SEGITIGA BERBAHAYA
Hubungan Rahasia antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat

Ditulis oleh TRITA PARSI

Diterjemahkan oleh IMAM SOPYAN

2018

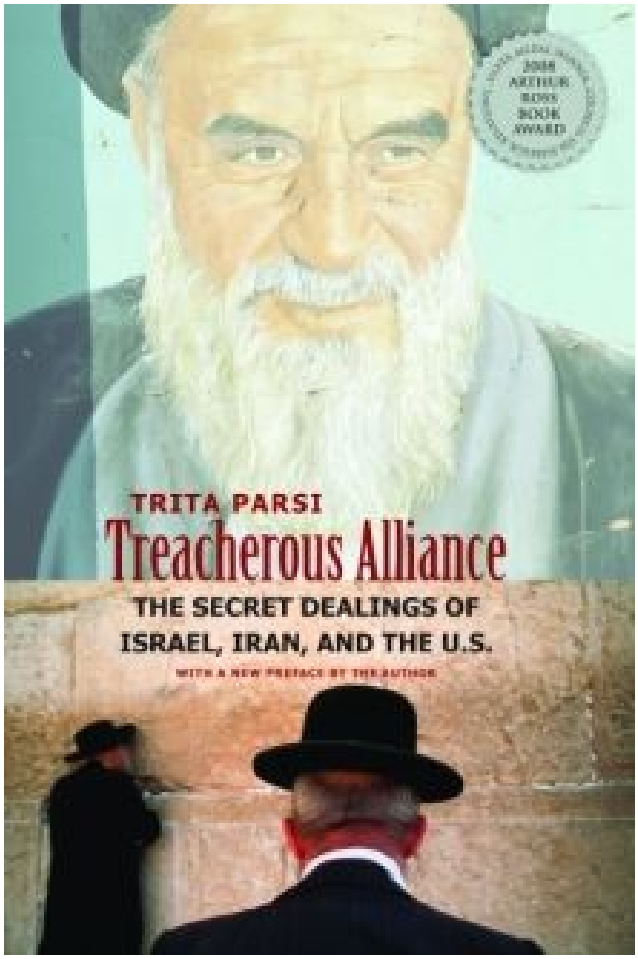

Untuk Amina
yang mampu tegak berdiri ketika hati ini berada pada titik terlemah

Dan untuk Darius, cinta abadiku
saya berharap mampu menjadi orang tua yang baik bagimu sebaik orang tuaku padaku

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
UCAPAN TERIMA KASIH

BAB 1
Pendahuluan: Seekor Gorila Delapan Ratus Pon

BAGIAN SATU: ERA PERANG DINGIN
BAB 2
Persekutuan Oportunis: Persahabatan Rahasia Shah
BAB 3
Bangkitnya Israel, Bangkitnya Iran
BAB 4
Pencarian Supremasi Iran
BAB 5
Menyambut Kematian dalam Momentum Kemenangan
BAB 6
Megalomania
BAB 7
Munculnya Begin and Kelompok Sayap Kanan Israeli
BAB 8
Masuklah Wahai Ayatollah!
BAB 9
Pergeseran Ideologis, Kesinambungan Geopolitik
BAB 10
Saddam Menyerang!
BAB 11
Skandal
BAB 12
Runtuhnya Doktrin Periperial

BAGIAN KEDUA: ERA UNIPOLAR
Bab 13
Tatanan Dunia Baru
Bab 14
Jual – Beli Musuh
Bab 15
Dari Perdamaian Dingin ke Perang Dingin
Bab 16
Bersama Partai Likud, Kembalinya Doktrin Periperial
Bab 17
Kebijakan Detente Khatami
Bab 18
Pengkhianatan di Afghanistan
Bab 19
Merebut Kekalahan dari Pintu Kemenangan

BAGIAN TIGA: PROYEKSI KE DEPAN
Bab 20
Menatap Masa Depan, Menghadapi Realita

CATATAN KAKI

LAMPIRAN
APPENDIKS A: PROPOSAL NEGOSIASI IRAN KEPADA AMERIKA SERIKAT, MEI 2003
APPENDIKS B: DRAFT ASLI PROPOSAL NEGOSIASI AMERIKA SERIKAT
APPENDIKS C: SURAT DARI DUTA BESAR GULDIMANN KEPADA DEPARTMEN LUAR NEGERI AS

KATA PENGANTAR

Hubungan antara Israel dan Iran masih menjadi misteri bagi sebagian besar ahli, meskipun hubungan keduanya berdampak signifikan terhadap situasi keamanan dunia Timur Tengah dan Amerika Serikat. Efek politis dari isu ini membuat sebagian besar pengamat Amerika Serikat menghindar untuk mengkaji isu ini lebih dalam. Hubungan renggang kedua negara—yang sebelumnya bersekutu—ini bahkan dinilai sebagai sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan ataupun sebagai efek dari konfrontasi ideologis kedua negara tersebut. Selama ini, dampak dari hubungan kedua negara ini terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat cenderung diabaikan—yang berpengaruh besar pada kepentingan-kepentingan AS. Sementara itu, sebagian besar publik percaya bahwa kunci terwujudnya perdamaian di Timur Tengah adalah penyelesaian konflik Israel-Palestina. Di sisi lain, publik sedikit sekali memberikan perhatian pada persaingan geopolitik antara Israel dan Iran yang berpengaruh signifikan terhadap konflik Israel-Palestina di atas maupun konflik regional lainnya.

Dalam mengkaji naik-turunya hubungan Israel-Iran serta hubungan segitiga keduanya dengan Amerika Serikat, saya memfokuskan diri pada aspek kekuatan-kekuatan dan perkembangan-perkembangan geopolitik daripada aspek ideologi, justifikasi politis sesaat, ataupun perspektif Manichean yang simplisistik. Argumentasi saya adalah bahwa transformasi besar yang terjadi pada hubungan Israel-Iran merupakan akibat dari pergeseran geopolitik yang terjadi—bukan ideologi, dan bahkan suatu resolusi atas rivalitas strategis kedua negara akan memfasilitasi resolusi konflik di wilayah lainnya daripada jalan keluar lainnya.

Konflik terkini antar kedua negara lebih berkaitan dengan pergeseran dan perimbangan kekuatan di Timur Tengah pasca Perang Dingin dan kekalahan Irak pada Perang Teluk I—daripada berkaitan dengan Revolusi Islam pada tahun 1979. Meskipun bagi Israel, Revolusi Iran merupakan suatu bentuk kemunduran, hal tersebut tidak membuat Negara Yahudi berhenti untuk mendukung Iran dan meningkatkan hubungan Israel dengan pemerintahan Khomeini sebagai bentuk perlawanan terhadap musuh-musuh Israel di negara Arab. Ironisnya, ketika para pemimpin Iran menyerukan penghancuran Israel pada tahun 1980, negara Israel dan lobi Yahudi di Washington membujuk Amerika Serikat untuk *mengabaikan* seruan tersebut. Meskipun semangat para Islamis revolusioner Iran berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada tahun 1980 tersebut, saat ini ada beberapa perubahan yang terjadi. Pemerintahan Iran telah menerapkan kebijakan ganda dalam dekade tersebut: pada 1980-an, Iran menjadi negara pendukung terdepan dalam isu Palestina.

Meskipun begitu, retorika Iran terkait isu Palestina ini jarang diikuti oleh kebijakan kongkrit disebabkan kepentingan strategis Teheran—menjaga hubungan baik dengan negara Israel dan memanfaatkan Negara Yahudi untuk membangun kembali hubungan Iran dengan Amerika Serikat—yang bertentangan dengan ideologi negara Iran itu sendiri. Pasca 1991 dan usaha Amerika Serikat dan Israel untuk menciptakan sebuah tatanan baru di Timur Tengah berdasarkan proses perdamaian Israel-Palestina dan kebijakan untuk memperpanjang isolasi Iran, ideologi dan strategi kepentingan negara Iran mengalami 'persaingan'. Untuk pertama kalinya Teheran berada pada garis terdepan dalam perlawanan terhadap Negara Yahudi. Dalam situasi seperti ini, baik Israel dan Iran telah menggunakan pengaruh mereka masing-masing untuk mengganggu kebijakan politik luar

negeri Amerika Serikat yang mereka anggap akan memberikan dampak positif bagi pihak lain. Iran cenderung resisten terhadap proses perdamaian Israel-Palestina karena khawatir proses perdamaian tersebut akan mengisolasi negara tersebut di wilayah Timur Tengah. Di sisi lain, Israel juga merintangi dialog AS-Iran karena Israel khawatir Washington akan mengganggu kepentingan keamanan Israel jika Amerika Serikat dan Iran memiliki hubungan langsung. Dua kecenderungan tersebut masih terjadi hingga saat ini dan menjadi memicu berbagai ketegangan di wilayah Timur Tengah.

Buku ini merupakan buku tentang kebijakan luar negeri. Saya memfokuskan diri pada hubungan ketiga negara ini bukan pada perkembangan internal dari ketiganya—meskipun penting—yang memiliki pengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali pada kebijakan luar negeri masing-masing negara. Saya juga tidak berusaha menyajikan penjelasan mendalam tentang ideologi yang dianut oleh masing-masing pemimpin dari kedua negara ini. Gagasan dan pandangan hidup dari masing-masing pihak dapat dinilai relevan ketika memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri Israel dan Iran. Namun, pendekatan ini tidak bermaksud untuk mengabaikan sepenuhnya eksistensi ideologi dari masing-masing negara ataupun mempertanyakan keyakinan mereka terhadap ideologi tersebut. Kenyataannya, baik pemimpin Israel maupun Iran memiliki keyakinan yang kuat terhadap ideologi dan pandangan hidup mereka. Apakah keyakinan mereka ini menjadi faktor utama dalam konteks hubungan antara Israel dan Iran tentu saja merupakan persoalan lain.

Disebabkan oleh sensititifitas politik dari persoalan ini, publikasi ilmiah mengenai hubungan Israel dan Iran serta dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dihitung dengan jari. Buku berbahasa Inggris yang mengkaji tentang hubungan Israel dan Iran diterbitkan hampir 20 tahun yang lalu. Analisis-analisis yang muncul tentang Iran dalam jangka waktu tersebut memiliki kelemahan karena tidak adanya akses para analis Barat terhadap sumber-sumber resmi dari negara Iran dan para pejabat Iran. Hal ini berakibat pada kajian-kajian yang sulit seperti hubungan Amerika Serikat, Iran dan Israel. Untuk mengatasi hal ini, saya telah melakukan wawancara mendalam terhadap 130 orang dari pihak Iran, Israel, dan Amerika Serikat baik dari unsur pejabat negara maupun para analis.

Wawancara langsung tatap muka dengan para pemegang kebijakan memungkinkan saya untuk mendeskripsikan kejadian dari para pelaku sejarah sekaligus menjelaskan dasar pemikiran yang melatarbelakangi keputusan-keputusan strategis mereka. Metode ini juga memungkinkan saya untuk melampaui berbagai pembicaraan dan justifikasi publik yang berkembang di Iran dan Israel untuk mengaburkan ketegangan yang terjadi antara kedua negara. Beberapa keterangan dan dasar pemikiran belum pernah dipublikasikan secara umum ke publik. Wawancara dengan pejabat Iran mampu mengungkapkan berbagai fakta yang sebelumnya jarang—jika memang pernah—diperbincangkan secara terbuka di Iran sebagai akibat dari kebijakan sensor media cetak khususnya dalam isu-isu mengenai Israel. Hal yang sama—pada tingkatan tertentu—juga terjadi di Isreal. Persoalannya mungkin tidak disebabkan oleh kebijakan sensor pemerintah, tetapi pemberitaan media yang cenderung mengekspos secara eksklusif persepsi terhadap ancaman militer Iran sekaligus mengabaikan kalkulasi strategis yang dipertimbangkan para pemegang kebijakan dari Israel dan Iran.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan narasumber, saya telah melakukan wawancara terhadap ratusan narasumber untuk mengkonfrontasi setiap

informasi saya peroleh. Setiap argumentasi dan informasi dalam buku ini tidak hanya didasarkan pada satu atau dua sumber saja. Metode *cross-reference* dan jumlah narasumber yang besar juga menjadi jaminan bahwa keterangan dalam buku ini merupakan refleksi dari kenyataan sebenarnya, meskipun untuk mengumpulkan kembali berbagai fakta yang telah terjadi 20 tahun yang lalu merupakan hal yang sulit.

Para narasumber dalam buku ini telah diseleksi berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam perumusan kebijakan luar negeri baik di Iran, Israel, ataupun Amerika Serikat, ataupun berdasarkan pengetahuan mereka terhadap proses perumusan kebijakan tersebut. Semua keterangan dalam buku ini berasal dari para pejabat dan analis ini kecuali dalam beberapa peristiwa. Meskipun jumlah narasumber ini terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu, beberapa narasumber layak untuk disebutkan atas akses mereka terhadap berbagai informasi yang sangat berharga dan sebelumnya cenderung ditutup-tutupi.

Berkaitan dengan kebijakan Iran terhadap Israel di bawah rezim Shah, Fereydoun Hoveyda, Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir dekade 1970-an. Alinaghi Alikhani, Menteri Perekonomian Iran—yang memiliki kedekatan hubungan dengan Assadollah Alam, Ketua Pengadilan Shah—yang telah memberikan masukan-masukan berharga mengenai pemikiran strategis Shah. Dalam konteks pembahasan mengenai periode revolusi Iran, saya berterimakasih kepada Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Dr. Javad Zarif, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dr. Abbas Maleki, Dr. Mahmoud Vaezi, dan Dr. Hadi Nejad-Hosseinian sebagai mantan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Iran, Mohsen Mirdamadi, Mohammad Reza Tajik sebagai mantan penasihat Presiden Mohammad Khatami, Amin Mohebian, editor politik koran *Resalat,* sebuah surat kabar konsevatif di Iran, dan Ali Reza Alavi Tabar sebagai editor beberapa surat kabar reformis. Mereka telah memberikan masukan yang tak ternilai harganya dalam pembahasan mengenai berbagai kalkulasi Republik Islam.

Mengenai sumber-sumber Israel, mantan Kepala Mossad, Efraim Halevi, telah memberikan informasi yang sangat berharga bagi buku ini, termasuk mantan Menteri Luar Negeri, Dr. Shlomo Ben-Ami, mantan Menteri Pertahanan, Moshe Arens, Wakil Menteri Pertahanan, Dr. Efraim Sneh, Direktur Intelijen Militer, Mayor Jenderal Amos Gilad, Mantan Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dr. Dore Gold, mantan Kepala Kementerian Pertahanan, David Kimche, mantan Perwakilan Israel untuk Iran, Uri Lubrani, mantan Atase Pertahanan untuk Iran, Yitzhak Segev, mantan Kepala Komite Israel untuk Iran, David Ivry, mantan Penasihat Perdana Menteri Yitzhak Rabin, Yossi Alpher, mantan Duta Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Itamar Rabinovich, dan penyandang dana kesepakatan Kontra-Iran, Yaacov Nimrodi. Sebagai sosok penting dalam *American Israel Public Affairs Committtee* (AIPAC), Keith Weissman juga telah memberikan masuka mengenai strategi lobi pro-Israel. Wawancara dan diskusi yang saya lakukan dengan Keith dilakukan sebelum dia dituduh terlibat dalam spionase dan meninggalkan organisasi tersebut).

Sumber-sumber mengenai Amerika Serikat saya peroleh dari Penasihat Keamanan Nasional (*National Security Advisors*), Dr. Zbigniew Brzezinski, Letnan Kolonel Robert McFarlane, Jenderal Brent Scrowcroft, dan Dr. Anthony Lake. Saya juga mendapatkan informasi dari Asisten Sekretaris Negara, Robert Pelletreau dan Martin Indyk; Kepala Staff Sekretariat Negara Colin Powell, Larry Wilkerson, Utusan Khusus pemerintahan Bush

untuk Afghanistan, Duta Besar James Dobbins, Duta Besar Dennis Ross, dan Dr. Gary Sick yang bertindak sebagai direktur ajudan Gedung Putih untuk urusan Teluk Persia pada tahun 1976 hingga 1981.

Para narasumber tersebut di atas telah terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara. Hasilnya, terungkaplah sebuah gambaran yang unik dan belum diketahui secara umum tentang sikap masing-masing negara satu sama lain. Perspektif Iran, khususnya, belum banyak diketahui oleh publik di Barat sehingga mengakibatkan lemahnya analisis tentang Iran di Barat. Yang menjadikan buku ini secara signifikan berbeda dari persepsi umum mengenai hubungan segitiga antara Amerika Serikat-Israel-Iran adalah bahwa buku ini didasarkan pada perspektif dan sumber-sumber yang berasal dari pemegang kebijakan tingkat tinggi dari masing-masing negara. Di samping itu, pada bab terakhir dalam buku, saya sebagai penasihat Anggota Kongres Amerika Serikat memiliki akses terhadap beberapa kesepakatan tersembunyi antara ketiga negara tersebut. Posisi tersebut memungkinkan saya untuk memperoleh sumber pertama dari beberapa perkembangan mutakhir yang dibahas dalam buku ini, yang telah saya simpulkan seakurat mungkin.

Buku ini membahas hubungan negara Israel dan Iran sejak pendirian Negara Yahudi pada tahun 1948 hingga saat ini, yang saya bagi ke dalam tiga bagian besar. Pertama, konteks historis hubungan segitiga Amerika Serikat-Israel-Iran pada masa Perang Dingin. Pembahasan tentang perjanjian yang terjadi antara Israel-Iran di bawah kepemimpinan Shah dan hubungan rahasia di bawah Republik Islam juga dibahas dalam bagian Pertama. Saya menganalisis kesepakatan perjanjian antara Israel-Iran, pengkhianatan Shah terhadap Israel melalui Perjanjian Aljazair tahun 1975, usaha-usaha Israel untuk memperbaiki hubungan Amerika Serikat-Iran pada dekade 1980-an, dan kebijakan ganda Iran menghadapi Israel—yaitu pada satu sisi menolak hak negara Israel untuk berdiri dan pada sisi lain menerima dukungan Israel sekaligus berbasa-basi kepada warga Palestina.

Bagian kedua dari buku ini menunjukan bagaimana pergeseran geopolitik yang disebabkan oleh runtuhnya Uni Soviet dan kekalahan Irak pada Perang Teluk tahun 1991 secara dramatis telah merubah cara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam berhubungan satu sama lain. Pasca pergeseran geopolitik ini, dalam konteks tatanan dunia Timur Tengah yang baru, Israel dan Iran memandang satu sama lain tidak lagi sebagai mitra keamanan yang potensial, tetapi sebagai musuh dalam konteks perimbangan kekuatan politik di Timur Tengah. Pada bagian kedua ini saya mendiskusikan transisi yang terjadi di Iran sehingga menjadi rival Israel dan perubahan drastis Tel Aviv yang memilih untuk menjadi lawan daripada pendukung atas proses saling-mendekat antara Amerika Serikat dan Iran. Saya juga membahas usaha-usaha yang dilakukan Israel dan Iran untuk menggangu berbagai kebijakan Amerika Serikat di beberapa wilayah yang mereka anggap akan menguntungkan pihak lain. Pada bagian terakhir buku ini saya mendiskusikan beberapa pilihan yang sedang dipertimbangkan Washington, termasuk satu kebijakan administratif Bush yang tampaknya segan untuk dilakukan namun memiliki potensi besar untuk menjinakkan konflik antara Israel dan Iran sekaligus mengurangi risiko dari efek buruk sebuah perang yang akan melanda dunia Timur Tengah—juga Amerika—selama beberapa dekade mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tidak ada ruang yang cukup bagi saya untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan buku ini. Saya tidak bisa menyebutkan orang-orang tersebut satu per satu di sini. Saya akan terus berhutang budi pada Francis Fukuyama, pembimbing saya di *Johns Hopkins University School of Advanced International Studies* (SAIS) dalam penulisan buku ini yang berasal dari disertasi saya sendiri. Bimbingan, kritik, dan pendampingan beliau sangat berharga, dan semua hal ini melampaui nasihat-nasihat khusus yang beliau berikan terhadap disertasi saya dan buku ini. Beliau merupakan salah satu pemikir politik kontemporer paling penting abad ini. Saya cukup beruntung memiliki kesempatan mendapat bimbingan beliau.

Saya juga berterimakasih kepada Charles Doran yang juga telah berjasa membantu penulisan buku ini juga analisis-analisis yang terdapat di dalamnya. Teori *cycle power*-nya merupakan fondasi utama berbagai analisis dalam buku ini. Dengan menggunakan teori ini, saya mengkombinasikan proses saling mempengaruhi antara siklus alami dari kekuatan negara dengan *hasrat-berperan* dari masing-masing negara. Dalam konteks hubungan Israel-Iran, menganalisa *hasrat-berperan* dari negara Iran sangat penting untuk memahami sikap Iran terhadap Israel—baik sebelum atau sesudah peristiwa Revolusi Iran 1979. Nasihat dan kritik berbobot dari Zbigniew Brzezinski dan Jakub Grygiel sangat membantu, dan tentu saja saya akan terus berhutang budi pada dekan studi kebijakan luar negeri Iran, Ruhi Ramazani. Saya sangat beruntung dan merasa terhormat berkesempatan memperoleh nasihat dan bimbingannya. Saya berharap mampu melanjutkan studi saya tentang hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Iran dalam tradisi studi yang telah dibangun oleh beliau sekaligus mempertahankan standar yang telah dibuatnya.

Roaney Carey telah memberikan masukan dan saran berharga untuk buku ini. Saya sangat berterima kasih atas hal ini. Agen saya, Deborah Grosvenor, juga telah membantu menyempurnakan edisi awal buku ini sehingga layak-jual. Saya juga berterimakasih kepada Clayton Swisher atas dukungan dan bantuannya sehingga saya memiliki koneksi dengan berbagai pihak. Saya juga berhutang budi kepada Prof. David Menashri, Kolonel Shmuel Limone dari Kementerian Pertahanan Israel, dan Prof. Elliot Cohen yang telah membantu saya melakukan serangkaian wawancara di Israel. Buku ini dibangun di atas fondasi intelektual yang telah dibangun oleh Prof. Menashri dalam kajian hubungan Israel-Iran beberapa dekade sebelumnya.

Saya juga berterima kasih kepada Duta Besar Javad Zarif, Dr. Mustafa Zahrani, dan Afshin Molavi yang telah membantu saya melakukan serangkaian wawancara di Iran. Saya juga berterimakasih kepada *Johns Hopkins University School of Advanced International Studies* (SAIS) yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan investigasi-mendalam tentang topik kajian ini, juga kepada George Perkovich pada *Carnegie Endowment for International Peace* (CEIP) yang telah memfasilitasi saya dengan sebuah ruang kerja khusus untuk menulis buku ini selama musim panas tahun 2006. Chris Rogers dari Penerbit Universitas Yale dan Prof. Nikki Keddie telah memberikan bantuan yang tak ternilai ketika menyempurnakan edisi awal buku ini menjadi naskah yang dapat diterima.

Di atas semua pihak ini, saya harus mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya; istri saya, Amina, yang tanpa cinta, persahabatan, dan kesabaran yang tak terbatasnya saya tidak akan mampu menyelesaikan buku ini; anak saya, Darius, kebanggaan hidup

saya; saudara saya, Rouzbeh yang hasratnya dalam mencari kebenaran telah menginspirasi saya; orang tua saya yang tanpa mereka, segalanya menjadi tidak mungkin. Saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada mereka.

Pengantar Penerjemah dan Ucapan Terimakasih

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan hasil dari penelitan disertasi penulis—Trita Parsi—di *School of Advanced International Studies* (SAIS) Universitas John Hopkins, Amerika Serikat, di bawah bimbingan Prof. Francis Fukuyama—seorang pakar studi hubungan internasional, salah satu bukunya yang terkenal dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *The End of History*. Dalam sebuah wawancara ekslusif dengan penulis khusus tentang buku ini, Trita Parsi menyatakan bahwa beliau ingin melakukan penelitian tentang sejauh mana ideologi sebuah negara mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut, dan, Trita Parsi melanjutkan, Israel dan Iran adalah dua contoh terbaik dalam topik penelitian ini—Israel sebagai negara berideologi Yahudi dan Iran sebagai negara yang menggunakan ajaran-ajaran Syiah sebagai fondasi resmi ideologi negaranya. Di sisi lain, sebagai penasihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, Trita Parsi juga ingin mengungkap sejauh mana pasang-surut hubungan Israel dengan Iran telah mempengaruhi sebagian besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.

Dengan dua tujuan utama di atas, buku ini kemudian berisi perjalanan hubungan segitiga antara ketiga negara selama lebih dari 60 tahun ke belakang pasca berakhirnya Perang Dunia II—era Perang Dingin hingga era Unipolar, yaitu pasca keruntuhan negara adidaya Uni Soviet sebagai rival Amerika Serikat dalam era Perang Dingin. Dari sisi Israel, buku ini membahas manuver kebijakan luar negeri sejak era Perdana Menteri David Ben Gurion (1948), Golda Meir (1969), Menachem Begin (1977), Yitzhak Shamir (1983), Shimon Peres (1984), Yitzhak Rabin (1992), Benjamin Netanyahu (1996), Ehud Olmert (1999), hingga Ariel Sharon (2005), sementara dari sisi Iran; sejak masa rezim Dinasti Shah Pahlavi (1941-1979), kepemimpinan Revolusi Iran Khomeini/Ali Khamenei (1981), Ali Akbar Hashem Rafsanjani (1989), Mohammad Khatami (1997), hingga Mahmoud Ahmadinejad (2005), dan dari sisi pemerintahan Amerika Serikat; Richard Nixon (1974), Gerald Ford (1977), Jimmy Carter (1981), Ronald Reagan (1989), Geroge H.W. Bush (1993), Bill Clinton (2001), dan George W. Bush (2009). Derajat permusuhan dan persahabatan ketiga negara ini selalu mengalami pasang surut sesuai dengan kecenderungan politik masing-masing rezim yang berkuasa. Tetapi yang pasti, dalam kenyataan sejarahnya, sebagian besar huru-hara politik, ekonomi, dan militer di Timur Tengah merupakan akibat, baik langsung ataupun tidak, dari pasang surut hubungan ketiga negara ini.

Dengan akses terhadap dokumen-dokumen rahasia-negara-tingkat-tinggi di masing-masing negara dan wawancara terhadap tidak kurang dari 130 pejabat tinggi negara dari masing-masing negara—sebagai saksi dan pelaku sejarah—buku ini memberikan informasi yang berharga untuk memperbaiki pandangan kita, khususnya umat Islam di Indonesia, tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Timur Tengah selama lebih dari setengan abad ke belakang. Ketergantungan pragmatis Iran pada Israel—yang mampu memberikan Iran akses terhadap persenjataan produk Amerika dan perbaikan hubungan diplomatik—misalnya, membuat kita sebagai umat Islam di Indonesia tidak bisa percaya terhadap keseriusan Iran dalam isu pembebasan wilayah Baitul Maqdis yang dihuni oleh warga Palestina. Kampanye dan propaganda media pemerintahan Iran, yang mulai massif digunakan sejak pemerintahan Revolusi Iran, yang secara konsisten mengecam Israel atas tindakannya terhadap warga Palestina di wilayah Baitul Maqdis—buku ini menegaskan—

tidak akan pernah bertransformasi menjadi kebijakan kongkrit apapun, misalnya mengirim bantuan militer kepada kelompok pejuang di Palestina. Sebab sebagaimana diyakini oleh Israel sendiri, Iran tidak akan pernah berani menyerang Negara Yahudi ini secara militer. Buku ini mencatat keterangan dari salah satu pejabat Iran bahwa negara ini memiliki dua jenis kebijakan luar negeri mengenai isu wilayah Baitul Maqdis yang dihuni warga Palestina, yaitu *kebijakan retorika* dan *kebijakan praktikal.* Dalam *kebijakan retorika,* Iran akan mengecam sekeras mungkin setiap tindakan Israel di wilayah Baitul Maqdis, tetapi dalam *kebijakan praktikal,* Iran akan tetap menjaga hubungan pragmatisnya dengan Negara Yahudi.

Bagi Israel sendiri, Iran merupakan sekutu alami bagi Negara Yahudi, misalnya, sebagai negara yang sama-sama non-Arab di Timur Tengah dan sebagai konsekwensi logis dari sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang dikenal dengan istilah "doktrin periperial"—yang pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion. Doktrin ini—"periperial" artinya "wilayah pinggiran"—mengungkapkan persepsi Negara Yahudi tentang ketidakmampuannya membangun hubungan damai dengan negara-negara di lingkaran-dalam Arab-Timur Tengah yang mendorongnya untuk membangun aliansi dengan negara-negara di pinggiran wilayah Timur Tengah, yaitu, Iran di sisi Timur, Ethiopia di sisi selatan, dan Turki di sisi utara. Di sisi lain, sebagai negara yang berpopulasi warga Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Israel sendiri, Iran merupakan negara yang sangat kecil kemungkinanya untuk mendapatkan serangan militer-nuklir dari Israel. Dan dengan kemunculan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya pasca runtuhnya Uni Soviet, hubungan Iran-Israel menjadi semakin erat sekaligus rumit, sebab kedekatan salah satu negara terhadap negara adidaya ini cenderung akan mengorbankan kepentingan negara lainnya. Misalnya, ketika Iran diisukan sedang mengembangkan teknologi nuklir dan dukungannya terhadap kelompok Hezbollah di Lebanon meningkat, Israel merasa terancam sehingga kelompok lobi pro-Yahudi di Amerika, mendorong pemerintahan di Negeri Paman Sam untuk menjatuhkan sanksi isolasi terhadap Iran—buku ini juga mengungkap peran sebuah lembaga pro-Yahudi di Amerika yang "lebih pro-Israel dibandingkan pemerintahan Israel sendiri".

Alhasil, terhadap pertanyaan sejauh mana ideologi Syiah Iran dan ideologi Yahudi Israel mempengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara telah terjawab; bahwa kepentingan geopolitik-lah, *bukan ideologi*, yang justru menjadi fondasi dan orientasi kebijakan luar negeri kedua negara ini. Lalu, sebagai seorang konsultan kebijakan luar negeri Amerika, Tritas Parsi menyarankan sebuah pendekatan "integrasi regional dan keamanan kolektif", yang terutama menekankan inklusi peran Iran dalam proses pembangunan tatanan dunia baru di Timur Tengah. Dalam konteks ini, sikap oposisi, dalam beberapa hal "oposisi retorika" Iran terhadap Amerika, misalnya, dapat dipahami sebagai respon terhadap kebijakan isolasi Amerika terhadap Iran, bukan semata-mata permusuhan ideologis Iran terhadap ideologi kapitalisme Amerika—sebab pada kenyatannya, dalam konteks dunia unipolar, Iran tetap bergantung pada Amerika untuk menjadi kekuatan regional di Timur Tengah, baik restu-diplomatik, suplai senjata, maupun hubungan perdagangan, terutama minyak, dan barang lainnya.

Dengan demikian, hubungan Israel, Iran, dan Amerika Serikat adalah sebuah keniscayaan yang didikte hukum-besi geopolitik dan kepentingan nasional masing-masing negara; Israel membutuhkan Iran sebagai sesama negara 'terasing-non-Arab' di tengah-tengah negara Arab di wilayah Timur Tengah yang sama-sama memiliki kecenderungan

konfrontatif dengan negara Arab; Iran membutuhkan Israel untuk mendapatkan akses diplomatik dan suplai persenjataan dari Amerika Serikat; dan Amerika Serikat berkepentingan atas relasi kedua negara ini—sebagai kekuatan regional di Timur Tengah—untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat itu sendiri di Timur Tengah.

Sekali lagi, bagi kita sebagai umat Islam di akhir zaman, kepentingan kita terhadap relasi ketiga negara ini adalah eksistensi wilayah Baitul Maqdis sebagai tempat suci ketiga dalam ajaran Islam yang dinubuatkan Rasulullah SAW akan menjadi pusat perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Dengan berbagai fakta sejarah yang disajikan buku ini, tentu saja kita harus semakin paham dan yakin bahwa perjuangan pembebasan Baitul Maqdis—yang saat ini masih dikangkangi oleh hubungan segitiga negara ini—tidak bisa kita sandarkan kepada metode-metode dan pendekatan-pendekatan selain dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW sendiri, sekaligus kita tidak lagi terbuai dengan propaganda media dari Iran yang seolah-olah memberikan pemihakan dan pembelaan kepada saudara kita warga Palestina yang tinggal di Baitul Maqdis, padahal retorika tersebut hanya sebuah *basa-basi politik* untuk mendapatkan simpati umat Islam di seluruh dunia. Sebab kepentingan Iran, sejak era Shah Pahlavi, Khomeini hingga Ahmadinejad, bukan itu—*kebebasan Baitul Maqdis*—tetapi supremasi negaranya di regional Timur Tengah, yang mendorong negara ini—secara konsisten dan konstan—untuk tetap menjaga hubungan baik, bahkan memberikan layanan terbaik, kepada "Setan Besar" dan "Amerika Kecil". *Allaahu a'lam*.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ust. Farid Achmad Okbah dan Ust. Tiar Anwar Bachtiar atas kesempatan berharga ini. Semoga ikhtiar ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Saya juga menghaturkan terimakasih kepada istri, Endah Ihsaniah, dan anak-anak, Fatiya dan Farshad, yang telah memberikan dukungan selama proses penerjemahan ini. *Alhamdulillaahirabbil'aalamiin.*

Jatiasih, Bekasi, 22 Dzulqa'dah 1439/5 Agustus 2018

1-Pengantar: Seekor Gorila Delapan-Ratus Pon

Presiden Iran adalah Hitler versi Bangsa Persia
—Wakil Perdana Menteri Israel, Shimon Peres,
Ketika mengomentari Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad

[Israel dan Amerika Serikat harus membangun] hubungan strategis yang lebih luas dengan Iran.
—Pernyataan Perdana Menteri Shimon Peres kepada Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, September 1986

"Rezim yang menduduki al Quds (Yerusalem) harus dihapuskan dalam halaman sejarah."[1] Melalui kata-kata tersebut, yang disampaikan dalam sebuah konferensi tertutup di kota Teheran pada Oktober 2005, Mahmoud Ahmadinejad—Presiden Iran garis-keras—telah memanaskan rivalitas Iran dengan Israel hingga titik didihnya yang sudah berlangsung selama lebih dari 15 tahun. Oleh karena selalu dianggap sebagai konflik pinggiran, ketegangan Israel-Iran seringkali diabaikan oleh pemegang kebijakan di Washington. Mereka cenderung fokus pada konflik Israel-Palestina atau pada hasrat Saddam Hussein—Presiden Irak—untuk melakukan pendudukan wilayah. Kecenderungan ini menyebabkan Washington gagal menangkap kenyataan bahwa rivalitas geopolitik antara Israel dan Iran—sejak berakhirnya Perang Dingin—telah melatarbelakangi berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah sekaligus memberikan konteks bagi seluruh persoalan di regional. Cepat atau lambat, politisi yang rabun mata sekalipun akan menyaksikan seekor gorila dengan berat delapan ratus pon berada dalam ruangan. Dengan menghidupkan kembali semangat anti-Israel dari Ayatollah Rohullah Khomeini dari keranjang sampah sejarah, Ahmadinejad telah membuat rivalitas kedua negara ini lebih cepat mencapai titik didihnya.

Meskipun dunia internasional telah mengalihkan perhatiannya pada kebuntuan hubungan Israel-Iran, substansi konflik kedua negara ini masih disalahpahami secara luas. Sebagian besar warga Amerika masih beranggapan bahwa sikap Ahmadinejad yang mempersoalkan kebenaran sejarah dari peristiwa Holocaust dan penghinaan Israel yang menyatakan bahwa Iran adalah Jerman-Nazi di era modern merefleksikan adanya benturan fundamental-ideologis antara kedua negara ini. Pada satu sisi, Israel dicitrakan oleh para pembelanya sebagai negara demokratis—yang dikelilingi oleh negara-negara otoriter—dan sebagai model ideal dari bentuk rasionalisme-tercerahkan dari Timur. Di sisi lain, Republik Islam Iran digambarkan oleh musuh-musuhnya sebagai rezim mullah yang picik. Sikap Iran yang anti-Barat dan seruan mereka kepada seluruh dunia Islam disimbolkan dengan penolakannya terhadap keberadaan negara Israel. Para ideolog ini telah memunculkan pertempuran yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan ataupun gencatan senjata—hanya kemenangan dari satu pihak dan satu sistem nilai di atas pihak lainnya. Atau begitulah nampaknya. Terkecoh dengan retorika-saling mengutuk dari masing-masing pihak, sebagian besar pengamat kemudian gagal menangkap suatu kepentingan bersama yang dimiliki kedua negara non-Arab di Timur Tengah ini, yaitu

[1]

kebutuhan untuk mencitrakan konflik fundamental-strategis ini sebagai sebuah benturan ideologis.

Pasca Perang Dingin dan kekalahan Irak pada Perang Teluk Persia tahun 1991, pertimbangan strategis yang telah membuat Iran dan Israel berada pada kepentingan geopolitik yang sama pada akhir abad ke 20 mulai diabaikan. Segera setelah keduanya sadar tidak memiliki musuh lagi, Israel dan Iran kemudian memposisikan diri dalam sebuah relasi konflik untuk meredefinisi situasi regional pasca melemahnya kekuatan militer Irak. Didorong oleh rasa takut akan lemahnya pertahanan strategis Israel jika Iran muncul sebagai kekuatan tak terkalahkan di Timur Tengah, para politisi Israel mulai mencitrakan rezim yang sedang berkuasa di Teheran sebagai rezim yang fanatik dan irasional. Mereka menegaskan bahwa berhubungan baik dengan "mullah-gila" seperti ini merupakan bentuk kegagalan. Para politisi Israel ini bahkan mengajak Amerika Serikat untuk mengkategorikan Iran, bersama Presiden Irak Saddam Hussein, sebagai sebuah negara bandit yang perlu dibendung. Perubahan sikap Israel terhadap Iran awalnya bersamaan dengan skeptisme Washington, meskipun kemudian Israel mengembangkan argumentasinya sebagaimana yang mereka lakukaan saat ini. Mereka berpendapat bahwa program nuklir Iran akan segera memberikan akses kepada "mullah-bersorban-hitam" untuk melakukan pengeboman. Clyde Haberman menulis dalam surat kabar *New York Times* pada November 1992,"Mengapa Israel begitu lama menunggu untuk membunyikan alarm keras kepada Iran, merupakan hal yang membingungkan." Haberman kemudian sampai pada sebuah kesimpulan bahwa, "Selama beberapa tahun, Israel masih berminat untuk menjalin hubungan dengan Iran, meskipun para mullah di Teheran terus berteriak untuk menghapuskan keberaadan Zionis."[2]

Bagi Israel, kesuksesan mengumpulkan negara-negara Barat berada pada pihak mereka merupakan pencapaian terbaik. Mereka mengarahkan perhatian pada kecenderungan destruktif para mullah dan ambisi Iran yang membabi-buta dengan ide penghancuran Israel. Jika kepemimpinan Iran dianggap tidak rasional, taktik konvensional seperti sikap penolakan tidak mungkin diambil, yang membuat komunitas internasional tidak punya pilihan lain kecuali tidak memberikan toleransi bagi kemampuan militer Iran itu sendiri. Bagaimana mungkin negara seperti Iran dapat dipercaya dengan teknologi rudal jika kepemimpinan di negara tersebut cenderung kebal dari larangan negara-negara Barat yang juga memiliki teknologi yang sama—demikian salah satu opini muncul. Strategi Israel ditujukan untuk meyakinkan dunia—khususnya Washington—bahwa konflik Israel-Iran bukanlah konflik keunggulan kekuatan militer yang terjadi di sebuah wilayah yang kacau dan tidak memiliki hierarki kekuasaan (*pecking order*) yang jelas**.** Israel justru membingkai konflik ini sebagai konflik antara satu negara demokratis di Timur Tengah dengan satu negara totaliter-teokratis yang membenci apapun yang dibela Barat. Dalam menghadapi situasi ini, Israel berargumentasi bahwa kesetiaan negara-negara Barat kepada Israel tidak lagi merupakan sebuah pilihan tetapi sudah menjadi sebuah kepentingan politik dan bentuk pertahanan diri atau setidaknya sebagai usaha untuk mempertahankan kebaikan melawan kejahatan.

Argumentasi para "mullah-gila" segera menemui jalan buntu. Setelah semua upaya ditempuh, Iran sendiri yang menjadi pihak terdepan dalam menawarkan argumentasi tersebut kepada Washington. Sebab Iran juga lebih menyukai bingkai ideologis dalam

[2]

konfliknya dengan Israel. Ketika Revolusi 1979 terjadi di Iran, kepemimpinan Islam yang baru mengabaikan identitas nasionalisme-Persia yang dibawa Shah Iran—yang saat itu berhasil dilengserkan, Mohammad Reza Pahlevi, tapi kepemimpinan Islam yang baru tidak melupakan ambisi untuk mempertahankan status Iran sebagai kekuatan terbesar. Sementara Shah melakukan pencarian legitimasi kekuasaan di wilayah Teluk Persia dan beberapa bagian dari wilayah Samudera Hindia—sambil berusaha untuk menjadikan Iran sebagai Jepang-nya Asia Barat—pemerintah Khomeini juga mencoba merebut legitimasi kepemimpinan di seluruh dunia Islam. Strategi Shah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan kekuatan militer dan hubungan erat dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Khomeini mengandalkan citra politik Islam dan semangat ideologis untuk mengatasi konflik Arab-Iran sekaligus melemahkan pemerintahan negara-negara Arab yang bersebrangan ambisinya dengan Iran. Tetapi ketika tujuan ideologis dan strategis Iran terancam maka strategi imperatif berlaku, sehingga pada dekade 1980-an, ketika Iran terlibat dalam perang berdarah dengan Saddam Hussein, mereka secara hati-hati tidak melanjutkan caciannya kepada aIsrael dengan aksi-aksi kongkrit. Meskipun aspek ideologi berperan penting dalam masa-masa awal Revolusi, kebijakan Iran terhadap Israel hanya bisa 'menggonggong' dan tidak pernah sampai 'menggigit'. Ideologi rezim pasca Revolusi 1979 dan strategi retorika-pedas telah mampu menutupi sebuah usaha konsisten untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik praktis secara sukses—daripada kepentingan-kepentingan ideologis.

Pasca Perang Dingin, kebijakan ganda ini semakin penting untuk diambil karena Israel telah menjadi mitra yang diperlukan Iran untuk mempertahankan diri dari lawan-lawan agresifnya—yang telah mengganggu pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah. Namun Iran tidak mungkin mengkonsolidasikan massa di Timur Tengah untuk berada di pihak Iran demi mewujudkan ambisi kekuatan Iran sendiri. Iran kemudian kembali bersandar pada aspek ideologi untuk menyembunyikan motif mereka sebenarnya, sambil memanfaatkan isu Palestina untuk merusak cintra negara-negara Arab lainnya yang mendukung Perjanjian Oslo 1990. Tim penulis naskah pidato Iran menjadi otak perlawanan-retoris Iran terhadap Israel "yang tidak akan pernah kenyang mencaplok tanah Arab", juga terhadap penindasan Israel pada warga Palestina, penolakan Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, dan pendudukan berkepanjangan Israel terhadap kota Yerusalem, situs *Haram al Syarif,* atau masjid kubah emas (*dome of the rock*), tempat suci ketiga dalam ajaran Islam—yang merupakan bentuk penistaan Israel terhadap Islam. Hingga saat ini, para pemimpin Teheran menegaskan bahwa perjuangannya melawan Israel tidak berkaitan dengan kepentingan geopolitik atau bahkan bagi Iran sendiri—tetapi lebih ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi warga Palestina dan kemuliaan Islam. Dalam situasi konflik Palestina-Israel seperti ini dan kekhawatiran atas respon warga negaranya sendiri, para penguasa Arab pro-Barat harus melangkah secara hati-hati tanpa meremehkan tujuan yang telah diumumkan Teheran. Bagi sebagian negara Arab, kekuatan retorika Iran telah membuat oposisi publik terhadap Iran sebanding dengan persetujuan atau bahkan dukungan dari Israel dan Amerika Serikat dalam isu Palestina. Misalnya, pernyataan anti-Iran dari Raja Yordania pada akhir 2004 tentang "bulan sabit Syiah" yang membentang dari Iran melalui Irak pasca-Saddam Hussein hingga Lebanon, ataupun tuduhan Presiden Mesir Husni Mubarak yang mengatakan bahwa Syiah di Irak merupakan loyalis Iran direspon biasa saja oleh publik Arab. Hal ini disebabkan oleh kuatnya citra Teheran sebagai pihak yang pro-Palestina.

Pernyataan-pernyataan ideologis yang disampaikan Ahmadinejad dan dan tokoh Iran lainnya merupakan sebuah akibat—bukan sebab—dari orientasi strategi Iran. Demikian juga dengan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert yang menyatakan bahwa Iran merupakan "kumpulan badai gelap yang bayangannya menutupi belahan bumi" dalam sebuah pidato Kongres 24 Mei 2006—yang tidak harus disikapi secara serius. Untuk saat ini, baik Iran dan Israel nampaknya mempertimbangkan-atau salah mempertimbangkan—bahwa sikap menampakan perjuangan ideologis dan destruktif mereka akan membuat mereka tersingkir dalam persaingan untuk menentukan situasi yang menguntungkan mereka di wilayah Timur Tengah. Akan tetapi bahaya dari permainan beresiko ini adalah ketika kedua belah pihak sudah mencapai batas-batas toleransi dan mendorong pihak lain untuk ikut terlibat. Israel telah mengeluarkan ancaman untuk mengebom Iran. Bush juga telah melakukan hal yang sama, dengan menegaskan bahwa opsi tindakan militer terhadap Iran masih tetap dipertimbangkan. Menurut beberapa berita, Washington sudah menyadari perlunya menggunakan senjata nuklir untuk melawan Iran.[3] Dan Teheran terus mencibir Israel sebagai negara-palsu yang tidak memiliki legitimasi sekaligus masa depan di Timur Tengah. Mereka lupa bahwa ancaman, slogan-slogan, dan retorika-retorika itu tidak sekedar dilatari oleh realitas politis maupun strategis tetapi juga menunjukan sebuah realitas kemanusiaan dan hubungan yang panjang antara bangsa Iran dan Israel.

***

Hanya ada beberapa kota di Barat yang sejumlah pusat perbelanjaannya memutar musik pop Persia dengan volume tinggi. Namun musik pop Persia ini biasa diperdengarkan di terminal bus di pusat kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, sama halnya dengan *New York's Penn Station*, anggota militer Israel berusia 18 tahun sedang menunggu kendaraan kepulangannya, senjata api menggantung di bahunya, dan lagu pop Persia Moin dan Ebi menggema di telinganya. Mayoritas toko kaset di kota Yerusalem dimiliki oleh Yahudi-Iran, dan mereka telah membangun pangsa pasarnya sendiri bagi musik Pop Iran selama lebih dari 20 tahun di jantung Negara Yahudi. Ketika seseorang mampu memahami lebih dalam konflik sengit antara Israel-Iran, sebuah kesamaan antara kedua budaya ini akan mulai nampak. Dalam berbagai hal, kedua negara justru lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Sebagian orang Iran memiliki persepsi bahwa bangsa Arab yang ada di wilayah barat dan selatan Iran adalah bangsa inferior secara kultural; sebagai bangsa yang brutal yang beruntung memiliki tetangga seperti Iran yang mampu menjadikan mereka berperadaban dan memperbaiki kehidupan mereka. Sama halnya dengan Iran, karena mampu mengalahkan negara Arab dalam beberapa peperangan, warga Israel juga memiliki rasa hormat yang kecil terhadap negara Arab. "Kami tahu bahwa Arab bisa melakukannya, tapi apa yang bisa mereka lakukan itu tidak banyak," seorang pakar dari Israel mengatakan hal itu pada saya secara arogan, beberapa bulan sebelum perang dengan Hizbullah pada 2006 mungkin berhasil menyadarkan pakar tersebut. Karena gagal menyembunyikan superioritas mereka ataupun gagal meyakinkan bangsa Arab untuk menghilangkan sikap stereotif mereka terhadap bangsa Persia dan Yahudi, akhirnya Israel sampai pada kesimpulan bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Israel telah berputus asa untuk hidup damai dengan tetangga mereka, baik melalui ikatan persahabatan maupun sikap saling mengakui dan menerima. Pandangan bahwa "Tidak ada

[3]

peperangan, Tidak ada perdamaian" telah menjadi prinsip dasar anggota militer Israel. Bangsa Iran juga memiliki sikap yang sama sejak beberapa abad sebelumnya. "Bangsa Arab tidak dapat mengalahkan kami", warga Israel dan Iran seringkali berpikir ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Barangkali yang paling penting adalah bahwa kedua negara tersebut memandang diri mereka sendiri tidak memiliki keterkaitan dengan regional (Timur Tengah, *pen.*) baik secara kultural dan politik sehingga mereka terpaksa untuk menghadapi musuh-musuh mereka—dengan pola pikir Manichean. Secara etnis, Yahudi-Israel dikelilingi laut Arab yang bisa saja tidak akan selalu menimbulkan peperangan dengan Israel, juga tidak akan selalu berdamai dengan Israel. Secara kultural, Yahudi Ashkenazi yang berasal dari Eropa Timur mendominasi populasi negara Israel, meskipun keberadaan Yahudi Oriental atau Mizrahi mulai muncul beberapa tahun terakhir. Dari aspek keagamaan, tentu saja negara Israel merupakan negara yang unik, baik di tingkat regional maupun global. Mereka adalah satu-satunya negara di dunia dengan fondasi keyakinan Yahudi. Sebagai respon alami terhadap sejarah panjang persekusi terhadap mereka, warga Yahudi barangkali cenderung tidak percaya terhadap dunia luar. Berdasarkan pola pikir seperti ini, berbagai lembaga internasional dan aliansi global tidak akan pernah mampu menggantikan negara Israel sendiri dalam melindungi warga Yahudi. Pada akhirnya, sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB juga tidak akan pernah mampu melindungi Israel begitu juga dengan dua ratus hulu ledak nuklir. Demikian keyakinan warga Israel. Seorang jenderal Israel menyampaikan kepada saya bahwa nuklir adalah senjata untuk mewujudkan perdamaian. Jenderal tersebut gagal menemukan kontradiksi dalam pernyataannya sendiri.

Begitu juga dengan Iran. Dengan kebanggaan terhadap peradaban yang sudah ada sejak dua abad sebelum Islam datang, mereka merupakan pihak pertama yang menyatakan diri pada Barat bahwa mereka bukan bangsa Arab. Iran, atau Tanah Bangsa Arya, sebagaimana diyakini secara umum, merupakan wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang berbahasa Indo-Eropa. Bahasa Persia (Farsi) secara linguistik lebih dekat dengan Bahasa Prancis dan Swedia dari pada Bahasa Arab, meskipun Bahasa Persia mengandung beberapa kosa kata Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf Arab. Meskipun wilayah Iran telah mengalami Islamisasi pada abad ke 7 M, bangsa Persia tetap menggunakan bahasa, tradisi, dan beberapa aspek yang hingga saat ini memiliki kaitan dengan ajaran Zoroaster. Perayaan Tahun Baru Iran, *Nowruz* (Hari Baru), selalu diperingati di Iran sejak 300 tahun yang lalu dan masih menjadi hari libur terbesar di Iran hingga saat ini. Perayaannya jauh lebih meriah dari perayaan hari raya Islam manapun—di Iran. Ketika hari Asyura—peringatan terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali pada tahun 680 M di Karbala—dirayakan bersamaan dengan *Nowruz,* jiwa Zoroastrian dari warga Iran mampu mengalahkan aturan-aturan dari para tokoh agama di Iran.

Bahkan sebagai seorang muslim, warga Iran cenderung membedakan dirinya dengan umat Islam di sekelilingnya dengan menganut ajaran Syiah daripada Sunni yang menjadi pemahaman mayoritas. Dan sebagaimana Israel, Iran cenderung menaruh curiga terhadap dunia luar. Sementara Israel mengalami persekusi dan Holocaust, Iran harus berjuang melawan penjajahan, pendudukan, intervensi asing, dan perang dengan Saddam Hussein selama 8 tahun—semua pihak termasuk Amerika Serikat berada di pihak Irak dalam perang ini. Ketika Saddam Hussein melakukan invasi terhadap Iran pada 1980, PBB tidak menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah gangguan terhadap perdamaian dan keamanan. Dewan Keamanan PBB membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk menarik

pasukan Saddam Hussein tersebut. (Bandingkan dengan serangan Saddam Hussein pada 1990 terhadap Kuwait. Resolusi Dewan Keamanan PBB diterbitkan—yang meminta Irak dengan segera dan tanpa-syarat untuk menarik pasukannya hanya dalam waktu 12 jam sejak terjadinya penyerangan). Dewan Keamanan PBB juga memerlukan waktu lima tahun—terutama karena penundaan dari Amerika—untuk menjatuhi sanksi pada Saddam Hussein yang telah menggunakan senjata kimia untuk menyerang militer dan warga sipil Iran. (Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat terlibat dalam kasus senjata kimia ini, baik secara langsung dengan menjual senjata kimia tersebut pada Saddam Hussein ataupun mengetahui dan secara diam-diam menyetujui penjualan tersebut). Pihak Washington memastikan bahwa PBB akan mengeluarkan resolusi untuk melindungi Saddam Hussein. Di kemudian hari, Amerika Serikat menggunakan isu senjata kimia ini sebagai dalih penyerangan terhadap Irak pada 2003. Bagi Iran, ada satu pelajaran penting; ketika berada dalam posisi bahaya, Iran tidak dapat berlindung baik pada Konvensi Genewa atau Piagam PBB. Sebagaimana Israel, Iran berkeyakinan bahwa mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri.

Bangsa Yahudi dan bangsa Iran bukanlah pihak yang asing satu sama lain. Mereka memiliki ikatan erat dalam aspek budaya, agama, dan sejarah sejak masa sebelum Masehi. Awal hubungan keduanya dapat ditelusuri hingga abad 8 SM, yaitu ketika saja Assyria, Tiglath-pileser III memindahkan secara paksa pemukiman ribuan bangsa Yahudi di kota Media, sebelah utara Iran. Kelompok Yahudi lainnya dipindahkan ke kota Ecbatana (Hamadan) dan Susa oleh suksesor Tiglath-pileser III, Sargon II, pada 721 SM. Hingga saat ini, kota Hamadan masih menjadi pusat pemukiman Yahudi Iran. Kota Hamadan juga dikenal sebagai tempat pemakaman Ratu Esther, istri Raja Xerxes, yang telah menyelamatkan kaum Yahudi dari rencana persekusi pada abad 5 SM. Upacara ini masih dirayakan oleh kaum Yahudi pada acara Festival Purim (Esther 3:1-9:32). Selain itu, pemakaman nabi Daniel (Perjanjian Lama) terletak di luar kota Susa, sebelah selatan Iran.[4] Gelombang terbesar migrasi bangsa Yahudi ke wilayah Iran terjadi setelah raja Persia, Cyrus Agung berhasil menaklukan Babilonia pada tahun 539 SM dan membebaskan kaum Yahudi dari tawanan Babilonia. Kaum Yahudi sangat mengapresiasi jasa raja Persia ini dengan mengangkatnya sebagai juru selamat utusan Tuhan—dengan gelar ini, Cyrus Agung menjadi satu-satunya orang non-Yahudi yang mendapatkan penghargaan tersebut dalam Bibel (Ezra 1:1-7). Meskipun bangsa Persia membolehkan kaum Yahudi kembali ke Israel dan bersedia untuk membiayai pembangunan kuil di Yerusalem, sebagian besar kaum Yahudi memilih untuk bermigrasi di wilayah Persia. Sekitar dua pulul lima ribu orang kaum Yahudi yang sekarang tinggal di Iran merupakan keturunan langsung dari kaum Yahudi yang memilih untuk bermigrasi ke wilayah yang pernah menjadi satu-satunya kekuatan adidaya di dunia ini.

Barangkali yang lebih penting dan lebih argumentatif untuk menjelaskan mengapa bangsa Yahudi Persia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Iran adalah bahwa, tidak seperti proses diaspora bangsa lain, Yahudi-Iran tidak melarikan diri ke wilayah Iran. Mereka secara suka rela pindah ke wilayah Iran dan sejak saat itu, baik dalam situasi baik dan buruk, Iran tetap menjadi rumah mereka. Bahkan hingga saat ini, di bawah pemerintahan Republik Islam, Iran menjadi tuan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah di luar negara Israel, meskipun ada puluhan ribu orang yang sudah pindah

[4]

ke Israel dan Amerika Serikat.[5] Kitab Esther, Ezra, Nehemiah, dan Daniel memberikan penjelasan berharga tentang posisi kaum Yahudi dalam masyarakat Persia. Sebagaimana komunitas penduduk lainnya di Kerajaan Persia, kaum Yahudi menikmati kebebasan beragama dan tetap menjalankan peraturan internal mereka sendiri dalam urusan-urusan privat, seperti pernikahan dan aturan-aturan keluarga. Situasi ini membuat kaum Yahudi relatif tidak terlalu resisten terhadap pengaruh Persia pada ajaran Yahudi. Ajaran Zoroaster-Persia memiliki pengaruh besar pada prinsip-prinsip kunci Judaisme modern. Dari bangsa Persia, kaum Yahudi mengadopsi konsep tentang linieritas waktu, eskatologi, konsep tentang malaikat, konsep tentang iblis, juga konsep tentang surga dan neraka, yang di kemudian hari mempengaruhi ajaran Kristen dan Islam.[6] Yang lebih penting lagi, atas pengaruh bangsa Persialah, ajaran Judaisme menjadi agama yang menganut paham monoteistik. Kaum Zoroasterian merupakan kelompok pertama yang percaya pada satu tuhan, yaitu Ahura Mazda. Hubungan dengan bangsa Persia membuat bangsa Yahudi mampu mentransformasi ajaran henoteistiknya (bahwa setiap kelompok memiliki tuhannya masing-masing). Hal ini dapat dengan jelas ditemukan dalam berbagai karya yang ditulis sejak masa kerajaan Achaemenian, ketika kaum Yahudi mulai mendeskripsikan konsep satu tuhan sebagai upaya untuk menyatakan bahwa tuhan mereka merupakan tuhan yang paling hebat di antara tuhan lainnya—sebuah konsep yang diambil dari ajaran nabi dan tokoh agama Yahudi sebelumnya.[7]

Sekitar dua ratus ribu kaum Yahudi-Iran dan keturunan mereka tinggal di Israel. Sebagian dari mereka merupakan elit politik Israel di level tertinggi. Dalam pemerintah Republik Islam Iran, individu-individu ini tidak akan pernah mampu mencapai karir tinggi. Jauh sebelum menjadi sosok terkenal, mereka bisa saja diberhentikan oleh peraturan yang memisahkan kelompok agama minoritas, kelompok sekular, dan kelompok ateis dari orang-orang yang dianggap mampu memberikan loyalitas mereka kepada pemerintahan Republik Islam Iran. Presiden Israel, Moshe Katsav dan Wakil Perdana Menteri (juga mantan Kepala Staf *Israel Defense Forces* (IDF) dan Menteri Pertahanan), Shaul Mofaz, keduanya merupakan Yahudi yang lahir di Iran. Kepala Staf IDF yang baru, Dan Halutz, juga dilahirkan dari imigran Persia.

Ketika Katsav bekerja di PBB, hiburan favoritnya adalah ketika dia berhasil mempermalukan para diplomat Iran dalam berbagai kesempatan melalui percakapan berbahasa Persia dengan mereka. Karena dilarang untuk berbicara pada staf Israel (setidaknya di ruang publik), para diplomat Iran biasanya menyelamatkan diri mereka dari sikap Katsav itu dengan meninggalkan forum. Katsav menilai kejadian itu sangat lucu. Mofaz dan Halutz mendekati Iran dengan sikap yang tidak terlalu humoris; sikap mereka seperti halnya pemimpin-pemimpin Israel yang agresif terhadap Iran. Ketika ditanya dalam sebuah konferensi pers pada Januari 2005 tentang seberapa jauh Israel akan menghentikan proyek nuklir Iran, Halutz, sebagai seorang mantan pilot, memberikan jawaban yang menakutkan; ”dua ribu kilometer.” Itu adalah jarak antara Israel dan Iran. Bagi kaum Yahudi Iran lainnya—baik yang tinggal di Israel ataupun Iran—rivalitas antara kedua negara ini telah menimbulkan banyak dampak buruk. Sejak persitiwa revolusi di Iran, ada sebuah kesepakatan tidak tertulis antara minoritas Yahudi Iran dan otoritas Iran.

5

6

7

Sepanjang Yahudi Iran menentang Zionisme dan negara Israel, mereka akan dilindungi Iran dan diberikan kebebasan beragama. "Kesepakatan ini, yang memberikan pemisahan yang jelas antara menjadi Yahudi dan menjadi Zionis, merupakan usulan bersama; mereka mengusulkan kepada rezim Khomeini setelah peristiwa revolusi," demikian penjelasan David Menashri, seorang pakar dari Israel tentang Iran yang juga Yahudi kelahiran Iran.[8] Khomeini mengeluarkan sebuah fatwa—dekrit keagamaan—yang menyatakan bahwa kaum Yahudi (Iran) harus dilindungi.[9]

Hanya sebagian kecil dari Yahudi Iran yang menganggap serius retorika anti-Israel yang disampaikan Ahmadinejad. Mereka menegaskan sebuah fakta bahwa di bawah pemerintahan Ahmadinejad tidak ada perubahan besar terjadi bagi Yahudi-Iran. "Sikap anti-semit bukanlah fenomena di dunia Timur, sikap tersebut bukan juga fenomena di dunia Islam ataupun Iran—sikap anti-semit merupakan fenomena masyarakat Eropa," demikian penjelasan Ciamak Morsathegh, kepala Rumah Sakit Yahudi di Tehran.[10] Empat puluh sinanog di Iran, sebagiannya ada sekolah-sekolah Ibrani, tidak pernah diganggu. Begitu juga dengan perpustakaan Yahudi, yang memiliki 20 ribuan judul buku ataupun rumah sakit dan pemakaman Yahudi. Yahudi Iran tetap tidak bisa tinggal diam. Anggota Yahudi dalam Majlis Iran, atau parlemen (sebagian besar kelompok minoritas keagamaan diberikan jaminan perwakilan di parlemen), Maurice Motamed, secara terang-terangan mengkritik pernyataan Ahmadinejad. "Ketika presiden kita berbicara tentang peristiwa Holocaust, Saya merasa bahwa sudah menjadi tugas saya sebagai seorang Yahudi untuk memberikan pernyataan tentang persoalan tersebut," Mohtamed memberikan keterangan pada *Guardian*. "Bencana terbesar dalam sejarah umat manusia didasarkan pada puluhan ribu film dan dokumen. Saya katakan bahwa pernyataan ini merupakan sebuah pelecehan besar bagi seluruh warga Yahudi di Iran dan di dunia."[11] Haroun Yashayaei, ketua *Iran's Jews Council* dengan cepat mendukung pernyatan tersebut dengan mengirimkan surat protes keras atas pernyataan Ahmadinejad tersebut.[12] Komunitas Yahudi berhasil mendapatkan dukungan dari Mohammad Khatami, pendahulu Ahmadinejad yang lebih moderat. "Kami harus melakukan protes jika ada seorang Yahudi terbunuh," presiden reformis itu memberikan pernyataan dalam sebuah publikasi pada awal 2006." Jangan lupa bahwa salah satu tindakan kriminal yang dilakukan Hitler, Nazi dan Sosialisme Nasional Jerman adalah tindakan pembantaian terhadap warga yang tidak berdosa, dan di antara warga yang tidak berdosa itu adalah kaum Yahudi."[13]

Yahudi-Iran di Israel menghadapi sejumlah dilema. Kita dapat memahami bahwa sikap Ahmadinejad yang mempertanyakan kembali persitiwa Holocaust dan seruannya agar Israel pindah ke Eropa telah menimbulkan rasa takut akan munculnya fasisme di tengah-tengah Yahudi Ashkenazi. Tetapi Yahudi-Iran di Israel tidak terlalu khawatir meskipun sama-sama dibuat marah. "Yahudi Eropa tidak tahu Ahmadinejad, begitu juga Yahudi Iran. Maka pernyataannya tentang Holocaust lebih efektif bagi mereka," Soli Shavar, Yahudi-Persia yang mengajar di Universitas Haifa menjelaskan. "[Yahudi-Iran] tahu [dari

8

9

10

11

12

13

mana] jargon dan retorika radikal itu berasal."[14] Akhirnya, sebagian Yahudi Iran di Israel memandang Iran dari dekat—sebuah perspektif yang warga Israel lainnya tidak pernah mengalaminya. Sepanjang pemerintahan Khatami, perjalanan antar kedua negara ini via Turkey menjadi lebih mudah, dan jaringan langsung telekomunikasi—yang tidak pernah diputus—lebih sering digunakan karena harganya murah. Yahudi-Persia bepergian dari Israel ke Turki; dimana mereka mengembalikan paspor Israel mereka dan hanya membawa paspor Iran untuk melanjutkan penerbangan ke Tehran. Sebagian warga Yahudi yang kehilangan paspor Iran bahkan akan mendatangi konsulat Iran di Istanbul untuk membuat paspor baru dengan memperlihatkan identitas kebangsaan Israel mereka. Otoritas Iran tidak mempermasalah hal tersebut—sebuah fenomena mengherankan.

Di antara semua kemiripan kultural mereka, ada satu hal yang memisahkan keduanya. Perbedaan antara Iran dan Israel ada pada sesuatu yang berhubungan dengan keseharian Yahudi-Iran. Baik secara kultural maupun ekonomi, sebagian Yahudi-Iran lebih memilih tempat kelahirannya di Iran daripada tanah air Yahudi. Sebagian imigran Iran yang datang ke Israel didorong oleh faktor ekonomi, bukan alasan politik. Mereka menganggap bahwa Israel merupakan surga bisnis. Mereka meninggalkan kehidupan mereka di Iran untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Israel. Namun kehidupan baru di Israel seringkali tidak sesuai dengan harapan mereka. Menurut Orly Halpern dari *Jerusalem Post*, Jalan Jaffa Yerusalem dan Rehov Ben-Yehuda dipenuhi penjaga toko Iran yang mengaku bahwa mereka sudah putus asa untuk kembali ke Iran—sebagian ada yang hanya berkunjung, sebagian ada yang tinggal di sana. "Di Iran, setiap orang mengatakan bahwa Israel merupakan tempat yang luar biasa. Mereka akan memberimu rumah, uang, dan kemudahan hidup," seorang imigran Yahudi Iran berkata pada Halpern. "Kami datang ke sini dan terkejut. Di Iran memang sulit, tapi tidak sesulit di sini [Israel]," perempuan ini menjelaskan bahwa dia merindukan Iran.[15] Imigran Iran lainnya lebih memilih tinggal di Israel, dan beberapa ketegangan terjadi antara imigran yang datang kemudian dan lebih mapan dari Iran. Imigran yang lebih awal cenderung lebih mencurigakan dari imigran baru karena mereka dituduh lebih mendukung pemerintahan Iran.

Sebagaimana Israel dan Iran, imigran Iran di Israel menghadapi kesulitan untuk mengatasi kejutan budaya. Kontradiksi yang terjadi antara nilai-nilai tradisional masyarakat Iran dengan nilai-nilai liberal masyarakat Israel—yang ditentukan oleh norma dan budaya imigran Eropa di Israel daripada letak geografis Israel itu sendiri di Timur Tengah—bisa saja tidak terlalu besar. Saya pernah berbicara dengan orang tua Yahudi-Iran ketika kami duduk berdekatan dalam sebuah perjalanan bus dari Yerusalem menuju Tel Aviv. Orang tua itu bernama Eshaq (Isaac), tidak memiliki rasa suka pada para ulama di Teheran, tapi suka bernostalgia tentang sebuah negeri yang dia habiskan sebagian besar usianya di sana (Iran). Pada akhirnya, Israel hanya menjadi bagian terakhir di sepanjang perjalanan hidupnya, dan dia tidak pernah benar-benar ingin mendirikan negara Yahudi. Dia tidak terlalu sepakat dengan gagasan pendirian negara Yahudi itu. Berdasarkan tipe gaya orang Iran, Eshaq merasa terpaksa untuk berbagi roti yang dia bawa selama perjalanan bus bersama temannya orang Ashkenazi, menakut-nakuti suasana siang hari Yahudi-Eropa yang lebih pendiam itu, yang bisa saja tidak bisa mengenali Eshaq ketika wajah gelapnya membuat dia kelihatan seperti Yahudi Oriental (Mizrahi) atau orang Arab

14

15

lokal. Dalam keadaan malu, Eshaq kembali ke tempat duduknya. Setelah beberapa saat terdiam, dia berteriak dengan aksen Isfahan yang kental, "*Farhang nadaran*" (Mereka tidak beradab). Kritisisme terhadap Israel ini umum terdengar di kalangan Yahudi-Iran.

Seperti kebanyakan Yahudi-Rusia yang bermigrasi ke Israel pasca runtuhnya Tembok Berlin, Yahudi-Iran memilih untuk tetap menggunakan bahasa asli mereka—daripada bahasa Ibrani—dan berbaur dengan budaya Iran dengan penuh kesetiaan. Mereka merayakan Nowruz dengan melakukan pawai yang tingkat kemeriahannya sama dengan pawai di New York. "Saya bangga menjadi Yahudi, saya bangga menjadi warga Israel, tetapi saya tidak memiliki kesamaan dengan Yahudi dan Israel," seseorang bernama Ehsan berbicara pada saya. "Saya tidak mau anak-anak saya hidup seperti mereka," dia mengomentari gaya hidup bebas Yahudi Eropa. Kesalahpahaman antara dua kelompok ini tidak biasa. Warga Iran cenderung berkata secara hati-hati dan menghindari percakapan yang bukan urusan mereka atau di luar tujuan mereka. Dengan penuh kefasihan dan kesopanan, bangsa Iran menyampaikan pesan mereka dengan berbagai lapisan rasa bahasa dan berbagai pujian yang secara sengaja untuk menyesatkan. Israel merupakan kebalikannya. Keduanya seperti pertentangan yang terjadi antara *taarof* dan *chutzpah*.

Taarof merupakan prinsip sosial bangsa Iran, sebuah konsep kesopanan 'bermuka dua'. Misalnya, jika bangsa Iran saling mengundang untuk makan malam, undangan tersebut tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk makan malam tetapi lebih ditujukan untuk menunjukan kesopanan. Tujuannya adalah agar pihak yang diundang juga melakukan hal yang sama kepada pihak yang mengundang sebagai bentuk kesopanan juga. Kita akan dianggap tidak sopan jika menerima undangan makan malam ini pada undangan pertama. Sebuah undangan makan malam akan dianggap serius jika sudah disampaikan tiga kali yang justru akan dianggap tidak sopan ketika menolaknya. Ambiguitas, simbolisme, dan ketidakjelasan motif merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam budaya dan bahasa bangsa Iran. "*Taarof* merupakan tanda rasa hormat, bahkan jika kita tidak bermaksud memberi rasa hormat tersebut," Nasser Hadian dari Universitas Teheran menjelaskan, sebuah pernyataan yang bertentangan dengan bangsa Israel dan Amerika.[16] Bagi bangsa Iran, tentu saja tidak ada kontradiksi dalam tradisi tersebut. Mereka tentu paham tradisi *taarof* dan mereka juga paham mengapa prinsip kesopanan 'bermuka dua' ini tetap menjadi simbol rasa hormat yang sebenarnya.

Sementara itu tradisi *chutzpah* dalam bangsa Israel bermakna "keberanian" dan "menyakitkan hati". Bangsa Israel akan menggunakan sebuah candaan untuk menjelaskan sebuah konsep. Seorang anak manja berusia 12 tahun akan berargumentasi di depan orang tuanya, dan jika anak itu marah dia akan membunuh kedua orang tuanya. Anak itu segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ketika anak itu digiring ke persidangan, dia segera mencium kaki hakim dan menangis," Kasihanilah saya! Saya hanya seorang anak yatim yang miskin!" Tidak seperti bangsa Iran, bangsa Israel cenderung tidak menyembunyikan apa yang mereka ingin sampaikan. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, tapi mereka mampu langsung menyampaikan sesuatu yang dapat merefleksikan seluruh situasi sosial yang ada—sebuah sikap yang akan dinilai oleh orang Iran dan Yahudi-Iran sebagai sikap yang kasar dan 'ofensif'. Sementara itu, seorang warga Iran akan menggunakan kalimat-kalimat yang panjang untuk menghindari kata "tidak". Sebagian warga Israel maju dengan kondisi hidup imperatif—penuh dengan

16

perintah/kewajiban. Mendapatkan jawaban bias dari orang Israel sama sulitnya dengan mendapatkan jawaban yang lugas dari orang Iran. Dalam pertentangan antara tradisi *taarof* dan *chutzpah*, keduanya tidak ada yang menang, yang ada hanyalah kebingungan.

Selama keduanya dapat menemukan sikap kasar dan tidak sopan dari masing-masing pihak, atau ketidakjujuran dan ketidaktulusan, Israel dan Iran juga memiliki pandangan mistik dan berlebih-lebihan satu sama lain. Rasa hormat dan rasa kagum kedua rival ini kepada masing-masing pihak tidak dapat dipersalahkan."Bangsa Iran dinilai sebagai ahli penyesatan, dan menurut saya, sifat mistis mereka yang tinggi tidak hanya karena Israel mengetahui Iran dan mengakui kemampuan mereka, tetapi juga karena mereka jauh berbeda dengan bangsa Arab," seorang pakar Israel berkata kepada saya."Ketika kita mengidentifikasi musuh kita, bangsa Arab merupakan bangsa yang keras kepala yang akan menjalankan sebuah rencana yang sama persis selama-lamanya, karena mereka bangsa Arab. Mereka berpikiran sempit. Sederhana. Bangsa Iran lebih sulit lagi untuk didefinisikan karena mereka terlalu mirip dengan kita [Israel]."

Sebagian warga Israel mengutip kisah dalam Bibel tentang cerita Putri Esther sebagai sebuah bukti tentang reputasi bangsa Iran dalam seni manipulasi. Menurut sebuah legenda, Esther merupakan seorang putri dari seorang pedagang Yahudi yang tinggal di kota Susa pada masa kekuasaan Raja Xerxes (486-465 SM). Kecantikannya membuat raja Persia terpesona sehingga menjadikannya istri tanpa menghiraukan darah Yahudi Esther. Ketika berada pada singgasana, Esther mengetahui sebuah rencana jahat kerajaan Persia untuk membunuh seluruh warga Yahudi yang dibuat bukan oleh orang Persia melainkan oleh sebuah kelompok kecil bernama Amalekit. Esther mengundang sang raja dan aktor utama konspirasi, Haman, untuk menghadiri sebuah jamuan yang telah disiapkannya. Dalam jamuan tersebut, Esther akan menyampaikan sebuah petisi kepada raja Persia. Dalam jamuan tersebut, Xerxes bertanya pada Esther,"Sekarang apa petisimu itu? Saya akan mengabulkannya." Tanya sang raja, sebagaimana dikisahkan Bibel. Namun alih-alih menyampaikan petisinya, Esther justru mengatakan bahwa dia berjanji akan menyampaikan petisi tersebut jika Xerxes dan Haman bersedia makan malam bersamanya keesokan harinya. Pada makan malam tersebut, sang raja bertanya kembali dan saat yang tepat yang ditunggu-tunggu Esther kini telah tiba. "Jika diperkenankan, selamatkanlah hidupku—inilah permintaanku. Aku dan bangsaku terancam penghancuran, pembantaian, dan pembinasaan." Raja Xerxes bingung dan bertanya siapa yang menghendaki kematian istrinya. "Haman," Esther menjawab dengan percaya diri, dia paham bahwa rencana dan kesabarannya sudah berbuah hasil. Haman kemudian dihukum gantung, dan Yahudi-Persia terselamatkan.

"Dalam Bibel, Esther bertindak sepenuhnya seperti bangsa Persia," Shmuel Bar dari *Interdiciplinary Cent*er di Herzliya menjelaskan, yang juga seorang veteran intelijen Israel. "Dia memperdaya, menyembunyikan niatnya, memanipulasi, dan meyakinkan pihak yang lebih kuat untuk berada di pihaknya."[17] Merujuk pada *Shalem Center* di Yerussalem, saat ini Israel harus belajar dari naluri manupulatif Esther dan menggunakannya dalam diplomasi. Namun ketergila-gilaan pada Esther ini bisa saja mengungkapkan jati diri Israel itu sendiri daripada Iran. "Kita suka menilai diri kita sebagai ahli tipu muslihat," seorang ahli dari Israel berkomentar tentang Iran. "Perhatikan hal ini; Ketika Anda mendefinisikan seseorang sebagai musuh terbesar, Anda hanya mengatakan sedikit saja tentang Anda

[17]

sendiri. ”Ironisnya, di Eropa, yang secara historis tempat tumbu suburnya sikap anti-Semit, gelar “Ahli Tipu Daya” diberikan kepada warga Yahudi—bukan kepada Iran. Sebagian besar warga Israel cenderung hati-hati dalam pandangan mereka terhadap Iran, agar terhindar dari sikap melebih-lebihkan kelebihan dan kekurangan mereka. ”Mitos-mitos ini dibuat oleh tangan-tangan Iran terdahulu; mari panggil mereka “Lubranis” [merujuk pada seseorang bernama Uri Lubrani, utusan Israel untuk Iran 1970-an yang masih aktif di Kementerian Pertahanan],” Ehud Yaari menjelaskan, seorang pensiunan jurnalis televisi Israel. “Saya tidak membeli sebuah mitos yang menyatakan bahwa Iran memiliki 700 tahun diplomasi di bawah sorban Rafsanjani.” Bahkan Yaari tidak dapat mengabaikan penghargaan Israel terhadap bangsa Iran.”Saya merindukan Iran,” dia mengatakannya pada saya sambil mengenang “masa lalu yang indah” sebelum peristiwa revolusi, ketika kerjasama intelijen antara dua negara ini meningkat dan turis Israel berkumpul mengunjungi Iran—satu-satunya negara di Timur Tengah yang mempersilahkan warga Israel untuk masuk pada saat itu.[18]

Di sisi lain, Iran tidak secara eksplisit menunjukkan kekaguman mereka terhadap kemampuan Israel dan cenderung menyembunyikan perhatian dan ketakutan mereka dengan berbagai retorika yang ‘aman’ dan tidak terlalu ideologis. Dengan sangat marah Iran akan menolak usulan apapun untuk menjadikan Israel sebagai rival Iran untuk mencapai posisi paling dominan di Timur Tengah. Bagaimana hal itu terjadi, mereka bertanya dengan kemarahan yang tidak ditutup-tutupi? Dengan seluruh persoalan yang ada antara Iran dengan bangsa Arab, Iran menegaskan bahwa persoalan dengan Israel jauh lebih buruk. Setidaknya, Iran dan bangsa Arab sama-sama beragama Islam, dan Iran merupakan sebuah “negeri yang sebenarnya”—bukan sebuah negara buatan yang didirikan di atas tanah Arab, sebagaimana yang sering diargumentasikan mereka. ”Tidak ada satu negarapun yang akan menerima hegemoni Israel, bahkan jika ada solusi dua-negara,” Mustafa Zahrani, staf Kementerian Luar Negeri Iran, berkata kepada saya di kantornya di bagian utara Iran pada Agustus 2004. ”Tindakan Israel merupakan tindakan ilegal, dan penduduk mereka sangat sedikit. Mereka tidak bisa menjadi kekuatan dominan. Menerima keberadaan mereka saja sudah lebih dari cukup, apalagi jika mereka melakukan hegemoni” lanjut Zahrani.[19] Namun di belakang pernyataan kasar Zahrani, tersimpan ketakutan Iran untuk menghadapi sebuah rival di wilayahnya yang bisa saja rival itu kecil dan secara kultural asing di wilayah tersebut, tetapi memiliki kartu sakti di lengan bajunya yang dapat membuat Iran iri—yaitu dukungan dari Amerika Serikat.

Pada 12 Juli 2006, peperangan terjadi antara Israel dan Hezbullah, gerilyawan Lebanon dan kelompok politik yang didukung Iran. Pada saat itu, sebuah pasukan Hezbullah melewati perbatasan Israel-Lebanon dan menculik 2 orang anggota militer Israel sekaligus membunuh pasukan lainnya. Israel segera mengirimkan pasukan bantuan yang tidak hanya gagal menjalankan misi, bahkan membuat 5 orang pasukan Israel terbunuh. Bagi kelompok Hezbullah, persitiwa ini merupakan pertempuan perbatasan dengan skala medium; tujuan utama mereka adalah mendapatkan tawanan Israel yang akan mereka gunakan sebagai tebusan untuk melepaskan tawanan Lebanon dan Palestina. Bagi Israel dan bagi pendukung non-konservatifnya dalam pemerintahan Bush, tidakan ini

18

19

merupakan ajakan untuk berperang—yang tidak hanya dilakukan Hezbullah, tetapi juga Iran.

Dalam beberapa jam saja, Israel menyerang Hezbullah dengan serangan yang tidak pernah diduga sebelumnya; serangan udara yang masif terhadap benteng pertahanan Hezbullah dan serangan rudal terhadap infrastruktur warga sipil Lebanon. Mengejutkan dan mengagumkan, begitulah gaya perang Israel. Israel bahkan membom tank cadangan minyak Lebanon dan landasan pacu di bandar udara kota Beirut sehingga pesawat tidak dapat terbang atau mendarat dari dan menuju Beirut. Serangan ini juga berdampak pada lebih dari 2500 warga Lebanon-Amerika, tapi pemerintahan Bush tidak menghiraukannya. Sebaliknya, kelompok neo-konservatif, yang selama beberapa tahun mendorong pemerintahan Bush agar mengambil tindakan terhadap Iran, merasakan kebahagiaan. William Kristol dari *Weekly Standard* mendorong Pentagon agar membalas "serangan Iran ini dengan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran. Mengapa menunggu?"

Melalui penjelasan pertentangan istilah ideologis—"perang Islamis-Israel"—Kristol memperingatkan militer Amerika agar tidak tampak lemah dan terlihat ingin mengakhiri serangan. "Ini adalah perang kita juga."[20] Lupakan saja bahwa Hezbullah, meskipun memiliki kedekatan dengan Iran dan Syiria, telah berulangkali menunjukkan bahwa mereka mampu mengambil keputusan politik dan militer sendiri tanpa persetujuan atau arahan Iran. Bagi kalangan neo-konservatif dan pendukung Israel di Amerika, perang di Lebanon merepresentasikan sebuah tahapan penting dalam rencana mereka untuk menjadikan Iran sebagai Irak selanjutnya.[21] Hanya berselang satu hari setelah perang terjadi, Michael Ledeen dari *American Enterprise Institute* menyerukan agar Amerika Serikat memperluas perang di Lebanon ini menjadi perang wilayah. "Satu-satunya cara bagi kita untuk memenangkan pertempuran ini adalah dengan menjatuhkan rezim-rezim ini di Tehran dan Damaskus. Mereka tidak akan mengalami kekalahan sebagai hasl dari peperangan antara kelompok teroris di Gaza dan Lebanon pada satu sisi dan Israel di sisi lain. Hanya Amerika Serikat yang mampu menyelesaikannya."[22]

Pada hari yang sama, pendukung kebijakan pemerintahan Bush di Timur Tengah, John Gibson, menulis sebuah editorial di *Fox News Channel*. Dia menyatakan bahwa Iran (maksudnya Hezbullah) tidak pernah menyerang Israel. Mereka sebenarnya menyerang Amerika Serikat. "Serangan ini merupakan ajakan perang dari Iran kepada Amerika."[23] Namun Presiden Bush tidak mengikuti saran dari sesama kolega neo-konservatifnya itu. Washington melakukan segala cara untuk memperpanjang perang sehingga memberikan Israel lebih banyak waktu untuk menghancurkan Hezbullah semaksimal mungkin. "Penghentian tindakan kekerasan sangat krusial, tapi jika penghentian ini membuat Hezbullah meluncurkan kembali rudal kepada Israel atau tindakan penculikan Hamas terhadap warga Israel, maka kami tidak akan menghentikannya," Sekretaris Negara, Condoleeza Rice memberikan keterangan kepada *Fox News*. Presiden Bush merespon pernyataan ini dengan mendesak dilakukannya gencatan senjata tanpa mengabaikan peluang strategis dari peperangan yang terjadi." Apa yang kita sampaikan adalah bahwa kita tidak boleh mengabaikan konteks yang lebih luas," demikian pernyataan Bush untuk

20

21

22

23

CNN.[24] Jelas sekali bahwa Bush berharap agar Israel mampu mengantisipasi gerakan Hezbullah untuk melemahkan perluasan pengaruh Iran di Timur Tengah sekaligus mengakhiri ancaman Iran terhadap dominasi regional Amerika dan Israel. Keberhasilan mengatasi gerakan Hezbullah juga akan mampu melemahkan kekuatan dan kemampuan balas dendam Iran, sekaligus membuka jalan perang dengan Tehran yang tidak akan mampu membalas serangan pada Negara Yahudi. "Peperangan dengan Iran merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan," wakil Menteri Pertahanan Israel, Ephraim Sneh mengatakan hal ini kepada saya dalam sebuah konferensi di selatan Eropa pada 28 Juli 2006 menjelang terjadinya peperangan." Lebanon hanya permulaan bagi peperangan yang lebih hebat dengan Iran," lanjutnya dengan intonasi yang menakutkan.

Pasca peperangan yang menimbulkan korban tewas lebih dari 15 ribu, sebagian besar warga sipil Lebanon, 900 ribu pengungsi Lebanon, dan 300 ribu pengungsi Israel, memporak-porandakan infrastruktur Lebanon, dan menganggu kehidupan normal seluruh warga Lebanon dan utara Israel, prediksi Sneh menjadi sebuah peringatan akan adanya nasib buruk itu. Namun jika kita kembali ke belakang, konflik ini tidak akan terbatas antara Israel dan Iran. Konflik ini akan menjadi konflik regional, yang akan mendorong negara-negara lain dan pihak non-negara ikut terlibat. Konflik ini juga akan menjadi perang bagi Amerika, sebagaimana yang sangat diharapkan oleh kalangan neo-konservatif. (Tidak seperti Irak, Iran dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Amerika karena kemampuan asimetris militernya tersebar di wilayah Timur Tengah).

Saat ini Amerika sedang berada pada persimpangan yang berbahaya dengan adanya perang sipil dan kekacauan sebagai akibat dari pendudukan militer dan kekuatan militer Amerika Serikat hampir mencapai batas kemampuannya. Ada kebingungan yang besar tentang bagaimana Amerika dapat ikut dalam rivalitas Israel-Iran yang tidak ada kaitannya dengan ideologi maupun agama. Sebelum Amerika menemukan jalan menuju masa depan yang damai, Washington harus belajar kembali pada pengalamannya di masa lalu dan berhadapan langsung dengan 800 pon gorilla (rivalitas Israel-Iran, *pen.*).

[24]

2-Persekutuan Oportunis: Hubungan Rahasia Shah

Negara-negara Arab memberikan toleransi terhadap kedekatan hubungan Israel dan Iran selama hubungan itu tidak terbuka ke publik
—Publikasi dokumen Catatan Percakapan, Kedutaan Amerika Serikat di Teheran, Iran, 14 Oktober 1972.

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Inggris mengontrol wilayah Palestina melalui mekanisme kuasi-kolonial dengan sebuah mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Gerakan Zionisme, yang mulai beroperasi sejak akhir abad sebelumnya dan mensponsori migrasi Yahudi ke wilayah Palestina dengan tujuan berdirinya Negara Yahudi, bergerak memanfaatkan mandat ini. Pertumbuhan populasi Yahudi berulang kali berbenturan dengan mayoritas bangsa Arab yang secara konsisten menentang keberadaan Negara Yahudi dan menginginkan kemerdekaan dari Inggris. Selama berlakunya mandat tersebut, Inggris berulang kali dikejutkan oleh pemberontakan para gerilya baik dari pihak Yahudi maupun Arab. Dalam keadaan lelah pasca Perang Dunia II, krisis keuangan, dan dilema di antara penolakan bangsa Arab dan populasi warga Yahudi, Inggris akhirnya menyerahkan urusan Palestina ini kepada PBB. Pada 15 Mei 1947, PPB membentuk sebuah Komite Khusus untuk Palestina, UNSCOP (*United Nation Special Committee on Palestine*), untuk merumuskan sebuah resolusi. Iran menjadi salah satu negara dari 11 negara anggota komite.

Setelah menjalani proses dengar-pendapat selama beberapa bulan, komite ini merumuskan sebuah usulan yang hanya didukung oleh 8 dari 11 anggota komite. Mayoritas anggota komite mengusulkan pembagian wilayah Palestina, pembentukan negara Arab yang independen, dan Negara Yahudi; sementara itu kota Yerusalem berada di bawah otoritas internasional. Bersama India dan Yugoslavia, Iran menentang usulan ini dan memprediksikan bahwa usulan tersebut akan menimbulkan lebih banyak lagi aksi kekerasan.[25] Pada waktu itu, Iran sedang dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi, penguasa kedua dari dinasti Pahlavi. Reza Shah, sang ayah, melakukan sebuah kudeta pada Februari 1921 dan menjatuhkan dinasti Qajar. Dua puluh tahun kemudian, Reza Shah dijatuhkan oleh Inggris dan Rusia yang kemudian menempatkan anak laki-lakinya sebagai penguasa. Bahkan sebelum berdirinya Negara Yahudi, Mohammad Reza Pahlavi telah memprediksikan bahwa pembagian wilayah Palestina akan menimbulkan aksi kekerasan yang berkepanjangan. Rezim Pahlavi berpendapat bahwa hanya dengan pendirian sebuah negara federasi tunggal yang terdiri dari warga Yahudi dan Arab, kedamaian akan dapat wujudkan. Bertentangan dengan penolakan-diam Teheran, usulan ini—pembagian wilayah—diterima oleh Sidang Umum PBB sebagai sebuah Resolusi 181 pada 29 November 1947. Bentrok fisik antara Yahudi dan warga Palestina segera terjadi dan kurang dari enam bulan kemudian David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya Negara Israel. Bersama dua belas negara lainnya, Iran menentang usulan pembagian wilayah ini dan menolak untuk mengakui negara baru itu. Pendirian ini tetap bertahan selama 37 tahun masa kepemimpinan Shah.[26]

25

26

Terjebak dalam Permainan Negara Adidaya

Pemenang mutlak dalam Perang Dunia II adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun kegagalan mereka dalam kekuatan-kekuatan Poros (*Axis power*) membuat mereka terjebak dalam rivalitas global, dan segera setelah berakhirnya perang, mereka mulai membelah dunia ini menjadi dua kutub; kutub Amerika dan Uni Soviet. Begitu juga dengan wilayah Timur Tengah. Cadangan minyak yang mereka miliki membuat wilayah Timur Tengah menjadi bagian dunia yang strategis dalam percaturan geopolitik yang dimainkan Washington dan Moskow, yang membelah negara-negara di wilayah tersebut ke dalam masing-masing kubu. Sebagai imbalan atas sikap kooperatif mereka, negara-negara tersebut ditawari hubungan diplomatik dan perlindungan keamanan. Bagi Iran, pilihan antara dua kubu ini sangat jelas. Peperangan yang terjadi berabad-abad antar Iran dan Rusia telah membentuk sebuah kecurigaan alami terhadap tujuan Soviet. Ideologi komunis merupakan ancama nyata bagi kekuasaan Shah di Iran, sebuah negara dengan distribusi kekayaan yang tidak merata merupakan tanah subur bagi munculnya kelompok pro-Soviet seperti Partai Rakyat Iran (*Iranian Tudeh Party*). Shah berharap dengan bergabungnya Iran dengan kubu Barat akan membuat Iran mendapatkan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk membendung penetrasi Uni Soviet di wilayah Timur Tengah dan Teluk Persia.

Pilihan strategis yang dihadapi Israel lebih kompleks. Mereka merupakan Negara Yahudi yang baru saja berdiri dan bergantung pada investasi kapital kubu Barat. Tapi mereka juga membutuhkan adanya migrasi warga Yahudi baik dari wilayah Timur maupun Barat agar dapat tumbuh dan bertahan. Dengan kondisi demografik yang ada saat itu—pada 1948 jumlah penduduk Arab mencapai 1,35 juta orang dan warga Yahudi berjumlah 650 ribu orang—Israel tidak dapat mencapai kesejahteraan tanpa adanya migrasi warga Yahudi. Sementara Ben-Gurion selalu menjadikan Amerika Serikat sebagai patron utamanya, pada masa awal berdirinya negara Israel, banyak warga Israel yang memiliki ikatan emosional dan kedekatan ideologis dengan Uni Soviet. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kuatnya sentimen ideologi Sosialisme di Israel tetapi juga banyak warga Israel yang menganggap Uni Soviet adalah negara yang paling berjasa menjatuhkan Nazisme—pihak yang dianggap sebagai dalang utama peristiwa Holocaust, *pen*. Bagi Shah, yang memandang situasi dunia melalui kaca mata Perang Dingin, hubungan dualistis Israel dengan Uni Soviet dan usaha-usahanya untuk bekerjasama dengan dua negara adidaya itu membuat Israel patut dicurigai. Shah mengadopsi sebuah kebijakan "ambivalensi yang dipertimbangkan", menjaga jarak aman dari Negara Yahudi sekaligus memastikan kesetiaan Negara Yahudi itu. Selama dua tahun pertama keberadaan Negara Yahudi, Iran tidak mengakuinya baik secara *de facto* maupun *de jure*. Namun kecenderungan Tel Aviv yang menjauh dari Uni Soviet dan sikap Tel Aviv yang mendukung kubu Barat membuat kecurigaan Iran berkurang pada Israel.[27] Pada 1951, pemerintah Mossadeq di Iran mengakui Israel secara *de facto* di wilayah Timur Tengah tapi tetap menolak secara *de jure*. Artinya, Iran tidak membuka peluang kerja sama resmi dengan Negara Yahudi.[28] Pengakuan secara *de facto* tetap memiliki implikasi politik yang signifikan—secara substansial Iran mengakui pendirian negara Israel dan tidak akan merubah pengakuan tersebut.

27

28

Namun keputusan untuk berada di kubu Barat tidak dapat menyelesaikan dilema keamanan yang dihadapi Israel. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di tengah-tengah negara-negara Arab, beberapa negara ini memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet. Di tengah ketidakmungkinan menhakhiri permusuhan dengan negara-negara Arab, Israel mulai membuka hubungan dengan negara non-Arab di wilayah tersebut, termasuk Iran. Pandangan ini menjadi basis munculnya *doktrin periperial* yang digagas Ben-Gurion. Doktrin ini merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang mendominasi pertimbangan-pertimbangan strategis Israel hingga berakhirnya Perang Dingin. Doktrin ini muncul akibat ketidakmungkinan mewujudkan perdamaian dengan negara tetangga Arab sehingga mendorong Israel untuk membangun aliansi dengan negara-negara non-Arab di pinggiran wilayah Timur Tengah, khususnya Iran, Turki, dan Ethiopia, juga termasuk minoritas non-Arab seperti suku Kurdi dan penduduk Kristen Lebanon. Aliansi ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi musuh-musuh Israel, melemahkan blok negara-negara Arab, dan menghentikan penyebaran pan-Arabisme di Timur Tengah.[29]

Sementara itu, hubungan Iran dengan negara-negara Arab semakin memburuk.[30] Meskipun Iran memberikan simpati terhadap gerakan nasionalisme Arab dan tuntutan kemerdekaan dari kekuatan kolonial Eropa (Iran masih berusaha menyembuhkan diri dari luka sejarah akibat intervensi Inggris dan Rusia), Shah merasa tidak nyaman dengan kecenderungan pro-Soviet dari negara-negara Arab.[31] Misalnya di Mesir, para pejabat melakukan kudeta terhadap Raja Faruk pada 1952 dan mendapatkan kemerdekaan dari Inggris lalu secara perlahan mendekat ke Uni Soviet sebagai pusat orbit. Karena tidak punya pilihan lain, Iran dan Israel akhirnya menghadapi dilema keamanan bersama. Baik Iran dan Israel khawatir terhadap rencana Soviet di Timur Tengah dan ancaman negara-negara pro-Soviet. Keduanya juga melihat gerakan pan-Arab, anti-Barat di Kairo, yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser sebagai penjahat utama di Timur Tengah.[32] Setelah Israel, penguasa Iran pro-Barat merupakan salah satu target utama Mesir.[33] Iran menaruh perhatian besar pada perluasan teritorial dari gerakan pan-Arabisme dan klaim Arab atas wilayah selatan Iran yang kaya-minyak, Khuzestan, karena hal ini akan mendorong negara-negara Arab bersatu melawan Iran meskipun kepentingan nasional masing-masing negara Arab ini bisa saja didorong oleh berbagai kepentingan yang berbeda.[34] "Iran menganggap mereka dikelilingi oleh negara-negara Arab. Dan negara-negara Arab mengadopsi kebijakan anti-Iran," demikian pernyataan Fereydoun Hoveyda, perwakilan Iran di PBB pada dekade 1970-an, sementara itu saudaranya, Amir Abbas Hoveyda, merupakan Perdana Menteri rezim Shah di Iran.[35]

Pada akhir dekade 1950-an, ada sebuah kesepakatan antara Israel dan Iran yang didorong oleh menguatnya hubungan antara Mesir dan Uni Soviet dan munculnya Nasser sebagai pemimpin dunia Arab pasca perang Suez pada 1953. Koalisi antara Israel, Inggris, dan Prancis dalam serangan terhadap Mesir pada 1956 menguatkan Nasser dan kecurigaan sekaligus permusuhan dunia Arab terhadap mantan negara penjajahnya itu juga Israel.

29

30

31

32

33

34

35

Namun Ben-Gurion, yang sangat berhati-hati dan curiga terhadap sikap dunia pada Negara Yahudi, khawatir bahwa Iran dan negara-negara di wilayah pinggiran tidak akan menjadi bagian dalam hubungan strategis dengan Israel kecuali setelah ditekan oleh Amerika Serikat. Pada 24 Juli 1958, Ben-Gurion mengirim sebuah surat pribadi kepada presiden Amerika Serikat, Dwight Eisenhower. Dalam surat itu dia memperingatkan Amerika tentang penyebaran gerakan pan-Arabisme dan Komunisme di Timur Tengah sekaligus meminta Amerika Serikat agar mendukung Israel sebagai alat untuk menjaga kepentingan kubu Barat. Ben-Gurion menulis: "Untuk membendung gelombang pasang Nasser-Soviet, kita harus mulai memperkuat hubungan kita dengan beberapa negara di luar wilayah Timur Tengah—Iran, Turki dan Ethiopia. Tujuan kita adalah untuk mengelola sekelompok negara, bukan sebuah aliansi resmi, yang akan mampu berdiri kuat melawan ekspansi Soviet yang menggunakan (Presiden Mesir) Nasser, yang juga bisa menyelamatkan kebebasan rakyat Lebanon uga Syiria.[36] Eisenhower menerima ajakan Israel dan menawarkan dukungan bagi anggota aliansi di pinggiran wilayah Timur Tengah.

Kecocokan antara Iran dan Israel lebih dari sekedar didorong oleh sebuah ancaman bersama. Pertumbuhan ekonomi Israel yang impresif dan penolakan negara Arab untuk menjual minyak ke Israel membuat Tel Aviv betindak nekad untuk mendapatkan komoditas yang dimiliki Iran secara melimpah.[37] Pasca krisis Suez tahun 1956, Iran membantu keuangan pemasangan pipa minyak 8 inci dari kota Eilat di sisi selatan Israel melewati Beersheba menuju garis pantai Laut Tengah yang dimiliki Israel. Pipa yang dinamai pipa Eilat-Ashkelon menghubungkan teluk Aqaba dan Laut Tengah serta memungkinkan ekspor minyak dari Iran dapat mencapai Kanal Suez. Berkurangnya ketergantungan terhadap kontrol Mesir atas Kanal Suez sangat penting sekali bagi Shah karena 73 persen impor Iran dan 76 persen ekspor minyaknya harus melewati kanal ini. Kesepakatan ini—yang membutuhkan beberapa hari sebelum diputuskan—dilakukan di sebuah kota sub-urban Tel Aviv pada musim panas tahun 1957 dalam sebuah kunjungan rahasia seorang pejabat Perusahaan Minyak Nasional Iran. Pipa minyak ini dipasang dalam waktu seratus hari—sebuah pemecahan rekor—dan mulai beroperasi pada akhir 1957 yang menyalurkan minyak dari Iran menuju Israel dengan harga 1,3 dolar Amerika per barel. Pipa minyak ini kemudian diperbesar hingga berdiameter 16 inci sebagai hasil negosiasi antara Perdana Menteri Israel Levi Eshkol dengan Shah pada 1958. Negosiasi ini merupakan pertemuan langsung pertama antara kabinet Israel denga Shah.[38] Meskipun Iran dan Israel tidak mengakui adanya perdagangan minyak atau kerjasama pemasangan pipa, hubungan antara keduanya merupakan rahasia umum dan menjadi objek kritik dunia Arab. Khawatir bahwa Shah bisa saja menghentikan proyek tersebut karena sensitifitas Arabnya, Washington memberikan jaminan terhadap proyek pipa ini berupa dukungan yang kuat hanya setelah menerima jaminan bahwa kepentingan finansial Iran dalam menyelesaikan proyek pipa ini lebih besar daripada kepentingan Teheran untuk mengikuti sentimen Arab mereka. Washington merasa bahwa Shah menginginkan adanya jarak yang aman dengan Israel dan menginginkan jaminan bahwa tekanan dari dunia Arab tidak akan membuat Shah mengingkari komitmennya dalam proyek saluran pipa minyak di atas.[39]

36

37

38

39

Ada alasan lain yang menjadi sebab menguatnya hubungan Israel dengan Iran; besarnya jumlah penduduk Yahudi di Iran yang diharapkan Israel bisa bermigrasi ke Negara Yahudi, dan Teheran juga menginginkan adanya jalur aman menuju Israel bagi Yahudi Iran. Sebaliknya, Iran iri pada pengaruh Israel di Washington dan sangat membutuhkan teknologi Israel untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Iran. Keahlian Israel dalam teknologi irigasi merupakan hal yang sangat berharga Iran yang ketinggalan dalam hal teknologi. Israel membuka peluang kerjasama lebih jauh dengan Iran dalam pertanian, meskipun faktor politik menjadi pertimbangan utama daripada pertimbangan pertanian itu sendiri. Shah seringkali memerintahkan para menterinya untuk mempekerjakan konsultan dari Israel agar memperkuat hubungan kedua negara—meskipun keahlian para konsultan itu tidak selalu dibutuhkan dan keterampilan mereka seringkali tidak sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. "Kami mempekerjakan orang Israel yang bahkan bukan seorang ahli pertanian, tidak bermaksud mencari gaji, tapi mereka tetap terlibat dalam proyek-proyek," mantan wakil menteri pertanian Iran memberikan penjelasan.[40] Namun, kebijakan ini secara politik merupakan cara aman bagi Shah untuk meminimalisir jaraknya dengan Negara Yahudi.[41] Meskipun ada pertimbangan politik dalam pertukaran teknologi ini, Israel tidak mengajarkan keahlian dan pengetahuan tingkat tinggi. Menurut Arieh Eliav, mantan menteri tenaga kerja Israel, Israel telah melatih sekitar 10 ribu tenaga pertanian Iran.[42] Yang tak kalah penting, kenyataan bahwa Iran dan Israel merupakan negara non-Arab membuat hubungan kedua negara ini memberikan dimensi emosional dalam perkembangan kerjasama keduanya.[43]

Kerja Sama yang Tak Seimbang

Sebagai negara paling kuat di pinggiran wilayah Israel, Iran tentu saja menjadi faktor utama bagi strategi besar Tel Aviv. Namun Israel tidak sama pentingnya bagi Iran sebagaimana Iran bagi Israel, meskipun Iran membutuhkan teknologi Israel. Sepanjang dekade 1950-an, Iran menganggap Israel terutama sebagai alat untuk mengantisipasi ekspansi Soviet—bukan dunia Arab—di wilayah Timur Tengah.[44] Uni Soviet menjadi ancaman utama Iran karena negara ini sedang mencari cadangan minyak di Timur Tengah dan menggunakan Nasser (Presiden Mesir) sebagai alat untuk masuk ke Teluk Persia.[45] "Shah melihat dua alat penjepit Soviet ini datang melalui Afghanistan dan Irak," demikian penjelasan Charles Naas, diplomat Amerika untuk Iran.[46] Warga Iran tentu saja khawatir jika Soviet menguntungkan Amerika Serikat karena hal itu akan membuat pemerintah Iran lebih bersemangat untuk mendapatkan perlindungan dari blok Barat. Dukungan Soviet terhadap gerakan pan-Arab pada gilirannya menyebabkan bahaya Arab bagi Iran yang dianggap sebagai ekspansi ancaman Uni Soviet. Sementara itu gerakan pan-Arab hanya dipandang sebagai katalisator dari ancaman ini, bukan akarnya.

Shah menyakini kuat bahwa dalam menghadapi gangguan atau bahkan serangan langsung Soviet, tidak ada pihak manapun yang dapat menjamin keamanan Iran kecuali

40
41
42
43
44
45
46

Iran itu sendiri.[47] Keyakinan ini salah satunya lahir dari sebuah percakapan antara Shah degan seorang perwakilan Amerika Serikat pada akhir dekade 1940-an. Pada waktu itu, Shah masih muda, belum berpengalaman, dan mudah terpengaruh. Dia sudah menyaksikan bagaimana kelemahan Iran memungkinkan kekuatan besar dapat mengontrol tujuan dari negaranya sendiri. Hal ini merupakan kenyatan yang harus dia rubah. "Amerika tidak akan pernah berperang dengan Soviet karena masalah Iran, untuk menyelamatkan Iran," demikian pernyataan perwakilan Amerika kepada Shah, dan Shah tidak akan melupakan percakapan itu.[48]

Di sisi lain, Uni Soviet sendiri tidak melakukan banyak hal untuk mengurangi kekhawatiran Shah. Moskow mendukung gerakan kiri Iran—yang beroposisi kepada pemerintah—seperti Mujahedin-e Khalq, Partai Tudeh, dan Fedayeen-e Khalq dengan harapan agar revolusi Komunis akan membuat Iran menjadi negara satelit bagi Soviet.[49] Dalam sebuah wawancara pada bulan Desember tahun 1947 dengan surat kabar Beirut *al Hawadis,* Shah menekankan bahwa kegelisahan Iran terhadap gerakan pan-Arabisme berujung pada pengaruh Moskow terhadap pemerintahan Arab yang memperjuangkan ideologi pan-Arab itu. Shah menegaskan bahwa Iran tidak sedang mencari permusuhan dengan dunia Arab, meskipun Palestina mendukung kelompok oposisi di Iran. Apa yang ingin dihindari Shah adalah sebuah situasi ketika aksi-aksi pejuang Palestina dan gerakan nasionalisme Arab membuat Soviet meningkatkan ancamannya terhadap Iran. "Kita akan terus berdiri di pihak pejuang Palestina, meskipun pada kenyataannya beberapa kelompok Palestina telah melatih para pemberontak Iran untuk melakukan infiltrasi terhadap wilayah kita, membunuhi warga, dan meledakkan berbagai instalasi," demikian pernyataan Shah. "Kami bisa membedakan antara tuntutan keadilan bagi Palestina dan pemberontakan yang ditujukan pada kami oleh pejuang Palestina sendiri. Apa yang saya takuti adalah bahwa warga Palestina bisa saja memungkinkan situasi global menggunakan kasus mereka sebagai alat bagi Soviet atau strategi global lainnya. Mesir, Saudi Arabia, Syiria dan negara Arab lainnya bisa saja memberikan bantuan kepada Palestina untuk menghindari jebakan itu."[50] Seiring berjalannya waktu, ancaman negara Arab akan menjadi faktor penting bagi pertimbangan strategis Iran. Seiring dengan meningkatnya ancaman negara Arab terhadap Iran, maka angkatan militer Iran membutuhkan bantuan Israel dan harus menjaga kesepakatan rahasia Israel.

Hubungan yang tidak terlalu rahasia

Iran memilih untuk menjaga agar kerjasamanya dengan Israel tidak terbuka ke publik. Di satu sisi, Shah meyakini bahwa hubungan terbuka dengan Israel akan mengganggu posisi Iran di hadapan negara Arab dan akan memicu oposisi negara Arab terhadap kebijakan Iran di Teluk Persia. Di sisi lain, Shah membutuhkan Israel untuk mengimbangi ancama Soviet dan negara-negara Arab pro-Soviet. Untuk meminimalisir publisitas hubungannya dengan Israel, Shah memutuskan untuk menjalin interaksi dengan Israel melalui sebuah agen polisi rahasia—*Sazeman-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar* (Organisasi Keamanan

47

48

49

50

Informasi dan Keamanan Negara, atau Savak).[51] Pada 1957, Shah memerintahkan intelijen Iran untuk berhubungan dengan intelijen Israel, Mossad, sekaligus mengelola kesepakatan sensitif Iran dengan Negara Yahudi, yang seringkali tidak atas sepengetahuan Kementerian Luar Negeri Iran. Militer Iran dan mata-mata polisi rahasia secara rahasia dilatih oleh pejabat intelijen Israel baik di Iran maupun di Israel. Israel juga memberikan pelatihan kepada 400 pilot Iran, anggota terjun payung, dan angkatan artileri serta menjual peralatan militer yang canggih.[52] Menurut keterangan salah satu mantan pejabat Iran, Mossad juga melatih Savak dengan cara siksaan dan teknik investigasi.[53]

Sementara itu, Teheran tetap menjaga kerahasian kunjungan para pejabatnya ke Israel. Para pejabat Iran berkunjung ke Israel melalui Turki dan paspor mereka tidak pernah berstempel Israel ketika sampai di Negara Yahudi itu. Prosedur ini dapat memastikan bahwa catatan perjalanan mereka hanya berupa kunjungan ke Turki dan tidak ada jejak kunjungan ke Israel.[54] (Hingga hari ini, kunjungan Yahudi-Iran ke Israel mengikuti cara di atas dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah Iran). Bahkan perkembangan diplomasi Iran di Israel tetap dirahasiakan. Sepanjang dekade 1970-an, enam diplomat Iran menjaga misi rahasia Iran di Israel tapi rekam jejak mereka menunjukan bahwa mereka bekerja di kota Bern, Swiss. Kedutaan Iran di Israel juga merujuk kepada "Bern 2" sebagaimana ada dalam dokumen Kementerian Luar Negeri Iran.[55] Iran bahkan mengajukan permohonan lokasi yang sebenarnya dari posisi mereka di hadapan diplomat Amerika, terlepas dari kepedulian Amerika Serikat baik terhadap keberadaan dan aktivitas diplomat Iran di Israel.[56] Meskipun Israel telah terbiasa dengan pendekatan rahasia ini, dan meskipun Israel menyadari adanya kesulitan yang dihadapi Shah untuk menciptakan keseimbangan sikap antara memenuhi tuntutan rakyat Iran sebagai sebuah negeri Muslim dan menetralisir gelombang radikalisme Arab, kebijakan kontradiktif Iran dan posisinya di depan Israel tidak pernah secara utuh diterima Tel Aviv. Jika Iran, sebagai sebuah negara Muslim, mampu secara terbuka menerima Israel, hal ini akan membantu Israel untuk meyakinkan negara Arab bahwa negara Yahudi merupakan karakter permanen dari masa depan di Timur Tengah. Israel telah membuktikan manfaatnya bagi Shah dan kepentingan nasional Iran, tapi Iran masih menolak untuk menerima secara penuh keberadaan negara Israel.

Kunjungan pertama Ben Gurion ke Iran pada 1961 menjadi sebuah pijakan bagi protokol rahasia.[57] Kunjungan ini tetap dirahasiakan, dan kunjungan berturut-turut dari perdana menteri Israel ke Iran dilakukan dengan cara yang sama. Beberapa tahun kemudian, diplomat Israel di Teheran memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengambil langkah yang lebih agresif terhadap Shah untuk merubah protokoler ini. Dengan membuat hubungan dengan Iran menjadi terbuka, Iran tidak akan memilih pilihan lain kecuali menerima keberadaan Israel secara *de jure*. Begitu pertimbangan pengambil kebijakan di Tel Aviv. Israel selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat

51
52
53
54
55
56
57

kesepakatannya dengan Iran terbuka ke publik.[58] Penasihat Golda Meir mengusulkan kepada Israel untuk menyimpan sebuah tanda pada bangunan kedutaan Israel di Teheran agar dapat dikenali secara jelas. Meir menolak usulan itu tetapi menerima rekomendasi kepala misi Israel, Meir Ezri, untuk meyakinkan kekuatan-kekuatan blok Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk menekan Shah agar secara terbuka mengakui Israel. Namun Shah menolak, dia bahkan menolak untuk bertemu dengan perwakilan Israel selama lebih dari tiga tahun kemudian.[59]

Sepanjang dekade 1970-an, Iran berhasil memenangkan akrobat diplomatik dalam menjaga aliansi geostrategisnya dengan sebuah negara yang tidak diakuinya secara legal, dan mengizinkan kehadiran Israel di Teheran tanpa mengakui misinya secara resmi sebagai sebuah kedutaan Negara Yahudi. Bendera Israel tidak dikibarkan di gedung perwakilan Israel di Teheran dan diplomat Israel tidak diundang dalam berbagai upacara resmi, sementara diplomat dari negara lain hadir. Dalam segala aspek kecuali upacara-upacara resmi, misi Israel berfungsi layaknya kedutaan negara lainnya. Meskipun ada hubungan yang tidak resmi antara kedua negara ini, kepala perwakilan Israel secara umum diakui sebagai perwakilan Israel untuk Iran, dan sejak tahun 1970-an perwakilan ini menikmati akses yang mudah kepada Shah. Pejabat Israel seringkali menemui Shah secara langsung, bahkan tanpa sepengetahuan Kementerian Luar Negeri Iran.[60] Meskipun nilai kemenangan simbolis atas pengakuan sebuah negara Muslim di Timur Tengah merupakan hal yang signifikan, Israel sangat berhati-hati untuk tidak mengkampanyekan isu ini terlalu keras karena akan memberikan efek negatif bagi substansi hubungannya dengan Teheran.[61] Sekalipun tidak optimal, hubungan dengan Iran tetap memberikan keuntungan bagi Israel. Menurut Ammen Ben Yohanan, diplomat elit Israel di Teheran pada dekade 1970-an, Israel "cenderung ingin menghindari diplomasi seremonial sepanjang substansi hubungan kedua negara tetap tercapai, sementara itu negara Arab dapat menerima hubungan dekat Iran-Israel sepanjang hubungan ini tidak terekspos ke publik."[62] Iran juga membutuhkan bantuan militer Israel.

Tumbuhnya Permusuhan Iran-Mesir

Shah telah belajar dari pengalaman pahit tentang bagaimana pengetahuan publik mengenai hubungannya dengan Israel dapat memperlemah kepentingan strategis Iran. Pada Juli 1960, seorang jurnalis asing bertanya tentang apakah Iran telah memutuskan untuk mengakui Israel. Tanpa berpikir panjang, Shah menegaskan bahwa Iran telah mengakui Israel secara *de facto* pada tahun 1951 melalui pemerintahan Mossadeq, "Iran sudah sejak dahulu mengakui Israel."[39] Pernyataan Shah ini berhasil memprovokasi Presiden Mesir, Nasser, yang secara tergesa-gesa memutuskan hubungan diplomatik dan melakukan propaganda sengit melawat Iran.[40] Tetapi perhatian utama Nasser bukanlah pada hubungan Iran dengan Israel, melainkan pernyataan liar Shah itu memberikan peluang bagi pemimpin Mesir untuk memperluas pengaruh Mesir di Teluk Persia sekaligus melawan ekspansi Iran di Teluk Arab. Pusat propaganda anti-Iran dari Arab mulai bergeser

58
59
60
61
62

dari Baghdad—rival Iran di Timur Tengah—ke Kairo.[41] Sikap agresif Mesir dan kerelaan mereka untuk bekerja sama dengan Moskow menjadi perhatian besar Teheran. Shah memprediksi risiko pertempuran militer dengan Mesir merupakan hal yang substansial—baik langsung atau tidak langsung melalui Irak. "Iran merupakan ancaman langsung bagi aktivitas militer Mesir di wilayah Teluk Persia," mantan intelijen Iran yang terlibat dalam kerjasama Israel-Iran memberikan penjelasan. "[Mesir] sedang membangun sebuah kekuatan armada alut yang bisa saja dikirim ke Teluk Persia untuk mendukung Irak sebagai bentuk konfrontasi langsung dengan Iran."[42]

Jika Iran mengalami pelemahan oleh Mesir dan Irak, maka pihak Arab akan mendapat dukungan dan militer Irak akan dibebaskan untuk ikut dalam serangan bersama negara Arab terhadap Israel. Tetapi selama Iran mampu mengimbangi kekuatan Irak dan mampu mengalihkan kekuatan militer Irak ke arah timur untuk menjauh dari Negara Yahudi, Israel telah mendapatkan pintu keselamatan yang penting meskipun kecil. Oleh karena itu, intelijen Israel memberikan layanan intelijen tingkat tinggi kepada Iran mengenai gerakan dan rencana militer Mesir—sementara kekuatan militernya sedang dipersiapkan untuk menghadapi serangan dari Irak atau Mesir. Bersama Turki, intelijen Iran dan Israel secara konsisten mengawasi kerjasama militer Soviet-Mesir-Irak. Tiga negara non-Arab ini mengawasi pergeseran militer Soviet yang ditujukan bagi Mesir dan Irak sebagai jalan pulang mereka dari Laut Hitam menuju Teluk Persia melalui Kanal Suez. Namun menjelang dekade 1960-an, situasi yang ada membuat perjanjian Israel-Iran pada 1950-an pelan-pelan meredup.

3- Bangkitnya Israel, Bangkitnya Iran

Lindungi saya!
—Pernyataan Richard Nixon kepada Shah, Kebijakan Pilar Kembar, Mei 1972.

Inti dari kerjasama antara Israel dan Iran pada dekade 1950-an dan 1960-an bukanlah sebuah perlawanan aliansi negara non-Arab terhadap dunia Arab, melainkan didorong oleh kesamaan kepentingan dan kerentanan bersama yang dimiliki Israel dan Iran. Mereka memiliki kepentingan yang sama karena mereka menghadapi ancaman yang sama. Adanya keseimbangan kekuatan memungkinkan terjadinya kerja sama Israel-Iran. Tetapi logika keseimbangan kekuatan ini berarti bahwa kerja sama ini akan berakhir jika masing-masing negara mampu mengatasi perselisihan dengan negara tetangga atau jika salah satu negara mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi ancaman masing-masing. Oleh karena konflik Arab-Israel berlangsung lebih hebat dibandingkan konflik Arab-Iran, maka Tel Aviv lebih membutuhkan Teheran daripada Teheran membutuhkan Tel Aviv. Dengan demikian, Iran nampak lebih berpotensi mengkhianati Israel daripada kemungkinan lainnya.

Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, terjadi perubahan signifikan dalam peta geopolitik di Timur Tengah; 1) kemenangan besar Israel atas negara Arab pada perang 1967; 2) meningkatnya ancaman Irak terhadap Iran dan Israel; pergeseran hubungan kekuatan strategis dari pengetatan (*containment*) menjadi lebih longgar (*detente*); 3) Mesir keluar dari aliansi Uni Soviet dan beralih ke blok Barat setelah perang Yom Kippur tahun 1973; 4) Iran mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diprediksi sebelumnya sehingga memiliki pengaruh di Timur Tengah; 5) Inggris memutuskan untuk menarik armada kapal mereka dari Teluk Persia yang memungkinkan Shah dapat memainkan peran dominan di internal dan eksternal wilayah tersebut. Berbagai situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kondisi *status quo* yang menjadi basis kerjasama Israel dan Iran.

Perang 1967

Perang 1967 berdampak pada perubahan persepsi Shah terhadap Israel. Kemenangan Negara Yahudi atas negara-negara Arab sekaligus pendudukan Israel atas sebagian wilayah Mesir, Yordania, dan Syria memaksa Iran untuk meninjau kembali hubungan regionalnya di Timur Tengah. Keengganan Shah untuk menyaksikan keseimbangan kekuatan antara Israel dan negara-negara Arab yang terlalu menguntungkan Tel Aviv tidak didorong oleh kekhawatiran munculnya Israel menjadi ancaman bagi Iran.[63] Saat itu Iran merupakan negara berpenduduk 41 juta orang dan berjarak ratusan mil dari Israel, yang hanya berpopulasi 4 juta orang. Berbagai faktor geopolitik membuat Israel tidak dapat menjadi ancaman bagi Iran.[64] Jika Israel kembali menjalin hubungan dengan Iran, maka Teheran akan selalu memodifikasi posisinya di Timur Tengah dan bergerak mendekat menuju blok Arab yang moderat. “Kami tidak merasakan kondisi tidak-aman karena Israel semakin kuat di Timur Tengah,” demikian penjelasan Mehdi Ehsassi, perwakilan Iran di PBB pada dekade 1970-an.” Ada aspek

63

64

geopolitik yang membuat Iran merasa lebih baik jika Israel tidak berada dalam keadaan lemah."[65]

Dalam pertimbangan keseimbangan kekuatan geopolitiknya, Iran tidak menginginkan Israel berada pada posisi lemah, tetapi juga tidak menginginkan Israel menjadi terlalu kuat. Posisi lemah Israel akan memberikan angin segar bagi negara Arab dan Soviet sekaligus mendorong mereka untuk kembali fokus pada Iran. Tetapi, jika Israel menjadi terlalu kuat, kondisi ini akan memberikan keuntungan sekaligus kerugian. Iran tentu saja diuntungkan dengan lemahnya negara-negara Arab, tetapi meningkatnya kekuatan Israel juga menimbulkan kecurigaan Iran atas kecenderungan ekspansionis Israel. Shah berkeyakinan bahwa perang 1967 membuat Israel berubah dari negara defensif menjadi negara agresif. Hal ini menimbulkan berbagai masalah bagi Iran. Karena kekhawatirannya terhadap kekuatan dan posisi negara tetangganya, Iran tidak menginginkan Israel menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah sehingga berpotensi menandingi keunggulan dan posisi strategis Iran di hadapan Washington. Lebih jauh lagi, agresifitas dan dominasi Israel akan mengganggu usaha-usaha Shah untuk menjaga hubungannya dengan Israel tanpa membuat negara-negara tetangga di dunia Arab marah.[66] Penolakan Israel untuk mengembalikan wilayah Arab dalam Perang Enam Hari membuktikan hal ini. Berbeda dengan harapan Israel, kekalahan pasukan Mesir tidak membuat Shah mendekat ke Israel dan mengakui keberadaan Negara Yahudi secara *de jure*. Sebaliknya, meskipun Shah mengirimkan ucapan selamat kepada pejabat Israel melalui jenderal Iran, Shah justru membekukan proyek Iran-Israel dan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Tel Aviv.[67] Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Yugoslavia pada akhir 1967, Shah menyatakan bahwa "setiap pendudukan wilayah oleh pasukan militer tidak dapat diterima. Solusi permanen atas konflik antara Israel dan negara Arab harus dirumuskan sesuai dengan piagam PBB."[68]

Washington juga merasakan perubahan sikap Iran dan berusaha mencari penjelasan mengenai hal ini.[69] Perubahan sikap ini ternyata memang bukan sekedar retorika saja tetapi memiliki substansi tersendiri. Pada 22 November 1967, Dewan Keamanan PBB merumuskan Resolusi 242 yang menyerukan "adanya penarikan pasukan militer Israel dari wilayah-wilayah yang sedang diduduki" dan menekankan "bahwa pendudukan wilayah melalui mekanisme peperangan tidak dapat diterima." Bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris, Iran mendukung resolusi ini dan secara pribadi menekan Israel untuk meninggalkan wilayah-wilayah tersebut.

Iran juga mendekati Amerika unltuk menekan Israel sekaligus mengambil posisi lunak ketika berhubungan dengan negara-negara Arab. Teheran berkeyakinan bahwa penolakan Israel untuk menghentikan pendudukan wilayah Arab akan memperpanjang dan memperparah konflik yang terjadi.[70] Tetapi Iran juga tetap mempertimbangkan kepentingan jangka panjang Iran dan konsekwensi jangka panjang dari tindakan Israel. Sebagaimana Mesir yang telah lebih dulu mengambil keuntungan dari kedekatan politik

65
66
67
68
69
70

antara Iran dengan Israel untuk meningkatkan kepentingannya di wilayah ekspansi Iran, penolakan Iran terhadap kebijakan ekspansionis Israel membuat hubungan Iran dengan dunia Arab semakin erat.[71] Sikap untuk mempertahankan prinsip kunci Resolusi 242—*bahwa pendudukan wilayah melalui perang adalah terlarang*—merupakan langkah penting untuk melindungi wilayah Iran dari ekspansi Arab atau Soviet. Fereydoun Hoveyda—mantan Kepala Misi Iran untuk PBB—menyatakan bahwa resolusi ini penting untuk menekankan prinsip bahwa Anda tidak bisa mendapatkan suatu wilayah melalui peperangan. "Maka ketika Israel mengatakan bahwa Tepi Barat merupakan bagian dari Eretz Israel (Israel Raya), penting sekali untuk menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima—pernyataan ini tidak ditujukan untuk membuat negara Arab senang tetapi kita memiliki kepentingan dengan wilayah Baluchistan dan Azerbaijan. Resolusi 242 sangat penting bagi kami," lanjut Hoveyda.[72] Kedua wilayah Iran ini secara historis telah menjadi basis bagi sebuah etnis-separatis kecil tetapi berpotensi memberikan masalah, dan Iran menginginkan adanya prinsip tegas yang dapat melindungi dua wilayah ini agar tidak memisahkan diri atau jatuh ke negara tetangganya. Oleh karena Tel Aviv menyadari bahwa Iran tidak terlalu senang dengan menguatnya posisi Israel, maka kecurigaan Tel Aviv atas maksud dari Shah mulai muncul.[73] Kekhawatiran Israel terbukti dengan semakin mendekatnya Iran ke blok negara Arab yang didorong oleh perubahan yang terjadi di Mesir.

Berakhirnya Era Nasser dan Manuver Mesir

Kekalahan besar negara Arab dibawah kepemimpinan Nasser dalam perang 1967 memaksa Kairo meninjau kembali strategi kepemimpinannya di dunia Arab dengan berpihak pada Moskow sekaligus menentang Amerika Serikat dan Iran. Mimpi Nasser untuk mengembalikan kejayaan Mesir hancur oleh dirinya sendiri dan Nasser terpaksa harus menurunkan ambisinya di Timur Tengah. Ketika Anwar Sadat—suksesor Nasser—meninjau kembali keberpihakan Mesir pada Soviet, hubungan yang semakin erat antara Mesir dan Iran mempengaruhi relasi Israel-Iran: Mesir mulai mengambil kebijakan luar negeri yang lebih moderat dan mengakui dukungan terbuka Iran kepada Arab dalam Resolusi 242. Hal ini merupakan tahapan penting untuk menurunkan ketegangan hubungan Arab dengan Iran.[74]

Melalui mediasi Kuwait, lobi antara Iran dan Mesir dimulai pada 1969. Iran menawarkan dua syarat untuk menjalin kembali hubungan dengan Mesir; *Pertama*, Teheran meminta Kairo menyampaikan permintaan maaf pada Iran atas provokasi terhadap Iran. *Kedua*, pihak pertama yang harus mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan ini adalah Mesir. Sadar atas kelemahan posisinya, Nasser menyetujui dan menerima syarat yang dirumuskan Shah tersebut. Nasser terpaksa menghadiri sebuah upacara yang mengumumkan kerja sama kembali Iran-Mesir ini pada bulan Agustus 1970. Satu bulan kemudian Nasser meninggal lalu diganti oleh Anwar Sadat, yang cenderung pro-Amerika dan semakin meningkatkan hubungan erat Mesir dengan Iran.[75] Pada Juli 1972,

71
72
73
74
75

presiden baru Mesir ini membuat langkah besar mengenai keberpihakannya pada blok Barat dengan mengusir lebih dari sepuluh ribu penasihat militer Rusia. Sebelum mengambil langkah besar ini, Sadat berkonsultasi dengan Shah. Shah sendiri sangat gembira dengan keberpihakan Sadat pada blok Barat dan menawarkan insentif ekonomi atas keberpihakannya pada blok Barat.[76]

Namun sebelum pengusiran ini terjadi, terlepas dari kecenderungan Shah yang ingin mempertahankan hubungan keamanan yang kuat dengan Israel, dia justru mulai mengambil langkah terbuka dengan negara Arab.[77] Misalnya, Shah melarang pejabat Iran menghadiri acara perayaan detik-detik lahirnya Negara Yahudi di gedung perwakilan Israel di kota Teheran.[78] Shah bahkan memprovokasi Israel dengan tidak mengundang kepala negara Israel dalam acara peringatan 2500 tahun Kerajaan Persia pada bulan Oktober 1970; kehadiran presiden Israel akan membuat blok Arab memboikot acara tersebut.[79] Perayaan besar ini justru diberitakan negatif oleh media Amerika Serikat yang menilai langkah Shah ini sebagai bentuk balas dendam terhadap Israel—dengan tidak mengundang Israel. Mentalitas monarki Iran membuatnya mudah dipengaruhi teori konspirasi dan percaya bahwa media di Amerika Serikat berada di bawah kontrol kepentingan Yahudi. Iran selalu menuduh setiap kritisisme media Amerika terhadap Iran merupakan bentuk usaha Israel untuk melemahkan Iran. Pihak Israel bisa saja terganggu dengan prasangka media yang dimiliki Shah tetapi Israel juga diuntungkan dengan prasangka tersebut. Dalam sebuah perbincangan dengan Shah, Shimon Peres, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, seringkali menjanjikan pemberitaan positif tentang Iran di Amerika Serikat untuk mendapatkan balas jasa dari Iran dalam aspek lainnya. “Meskipun kita tidak dapat memenuhi janji itu, kita tidak dirugikan dengan kenyataan bahwa Shah percaya bahwa kita memiliki kekuatan tersebut,” demikian penjelasan mantan diplomat Israel untuk Iran.[80]

Dalam beberapa kesempatan tertutup, penolakan Shah terhadap kebijakan-kebijakan Israel bahkan lebih keras. Dalam sebuah pertemuan rahasia antara Shah dan Menteri Luar Negeri Israel, Abba Eba, di Teheran pada 14 Desember 1970, Shah berulangkali menekankan pada Eban bahwa solusi perdamaian harus disepakati dan wilayah Arab harus dikembalikan.[81] Ini merupakan kutukan dari legenda Eban. Mencairnya hubungan antara Iran dan Mesir menyiratkan sedang melemahnya hubungan Iran-Israel. Ketika kekayaan dan kekuatan Iran meningkat, terutama karena didorong oleh kenaikan pendapat dari minyak, Teheran tidak terlalu termotivasi untuk memperkuat hubungan dengan Israel karena Iran menyadari bahwa prospek untuk memperbaiki hubungan dengan Arab lebih terbuka. Pada saat yang sama, kehadiran Iran dan menguatnya hubungan dengan dunia Arab meningkatkan kekhawatiran Israel bahwa Negara Yahudi ini tidak lagi diperlukan Iran.[82] Hubungan asimetris ini dibuktikan oleh keinginan para pejabat Israel untuk membangun hubungan politik antara dua negara ini—sebuah antusiasme yang tidak dapat dipenuhi Iran sendiri.[83]

76

77

78

79

80

81

82

83

Dari sisi kepentingan Iran, perubahan sikap Mesir terhadap blok Barat merupakan kemenangan strategis yang penting. Keruntuhan ideologi pan-Arab yang dibawa Nasser dan retaknya hubungan Arab-Soviet mampu mengurangi potensi ancaman blok Arab terhadap Iran atau propaganda Persia.[84] Kemunculan kekuatan negara Arab yang moderat dan pro-Barat secara signifikan mampu merubah pertimbangan strategis Iran. Misalnya, di bawah kepemimpinan Anwar Sadat, Mesir secara efektif mampu mengurangi citranya yang dipandang sebagai ancaman bagi Teheran. "Keuntungan terbesar [Iran] yang diperoleh dari pergantian dari Nasser ke Sadat adalah bahwa agitasi untuk melawan Iran di negara-negara Arab mulai berkurang. Tidak ada lagi pihak yang memprovokasi agar melawan Iran," demikian keterangan dari wakil komandan angkatan laut Iran.[85] Meskipun begitu, perubahan sikap Mesir ini membuat lingkungan strategis Israel menjadi semakin rumit dan aliansinya menjadi kurang jelas. Tidak seperti Iran, Israel tidak memiliki alasan yang jelas untuk menganggap bahwa kepemimpinan Sadat akan berdampak positif bagi Israel. Konflik Israel dengan Mesir berlangsung lebih parah dan tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan politik kekuatan-kekuatan adidaya—tidak seperti pandangan Iran terhadap negara-negara Arab. Secara umum, ancaman pan-Arabisme lebih berpotensi negatif bagi Israel dari pada bagi Iran. Para pemegang kebijakan di Tel Aviv memandang pan-Arabisme sebagai ancaman terhadap keberadaan Israel—pan-Arabisme sendiri merupakan kekuatan yang mampu menyatukan dan menggerakan sumber daya negara Arab untuk menghancurkan Negara Yahudi. Sementara itu, Iran memandang pan-Arabisme sebagai desain buatan Soviet dan dalam beberapa hal merupakan ancaman bagi kepemimpinan Iran di Timur Tengah. Perhatian Israel ini sangat beralasan. Israel memiliki konflik wilayah perbatasan dengan Mesir. Sementara orientasi Mesir yang saat ini menuju blok Barat membuat Mesir menghentikan ancaman pan-Arabisme ini ke arah Iran, hal yang sama tidak terjadi dengan Israel. Keperpihakan Mesir pada blok Barat tidak mengurangi perlawanan Mesir terhadap Israel. Bagi Israel, Mesir dibawah kepemimpinan Sadat tetap menjadi sebuah ancaman, sebagaimana dibuktikan dalam peristiwa Yom Kippur.

Akibatnya, pergesaran pertimbangan Iran menimbulkan banyak masalah bagi Israel. Beberapa bulan sebelum Sadat mengusir para penasihat militer Rusia, Golda Meir melakukan kunjungan pertamanya ke Teheran sebagai perdana menteri Israel. Sesuai peraturan umum, pesawat yang ditumpangi Meir akan tiba di bandara Mehrabad pada malam hari. Shah kembali memaksa Israel untuk menjaga hubungan dengan Mesir. Monarki Iran ini menegaskan bahwa koalisi Soviet dengan pemerintah Irak—di bawah Partai Komunis Baats—mengharuskan Mesir keluar dari blok Soviet. Dalam pandangan Shah, Israel tidak memahami perubahan yang terjadi di Timur Tengah dan tidak terlalu memberikan perhatian bagi kebutuhan dari kerjasamanya dengan Iran. Meir kemudian meninggalkan Teheran dengan putus asa. Perdana menteri perempuan ini kemudian mengeluh kepada asistennya bahwa setelah Shah memperbaharui hubungannya dengan Mesir, Shah tidak lagi seperti yang dulu."[86]

Meningkatnya Ancaman Irak dan Kebijakan *Detente*

84

85

86

Setelah Sadat berpisah dengan Uni Soviet, Moskow mengalihkan perhatiannya pada Irak. Irak dengan cepat menjadi musuh bagi Iran di wilayah Timur Tengah, meskipun Saddam Husein tidak berpotensi—setidaknya belum—menjadi seperti Nasser bagi Iran. Penolakan Sadat atas ide pan-Arabisme Nasser membuat Iran membatalkan seluruh agenda militernya terhadap Mesir, khususnya menghapuskan berbagai kemungkinan campur-tangan dan pemberontakan terhadap Mesir melalui Irak.[87] Meskipun begitu, rencana menyerang Irak terus dilanjutkan dan semakin intensif.[88] Keberadaan oposisi di Baghdad dan Perjanjian Persahabatan dengan Uni Soviet—termasuk komitmen bantuan militer dan ekonomi dari Soviet selama 15 tahun—membuat Iran menaruh kecurigaan pada pemerintah Irak. Perjanjian ini ditandatangani pada 9 April 1972 ketika Mesir dan Iran berada pada puncak kerja sama.[89] Meskipun Shah mengklaim bahwa Iran memiliki perhatian kecil terhadap Irak, mengingat bahwa Irak merupakan "kurcaci kecil yang menyedihkan", keraguan Amerika atas penjualan senjata ke Iran bisa membuat negaranya rentan oleh serangan militer Irak. Sepanjang awal dekade 1970-an, pengeluaran militer Iran sebagian besar didorong oleh kekhawatiran atas ancaman dari Irak.[90]

Israel juga menghadapi ancaman yang sama dan mengikuti perkembangan kekuatan Irak dengan kekhawatiran yang tinggi. Irak tidak pernah menjadi pendukung penuh dalam perang Arab melawan Israel, tapi para ahli militer di Israel khawatir jika Irak menjadi pemimpin dunia Arab dan bermaksud mengajak Israel dalam perang Arab-Israel selanjutnya. Kondisi ini bisa saja menguntungkan pihak Arab. Aliansi negara-negara Arab dengan partisipasi penuh Irak akan dengan cepat memenuhi wilayah Yordania untuk menempatkan pasukan Irak di perbatasan Israel sebelah barat. "Ada kekhawatiran yang tinggi dari Israel bahwa Irak akan menyerang Israel bersama pasukan Arab lainnya," Shmuel Bar dari lembaga *think thank* Israel, *Interdiciplinary Center* di Herzliya menjelaskan.[91] Pandangan bahwa Irak merupakan 'kartu liar' yang mengancam Israel merupakan persepsi umum di sepanjang 1970-an, terlepas dari unjuk kekuatan yang didemonstrasikan Mesir dan Syiria pada perang 1973. "Irak merupakan musuh yang nyata bagi kami," Letnan Jenderal Yitzhak Seqev, atase militer Israel untuk Iran, memberikan penegasan.[92]

Ketika kedekatan Arab-Iran menyebabkan retaknya hubungan Teheran dengan Tel Aviv, maka munculnya ancaman dari Irak mendorong terwujudnya basis goepolitik yang kuat untuk memperpanjang kerahasiaan hubungan kerjasama antara Israel dan Iran. Terlepas dari kedekatan hubungan Teheran dengan Mesir, kerentanan Iran atas serangan Soviet dan Irak terus menggangu Shah. Kenyataannya, ancaman Soviet terhadap Iran memang meningkat, yang disebabkan bukan karena meningkatnya ancaman Soviet terhadap Iran tetapi menurunnya determinasi Amerika untuk melindungi Iran. Ketika hubungan strategis Amerika Serikat bergeser dari *containment* menjadi *detente,* yang menyebabkan terciptanya hubungan ko-eksistensi yang damai-tapi tetap-kompetitif antara Amerika Serikat dengan Soviet, perbedaan sikap antara Israel dan Iran di hadapan

87
88
89
90
91
92

kekuatan adidaya menjadi faktor yang tidak terlalu penting dalam hubungan bilateral mereka. Tidak seperti Iran, Israel tentu saja bukan pihak yang terpengaruh oleh Perang Dingin. Dalam pandangan Israel, pemerintahan Arab yang pro-Barat belum tentu menjadi ancaman yang lebih kecil bagi keamanan Israel, begitu juga ketika ada negara Arab yang pro-Soviet—tidak secara otomatis menjadi musuh Negara Yahudi.[93]

Akan tetapi dengan diambilnya kebijakan *detente*, dinamika hubungan antar negara kemudian berubah. Perubahan ini mengakhiri pengaturan militer regional dari CENTO (*Central Treaty Organization between Iran, Pakistan, Turkey, and United States*—Badan Pusat Perjanjian antara Iran, Pakistan, Turki, dan Amerika Serikat), yang memungkinkan anggota CENTO memiliki kebijakan luar negeri yang lebih independen dan mengurangi ketegangan dengan Uni Soviet tanpa memunculkan friksi dengan Amerika Serikat.[94] Namun kebijakan *detente* juga menurunkan keinginan kekuatan adidaya untuk mengambil resiko dan mulai meninggalkan sekutu-sekutunya di berbagai wilayah, seperti kurang percaya dirinya sekutu-sekutu di Timur Tengah terhadap komitmen negara-negara adidaya untuk menjamin keamanan mereka. Bersamaan dengan munculnya Irak sebagai ancaman bagi Israel dan Iran, ketidakpastian Amerika untuk membendung pengaruh Soviet (dan negara Arab) di Timur Tengah membuat kerjasama Israel-Iran menjadi lebih penting.[95]

Penarikan Tentara Inggris

Kebijakan *detente* dan perpanjangan waktu yang berlebihan oleh Amerika—karena perang di Vietnam—juga memberikan peluang-peluang baru bagi Iran—yang tidak terjadi sebelumnya. Shah sudah lama bermimpi untuk mengambalikan lagi kejayaan Iran dahulu dan menjauhkannya dari ketergantungan terhadap kekuatan adidaya. Lebih penting dari itu, Shah menginginkan dominasi Iran di Teluk Persia—perairan ini ibarat halaman belakang Iran dan sangat strategis bagi keamanan negara. Shah berpandangan bahwa Teluk Persia harus dijaga oleh Iran secara langsung—bukan melalui kekuatan asing. Maka ketika Inggris mengumumkan penarikan seluruh armada militernya pada 1969 dari Kanal Suez dan mengakhiri kontrol mereka atas Teluk Persia, Shah menangkap sebuah peluang untuk meningkatkan posisi Iran secara meyakinkan sekaligus melakukan perluasan perannya di dalam proses pengambilan keputusan di wilayah Timur Tengah. Di tengah berkecamuknya perang di Vietnam, Amerika Serikat tidak memiliki cukup kekuatan untuk merebut kontrol atas Teluk Persia, sehingga negara-negara di Timur Tengah harus menjaga sendiri keamanan mereka. Kekosongan kontrol yang ditinggalkan Inggris segera ditindaklanjuti Iran. Shah kemudian berusaha keras melakukan lobi agar Iran diberikan peran sebagai 'polisi' di Teluk Persia, yang kemudian mengarahkan Presiden Amerika, Richard Nixon, pada kebijakan Tiang Kembar (*Twin Pillar policy*). Perkembangan regional yang penting ini semakin memperbesar ketergantungan Amerika Serikat pada Teheran—dari pada jalan keluar lainnya—dan sekaligus meningkatkan pengaruh Iran di Washington.[96]

93

94

95

96

Melaui kebijakan Tiang Kembar ini, Amerika Serikat menyerahkan keamanan Teluk Persia pada dua negara terkuat di regional tersebut, Iran dan Arab Saudi. Namun, karena Iran lebih padat penduduknya dan kekuatan militernya yang lebih kuat, dan karena Iranlah yang memiliki kontrol terbesar atas Selat Hormuz, tanggung jawab keamanan berada pada pihak Iran—sebuah situasi yang memuaskan Shah.[97] Gholam-Reza Afkhami, seorang penasihat Shah, berkeyakinan bahwa akar-akar kebijakan Tiang Kembar ini sudah ada sejak 1966 dalam sebuah kunjungan Nixon ke Iran. Nixon, yang saat itu tidak memiliki kantor resmi di Iran, menemui Shah selama beberapa jam dalam sebuah pertemuan pribadi. Selama pertemuan tersebut, Shah berpendapat bahwa Amerika terlalu berlebihan dan masifnya kekuatan militer Amerika yang tersebar di berbagai wilayah di dunia segera akan berdampak buruk bagi Washington. Shah kemudian mengusulkan agar Amerika Serikat mendorong kekuatan-kekuatan regional yang memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas agar mengambil peran dalam aspek-aspek keamanan di wilayahnya. Langkah ini akan membuat setiap kekuatan regional semakin terpengaruh kepemimpinan global Amerika Serikat sehingga mampu menjadi fondasi yang berkelanjutan bagi keamanan regional.[98] Apakah saran Shah ini menjadi faktor utama yang dipertimbangkan Nixon dalam keputusannya sebagai seorang presiden merupakan hal yang masih diperdebatkan. Pada waktu itu, gagasan tentang "pengaruh regional" menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan luar negeri Washington—dan sesuai dengan keinginan Shah. Meskipun masih diperdebatkan, Shah ternyata berulangkali menyampaikan sarannya di atas pada para pejabat Amerika.[99]

Pada akhir 1960-an, ketergantungan Amerika pada Iran tidak lebih besar dari pada ketergantungan Shah—yang berusaha meningkatkan independensinya dari Amerika Serikat—pada Amerika. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya pendapat minyak Iran dan juga sebagai akibat dari berlarut-larutnya peperangan Amerika di Asia Tenggara. Menjadi sekutu atau tidak, Shah tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil keuntungan dari peningkatan pengaruhnya.[100] Nixon dan Henry Kissinger dari *National Security Advisor* melakukan kunjungan singkat ke Teheran pada bulan Mei 1972 dalam perjalan pulang dari kunjungan pertama mereka ke Uni Soviet—dalam rangka penerapan kebijakatan *detente*. Selama perbincangan beberapa jam dengan Shah, Richard Nixon menjelaskan konsep kebijakan Tiang Kembar dan Nixon juga menjelaskan peran yang ia bayangkan akan diambil alih oleh Iran bagi keamanan Teluk Persia. Untuk membuat kebijakan ini lebih menarik hati Shah, Nixon menawarkan kuasa penuh pada Iran atas pembelian terhadap sebagian besar persenjataan non-nuklir yang diproduksi Amerika Serikat. Ketika pembicaraan ini mencapai kata sepakat, Nixon memandang Shah dengan dua mata kepalanya sendiri dan berseru,"Lindungi saya!"[101] Terlepas dari penolakan keras dari kalangan militer Amerika Serikat, Nixon telah mengambil sebuah kebijakan yang sama sekali baru dengan memberikan keistimewaan kepada sekutunya di Timur Tengah untuk mendapatkan akses penuh terhadap seluruh persenjataan non-nuklir yang diproduksi Amerika Serikat. Meskipun Kissinger membantah pemberian kuasa penuh tersebut, sebuah

97

98

99

100

101

memo rahasia bertanggal 25 Juli 1972, yang ditemukan di kedutaan Amerika Serikat di Teheran pada 1979 selama masa krisis penyanderaan, justru membantah bantahan Kissinger. Dalam memo untuk Sekretaris Pertahanan, Melvin Laird, dan Sekretaris Negara, William Rogers, Kissinger menulis bahwa "secara umum, keputusan atas penambahan peralatan militer harus diberikan terutama kepada pemerintahan Iran. Jika Iran memutuskan untuk membeli beberapa peralatan, maka penjualan persenjataan Amerika ini harus dilakukan dengan hati-hati—petunjuk teknis yang benar tentang kemampuan peralatan-peralatan tersebut harus disampaikan pada pihak Iran."[102]

Ketika kerentanan Amerika Serikat sedang memuncak, Shah dengan cerdik memperbesar kepentingan dan perannya—dengan memanfaatkan konsesi dari Amerika yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh sekutu Amerika lainnya. Sejak 1960-an, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Iran tumbuh hingga 12 persen per tahun, dan Investasi Domestik Bruto (IDB) mencapai 15 persen per tahun. Antara 1973 hingga 1974, PDB Iran mencapai nilai tertinggi hingga 34 dan 42 persen—yang muncul dari embargo minyak OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Country*-Organizasi Negara Eksportir Minyak). Pendapatan minyak Iran meningkat dari 5,4 juta dolar Amerika menajdi 19,4 juta dolar Amerika pada tahun 1974.[103]

Namun kekuatan yang besar juga memiliki konsekwensi berupa besarnya tanggung jawab dan kerentanan keamanan negara. Shah mengerti situasi ini dan berusaha meningkatkan perannya di tingkat regional dengan mengisi kekosongan kontrol pasca mundurnya pasukan Inggris, meningkatnya ketergantungan Amerika pada Iran, dan—barangkali yang paling penting—mendapatkan pengakuan dari negara Arab atas pentingnya pertumbuhan ekonomi Iran di atas. Meskipun begitu, ketika kekuatan geopolitik—yang paling penting adalah meningkatnya ancaman Irak—memaksa Iran menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Israel, ambisi Shah untuk menjadi kekuatan terbesar di Timur Tengah akan menjadi bayang-bayang hubungan Israel-Iran tersebut.

102

103

4-Pencarian Supremasi Iran

Kita bisa mendapatkan keuntungan dari persahabatan [dengan Israel],
Tapi mereka bukan sahabat sejati kita.
—Mantan diplomat Iran di Israel

Menjadi negara regional terkuat sudah menjadi tradisi bagi Iran dalam tiga ribu tahun perjalanan sejarahnya. Sejak tahun 550 SM dan tahun 630 M, Persia merupakan salah satu dari kekuatan dominan yang mampu mengalahkan Babilonia, Assyria, Mesir, Athena, dan Roma. Persia kemudian membangun kerajaan pertama di dunia yang wilayah kekuasaannya membentang dari Libya di sisi barat hingga Ethiopia di sisi selatan, Bulgaria di sisi utara dan India di sisi timur. Ketika kekaisaran Parthian dan dinasti Sassanian berkuasa, kejayaan Roma menghadapi lawan tandingnya. Iran memiliki sumber daya alam yang besar, posisi geostrategis yang unik, kebudayaan yang tinggi, dan populasi terbesar dibandingkan negara-negara tetangganya. Sadar atas kelebihan-kelebihan ini, Iran kemudian secara konsisten terus berusaha untuk memegang peran dominan dalam politik regional.[104] Kenyataan-kenyataan ini tidak lepas dari pertimbangan Shah, yang memimpikan hadirnya kembali kejayaan Iran dan mengembalikan Iran menjadi kekuatan besar yang pernah dicapainya. Hanya di bawah supremasi Iranlah, Shah berkeyakinan, wilayah Timur Tengah akan berjalan baik dan mampu menyelematkan diri dari perang dan pertumpahan darah. Iran merupakan "satu-satunya negara yang mampu menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," Shah menulis pada masa-masa akhirnya hidupnya dalam buku *Answer to History*.[105] Dalam persepsi bangsa Iran, negaranya merupakan kekuatan dominan yang alami di wilayah Teluk Persia; kelemahan negara tetangga Iran akan membuat mereka tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan posisi itu.[106] "Tidak ada satu pihakpun yang mampu menandingi kekuatan Iran, kebudayaan Iran, dan sejarah Iran," Gholam-Reza Afkhami menjelaskan." Kita harus menyadari bahwa untuk memahami mengapa Shah melakukan apa yang dia lakukan. Dan juga mengapa setiap orang di dunia ini berpandangan bahwa Shah merupakan sosok yang arogan"[107]

Washington sangat sadar terhadap tujuan Shah untuk menjadi kekuatan adidaya dan menemukan bahwa motivasi Iran ini menjadi dasar bagi ambisi-ambisi yang seringkali berbenturan dengan dengan Washington.[108] Ambisi reformasi ekonomi yang dimiliki Shah, begitu juga dengan belanja militer yang besar, ditujukan untuk mengoptimalkan potensi Iran sebagai negara adidaya di tingkat regional. Pada awal 1970-an, ada sebuah indikasi yang jelas bahwa Iran telah mencapai posisi tersebut. Selama 1960-an hingga 1970-an, Iran dengan cepat menguasai negara tetangganya baik secara ekonomi maupun militer, sehingga menjadikan Iran sebagai "kekuatan terbesar yang nyata di regional."[109] Pada 12 Februari 1971, menteri peradilan Shah menulis dalam buku hariannya bahwa Iran "dengan cepat berasumsi bahwa Iran memegang kepemimpinan tidak hanya di Teluk Persia tetapi

104
105
106
107
108
109

juga Timur Tengah dan seluruh negera produsen minyak."[110] Pendapatan minyak Iran melonjak dari jutaan menjadi miliaran. Sebagian besar dari pendapatan minyak ini digunakan untuk memodernisasi dan meningkatkan kapasitas militer Iran, termasuk memberikan pinjaman kepada tetangga Iran. Shah kemudian melakukan belanja senjata dengan meningkatkan alokasi dananya dari 6,10 milyar dolar pada 1973 menjadi 12,14 milyar dolar pada 1974. Pada 1976, belanja militer Iran meningkat 3 kali lipat hingga 18,07 milyar dolar.[111] Sementara itu, belanja militer Israel relatif konstan sepanjang tahun 1970-an, dan negara-negara Arab mengalami peningkatan pendapatan yang terutama disebabkan oleh naiknya harga minyak. Para pengambil kebijakan di Tel Aviv mempertimbangkan bahwa logika perimbangan kekuatan mengandaikan bahwa meningkatnya kekuatan negara-negara Arab seharusnya mendorong Iran untuk memperkuat hubungannya dengan Israel. Namun, sebagaimana yang seringkali dilakukan para pejabat Israel sebelumnya, mereka salah memperhitungkan tujuan sebenarnya dari Shah dan permainan besar yang telah Shah siapkan untuk Iran.[112]

Lebih dari Sekedar Supremasi Militer

Setiap kelebihan memiliki sisi negatifnya. Bagi Iran, meningkatnya kekuatan mereka mengharuskan Iran melakukan perubahan atas kebijakan luar negerinya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan baik dengan Iran. Tanpa pengakuan ini, Iran tidak dapat menikmati hasil dari posisi barunya itu. Shah sangat paham bahwa sebagai negara yang mendapatkan kekuatan besar, tingkat pengaruhnya juga meningkat. Untuk mempertahankan posisi barunya itu, Iran perlu mendorong sebuah perkembangan di beberapa wilayah pinggiran—dan, untuk menjaga kontrol atas proses perkembangan itu, Iran memerlukan sebuah peran politik yang sejajar dengan kemampuan ekonomi dan militernya. Peran ini tidak dapat begitu saja diperoleh—tetapi harus diberikan kepada suatu negara oleh tetangga-tetangganya. Jika tetangga-tetangga ini berpandangan bahwa berbagai kebijakan dari negara tersebut berpotensi menimbulkan banyak masalah dan ilegal, mereka bisa saja bergabung untuk mengambil posisi oposisi daripada menanggung beban geopolitik baru yang dibawa negara itu.[113] Dengan mendapatkan pengakuan dari negara-negara tetangganya, Iran akan memperoleh peran dalam proses pengambilan keputusan di Timur Tengah dengan menempati posisi pimpinan dalam lembaga seperti OPEC dan forum-forum keamanan di tingkat regional. Dengan posisi ini, Iran mampu memastikan bahwa tetangga-tetangganya akan mempertimbangkan kepentingan dan keinginan Iran, dan mengantisipasi berbagai kekuatan yang mengancam posisi Iran. Shah meyakini bahwa "satu-satunya cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan memegang kontrol politik atas lalu lintas distribusi minyak, sebagaimana yang telah dilakukan Amerika."[114] Shah paham sekali bahwa Iran saat ini membutuhkan peran politik yang sejajar dengan pertumbuhan kekuatan ekonominya. Dengan peran politik ini, Shah memprediksi bahwa Iran akan memiliki sebuah peluang untuk melakukan perubahan atas formasi kenegaraan di Timur Tengah

110

111

112

113

114

yang menguntungkan Iran dengan menghindari langkah-langkah yang beresiko dan dengan mendestabilisasi doktrin perimbangan kekuatan. Secara sederhana, Shah menganggap bahwa Iran sudah cukup kuat untuk mengakhiri permainan konflik ini dan berteman dengan musuh-musuh negara Arab dalam posisi yang lebih kuat. Namun, jika Iran mengambil peluang ini, di kemudian hari keputusan itu justru akan memaksa Iran untuk membangun hubungan dengan negara-negara Arab dari posisi yang lemah.

"Jika Iran sudah cukup kuat untuk membantu menghadapi situasi [di regional] oleh dirinya sendiri, dan hubungannya dengan Amerika Serikat semakin solid maka Anda tidak akan membutuhkan [Israel], sehingga kemudian arah gravitasi akan berada di pihak negara Arab," Afkhami menjelaskan.[115] Pada pertengahan 1970-an, Iran terlalu percaya diri, bahkan berlebihan. Dengan segala hal yang sudah terjadi, Shah tidak merasa bahwa peringatan Afkhami diatas mendapat jaminan. "Saat itu Teheran merasa bahwa Iran sedang berada pada posisi untuk melakukan perubahan atas struktur politik regional dan mengambil-alih status yang sangat strategis," Davoud Hermidas-Bavand—mantan diplomat Iran yang, tidak seperti diplomat lainnya, tetap tinggal di Iran pasca revolusi—menjelaskan.[116] Dalam permainan ini, Iran ingin menjadi pemain. Iran ingin menjadi pihak yang penting bagi setiap pihak, menjadi bagian dari permainan."[117] Shah merasa tersinggung ketika negara-negara tetangganya membuat sebuah keputusan tanpa berbicara terlebih dahulu dengannya. Dengan memiliki suara dalam setiap keputusan regional—sebagaimana negara adidaya memiliki suara dalam setiap keputusan global—Shah dapat memastikan bahwa ambisinya untuk menjadikan kembali Iran sebagai kekuatan penting regional tetap terjaga. "Bagi Shah, proyeksi terhadap kekuatan dominan dapat dia wujudkan dengan menjadi pihak yang diperhitungkan dan dimintai pandangan dalam setiap pengambilan keputusan," mantan diplomat Iran menjelaskan.[118] Namun ambisi Shah ini justru menimbulkan rasa takut dari negara tetangganya. Sementara Amerika Serikat dapat memahami dan memberi simpati atas ambisi ini, ("Aspirasi dan posisi Iran harus diperhatikan dengan serius. Ketika dunia berada dalam situasi yang terburuk dan tersulit, hal ini merupakan sesuatu yang masuk akal," Charles Naas, diplomat Amerika untuk Iran menjelaskan), maka negara-negara lain dengan penuh keyakinan berpandangan bahwa strategi defensif Iran untuk menjaga stabilitas kekuatannya segera akan berubah menjadi sebuah kebijakan hegemoni regional.[119] Keputusan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara Arab sekaligus mempertahankan agar Israel tetap berada di pihak Iran menjadi keputusan yang sulit dijalani oleh Shah. Dengan meningkatnya kekuatan Iran, keseimbangan antara hubungan strategis dengan Iran dan pengakuan dari negara Arab mulai memberikan angin segar bagi musuh-musuh sejarah Iran.

Munculnya Opsi Arab bagi Iran

Konflik antara Arab dan Iran memiliki akar sejarah yang panjang. Bekas luka yang disebabkan oleh invasi Arab pada abad 7 M dan proses Islamisasi Iran masih terlihat jelas;

115

116

117

118

119

Iran tetap bangga atas keberhasilannya membendung proses Arabisasi negaranya. Ketika Islam menjadi agama mayoritas di Iran, identitas etnik dan budaya Iran tetap tidak berubah, tidak seperti negara-negara lainnya di Timur Tengah. Iran kemudian menjadi sebuah negara Islam, bukan negara Arab. Situasi—yang menguntungkan Iran ini—menumbuhkan kebencian dari negara-negara tetangga Iran. Tigas ratus tahun pasca invasi Arab di Iran, pertentangan budaya antara Arab dan Iran mencapai titik didihnya dengan perang kosa kata yang dikenal dengan istilah *Shu'ubiya*. Perang kosa kata yang penuh dengan hinaan dan cacian ini, semakin memperkuat identitas Persia dari bangsa Iran dan semakin memperkuat persepsi bahwa menjadi seorang muslim tidak sama dengan menjadi seorang Arab. Konflik berabad-abad ini—yang tertanam kuat dalam persepsi bangsa Arab dan Persia—telah menimbulkan sebuah fanatisme yang merugikan kedua belah pihak. Di satu sisi, bangsa Arab percaya bahwa mereka adalah etnis yang lebih superior dibandingkan Iran: di sisi lain antagonisme Iran memiliki akar kuat dalam persepsi supremasi kultural mereka.[120] Persepsi ini terus bertahan hingga abad 20 dan tetap menjadi faktor dominan. Kenyatannya, sebagian pengamat berpendapat bahwa konflik Iran-Arab semakin meruncing sejak beberapa dekade terakhir.[121] Kemunculan nasionalisme Iran dan Arab pada abad 19 mendorong konflik Irab-Arab memasuki babak baru. Di pihak Iran, Reza Shah (ayah dari Mohammad Reza Pahlavi), yang terinspirasi oleh doktrin Presiden Turki Kemal Ataturk, berusaha merekonstruksi Kerajaan Persia dan mengurangi pengaruh budaya Arab, bahasa, dan agama dalam masyarakat Persia. Di pihak Arab, permusuhan Iran-Arab semakin diperbesar oleh golongan pengusung pan-Arabisme sebagai alat untuk menyatukan bangsa Arab.

Usaha-usaha untuk memulihkan hubungan Persia-Arab merupakan salah satu dari dua faktor yang menyulitkan Iran—pada dekade 1970-an—untuk mencapai posisi terkuat Timur Tengah. Di satu sisi, Shah Mohammad Reza Pahlavi harus menjaga stabilitas regional untuk mengantisipasi intervensi Amerika dan Uni Soviet agar tidak menganggu pengaruh Iran di Timur Tengah. Shah telah berusaha untuk memenangkan dominasi atas Teluk Persia dengan memanfaatkan hengkangnya pasukan Inggris dari Teluk Persia; Shah tidak ingin dominasi atas Teluk Persia ini jatuh ke tangan Moskow atau Washington.[122] Di sisi lain, gagalnya rekonsiliasi Arab-Persia membuat Arab tidak akan menerima munculnya Iran sebagai kekuatan baru dan klaim Iran atas peran politik yang lebih luas di Timur Tengah. Arab memandang kekuatan baru Iran dan nasionalisme Persia ala Shah ini dengan penuh kecurigaan dan cenderung tidak sudi memberikan kuasa politiknya pada Iran. Bahkan sebuah kerajaan kecil Arab pun nampak akan mencegah usaha Iran untuk mendapatkan legitimasi dari Arab sekaligus peran sebagai pemimpin di regional Timur Tengah.[123] Secara sederhana, jika ingin diakui dan diterima sebagai pemimpin di Timur Tengah, "Iran harus melayani dan memenuhi keinginan Arab."[124]

Shah kembali gagal mengatasi kecurigaan dan resistensi Arab. Pada 1972, Shah mencoba membentuk sebuah lembaga multilateral bagi keamanan Teluk Persia agar menjadi legitimasi bagi kebijakan Tiang Kembar-nya Nixon. Usaha ini gagal karena Arab

120

121

122

123

124

menolak untuk bergabung; Arab khawatir atas ambisi hegemoni Shah di regional Timur Tengah.[125] Peran dominan Iran di lembaga OPEC—sebuah lembaga yang juga strategis bagi perkembangan internal dan eksternal Iran—juga sangat penting untuk memperbaiki hubungan Iran-Arab. Melalui lembaga OPEC, Shah juga menghadapi kegagalan.[126] Dengan tumbuhnya perekonomian Iran yang didorong oleh melambungnya harga minyak dunia, Iran mulai memanfaatkan kekuatan ekonomi ini untuk tujuan-tujuan politik.[127] Shah mulai memperbaiki hubungan dengan Arab dengan memberikan bantuan-bantuan keuangan bagi negara Arab.[128] Pada tahun 1974, Shah memberikan dana pinjaman sebesar 850 juta dolar kepada Mesir, 7,4 juta dolar kepada Yordania, 30 juta dolar kepada Maroko, dan 150 juta dolar kepada pemerintahan pro-Soviet di Syiria.[129] "Warga Syiria sangat membutuhkan [minyak kami]. Kami sebenarnya sedang membeli pertemanan dengan mereka melalui sogokan-sogokan ini. Shah sangat paham bahwa kami tidak akan menjadi teman yang baik, tapi bantuan keuangan ini dapat membantu," Mehdi Ehsassi, mantan perwakilan Iran di PBB, menjelaskan.[130]

Namun bantuan keuangan Iran ini hanya memberikan efek jangka pendek, khususnya karena pemerintahan negara-negara Arab bisa mendapatkan dukungan keuangan dari negara-negara Arab kaya-minyak di Teluk Persia. Shah kemudian menyadari bahwa hubungannya dengan Israel menjadi faktor penghambat terjalinnya hubungan erat Iran dengan Arab. Kritik Arab atas hubungan Iran dengan Israel tidak bisa lagi dihentikan. Dalam sebuah surat kepada Shah, seorang ahli minyak Arab, Sheikh Tariki menyampaikan kekecewaan Arab terhadap Iran: "Anda paham bahwa apa yang dilakukan Israel pada saudara Muslim Anda, Anda tahu bagaimana mereka menodai Masjid Al Aqsha dan pasukan militernya memakai sepatu ketika berada dalam masjid dan menara. Lalu Anda masih menjalin hubungan dengan mereka, dan memberi mereka minyak mentah yang sangat berperan penting dalam menggerakan kekuatan militer mereka untuk melawan saudara Muslim Anda. Setelah semua yang Anda lakukan, apakah mungkin Anda dapat menjalin hubungan baik dengan negara Arab?"[131]

Ketika Iran semakin kuat, Shah semakin merasa perlu untuk mendapatkan pengakuan dari Arab atas aspirasi politiknya sekaligus Iran juga semakin rentan mendapatkan kritik dari Arab. Di luar konteks politik ini, muncul sebuah orientasi baru di Teheran—opsi Arab-Iran; yaitu daya tarik posisi Arab dalam konflik Arab-Israel. Artinya, keberatan Israel menjadi tidak relevan bagi Iran. Shah "tidak perlu memainkan irama [yang diinginkan Israel]. Shah sangat, sangat khawatir jika ada satu saja pemimpin negara Arab yang mengkritik dirinya, tapi Shah tidak akan khawatir jika [Perdana Menteri Israel Menachem] mulai mengkritik dirinya," mantan wakil komandan angkatan laut Iran berkomentar. Misalnya, Iran menunjukkan tingginya perhatian terhadap opini negara Arab tentang kerja sama militer Israel-Iran. Kerja sama militer dengan Israel cenderung mengisolasi pasukan angkatan darat dan udara karena kedua pasukan ini "ada di wilayah Iran dan tidak terlihat dari luar. Kami tidak bisa mengoperasikan kapal perang kita di

125

126

127

128

129

130

131

wilayah Teluk Persia ketika senjata misil Israel (Gabriel) berada di atas kapal," komandan angkatan laut berkomentar.[132] Shah—karena sadar bahwa hubungannya dengan Israel membuat Iran sulit mendapatkan posisi penuh sebagai pemimpin regional—kemudian mencari peluang untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan-kebijakan Israel melebihi keengganan Iran untuk memberikan pengakuan diplomatik terhadap keberadaan Israel. Iran sudah mempersiapkan diri untuk menunjukkan independensinya di hadapan negara Arab. Ujian pertama bagi orientasi baru Iran ini adalah ketika negara Arab menunjukkan kekuatan militernya pada perang Yom Kippur.

Israel "Tertangkap Celananya Melorot"

Kekhawatiran Iran atas manuver Anwar Sadat terbukti dalam perang Yom Kippur. Pada 6 Oktober 1973, secara mengejutkan, pasukan militer Mesir dan Syria menyerang Israel sekaligus menghancurkan citra pasukan pertahanan Israel sebagai pasukan yang tak terkalahkan—peristiwa ini terjadi hanya 6 tahun sejak perang 1967.[133] Israel terlalu meremehkan kekuatan pasukan negara Arab. "Pasukan Israel yang perkasa tertangkap dengan kondisi celananya melorot pada tahun 1973," merupakan ungkapan ilmuwan Israel tentang peristiwa ini.[134] Meskipun Israel kemudian menyerang balik Arab, kekalahannya ini mendorong negara-negara di Timur Tengah mempertimbangkan kembali persepsi mereka tentang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Perang ini telah menghancurkan persepsi tentang keperkasaan militer Israel, yang secara signifikan berdampak pada peta politik di regional Timur Tengah.

Perang Yom Kippur menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Iran. Di satu sisi, Iran tidak menginginkan kemenangan pihak Arab, yang akan membuat negara-negara Arab sepenuhnya melenyapkan Israel lalu hanya fokus pada Iran.[135] Israel sangat sadar titik lemah dalam hubungannya dengan Iran ini, sebagaimana doktrin periperial secara keseluruhan. Sama halnya ketika Israel mencoba untuk merusak hubungan Arab-Iran, Tel Aviv mengakui bahwa Iran memiliki kepentingan untuk mempertahankan permusuhan antara Israel dengan tetangga-tetangga negara Arab. "Shah sangat cerdas," Yitzhak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, memberikan penjelasan pada saya di rumahnya yang terletak di luar Tel Aviv. Sambil membuka kembali album foto dengan kolega-koleganya di Iran dulu—mayoritas para jenderal di bawah pemerintahan Shah—Segev mengakui adanya keterbatasan kerja sama antara Israel dengan Iran. "Kenyataan yang Shah dapati adalah bahwa seluruh negara Arab membenci Israel. Israel merupakan subjek kemarahan seluruh negara Arab," Segev berkomentar.[136] Di satu sisi, kemenangan Israel bisa membuat usaha-usaha Iran untuk menetralisir blok Arab menjadi lebih sulit. Munculnya pemerintahan pro- Barat di Mesir merupakan berkah tersendiri bagi Shah, sebab dia kemudian mampu mengurangi ancaman Arab terhadap Iran. Israel berpandangan bahwa kemenangan penting Israel mampu menjadi tonggak keruntuhan rezim Anwar Sadat sehingga Mesir kembali menjadi negara pro-Soviet.[137]

132

133

134

135

136

137

Kemenangan cepat kedua belah pihak bisa berdampak buruk bagi Iran karena akan meningkatkan gengsi Israel dan Arab. Keamanan posisi Iran dapat dipertahankan dengan tetap memastikan bahwa peperangan antara Israel dan Arab berakhir dengan kemenangan yang tidak terlalu telak, sebab kemenangan telak salah satu pihak akan mengancam usaha Iran untuk mendapatkan supremasi di regional Timur Tengah.[138] Meskipun begitu, perang yang berkepanjangan memiliki bahaya tersendiri; kekuatan adidaya akan mempunyai alibi untuk mengintervensi kembali keamanan di Teluk Persia. Kemungkinan ini mendapatkan perhatian penuh di Teheran.[139] Sebagainya konsekwensinya, Iran sangat hati-hati "untuk tidak menyimpan gas di dalam kobaran api (peperangan)."[140] Perhatian utama Teheran adalah bahwa Uni Soviet akan diuntungkan dengan perang berkepanjangan Amerika di Vietnam sekaligus mengancam dominasi Iran di Teluk Persia, yang pada gilirannya akan membahayakan kontrol Iran atas lalu lintas distribusi minyak dan sehingga akan mengganggu pertumbuhan kekuatan Iran, baik secara internal maupun eksternal.[141]

Instabilitas atau peperangan yang berkepanjangan akan menjadi alasan bagi Uni Soviet (untuk melakukan intervensi, *pen*)—yang menimbulkan kekhawatiran Shah terhadap agresifitas kebijakan luar negeri Israel. Akibatnya, meskipun berharap agar Arab dan Israel saling mewaspadai satu sama lain, Iran tidak menginginkan terjadinya peperangan antara Israel dan Arab—yang berpotensi melahirkan dampak yang tidak diinginkan dengan munculnya kekuatan dominan baru di regional Timur Tengah. Dokumen rahasia Departemen Luar Negeri AS bulan April 1974 mengungkapkan secara detail kekhawatiran Shah atas kemungkinan di atas :

> Shah memberikan perhatian khusus pada kebijakan *detente* kita dengan USSR dan kemungkinan intervensi Soviet di Timur Tengah. Shah percaya bahwa aktifitas Soviet di Timur Tengah menunjukkan adanya kelanjutan penggunaan negara-negara *proxy* seperti Irak dan Yaman Selatan untuk membantu Soviet mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya. Shah tetap memberikan perhatian pada potensi instabilitas—dan manuver Soviet dalam memanfaatkan kondisi tersebut—di beberapa negara tetangga Iran. Shah memberikan perhatiannya pada gerakan-gerakan radikal di Teluk Persia; permusuhan Irak terhadap Iran. Shah mengakui adanya kebutuhan untuk memperbaiki hubungan dan kerjasama dengan beberapa pemerintahan Arab yang lebih moderat—sesuatu yang sudah diusahakan Shah sejak lama. Usaha untuk membangun hubungan ini tidak mudah karena kewaspadaan Arab pada Iran yang sudah ada sejak dulu.[142]

Tetapi Uni Soviet bukanlah satu-satunya penggangu potensial atas dominasi Iran di Teluk Persia. Amerika Serikat—sekutu dan pendukung Iran—juga dianggap sebagai rival bagi Shah, meskipun bukan sebagai musuh Iran.[143] Shah menentang Amerika Serikat secara terbuka atas kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di wilayahnya, karena "Shah tidak

138
139
140
141
142
143

menginginkan ada pihak yang menghalangi ambisinya untuk mendominasi Teluk [Persia], dan Shah menganggap bahwa pangkalan militer AS di Bahrain merupakan ancaman bagi kekuasaannya."[144] Afkhami menyatakan,"Jika Amerika ada di Timur Tengah, maka Iran kemungkinan tidak dapat memiliki peran yang diinginkannya."[145] Meskipun Iran berusaha untuk mendorong Amerika Serikat agar memberikan perlindungan dari serangan Soviet atau Arab, Iran tetap tidak menginginkan kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di wilayah yang dianggap Iran sebagai daerah kekuasannya. Dengan menjaga stabilitas regional di bawah kepemimpinannya, Iran mampu mengantisipasi penetrasi Washington dan Moskow atas Teluk Persia.[146]

Dengan target-target di atas, Shah sangat berhati-hati mengambil langkah selama perang Yom Kippur, untuk mengantisipasi kemenangan dari kedua belah pihak (Arab dan Israel, *pen.*) sekaligus menghindari ketidakstabilan dan peperangan yang berkepanjangan. Sikap Iran yang menjaga jarak dari Israel ditujukan untuk memperlihatkan pada negara-negara Arab bahwa kepemimpinan regional Iran akan memberikan keuntungan bagi Arab. Maka Iran secara normatif memilih posisi netral sepanjang berjalannya perang—pilihan yang menimbulkan banyak kekecewaan Israel—meskipun kekuatan negara-negara Arab semakin menguat. Tidak seperti kondisi ketika perang 1967 terjadi, saat ini Teheran memandang aspirasi perang Arab sebagai sesuatu yang logis.

Teheran secara langsung memberikan bantuan kepada negara-negara Arab yang sedang berperang—langkah yang sangat kontradiktif dengan hubungan Iran-Israel. Anwar Sadat secara pribadi menelpon Shah pada hari pertama peperangan untuk meminta suplai minyak mentah. Shah menyetujui permintaan tersebut, dan dalam waktu 24 jam sebuah kapal besar bermuatan minyak dikirim ke Kairo. Kedermawanan dan sikap bersahabat Shah ini memberikan kesan mendalam bagi Anwar Sadat.[147] Iran juga memperpanjang bantuan kesehatan bagi negara Arab dan mengirimkan pesawat lengkap dengan pilotnya untuk membantu negara Arab menyelesaikan persoalan logistik. Pesawat-pesawat Iran mengangkut satu batalion tentara Arab Saudi menuju Syria di Dataran Tinggi Golan. Di lokasi tersebut, pesawat ini kemudian mengangkut anggota pasukan Syria yang terluka ke Teheran untuk mendapatkan perawatan medis.[148] "Itulah bantuan yang bisa saya berikan—mengingat bahwa Saudi merupakan saudara kita sesama Muslim, dan saya sudah sejak lama ingin memperkuat persahabatan ini," Shah berbicara kepada Kepala Pengadilan, Asadollah Alam.[149] Langkah-langkah yang dilakukan ini segera memberikan efek positif bagi Iran, ketika Irak dan Sudan sepakat untuk menormalisasi hubungan dengan Teheran. Untuk memperkuat komitmen Iran ini, Shah melarang relawan Yahudi-Australia dalam pasukan militer Israel masuk ke Iran melalui Teheran.[150]

Iran bahkan berperan aktif ketika Soviet memberikan bantuan kepada negara Arab. Pada awal Oktober 1973, Soviet meminta izin kepada Iran untuk mengirim peralatan militer ke Baghdad (untuk digunakan dalam peperangan dengan Israel) melalui ruang udara Iran. Shah menolak permintaan Soviet ini tetapi tetap mengizinkan empat pesawat

144

145

146

147

148

149

150

sipil Soviet untuk mengangkut suku cadang ke Arab. Shah tidak berbicara terlebih dahulu dengan Amerika Serikat dan tidak menginformasikan kepada Washington mengenai keputusannya ini hingga hari ke-10 pasca keputusan di atas diambil. Wakil menteri luar negeri Iran, Ahmad Mirfendereski, kemudian memberikan izin atas lima pesawat Soviet lainnya—untuk melewati ruang udara Iran, *pen.* Keputusan tidak resmi ini membuat Mirfendereski kehilangan pekerjaannya, meskipun kita masih belum mendapatkan penjelasan tentang apakah keputusan Mirfendereski ini bertentangan dengan keinginan Shah atau apakah Mirfendereski dipecat karena telah mengambil keputusan tanpa proses otorisasi yang benar. Menurut mantan komandan angkatan laut Iran, masalah ini tidak berkaitan dengan dengan substansi keputusannya melainkan berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan itu sendiri. "Masalahnya adalah bahwa *dia* [Mirfenderenski] telah mengambil keputusan. Apakah *dia* sudah meminta masukan Shah, Shah kemungkinan akan memberikan persetujuan juga."[151]

Pada saat yang sama, Iran menolak untuk mendukung embargo minyak yang dilakukan negara-negara Arab atas Israel dan tetap memberikan suplai minyak kepada Israel sepanjang peperangan. Iran sebenarnya memiliki kebijakan resmi tentang pelarangan penggunaan minyak sebagai alat politik. "Kami tidak pernah setuju terhadap tindakan embargo minyak pada negara manapun," seorang mantan duta besar Iran menjelaskan. "Kami tidak percaya pada senjata itu [minyak, *pen.*]."[152] Kebijakan ini membuat Iran dapat menjual minyaknya ke semua pihak yang berkonflik.[153] Iran juga menyuplai Pasukan Pertahanan Israel dengan berbagai persenjataan termasuk mortir yang sangat dibutuhkan Israel.[154]

Shah memutuskan untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara Israel dan Arab dengan membantu kedua belah pihak daripada memperkuat kebijakan *balance of power*—ketika negara Arab kekuatan, maka dukungan Iran terhadap Israel akan lebih besar. "Kami tidak ingin menjadikan Israel sebagai teman dengan menjadikan Arab sebagai musuh," seorang mantan duta besar Iran menjelaskan.[155] Iran tidak pernah memiliki keberpihakan pada kedua belah pihak yang berkonflik, dan tidak bisa serta merta berpihak pada Israel, meskipun dua negara ini memiliki kesepakatan dalam berbagai hal. "Politik adalah politik," Duta Besar Fereydoun Hoveyda berkomentar dingin—dia juga mantan kepala Misi Permanen Iran di PBB. "Pada akhirnya, Iran hanya mengikuti kepentingan nasionalnya saja."[156]

Dalam urusan politik atau bukan, Negara Yahudi merasa sudah dikhianati Shah. Para pemimpin Israel percaya bahwa kekalahan mereka dalam peperangan membuat Shah mempertimbangkan kembali strategi aliansi Iran dengan Israel. Israel "sangat khawatir dan ketakutan terhadap perubahan perilaku Shah pada Israel dan Arab pasca perang Yom Kippur," Professor Soli Shavar dari Universitas Haifa menjelaskan.[157] Para pejabat Israel seringkali mencoba untuk meyakinkan Iran agar merubah kebijakannya dengan

151

152

153

154

155

156

157

argumentasi bahwa Iran tidak tahu siapa sahabat Iran yang sebenarnya.[158] Meskipun Iran dan Israel tidak memiliki hubungan kerja sama yang resmi, Israel tetap berharap, pada prakteknya, Iran bisa menjadi sekutu Israel—didorong oleh kesadaran atas kesamaan tujuan-tujuan geostrategis dan kerjasama intelijen kedua negara. Namun, sementara Israel berusaha mengimbangi kekuatan Arab melalui hubungannya dengan Iran—yang dipandang sebagai sekutu dan teman—Teheran justru memiliki pandangan yang lebih rumit. Teheran tetap menjaga agar kebijakan luar negerinya cenderung tidak memihak dan pragmatis tanpa membuka sedikitpun ruang persahabatan. Iran tidak pernah mendefinisikan dirinya sebagai negara yang berada di pihak Israel, dan Iran kemudian membedakan antara "sahabat" dan "persahabatan". "Kami bisa saja mendapatkan keuntungan dari persahabatan [dengan Israel], tetapi mereka bukanlah sahabat kami yang sebenarnya," mantan diplomat Iran di Israel menyampaikan pada saya secara terbuka.[159] Segera setelah perang berakhir, Mesir dan Irak bergabung dalam sebuah resolusi untuk membangun sebuah wilayah-bebas-senjata nuklir di Timur Tengah. Target dari resolusi ini sangat jelas (Israel, *pen*)—mengingat monopoli Israel atas pengembangan nuklir di Timur Tengah.[160]

158

159

160

5-Menyambut Kekalahan dalam Momentum Kemenangan

Kami kehilangan rasa percaya diri di hadapannya. Dia orang gila. Dia orang idiot.
—Yaacov Nimrodi, atase militer Israel di Iran, ketika mengomentari Shah dan keputusannya untuk menandatangani Kesepakatan Aljazair.

Saya terus mengutuk Iran di sepanjang jalan menuju Teheran.
—Eliezer Tsafrir, kepala operasi Mossad di utara Irak, ketika bereaksi atas Kesepakatan Aljazair

Perang Yom Kippur memaksa Israel untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Iran. Ketika peperangan berlangsung, saat Israel menghadapi ancaman atas keberadaan Negara Yahudi, Shah tidak memberikan bantuan kepada Israel untuk mengimbangi kekuatan Arab. Shah justru berusaha agar terjadi keseimbangan hubungan dengan Israel maupun Arab—dengan tujuan memperkuat posisinya di regional Timur Tengah.

Perang ini telah menunjukkan bahwa kedekatan Mesir ke blok Barat tidak perlu dimaknai sebagai usaha untuk menghindari perang dengan Israel. Dengan atau tanpa Nasser, Mesir tetap menjadi musuh besar dan ancaman yang serius. Pada saat yang sama, Israel merasa percaya diri atas berlarut-larutnya konflik Iran-Irak, Israel juga berada pada posisi tidak aman terkait dengan hubungan Iran-Mesir—dan dampak hubungan tersebut bagi hubungan Israel dengan Iran. Shah tidak pernah membicarakan rencana aksinya dengan Mesir kepada Israel—padahal pembicaraan seperti ini biasa dilakukan dengan Irak.[161] Situasi ini menjadikan Mesir lebih problematik bagi Israel. Soviet mendukung negara Arab selama peperangan sekaligus menunjukan bahwa tujuan, kekuatan, dan kemampuan ofensif kerajaan komunis itu dapat menjadi ancaman berbahaya. Pada saat yang sama, kekuatan Israel di sisi timur semakin menguat. Israel telah menghadapi pasukan gabungan negara-negara Arab sebanyak tiga kali dalam dua puluh lima tahun terakhir. Meskipun tidak ada satu pun dari tiga peperangan itu yang menunjukan kekuatan penuh Irak. Irak memiliki ambisi dan potensi untuk menjadi negara Arab terkuat, sehingga Israel tidak bisa tidur nyenyak karena permusuhan Baghdad yang berlanjut atas Israel. Irak telah meningkatkan kemampuan serangannya dengan membeli rudal Scud dan mengembangkan keterampilan untuk menyerbu Yordania dan menduduki perbatasan Israel sebelah timur dalam waktu empat puluh delapan jam. Terlepas dari sikap dingin Iran pada Israel, Negara Yahudi itu lebih membutuhkan Iran pasca berakhirnya peperangan daripada sebelumnya. Israel tidak punya pilihan lain selain menjaga hubungan dengan Teheran karena Israel tidak bisa melakukan manuver lebih jauh untuk memilih kebijakan atau sekutu lainnya.

Untuk membangun kembali hubungannya dengan Iran, pada 1973 Israel melantik Uri Lubrani sebagai kepala misi Israel di Teheran. Lubrani dilahirkan di Jerman pada 1926, dia kemudian bergabung dengan *Haganah* (Departemen Keamanan) di usia dini—sebuah organisasi paramiliter Yahudi dan perintis Pasukan Keamanan Israel, pasca berlakunya Mandat Inggris atas Palestina. Setelah negara Israel berdiri, Lubrani kemudian bekerja di

161

Kementerian Luar Negeri dan menempati berbagai jabatan tinggi, termasuk penasihat Perdana Menteri David Ben-Gurion untuk masalah-masalah negara Arab. Kedekatan Lubrani dengan Ben-Gurion ditunjukkan melalui keinginan Lubrani untuk membangun hubungan dengan negara-negara di wilayah pinggirian, sebagaimana yang selalu diperjuangkan Ben-Gurion. Dari tahun 1965 hinga 1968, Lubrani menjabat sebagai duta besar Uganda, Rwanda, dan Burundi—ketekunan intelijennya membuat Lubrani menjadi orang ayng paling banyak memiliki informasi tentang tiga negara tersebut—seorang yang selalu menjadi rujukan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Lubrani kemudian menjabat duta besar Israel untuk negara di wilayah pinggiran lainnya, Ethiopia.[162]

Lubrani memiliki perhatian khusus terhadap budaya dan kohesivitas nasional Iran. "Dalam kunjungan pertama saya ke Iran, saya mengunjungi sebuah desa kecil," Lubrani mengenang pengalamannya dalam sebuah wawancara di rumahnya, Tel Aviv. "Desa itu sangat miskin; desa itu tidak memiliki air dan fasilitas dasar lainnya. Tetapi pada malam hari, penduduk desa berkumpul untuk mendengar orang tua di desa itu membaca *Shahname*."[163] *Buku sang Raja* atau *Shahname* ditulis pada abad ke-10. *Shahname* merupakan karya yang sangat menakjubkan, yang bercerita tentang perjalanan sejarah bangsa Iran sejak masa mitologi hingga kerajaan Persia. Menurut sebagian besar ahli, kesatuan kultural serta politik yang ada dalam *Shahname* merupakan faktor yang berhasil membendung proses Arabisasi di Iran sehingga Iran tetap menjadi bangsa yang berbahasa Persia. "Pengalaman menyaksikan penduduk desa miskin yang mendengarkan seseorang membacakan *Shahname* dengan hafalan memberikan kesan mendalam bagi saya. Iran bukanlah negara kaya, juga belum berkembang saat itu, tapi Iran merupakan sebuah peradaban," Lubrani melanjutkan. Selama bertahun-tahun, Lubrani kemudian menjadi salah satu rujuan utama Negara Yahudi tentang Iran. Pemahaman dan kekagumannya pada kebudayaan Iran berdampak besar pada persepsi Israel terhadap Iran sebagai seorang sahabat—sekaligus rival.

Israel berusaha menggunakan penunjukan Lubrani sebagai sebuah peluang untuk memperbaiki diplomasi Israel di Iran. Lubrani berusaha menawarkan kepercayaan diplomatik kepada Shah—sebuah prosedur yang hanya berhak bagi duta besar yang baru bertugas—agar Shah memberikan pengakuan *de jure* atas keberadaan Israel. Namun harapan Israel ini ternyata tidak realistis sebab tidak ada satupun pejabat Iran yang menyambut Lubrani di bandara Mehrabad. Lebih buruk lagi, permintaan Lubrani untuk bertemu dengan Shah tidak kunjung mendapatkan jawaban hingga lebih dari tiga setengah tahun lamanya.[164]

Israel memiliki alasan penting atas kekhawatirannya tentang hubungannya dengan Iran. Setelah peperangan berakhir, Iran mulai menjajaki peluang untuk mengurangi ketergantungannya pada saluran pipa Israel untuk mengekspor minyak ke Eropa. Saluran pipa Eilat-Ashkelon memiliki manfaat strategis yang lebih panjang karena saluran pipa tersebut awalnya dibangun untuk Iran agar mampu menghindari wilayah yang dikuasai pemerintahan Nasser di Mesir—yang anti-Iran. Kekhawatiran Israel bahwa Iran akan menghentikan penggunaan saluran pipa tersebut membuatnya melakukan aksi-aksi diplomatik agar Shah tidak melakukan penghentian tersebut. "Para pejabat Israel sangat

162

163

164

ketakutan. Kunjungan para pemimpin Israel, Yigal Allon, Rabin, Peres .. adalah untuk memastikan bahwa Shah akan tetap melanjutkan penggunaan saluran minyak tersebut. Inilah isu terbesar dalam hubungan Israel dengan Iran pasca perang Yom Kippur," Professor Soli Shavar menjelaskan.[165]

Tidak lama setelah berakhirnya perang pada 1973, Washington berinisiatif untuk menyelenggarakan dialog antara Mesir dan Israel. Iran memainkan peran aktif dalam negosiasi tersebut, meskipun Israel merasa frustasi dengan posisi Shah. Sepanjang proses negosiasi, Iran menunjukkan dukungan kepada Mesir—usulan untuk mengembalikan seluruh wilayah yang sudah diduduki Israel sebagai usaha untuk mewujudkan perdamaian. Usulan ini menurut Shah didasarkan logika dan keadilan. Di sisi lain, Shah mengkritisi posisi Israel yang "kaku dan tidak bijak" ketika berusaha mendapatkan pengakuan dari negara-negara Arab. Teheran menekan Tel Aviv dengan membekukan semua kerja sama militer dan menghentikan pembelian persenjataan buatan Israel. Para pejabat Iran menekankan pada Lubrani bahwa hubungan Iran-Israel akan tetap dibekukan selama negosiasi antara Israel dan Mesir masih menemui jalan buntu. Shah juga mendorong Presiden Amerika, Gerald Ford, untuk meningkatkan tekanannya pada Israel. Kekesalan Shah atas Israel membuat para pejabat di Tel Aviv khawatir bahwa Iran akan memutuskan seluruh hubungan kerja sama.[166] Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Amerika yang bekerja di surat kabar Beirut *al Hawadis,* Shah secara terbuka menolak cara Israel untuk mewujudkan keamanan wilayah dengan mencaplok wilayah lain:

> Israel telah membuat kesalahan besar dengan mengandalkan strategi pencaplokan wilayah negara Arab untuk kepentingan keamanannya. Dalam era ketika pesawat mampu terbang pada ketinggian 80,000 kaki dan peluncuran rudal darat-ke-darat—yang mampu menimbulkan banyak gangguan—tidak ada perbatasan yang aman bagi Israel. Satu-satunya keamanan bagi Israel adalah jaminan internasional atas perbatasan Israel sebelumnya. Apakah Israel telah memiliki pasukan yang cukup untuk menduduki seluruh wilayah Arab? Mampukah dia menduduki Aljazair? Bisakah dia bertarung dengan Arabi Saudi? Lebih jauh lagi, bisakah Israel mempertahankan belanja militer yang berkelanjutan hingga 10 tahun ke depan? Siapa yang harus membayar belanja itu? Apakah kamu, Amerika (yang akan membayarnya, *pen*), untuk apa? Untuk mendukung sebuah pertanyaan yang sangat tidak bermoral—pendudukan wilayah beberapa negara oleh beberapa negara lainnya?[167]

Sementara Shah telah menunjukan sikap kerasnya kepada Israel, aksi pengkhianatan Iran terhadap Israel—dalam perspektif Israel—belum benar-benar dilakukan. Israel percaya bahwa Shah akan melanjutkan "sikap kritis terhadap Israel untuk menjaga hubungan Iran dengan negara Arab.[168] Israel tidak berharap banyak bahwa pada proses pemutusan hubungan kerjasama antara Israel dan Iran—penghentian mendadak dukungan Iran atas bantuan Israel terhadap pemberontakan suku Kurdi-Irak melalui penandatanganan

165

166

167

168

Perjanjian Aljazair pada 1975. Shah sendiri tidak akan melakukan pembicaraan dengan Israel dalam segala hal.

Israel, Iran, dan Suku Kurdi-Irak

Sebagai keturunan dari bangsa Medes—menurut sebuah legenda—suku Kurdi telah menempati pegunungan di Irak, Turki, dan Iran sejak ribuan tahun yang lalu. Karena memiliki irisan keturunan dengan Iran, suku Kurdi memiliki hubungan budaya dan bahasa yang kuat dengan Iran. Mayoritas suku Kurdi terus berusaha memperjuangkan independensi—atau paling tidak otonomi—dari pemerintahan Irak, Turki, dan Iran—dengan alasan bahwa mereka berhak atas negeri mereka sendiri sebab mereka tidak dapat mengekspresikan identitas budaya mereka secara bebas di bawah pemerintahan non-Kurdi.[169] Tuntuan suku Kurdi menjadi masalah bagi negara-negara tersebut di atas, tapi juga membuka peluang bagi masing-masing negara untuk saling melemahkan satu sama lain. Secara historis, kekecewaan Kurdi lebih besar terhadap Turki dan Irak—karena dua negara tersebut telah mengabaikan keberadaan mereka selama puluhan tahun—daripada terhadap Iran. Dengan kondisi seperti ini, Iran lebih mudah menggunakan suku Kurdi untuk melemahkan negara-negara tetangganya.

Pada awal 1960-an, salah satu pemimpin gerilya Kurdi, Mullah Mustapha Barzani, berusaha mencari dukungan militer dari Israel untuk memerangi pasukan Irak. Israel memiliki kepentingan yang sama untuk melemahkan kekuatan Baghdad, khususnya dengan sekutu-sekutu non-Arab. Tetapi Mossad—agen intelijen Israel— dengan cepat menyimpulkan bahwa dukungan terhadap Kurdi tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kerja sama dengan Iran. Sementara itu, Teheran juga diuntungkan dengan kesibukan pemerintah Irak dengan pemberontakan Kurdi—Shah sendiri sangat meragukan Barzani yang dituduhnya sebagai seorang komunis. Menurut keterangan kepala operasi Mossad dalam suku Kurdi, Eliezer Tsafrir, Iran "tidak menyukai Mullah Mustapha Barzani karena Iran menganggap bahwa dia seorang "Mullah Merah", dia pernah berada di Rusia selama dua belas tahun untuk mendapatkan suaka politik."[170]

Shah awalnya menolak usulan tersebut, dengan mempertimbangkan dugaan hubungan Barzani dengan Soviet dan resiko jika Kurdi memenangkan pertempuran di Irak akan berdampak pada komunitas Kurdi di Iran. Shah juga masih meragukan niat sesungguhnya dari Israel karena Iran paham betul bahwa Israel memberikan dukungan penuh atas kedaulatan Kurdi—yang lebih penting daripada ide untuk melemahkan Baghdad.[171] Seperti yang diduga Shah, Israel menyampaikan kepada Barzani bahwa mullah ini dapat mengandalkan dukungan penuh dari Negara Yahudi. Maka, pendirian sebuah negara non-arab di jantung wilayah jazirah Arab bukanlah sebuah skenario yang harus dikhawatirkan Israel. "Kami telah menyampaikan pada Kurd [bahwa] apapun yang mereka lakukan, kami tetap mendukung mereka—dalam keadaan perang ataupun damai," Tsafrir menjelaskan, yang juga bertanggungjawab dalam program pelatihan Mossad bagi pejuang militer Kurdi. "Dalam satu hal, kepentingan bersama kita dengan suku Kurdi lebih lengkap dari pada kepentingan Iran dengan Kurdi."[172] Terlepas dari keraguan Shah, Israel

169

170

171

172

berencana untuk mengajak Iran dan Barzani—yang telah memahami motivasi dari Shah—untuk duduk satu meja setelah melakukan lobi beberapa bulan. Amerika Serikat telah mendapatkan informasi tentang usaha-usaha kooperatif ini dan sepakat untuk memberikan bantuan rahasia. Iran juga menginginkan agar perannya dalam kerjasama ini tidak menarik perhatian publik.

Kesepakatan pertama ditandatangani pada Mei 1965, di markas Mustapha Barzani daerah Kurdistan.[173] Savak, kelompok intelijen rahasia Shah—dengan menggunakan baju tradisional Kurdi, bersama agen Mossad melewati perbatasan Irak dengan berjalan kaki menuju markas gerilya suku Kurdi. Israel menawarkan pelatihan, bantuan keuangan, dan persenjataan bagi pasukan Barzani untuk memperkuat serangan terhadap pasukan Irak.[174] Pengiriman dana dan senjata akan dilakukan melalui Savak, yang juga memberikan akses wilayah bagi Israel agar terhubung dengan wilayah Kurdi Irak. Kerjasama dengan Iran ini memungkinkan adanya lalu lintas yang aman dari persenjataan Israel, termasuk tim dokter, obat-obatan, dan tim instruktur yang berangkat dari Israel menuju wilayah Kurdi melalui Iran.[175]

Ketika Richard Nixon dan Henry Kissinger dari *National Security Advisor* berkunjung ke Teheran pada Mei 1972, Shah berusaha meyakinkan Amerika Serikat untuk berperan lebih besar dalam hubungan kerjasama antara Israel dengan Iran. CIA dan Departemen Luar Negeri AS memberikan masukan sebaliknya kepada Presiden dengan pertimbangan bahwa Teheran akan mengkhianati pasukan Kurdi. Tetapi Kissinger tetap memutuskan sebaliknya dan beralasan bahwa keputusannya ini merupakan langkah nyata Amerika untuk menunjukkan dukungannya kepada Iran.[176] Meskipun operasi ini berhasil mengurangi ancaman Baghdad terhadap dominasi Shah di Teluk Persia, sekaligus mengacaukan perhatian pasukan militer Irak dalam kasus Palestina, kekuatan pasukan Irak masih tetap berkembang. Kecenderungan Baghdad ke Soviet, sikap anti-Iran, dan dukungan Irak atas agenda Pan-Arab menjadi perhatian besar Washington, Teheran, dan Tel Aviv.[177] Dalam perspektif Israel, operasi ini juga memberikan akses bagi Tel Aviv terhadap warga Yahudi dan memungkinkan Israel memulangkan Yahudi-Irak. Aspek demografis yang ada dalam kebijakan luar negeri Israel sangat penting bagi Negara Yahudi; rendahnya populasi negara Israel dibandinngkan dengan negara-negara tetangga Arab membuat Negara Yahudi ini bersemangat untuk mendorong migrasi warga Yahudi ke Israel dari diaspora. Savak membantu proses penyelendupan warga Yahudi-Irak melalui wilayah Kurdistan menuju utara Iran, kota Rezaieh. Di kota ini mereka diserahkan kepada organisasi Yahudi yang akan menempatkan mereka di Israel.[178]

Segera setelah Nixon dan Kissinger berkunjung ke Teheran, bantuan keuangan Amerika mulai mengalir ke kelompok gerilya Kurdi, atau *peshmerga* (orang-orang yang menghadapi kematian), sebuah panggilan untuk mereka sendiri.[179] Menurut Yaacov Nimrodi, seorang Yahudi-Irak yang bekerja sebagai atase militer Israel pertama di Teheran, Israel memiliki beberapa peleton pasukan yang berada di wilayah Kurdistan. Mereka

173
174
175
176
177
178
179

melatih *peshmerga* Irak dan memimpin mereka dalam peperangan tetapi jarang melibatkan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya.[180] Kehadiran militer Iran sangat luar biasa, dengan satu batalion anti-serangan udara, satu batalion artileri, dan beberapa anggota operasi Savak. Pihak Iran juga cenderung menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Irak.[181]

Pada Maret 1975, operasi militer Kurdi tiba-tiba berhenti, ketika Iran mulai menarik bantuan militernya dalam pertempuran dengan Irak. Presiden Aljazair, Houari Boumedienne, telah memberitahu Shah bahwa pemimpin *de facto* Irak, Saddam Hussein, berencana untk menghadiri pertemuan OPEC di Aljazair untuk menegosiasikan penyelesaian konflik Irak-Iran, termasuk perselisihan perbatasan di wilayah *Shait al Arab* atau saluran air Arvand Rud. Pada 3 Maret 1975, Shah berangkat menuju Aljazair, dan tiga hari kemudian, Boumedienne mengumumkan bahwa konflik antara Irak dan Iran sudah berakhir.[182] Kedua negara tersebut mencapai kesepakatan mengenai perbatasan yang mendorong keda belah pihak untuk tidak saling melakukan intervensi atas urusan internal, sekaligus membangun sebuah divisi untuk melakukan kontrol atas *Shatt al Arab* atau saluran air Arvand Rud—sebuah wilayah yang sudah lama menjadi target operasi Iran.[183] Melalui penandatanganan Perjanjian Aljazair ini, penyelesaian perselisihan saluran irigasi ini memberikan keuntungan bagi Iran, dan dinilai sebagai salah satu kemenangan terbesar Shah; kesepakatan ini mampu mendongkrak reputasi Iran sebagai kekuatan dominan di Teluk Persia. "Sekarang akhirnya saya mampu merobek-robek perjanjian *Shatt al-Arab*," Shah berbicara dengan penuh kebanggaan kepada Asadollah Alam, Kepala Pengadilan Shah, ketika Shah kembali ke Teheran.[184]

Kesepakatan Aljazair ini sangat mengejutkan Israel dan Amerika Serikat. Shah tidak berbicara terlebih dahulu dengan Israel dan Amerika Serikat mengenai negosiasi dengan Irak di atas. Shah juga tidak menunjukkan bahwa kerjasama dengan Kurdi merupakan keputusan yang berbahaya.[185] Menurut Gary Sick, yang bekerja sebagai ahli tentang Iran di *National Security Council* pada masa kepresidenan Carter dan Reagan," [Kesepakatan ini] sudah ditandatangani sebelum diberitahukan kepada setiap pihak, inilah masalah utamanya. [Shah] mendapatkan sebuah tawaran, dia menerima tawaran itu, lalu menyempurnakannya, kembali lagi, dan memberikan instruksi sekaligus membiarkan Amerika Serikat dan Israel tahu bahwa permainan sudah selesai."[186] Charles Nass, anggota staf urusan Iran di Departemen Luar Negeri AS, mengetahui informasi ini dari media."Bom, inilah beritanya. Di suatu pagi, ada berita tentang perjanjian ini," kenangnya.[187]

Menurut para pejabat Iran, keputusan Shah untuk tidak melakukan konsultasi ini tidak mengherankan. "Seorang diktator adalah seorang otokrat. Shah menganggap dirinya sejajar dengan Amerika Serikat. Shah tidak merasa bahwa dia perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Amerika."[188] Banyak fakta yang mengindikasikan bahwa keputusan Shah

180
181
182
183
184
185
186
187
188

untuk menandatangani Kesepakatan Aljazair itu muncul di lokasi pertemuan. Kesepakatan ini juga mengejutkan para pejabat senior Savak, dan sebuah paragraf dalam buku harian Asadollah Alam mengkonfirmasi dugaan ini. Shah kembali ke Teheran pada pagi hari 7 Maret 1975, kemudian memanggil Jenderal Nematollah Nassiri, kepala operasi Savak, dan memerintahkannya agar segera mengakhiri operasi Iran di wilayah Kurdistan sekaligus menawarkan kepada kelompok gerilya Kurdi untuk mengungsi ke Iran.[189] Sebagaimana karakter otokratik Shah, dokumen kesepakatan ini tidak pernah dilimpahkan kepada parlemen Iran untuk diratifikasi—untuk meminimalisir kritik terhadap beberapa ketentuan dalam dokumen perjanjian tersebut—termasuk adanya penyerahan sebuah wilayah kaya-minyak Iran kepada negara Irak.[190]

Israel maupun Kurdi mengalami kebingungan ketika melihat sekutunya Iran pergi dan meninggalkan mereka. Tel Aviv tidak pernah membayangkan bahwa Iran cepat atau lambat akan mengakhiri operasi militer di Kurdistan. Mereka juga tidak menginginkan operasi itu berakhir dengan "cara yang dramatis dan menyedihkan", Eliezer menjelaskan.[191] Savak merupakan pihak pertama yang harus menanggung malu ketika harus menginformasikan hal ini kepada Mossad, bahwa kerjasama Iran di Kurdistan harus berakhir. Mereka justru menjelaskan bahwa harus ada pergantian pasukan secara rutin. Hanya berselang sehari, pada 9 Mei, Uri Lubrani mendapat panggilan dari pejabat senior Iran untuk membicarakan isi perjanjian.[192] Pada saat itu, Washington sudah sadar dengan tujuan Iran selama beberapa hari tanpa berbagi informasi ini dengan Negara Yahudi, yang semakin membuat hina Tel Aviv.[193]

Bagi Israel, langkah ini bukan sekedar manuver simbolik Shah lainnya yang menguntungkan negara Arab—ini adalah tentang hidup dan mati. Penarikan pasukan Iran yang tiba-tiba membuat pasukan Israel dalam bahaya. Tsafir hanya memiliki waktu dua jam untuk meninggalkan markas Kurdistan menuju Iran—lokasi tinggal keluarganya—di hadapan pasukan militer Irak. "Saya memaki Iran di sepanjang jalan menuju Teheran. Ini adalah keputusan yang sangat mengecewekan," Tsafrir bercerita pada saya.[194]

Teheran menunjukkan pengertian yang rendah terhadap protes Israel. Shah memandang bahwa operasi Kurdi merupakan tanggung jawab utama Iran, sehingga persetujuan dan kepentingan Israel bukanlah hal yang terlalu penting. "Saya memposisikan diri berada di posisi Shah," seorang mantan anggota kabinet Shah bercerita pada saya. "Inilah saya, bukanlah negara yang kecil, berpenduduk tiga puluh lima juta orang, saya punya minyak, saya punya banyak warga berpendidikan. Mengapa saya harus peduli dengan sekelompok Yahudi sialan?"[195] Bagi Iran, inilah adalah sebuah peraturan daripada sebuah pengecualian—Shah memang tidak terbiasa berbicara dengan Israel terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang dianggapnya sebagai kepentingan nasional Iran.[196] Dalam pandangan mantan duta besar Iran di Afrika Selatan, "Prioritas kita adalah *Shatt al-Arab,* dan bahwa kita telah memperbaiki hubungan dengan Irak. Kepentingan

189
190
191
192
193
194
195
196

nasional kita adalah yang utama."[197] Saat itu Iran tidak mendapatkan waktu untuk mengadakan pembicaraan terlebih dahulu dengan Washington dan Tel Aviv. Negosiasai (dengan Irak, *pen.*) hanya berlangsung selama beberapa jam dalam jangka waktu dua hari, 5-6 Mei 1975, dan negosiasi terjadi secara sangat intens.[198] Shah hanya tidur selama 2 jam pada malam hari di Aljazair—dia juga melakukan negosiasi mengenai OPEC—dan ketika pulang ke Iran Shah mengalami kelelahan.[199]

Para pejabat Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel cukup mengerti bahwa negosiasi antara Iran dan Irak adalah tentang perselisihan saluran irigasi yang berlangsung sejak 1974 di Istanbul. Pembicaraan ini dipimpin oleh Duta Besar Abdul Rahman Sadrieh, salah satu diplomat terkenal dari Kementerian Luar Negeri Iran, dan rekannya dari Irak, Duta Besar Talib Shabib. Pembicaraan dilakukan secara terbuka, baik Washington dan Tel Aviv mengikuti perkembangan pembicaraan ini. Maka naif sekali jika Washington dan Tel Aviv meyakini bahwa solusi perselisihan saluran irigasi ini tidak akan mengakhiri intervensi Iran di wilayah utara Irak.[200] Teheran memberikan respon negatif atas kegemparan dunia internasional terkait sikap Iran di Kurdistan—mereka merujuk pada pengakuan Saddam Hussein dalam pembicaraan di Aljazair bahwa Irak sudah lama ingin menghabisi suku Kurdi, tetapi masih belum berhasil karena intervensi Iran. "Mereka (Kurdi) terus mengalami kekalahan demi kekalahan," Shah berbicara pada Asadollah Alam. "Tanpa dukungan kami, mereka tidak akan mampu melawan Irak lebih dari 10 hari." Tetapi Shah secara terpaksa bersedia menemui Barzani pada 11 Maret di Teheran karena menurut Alam, Shah "malu bertemu dengan orang itu secara langsung."[201]

Apakah terjadi proses pembicaraan terlebih dahulu atau tidak, para pengambil kebijakan di Tel Aviv dan Washington sangat marah dengan keputusan Shah. Kissinger, yang pernah menjadi aktor kunci keterlibatan Amerika dalam operasi Kurdi, mengirimkan seorang utusan ke Swis—Shah berlibur sebentar ke Swis setelah pertemuan Aljazair—untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi Shah. Utusan ini membawa surat yang menegaskan kembali posisi Amerika; bahwa operasi Kurdi harus tetap dilanjutkan. Tidak seperti biasanya, Kissinger tetap menyampaikan terlebih dahulu ucapan selamat atas kemenangan diplomatik Shah.[202] Bagi Washington, Kesepakatan Aljazair merupakan isyarat kuat, karena Amerika kemudian sadar bahwa kepentingan Iran mulai berbeda dengan kepentingan Amerika sendiri. "Kejadian ini merupakan tonggak perbedaan [kepentingan]. Kami sangat terkejut dengan kejadian ini," Nass bercerita.[203] Terlepas dari persoalan ini, Amerika Serikat tetap menahan diri untuk tidak bereaksi keras atas kebijakan Shah ini, salah satunya karena kebijakan luar negeri Amerika yang menjadikan Iran sebagai sebuah pengecualian. Dalam beberapa kesempatan, Washington cenderung menutup mata terhadap kecenderungan Shah yang tidak biasa. "Kami tidak melihat Iran, setidaknya ketika berada di kedutaan, sebagai sebuah negara penurut," Henry

197
198
199
200
201
202
203

Precht memberikan keterangan, staff urusan Iran di Departemen Luar Negeri AS pada akhir 1990-an.[204]

Israel sendiri tidak terlalu keras mengkritik Shah. Sepanjang malam, seluruh aspek startegi kebijakan Israel dibatalkan Iran. Lubrani menolak dengan tegas keputusan Iran, lalu direspon lebih keras lagi oleh pejabat senior Iran, yang kemudian menjelaskan kelemahan Israel; "apakah dia mengizinkan suatu perasaan mengintervensi urusan politik."[205] Para pemegang kebijakan di Israel merasa bahwa mereka telah dikhianati secara personal oleh pemerintahan monarki Iran. "[Shah] telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain kepada Hitler ketika mencampakan Cekoslovakia," Tsafrir berkomentar dengan pedas.[206] Jalan cerita sejarah suku Kurdi membuat Israel gagal menyadari kerentanan posisinya di hadapan Iran, dan rasa percaya diri juga kepercayaan Tel Aviv pada Shah mulai pudar. "Itulah kesalahan terbesar Shah. Kami kehilangan kepercayaan pada Shah. Dia orang gila. Dia orang idiot," Nimrodi berkomentar dengan penuh penyesalan.[207]

Meskipun Israel dapat menerima permainan politik Shah dan manuvernya dengan blok Arab, Tel Aviv melihat bahwa setiap isyarat perubahan pandangan strategis Shah dengan serius. Keputusan Shah yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada Israel ketika menghentikan operasi Iran di Kurdistan membuat Tel Aviv menganggap bahwa "hubungan Iran dengan Negara Yahudi telah menjadi sebuah kebijaksanaan daripada keharusan". Yitzhak Rabin, yang saat itu menjadi perdana menteri Israel, berkunjung ke Teheran untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Shah. Shah sadar betul bahwa Israel berharap Iran dan Israel akan sama fokus pada ancaman regional yang potensial. Shah kemudian menyatakan bahwa dia percaya—peperangan dengan Irak merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dan perjanjian ini akan menghemat waktu Iran.[208] Kesepakatan Aljazair tidak seperti apa yang tertulis," Shah berbicara pada Lubrani untuk menenangkan Tel Aviv bahwa hubungan mereka masih solid.[209] Tetapi kenyatannya, perpsesi kedua belah pihak mengenai ancaman keamanan bagi Iran dan Israel mulai berbeda.

Melepaskan Irak

Iran sangat diuntungkan dengan pemberian hak penuh dari Nixon atas pembelian seluruh persenjatan non-nuklir produk Amerika. Ketika belanja senjata Iran meningkat, jumlah pasukan militer Iran juga meningkat dari 225 ribu orang pada tahun 1972 menjadi 385 ribu pada 1975.[210] Pengeluaran belanja militer Shah yang begitu tinggi ini membantu perekonomian Amerika yang terdampak krisis pada awal 1970-an, karena anggaran Amerika Serikat yang sudah dihabiskan untuk belanja minyak di Timur Tengah dapat kembali lagi ke Amerika melalui belanja persenjataan Shah. Dari 1972 hingga 1977, Iran menguasai sepertiga total penjualan senjata Amerika.[211] Namun, pertumbuhan Iran ini

204
205
206
207
208
209
210
211

membuat Shah semakin mandiri dalam membuat kebijakan—dan kadang-kadang diputuskan sepihak—yang kemudian memunculkan kecurigaan Washington dan Tel Aviv atas ambisi berbahaya dari Shah.[212]

Dengan menarik pasukan operasi di Irak, Shah membuat wilayah perbatasan timur semakin berbahaya bagi Israel. Permusuhan negara Arab dengan Israel tidak dapat diturunkan dengan meningkatnya kekuatan Iran dan membaiknya hubungan Shah dengan negara Arab. Pertumbuhan yang berbeda antara Israel dan Iran membuat persepsi kedua negara tersebut terhadap potensi ancaman negara Arab menjadi berbeda. Menurut mantan Menteri Keuangan Iran, Alinaghi Alikhani," Gambaran tentang ancaman bersama antara Iran dan Israel menjadi berbeda," meskipun mereka masih memiliki musuh bersama.[213]

Tetapi seperti yang telah terjadi sebelumnya, langkah Iran yang meningkatkan kerentanan Israel atas negara Arab juga meningkatkan kebutuhan Israel terhadap kerjasama keamanan Israel dengan Iran. Meskipun langkah Iran ini menganggu kepentingan Israel, Tel Aviv tidak dapat membalasnya. Israel justru semakin memiliki ketergantungan pada Iran, karena kehilangan Teheran ketika Mesir semakin dekat dengan Washington dan Irak semakin kuat akan menjadi bencana besar bagi Negara Yahudi.

Sementara itu, pertumbuhan kekayaan dan kekuatan Iran tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi ancaman negara Arab; kecurigaan negara Arab dan ketidakpercayaan mereka terhadap Iran masih ada. Sebagaimana yang disampaikan Shah sendiri, Irak masih menjadi ancaman dengan kekuatan persenjatannya, perjuangannya bagi blok Arab, dan dukungannya kepada kelompok oposisi di Iran, termasuk Ayatollah Khomeini, yang kemudian dipenjara di Irak, sekaligus popularitas dan pengaruhnya dalam kelompok oposisi di Iran terus menguat. Dengan menyepakati Perjanjian Aljazair, Iran menarik serangannya terhadap Baghdad—yaitu dengan mendukung pemberontakan Kurdi—sekaligus menganggu keamanan Israel.

Shah paham sekali bahwa dukungan Iran terhadap pasukan Kurdi akan menghambat aksi militer Irak atas Iran. Maka keputusan untuk menghentikan bantuan bagi suku Kurdi cukup masuk akal jika Shah hanya mempertimbangkan keseimbangan kekuatan regional. Keputusan untuk meninggalkan Israel dan Kurdi merupakan sebuah indikasi yang jelas bahwa Shah memang mengabaikan logika perimbangan kekuasan. Shah memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Arab, Muhammad Hassanein Haykal, pada April 1975, hanya satu bulan setelah penandatanganan Perjanjian Aljazair: "Kami hanya mengikuti prinsip "musuh dari musuh kami adalah teman kami", dan hubungan kami dengan Israel muali berkembang. Tetapi saat ini situasi sudah berubah. Saya berpikir tentang sebuah keseimbangan regional. Barangkali [pertimbangan ini] bisa diintegrasikan ke dalam sebuah kerangka berpikir Islami."[214]

Seperti mayoritas kebijakan strategis sebelumnya, Shah juga dimotivasi oleh tujuan untuk memperoleh pengakuan negara Arab bagi kepemimpinan regional Iran. Karena keberhasilan Iran mendapatkan dukungan dari negara Arab atas dominasinya di Teluk Persia tidak dapat maksimal, maka pengurangan ancaman Irak—sebagai satu-satunya negara yang memiliki tujuan yang sama dengan Iran untuk mendominasi Teluk Persia—menjadi langkah yang lebih penting daripada langkah lainnya. Iran berharap bahwa

212

213

214

pengakuan implisit Baghdad terhadap dominasi Iran melalui Perjanjian Aljazair dapat mendorong negara Arab lainnya mengikuti Irak, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dinilai oleh negara-negara di regional menguntungkan Iran. Sebagaimana yang diharapkan Shah, negara Arab berpandangan bahwa perjanjian itu membuat Iran menempati posisi pertama di Teluk Persia dan menjadi kekuatan dominan di regional.[215] Lebih jauh lagi, pergeseran kebijakan Iran dan keputusan sepihaknya itu untuk menandatangani perjanjian—tanpa berbicara terlebih dahulu dengan Amerika Serikat—semakin menekankan independensi dan kepemimpinan Teheran. Shah sebenarnya menahan diri untuk berunding dengan Washington dan Tel Aviv karena Shah berpendapat bawah sudah saatnya dia mengambil tindakan sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak manapun; karena itu pernyataan yang telah dicapai oleh Iran.[216]

Awalnya, kudeta diplomasi Shah ini berjalan sukses. Langkah Shah ini dapat meredakan ketegangan antara Irak-Iran dalam beberapa saat. Misalnya, pada konferensi keamanan Teluk Persia di Muscat, Oman, tahun 1978, tidak terjadi perselisihan antara Iran baik dengan Irak maupun negara Arab lainnya. Konferensi tersebut bahkan gagal justru karena konfrontrasi antara Irak dan negara Arab lainnya yang memperebutkan posisi kedua di regional tersebut. Irak percaya bahwa negara-negara Arab harus mendapatkan status minoritas di hadapan Iran dalam hal pengelolaan keamanan bersama, dan bahwa Irak harus memiliki suara dominan di dalam status minoritas negara-negara Arab tersebut. Konferensi ini gagal meningkatkan keamanan regional karena Arab Saudi menolak posisi yang diusulkan tersebut.[217]

Tetapi Perjanjian Aljazair ini segera menjadi bukti kesalahan strategis yang dilakukan Shah—seperti yang diprediksikan Israel pada waktu itu. Kesepakatan ini justru lebih menguntungkan Saddam Hussein daripada Iran. Meskipun Shah mendapatkan pengakuan simbolik dari rival utamanya dengan menjadi kekuatan dominan di regional, dengan membebaskan Baghdad dari ancaman pemberontakan Kurdi. Sumber daya yang dimiliki Irak kemudian menjadi lebih mampu difokuskan untuk memperkuat aspek persenjataan dan perluasan pengaruh. Hal ini memungkinkan Irak mengkonsolidasikan kekuatannya dan secara signifikan meningkatkan kapasitas pasukan militernya dengan melakukan belanja senjata keapda Uni Soviet—belanja militer Irak meningkat berlipat-lipat antara 1975 hingga 1980—sementara itu Iran terus-menerus mengalami penurunan kekuatan. Pergeseran keseimbangan kekuatan yang kemudian menguntungkan Baghdad membuat Irak berpandangan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Aljazair ternyata tidak adil sehingga Saddam bernafsu untuk melakukan balas dendam.[218]

Pada 1978, pejabat resmi Savak secara diam-diam mulai membenarkan ucapan pejabat Israel bahwa Perjanjian Aljazair telah menimbulkan hambatan yang besar dari Irak, yang memungkinkan Baghdad mampu memperkuat kemampuan ofensifnya. “Saddam Hussein hanya tinggal menunggu waktu untuk menyerang Iran,” Tsafrir memprediksi. Peluang bagi Saddam Hussein datang hanya berselang lima tahun pasca Perjanjian Aljazair ditandatangani, segera setelah kejatuhan kekuasaan Shah.[219] Di samping itu, kebijakan

215

216

217

218

219

sepihak Shah telah menurunkan kredibilitas Iran sebagai sekutu Washington dan Tel Aviv, dan juga sebagai sekutu Kurdi. Perjanjian Aljazair memang memberikan supremasi—tanpa pengakuan—dan dominasi Iran—tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dalam momentum kemenangannya, Shah justru telah menyambut kematiannya sendiri. ”Perjanjian ini merupakan sebuah bencana,” seorang mantan komandan angkatan laut Iran bercerita pada saya.[220]

220

6-Megalomania

Saya sampaikan secara terbuka bahwa Iran memiliki peran di Samudera Hindia. Saya tidak keberatan dengan kehadiran mereka; saya justru akan memperjuangkan kepentingan Anda.
—Shah Mohammad Reza Pahlavi kepada Wakil Presiden Amerika Serikat Nelson Rockefeller, 24 Maret 1976.

Dalam konteks kerjasama pragmatis antara Iran dan Israel, langkah Teheran di Kurdistan menunjukkan adanya penurunan—tapi bukan pemutusan—ikatan kerja sama tersebut. Terlepas dari Perjanjian Aljazair, hubungan Irak-Iran masih berada pada ketegangan yang tinggi hingga kejatuhan kekuasaan Shah, dan Teheran serta Tel Aviv tetap memiliki kepentingan geostrategis yang sama meskipun beberapa aspek penting dalam hubungan kerjasama kedua negara tersebut sudah berkurang. Dengan pertimbangan lebih dari sekedar ancaman, Shah membuat tujuannya untuk menjadi kekuatan dominan di tingkat regional sebagai jalan untuk semakin menegaskan posisi Iran dengan memperoleh dukungan negara Arab bagi ambisi Iran untuk menjadi negara paling kuat di Timur Tengah.

Meskipun Israel bukanlah pesaing dalam kepemimpinan regional, hubungan Teheran dengan Negara Yahudi menjadi rintangan tersendiri bagi usaha-usaha Iran untuk mencapai posisi tersebut.[221] Hubungan Iran-Israel kemudian bergeser dari sebuah aliansi dua negara perang menjadi sebuah interaksi antara kandidat negara hegemonik dengan sebuah negara yang lebih menjadi hambatan daripada pendukung bagi ambisi kandidat negara hegemonik tersebut. Israel juga menjadi rintangan tersendiri bagi Shah dalam konteks pertimbangan-pertimbangan politik dalam negeri, meskipun Shah tidak terlalu menghiraukan opini publik terhadap kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sementara publik Israel mendukung hubungan Tel Aviv dengan Teheran—salah satu dari beberapa negara regional yang dapat menjalin kerjasama intelijen dengan Israel—maka publik Iran justru sebaliknya. Meskipun Iran cenderung khawatir dan curiga terhadap negara-negara tetangga Arab, hal ini tidak diekspresikan Iran ke dalam hal-hal yang justru menguntungkan Israel.[222] Negara Yahudi biasanya dianggap sebagai negara agresor, sebuah kekuatan penjajah. Respon publik anti-Israel yang paling ekstrem terjadi pada 1967 dalam sebuah pertandingan sepakbola antara Iran dan Israel. Pertandingan ini segera menjadi sebuah unjuk rasa anti-Israel—balon dengan lambang Nazi dibagikan kepada para penonton dan sebuah patung Moshe Dayan diarak lalu diludahi.[223]

Opini publik Iran terhadap Israel berakar dari pengaruh kelompok keagamaan di Iran dan sikap anti-penjajah rakyat Iran. Di samping itu, ketika kritisime terhadap Shah akan membuat seseorang masuk penjara, warga Iran memilih jalan aman dengan melampiaskan kritik mereka terhadap Shah dengan meluapkan kemarahan terhadap Israel.[224] Peristiwa ini bisa saja membuat para pengamat dari luar berpandangan bahwa sentimen anti-Israel di Iran lebih besar daripada yang nampak di permukaan—namun kantor perwakilan Israel di Teheran tetap menghadapi sikap negatif ini. Dalam berbagai

221
222
223
224

kesempatan, mobil milik Yitzhak Segev, suksesor Yaacov Nimrodi, yang menjabat sebagai atase militer Israel di Teheran, dicoret-coret dengan slogan Nazi dan anti-Israel—"Salam Hitler" dan "Israel keluar." Di sebuah pasar, ketika saya mengaku sebagai warga Israel, [mereka] tidak akan menerima uang saya," Segev menjelaskan pada saya. "Bahwa ajaran Syiah menjadi dasar dari sikap anti-Yudaisme telah kami pahami dengan jelas."[225]

Sentimen anti-Israel tidak terbatas hanya di tingkat publik; sikap ini juga berkembang di kalangan pemerintah. Meskipun begitu, sentimen anti-Israel dari pejabat pemerintah ini lebih bersifat politis daripada didasarkan pada doktrin agama. Menurut mantan pejabat Iran,"Bahkan beberapa teknokrat yang bekerja membantu Israel, dalam hati mereka tidak benar-benar bahagia dengan apa yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina."[226] Dalam pemerintahan Iran, Kementerian Luar Negeri dikenal sebagai pihak yang kritis terhadap hubungan Iran dengan Israel—yang diperkuat melalui peran kelompok militer dan Savak.[227] Kementerian Luar Negeri berpendapat bahwa blok Arab menjadi penting eksistensinya karena seluruh negara non-blok berada di pihak blok Arab ketika melakukan perlawanan terhadap Israel. Namun kementerian ini menghadapi kesulitan besar untuk mempengaruhi kebijakan Iran terhadap Israel, sebab Shah dan Savak secara sistematis telah merahasiakan hal ini. Mantan pejabat Iran seringkali menjelaskan,"Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi."[228] Ketidakpercayaan yang ada antara kelompok militer dengan Kementerian Luar Negeri dapat digambarkan dengan sebuah kejadian ketika Jenderal Hassan Toufani—jenderal kepercayaan Shah di bidang perbekalan—menemukan bahwa atase militer Israel, Yaacov Nimrodi, telah memalsukan kepala surat dan tanda tangan seorang jenderal angkatan udara Iran yang telah meninggal untuk menjual persenjataan bekas Perang Dunia II kepada sebuah negara Afrika melalui pemerintahan Swiss. Toufani mencatat bahwa kepala misi Israel, Meir Ezri, dan keduanya sepakat bahwa Nimrodi harus meninggalkan Iran—tetapi kejadian pemalsuan ini harus tetap dirahasiakan untuk menghindari komentar negatif yang berlebihna dari Kementerian Luar Negeri mengenai kejadian ini mengingat kecenderungan mereka kepada blok-Arab."[229]

Shah sendiri dikenal sebagai orang yang penuh kecurigaan—dan kadang-kadang penuh hinaan—kepada Israel dan kelompok Yahudi.[230] Pemerintahan monarki Iran secara berlebihan percaya atas pengaruh Yahudi di Washington; bahwa kelompok Yahudi Amerika mengontrol pemberitaan media Amerika, termasuk kontrol terhadap aspek lainnya.[231] Dugaan berlebihan Shah terhadap lobi Yahudi ini membuat pusing Israel, tetapi juga memberikan Israel kesempatan untuk menyangkal. "Shah percaya—secara cukup keliru—bahwa setiap editorial (*oppsite of the editorial page*) di *New York Times* merupakan hasil kerja Israel—maka dia tidak ingin memusuhi Israel," pejabat Israel di Iran berkomentar.[232] Ketika citra kepemimpinan Shah di Amerika memburuk pada dekade 1970-an dan dituduh sebagai sosok pelanggar hak asasi manusia dan otoriter, maka

225
226
227
228
229
230
231
232

kebutuhan monarki Iran terhadap lobi Yahudi di Amerika mulai tumbuh. Hal ini memungkinkan Israel untuk menawarkan jasa lobi mereka dan meminta imbalan dari Iran. Tapi menurut duta besar Hoveyda, mantan kepala Misi Iran di PBB, Shimon Peres hanya memberikan janji kosong pada Shah. Langkah untuk menawarkan jada lobi Yahudi "merupakan trik murahan dari Shimon Peres. Dia tidak akan mengorbankan apapun. Dia bisa saja menawarkan bantuan, tapi dia tidak akan melakukan apapun."[233]

Tetapi bagi sebagian besar warga Iran, sentimen anti-Israel tidak sama dengan anti-semit.Terlepas dari sikap diskriminatif yang dialami berbagai kelompok minoritas di bawah pemerintahan Islam Iran, komunitas Yahudi-Iran tumbuh subur baik dari aspek budaya maupun perdagangan mereka—yang didorong oleh kebijakan dinasti Pahlavi. Pada awal abad keduapuluh, komunitas Yahudi kemudian memegang peranan politik penting di Iran. Yahudi-Iran terlibat dalam sebuah Revolusi Konstitusional tahun 1906. Mereka berada di belakang kelompok konstitusionalis dalam proses pembentukan Majlis Konsultasi Nasional (*National Consultative Majlis*) atau lembaga sejenis parlemen—bukan sebuah Majlis Islam, sebagaimana aspirasi para ulama saat itu. Reza Shah, pendiri dinasti Pahlavi, mengakhiri segregasi berbagai kelompok agama minoritas ini dengan mengintegrasikan mereka sebagai warga Iran sepenuhnya. Reza Shah juga mengizinkan agen Yahudi membuka kantor cabangnya di Teheran untuk membantu migrasi warga Yahudi meskipun kelompok agama di Iran menolak migrasi Yahudi ini.[234]Berbagai kebijakan Reza Shah sangat berdampak pada respon warga Yahudi Iran terhadap pembentukan negara Israel. Sementara pendirian Negara Yahudi mendorong eksodus yang masif kelompok Yahudi Separdik dari negara-negara Arab ke Israel, Yahudi Iran tidak mengikutinya. Pada 1951, warga Yahudi-Iran yang pindah ke Israel hanya berjumlah 8,000 dari 100,000 total populasi warga Yahudi di Iran.[235] Menurut sebuah studi dari Universitas Teheran tahun 1974, mayoritas warga Yahudi Iran yang pindah ke Israel cenderung menentang opini bahwa sikap anti-Semit berkembang di Iran; mereka pindah ke Israel lebih karena faktor ekonomi, bukan ideologi.[236]

Resolusi "Zionisme *sama dengan* Rasisme"

Pada November 1975, satu bulan setelah penandatanganan Perjanjian Aljazair, negara-negara Arab anggota PBB mengusulkan adanya pemungutan suara tentang keputusan untuk menyamakan Zionisme—fondasi ideologi Negara Yahudi—dengan pertimbangan bahwa ideologi ini membenarkan adanya diskriminasi ras. Sidang Umum PBB kemudian menghasilkan Resolusi 3379 yang menyatakan bahwa "Zionisme merupakan bentuk rasisme dan diskriminasi ras" sekaligus menyerukan penghentian setiap bentuk diskriminasi ras, termasuk Zionisme. Resolusi ini diterbitkan pada 10 November 1975 dengan 72 suara setuju, 35 suara menolak, dan 32 suara abstain. Yang membuat Israel semakin kecewa adalah keputusan Iran yang menyetujui resolusi tersebut. Sikap mendua dari para birokrat Kementerian Luar Negeri Iran terkait Israel menjadi faktor utama yang mempengaruhi suara Iran dalam resolusi tersebut.

233

234

235

236

Blok negara-negara Arab menekan Iran secara intensif untuk ikut mendukung resolusi, dengan argumentasi bahwa negeri Muslim seperti Iran tidak boleh diam ketika menghadapi perlakuan Israel terhadap warga Palestina. Sebuah perdebatan sengit terjadi antara pejabat Iran di Teheran dengan utusan Iran di New York. Awalnya, Teheran memilih abstain, tetapi utusan Iran untuk PBB, khususnya para diplomat-tingkat-rendah, berhasil meyakinkan Teheran untuk merubah posisi Iran dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan politik dari pilihan ini. Para diplomat Iran ini cenderung setuju pada resolusi dan memiliki pertimbangan yang lebih luas dalam hal hubungan Iran dengan Israel.[237] Mengambil keputusan yang menyenangkan Amerika dan Israel dan pada saat yang sama merugikan negara-negara berkembang (negara-negara Arab, *pen.*) yang Iran sedang memperbaiki hubungan dengan mereka akan memerlukan biaya politik yang tinggi bagi Iran. "Kami tidak ingin dianggap memberi dukunan secara membabi-buta kepada Amerika Serikat dan Israel." Duta Besar Mehdi Ehsassi, yang berperan sebagai anggota delegasi Iran di PBB saat itu, menjelaskan.[238] Dalam perspektif Iran, dukungan terhadap Resolusi 3379 justru sejalan dengan kebijakan Teheran yang mendukung Gerakan Non-Blok sekaligus menurunkan sensitifitas negara-negara Arab.[239] Teheran kemudian sangat percaya bahwa dukungan mereka atas resolusi ini merupakan bagian dari kebijakan Iran untuk bergerak lebih dekat dengan negara Arab dalam rangka meraih independensi dan peran kepemimpinan mereka."[240] Hoveyda, orang yang mewakili suara Iran, menjelaskan bahwa ambisi Iran untuk memegang peran kepemimpinan merupakan persoalan utama dalam perdebatan antara Teheran dan utusan Iran untuk PBB. "Karena kebijakan Shah untuk melakukan hegemoni di Teluk Persia, dia tidak dapat menghindar dari suara ini," Hoveyda menjelaskan. Ambisi kepemimpinan Iran membuatnya tidak dapat memberikan suara abstain.[241]

Meskipun begitu, Shah tetap belum mengubah kebijakannya setelah kejadian ini. Monarki Iran—yang melakukan mikro-manajemen terhadap urusan-urusan negara dan melibatkan Shah ke dalam keputusan kecil dan besar—kemudian menghubungi utusan Iran di PBB pada 11 November dengan sebuah intruksi baru. Karena khawatir bahwa dukungan yang menguntungkan Gerakan Non-Blok dan Blok Arab sekaligus membuat Amerika marah ini akan membuat masalah baru bagi Iran, Shah lalu mengintruksikan utusan Iran di PBB agar menentang resolusi ini—bahwa proses pemungutan suara ini dilakukan pada malam sebelumnya dan, sesuai dengan instruksi sebelumnya, bahwa Iran telah mendukung resolusi tersebut.[242] Israel berhasil menunjukkan kemarahan mereka terhadap rakyatnya yang telah melecehkan keyakinan Negara Yahudi. Dalam sebuah kesempatan makan siang dua-bulanan antara wakil kepala delegasi PBB dari Israel dan Iran di New York, wakil duta besar Israel memastikan bahwa rekannya itu dapat memahami sepenuhnya ketidakpuasan Israel. Di Teheran, kepala delegasi Israel membicarakan persoalan ini langsung di hadapan Shah, tetapi Shah menolak untuk membicarakan persoalan resolusi ini—Shah menyampaikan bahwa pembicaraan tersebut

237
238
239
240
241
242

tidak relevan.[243] Arogansi Shah nampak pada citra-dirinya sebagai ahli geopolitik yang mampu mentranfromasi Iran dari sebuah negara berkembang-terbelakang menjadi negara industri-modern dan kekuatan regional dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun. Kesuksesan ini tidak mengurangi ambisi Shah.

Kaisar dalam diri Shah

Shah percaya bahwa kekuatan sebuah negara membuat negara itu lebih banyak memiliki tanggungjawab. Begitu juga apa yang terjadi pada dirinya. Ketika kekuatannya semakin meningkat, Shah semakin bernafsu menambah kekuasaannya. Namun, dengan mulai menurunnya kekuatan Iran sebagai akibat dari meningkatnya kekuatan Iran—yang baru saja bebas dari ancaman pemberontakan Kurdi pasca Perjanjian Aljazair—Shah kemudian berusaha menghadapi segala hambatan yang ada.[244] Ironisnya, Shah tetap berpandangan bahwa Perjanjian Aljazair bukan hanya sebuah kemenangan besar tetapi juga bukti dari keampuhan kebijakan-kebijakannya. Setelah berhasil menjadi kekuatan dominan di Teluk Persia, Shah kemudian menaikkan taruhannya dengan mulai melirik negara-negara di Kawasan Samudera Hindia dan negara lainnya—secara efektif memperluas kekuatan Iran melalui ambisinya yang tak terbatas. Dalam sebuah pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Nelson Reckefeller pada 24 Maret 1976, Shah menyampaikan visi dan ambisinya ini: "Kebijakan saya jujur dan *to the point*, dan saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya sampaikan secara cukup terbuka bahwa Saya menginginkan Iran memainkan peran di Samudera Hindia. Saya tidak menolak keberadaan Amerika; saya justru akan secara aktif membela kepentingan Anda."[245] Shah kemudian memperbesar armada laut Iran ke dalam garis keduapuluh, lalu menggeser ke garis kesepuluh di sisi selatan. Angkatan laut Iran mulai melakukan patroli di lautan Afrika Timur untuk menunjukkan potensi kekuatan militernya.[246] Dalam situasi seperti ini, Shah kemudian berpandangan bahwa Iran tidak bisa acuh lagi terhadap kondisi politik di Somalia, Shah kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengintervensi negara di Afrika Timur. "Inilah akibat dari persepsi megalomania yang dialami Shah baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap posisi Iran," mantan diplomat Iran, Davoud Hermidas-Bavand, menjelaskan.[247]

Washington melihat perkembangan ini dengan hati-hati. Mereka khawatir jika ambisi Shah ini akan merugikan mereka.[248] "Shah tidak hanya berusaha melakukan hegemoni di tingkat regional, dia juga ingin menjadi kekuatan di tingkat global," Henry Precht, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS untuk urusan Iran menjelaskan.[249] Para pejabat Israel juga mengakui perluasan kekuatan Iran ini dan apa yang mereka gambarkan sebagai "Megalomania Shah", sekaligus dampak negatif bagi hubungan Israel-Iran.[250] Dalam pandangan pakar tentang Irak, Andrew Parasiliti, meningkatnya kebijakan ambisius Shah pasca 1975 merupakan langkah Shah untuk mempertahankan posisi

243
244
245
246
247
248
249
250

Teheran ketika kehilangan peluang menguasai Baghdad karena semakin menguatnya kekuatan Iran di bawah kepemimpinan Saddam Hussein.

Meskipun para penasihat Shah sudah mengingatkan bahaya dari kebijakan-kebijakannya, sedikit sekali dari para penasihat ini yang berani mengekspresikan pandangan mereka di hadapan para otokrat Iran. "Mengapa kita harus menjadi kekuatan dominan di Samudera Hindia? Hal merupakan tindakan yang konyol," Alinaghi Alikhani, mantan menteri dalam kabinet Shah meratap. "Rakyat kita masih miskin. Bahkan kekuatan militer kita tidak kuat, karena semua persenjataannya diproduksi di Amerika—kita sangat bergantung pada pihak lain."[251] Gaya otokratik Shah dalam mengelola pemerintahannya bahkan sudah sampai pada tingkat yang absurd. Sebuah dokumen di Departemen LuarNegeri AS yang telah disiapkan sebelum kunjungan Shah ke Amerika Serikat pada 22 Agustus 1967 menyatakan bahwa "Shah berkuasa sebagaimana dia menjalankan pemerintahan. Dia memutuskan semua kebijakan yang penting dan tidak penting bagi pemerintahan Iran."[252] Pada pertengahan 1970-an, kecenderungan Shah untuk terlibat dalalm urusan-urusan mikro-kenegaraan semakin kronis. "Dia kemudian berpandangan bahwa dia lebih cerdas dari siapapun," Hoveyda menjelaskan.[253] Shah tidak lagi meminta masukan dari para penasihatnya dan melakukan analisisi sekaligus keputusan oleh dirinya sendiri. Persaingan antara beberapa kelompok di pemerintahan dalam menyediakan data bagi Shah semakin meningkat—khususnya antara Savak dan Kementerian Luar Negeri. Informasi yang diberikan kepada Shah menjadi mentah—tanpa analisa apapun terhadap informasi itu, membuat Shah melakukan sendiri proses analisis dan pengambilan keputusan sekaligus. "Tidak ada sumber informasi tunggal yang tidak sampai pada Shah. Shah harus tahu segalanya tentang urusan luar negeri. Dia akan mengatakannya atau tidak, hanya Shah yang bisa memutusukan."[254]

Tidak ada yang lebih mencolok persoalan ini selain tentang hubungan Iran dengan Israel. Kementerian Peradilan, Asadollah Alam, berulangkali menolak undangan dari para pejabat tinggi Israel karena undangan tersebut tidak akan diterima dengan baik oleh Shah yang lebih suka merahasiakan beberapa hal untuk hanya diketahui dirinya sendiri."[255] Shah kemudian menjadi pemerintah tunggal. Pertemuan cabinet hanya menjadi sandiwara; Shah tidak pernah membawa persoalan tentang keamanan nasional, kebijakan tentang minyak, belanja militer ataupun tentang program nuklir Shah dalam pertemuan kabinet.[256] Begitu juga ketika berkaitan dengan hubungan Israel-Iran. "Saya menghadiri rapat kabinet selama 6 tahun. Tidak ada satupun pembahasan mengenai Israel," mantan menteri di kabinet Shah menjelaskan kepada saya.[257] Sebagaimana dalam pendekatannya dengan negara-negara Arab, Shah tetap menjaga hubungannya dengan Israel agar lepas dari perhatian rakyat dan pemerintahannya. Akhirnya, ketidakpercayaan dan kebiasaannya untuk menyembunyikan sesuatu menjadi faktor kejatuhannya. Ketikakondisi Iran semakin tidak stabil, kecenderungan Shah yang selalu memberikan sanksi kepada setiap penasihatnya yang mempublikasikan perkembang negatif pemerintahannya semakin menguat—sehingga

251

252

253

254

255

256

257

sedikiti saja orang-orang yang masih peduli untuk memberikannya masukan. Ketika kondisi menyudutkan dirinya, semuanya sudah terlambat.

7-Munculnya Begin dan Kelompok Sayap Kanan Israel

Negeri seperti negeri Anda, dengan pesawat F-14, dengan begitu banyak pesawat F-4, dengan begitu banyak persoalan yang mengelilingi Anda, [harus memiliki] sebuah kekuatan rudal yang baik.
—Menteri Pertahanan Israel, pernyataan Ezer Weizman kepada Jenderal Hassan Toufanian, Juli 1978.

Tanggal 21 Juni 1977 menjadi momentum kemenangan bagi Israel. Setelah beberapa dekade politik nasional Israel didominasi oleh Partai Buruh, Partai Likud, dibawah kepemimpinan, Menachem Begin, akhirnya mengambil alih dominasi atas parlemen dan eksekutif Israel. Akibatnya, kecenderungan Israel yang bergerak ke kanan menjadi sumber friksi antara Tel Aviv dan Teheran.[258] Begin dilahirkan di Polandia pada 1913, dia merupakan seorang pelajar dan kemudian menjadi rival dari Ze'ev Jabotinsky, pendiri kelompok revisionis Zionisme dan tokoh intelektual kelompok sayap kanan Israel. Setelah pindah ke Palestina pasca Perang Dunia II, Begin memainkan peran penting dalam kelompok sayap kanan Israel dan memimpin *Irgun Zvai Leumi* (Organisasi Militer Nasional)—sebuah kelompok militan Yahudi yang menjadi dalang serangkaian aksi pengeboman ketika Mandat Inggris untuk Palestina berlaku pada dekade 1940-an. Pihak Inggris menawarkan hadiah 10,000 Euro bagi siapa aja yang memberikan informasi tentang keberadaan Begin untuk dipenjara, tetapi dia berulangkali lolos dari penangkapan. Begin kemudian mendirikan Partai Herut dan meradikalisasi ajaran-ajaran Jabotinsky ke dalam ajaran noe-Revisionisme.[259] Tidak seperti Jabotinsky, Begin dan para pengikutnya—kebanyakan para korban Holocaust yang selamat—tidak menyatakan kepada publik bahwa dunia akan memahami dan mendukung untuk mewujudkan mimpi para Zionis, meskipun mereka menyebarkan ajaran Jabotinsky yang mempercayai bahwa perseteruan berdarah antara Yahudi dan Arab tak akan terhindarkan.[260] Lebih dari itu, sebagaimana para revisionis pendahulunya, Partai Herut memiliki ikatan ideologis dengan Eretz Israel (Israel Raya) yang digambarkan sebagaimana Mandat Inggris untuk Palestina, tetapi juga termasuk wilayah-wilayah timur Sungai Yordania, yang nantinya akan menjadi wilayah negara Yordania.

Pada pertengahan 1970-an, Herut membentuk koalisi dengan partai lainnya yang sepemikiran, yaitu Partai Likud. Koalisi ini kemudian masuk ke dalam perdebatan ideologis tentang batas-batas Negara Yahudi. Menurut Shlomo Avineri, mantan direktur utama Kementerian Luar Negeri Israel, keterikatan ideologis Begin dengan Tepi Barat (yang ia sebut sebagai wilayah Yudea dan Samaria) melebihi kepentingan keamanan Israel. Begin menyatakan bahwa persoalan ini merupakan doktrin mazhab "teritorial", dia menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan sebanyak mungkin wilayah yang memiliki ikatan historis dengan Israel—sebab semakin banyak wilayah yang dimiliki Israel, maka derajat ke-Yahudi-an negara ini akan semakin tinggi. Dengan memperbesar klaim teritorial, seseorang akan menjadi Zionis yang lebih kuat. Mazhab territorial ini percaya bahwa setiap kompromi terhadap wilayah historis Israel sama dengan kompromi terhadap salah satu

258

259

260

keyakinan Zionisme.[261] Sementara Likud lebih dekat dengan pandangan seperti ini, Partai Buruh justru lebih dekat dengan "mazhab sosiologis" yang berpandangan bahwa struktur internal masyarakat Israel lebih penting dari pada perluasan wilayah Israel itu sendiri—wilayah Israel yang semakin luas akan memancing lebih banyak warga Palestina dan akibatnya akan membuat ke-Yahudi-an Israel berkurang. Dengan tingginya angka kelahiran warga Palestina, penduduk Yahudi menjadi kelompok minoritas di negerinya sendiri jika Tepi Barat dan Jalur Gaza berhasil diduduki Israel. Di samping itu, "mazhab sosiologis" ini juga berpandangan bahwa perluasan wilayah ini justru akan membawa malapetaka.[262] Mazhab "teritorial" mengakui bahaya dari masalah demografis ini, tapi tetap percaya bahwa persoalan ini akan teratasi dengan meningkatkan kontrol terhadap wilayah Israel Raya (*Eretz Israel*).

Dengan memanfaatkan kekecewaan publik terhadap Partai Buruh pasca perang Yom Kippur, Begin mengkampanyekan ide-ide kelompok teriorial dan menjadikan ideologi-sayap-kanan dari ajaran Jabotinsky sebagai ideologi dominan di Israel.[263] Begin merupakan perdana menteri Israel pertama yang memposisikan Tepi Barat sebagai wilayah Yudea dan Samaria sekaligus menganggap mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari Tanah Israel. Segera setelah terpilih menjadi perdana menteri, Begin mengunjungi pemukiman Israel di Elon Moreh yang diduduki warga Palestina dan mendeklarasikan wilayah itu sebagai bagian dari "Israel yang terbebaskan". Pada Oktober 1979, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan bahwa pemukiman Elon Moreh merupakan pemukiman illegal dan penduduknya harus dievakuasi.[264] Terlepas dari keputusan Pengadilan Tinggi tersebut, menteri pertanian dalam kabinet Begin, Ariel Sharon, mengumumkan sebuah rencana untuk memindahkan lebih dari 1 juta warga Yahudi di Tepi Barat dalam jangka waktu 20 tahun ke depan—langkah yang sangat bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242. Dengan diberlakukannya sebuah doktrin keamanan Israel yang baru, Begin memutuskan untuk membangun hegemoni Israel di tingkat regional—sebuah perimbangan kekuatan yang akan membuat Israel sangat dominan—menurut Ilan Peleg. Begin sudah sejak lama—selama masa oposisi—sangat kritis terhadap apa yang ia gambarkan sebagai sikap defensif Israel. Begin mengadopsi sikap ofensif—yang ditunjukan dengan tujuan-tujuan ekspansionis—untuk mewujudkan keunggulan strategis Israel. Ide tentang Israel sebagai kekuatan militer paling kuat mendapatkan dukungan dari publik Israel selama masa jabatan Begin.[265]

Di samping itu, sebagai efek radikalisasi ajaran Jabotinsky dari generasi Holocaust, sebuah dimensi ideologis ditambahkan ke dalam doktrin Israel tentang wilayah pinggiran (*Israel's doctrine of the periphery*). Israel tidak lagi mencari sekutu dengan negara-negara non-Arab hanya untuk melemahkan negara-negara Arab di sekitar wilayah negara Israel sekaligus meyakinkan mereka tentang keuntungan yang akan diperoleh dari perdamaian dengan Negara Yahudi, tetapi justru aliansi dengan negara-negara non-Arab ini sekarang dipandang sebagai sebuah kebutuhan karena kemustahilan yang mereka rasakan untuk mewujudkan perdamaian dengan negara Arab. Negara Iran sebagai negara non-Arab

261

262

263

264

265

sangat cocok dengan doktrin Partai Likud ini, khususnya karena peradaban kuno yang dimiliki Iran—yang dipandang Israel lebih superior dibandingkan peradaban Arab—dan karena diplomasi gaya kuno yang dipraktekkan. Sementara para pejabat Israel cenderung menganggap mereka lebih tinggi derajatnya secara kultural dengan negara-negara tetangga Arab, mereka justru menganggap Iran sejajar derajatnya dengan Israel. Ada sebuah gagasan khas Israel yang menyatakan bahwa mereka bisa berhubungan dengan Iran karena mereka bangsa Iran.[266] Bagi Iran, kebijakan luar negeri yang agresif membuat kemenangan Begin menjadi awal kemunduran elektoral Shah di dunia internasional dalam kurun waktu kurang dari 8 bulan, ketika kandidat presiden dari Partai Demokratik AS Jimmy Carter 4mengalahkan Gerald Ford pada Novomber 1976. Pada masa awal pemerintahan Kennedy, Shah menciptakan ketegangan hubungan dengan Partai Demokratik. Shah membenci perhatian Kennedy pada hak asasi manusia sekaligus mengkhawatirkan Carter—yang bertujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan merintangi penjualan persenjataan produksi Amerika—akan bertindak seperti Kennedy.[267] Dari sisi kepentingan Shah, dominasi Partai Demokrat di Gedung Putih akan membuat Amerika menjadi sekutu yang kurang dapat dipercaya untuk melawan blok Komunisme. Meskipun begitu, di Israel, Shah lebih memilih pemerintahan Buruh—yang ketika mereka berkuasa Shah sedang mengembangkan hubungan Israel-Iran selama dua dekade sebelumnya, dan kepemimpinan partai Buruh ini memiliki hubungan baik dengan Shah dan para penasihatnya.[268] "Kita bisa membangun hubungan lebih mudah dengan Partai Buruh karena Anda bisa berbicara pada mereka dengan lebih kuat dan mereka mau mendengar," seorang pejabat Iran pada rezim Pahlavi berkomentar.[269]

Pendekatan agresif Begin merupakan berita buruk bagi Iran. Sejak perang 1967, Iran menganggap Israel sebagai negara perang. Para diplomat Iran seringkali menunjukkan ketidaksetujuan Teheran terhadap doktrin militer Israel, dengan pertimbangan bahwa Israel tidak dapat mencapai perdamaian dan penerimaan di regional yang bertahan hidup dengan senjata.[270] Shah memberikan dukungan terhadap posisi Arab ketika dia menolak klaim Israel atas Tepi Barat dengan alasan bahwa era pendudukan dan perebutan wilayah dengan kekuatan militer sudah berlalu.[271] Merujuk pada laporan singkat dari Departemen Luar Negeri AS, Shah mendesak Amerika Serikat kembali pada dekade 1970-an untuk menekan Israel mewujudkan perdamaian. "Shah berpendapat bahwa Amerika harus mengambil langkah untuk menghasilkan sebuah resolusi bagi konfrontasi Arab-Israel. Shah dikenal sebagai penentang Yudaisasi kota Yerusalem dan mendukung penarikan pasukan Israel dari teritori negara Arab sekaligus mengembalikan hak-hak konstitusional warga Palestina."[272]

Dalam sebuah wawancara dengan *U.S. News &World Report* pada 1976, Shah mengajak Israel untuk menerapkan Resolusi PBB ke 242 dan 338 dan mengakui negara Palestina sebagai sebuah kenyataan: "Saya selalu menyampaikan pendapat bahwa Resolusi 242 dan 338 harus diterapkan. Kita tidak bisa hanya menerima sikap *fait accompli*—

266
267
268
269
270
271
272

pengambilan alihan wilayah dengan kekuatan militer—karena jika Anda menerima tindakan tersebut di satu wilayah, kenapa Anda menolak tindakan itu di tempat yang lain? PLO harus berada di Genewa dalam beberapa bentuk, karena Anda tidak dapat mengabaikan keberadaan begitu banyak warga Palestina. Kita harus menerima hal ini. Sebagaimana kita menerima keberadaan Israel, kita harus menerima keberadaan Palestina juga. Ini adalah sebuah kenyataan."[273]

Pada awal 1977, beberapa bulan sebelum pemilihan Begin, Perdana Menteri Iran Amir Abbas Hoveyda berkeliling di Timur Tengah dan mengumumkan beberapa perjanjian dengan rekan-rekannya di negara Arab. Di Rabat, Iran, dan Maroko dia "menekankan bahwa krisis di Timur Tengah bisa diselesaikan hanya dengan penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah negara-negara Arab yang sebelumnya diduduki Israel dan pemenuhan hak-hak warga Palestina yang tidak dapat dicabut untuk atas keberadannya sebagai sebuah bangsa."[274] Satu bulan setelah kunjungan ini, sebuah pernyataan bersama dengan Mesir diumumkan di Teheran yang mengecam Israel atas kebijakan dantindakannya di teritori negara Arab yang dirancang untuk mengubah komposisi demografis dan karakter geografis dari teritori tersebut. "Bagi Iran dan Mesir, kebijakan Israel ini merupakan ancaman serius bagi perdamaian di Timur Tengah.[275] Pada bulan Mei, pernyataan serupa diumumkan Iran bersama pemerintahan Kuwait.[276] Dari perspektif Iran, sikap kritis terhadap posisi Israel merupakan langkah yang tepat secara politis pada saat itu, dan—dengan pertimbangan kerentanan posisi Israel di hadapan Iran—sikap kritis ini tidak akan menguras ongkos politik yang banyak.[277] Pergeseran Israel ke sayap-kanan, dan kebijakan Begin yang 'keras kepala'—dari perspektif Shah—memberikan tantangan tersendiri bagi tujuan dan strategi Iran, yang terhambat oleh kemunduran kekuatan Iran. Shah melihat Begin sebagai seorang garis-keras yang kebijakan kakunya akan mengganggu keinginan Anwar Sadat untuk berdamai, dan Shah mengancam akan membatasi kerjasama militer Iran-Israel kecuali Begin mengadopsi kebijakan yang lebih fleksibel. Shah menginstruksikan Jenderal Hassan Toufanian, yang menjalankan program pengadaan persenjataan militer Iran, agar 'mengulur-ulur' proyek militer rahasia ini.[278] Teheran juga khawatir bahwa kebijakan ekspansionis Israel di Tepi Barat akan menyebabkan instabilitas dan memberikan kesempatan bagi Uni Soviet untuk memperkuat eksistensi mereka di Timur Tengah. "Jika [keinginan, *pen.*] negara-negara Arab tidak dapat diakomodasi dengan cara apapun, maka peluang Uni Soviet untuk kembali dan melakukan penetrasi di Timur Tengah akan semakin besar, karena negara-negara Arab tidak punya tempat lagi untuk pergi," seorang penasihat Shah berkomentar. Lagi pula, Shah sedang membangun legitimasi kepemimpinannya dengan mengkampanyekan perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab.[279] Keputusan jangka-panjang Shah tidak untuk mengakui keberadaan Israel secara *de jure* yang salah satunya disebabkan oleh kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan menghambat mediasi antara Israel dan negara Arab.[280]

273
274
275
276
277
278
279
280

Tetapi, kebijakan 'garis-keras' Begin membuat usaha Shah untuk menjadi juru damai semakin sulit, yang sangat mencerminkan kinerja Iran sebagai pemimpin regional di hadapan negara-negara Arab.[281] Peperangan yang berkepanjangan menyebabkan berbagai konsekwensi yang tidak terduga, yang akan mengganggu keseimbangan regional bagi Iran sekaligus mengarahkan perhatian yang besar terhadap hubungan Iran dengan Israel yang tidak populer. Begin sangat paham terhadap sensitiftas Shah, dan segera setelah kemenangan pemilihannya Begin mengutus Menteri Luar Negeri Moshe Dayan ke Teheran untuk meyakinkan Shah bahwa Israel akan mengusahakan perdamaian. Pesan Dayan ini kemudian disampaikan kembali kepada Toufanian dalam sebuah pertemuan di Tel Aviv pada 18 Juli 1977. Catatan pertemuan ini mengungkapkan bahwa Dayan meyakinkan Toufanian bahwa Israel menginginkan perdamaian "tanpa syarat apapun" dan tanpa "tapi" dan "jika". Lebih jauh lagi, Dayan menjelaskan bahwa "seluruh hal yang disampaikan terbuka untuk dinegosiasikan, dan bahwa Israel sudah mempersiapkan diri untuk duduk bersama dengan negara tetangga Arabnya tanpa syarat apapun," tapi Israel "tidak akan bernegosiasi dengan PLO dan tidak menyetujui pendirian negara oleh PLO." Toufanian merespon bahwa Shah juga telah memperjuangkan sebuah solusi damai dengan negara Arab dan bahwa ketika Shah diyakinkan bahwa ini adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Israel, maka kerjasama antara dua negara akan terus dikembangkan dan diperdalam."[282] Persetujuan bersyarat dari Toufanian mencerimkan keraguan atas kejujuran Begin.

Pada 9 November 1977, Anwar Sadat membuat sebuah langkah berani untuk memecahkan kebuntuan negosiasi Arab-Israel dengan memanggil Knesset Israel.[283] Shah sangat mendukung langkah berani Sadat ini dengan harapan bahwa Israel akan merubah posisinya menjadi lebih fleksibel.[284] "Sadat kurang memiliki kebencian terhadap perdamaian dibandingkan yang lainnya, termasuk Israel," Shah memberikan keterangan pada majalah *Newsweek*. "Saya berharap Israel memilih lebih sedikit kebencian,"[285] Tawaran yang tidak terduga dari Mesir memberikan tekanan besar bagi Israel, yang secara tepat menuduh bahwa tawaran Sadat untuk berdamai akan memperkuat "opsi Arab" dari Iran—menguatkan posisi Arab dalam konfliknya dengan Israel. Segera setelah langkah Sadat, Begin mengutus Dayan ke Teheran dengan tujuan untuk menyampaikan catatan asli dari pembicaraan presiden Mesir itu. Shah memanfaatkan peluang ini untuk memperingkatkan Israel agar tidak menganggap rendah Soviet. Shah berpandangan bahwa Uni Soviet telah mempersenjatai Irak dan Syria untuk menghalangi setiap usaha-usaha mewujudkan perdamaian. "Israel akan mencatat dengan baik bahwa negara-negara ini, atas dukungan dan bantuan dari Soviet Rusia, akan memerangi Israel."[286] Tetapi permintaan pertama Dayan terungkap bahwa tujuan utama Israel dalam kunjungan tersebut adalah untuk melemahkan opsi Arab dari Iran. Dayan meminta agar Shah secara resmi mengumumkan kedatangannya di Teheran, bertentangan dengan praktik rahasia yang selama ini terjadi dalam hubungan antara Iran dan Israel. Dayan juga mengusulkan

281

282

283

284

285

286

agar misi diplomatik mereka ditingkatkan statusnya ke dalam sebuah kedutaan resmi—maksudnya, Iran mengakui eksistensi Israel secara *de jure*. Shah sadar bahwa Israel berusaha menghalangi usahanya untuk menjalankan opsi Arab, lalu menolak usulan Dayan, dengan menekankan pengaruh pemimpin Islam Iran terhadap opini publik warga Iran. Bahkan sebelum kunjungan Dayan ini, Tel Aviv telah berusaha menggunakan kunjungan Sadat untuk semakin mempublikasikan hubungan Israel-Iran, yang sangat menggangu Iran. Kementerian Luar Negeri Iran kemudian mengundang kepala misi Iran ke Israel untuk memberikan sambutan resmi kepada Sadat ketika tiba di Bandara Ben-Gurion. Dengan pertimbangan bahwa kunjungan ini ingin akan menarik perhatian media, Iran tidak dapat memberikan sambutan resminya kepada presiden Mesir di Israel. Kepala misi Iran menolak tawaran itu dengan sopan.[287]

Kunjungan pertama kalinya dalam sejarah yang dilakukan Sadat ke Israel menumbuhkan harapan untuk sebuah proses perdamaian, tapi harapan itu segera pudar selama rangkaian tindak lanjut pembicaraan di Ismailia, Mesir, pada bulan Desember. Dengan dukungan yang penuh terhadap posisi Sadat, Shah kemudian mengunjungi Mesir pada 9 Januari 1978, dan memberikan keterangan kepada para wartawan bahwa "Menurut saya Mesir telah bertindak sesuai apa yang kami anggap benar." Shah justru menyalahkan Israel dengan mengatakan bahwa kesalahan ada di pihak Israel.[288] Satu bulan kemudian, Shah terus menekan Israel secara terbuka dengan mengecam sikap Israel sebagai negara yang "tidak dapat dipahami, tidak dapat berkompromi, dan keras kepala."[289] Sikap keras Shah ini muncul hanya beberapa hari sebelum kunjungan Begin ke Teheran. Meskipun Shah cenderung bersikap keras terhadap perdana menteri Israel, dia mampu memaksa Begin untuk memahami kerentanan posisi Sadat di dunia Arab karena kunjungan sepihaknya ke Yerusalem. Pemerintahan monarki Iran juga menunjukkan bahwa Iran tidak bermaksud ada di pihak negara Arab sepenuhnya. Shah tidak mempertimbangkan untuk mengambil posisi antagonistik terhadap Israel dalam membela Arab," Gholam-Reza Afkhami, seorang penasihat Shah, menjelaskan.[290] Alasan dari sikap ini karena—ketika kekuatan Iran mulai menurun dan kekuatan Irak meningkat—kebutuhan kemanan Teheran terhadap Israel semakin menigkat, yang membuat Tel Aviv sangat gembira.

Project Flower

Hanya berselang dua bulan setelah penandatanganan Perjanjian Aljazair, Iran mulai menyadari bahwa perjanjian tersebut tidak berhasil mengurangi ancaman Irak. Lebih jauh lagi, keamanan Iran terganggung oleh Presiden Carter, yang berusaha mendekati Soviet secara lebih halus. Shah sangat kritis terhadap langkah Amerika dalam Perang Dingin dan berpendapat bahwa Washington telah berubah menjadi sekutu yang tidak dapat dipercaya. Shah mengkhawatirkan jika Washington tidak mampuuntuk bersikap tegas melawan Komunisme, maka Soviet akan mendapatkan banyak peluang untuk memperbesar pengaruhnya di Timur Tengah. Pada akhir 1977, Shah berbicara pada seorang pejabat Israel yang menyelidiki belanja senjata Iran yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Shah yakin sekali bahwa peperangan dengan negara blok Arab pro-Soviet sudah datang.

287

288

289

290

Pemerintahan monarki Iran percaya bahwa Irak—atas provokasi Uni soviet dan dengan dukungan penuh dari negara-negara Arab—akan menyerang Iran terlepas dari adanya Perjanjian Aljazair. Lebih dari itu, Iran khawatir bahwa Amerika akan menyikapi perang itu sebagai konflik lokal dan menahan diri untuk tidak memihak sekaligus membiarkan Iran mempertahankan dirinya sendiri, meskipun Irak akan berperang dengan dukungan penuh Soviet.[291] Penjualan rudal Scud produk Soviet kepada Irak, yang secara signifikan mampu meningkatkan daya serang Irak, tidak mampu memperbaiki keadaan.[292] Pada November 1977, sebuah wawancara *Newsweek* dengan Shah mengungkapkan dilema yang dihadapi Iran:

> Pertanyaan: Anda seringkali dituduh "tergila-gila akan keagungan" dalam kebijakan belanja senjata. Apakah Anda sedang berusaha menjadi negara independen karena Anda merasa bahwa Amerika sudah tidak bisa diandalkan lagi?
>
> Shah: Ini bukan hanya karena Amerika tidak bisa diandalkan lagi seperti yang kita saksikan di Vietnam, Kamboja, dan Laos dan selama perang India-Pakistan. Ini juga karena ketidakmampuan PBB. Kami telah menyelesaikan berbagai persoalan dengan Irak, tapi pembangunan militer mereka terus berlanjut. Dan saya bertanya-tanya berapa banyak penulis editorial dan anggota Kongres Anda yang menyadari bahwa Irak memiliki lebih banyak pesawat, tank, dan senjata daripada kita—bahkan Irak memiliki lebih banyak rudal Scud misil *ground-to-ground*. Atau kita hanya sedang berada di negara lain. Perhatikan batas-batas wilayah kami. Apa yang akan terjadi jika wilayah Pakistan yang masih ada terpecah-pecah? Jika kami tidak menjaga keamanan negara kita sendiri di regional, siapa yang akan melakukannya?[293]

Shah merasa bahwa Iran membutuhkan kemampuan pencegahan atas rudal Scud Irak dan kembali melakukan pembelian rudal Pershing. Tetapi pemerintahan Carter menolak permintaan pembelian Iran, karena kepemilikan rudal ini berpotensi memicu perang nuklir.[294] Dalam keadaan frustasi dan tidak punya pilihan lain, Teheran kembali mendekat ke Israel—seperti yang sering dilakukan Iran ketika Washington menolak untuk berbagi perkembangan teknologinya dengan Iran. Negara Yahudi itu berkenan memberikan akses atas teknologi yang tidak akan diberikan Barat kepada [Iran]."[295] Pembelian rudal balistik Scud oleh Irak mendorong inisiatif sebuah kolaborasi rahasia sekaligus kontroversial antara Iran dan Israel—*Project Flower.* Shah memerintahkan Jenderal Toufanian agar kembali ke Israel untuk keperluan teknologi rudal. Respon Israel lebih dari sebuah penjulana rudal-rudal Amerika. Tel Aviv menawarkan sebuah kerjasama yang akan memanfaatkan anggaran Iran dan pengetahuan Israel untuk mengembangkan sebuah rudal dengan jangkauan 200 mil. Israel berpendapat bahwa Teheran membutuhkan rudal

291

292

293

294

295

balistik lokal yang dibuat di gudang senjata Iran, dan Shah bersedia mendengarkan Israel. "Anda harus memiliki rudal *ground-to-ground*," Menteri Pertahanan Israel, Ezer Weizman, berbicara pada Toufanian. "Negeri seperti negeri Anda, dengan pesawat F-14, dengan begitu banyak pesawat F-4, dengan begitu banyak persoalan yang mengelilingi Anda, [harus memiliki] sebuah kekuatan rudal yang baik."[296] Pembicaraan awal sudah dimulai di bawah pemerintahan Yitzhak Rabin. Shah dan Menteri Pertahanan Israel selanjutnya, Shimon Peres, menandatangani sebuah perjanjian pada April 1977 di Teheran, termasuk sebuah kontrak barter minyak-dengan-senjata yang bernilai 1 milyar dolar Amerika.[297] Tujuan perjanjian ini adalah untuk memperbesar kekuatan rudal Israel dan mengganti suplai onderdil persenjataan produk Amerika sehingga Israel bisa secara legal mengekspor ala-alat tersebut tanpa persetujuan Washington. Rudal produk Israel ini termasuk peralatan sistem navigasi produk Amerika dan sebuah sistem panduan yang terlarang untuk diberikan Tel Aviv ke negara lainnya.

Kemenangan Begin dalam pemilihan umum membuat Shah menangguhkan *Project Flower* ini, tetapi keputusan ini berubah pada 1978 setelah Iran menerima jaminan dari Weizman bahwa Israel serius untuk mewujudkan perdamaian dengan negara Arab. Iran melakukan pembayaran uang muka senilai 280 juta dolar Amerika dalam bentuk minyak dari Pulau Kharg di Teluk Persia, dan Israel memulai pembangunan fasilitas perakitan rudal dekat daerah Sirjan, di selatan Iran, dan sebuah percobaan jangkauan rudal dekat Rafsanjan—dari lokasi ini rudal dapat menjangkau jarak 200 mil ke arah utara di wilayah gurun pasir, dan ke arah selatan di Teluk Oman.[298] Toufanian menyaksikan percobaan rudal ini dalam sebuah kunjungan ke Israel. "Rudal ini sangat cantik, indah, dan sebuah rudal yang dikembangkan dengan maksimal," Toufanian memberikan keterangan dalam sebuah wawancara dengan *New York Times*.[299] Proyek ini membuat Iran memiliki teknologi rudal lokal yang dapat melindungi Iran baik dari ancaman Saddam Hussein dan Moskow sekaligus mengurangi ketergantungan Iran pada suplai persenjataan dari luar negeri.[300] "Hal yang paling penting adalah tetangga kita Rusia, " Toufanian berbicara pada Weizman." Tujuan mereka tidak pernah berubah. Hal ini berlaku atas semua wilayah perairan. Kami terpaksa harus mengembangkan kekuatan antisipasi."[301] Bagi Israel, proyek ini mampu menghidupkan kembali aliansi mereka dengan Teheran ketika hubungan ini mengalami tekanan dari blok negara Arab dan ambisi kepemimpinan Shah—sementara itu Shah menawarkan kepada Israel jaminan suplai minyak dan anggaran untuk meningkatkan riset militer. Meskipun Israel tidak nyaman dengan ketergantungannya pada minyak dari Iran—Departemen Luar Negeri AS memperkirakan bahwa 75 persen impor minyak Israel berasal dari Iran pada 1970—dan meskipun Tel Aviv berusaha mencari pemasok minyak baru dan cadangan minyak di Gurun Negev selatan Israel, pembelian minyak ini juga memungkinkan Israel menciptakan pasar baru untuk produk dan teknologi Israel di Iran.[302] Hal ini juga menunjukan kepada negara Arab—Israel berharap—bahwa kerjasama dan pengakuan Israel akan membawa banyak keuntungan.

296

297

298

299

300

301

302

Urgensi *Project Flower* ini adalah bahwa rudal-rudal ini bisa saja merupakan awal dari pembuatan hulu ledak nuklir, meskipun kemungkinan ini tidak diusahakan pada waktu itu. Hal ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka, tetapi Iran menafsirkan isyarat dari Israel sebagai tanda bahwa kemungkinan ini bisa direalisasikan. "Ketika Anda membaca paragraf ini, tidak ada keraguan mengenai hal ini," Toufanian menjelaskan dokumen rahasia Israel yang menggambarkan diskusi antara dirinya dengan Weizman. Meskipun Iran tidak menjalankan program nuklir pada waktu itu, "tidak berarti bahwa kami tidak akan tertarik pada program itu pada dekade selanjutnya", jenderal kepercayaan Shah bercerita. Dalam konteks yang lebih luas, Israel dan Iran membicarakan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan program rudal mereka sehingga mereka bisa meluncurkan rudal itu dari kapal selam. Hal yang paling mengejutkan mengenai proyek ini adalah Washington sangat sadar bahwa Tel Aviv dan Teheran telah melakukan banyak pertemuan rahasia, tetapi perkembangan dari pertemuan-pertemuan itu dan substansi dari pertemuan itu tetap tidak jelas bagi Amerika. "Israel telah mengerjakan cukup banyak proyek bagi Iran yang kita tidak tahu untuk apa," mantan Asisten Sekretariat Negara untuk Urusan Timur Dekat, Harold Saunders berkomentar, "Tetapi yang mengejutkan saya adalah Israel akan mengajak Iran dalam proyek pengembangan rudal yang akan menjadi bagian dari progam nuklir mereka," Gary Sick, yang bekerja di Dewan Keamanan Nasional sama terkejutnya. Dia mengatakan bahwa "sulit untuk memahami dua negara yang bersekutu sangat dekat dengan Amerika Serikat sedang bekerja sama dalam sebuah operasi militer tanpa membicarakan hal ini pada kami."[303]

Revolusi 1979 menjadi akhir dari keterlibatan Iran dalam *Project Flower*. Di kemudian hari, pada 1990-an, kepemimpinan Islam Iran menghubungi Toufanian di Washington dan berusaha meyakinkannya agar memberitahu detail proyek tersebut sekaligus membantu Iran agar mendapatkan kembali uang yang sudah dikirim ke Israel pada 1978. Toufanian menolak untuk bekerja sama.[304] Kerjasama militer antara Israel dan Iran merupakan sebuah wasiat bagi kekakuan Iran dan persepsia ancaman terhadap Israel. Ketika situasi geostrategis Iran dan Israel bergeser, fondasi utama kerjasama mereka—ancaman Soviet dan kekuatan Arab—menunjukkan daya tahan yang luar biasa terlepas dari usaha Shah untuk menjadi kekuatan dominan di regional. Bagi Iran, hubungan Israel-Iran merupakan sebuah antisipasi (*deterrent*) melawan rezim negara Arab, karena Israel bisa menggunakan serangan Arab terhadap Iran untuk melumpuhkan wilayah barat Irak.[305] Meskipun pembicaraan damai dengan Mesir mampu mengurangi perhatian sebagian pejabat Israel terhadap tujuan Kairo, Tel Aviv tetap melanjutkan ancaman dari tetangganya di bagian timur itu. Weizman menegaskan kekhawatiran-kekhawatiran Israel tentang kolaborasi militer dari Mesir, Syria, dan Irak dalam diskusinya dengan Toufanian: "Hal terakhir yang saya ingingkan dan saya perlukan adalah perang. Anda harus ingat bahwa Mesir, Yordania, Syria berada di sekeliling kita, mereka sekarang berkekuatan 5,000 tank dan memiliki lebih dari 1,300 pesawat perang. Irak mampu bergerak dalam waktu 48 jam dengan kekuatan yang cukup besar. Saya tidak ingin membicarakan strategi tetapi Anda hanya harus melihat peta dan perhatikan apa yang akan terjadi pada sebuah negara

303

304

305

kecil seperti kami jika kami mundur hingga batas-batas wilayah awal tanpa jaminan keamanan yang nyata."[306]

Menyadari kekhawatiran Iran terhadap kekuatan persenjataan Irak, Mossad mengusulkan kembali wacana pemberian bantuan kepada pasukan Kurdi melalui Savak. Iran menyadari bahwa penghentian kerja sama dengan pasukan Kurdi telah menyebabkan Irak mampu memperkuat pasukannya, sehingga Israel berharap bahwa Teheran akan membuka kembali jalur di wilayah Kurdi. Israel berasumsi bahwa Teheran telah mempertimbangkan usulan tersebut tetapi tidak pernah memberikan respon yang pasti. Seorang pejabat senior pemerintahan Iran menegaskan bahwa sebuah dokumen rahasia Savak menunjukan bahwa kerjasama antara Israel, Iran, dan Barzani Kurdi diusulkan pada 1978, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Hanya ada 4 agen Savak yang terlibat dan peduli dengan operasi kerjasama ini.[307]

Meskipun begitu, kemunduran kekuatan Iran, pendekatan lunak presiden Amerika Jimmi Carter kepada Uni Soviet, dan meningkatnya kekuatan Irak mendorong Iran kembali mendekati Israel. Meskipun Israel tidak mengambil langkah khusus apapun untuk mengintensifkan persepsi ancaman Iran dan Israel—menghemat energi untuk mengganggu hubungan Iran-Arab, sebagaimana Shah mengambil untung dari konflik Israel-Arab, Negara Yahudi diuntungkan dari ancaman yang dirasakan Shah dari Baghdad dan Moskow. Dari perspektif Israel, khususnya bagi kelompok neo-Revisionis dalam Partai Likud, Iran terus menjadi landasan bagi doktrin periperial Israel. Bagi Israel, logika aliansi Israel-Iran mampu bertahan lama—jika tidak permanen. Menurut Eliezer Tsafrir, kepala operasi Mossad di Iran dan Irak pada 1960-an dan 1970-an,

> Apapun nama dari Iran—baik Parsi, Elam, Media—dan apapun nama dari Irak—Babilon, Asyyria, Akkad, Sumer—selalu ada rivalitas dan kadang-kadang peperangan [antara dua negara]. Iran mengetahui hal ini—dan inilah mengapa saya optimis tentang hubungan Iran-Israel di masa depan. "Koroush-e Kabir" [Cyrus yang Agung] tahu bahwa ada kepentingan bersama antara dua pihak di Timur Tengah—Iran dan Israel. Inilah kenapa Koroush membiarkan Ezra dan Nehemja kembali dan membangun ulang kuil itu. Jelas sekali ada kepentingan untuk menguasai Babilonia [Irak]. Iran memang Muslim tetapi bukan Arab, dan [untuk menjaga keseimbangan ini] Iran perlu pihak lain [yang sama-sama non-Arab] yang memiliki kepentingan bersama.[308]

Saat Shah berusaha meraih kembali inisiatif dalam kondisi ketidakseimbangan kekuatan di regional, pergolakan internal di Iran memaksa pemerintahan monarki Iran mengalihkan perhatiannya pada kerentanan situasi domestiknya. Ketidakpercayan publik tumbuh; tujuh bulan setelah kunjungan Begin ke Iran, perdana menteri Israel berusaha meyakinkan Presiden Amerika Jimmy Carter dan Anwar Sadat dalam sebuah perbincangan di Camp David bahwa rezim Shah sudah berakhir.[309]

306

307

308

309

8-Masuklah Wahai Ayatollah

Allaahu Akbar, Khomeini Rahbar
(Allah MahaBesar, Khomeini pemimpin kami)
—Atase Militer Yitzhak Segev dan Kepala Mossad Elizer Tsafrir menyambut kembalinya Khomeini ke Iran, di Lapangan Shahyad/Meidan-e Azadi, 11 Februari 1979

Pada 11 Februari 1979, pemerintahan dinasti Persia digantikan dengan sebuah pemerintahan Islam. Revolusi Iran merupakan peristiwa penting tidak hanya bagi Iran—peristiwa ini juga mengejutkan seluruh dunia Islam. Melalui sebuah revolusi populis, pemerintahan diktator pro-Amerika yang berada di wilayah kaya-minyak Timur Tengah telah dijatuhkan dengan rezim teokratik pertama di dunia modern. Situasi Timur Tengah kemudian berubah. Kejatuhan Shah mengejutkan blok Barat, meskipun tanda-tanda ketidakpuasan di internal Iran ditutupi begitu rapat. Israel juga mengalami kekhawatiran yang sama tetapi tidak merasakan keterkejutan seperti blok Barat. Dengan dukungan dari komunitas Yahudi-Iran, jaringan inteljen informal Israel di Iran memiliki akses informasi yang lebih tinggi dari pada Amerika Serikat.[310] Para pejabat Iran sudah mengungkapkan kerentanan posisi Shah secara tidak langsung dengan meminta bantuan dan nasihat dari Israel. Savak kemudian lebih sering berkomunikasi dengan Mossad untuk menginterogasi aktivis oposisi yang jumlahnya terus meningkat.[311]

Pada waktu itu, perilaku pejabat Iran terkadang menggelikan. Misalnya, pada 1978, kepala angkatan udara Iran, Amir Hossein Rabii, memaksa atase militer Israel, Yitzhak Segev untuk meminta Menteri Luar Negeri Israel, Moshe Dayan, agar "menyampaikan realitas di Iran kepada Shah. Shah sedang duduk di atas kursi yang tinggi sekali. Setiap orang hanya berkata ya, ya, ya. Anda tidak dapat mengkritik Shah, Anda tidak bisa membicarakan semua hal ini padanya." Atase militer Israel kemudian memerintahkan dan membawa Dayan ke Iran. Dayan dengan cepat berkesimpulan bahwa Shah tidak lagi mampu membuat keputusan. Dan tanpa keputusan Shah, pemerintahan Iran secara efektif akan lumpuh. Segev beralasan bahwa sebuah kudeta militer merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan rezim Pahlavi. Tetapi para jenderal Iran terlalu khawatir untuk menentang otoritas Shah atau bahkan hanya untuk menjelaskan instabilitas situasi di Iran kepada Shah. Sebuah pertemuan sederhana para jenderal tanpa izin dari kerajaan Iran merupakan bentuk kudeta bagi pikiran paranoid Shah. Para jenderal itu baru merancang kudeta hanya setelah Shah melarikan diri pada 16 Januari 1979, tetapi kemudian Presiden Amerika Jimmy Carter menginginkan adanya proses yang demokratis di Iran. Keputusan Washington ini kemudian menghancurkan harapan terakhir para jenderal, dan sebagian para jenderal ini berpandangan bahwa tidak ada solusi lain selain melarikan diri dari Iran.[312]

Ketika Shah melarikan diri, dia menyerahkan kekuasaan kepada Shahpour Bakhtiar, tokok oposisi yang tidak mendapat kepercayaan pemerintahan monarki Iran, kelompok Islamis, atau kelompok sayap kiri. Mossad kemudian menawarkan bantuan kepada Bakhtiar—yang menegaskan bahwa jika Israel mampu melakukan sesuatu yang membuat

310

311

312

Khomeini diam, hal ini akan sangat membantu—Khomeini merupakan tokoh garis-keras Iran yang menjadi pelopor gerakan oposisi terhadap Shah dari markasnya di Paris. Bakhtiar mengusulkan agar Shah membuat permintaan langsung ke Tel Aviv, tetapi Israel menolak usulan tersebut, dengan mengingatkan Bakhtiar bahwa Israel bukan polisi dunia."[313] (Satu dekade kemudian berbagai peran ini dibalik. Menurut laporan media, beberapa agen Iran memasuki rumah Bakhtiar di Paris—kota pelarian Bakhtiar—dan secara brutal membunuhnya.) Saat itu Bakhtiar sudah menjabat sebagai perdana menteri. Penerbangan El Al milik Israel merupakan satu-satunya akses penerbangan Iran ke seluruh bandara di dunia; seluruh penerbangan lainnya telah membatalkan perjalanannya ke Iran karena situasi yang tidak stabil dan adanya kekerasan. Dayan ingin agar para staf Israel tetap tinggal di Iran selama mungkin, dengan harapan kehadiran mereka dapat memaksa pemerintahan revolusioner untk tetap menjaga hubungan mereka dengan Israel.[314] Untuk meredam opini publik dan gerakan oposisi dari kelompok agama, kebijakan pertama Bakhtiar adalah memutuskan hubungan Iran dengan rezim *apartheid* di Afrika Selatan dan menghentikan ekspor minyak ke Israel.[315] Isyarat Israel kepada Bakhtiar terbukti tidak berguna, karena kekuasaan Bakhtiar tidak berlangsung lama. Pada 1 Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran setelah lima belas tahun hidup dalam pengasingan, dia disambut jutaan rakyat Iran. Dia segera mendeklarasikan perang terhadap pemerintahan Bakhtiar. Sepuluh hari kemudian, Bakhtiar mundur.[316]

Ketika Khomeini tiba, ayatollah—makna literalnya "Tanda Tuhan"—terbang ke Alun-Alun Shahyad di selatan Teheran (namanya diganti jadi Meidan-e Azadi, Alun-Alun Kebebasan, setelah peristiwa revolusi), dan jutaan pendukungnya sudah berkumpul untuk menyambut Khomeini. Di lapangan ini, di samping kelompok religius revolusioner, telah berdiri atase militer Israel—Yitzhak Zegev—dan kepada Mossad di Iran—Eliezer Tsafrir—yang sedang mengawasi proses tersebut dan berusaha menyelesaikannya. Seorang mullah—panggilan tokoh agama dalam Islam—melewati dua orang Israel itu dan bertanya kepada mereka dalam bahasa Persia—mengapa mereka tidak membawa gambar Ayatollah yang sedang marah. Mereka berapologi—dalam bahasa Persia yang fasih—lalu diberi dua gambar besar "Bapak Revolusi". Mereka kemudian bergabung dengan jutaan orang yang berteriak "Allaahu Akbar, Khomeini Rahbar" (Allah Maha Besar, Khomeini pemimpin kami). Ketika helikopter Khomaini mendekat, Segev melihat seseorang yang tidak asing lagi duduk di samping Khomeini. "Di dalam helikopter ada Jenderal Rabii," tangan kanan Shah yang beberapa bulan sebelumnya merancang sebuah konspirasi untuk membunuh Khomeini.[317] Beberapa minggu kemudian, Rabii dibunuh kelompok revolusioner. Itulah hari-hari yang berbahaya bagi warga Israel di Teheran. Pada 10 Februari 1979, satu hari sebelum Bakhtiar mundur, penerbangan terakhir El Al tiba di Teheran untuk mengevakuasi warga Israel. Tetapi peraturan jam malam memaksa penerbangan ini melakukan lepas landas secara terburu-buru, tanpa bisa mengangkut penumpang, sehingga banyak warga Israel menunggu di bandara hingga pagi hari. Pada hari berikutnya, segerombolan orang menyerang kantor perwakilan Israel. Segev lalu menghubungi Jenderal Toufanian dalam

313

314

315

316

317

keadaan putus asa dan meminta bantuan militer Iran. Tetapi permintaan Segev ini diabaikan. “Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak bisa membantu Anda.” Toufanian menjawab.[318] Ketika gerombolan ini berhasil mendobrak pintu gerbang, Segev dan tiga staf lainnya melarikan diri melalui pintu samping. Kantor perwakilan Israel kemudian dijarah dan dibakar.

Setelah kehilangan markas, Mossad kemudian membangun beberapa rumah yang aman di Teheran untuk melindungi warga Israel yang masih tersisa. Saat itu Khomeini telah mendirikan sebuah pemerintahan baru. Mossad telah menjalin kontak dengan beberapa kelompok oposisi sebelum kejatuhan Shah, dan mereka tidak punya banyak harapan untuk membangun hubungan baik dengan pemerintahan revolusioner.[319] Meskipun begitu, untuk terakhir kalinya Israel telah mengklarifikasi apakah mereka bisa tetap tinggal di Iran atau mereka harus meninggalkan Iran—Israel sangat paham bahwa kondisinya akan lebih sulit jika Israel mengirimkan para stafnya kembali ke Iran daripada mempertahankan mereka tetap tinggal di Iran dan memaksa (*fait accompli*) pemerintahan baru di Teheran. Tsafrir,yang memimpin Mossad melakukan proses evakuasi, lalu menghubungi wakil perdana menteri Khomeini, Amir Abbas Entezam, untuk meminta izin tinggal. Setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri Mehdi Bazargan dan ajudan Menteri Luar Negeri Karim Sanjabi, Entezam menolak permintaan itu dan memaksa Israel untuk meninggalkan Iran. Beberapa hari kemudian, 18 Februrari 1979, Bazargan memutuskan seluruh hubungan dengan Israel, termasuk perdagangan minyak dan jalur penerbangan. Dengan keputusan ini, hubungan Iran-Israel berakhir secara tiba-tiba dan tidak terduga.[320]

Isu Palestina di tangan Kelompok Revolusioner

Rezim baru ini memposisikan dirinya sebagai negasi terhadap terminologi Pahlavi; setiap aspek yang berasal dari dinasti Pahlavi adalah salah, termasuk hubungan dengan Israel. Meskipun kekecewaan terhadap hubungan diam-diam Shah dengan Israel bukanlah faktor utama yang mendorong revolusi, sentimen anti-Israel didukung oleh seluruh faksi revolusi. Kelompok sayap Kiri menentang Israel karena Tel Aviv dekat dengan Amerika Serikat. Mereka memandang Negara Yahudi itu sebagai sebuah pengawal imperialisme Amerika di Timur Tengah dan mengaitkan sikap Israel terhadap warga Palestina dengan sikap rezim apartheid di Afrika Selatan terhadap warga kulit hitam.[321] Di sisi lain, kelompok agama di Iran menganggap Israel sebagai negara ilegal dan perampas wilayah Muslim.[322] Kelompok-kelompok revolusioner dari kalangan agama menegaskan bahwa Israel secara alami bertentangan dengan Islam dan al Quran dan bahwa sikap penentangan terhadap Israel merupakan kewajiban agama bagi setiap Muslim.[323] Pendirian Negara Yahudi merupakan penghinaan bagi agama Islam, dan berbagai masalah di dunia Islam disebabkan oleh sekularisme serta penyelewengan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kelompok fundamentalis berpendapat bahwa Iran berkewajiban untuk berjuang demi Islam dan keadilan Islam dimanapun, karena proses revolusi hanya menghasilkan sebuah negara

318

319

320

321

322

323

Islam yang sebenarnya.[324] Pandangan seperti ini relatif baru di kalangan ulama Iran. Sementara para ulama Iran mendukung perjuangan warga Palestina dalam perspektif anti-imperialisme, maka Khomeini memberikan dimensi religius terhadap konflik Palestina-Israel.[325]

Imam Seyyed Ruhollah Khomeini Al Mosawi dilahirkan di tengah keluarga taat dengan lingkungan keulamaan yang kuat di sebuah kota bernama Khomein di wilayah tengah Iran pada 17 Mei 1900. Dia mempelajari agama sejak masa kecil dan diterima menjadi murid di sebuah madrasah di Arak dan Qom—terkenal dengan tokoh Ayatollah Sheikh Abdol-Karim Haeri-Yazdi. Pada 1963, Khomeini menentang pemerintahan Shah secara terbuka dan dipenjara selama 8 bulan, lalu diasingkan ke Turki dan Irak—di Irak Khomeini terus mengkhutbahkan seruan anti-Shah. Pada 1978, Saddam Hussein sudah cukup marah dan mengusir Ayatollah, yang salah satunya terbukti karena tekanan Iran.[326] Khomeini kemudian tinggal di Prancis hingga ia kembali ke Iran pada 1979. Ketika Khomeini menginjakkan kakinya di Prancis, ia telah menjadi tokoh oposisi dinasti Pahlavi yang paling berpengaruh. Tidak seperti kritik Iran lainnya terhadap Israel, Khomeini tidak mengungkapkan kritiknya terhadap Negara Yahudi melalui bahasa agama dan memposisikan Israel sebagai musul Islam.[327] Israel merupakan kanker yang akan menghancurkan Islam dan umat Islam jika tidak dihilangkan dari regional Timur Tengah. Ia adalah sebuah negara yang tidak menginginkan Al Quran ada.[328] Pengabaian Khomeini terhadap warga Palestina dalam konflik Palestina-Israel sudah sesuai dengan pandangan hidupnya. Dia lebih mengedepankan kepentingan umat Islam (*umma)* dan mengabaikan kepentingan nasional-sekular serta nasionalisme (*melli-garai*), dan berpandangan bahwa sistem internasional yang ada merupakan hasil dari pikiran manusia yang lemah sehingga harus diganti dengan sebuah tatanan dunia Islam yang berlandaskan ketuhanan. “Islam tidak hanya datang untuk satu negara, untuk beberapa negara, suatu kelompok atau bahkan hanya untuk umat Islam, Islam datang untuk kemanusiaan. Islam menginginkan agar seluruh umat manusia hidup di bawah payung keadilan,” Khomeini menulis pada akhir dekade 1970-an.[329]

Pandangan hidup ini kemudian memberikan dimensi ideologis bagi kebijakan luar negeri Iran. Dimensi ideologis ini semakin menguat karena kelompok agama gagal memandang Iran sebagai sebuah negara. Mereka justru mendefinisikan sekutu dan musuh mereka berdasarkan perspektif mereka masing-masing tentang Islam.[330] Revolusi Iran juga telah memasuki kancah politik yang penuh dengan hinaan pada Amerika Serikat—sebagai akibat dari dukungan Amerika terhadap Shah. Mereka seringkali tidak membedakan antara Washington dan Tel Aviv. Amerika Serikat mereka anggap sebagai “Setan Besar” dan Israel sebagai “Amerika Kecil”. Akibatnya, oposisi terhadap Israel merupakan karakter utama dari pemerintahan Islam Iran—Negara Yahudi dan Zionisme dianggap sebagai musuh Islam dan ancaman ideologis terhadap identitas keIslaman Iran.[331]

324

325

326

327

328

329

330

331

Tamu tak Diundang

Palestina sudah sejak lama memberikan dukungan kepada kelompok oposisi di Iran terhadap rezim Pahlavi. Sebagian aktivis revolusi Iran mendapatkan pelatihan di markas PLO. Mereka berharap revolusi Iran akan berdampak besar pada pandangan Iran terhadap konflik Palestina-Israel. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintahan revolusioner, pemimpin PLO, Yasser Arafat melakukan kunjungan ke Iran pada 18 Februari 1979 bersama 58 staf PLO lainnya.[332] Meskipun kelompok revolusioner sudah kecolongan, beberapa pejabat Iran memberikan sambutan di bandara sekaligus akomodasi mewah di gedung bekas *Government Club* di Jalan Fereshteh, sebelah utara Teheran.[333] Dalam sebuah upacara di minggu yang sama, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Bazargan dan Menteri Luar Negeri Sanjabi, sejumlah misi Israel di Iran diserahkan ke PLO, dan nama jalan tempat upacara itu diselenggarakan dirubah menjadi "Jalan Palestina". Arafat lalu mengelilingi Iran dan membangun kantor perwakilan PLO di berbagai kota di Iran, termasuk di kota Ahvaz sebelah barat daya provinsi Khuzestan, yang mayoritas penduduknya berbahasa Arab.[334]

Beberapa anggota rombongan Arafat akhirnya tinggal lebih dari 1 tahun di Iran untuk mejaga kantor PLO di Iran. Dalam perjalanan ini, Arafat juga bertemu dengan Ayatollah Taleqani, pendukung setia Arafat di Iran, yang juga terlibat dalam isu-isu Palestina sebelum Khomeini.[335] Tetapi segera setelah Arafat tiba di Teheran, konflik antara PLO dan kelompok revolusioner mulai muncul ke permukaan. Pada hari pertama kunjungannya, Arafat melakukan pertemuan selama dua jam dengan Khomeini. Khomeini cukup kritis terhadap PLO dan menasihati pemimpin Palestina itu agar menggunakan argumentasi keIslaman dalam isu Palestina daripada menggunakan gagasan kiri Arafat dan kecenderungan nasionalistik—sesuatu yang sangat mengejutkan Arafat. "Mereka cuma tidak melakukannya dengan baik," menurut seorang analis Iran.[336] Ibrahim Yazdi, menteri luar negeri Iran pertama dalam pemerintahan revolusioner, memberitahu seorang staf kedutaan Amerika bahwa Khomeini telah menyarankan agar PLO menggunakan orientasi keIslaman dan menggantinya dengan metode revolusi non-kekerasan Iran. Iran beralasan bahwa orientasi keIslaman akan memperbesar peluang kemenangan Palestina sekaligus menghadang pengambil-alihan elemen radikal dan Marxis di kalangan pejuang Palestina.[337] Kenyataannya, Iran perlu mendefinisikan ulang isu Palestina agar Iran mampu memainkan peran kepemimpinan mereka dalam isu tersebut. Jika isu Palestina diartikan sebagai sebuah kasus Arab, maka Iran tidak akan memainkan peran utama. Dua kelompok revolusioner ini tidak bertemu lagi.

Kelompok revolusioner Iran telah membuat citra tertentu tentang Palestina dan perjuangan mereka yang tidak sesuai dengan kenyataan. "Tidak ada warga Palestina yang religius. Mayoritas mereka minum alkohol, dan mereka ingin menonton film," seorang pejabat Iran yang menyambut pejuang Palestina mengeluh. Perbedaan ideologis antara kelompok revolusioner Iran dan perwakilan PLO memberikan awan gelap bagi hubungan

332
333
334
335
336
337

keduanya, dan kerenggangan antara dua kelompok ini semakin membesar. “Apakah ini benar-benar orang Palestina? Pejuang Palestina yang derajatnya ingin kami capai?” Pejabat Iran bertanya pada diri mereka sendiri.[338] Pejuang Palestina sendiri mulai paham setelah pertemuan Arafat dengan Khomeini bahwa pemerintahan Islam Iran hanya akan memberikan dukungan verbal dan retoris pada Palestina. Investasi besar Palestina terhadap kelompok oposisi Iran terhadap Shah tidak akan mendapatkan balasan yang setimpal.[339] Misalnya, terlepas dari retorika anti-Israelnya, Khomeini menolak pengiriman pesawat F-14 milik Iran untuk membantu pasukan Syria yang sedang berperang dengan Israel di Lebanon, yang menunjukkan bahwa Iran tidak ingin berperan aktif di pihak blok Arab untuk menentang Israel dengan melampaui kecaman verbalnya terhadap Negara Yahudi.[340] Meskipun Arafat mendapat dukungan dari Ayatollah Taleqani, kondisinya yang sakit membuatnya terpinggirkan dalam politik Iran, dan rival PLO mulai mendapatkan angin segar. Beberapa kelompok revolusioner, seperti Mostafa Chamran yang berpendidikan di Amerika, menteri pertahanan Iran, mendukung gerakan Amal Syiah di Lebanon yang berlawanan dengan PLO. Kelompok lainnya seperti komandan Korps Pengawal Revolusi Iran (*Iranian Revolutionary Gurads Corps*) memiliki hubungan dekat dengan musuh Arafat, yaitu George Habash dari *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP).[341]

Hubungan Iran-PLO semakin memburuk karena hubungan Iran dengan negara-negara tetangga Arabnya juga mulai memburuk. Sebagaimana Khomeini menasihati Arafat tentang bahaya sekularisme, Khomeini juga menuduh negara Arab telah meninggalkan ajaran Islam. Hubungan antara Teheran dengan negara anggota *Gulf Copperation Council* (GCC) segera memanas. Pemerintahan Khomeini mulai menuduh PLO dan PFLP secara terbuka sebagai dalang di balik memanasnya hubungan warga Arab dengan warga Persia di wilayah Ahvaz, dan beberapa ulama terkenal mempertanyakan, dari perspektif keamanan, urgensi keberadaan kantor PLO di Ahvaz, dengan mempertimbangkan banyaknya warga berbahasa Arab di kota tersebut.[342] Hanya berselang satu bulan setelah pembukaannya, kantor PLO di Ahvaz ditutup dan perwakilan LPO di Teheran berada dalam pengawasan ketat. Untuk mengimbangi tindakan terhadap Palestina ini dan hubungan mereka dengan warga Arab dan umat Islam, Khomeini kembali menggunakan retorikanya untuk menutupi kebijakan Iran yang sesungguhnya. Ayatollah mendeklarasikan tanggal 17 Agustus sebagai Hari Al Quds dan mendorong umat Islam di dunia untuk berdemonstrasi pada hari itu sebagai bentuk dukungan bagi Palestina.[343] Meskipun begitu, kenyatannya perayaan Hari Al Quds ini justru menunjukkan keengganan Iran untuk memberikan dukungan nyata bagi perjuangan Palestina.

Hubungan yang memanas antara Khomeini dengan PLO segera timbul ke permukaan. Sebuah memo rahasia dikirim ke Washington dari kedutaan Amerika di Teheran pada September 1979 yang menyatakan bahwa “Iran sangat antusias dan terang-terangan mendukung isu Palestina”, tetapi bahwa “sedikit sekali pembicaraan mengenai

338

339

340

341

342

343

PLO," dan bahwa Iran tidak akan mengizinkan intervensi apapun dari PLO terhadap urusan dalam negeri Iran, khususnya di wilayah Khuzestan.[344] Tetapi sebagaimana Israel, PLO tahu bahwa Iran terlalu penting posisinya untuk diabaikan. Hingga pecahnya perang Irak-Iran, PLO terus terlibat dalam berbagai kelompok di Iran untuk mempengaruhi Khomeini agar sikapnya yang cenderung pasif menjadi aktif—dukungan yang tidak retoris terhadap persoalan Palestina.[345] Ketika Arafat memperkuat hubungannya dengan kelompok Mujahidin, hubungannya dengan Khomeini semakin memburuk, dan pada November 1980 bulan madu antara Iran dan Palestina berakhir, ketika Khomeini menolak langkah mediasi Palestina untuk membebaskan diplomat Amerika yang disandera oleh para pelajar Iran di kedutaan besar Iran.[346]

344

345

346

9. Pergeseran Ideologis, Kelanjutan Geopolitis

Bayangkan jika Anda mampu menjatuhkan Saddam dan membangun sebuah Republik Islam di sana. Hal itu akan merubah segalanya, Anda akan mampu menjadi penguasa regional, Anda akan mendominasi seluruh wilayah Timur Tengah.
—Seorang ahli strategi politik Iran tentang ambisi Iran pada permulaan revolusi

Pada masa revolusi 1979, kekuatan Iran di regional tengah mengalami kemunduran dibandingkan negara tetangganya, khususnya Irak. Pada 1978, posisi Iran sebagai kekuatan tak terkalahkan di regional mulai tersungkur ke bawah. Kekacauan yang terjadi akibat revolusi hanya membuat kondisi Iran semakin memburuk. Belanja militer turun drastis dari 16,6 milyar dolar pada 1978 menjadi hanya 7,7 milyar dolar pada 1979, termasuk jumlah pejabat Iran baik yang melarikan diri atau terbunuh dalam peristiwa revolusi, sehingga Iran kehilangan banyak aset pengetahuan militer. Antara 1979 dan 1980, kekuatan militer Iran berkurang lebih dari 100,000 anggota, dan pada saat yang sama, jumlah pasukan Irak meningkat tajam dan melebihi jumlah pasukan Iran untuk pertama kalinya. Pada 1980, belanjar militer Irak juga lebih besar dibandingkan Iran untuk pertama kalinya juga.

Ironisnya, kemunduran Iran ini justru memperbesar ambisi kelompok-kelompok revolusioner. Meskipun para pemegang kebijakan di Amerika memprediksi bahwa Ayatollah Khomeini akan memberlakukan kebijakan luar negeri yang nasionalis secara ekstrem, mereka juga percaya bahwa Khomeini akan merubah semua orientasi politik Shah.[347] Tetapi ideologi Islam Iran—meskipun menaruh kebencian pada tatanan dunia internasional dan ide tentang negara-bangsa—tidak kurang ambisius dari pandangan politik Shah yang menekankan kepemimpinan regional Iran sebagai tujuannya. Sementara Shah berusaha mendapatkan legitimasi kepemimpinan regional ini melalui bantuan keuangan dan perlindungan militer bagi negara-negara Arab, maka kelompok revolusioner menggunakan propaganda politik Islam. Tetapi sementara Shah percaya bahwa ambisinya ini dapat dicapai dengan situasi eksternal yang sudah ada, maka kelompok revolusioner merasa bahwa mereka perlu mendefinisikan kembali kerangka hubungan antar-negara dan prinsip-prinsip dasarnya untuk mengatasi kemunduran mereka sekaligus memulihkan kembali kepemimpinan regional Iran.

Meskipun cara dan justifikasi rezim Pahlavi dan Khomeini sangat berbeda, tujuan strategis mereka mirip sekali—yaitu kepemimpinan regional dan keunggulan. Perbedaan yang mendasar adalah kelompok revolusioner mampu melampaui karakter megalomania Shah; mereka tidak hanya berusaha menjadi kekuatan dominan di Samudera Hindia dan wilayah Asia Barat, pemerintahan Khomeini berusaha menjadi pemimpin seluruh dunia Islam. Baik Shah (setelah tahun 1979) dan kelompok revolusioner sama-sama berusaha memperoleh peran politik yang melebihi sumber daya Iran sendiri.[348]

Kelompok revolusioner percaya bahwa agar kepemimpinan Iran dapat bertahan, seluruh kondisi di regional harus dirubah. Kelompok revolusioner berpandangan bahwa sebagaimana rakyat Iran telah menggulingkan kekuasaan Shah—yang didukung Amerika—dan mendirikan sebuah pemerintahan Islam, maka rakyat Arab juga harus

347

348

menggulingkan pemimpin mereka yang juga didukung Amerika, lalu mendirikan sebuah pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Langkah Shah untuk memperoleh legitimasi kepemimpinan Iran di tingkat regional—yang didasarkan pada dukungan Amerika, hubungan yang kuat dan bantuan militer kepada pemerintahan moderat Arab, dan bantuan keuangan kepada negara-negara Arab seperti Syria, yang dikombinasikan dengan menjaga jarak di hadapan publik dengan Israel—ternyata gagal untuk mempengaruhi blok Arab agar memberikan peran kepemimpinan regional ini kepada Iran sebagaimana yang diharapkan. Kecurigaan historis antara Arab dan Persia, juga kemarahan blok Arab atas kerjasama Shah dengan Israel, akan menghapuskan Iran dari peran tersebut. Tetapi dengan mempropagandakan semangat revolusi dan ideologi politik Islam, Iran berharap bisa menjembatani kerenggangan Persia-Arab sekaligus membangun sebuah sistem nilai di tingkat regional yang akan melibatkan Iran dalam peran kepemimpinannya. Seorang politisi Iran dari kalangan reformis menjelaskan pemikiran Iran sebagai berikut: ”Bayangkan jika Anda mampu menjatuhkan Saddam dan membangun sebuah Republik Islam di sana. Dominasi regional merupakan gagasan komprehensif. Anda akan memiliki Republik Islam di Irak, dan Republik Islam di Iran. Keduanya adalah negara paling kuat di tingkat regional, dan akan memberikan perubahan pada segala aspek, Anda bisa mendominasi regional dan Anda akan mampu menguasai Timur Tengah.”[349]

Tidak seperti strategi Shah, yang menyandarkan posisi Iran di Teluk Persia pada aliansinya dengan Washington, rezim baru ini tidak memilih strategi itu bahkan berpandangan bahwa strategi itu tidak akan menguntungkan mereka. Kepemimpinan baru ini justru lebih mengedepankan pendekatan integrasi Iran dan rekonsiliasi dengan negara-negara tetangga yang dekat daripada kerjasama dengan negara-negara yang lebih jauh. “Iran berada di sebuah wilayah yang membuatnya menjadi minoritas, yang penduduknya tidak terlalu dekat dengan Iran. Tetapi pada saat yang sama, bagaimanapun juga Iran perlu membangun hubungan baik dengan tetangga terdekatnya, yang akan mengurangi kekhawatiran Iran atas keberadaannya yang dikelilingi oleh negara-negara Sunni dan Arab.” Javad Zarif, duta besar Iran di PBB menjelaskan.[350]

Kelompok revolusioner berpandangan bahwa kepentingan keamanan jangka panjang dan hasrat kepemimpinannya berhasil dicapai melalui hubungan baik dengan negara tetangga Arab daripada melalui kekuatan militer dan bersekutu dengan negara-negara di luar regional. Urgensi memperbaiki kerenggangan Arab-Persia melaui Islam-politik sudah nampak sejak awal revolusi. Konflik Khomeini dengan Arafat mendorong perjuangan kelompok nasionalis-pan-Arab Palestina melawan Israel sebagai wujud perlawanan yang terinspirasi ajaran Islam. Kritik Khomeini terhadap Arafat merefleksikan kebutuhan Iran untuk membangun sebuah sistem nilai yang memungkinkan Iran dapat memainkan peran kepemimpinannya. Garis pemikiran ini bukanlah hal baru dalam kebijakan luar negeri Iran. Shah berkesimpulan sama pada 1975 ketika melakukan penandatanganan Perjanjian Aljazair, dan bahkan dia menggunakan semangat keIslaman untuk mendapatkan kepercayaan dunia Arab. Namun, semakin Shah menyadari dilema Iran sebagai negara Persia yang berada di laut Arab, dia tidak pernah bisa menerima berbagai akibat dari revolusi.

349

350

Kerugian Besar Amerika, Pukulan Telak bagi Israel

Revolusi Iran berdampak besar pada keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dengan menjauhkan Iran dari blok Barat. Bagi Amerika, situasi ini merupakan bencana. Dalam situasi Perang Dingin, Washington kehilangan sekutu penting yang berperan untuk menjaga stabilitas di wilayah vital Teluk Persia sekaligus menjaga dari intervensi Uni Soviet. Meskipun Khomeini membenci Kremlin yang ateis dan menolak bergabung ke blok Uni Soviet—slogannya adalah "Tidak blok Barat ataupun Timur"—Washington masih khawatir jika Iran jatuh ke tangan Imperium Merah. Tapi semua kemungkinan tetap terbuka bagi Khomeini dan Carter. Meskipun retorika Ayatollah selalu mengeskpresikan penentangan dan penghinaan terhadap Amerika Serikat, Khomeini awalnya tidak bermaksud memutuskan hubungan dengan Washington. Bagi Khomeini, sepanjang Amerika Serikat menghormati independensi Iran, sebuah hubungan baru antara Iran dengan Amerika bisa saja terjadi.

Sebuah dokumen CIA menunjukan bahwa Washington sadar bahwa Khomeini memahami adanya kepentingan bersama antara Iran dan Washington dan dia memilih untuk tetap melanjutkan penjualan minyak ke Amerika Serikat.[351] Washington juga sangat ingin memastikan bahwa revolusi Iran tidak akan memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat secara total, karena jika hal itu terjadi maka akan sangat menguntungkan Moskow. Tapi kelompok ulama fundamental mengalami radikalisasi ketika sekelompok pelajar sayap kiri menyerang kedutaan Amerika Serikat pada 4 November 1979 dan menyandera semua diplomat serta staf kedutaan. Awalnya Khomeini menahan diri untuk tidak memberikan dukungan pada aksi penyanderaan tersebut, tetapi setelah diyakinkan oleh kelompk sayap kiri dari para pendukungnya, Khomeini segera mendukung aksi ini dan tuntutan mereka kepada Amerika Serikat untuk menyerahkan Shah.[352] ("Raja diRaja" Iran yang terserang kanker telah melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, dengan harapan Presiden Carter akan memberikan tempat perlindungan di Amerika Serikat).

Rencana amatir ini—menyandera beberapa diplomat Amerika selama beberapa hari—kemudian menjadi menuai kecaman dari dunia internasional yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Carter kemudian memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Iran karena merasa dipermalukan, dan Amerika tidak pernah memandangan Iran dengan cara yang sama lagi. Sebaliknya, Iran mulai memandang Wahington sebagai sebuah ancaman—bukan sebuah ancaman militer langsung tetapi sebuah ancaman politik jangka panjang yang bermula dari penolakan Amerika untuk menerima revolusi Iran dan langkah Amerika untuk menggagalkan peristiwa tersebut.[353] Hingga hari ini, Iran terus bergulat dengan berbagai akibat buruk dari aksi penyanderaan para diplomat Amerika ini.

Berbagai dampak dari Perang Dingin bukanlah pertimbangan utama bagi Israel dalam melakukan kalkulasi strategi. Mereka justru lebih mempertimbangkan keamanan jangka pendek dan ancaman yang dihadapinya dari negara-negara Arab—sikap pro dan anti Amerika negara-negara Arab ini bukan pertimbangan utama bagi Negara Yahudi. Israel justru lebih mempertimbangkan doktrin periperial mereka meskipun Tel Aviv berhasil memutuskan lingkaran permusuhan melalui perjanjian damai dengan Mesir—negara Arab

351

352

353

yang paling kuat dan paling banyak penduduknya.[354] Dengan strategi ini, posisi Iran yang berbatasan dengan dunia Arab, hubungan ekonomi dan militernya dengan Israel, minyak yang dimiliki Iran, dan permusuhan abadinya dengan Irak dan Uni Soviet membuat Iran tak tergantikan (bagi Israel, *pen.*).[355] Setelah dua puluh lima tahun Israel memberikan dukungan politik kepad Iran, hubungan dengan Iran menjadi elemen penting bagi strategi regional Israel.

Kehilangan Iran tentu saja menjadi kemunduran strategis bagi Negara Yahudi. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk menjaga hubungan dengan Iran merupakan hal yang paling penting bagi Israel, meskipun Iran berada di bawah rezim baru. Israel telah kehilangan sekutu di wilayah pinggiran lebih awal dengan jatuhnya pemerintahan Haile Selassie di Ethiopia pada 1974. Tetapi Israel berhasil membangun kembali hubungannya dengan penguasa baru di negeri itu yang berhaluan Komunis. Iran jauh lebih berharga bagi Israel daripada Ethiopia, maka Israel patut memperjuangkan hubungannya dengan Iran.[356] "Kami memiliki hubungan erat dengan Iran, hingga hubungan erat kedua warga negara" David Kimche, kepala Kementerian Luar Negeri Israel saat itu, menjelaskan. "Publik sulit sekali menerima fakta bahwa kedekatan ini telah dibuang ke luar jendela. Sehingga ada usaha-usaha pada tahun pertama pasca revolusi tentang kemungkinan bagi kami untuk menjalin kembali hubungan dengan Iran."[357] Israel yang juga memberikan perhatian pada keyakinan yang kuat dari 100,000 komunitas Yahudi-Iran. Israel menghadapi dilema; bahwa kebijakan agresif terhadap Teheran akan membuat komunitas Yahudi-Iran dalam bahaya. Sementara itu, pendekatan yang lebih halus tidak akan mampu menghilangkan bahaya yang mereka hadapi. Israel tidak memiliki banyak kartu untuk dimainkan.[358]

Meskipun intelijen Israel mengetahui bahwa peristiwa revolusi ini akan menjadi akhir dari hubungan Iran dengan Israel, Negara Yahudi berada di antara dua kelompok, yaitu kelompok yang ingin menyerang balik untuk menyelamatkan rezim Pahlavi dan kelompok yang percaya bahwa rezim revolusioner akan segera runtuh dan digantikan oleh sebuah kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan realitas geopolitik Iran sekaligus mengakui kebutuhan Iran terhadap Israel.[359] Kelompok pertama didominasi oleh warga Israel yang memiliki hubungan dekat dengan rezim Pahlavi. Mereka sangat yakin bahwa revolusi hanya fenomena sesaat, dan Iran "yang sebenarnya" akan segera muncul kembali.

Ariel Sharon—seorang komandan militer Israel yang ambisius sekaligus politisi yang kemudian menjadi perdana menteri Israel—merupakan bagian dari kelompok pertama ini. Dalam sebuah rapat kabinet ketika revolusi memuncak, dia mengusulkan agar pasukan terjun payung dikirimkan ke Teheran untuk menyelamatkan Shah.[360] Usulan ini kemudian ditolak. Meskipun terjadi berbagai perbedaan antara dua kelompok di atas, doktrin periperial tetap mendominasi pola pikir kedua kelompok ini. "Dua kelompok ini melihat Iran dari perspektif doktrin periperial, dan percaya bahwa Iran merupakan sekutu alami bagi Israel," Yossi Alpher, mantan pejabat Mossad, berkomentar.[361] Menurut Alpher,

354

355

356

357

358

359

360

361

logika doktrin periperial sudah mendarah-daging dalam pola pikir Israel secara naluariah. Israel sulit memahami jika harus memandang Iran bukan sebagai sekutu alami mereka.[362]

Dengan kemunculan kelompok neo-Revisionis Zionisme, doktrin periperial mendapatkan dimensi ideologisnya. David Ben-Gurion awalnya merancang strategi ini untuk melemahkan negara-negara Arab dengan menunjukkan kepada mereka berbagai keuntungan jika berdamai dengan Israel, misalnya Israel memamerkan kontribusi mereka terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi negara-negara yang berada di wilayah pinggiran dunia Arab. Ben-Gurion memprediksi bahwa negara Arab segera akan menyadari bahwa mereka juga dapat mengambil keuntungan dari perkembangan ini jika mereka berdamai dengan Israel. Maka, dalam pandangan Bapak Doktrin Periperial ini, perdamaian dengan negara Arab dan penerimaan keberadaan Israel di regional Timur Tengah bukanlah sebuah kemungkinan, tetapi target Israel.

Namun kelompok neo-Revisionis tidak begitu optimis. Perdana Menteri Begin percaya bahwa negara Arab hanya memahami bahasa militer, yang membuat Israel tidak punya pilihan lain kecuali meningkatkan kekuatan militer mereka. Dalam konteks pandangan ini, karena eksistensi Israel tidak akan pernah bisa diterima di Timur Tengah dan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai dengan jalan negosiasi dan kompromi, maka satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan negara-negara Arab ini dengan kekuatan serangan militer.[363] Yitzhak Shamir, suksesor Begin di Partai Likud, juga memiliki pendapat yang sama dan sangat percaya bahwa perdamaian dengan negara Arab sama sekali tidak bisa dicapai.[364] Bagi kelompok neo-Revisionis, doktrin periperial tidak hanya dibuat untuk kepentingan strategis, tetapi memang sesuai dengan pandangan hidup mereka. Bahkan, ketika logika strategis doktrin ini lemah—dengan adanya perdamaian yang dingin dengan Mesir dan ideologi anti-Israel di Iran—dimensi ideologis dari doktrin ini tetap hidup.

Israel gagal menemukan kebijaksanaan dari doktrin ini ketika Iran mulai mengembangan hubungan dengan kelompok Syiah di Lebanon pada pertengahan dekade 1980-an. Ironisnya, kerugiaan dan kelemahan Iran justru semakin menguatkan ancaman Irak terhadap Israel, sehingga kebutuhan Tel Aviv terhadap Iran meningkat. Meskipun Israel telah berdamai dengan Mesir, hubungannya dengan dunia Arab dan Uni Soviet tetap konfrontatif. Maka, sementara sisi selatan Israel—Mesir—dapat diamankan, bagian timur Israel masih menjadi wilayah yang rentan bagi Israel sebagai akibat dari meningkatnya kekuatan Irak dan melemahnya kekuatan Iran sebagai rival utama Irak. Dalam perspektif Tel Aviv, Irak merupakan ancaman tunggal yang terbesar bagi keamanan Israel, sementara Iran masih belum dilihat sebagai ancaman—terlepas dari ideologinya, retorikanya yang keras, dan dukungan penuhnya dalam isu Palestina. Bagi Israel, dalam konteks tujuan-tujuan praktikal, Iran tetap menjadi sekutu untuk mengatasi ancaman Irak.[365]

Realitas Geopolitis, Fantasi Ideologis

Kenyataan bahwa situasi geopolitik di regional tidak berubah membuat kelompok revolusioner sangat kecewa—terlepas dari usaha Iran untuk merubah identitas Iran dari monarki Persia di bawah rezim Pahlavi menjadi pemerintahan Republik Islam di bawah

362

363

364

365

Khomeini. Iran dan Israel tetap memiliki ancaman fundamental yang sama. Akibatnya, realitas geopolitik Iran tetap tidak terpengaruh pandangan hidup dan ideologi yang dipropagandakan kepemimpinan baru Teheran—Iran masih dikelilingi negara-negara Arab yang tetap memusuhi Iran dari sisi selatan hingga sisi barat dan sebuah negara agresif-adidaya Rusia di sisi utara.[366]

Awalnya, karena ingin merombak keseluruhan formasi kekuatan di Timur Tengah, Iran menolak untuk beraliansi dengan negara-negara Arab yang memiliki dilema geopolitik yang sama dengan Teheran, kecuali dengan negara-negara yang memiliki konflik ideologis dengan Iran. Misalnya, Mesir telah kehilangan peran kepemimpinannya di dunia Arab dan mulai dijauhi oleh negara-negara Arab setelah menandatangani Perjanjian Camp David dengan Israel. Sadat berusaha menghentikan isolasi terhadap negaranya melalui hubungan dengan Iran setelah kematian Shah. Tetapi Khomeini memanfaatkan peluang ini dengan meraih legitimasi di dunia Arab dengan menolak penawaran Sadat ini dan menuduh Kairo telah mengkhianati Palestina.

Pada Mei 1980, Iran telah memutuskan seluruh hubungannya dengan Mesir.[367] Tetapi pemerintahan Khomeini segera sadar bahwa negara tetangga Arab mereka tidak bisa menerima propaganda politik Islam dari Iran ini. Kesatuan umat Islam, dan sebuah tatanan Islam, sangat cocok dengan rezim blok Arab, dan para pengusungnya, seperti Arab Saudi, sangat memusuhi Iran yang berhaluan Syiah. (Konflik antara Sunni dan Syiah sudah terjadi sejak beberapa abad sebelumnya). Tantangan Iran terhadap sistem politik yang berkembang di dunia Arab sangat mengganggu beberapa negara monarki Arab yang memiliki hubungan dekat dengan Washington, yang dicitrakan Khomeini sebagai "Islam Amerika". Revolusi Iran juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pemimpin negara yang berpenduduk mayoritas Syiah seperti Irak, Bahrain, dan Saudi Arabia, khususnya di Provinsi bagian Selatan yang kaya-minyak. Sementara dunia Arab dulu mengkhawatirkan ambisi Shah, saat ini mereka juga ketakutan atas agenda politik Khomeini dan usaha-usaha Iran untuk mengkampanyekan semangat revolusi ke luar Iran.[368] Meja persaingan sudah berbalik—ancaman pan-Arab terhadap Iran sudah digantikan dengan semangat Islam Syiah yang mengancam dunia Arab.[369]

Revolusi Iran juga tidak mampu menghilangkan ketakutan Iran pada Uni Soviet. Pada Desember 1979, pasukan Rusia menyerang Afghanistan sehingga memberikan peringatan keras bagi pasukan militer Iran. Teheran khawatir jika Moskow akan mengambil keuntungan dari kekacauan politik Iran untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu akses terhadap Teluk Persia. Meskipun ada revolusi Iran, Uni Soviet terus memberikan tantangan kepada Teheran. Secara ideologis, Shah menentang Komunisme sebagai konsekwensi dari kedekatan Shah dengan nilai-nilai kapitalis Barat. Sementara itu, Khomeini memandang ateisme Moskow sebagai ancaman bagi Islam. Secara strategis, desain politik Kremlin di Timur Tengah tetap sama. Pemegang kebijakan luar negeri rezim revolusioner, yang dikepalai Presiden Abolhassan Bani-Sadr dan Menteri Luar Negeri, Sadegh Ghotzadeh, sangat curiga terhadap Moskow dan khawatir bahwa Soviet akan memanfaatkan kelemahan pasukan militer Iran dan melancarkan sebuah serangan

366

367

368

369

militer.[370] Secara politik, baik Shah maupun Khomeini menghadapi kelompok oposisi sayap kiri yang didukung—langsung atau tidak langsung—oleh Moskow. Perbedaan mendasar dari kepemimpinan baru ini adalah bahwa Iran tidak lagi bergantung pada dukungan Washington untuk melawan tantangan Soviet, yang menegaskan posisi Iran sebagai negara paling berbahaya bagi desain geopolitik Soviet.

Ambisi regional Teheran, tujuannya untuk memproagandakan Islam-politik, dan perseteruannya dengan Washington segera berujung menjadi permusuhan antara Iran dengan Israel, sebagaimana yang ditemukan intelijen Israel jauh sebelum peristiwa revolusi. Oposisi ideologis Iran terhadap Negara Yahudi tidak bisa disalahkan, dan kecurigaannya membuat Iran melihat Israel ada di belakang berbagai tantangan yang dihadapinya. Misalnya, rezim Khomeini percaya bahwa bantuan Israel pada pemberontakan Kurdistan di barat daya Iran datang hanya beberapa bulan setelah revolusi terjadi.[371] "Kami melihat Israel dari perspektif bahwa mereka adalah pendukung dan agen Amerika di Timur Tengah," Mahmoud Vaezi, mantan wakil menteri luar negeri Republik Islam, menjelaskan.[372] Tetapi berbagai faktor geopolitik mendorong kedua negara saling mendekat satu sama lain, terlepas dari kecurigaan dan oposisi ideologis Iran terhadap Israel. Kedua belah pihak saling mengirim mata-mata ke negaranya, meskipun Tel Aviv ingin sekali memperbaiki hubungan lama mereka dengan Teheran.

Hanya satu bulan setelah revolusi, meskipun hubungan dengan Iran telah putus, Tel Aviv menawarkan pengembalian tank Iran buatan Amerika yang dikirim Shah ke Israel untuk diperbaiki, dan Iran menerima tawaran tersebut.[373] Israel segera mencari cara untuk membujuk pemerintahan Khomeini, tetapi mereka kemudian sadar bahwa Teheran masih besikap ambivalen tentang keuntungan yang akan mereka peroleh dari Negara Yahudi. Di satu sisi, kedua negara memiliki kepentingan bersama sebagai akibat dari ancaman yang sama-sama mereka hadapi di regional Timur Tengah. Di sisi lain, setiap hubungan terbuka dengan Israel akan mengganggu posisi Iran dalam isu Palestina dan argumentasinya yang menegaskan bahwa dunia Islam harus berada di bawah kepemimpinan Iran untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Untuk mencapai dua tujuan ini Iran hanya akan mendekati Israel sebagai pilihan terakhir. Sepanjang masih memiliki alternatif lain, Republik Islam akan terus menghindari Israel; sebuah langkah yang membuat Israel sangat frustasi. Tetapi pengaruh Israel tidak dapat menjadi faktor konflik dengan Iran dengan sendirinya, yang dipicu oleh sekelompok pelajar militan yang melakukan penyanderaan di kedutaan besar Amerika Serikat. Aksi penyanderaan para diplomat Amerika ini membuat Iran mendapatkan embargo internasional, pembekuan aset-aset Iran di luar negeri, dan penghentian penjualan senjata dan onderdil produk Amerika ke Iran. Ketika Iran terus mengalami kemunduran dan mendapatkan isolasi internasional sebagai akibat dari meningkatnya tekanan Amerika, Israel kemudian berada di atas angin, yang diperlukan untuk membangun kembali hubungan dengan Iran.[374]

Kembalinya Ethiopia?

370

371

372

373

374

Pada awal 1980, hanya satu bulan setelah efek krisis dari aksi penyanderaan, Ahmed Kashani, anak termuda dari Ayatollah Abol Qassem Kashani, yang berperan penting dalam aksi nasionalisasi industri minyak Iran pada 1951, melakukan kunjungan ke Israel—nampaknya menjadi kunjungan pertama Iran setelah revolusi—untuk membicarakan penjualan senjata dan kerjasama militer sebagai perlawanan terhadap program nuklir Irak di Osirak. Meskipun Ahmed Kashani memperkenalkan dirinya sebagai seorang "warga negara yang peduli", setelah kunjungannya Begin menyetujui pengiriman ban untuk pesawat tempur Phantom dan persenjataan untuk pasukan Iran. Keputusan ini sangat bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat dan kebijakan terbuka Washington untuk mengisolasi Iran untuk mengamankan pelepasan para sandera Amerika. Presiden Jimmy Carter marah sekali atas langkah Begin ini yang menunjukkan sikap tidak peka terhadap trauma yang dialami Amerika. Setelah terjadi konflik antara dua pemimpin keras kepala ini, Carter kemudian menegur Israel dengan menunda penjualan onderdil ke Negara Yahudi.[375]

Tetapi pembangkangan Begin—terhadap Amerika, *pen.*—ini terbayarkan. Ayatollah Khomeini membalas langkah Israel ini dengan mengizinkan migrasi ribuan warga Yahudi Iran ke Israel. Ribuan warga Yahudi Iran melintasi wilayah perbatasan di Pakistan dengan mengendarai bus menuju Austria, dan mereka diperbolehkan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat atau Israel.[376] Menurut Mohammad Reza Aminzadeh, seorang pejabat Israel yang memberontak pada tahun 1985, sebuah kesepakatan telah dinegosiasikan oleh Kolonel Uri dari pasukan militer Israel, yang mengunjungi Iran pada awal 1980.[377] Kesediaan Iran untuk mengadakan perjanjian dengan Israel menunjukkan bagaimana kesulitan yang dihadapi Iran membuatnya tidak mampu mencapai tujuan-tujuan ideologis. Setelah sampai pada tahap ini, kelompok revolusioner cenderung mengesampingkan ideologi mereka untuk meningkatkan keamanan dan kepentingan mereka sendiri. Dalam sebuah kesempatan, Khomeini diberitahu oleh salah satu rekannya bahwa sebuah pengiriman senjata dalam jumlah besar—yang sedang dipertimbangkan Iran—sudah berangkat dari Israel. Rekannya tersebut berusaha mendapatkan persetujuan Khomeini untuk melakukan pembayaran atas pembelian senjata. Khomeini bertanya apakah perlu untuk mendiskusikan dan menyelidiki asal-usul persenjataan itu ketika melakukan pembayaran; rekan tersebut menjawab, "Tidak." Maka kita tidak peduli," Khomeini merespon dengan tenang.[378]

Retorika Iran terhadap Israel terbukti tidak sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan Khomeini. Pada saat yang sama, ketika Iran secara rahasia melakukan kesepakatan dengan pemerintah Israel, Khomeini mengecam Negara Yahudi secara terbuka dan mempertanyakan keabsahan keberadaan Israel. Misalnya, pada 14 Agustus 1980, Menteri Luar Negeri Iran mengajak negera-negara eksportir minyak untuk menghentikan penjualan minyak ke Israel. Namun ancaman retoris ini tidak pernah dilakukan, meskipun Iran sudah mengecam keras.[379] "Oposisi ideologis terhadap Israel

375

376

377

378

379

memainkan peran penting dalam rezim ini sebelum revolusi.[380] Ketika kelompok revolusioner memegang kekuasaan, mereka bertindak dengan prinsip-prinsip berbeda. Pilar utama dalam kebijakan luar negeri mereka adalah "oposisi dalam retorika, kolaborasi dalam praktik dengan Negara Yahudi," demikian komentar seorang pakar di Teheran tentang kebijakan luar negeri Iran.[381]

Tentu saja hal ini bukan situasi yang ideal bagi Israel, tetapi logis bagi doktrin periperial yang memaksaka Israel untuk membujuk Iran. Meningkatnya popularitas Anwar Sadat di Amerika Serikat dan hubungan dingin Begin dengan Carter membuat hubungan strategis Israel menjadi rumit. Jika hubungan Amerika-Arab semakin dekat, maka kebutuhan Israel terhadap rekan regional—Iran—untuk melakukan perimbangan akan semakin meningkat. Peluang untuk menjaga hubungan baik dengan Iran harus tetap dijaga. "Dari perspektif Israel, hal ini merupakan rencana strategis-jangka panjang. Inilah kebijakan periperial," demikian komentar Gary Sick, yang bekerja di *National Security Council* Amerika Serikat pada waktu itu. "Israel sedang memperlakukan Iran sebagaimana mereka memperlakukan Ethiopia."[382] Tetapi pada 22 September 1980, prediksi Shah terbukti—bahwa dictator Irak akan menyerang Iran ketika Saddam Hussein mendapatkan peluang. Serangan ini terjadi hanya lima tahun setelah Perjanjian Aljazair. Iran kemudian merasakan kebutuhan yang tinggi atas akses Israel terhadap persenjataan Amerika—daripada Israel yang merasakan ketergantungan pada Iran.

380

381

382

10-Saddam Menyerang!

Ada tiga hal yang seharusnya tidak diciptakan Tuhan; Bangsa Persia, Bangsa Yahudi, dan Lalat
—Judul buku Khairallah Tulfah, Paman Saddam Hussein dari pihak ibu

Alih-alih mampu membangun hubungan baik dengan negara-negara Arab, kebijakan pemerintahan Khomeini jutsru membuat negara-negara Arab memusuhi mereka. Usaha Iran untuk merubah *status quo* regional justru membuat Iran menjadi negara sampah, dijauhi oleh banyak negara dan ditakuti oleh semua negara.[383] Klaim Iran atas kepemimpinan dunia Islam membuatnya menjadi rival Irak—yang berusaha mengibarkan bendera pan-Arab pasca kegagalan Mesir untuk melakukan hal yang sama dengan menandatangani Perjanjian Camp David dengan Israel—dan Saudi Arabia, sebagai tempat kelahiran Islam dan penjaga tempat suci umat Islam, yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya penjaga dan pemiliki otoritas tertinggi atas keyakinan umat Islam.[384]

Ayatollah memiliki beberapa pilihan untuk mengakhiri lingkaran isolasi terhadap Iran yang dilakukan Amerika Serikat, blok negara Arab, dan Uni Soviet. Kekurangan Iran dalam diplomasi, hubungan dengan negara regional dan pendapatan minyak (karena menurunnya produksi minyak Iran sebagai akibat dari kekacauan revolusi) membuat Iran mempunyai banyak musuh. Meskipun begitu, kelemahan Iran memberikan keuntungan tersendiri bagi musuh-musuhnya. Saddam Hussein—yang sangat menantikan peluang untuk mengembalikan kejayaan Irak—menyadari bahwa berbagai kondisi yang ada memberikan keuntungan baginya. Dia tahu bahwa negara Arab lainnya sadar akan ancaman Iran dan akan memberikan dukungan kepada Irak. (Kenyataannya, Saddam melakukan koordinasi dengan Saudi Arabia dan Kuwait ketika melakukan penyerangan ke Iran). Kevakuman pasca keluarnya Mesir dari Liga Arab (setelah Anwar Sadat memisahkan diri dari blok Arab dan menandatangani Perjanjian Camp David dengan Israel) memunculkan kebutuhan terhadap seorang pemimpin baru yang ditinggalkan Anwar Sadat.[385] Di samping itu, kekuatan militer Iran juga tampak lemah dan pertahanan mereka di wilayah *Shatt al-Arab* atau saluran air Arvand Rud juga rapuh. Iran merupakan target percobaan. Saddam memprediksi bahwa dia tidak hanya akan mampu mengontrol saluran air tetapi juga wilayah provinsi Khuzistan di selatan Iran yang kaya-minyak. Keberhasilan serangan militer terhadap Iran akan membuat Irak menjadi kekuatan dominan di Teluk Persia dan semakin memperkuat perdagangan minyak Irak. Pada saat itu, Irak juga berusaha meningkatkan hubungan mereka dengan Amerika Serikat, dan Washington memandang bahwa serangan Irak terhadap Iran akan memberikan keuntungan bagi mereka.

Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada Juni 1980, pada 17 September Irak mengumumkan bahwa wilayah *Shatt al-Arab* merupakan bagian dari wilayah Irak, yang secara efektif membatalkan Perjanjian Aljazair. Saddam melancarkan serangan penuh terhadap Iran pada 22 September, dengan dalih adanya percobaan pembunuhan yang dilakukan Iran terhadap menteri luar negeri Irak, Tariq Aziz. Sistem

383

384

385

pertahanan Iran kacau, dan pasukan Irak dengan mudah memasuki wilayah Ahvaz, ibu kota provinsi Khuzistan. Tanpa suplai onderdil senjata dari Amerika, sebagian besar pasukan udara Iran lumpuh, sehingga pasukan Iran semakin berada di atas angin dan meningkatkan kemampuan serangannya. Tetapi ketika Irak terus melakukan penetrasi ke wilayah Iran, Irak kemudian menemui berbagai rintangan yang tak terduga. Alih-alih berbalik melawan rezim mullah, rakyat Iran kemudian berkumpul di bawah kepemimpinan para mullah dengan semangat yang tinggi. Dalam jangka waktu dua bulan, sekitar 100,000 relawan berada di garis pertempuran. Pasukan Irak segera menghadapi Iran sebagai musuh tetap yang tangguh meskipun mereka menghadapi kekacauan dan kesulitan. Pada 1982, Iran mampu menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai pasukan Saddam dan berbalik menyerang wilayah Irak. Perang yang dimimpikan Saddam akan berakhir dengan kemenangan yang elegan kemudian berubah menjadi peperangan berkepanjangan selama delapan tahun yang menelan korban tidak kurang dari 1 juta orang.

Peperangan ini memperkuat permusuhan Soviet dan negara Arab pada Iran, yang kemudian memperkuat persepsi ancaman yang sama-sama dihadapi Israel dan Iran. Meskipun hubungan Irak dan Amerika mulai mencair, Moskow tetap khawatir bahwa kemenangan Iran akan menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan regional, sehingga Soviet memperpanjang dukungan mereka terhadap Irak. Bantuan militer Soviet pada Irak membuat rezim Khomeini semakin marah—yang kemudian memanggil Soviet dengan nama "Setan Besar lainnya". Pada 1983, Iran mengusir sejumlah diplomat Soviet dan mengeksekusi sejumlah aktivis Partai Komunis Iran dengan tuduhan menjadi mata-mata Moskow.[386] Dan sebagaimana diprediksi Saddam, kerajaan-kerajaan Arab di Teluk Persia membiayai mesin perang Irak dengan senang hati. Sebagai imbalannya, diktator Irak selalu melakukan koordinasi dengan pemimpin Arabi Saudi, Kuwait, dan Yordania dalam keputusan-keputusan perangnya.[387]

Dari September 1980 hingga musim semi 1982, Arabi Saudi—yang khawatir jika kemenangan ada di pihak Iran dan dukungan terhadap semangat ideologi Iran—memberikan bantuan 1 triliun dolar per bulan kepada Irak. Dengan cadangan dana di bank milih negara-negara Teluk, Irak menghabiskan beberapa milyar dolar lebih besar dibandingkan Iran dan Israel untuk belanja militer selama periode ini. Di tingkat regional, pengeluaran belanja militer Irak merupakan yang terbesar kedua setelah Arab Saudi sepanjang decade 1980-an, dan kapasitas pasukan Irak meningkat 10 kali lipat dalam jangka waktu kurang dari satu dekade, yang mencapai angka 1,000,000 pasukan pada tahun 1988 dan 1,4 juta pada 1990. Kemampuan serangan Baghdad juga terus berkembang termasuk cadangan senjata kimia yang disediakan oleh negara-negara Barat. Pada tahun terakhir peperangan, Irak mendemonstrasikan persenjataan mereka dengan melakukan serangan terhadap ibu kota Iran dengan rudal balistik—yang berjarak 300 mil dari garis pertahanan Irak. Dengan persenjataan seperti ini, Irak kemudian menempatkan Israel menjadi target selanjutnya.[388]

Perang ini juga membuat Iran berjarak dengan PLO, yang juga mendukung Saddam Hussein, sehingga Iran memiliki kredibilitas yang rendah untuk mendapatkan klaim

386

387

388

kepemimpinan dunia Islam melawan Israel.[389] Persatuan blok Arab melawan Iran sudah nampak ketika Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman membentuk *Gulf Cooperation Council* (GCC) pada 1981, sebuah badan keamanan untuk mengimbangi kekuatan Iran.[390] **"**Di satu sisi, kita tidak mengakui Israel, tetapi pada sisi lain, kita sedang memerangi negara Islam sekular," Amir Mohebian berkomentar, editor politik *Resalat,* surat kabar harian konservatif di Iran, "Kami merasa bahwa dunia sedang memusuhi kami."[391]

Berbagai kenyataan ini bertemu dengan ideologi di Teheran. Dengan menyerang Iran, Saddam Hussein telah merealisasikan ancaman blok Arab terhadap Iran sekaligus mengintensifkan kekuatan-kekuatan geostrategis yang telah menciptakan poros Israel-Iran satu dekade sebelumnya. Semangat ideologis telah membawa Iran sebegitu jauh, dan para pemimpin kelompok revolusioner berdebat secara intensif di internal mereka sendiri tentang apakah ada sebuah "kepentingan nasional" atau apakah hanya ideologi saja yang harus memandu langkah negara. Ketika peperangan semakin berkecamuk, perdebatan ini kemudian berakhir dengan kemenangan kelompok pragmatis.[392] Meskipun kecenderungan ini mulai ada hanya beberapa bulan setelah kemenangan kelompok revolusioner, serangan Saddam dan isolasi terhadap Iran semakin mengintensifkan pergeseran kebijakan luar negeri Iran—dalam realisasinya bukan pada retorikanya—yang menjauh dari ideologi menuju kebijakan yang lebih praktikal dan pragmatis.[393] Bagaimanapun juga, Iran tidak dapat melakukan serangan terhadap Irak tanpa membangun hubungan dengan Israel dan Washington untuk membeli persenjataan dan onderdil buatan Amerika Serikat.[394]

Ketika "kepentingan nasional" mulai mendominasi, sebagian besar pihak berpendapat bahwa hubungan Iran dengan Amerika Serikat perlu dibuka kembali sekalipun harus menggunakan Israel sebagai perantara.[395] Seluruh kontak dengan Israel harus dirahasiakan karena hubungan terbuka dengan Israel akan menghilangkan kepercayaan terhadap ideologi Iran. Tetapi, alih-alih mengembalikan pola kebijakan luar negeri warisan Shah, bersama dengan Israel dan Washington, kelompok revolusioner mencapai sebuah kesimpulan yang berbeda, yang berdekatan dengan pertimbangan Shah ketika menandatangani Perjanjian Aljazair. Serangan Saddam ini—alih-alih membuat Iran menyerah untuk menjalin persahabatan dengan blok Arab dan tetangganya yang Sunni sekaligus menjaga jarak dengan Israel—secara ironis justru membuat Khomeini semakin percaya bahwa hubungan baik dengan negara Arab merupakan faktor kunci bagi keamanan jangka panjang Iran.

Di tengah dilema yang dihadapi Iran—ketika kekuatan ideologis dan strategisnya mendorong Iran menuju arah kebijakan luar negeri yang berbeda—sebuah strategi berlapis muncul, yang semakin membingungkan para analis politik dan pemimpin dunia. Alih-alih mengimbangi kekuatan blok Arab melalui aliansi dengan Israel atau membangun hubungan baik dengan blok Arab dengan memegang peran kepemimpinan melawan Israel, Teheran justru memilih kedua langkah tersebut dengan membedakan antara kebijakan

389

390

391

392

393

394

395

operasional dan kebijakan retorikanya. Di satu sisi, Iran bekerja sama dengan Israel dalam hal keamanan, dan di sisi lain, Iran secara terbuka menampilkan retorika mengecam tindakan Israel hingga mampu menutupi hubungan mereka dengan Israel.[396] Kebijakan ini—yang bisa saja muncul sebagai bentuk kompromi antara berbagai kelompok dalam pemerintahan—ditujukan agar baik kepentingan ideologis dan kepentingan strategis saling menguatkan satu sama lain. Tujuan-tujuan itu termasuk keamanan jangka-panjang sebagai sebuah negara non-Arab di Timur Tengah, keunggulan posisional di tingkat regional terlepas dari konflik Arab-Persia dan Sunni-Syiah, dan—pada akhirnya—kemurnian ideologis untuk melindungi identitas revolusioner dan fungsi ideologi Islam Iran sebagai kendaraan untuk mencapai dua tujuan sebelumnya.

Pada level ideologis, "kepentingan dunia Islam" harus menjadi bagian yang diperhitungkan; yaitu, kemerdekaan dari kekuatan adidaya, buruknya nasib warga Palestina, dan akses serta kontrol terhadap tempat suci di Yerusalem. Dan meskipun kelompok revolusioner "tidak melihat adanya ancaman (militer) yang datang dari Israel, setidaknya dalam jangka pendek," Negara Yahudi tetap dianggap sebagai ancaman ideologis bagi Islam politik.[397] Kewajiban-kewajiban moral ini, sebagaimana digambarkan oleh mantan wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mahmoud Vaezi, mampu menutupi kepentingan strategis Iran, khususnya pada masa-masa awal revolusi.[398]

Di sisi lain, dalam pandangan kelompok revolusioner, kepentingan strategis Iran kemudian memperkuat oposisi ideologis Iran terhadap Israel. Untuk mengelola hubungannya dengan negara-negara Muslim di sekitarnya, "Iran—dalam perspektif kepentingan strategis—perlu mengambil posisi tegas terhadap Israel untuk setidaknya meredam—jika tidak menghapus—permusuhan yang telah menyatu dalam sikap negara tetangganya terhadap Iran," duta besar Iran untuk PBB, Javad Zarif, menjelaskan." Hal ini merupakan pandangan dari perspektif kepentingan strategis untuk memperkuat aspek ideologis dalam dukungan Iran dalam isu Palestina."[399] Kelompok revolusioner sangat menentang ide agar Iran menyandarkan diri pada negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan blok Arab sebab Iran tidak akan mampu menjadi pemimpin regional jika masih bergantung pada pihak lain untuk kepentingan keamanannya sendiri. "Ketika Iran mendapat serangan senjata kimia, seluruh perjanjian dengan Iran yang telah ditandatangani menjadi tidak berarti lagi," Gary Sick, yang pernah bekerja di *National Security Council* pada masa kepresidenan Jimmy Carter dan Ronald Reagan, berkomentar. "Iran kemudian berkesimpulan bahwa mereka tidak bisa bergantung pada pihak manapun selain mereka sendiri."[400]

Fungsi utama dari propaganda anti-Israel bagi Iran adalah untuk meredam ancaman Arab terhadap Iran atau setidaknya membuat Arab lebih mengeluarkan sumber daya yang banyak untuk mendukung Irak. "Kami percaya bahwa sikap oposisi kita terhadap Israel akan meyakinkan dunia Islam dan Arab bahwa serangan Irak terhadap Iran adalah tindakan yang salah," editor politik *Resalat,* Mohebian mengakui hal tersebut.[401] Dalam

396

397

398

399

400

401

sebuah pertemuan, Menteri Luar Negeri Iran, Ali Akbar Velayati, yang seringkali menjadi penengah antara kelompok ideologis dan kelompok pendukung "kepentingan nasional", memberikan dukungannya kepada para ideolog. "Ideologi merupakan salah satu aspek yang telah ditinggalkan Iran," Ali berargumentasi. Iran tidak boleh mencoba untuk mengabaikan pengaruh dari kekuatan ideologi ini.[402] Sebagimana yang telah dilakukan Shah, kelompok revolusioner memanfaatkan citra negatif Negara Yahudi di dunia Arab untuk meningkatkan statusnya di dunia Muslim sekaligus mengurangi ancaman yang Iran hadapi dari blok Arab. Namun tidak seperti Shah, kelompok revolusioner tidak melakukan hubungan terbuka dengan Israel karena Iran memfokuskan diri untuk kembali pada tujuan regional mereka—hubungan terbuka dengan Israel akan mempersulit usaha Iran untuk membangun kembali hubungan dengan negara tetangga Arab mereka.

Namun propaganda Islam politik dan sikap oposisi terhadap Israel juga membantu pencapaian tujuan-tujuan strategis Iran. Setelah gagal mengekspor semangat revolusi sekaligus meruntuhkan rezim-rezim Arab di sekelilingnya, Iran kemudian mengeksploitasi dan memperlebar jarak antara rakyat Arab dengan pemerintahan mereka yang tidak populer dan korup dengan mengkampanyekan kebanggaan religius bangsa Arab sekaligus rasa frustasi mereka terhadap ketidakmampuan pemerintahan Arab mereka menghadapi Israel dan negara adidaya.

Iran membuat berbagai langkah untuk mengeluarkan Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan mensponsori kontes menulis dan menggambar bagi anak-anak dengan tema "*Israel Must Be Erased from the Earth* (Israel harus dihapuskan dari muka bumi)" di berbagai negeri Muslim, dan menjanjikan akan mengirimkan tahanan Irak untuk melawan Israel di Lebanon.[403] Iran bahkan mengusulkan pembentukan sebuah pasukan militer Islam untuk mengusir Israel dari wilayah-wilayah Arab yang sudah diduduki Negara Yahudi. "Iran sudah mengumumkan bahwa mereka ingin terlibat secara aktif dalam pembebasan Palestina," Velayati memberikan keterangan kepada wartawan. Kelompok revolusioner berpandangan bahwa semakin Iran nampak bersikap anti-Israel, Iran semakin mendapatkan simpati dari dunia Arab dan semakin sulit pemerintahan Arab melawan Iran. Namun strategi ini gagal sebelum waktunya. Strategi ini justru semakin mengisolasi Iran dan meningkatkan kekhawatiran pemerintahan di dunia Arab terhadap ambisi Iran. "Pertimbangan kami bukanlah pemerintahan di dunia Islam, tetapi rakyatnya, [orang-orang] yang ada di jalanan," Mohebian menjelaskan. "Namun hal ini justru membuat pemerintahan Arab semakin ketakutan dan mereka meningkatkan dukungannya pada Saddam."[404]

Tetapi kecanggihan retorika Iran terhadap Israel hanyalah sebatas kata-kata belaka. Ketika pertimbangan strategis lebih diutamakan daripada pertimbangan ideologis, Teheran kemudian berhati-hati untuk tidak merealisasikan retorika ini ke dalam tindakan nyata. Sebab Iran tidak akan mampu berkonfrontasi dengan Negara Yahudi sementara mereka sedang berperang dengan Irak. "Pemegang keputusan di Iran sangat cerdas untuk tidak menjadikan Israel sebagai ancaman langsung bagi Iran," mantan wakil Menteri Luar Negeri,

402

403

404

Abbas Maleki menjelaskan kepada saya. “Karena pada waktu itu, Irak merupakan sebuah ancaman (bagi Iran).”[405]

Dalam sebuah percakapan selama 3 jam dengan teman dekatnya pada masa awal perang, Ayatollah Khomeini menjelaskan pendekatan yang digunakan Republik Islam terkait konflik Palestina. Menurut Bapak Revolusi Iran, dan sosok yang merancang ideologinya, dalam konflik Israel-Palestina, warga Palestina adalah pihak yang pertama harus berperan. Pada level yang kedua, isu ini harus melibatkan negara-negara Arab yang berbatasan dengan Israel, dan di level yang ketiga adalah keterlibatan Iran dan negara Islam lainnya. Sehingga Iran tidak boleh terlibat terlalu jauh dalam konflik tersebut dibandingkan warga Palestina sendiri dan negara tetangga Arab mereka, dan Iran tidak boleh menjadi negara terdepan melawan Israel. Konfrontasi langsung dengan Negara Yahudi harus hanya dilakukan oleh Palestina dan negara-negara tetangga Arab. “Kami tidak pernah menginginkan untuk terlibat langsung dalam peperangan melawan Israel,” Ali Reza Alavi Tabar menjelaskan, yang berasal dari kelompok reformis dalam pemerintahan Iran.[406] Khomeini juga berbicara pada teman-temannya bahwa dalam sebuah perjanjian antara Palestina dan Israel, Iran harus memberikan dukungannya kepada perjanjian itu dengan berdiri di belakang warga Palestina.[407]

Pada tahun-tahun pertama perang Iran-Irak, Khomeini mendapatkan peluang emas untuk menunjukkan pembedaan Iran antara kebijakan retorikal dan operasional. Pada 6 Juni 1982, ketika Israel menyerang Lebanon, beberapa pemimpin komunitas Syiah di Lebanon, termasuk kepala—yang kemudian menjadi kelompok—Hezbullah Lebanon, berada di Teheran untuk menghadiri sebuah konferensi. Berita tentang serangan Israel ke Lebanon tiba ketika konferensi sedang berlangsung, dan para pemimpin Syiah segera meminta bantuan kepada Iran. Khomeini setuju dan mengirimkan utusan elit Iran, termasuk menteri pertahanan Iran dan beberapa pasukan elit lainnya, menuju Syria untuk meninjau peluang keterlibatan Iran. Pada 11 Juni, utusan Iran ini tiba di Syria, tetapi mereka segera berkesimpulan seperti apa yang dicurigai Khomeini selama ini—bahwa perang Lebanon merupakan sebuah pengalihan perhatian Iran dari fokus mereka pada perang Irak. Pada malam sebelum perang Lebanon, Saddam telah menawarkan damai kepada Iran dan mengajak Teheran untuk bergabung dengan Baghdad melawan Israel. Khomeini menolak ajakan tersebut. Sekarang, terlepas dari lobi duta besar Iran di Syria, Ali Akbar Mohtashamipour, dan kepala *Iranian Revolutionary Guards Corps,* Mohsen Rafiqdoost, mengirimkan sepuluh ribu pasukan ke selatan Lebanon untuk membuka dua gerbang peperangan. Khomeini segera merubah instruksinya dan memerintahkan Iran agar kembali berperang melawan Irak dengan menyatakan bahwa jalan menuju Al Quds akan ditempuh melalui Karbala, Irak.[408]

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Pada 1986, terjadi kontak senjata antara Hezbullah dan *Syrian Social Nationalist Party* (SNNP) sebagai akibat dari usaha Syria untuk melumpuhkan Hezbullah agar dapat dikontrol. Langkah ini membuat sekutu Iran di Lebanon bertentangan dengan sekutu Iran dalam perang melawan Irak. Teheran kemudian

405

406

407

408

lebih mementingkan sekutu mereka yang kedua.[409] Keputusan Khomeini ini menegaskan kembali tujuan ideologis Iran sambil memastikan bahwa tujuan-tujuan ideologis ini tidak akan secara aktif direalisasikan. "Pembebasan Yerusalem" akan terus menjadi bahan retorika Iran untuk mendapatkan legitimasi dari dunia Arab, namun bukanlah agenda ideal untuk direalisasikan, agar tidak membahayakan kepentingan keamanan jangka pendek Iran. "Keputusan ini menegaskan kembali bahwa kebijakan kami di tingkat regional memiliki sisi lunak dan sisi tajam sekaligus. Kami selalu menunjukkan pandangan dan kepercayaan kami. Tetapi bukan berarti kami perlu merealisasikan pandangan itu ke dalam kebijakan yang nyata," Vaezi, mantan wakil Menteri Luar Negeri, berargumentasi.[410] Dengan menghindari keterlibatan langsung dalam isu Palestina, Iran mampu memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. "Hal ini merupakan keputusan strategis yang krusial. Jika Ayatollah Khomeini tidak menentang langkah ini, Iran tidak akan mampu lagi menghadapi Saddam." Abbas Maleki, mantan wakil Menteri Luar Negeri, menegaskan.[411] Sikap penentangan terhadap Israel—negara yang menjadi tempat bergantung Iran dalam suplai senjata—tanpa merealisasikan retorika ini ke dalam tindakan-tindakan nyata dapat dipahami hanya dalam konteks ambisi utama Iran untuk menjadi pemimpin dunia Islam.

Barangkali yang lebih penting, dukungan Iran kepada Hezbullah lebih didorong oleh keinginan Iran untuk memperluas cabang Islam politik mereka dengan memegang posisi kepemimpinan di dunia Islam bukan dengan beroposisi melawan Israel. "Jika kami hanya mempertimbangkan bahwa Lebanon dianggap sebagai jantung dari negeri Arab di Timur Tengah, sebuah panggung tempat semua gagasan dipersembahkan untuk dunia Arab, maka kami berkesimpulan bahwa keberadaan sebuah gerakan Islam di negeri tersebut akan berpengaruh pada gerakan Islam di seluruh dunia Arab," duta besar Iran untuk Lebanon menjelaskan.[412]

Serangan Saddan terhadap Iran membuat perbedaan kepentingan antara Amerika dna Israel terkait Iran menjadi jelas. Tidak seperti sekutunya Washington, Israel menyikapi perang ini dengan penuh perhatian, Iran nampak lemah, dan kemenangan Irak akan membuat Israel berada di posisi yang semakin rentan.[413] Baghdad akan menjadi kekuatan dominan tak terkalahkan di Teluk Persia, dengan cadangan minyak ketiga terbanyak di dunia dan kekuatan militer empat kali lebih besar dibandingkan Israel. Hal ini akan membuat ancaman dari sisi timur lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Meskipun Irak tengah bermain mata dengan Amerika Serikat, dan sebagian pejabat di pemerintahan Ronald Reagan—seperti Donald Rumsfeld, utusan khusus Reagan di Irak—juga membalasnya dengan bermain-main dengan rencana untuk menjadikan Saddam sebagai sekutu Amerika di Teluk Persia, kedekatan hubungan Irak dengan Barat akan menjadi hambatan kecil bagi permusuhan Baghdad terhadap Israel.[414] Kemenangan Iran, tidak seperti ketika peperangan baru dimulai, tidak membuat Israel khawatir. Sebab Iran jaraknya ribuan mil dari Israel, dan kemampuan Iran untuk terlibat dalam perang melawan Israel rendah, bahkan jika Iran memang memenangkan peperangan dengan Irak.[415]

409
410
411
412
413
414
415

"Sepanjang dekade 1980, tidak ada satupun orang di Israel yang berbicara tentang ancaman Iran—sebuah kata yang bahkan tidak pernah diucapkan," Professor David Menashri dari Universitas Tel Aviv, pakar terkemuka di Israel tentang Iran, berkomentar.[416]

Memuncaknya semangat ideologis Iran, ketakutan Israel atas kemenangan Irak, resistensi Israel terhadap bahaya ideologi politik Iran, dan usaha-usahan Israel untuk merebut kembali Iran sekaligus mengembalikan doktrin periperial; semua kondisi ini mendorong Israel untuk mempersenjatai Iran sekaligus meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran.[417] Meskipun negara-negara Arab inti dan negara-negara di pinggiran wilayah Arab dalam beberapa hal telah berganti peran sejak akhir 1970 melalui proses stabilisasi dan moderasi kawasan utama ajaran Sunni dan radikalisasi ajaran Syiah—kawasan pinggiran Persia, para pemimpin Israel gagal menangkap fenomena ini atau justru memilih fokus pada potensi yang berbeda dari berbagai elemen ini, bukan pada ideologi, retorika, atau tujuan mereka. Israel percaya bahwa perang Iran-Irak ini berhasil mempertahankan kepercayaan Israel pada doktrin periperial. Mayoritas pejabat senior Israel, termasuk Yitzhak Rabin, tetap percaya bahwa Iran merupakan "sekutu alami" Israel.[418] Menghentikan Saddam merupakan hal terpenting, dan jika "itu berarti Israel harus memenuhi permintaan senjata Iran, dan itu mampu membendung kemenangan Irak, maka lakukanlah," David Kimche, mantan kepala Kementerian Luar Negeri Israel, menegaskan.[419] Tapi ada yang lebih penting lagi. Langkah untuk mendorong Washington agar berhubungan baik dengan Iran akan berakibat tidak hanya mampu menghentikan Irak dan mengembalikan doktrin periperial, hal ini juga akan menjauhkan Amerika Serikat dari blok Arab dan pada akhirnya "akan menempatkan Israel sebagai satu-satunya sekutu strategis Amerika Serikat di Timur Tengah."[420]

Maka tiga hari setelah pasukan Irak memasuki wilayah Iran, Menteri Luar Negeri Israel, Moshe Dayan, membatalkan kunjungan pribadinya ke Vienna untuk menggelar konferensi pers untuk mendesak Amerika Serikat—dalam suasana krisis penyanderaan—untuk melupakan masa lalu dan membantu Iran menjaga pertahanannya.[421] Dua hari kemudian, Wakil Menteri Pertahanan Israel, Mordechai Zippori memberikan keterangan kepada surat kabar *Maariv* bahwa Israel akan menyediakan bantuan militer untuk Iran jika Iran merubah sikap permusuhannya pada Negara Yahudi: "Israel memiliki kemungkinan untuk memperpanjang bantuannya kepada Iran dan membuat Iran mampu melanjutkan peperangan—dari sisi logistik—dengan Irak. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi selama rezim ekstrim Iran tidak merubah sikapnya secara serius."[422]

Israel bergerak dengan cepat di berbagai tempat. Di kota Zurich, para pejabat Iran dan Israel dikabarkan melakukan pertemuan yang menyepakati sebuah kerjasama militer. Kolonel Ben-Yousef dari Israel dan Kolonel Zarabi dari Iran yang juga direktur komplek industri militer Iran telah membicarakan berbagai proposal termasuk sebuah kesepakatan yang mengizinkan para teknisi Israel untuk melatih pasukan Iran dalam melengkapi dan

416
417
418
419
420
421
422

memperbaiki senjata Iran buatan Amerika dengan onderdil buatan Israel.[423] Di kota Washington, duta besar Israel untuk Amerika, Ephraim Evron, melobi Sekretaris Negara Edmund Muskie untuk melunakkan kebijakan pemerintahan Jimmy Carter dalam penjualan senjata ke Teheran dengan menyampaikan perhatian Tel Aviv terhadap implikasi kemenangan Irak. Terkait dengan keinginan-keinginan Washington, Begin kembali pada kata-katanya di hadapan Carter dan melanjutkan penjualan senjata serta onderdil ke Iran. Dalam pertemuan terakhir Carter dengan Begin pada 13 November 1980, Begin menyampaikan kembali perhatian Israel untuk memulihkan hubungan dengan Iran. Begin menjelaskan permintaan Teheran atas dukungan Tel Aviv dan kesediaan Tel Aviv untuk membantu. Carter segera menolak ide tersebut dan mengingatkan Begin bahwa penjualan senjata ke Iran akan mengganggu kebijakan embargo Amerika. Meskipun Begin sudah berjanji, dia tidak begitu serius menghalangi. Segera setelah Ronald Reagan disumpah menjadi presiden pada 1981, penjualan senjata Israel secara diam-diam dilanjutkan.[424] Pemerintahan Reagan tetap melanjutkan kebijakan embargo tetapi membiarkan penjualan senjata Israel. Sekretaris Negara, Alexander Haig, yang dikenal dengan simpatinya kepada Israel, memberikan Kimche sebuah lampu hijau informal untuk meneruskan penjualan ini pada awal 1981.[425]

Pada September 1981, Sharon bertemu kembali dengan Haig, Sekretaris Pertahanan Caspar Weinberger, dan Direktur CIA, William Casey, dan menyatakan perlunya memberikan bantuan pada Iran. Dalam autobiografinya, Sharon menulis bahwa dia mengatakan kepada Amerika bahwa ideologi ekstrem Khomeini "tidak serta merta menghapuskan posisi Iran sebagai negara kunci di regional" dan bahwa hubungan yang baik dengan pemerintahan Khomeini—khususnya kelompok militer di Teheran—akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Barat. Alih-alih menekankan kebutuhan Israel terhadap Iran untuk mengimbangi kekuatan Irak, Sharon justru memperingatkan Amerika tentang bahaya Uni Soviet yang akan menggunakan perang ini untuk memasuki wilayah Iran dan mengontrol sumber energi di Iran. Sebuah perjanjian pada 1921 antara Iran dan Rusia berisi tentang pemberian izin bagi Moskow untuk melakukan intervensi perlawanan terhadap kekuatan manapun yang menggunakan Iran sebagai basis perlawanan terhadap Russia.[426] Sharon memperingatkan Amerika bahwa hal ini bisa saja terjadi jika Irak terus melanjutkan peperangan dengan Iran.[427] Secara keseluruhan, menurut Ahmad Haidari, seorang negosiator Iran untuk urusan senjata yang bekerja pada rezim Khomeini, kurang lebih 80 persen persenjataan Iran dibeli Teheran segera setelah permulaan peperangan yang berawal di Israel.[428]

Ketika peperangan terus berlanjut dan pemerintahan revolusioner tidak kunjung jatuh, pertimbangan Israel kemudian bergeser dari perkiraan kejatuhan pemerintahan Khomeini kepada usaha-usaha untuk memperkuat faksi-faksi moderat dalam pemerintahan Khomeini.[429] Meskipun Israel mulai menyadari bahwa rezim Khomeini tidak akan jatuh dalam waktu dekat, mereka masih menganggap semangat ke-Islaman dan

423
424
425
426
427
428
429

pandangan ekstrem Iran sebagai sebuah sisipan sejarah. Kenyatannya, Iran yang berorientasi kepada pertimbangan geostrategis yang akan melanjutkan strategi kerjasama Shah dengan Israel akan segera muncul kembali. Hal ini membuat bantuan Israel kepada Iran dalam peperangan menjadi langkah paling penting, sebab kekalahan Iran tidak hanya akan memperkuat blok Arab terhadap Israel, tetapi juga akan semakin memperkecil peluang bagi Israel untuk membangun kembali hubungannya dengan Iran, karena rezim Iran yang selanjutnya bisa saja akan lemah dan bergantung pada Irak. Langkah untuk memperkuat kelompok moderat dalam pemerintahan Iran akan membantu Israel membangun kembali hubungannya dengan Iran, dan salah satu kelompok dalam pemerintahan Iran yang mampu merubah komposisi pejabat profesional dalam angkatan militer Iran. "Ada sebuah perasaan bahwa jika Iran mampu menjaga hubungan dengan kelompok militer, maka hal ini akan memberikan kemajuan dalam hubungan Iran dan Israel," Kimche menjelaskan.[430]

Namun berbagai kelompok di Israel juga tidak sepakat untuk mendukung Iran dalam peperangan. Sebuah kelompok kecil di Israel justru aktif dalam keterlibatan Israel untuk menggulingkan Khomeini. Uri Lubrani, duta besar Israel untuk Iran pada 1970-an, memberikan pernyataan di *BBC Panorama* pada 8 Februari 1982, bahwa Israel bisa saja melancarkan kudeta militer melawan Khomeini, tetapi Washington tidak memberikan dukungan atas rencana kudeta ini. Sharon telah bermain mata dengan Reza Pahlavi, anak laki-laki terakhir dari dinasti Shah.[431] Kelompok lain berpendapat bahwa perdamaian dengan Mesir telah membuat seluruh doktrin periperial menjadi usang, sebab hal ini membuktikan bahwa perdamaian dengan blok Arab adalah sesuatu yang mungkin. Pendapat yang menyatakan bahwa Iran dan Irak tidak mampu memberikan ancaman kepada Israel ketika kedua negara tersebut sedang berperang merupakan sebuah pikiran picik sebab hal tersebut tidak menyadari bahwa jika peperangan kedua negara tersebut berlangsung semakin lama, maka kekuatan militer kedua negara tersebut semakin besar dan kedua negara tersebut semakin berada di pihak yang sama-sama ekstrem," Yossi (Joseph) Alpher, mantan pejabat Mossad dan penasihat senior untuk Perdana Menteri Israel Ehud Barak, berpendapat.[432]

Picik atau tidak, faktanya Israel tetap ingin membangun kembali hubungannya dengan Teheran. Barangkali hubungan ekstensif Israel dengan kelompok militer Iran yang membuat Israel terlibat dalam sebuah aksi militer penting dalam peperangan Iran dengan Irak. Pada 7 Juni 1981, delapan pesawat F16 Israel dan enam pesawat F15 Israel lepas landas dari landasan udara Etzion dalam sebuah misi yang dikenal dengan nama Operasi Opera. Target operasi ini adalah reaktor riset plutonium Irak di Osirak, yang diduga sebagai pusat pengembangan bahan untuk senjata pemusnah massal. Serangan udara ini dengan cepat menghancurkan pusat reaktor, membuat Irak harus mengulang kembali program senjata nuklirnya. Menurut surat kabar London *Sunday Telegraph* serangan Israel ini dibantu oleh informasi foto dan peta dari Iran tentang instalasi nuklir ini.[433] Menurut Ari Ben-Menashe, yang terlibat aktif dalam hubungan Iran-Israel pada awal dekade 1980-an, serangan ini sudah dibicarakan para pejabat senior Israel dan perwakilan rezim Khomeini

430

431

432

433

di Prancis satu bulan sebelumnya. Pada pertemuan tersebut, pihak Iran menjelaskan kegagalan mereka melakukan serangan terhadap reaktor nuklir ini pada 30 September 1980, dan mengizinkan pesawat Israel untuk mendarat di landasan udara Iran di daerah Tabriz dalam keadaan darurat.[434] Apakah Iran berperan dalam serangan ini atau tidak, Iran kemudian menggunakan serangan Israel ini untuk mengganggu langkah Irak untuk mendapatkan legitimasi kepemimpinan di dunia Islam. Irak menyatakan bahwa Iran telah bekerja sama dengan Israel.

Satu bulan kemudian, pada 18 Juli, sebuah pesawat kargo Argentina yang membawa senjata dari Israel untuk Iran terjatuh di wilayah perbatasan Soviet-Turki sehingga menggemparkan dunia internasional. Baik Iran dan Israel membantah hubungan keduanya, tetapi dukungan Israel terhadap Iran semakin terbuka ke publik.[435] Situasi ini memberikan amunisi baru bagi propaganda Saddam Husein untuk menyerang Iran. PLO juga memprotes standar ganda Iran terhadap isu Palestina.[436] Tetapi penjualan senjata tetap berlanjut. Secara keseluruhan, menurut *Jaffe Institute for Strategic Studies* di Universitas Tel Aviv, Iran telah menggelontorkan dana senilai 500 juta dolar untuk pembelian senjata Israel antara tahun 1980-1983. Mayoritas senjata Israel ini dibayarkan dengan pengiriman minyak Iran ke Israel. CIA melacak ada kira-kira 300 juta dolar, dan beberapa intelijen terkejut dengan keengganan pemerintahan Ronald Reagan untuk menghentikan transaksi senjata Israel-Iran ini.[437]

Pada Mei 1982, Menteri Pertahanan Israel Ariel Sharon memberikan keterangan pada NBC bahwa Tel Aviv telah menyuplai senjata dan amunisi kepada Iran karena Israel memandangan bahwa Irak membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah.[438] Sharon menambahkan bahwa Israel telah menyediakan persenjataan untuk Iran karena Israel merasa bahwa penting sekali untuk membuat celah kecil bagi kemungkinan terciptanya hubungan baik dengan Iran di kemudian hari.[439] Sementara Iran berusaha menjaga agar transaksinya dengan Israel tetap rahasia, Israel justru menuai keuntungan dengan terbukanya hubungan mereka dengan Iran, khusunya sejak pemerintahan Reagan menutup mata atas transaksi ini. Semakin terbuka hubungan Israel-Iran, maka semakin terisolasi Iran dari dunia Arab, sehingga Iran semakin bergantung pada Israel. “Setiap hubungan dengan Israel atau setiap persepsi hubungan dengan Israel akan sangat membayakan tujuan utama kebijakan dan strategi luar negeri Iran, yaitu usaha saling mendekat dengan negara-negara regional,” Duta Besar Zarif menjelaskan. Bahkan dalam masa-masa revolusi, tujuan untuk mendapatkan simpati dari dunia Islam merupakan tujuan utama.[440] Teheran menganggap bahwa publisitas hubungannya dengan Israel merupakah usaha yang dilakukan Amerika, Israel, atau Irak untuk mencemarkan nama Iran dan menganggu kebijakan luar negeri Iran.[441]

Khomeini bereaksi keras terhadap situasi ini. Dalam sebuah pidato pada 24 Agustus 1981, dia membantah semuah tuduhan itu dan menegaskan bahwa musuh-musuh Iran

434
435
436
437
438
439
440
441

sedang berusaha mengganggu proses revolusi dengan menyebarkan berita palsu tentang kerjasama Israel-Iran.

> Mereka menuduh kita telah mengimpor senjata dari Israel. Hal ini dituduhkan pada sebuah negara yang sejak awal muncul untuk menentang kelompok Zionis terkutuk. Selama lebih dari 20 tahun, dalam setiap pidato dan pernyataan, kami berbicara tentang Israel dan penindasan mereka, sesuatu yang tidak dilakukan oleh negara Islam manapun sebagai bagian dari penentangan terhadap Israel. Orang ini, Saddam, yang berpura-pura dan, sebagaimana diberitakan, memaksa Israel untuk menghancurkan pusat reaktor nuklirnya untuk menyelamatkan dirinya dari aib yang dibuatnya sendiri dengan menyerang negara Islam Iran—tujuannya dengan melakukan hal ini adalah untuk menutupi tindakan kriminal ini dan memberikan kesan bahwa Israel memusuhi Saddam, bahwa Israel memusuhi pemerintahan Ba'ats Irak. Situasi ini kemudian memberikan sebuah alasan, bahwa Israel memusuhi Saddam, bahwa Israel memiliki hubungan dengan kami. Ini adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan. Mereka berusaha agar negara Muslim lainnya percaya bahwa kami mendukung Israel. Tapi, sejak kami memulai langkah ini, gerakan ini, salah satu isu penting kami adalah bahwa Israel harus disingkirkan.[442]

Israel sedang berhadapan dengan keterputusan ideologisnya. Tidak diragukan lagi, hubungannya dengan Iran merupakan langkah untuk mengimbangi ancaman dari Irak. Meskipun Teheran menerima bantuan militer Israel, keengganan Iran untuk mengakui keuntungan dari Israel dan memperpanjang kerjasama dalam aspek lainnya membuat Israel tidak memiliki hubungan strategis yang berkelanjutan dengan negara non-Arab di wilayah pinggiran lainnya. Kekeliruan Israel dalam urusan dengan Iran berkaitan dengan perbedaan pandangan Iran terhadap Israel. "Dalam pandangan hidup Iran, Anda bisa berhubungan dengan setan, tetapi setan tetap setan."[443] Shmuel Bar dari *Institute of Policy and Strategy* di Herzliya, Israel, berkomentar. Tetapi bagi Israel, ketika menghadapi situasi yang tanpa pilihan, maka insting yang berbicara. Dan terlepas dari keputusasaan Israel untuk mengembalikan doktrin periperial sekaligus membangun kembali poros Amerika-Israel-Iran, terjadilah sebuah skandal terbesar sepanjang dekade, yaitu operasi Kontra-Iran.

442

443

11-Skandal!

Israel dan Iran saling membutuhkan satu sama lain, sejak dulu akan selalu seperti itu.
—Analis dari Israel, 1986.

Situasi dunia tahun 1983 berbeda dengan sekarang. Sebagai seorang utusan khusus dari Presiden Ronald Reagan, Donald Rumsfeld membujuk Saddam Hussein di Baghdad; Israel melobi Washington agar mengabaikan seruan Iran untuk menghancurkan Negara Yahudi; kelompok neokonservatif mendorong pemulihan hubungan dengan pemerintahan Khomeini, dan Iran—bukan Amerika—dianggap sedang berfantasi tentang kebangkitan bulan sabit Syiah.

Alih-alih mengimbangi pengaruh Iran di regional dan memperingatkan blok Barat atas hegemoni Iran, Israel—dengan menyerang Lebanon—secara tidak sengaja justru memberikan peluang bagi Iran untuk mengekspor propoganda revolusinya di dunia Arab. Pada 6 Juni 1982, terjadi sebuah serangan yang seolah-olah ditujukan sebagai respon terhadap percobaan pembunuhan Shlomo Argov, duta besar Israel untuk Inggris, oleh pejuang militan Palestina. Tetapi Ariel Sharon, yang kemudian menjadi menteri pertahanan Israel, telah merencanakan serangan terhadap Lebanon untuk membasmi kehadiran PLO di Lebanon selama beberapa bulan—setidaknya paling lcepat pada akhir 1981. Meskipun PLO telah menyepakati sebuah gencatan senjata dengan Israel pada 1981, Sharon dan Perdana Menteri Menachem Begin mempertimbangkan bahwa jika mereka mampu menghancurkan PLO di Lebanon, maka mereka mampu menggagalkan kekuatan diplomatik PLO sekaligus menumpas pergolakan kelompok nasionalis Palestina di daerah-daerah yang diduduki Israel.

Wilayah selatan Lebanon secara tradisional merupakan tempat tinggal komunitas Syiah yang terpinggirkan. Awalnya komunitas Syiah ini menyambut baik kehadiran Israel karena persaingan mereka dengan pengungsi dari warga Palestina untuk mendapatkan sumber daya dan kebencian mereka terhadap kekuasaan PLO di wilayah selatan ini. Tetapi komunitas Syiah khawatir jika kehadiran Israel memperpanjang kehadiran mereka dengan membuat sebuah "zona keamanan" di wilayah selatan. Kelompok Syiah ini segera berbalik melawan, ketika Israel menutup akses komunitas Syiah atas pasar di wilayah utara dan mulai membanjiri pasar lokal mereka dengan produk-produk Israel sehingga menyebabkan kepentingan ekonomi mereka terancam.[444] Serangan Israel juga destruktif dan semakin menambah ketakutan warga Lebanon yang sudah menderita akibat perang sipil selama 7 tahun. Hampir 20,000 warga Lebanon terbunuh dalam serangan Israel ini, dan 450,000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Pada September 1982, atas arahan Sharon, seorang milisi Kristen Lebanon memasuki kamp pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila di Beirut. Atas persetujuan diam-diam dari Israel, milisi ini memukul, membunuh, dan memperkosa rarusan warga sipil. Diperkirakan seperempat dari total pengungsi itu adalah warga Syiah dan melarikan diri dari ancaman kekerasan di wilayah selatan.[445]

Nasib buruk warga Syiah di bawah pendudukan Israel membuat kelompok Syiah ini mau menerima pesan dari Teheran. Untuk menghadapi lawan besar Israel, komunitas Syiah Lebanon ini kemudian membutuhkan sekutu dari luar, dan Teheran ingin

444

445

memainkan peran ini—tidak untuk menonjolkan sentimen anti-Israel tetapi untuk menemukan sekutu di sebuah negara Arab. Teheran sangat perlu untuk terus meningkatkan propaganda revolusi ke dunia luar. Usaha ini telah gagal di Irak dan Bahrain, meskipun populasi Syiah di kedua negara ini besar. Sekarang, diuntungkan dengan serangan Israel ke Lebanon, Iran mendapatkan peluang untuk menanam bibit revolusi Islam wilayah *Levant*. Pasca invasi Israel ini, muncul sebuah gerakan Syiah yang diinspirasi revolusi Iran. Awalnya gerakan ini hanya sekelompok pasukan militer angkatan muda yang diorganisir di bawah bendera Islam dan mendedikasikan dirinya untuk melawan pendudukan Israel. Seiring berjalannya waktu mereka bersatu—dengan bantuan dan bimbingan Iran—menjadi salah satu musuh Israel yang tangguh—dengan nama "Hezbollah".[446]

Hezbollah tidak hanya memberikan Iran sebuah basis kekuatan di wilayah Levant, tetapi juga membuat Iran tampil dengan kartu yang lebih berharga; potensi sandera warga Amerika yang cukup besar. Ronald Reagan telah mengirimkan 1,800 pasukan angkatan laut ke Lebanon pada Agustus 1982 untuk memfasilitasi perdamaian dan mencegah konflik regional yang lebih besar. Pasukan ini terdiri dari kekuatan multinasional dari Prancis dan Italia. Tetapi ketika pasukan ini justru dianggap memihak pada salah satu kubu daripada berusaha menciptakan perdamaian, Hezbollah mulai menjadikan mereka sebagai target. Serangan Hezbollah dilakukan dengan bom bunuh diri dengan truk terhadap barak pasukan multinasional ini di Beirut pada 23 Oktober 1983, yang menewaskan 243 orang. Dua pubuh detik setelah serangan ini, bom bunuh diri lainnya menewaskan 58 pasukan dari Prancis di sebuah bangunan yang berjarak 4 mil. Pada tahun-tahun berikutnya, Hezbollah berhasil menculik beberapa warga negara Amerika Serikat dan beberapa warga Eropa lainnya. Para sandera ini membuat Iran memiliki daya tawar ketika bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan Israel untuk memaksa Amerika Serikat agar membuat kesepakatan dengan Iran.

"Strategi Bertahan" Israel

Pada 1983, kecenderungan pemerintahan Reagan sudah bergeser. Pasukan Iran berhasil mengusir Irak dari wilayah Iran, dan Saddam Hussein sudah menawarkan perdamaian, termasuk kesediaan untuk membayar ganti rugi perang kepada Iran. Tetapi Ayatollah memilih untuk melanjutkan peperangan dengan menegaskan, "Perang, perang hingga menang." Terlepas dari disorganisasi dan kekacauann pertahanan, Teheran telah memberikan perlawanan yang hebat terhadap invasi Irak, dan ketakutan Israel atas kemenangan Irak mulai hilang. Sekarang ketika peperangan ini telah melumpuhkan Irak dan Iran, Israel mendapatkan peluang untuk memperkuat posisi regionalnya.[447]

Ironisnya, peperangan ini membuat Iran meIsrael mampu mencapai tujuannya dengan menjadikan Iran sebagai negara periperial dengan mengunci Irak sekaligus menetralisir ancaman di perbatasan timur Israel.[448] Dan dengan menyediakan bantuan militer kepada Iran, Israel mampu meningkatkan keamanannya dengan membuat blok Arab semakin terpecah belah. "Kami berharap besar bahwa kedua belah pihak akan saling melemahkan satu sama lain sehingga keduanya tidak menjadi ancaman bagi kami," kepala

446

447

448

Kementerian Luar Negeri Israel, David Kimche, menjelaskan.[449] Logikanya sederhana; selama Irak dan Irak saling berperang, keduanya tidak akan memerangi Israel.[450] Dalam sebuah diskusi di Universitas Tel Aviv pada Januari 1989, Menteri Pertahanan, Yitzhak Rabin mengungkapkan pertimbangan strategi Israel; "Yang baik bagi Israel adalah tidak ada pemenang dalam perang Iran-Irak. Ini dalam konteks kepentingan strategis Israel dan politik jangka panjang yang telah diabaikan Israel. Perjanjian periperial (dengan Iran dibawah Shah) hanya mampu menetralisir internal blok Arab, tetapi tidak mampu secara strategis mengurangi ancaman mereka terhadap Israel. Dengan adanya perang Iran-Irak ini, Israel mampu mengurangi ancaman keamanan bagi dirinya."[451]

Tetapi usaha untuk mempertahankan strategi ini memberikan ketidakpastian. Peperangan bisa saja dengan cepat berada di pihak Irak dan memberikan mimpi buruk bagi Israel. Kemampuan bertahan Iran semakin kuat dukungan Israel terhadap doktrin periperial. Israel berpandangan bahwa keberadaan faksi moderat di dalam pemerintahan Iran akan membantu memperhalus ideologi Islamis dan mengontrol kebijakan Iran agar lebih dekat dengan Israel. Israel memprediksi bahwa faksi moderat ini akan melanjutkan kekuasaan ketika Khomeini yang sudah sakit-sakitan meninggal.[452] Ayatollah sudah tidak muda lagi, dan perjuangan suksesi bisa saja memberikan peluang bagi Israel untuk mempengaruhi Iran dengan tujuan membangun aliansi dengan negara-negara di pinggiran dunia Arab.[453] Hal ini menjadi target paling penting karena Washington mulai menunjukkan keberpihakannya pada Irak.

"Operation Penjegalan"

Keputusan Khomeini untuk melanjutkan peperangan hingga memasuki wilayah Irak telah memperkuat salah satu faksi dalam pemerintahan Reagan yang mendukung penghentian atas akses senjata bagi Iran. Para pejabat ini terganggu dengan bantuan Israel terhadap ayatollah. Pada Maret 1982, Amerika Serikat mulai memberikan bantuan intelijen dan militer kepada Saddam Hussein yang bertentangan dengan sikap netral Wahington dalam perang Iran-Irak.[454] Keberpihakan Amerika Serikat pada Irak membuat Washington semakin rentan untuk melakukan kecaman atas penggunaan senjatan kimia oleh Irak, meskipun intelijen Amerika Serikat telah membenarkan tuduhan Iran atas serangan-kimia-harian Irak kepada para tentara Iran dan para pejuang Kurdi.[455]

Pada akhir 1983, Reagan mengutus Rumsfeld sebagai utusan khusus ke Baghdad untuk bertemu dengan Saddam Hussein sekaligus meningkatkan hubungan Amerika-Irak dengan peningkatan bantuan Amerika terhadap Irak dalam peperangan melawan Iran. Dalam kunjungan ini, Rumsfeld juga menyampaikan sebuah tawaran rahasia kepada Menteri Luar Negeri Irak, Tariq Azizi, berupa bantuan untuk Irak. Azizi kemudian menolak tawaran tersebut, bahkan menolak untuk menerima surat Israel untuk pemimpin diktator Irak.[456] Israel bertujuan untuk memastikan apakah membaiknya hubungan Amerika

449
450
451
452
453
454
455
456

dengan Irak akan berdampak baik pula terhadap hubungan Israel dengan Irak. Penolakan Azizi ini menunjukkan bahwa Israel sudah tidak ragu lagi atas tujuan Baghdad yang sebenarnya. Keberpihakan Washington pada musuh Arab terbesar Negara Yahudi ketika Irak menolak untuk memperbaiki hubungannya dengan Israel merupakan peringatan terbesar bagi Israel. Israel khawatir jika kedekatan Amerika dan Irak ini membuat Amerika menerima kemenangan Irak dalam peperangan sehingga menganggu keseimbangan kekuatan regional.

Manuver non-diplomatik yang dilakukan Azizi terhadap Israel tidak mengurangi antusiasme Washington, situasi yang membuat Israel cemas. Para pejabat Departemen Luar Negeri AS memanfaatkan kedekatan hubungan Amerika-Irak ini dengan menawarkan sebuah rencana "Operation Staunch*"*. Operasi ini ditujukan untuk mengantisipasi penjualan kembali senjata-senjata produk Amerika kepada Iran oleh sekutu-sekutunya. Rencana ini diadopsi tahun 1984 dan pasukan Iran segera 'mengering'.[457] Israel dengan segan memprotes arah baru Amerika ini, meskipun mereka tidak pernah sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan Iran.

*"*Operation Staunch"*,* kegagalan Amerika di Lebanon, aksi penyanderaan oleh Hezbollah, kegagalan Israel untuk membujuk Irak, dan kegigihan doktrin periperial menjadi jalan bagi terjadinya peristiwa yang kemudian disebut sebagai "Skandal Dekade Ini"—operasi Iran-Contra (gerakan protes di Nicaragua yang didukung Amerika, *pen.*). Israel tidak lagi berusaha agar Khomeini kembali merapat ke blok Barat. Negara Yahudi ini justru lebih berusaha untuk memperkuat faksi moderat dalam pemerintahan Iran yang dapat mendekatkan Iran ke blok Barat ketika Khomeini sudah meninggalkan dunia politik Iran. "Blok Barat harus memiliki basis dalam pemerintahan Iran setelah negara ini kembali ke blok Barat," Yitzhak Rabin menjelaskan, suksesor Begin sebagai Perdana Menteri Israel periode 1983-1984.[458] David Kimche juga berpendapat sama: "Ada kelompok ultra-ekstrem, dan ada kelompok—katakanlah—moderat-ekstrem. Keduanya merupakan kelompok ekstrem. Keduanya kelompok fanatik. Tetapi ada satu kelompok yang berbahaya. Dan ada lagi kelompok lain yang akan mencapai kata sepakat dengan blok Barat. Mereka masih memusuhi Israel, tetapi mereka tidak lebih ekstrem dibandingkan kelompok pertama. Kami merasa bahwa jika kelompok pertama menjadi suksesor rezim Khomeini, Iran akan menjadi ancaman langsung bagi Israel, sementara itu jika kelompok kedua yang memenangkan kekuasaan pasca Khomeini, maka masih ada harapan. Kami tentu saja tidak akan dirugikan."[459] Kekuatan dari pola pikir periperial di kalangan pemimpin Israel tidak bisa diremehkan begitu saja. Para analis Israel percaya bahwa rezim Khomeini—tidak seperti hukum geopolitik—hanyalah sebuah fenomena sesaat. "Aturan-aturan ini sudah terbukti kebenarannya sejak zaman raja Cyrus hingga saat ini. Israel dan Iran saling membutuhkan satu sama lain, sejak dulu akan selalu seperti itu."[460] Seorang pejabat anonim memberikan keterangan pada *Manchester Guardian Weekly* pada 1986 bahwa "kepentingan geopolitik yang mendikte hubungan Israel dan Iran lebih dari sekedar

457

458

459

460

keinginan Shah. Kesamaan kepentingan ini akan terus ada ketika gairah keagamaan yang menjadi fondasi rezim Khomeini mulai melemah."[461]

Plot Israel

"Operation Staunch" yang bertujuan untuk membawa kembali Iran—dengan atau tanpa Khomeini—merapat ke blok barat pertama kali muncul dalam sebuah pertemuan di kota Hamburg pada akhir 1984 antara Kimche, Al Schwimmer, seorang penjual senjata Israel yang bekerja sebagai penasihat utama Perdana Menteri Israel Shimon Peres; Yaacov Nimrodi, yang bekerja sebagai atase militer Israel untuk Iran pada akhir dekade 1960-an hingga 1970-an, dan negosiator senjata Iran, Manuchehr Ghorbanifar, yang memiliki kedekatan dengan faksi Hashem Rafsanjani, ketua parlemen Iran.[462] Beberapa bulan sebelumnya, mereka sudah melakukan dialog dengan beberapa faksi dalam pemerintahan Iran yang berusaha menggeser arah kebijakan luar negeri Iran menjadi lebih pro Barat.[463] Meskipun pasukan Iran berhasil mengusir pasukan Irak dari wilayah Iran, peperangan terus berlanjut, dan Iran sangat membutuhkan pasokan senjata. Melalui Ghorbanifar, Iran mulai mendekati pemerintahan Arab Saudi dan Mesir tetapi tidak mendapat bantuan.

Iran bahkan berusaha mendekati langsung Amerika Serikat. Pada 4 Juni 1985, TWA Flight 847 yang sedang dalama perjalanan dari kota Athena menuju kota Roma berhasil dibajak oleh Hezbollah. Para pembajak ini meminta pembebasan tawanan Syiah yang ada di Kuwait, Israel, dan Spanyol sebagai tebusan bagi para sandera, yang terdiri dari beberapa warga Amerika Serikat. Dengan harapan memperoleh niat baik dari Washington, Iran terlibat dalam penyelesaian sandera ini. Iran mengirimkan pesan ke Dewan Keamanan Nasional AS untuk menegaskan bahwa Iran berniat menyelesaikan kasus pembajakan di atas semaksimal mungkin. Rafsanjani sedang melakukan transit dalam perjalanannya menuju Tunisia ketika seorang agen rahasia Israel menyadap sebuah pembicaraan antara dirinya dan duta besar Iran untuk Syria, Ali Akbar Mohtashamipour, tokoh utama di balik hubungan antara Iran dengan Hezbollah. Rafsanjani mengarahkan duta besar tersebut agar menekan Hezbollah untuk melepaskan para sandera tersebut.[464] Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Velayati juga melakukan hal yang sama.[465] Meskipun para tawanan ini akhirnya dibebaskan atas intervensi Iran, Washington menolak untuk berhubungan dengan Teheran. Ghorbanifar juga membujuk CIA, namun cara ini tidak juga membuahkan hasil. Ghorbanifar diberitahu Adnan Kashoggi, seorang penjual senjata dari Arab Saudi, bahwa satu-satunya jalan untuk mendekati Amerika adalah melalui Israel.[466]

Namun kondisi peperangan kembali memburuk; Baghdad membalas serang balik Iran ke wilayah Irak dengan meningkatkan penggunaan senjata kimia dan serangan rudal ke kota-kota besar di Iran. Iran kemudian terpaksa mengikuti saran Khashoggi.[467] Saran ini merupakan jalan terakhir bagi Iran, dan merupakan cara untuk bertahan hidup. Faksi Rafsanjani percaya bahwa Iran memang membutuhkan Washington—tanpa akses terhadap senjata Amerika dan onderdil, Iran akan menderita kekalahan, dan tanpa

461
462
463
464
465
466
467

perlindungan Amerika Serikat atas intervensi Uni Soviet Iran bisa saja menjadi negara satelit Soviet. Setelah kehabisan seluruh jalan keluar, Ghorbanifar menemui Khashoggi untuk mendekati Tel Aviv. Iran menjanjikan pada Israel bahwa "jika Iran memenangkan peperangan, kami tidak akan lupa untuk berterimakasih kepada pihak yang telah membantu kami. Anda akan menyaksikan perubahan dramatis atas posisi Teheran terhadap Israel." Israel tidak butuh janji apapun. "Kami tidak lebih berhasrat kecuali dalam kepentingan hubungan kami," Nimrodi menjelaskan.[468] Mantan atase militer Israel untuk Iran membayangkan "kembalinya situasi yang pernah terjadi sebelumnya, menyaksikan dua negara bergabung melawan musuh mereka bersama di dunia Arab."[469] Kimche, Nimrodi, dan rekan-rekannya di Israel berpandangan bahwa Israel bertugas untuk membawa Iran keluar dari isolasi, menghentikan dukungannya terhadap aksi teror, membawa kembali Iran ke dalam "persekutuan geopolitik bersama blok Barat", dan mengimbangi kekuatan Irak.[470] Tetapi Israel tidak pernah memahami bahwa Iran tidak memiliki kepentingan apapuan terhadap Israel. Tujuan Iran adalah untuk memperbaiki hubungannya dengan Amerika, bukan dengan Israel. Terlepas dari kesamaan tujuan geostrategis, Iran hanya ingin agar Israel memberikan akses terhadap Washington.[471] "Israel selalu menjadi pintu gerbang menuju Washington," seorang ahli strategi reformis terkemuka menjelaskan. "Bagi saya siapapun tidak akan berpikir bahwa akan ada keberlanjutan hubungan dengan Israel dalam hal apapun."[472]

Tanpa sadar bahwa Iran sedang memainkan permainan ganda, Israel mulai membujuk Iran agar kembali ke blok Barat untuk mengimbangi blok Arab dan ancaman Irak sekaligus mencegah langkah Soviet untuk mendapatkan basis di Iran. Sementara Israel telah mendapatkan imbalan untuk memperbaiki hubungannya dengan Teheran, Washington masih menjadi tantangan yang lebih sulit. Amerika Serikat masih dalam proses saling-mendekat dengan Saddam Hussein, dan kenangan pahit atas aksi penyaderaan kelompok revolusioner Iran masih segar dalam ingatan Washington. Namun melalui aksi pembajakan yang dilakukan Hezbollah, Iran memiliki sesuatu yang diinginkan Washington—tawanan warga Amerika di Lebanon.[473]

Situasi ini menciptakan hubungan segitiga yang sempurna—Washington menginginkan pembebasan para sandera, Tel Aviv menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Iran, dan Iran membutuhkan pasokan senjata.[474] Bagi Israel, tujuan strategis untuk memulihkan kembali hubungan dengan Iran lebih penting dari pada aksi pembajakan Hezbollah di Lebanon atau kebutuhan Iran atas pasokan senjata. Mata rantai kebutuhan kemudian berbalik—untuk memasukkan kembali Iran ke dalam blok Barat, maka Israel bersedia memperkuat kemampuan militer Iran dan menyelesaikan kasus penyanderaan warga Lebanon.[475] Tetapi rencana ini bisa dilaksanakan setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mereda. Maka tugas pertama Iran adalah mendapatkan restu dari Tel Aviv sehingga mampu mengajak Washington dalam rencana ini. Nimrodi dan

468
469
470
471
472
473
474
475

Kimche kemudian mendekati Perdana Menteri Simon Peres (pemilihan umum di Israel dilakukan pada 1984, dan hasil suara hampir sama, Partai Buruh dan Partai Likud kemudian sepakat untuk membentuk koalisi besar), yang berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan, Rabin dan Menteri Luar Negeri, Shamir—sekarang Shamir adalah ketua partai Likud setelah Begin pensiun. Tiga orang ini, yang dijuluki "Forum Perdana Menteri" oleh media Israel, menyetujui rencana di atas pada musim semi 1985 dengan syarat hanya senjata rampasan dan senjata produk Israel yang bisa dijual ke Iran; Mereka menegaskan bahwa senjata produk Amerika harus dikecualikan.[476]

Khashoggi dan Ghorbanifar diperintahkan untuk menghubungi Dewan Keamanan Nasional AS, tetapi penasihat Dewan Keamanan Nasional, Robert "Bud" McFarlane tidak tertarik. Dia hampir menolak permintaan senjata dan dialog ini ketika Shimon ikut terlibat dan menanyakan kemungkinan adanya kerja sama rahasia dengan Iran. Intervensi Peres ini membuahkan hasil. McFarlane memutuskan untuk melakukan percobaan kerja sama dengan Iran melalui pihak ketiga yang akan mendapatkan tanggungjawab penuh; Israel. Sementara Israel didorong oleh doktrin periperial, maka rivalitas di Perang Dingin lah yang justru menjadi pertimbangan politik Washington. Para pejabat politik dalam pemerintahan Reagan, seperti Paul Wolfowitz, Robert McFarlane, dan Richard Burt menganggap pembaruan hubungan diplomatik dengan Iran merupakan keputusan yang tidak realistis, tetapi mereka sangat percaya bahwa usaha untuk melakukan pergantian pemeritahan Iran yang bisa memperbaharui hubungan ini merupakan kepentingan bersama Israel dan Amerika Serikat.

Ketika peperangan terus berlanjut dan korban semakin bertambah, sebuah faksi kemudian muncul yang kemudian menjadi kelompok oposisi yang gigih. Kelompok ini berpandangan bahwa, di tengah langkah Soviet yang telah menempatkan 100,000 pasukan di perbatasan Iran sebelah utara, dengan latihan periodik di wilayah perbatasan, Iran harus memberikan perhatian pada aspek geostrategis terkait tujuan Soviet ini. "Meskipun begitu, pertimbangan ini hanya ada di internal kelompok kita dan tidak memiliki fondasi faktual dalam peristiwa-peristiwa terkini atau dari informasi intelijen," McFarlane menjelaskan.[477] McFarlane memperhatikan bawah meningkatnya pengaruh Uni Soviet terhadap Iran akan membuatnya mampu memaksa Iran masuk ke dalam blok Komunis, khususnya pasca meninggalnya Khomeini. Dalam sebuah memorandum rahasia tingkat tinggi kepada Sekretaris Negara, George Shultz, dan Sekretaris Menteri Pertahanan, Caspar Weinberger, McFarlane menulis; "Posisi Uni Soviet lebih baik daripada Amerika Serikat untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari pertempuran kekuatan yang berakibat pada pergantian rezim di Iran, begitu juga dengan meningkatnya tekanan sosial-politik Iran." McFarlane menyimpulkan bahwa tujuan jangka pendek Washington seharusnya adalah menghentikan usaha Moskow untuk meningkatkan pengaruhnya di Iran, dan Amerika Serikat harus menghindari sebuah situasi yang membuat Iran berpikir bahwa tidak ada pilihan lain kecuali masuk ke dalam blok Soviet.[478]

Sandera Ditukar Senjata

476

477

478

Setelah intervensi Peres, Reagan memberikan persetujuannya untuk menjalankan sebuah investigasi rahasia terhadap usulan rencana ini dan mendelegasikan Michael Ledeen, seorang professor di Universitas Amerika yang dalam pandangan Nimrodi merupakan seorang yang "dikenal sebagai Zionis sejati dan ramah, dan selalu hadir dalam setiap acara publik atas nama Israel."[479] McFarlane meminta kepada Ledeen agar keterlibatannya Departemen Luar Negeri AS dan CIA tetap dirahasiakan. Ledeen kemudian merencanakan sebuah pertemuan dengan Shimon Peres di Tel Aviv pada 6 Mei 1985.[480] Sebagai seseorang yang sekarang dikenal sebagai salah satu oposan paling bersemangat bagi setiap hubungan Washington dengan rezim Iran, Ledeen saat itu justru merupakan bagian dari kubu yang sebaliknya. Ledeen menyampaikan kepada perdana menteri Israel persis seperti apa yang dia inginkan; kurangnya informasi intelijen Amerika terkait Iran merupakan sebuah hal patut disesali dan Amerika membutuhkan Israel untuk membangun dialog dengan Teheran. Perdana menteri Israel "dengan tulus mengabulkan permintaan itu," menurut Nimrodi." Kami pernah didatangi oleh anggota senior dari pemerintahan Iran, oleh seorang perantara, berkaitan dengan penjualan peralatan militer," Peres menyampaikan pada Ledeen. Perdana menteri Israel mengusulkan bahwa akan sangat bermanfaat jika dikirimkan terlebih dahulu sebuah paket ke Teheran—satu kiriman persenjataan, untuk menguji niat Iran yang sebenarnya.[481] Meskipun keterlibatan CIA sangat dirahasiakan dalam kesepakatan dengan Iran ini, CIA mendukung ide untuk mencegah Iran masuk ke dalam blok Soviet dan mengusulkan penjualan senjata ke Iran melalui pihak ketiga untuk memperkuat kelompok moderat dalam pemerintahan Iran dan meningkatkan peran intelijen Amerika atas Iran.[482]

Kimche dan McFarlane kemudian melanjutkan rencana operasi ini oleh mereka sendiri. Untuk meyakinkan McFarlane bahwa Rabin dan Shamir juga sedang dalam perjalanan, Kimche menyatakan bahwa Iran merasa percaya diri bahwa mereka mampu mengamankan proses pembebasan sandera warga Amerika di Lebanon. [483] Hal ini menjadi perhatian utama McFarlane karena tekanan dari Reagan sendiri. Kimche masih memperingatkan McFarlane bahwa cepat atau lambat Iran akan meminta akses terhadap senjata Amerika.[484] Dalam beberapa hal, Kimche dan McFarlane memiliki perbedaan.[485] Berbeda dengan pernyataan Kimche, McFarlane mengaku telah meninggalkan pertemuan itu dengan Kimche dalam keadaan "diam dan skeptis".[486] McFarlane percaya bahwa "kepentingan Israel dan kepentingan Amerika tidak sama" dan menuduh Israel bisa saja mencari peluang untuk merusak hubungan Amerika Serikat dengan blok Arab.[487]

Setelah McFarlane menjelaskan secara singkat pada Reagan tentang pembicaraan itu, segala sesuatu berubah dengan cepat. McFarlane memberitahu Kimche, Kimche memberitahu Peres dan Shamir, lalu Peres menjelaskannya secara singkat kepada Nimrodi dan timnya. Pada 9 Juli, Ghorbanifar menyusun sebuah pertemuan di kota Hamburg

479
480
481
482
483
484
485
486
487

dengan Hasan Karoubi, orang dekat dan kepercayaan Khomeini yang mendukung pemulihan hubungan dengan Washington. Ghorbanifar memberitahu Kimche, Khashoggi, Schwimmer bahwa sebagai seorang anggota kabinet, Karoubi menghabiskan waktunya pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu di rumah Khomeini.[488] Pertemuan dengan Karoubi dimulai dengan tegang, tetapi Karoubi sangat paham apa yang perlu dibicarakan agar Israel tenang. Bagian pertama dalam pertemuan tersebut membahas analisis strategis terkait situasi di regional dan situasi internal Iran. Karoubi tidak menyembunyikan kesulitan yang sedang dihadapi Iran. "Amerika dapat menyelamatkan Iran dari posisi sulitnya," Karoubi berbicara pada Israel. "Kami tertarik untuk bekerjasama dengan blok Barat. Kami memiliki kepentingan yang sama, dan berharap menjadi bagian dari blok Barat," Karoubi menyatakan bahwa kekalahan perang dari Irak akan memaksa Iran menjadi negara satelit Soviet, kecuali Amerika dan Israel secara diam-diam ikut terlibat. Karoubi juga menegaskan bahwa Iran dan blok Barat memiliki musuh bersama—Uni Soviet dan kelompok kiri Iran yang harus dibasmi. Permintaan pasokan senjata dari Amerika merupakan langkah yang tepat: "Wilayah kami, dan wilayah Anda, bisa mendapatkan ancaman fisik dari Uni Soviet. Kami mengkhawatirkan Uni Soviet dan kelompok kiri di negeri kami."[489]

Karena terkesan oleh sosok ulama ini, Israel menawarkan bantuan mereka. "Kami juga berharap bisa bekerjasama," Kimche menjawab. "Kami juga menginginkan adanya pemerintahan yang moderat di Iran. Kami [Israel] ingin menjadi jembatan antara Iran dan blok Barat"[490] Nimrodi kemudian menggambarkan bagaimana ancaman dan musuh yang sama-sama dihadapi Iran dan Israel memposisikan kedua negara ini dalam hubungan dekat pada masa lalu: "Kami telah berupaya untuk memperkuat Iran. Saya tidak sedang berbicara tentang memperkuat rezim tertentu, tetapi tentang bantuan untuk membangun sebuah negara Iran yang kuat, bebas, dan mapan."[491] Pertemuan ini berlangsung selama 4 jam. Sebelum mereka berpisah, Kimche bertanya apakah Karoubi akan memberitahu semua sekutunya tentang pertemuannya dengan Israel. "Ya," Karoubi menjawab "Tetapi saya tidak berniat untuk mempublikasikannya secara umum." Akhirnya, pertemuan ini merupakan terobosan besar, dan dalam sebuah memorandum untuk Peres dan Shamir, Kimche merekomendasikan agar hubungan ini tetap dijaga.[492]

Permintaan akses Iran terhadap senjata—100 buah rudal TOW—sebagai imbalan bagi tekanan yang dilakukan Iran terhadap Hezbollah untuk melepaskan 4 sandera tidak berjalan dengan baik dari pihak Washington. Untuk menyelamatkan proses transaksi ini, Kimche terbang ke Washington pada 3 Agustus untuk bertemu dengan McFarlane dengan sebuah usulan baru. Pihak Israel ingin mengklarifikasi tujuan Washington sebenarnya; apakah operasi strategis ini ditujukan untuk membangun sebuah hubungan baru dengan Iran, atau sebuah hanya langkah taktis untuk membebaskan sandera Amerika? Kimche mempertanyakan apakah Amerika Serikat akan mengisi kembali gudang rudal Israel, jika Israel melanjutkan kerjasama dengan Iran. Permintaan ini dengan menempatkan resiko tepat di pihak Israel, sementara memaksa Washington untuk terlibat tanpa syarat dalam

488

489

490

491

492

rencana ini. Para anggota administrasi menolak kesepakatan ini, tetapi prospek pembebasan para sandera terlalu menggoda bagi Presiden Reagan. Pada 6 Agustus 1985, presiden memberi lampu hijau bagi rencana ini, dan rudal mulai dikirim ke Iran.[493] Meskipun kiriman rudal ini sampai pada kelompok radikal di pemerintahan Iran—bukan kepada kelompok moderat sebagaimana dijanjikan Grobanifar—operasi "senjata-ditukar-sandera" tetap berlanjut.[494] Pada 15 September, kiriman kedua rudal sampai di Iran. beberapa jam kemudian, Benjamin Weir, sandera Amerika di Lebanon, dibebaskan. Reagan segeran menghubungi Peres untuk mengucapkan selamat dan terimakasih pada Peres, Peres kemudian menghubungi Nimrodi untuk menyampaikan hal yang sama.[495]

Pertemuan kedua dengan Karoubi berlangsung pada 27 Oktober 1985 di kota Genewa. Ledeen menghadiri pertemuan ini untuk melobi Iran secara langsung tentang jumlah rudal yang dijual, berapa jumlahnya dan kapan sandera bisa dibebaskan.[496] *Pertama*, para mullah di Iran meminta rudal secara gratis sebagai imbalan atas pembebasan para sandera, dengan pertimbangan bahwa kompromi dalam isu ini akan membuat Amerika melihat permintaan Iran lainnya lebih baik lagi. Tawaran Iran kepada Ledeen tidak hanya untuk menghentikan dukungan Iran pada aksi teror tetapi juga sebuah undangan bagi seorang utusan Amerika untuk berkunjung ke Iran. "Jika Anda menjaga janji-janji Anda dan membuat langkah yang membantu pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat, kami akan menyiapkan kontak awal dengan rezim revolusioner di Iran," seorang professor neokonservatif menjawab. Pada titik ini, Israel mulai gelisah dengan fokus Karoubi yang cenderung ekslusif terkait masa depan hubungan Amerika-Iran dan pengabaiannya terhadap Israel. Kimche menginterupsi pembicaraan dengan marah lalu bertanya: "Lalu dimana posisi Israel dalam semua rencana ini?" Tetapi Karoubi menolak berkomitmen apapun dengan Israel.[497] Ledeen meninggalkan pertemuan itu dengan gembira, sementara Israel kecewa.[498]

McFarlane tidak menyebarkan antusiasme Ledeen. Dia mengekspresikan Kimche kekecewaannya terhadap operasi ini kepada Kimche; setelah ada dua kali kiriman senjata, hanya satu orang sandera warga Amerika yang dibebaskan. Ini merupakan bagian dari kesalahan Israel yang memalukan. Tidak hanya karena mereka melakukan salah-kirim rudal, tetapi salah satu rudal tersebut bertanda Bintang David. Iran merasa dibohongi dan dilecehkan. Meskipun Kimche dapat memahami beberapa hal yang menjadi perhatian McFarlane, dia berpendapat bahwa Iran harus memberikan kesempatan kedua karena urusan ini terlalu penting untuk dihentikan di tengah jalan. Sebagaimana yang seringkali mereka lakukan sebelumnya, Ledeen dan Letnan Kolonel Oliver North—seorang staff di Dewan Keamanan Nasional yang perannya dalam urusan ini akan semakin penting dalam beberapa bulan selanjutnya—berada di pihak Israel dan melobi agar operasi dilanjutkan.[499]

Tetapi McFarlane masih skeptis. Segera setelah pertemuan di bulan November dengan Kimche, dia memberikan surat pengunduran diri kepada Reagan dan

493
494
495
496
497
498
499

merekomendasikan agar operasi Israel-Iran dihentikan. McFarlane berpendapat bahwa alih-alih berhasil membangun hubungan dengan kelompok moderat di Iran, pemerintah Amerika justru terlibat pembicaraan dengan penjual senjata dan tidak menaruh perhatian besar pada solusi politik atas kerenggangan hubungan Amerika dengan Iran. Dalam keadaan tidak teryakinkan, Reagan justru mengutus McFarlane ke London pada 7 Desember 1985 untuk bertemu Ghorbanifar dan melakukan manuver terkait kemungkinan adanya kesepakatan lain.[500]

Pembicaraan McFarlane dengan Ghorbanifar tidak berhasil menghilangkan sikap skeptisnya, dan ia kembali ke Washington untuk mengulangi lagi rekomendasinya bahwa operasi ini harus dihentikan. McFarlane mengundurkan diri beberapa hari kemudian, tetapi, karena merasa bahwa presiden belum puas dengan operasi Israel-Iran ini, ia menawarkan bantuan jika ada perkembangan untuk melakukan sebuah dialog politik yang kongkrit.[501] Beberapa minggu kemudian, 17 Januari 1986, Reagan menandatangani sebuah keputusan intelijen yang melegalkan penjualan senjata Amerika—bukan Israel—ke Iran. Baik Departemen Luar Negeri AS maupun Pentagon tidak diberitahu terlebih dahulu atas keputusan Reagan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.[502] Pada titik ini, Kimche, Nimrodi, dan Ledeen juga tidak dilibatkan. Ledeen kemudian digantikan oleh North, dan Kimche oleh Amiram Nir, penasihat Peres tentang terorisme. Menurut Kimche, yang tidak begitu menghargai Nir dan North, tim baru ini lebih fokus pada operasi "senjata-ditukar-sandera" dari pada operasi awal, yaitu tujuan geostrategis untuk membangun kembali hubungan dengan Iran.[503]

Israel terus menekan Amerika Serikat untuk menjaga agar koneksi dengan Iran tetap ada, terlepas dari kegagalan Iran untuk membebaskan sandera. Dengan pertimbangan bahwa kegagalan menyelamatkan seluruh sandera akan membuat Reagan menghentikan operasi Iran, Peres kemudian mengirim sebuah surat kepada presiden pada 28 Februari 1986 untuk mendorong Reagan agar melanjutkan usahanya untuk membuka ruang dialog dengan Iran atas pertimbangan geopolitik ."Ini adalah keyakinan kuat saya bahwa perubahan fundamental yang kita usahakan untuk negara ini, tidak hanya menjanjikan sesuatu yang terbatas untuk kedua negara kita saja, tetapi juga bagi negara lain di regional dan di seluruh dunia," Peres menulis[504]. Peres berpandangan bahwa Amerika Serikat harus menyelesaikan perselisihan di Lebanon melalui dialog dengan Teheran untuk membangun hubungan strategis yang lebih luas dengan Iran.[505] Dengan atau tanpa pembebasan sandera Amerika, Peres tetap ingin membangun kembali kemitraan-periperial dengan Iran.

Kue Coklat dan Bibel

Lima bulan setelah pengunduran dirinya, McFarlane dihubungi oleh suksesornya, John Poindexter. John memberitahu McFarlane bahwa Iran akhirnya sepakat untuk melakukan sebuah dialog politik dan menyelenggarakan pertemuan tingkat-tinggi di Teheran. Gedung

500

501

502

503

504

505

Putih mengharapkan Rafsanjani, Perdana Menteri Mir Hussein Moussavi, atau Presiden Ali Khamenei dapat menghadiri pertemuan ini. Presiden Ali Khamenei menginginkan agar McFarlane juga ikut dalam pertemuan ini. Ini adalah tawaran yang tidak dapat ditolak McFarlane.[506] Meskipun pertemuan ini dilakukan di Teheran, presiden Amerika Serikat ingin membangun hubungan yang baik dengan Iran, mengakhiri perang Iran-Irak, dan membebaskan seluruh sandera warga Amerika di Lebanon.[507] Meskipun McFarlane ingin mencegah keterlibatan Israel dalam operasi ini, keinginan ini bukanlah pilihan yang realistis pada saat itu. McFarlen justru berkoordinasi dengan Israel terkait detail kunjungannya ke Tehera ini.[508]

McFarlane berangkat ke Iran pada 25 Mei 1986 bersama dengan pensiunan analis CIA George Cave, staf dari Dewan Keamanan Nasional, Howard Teicher, dan seorang asisten.[509] Mereka transit dulu di Israel untuk bertemu dengan North, Nir, dan Richard V. Secord, seorang purnawirawan mayor jenderal di Angkatan Udara Amerika Serikat. North memanfaatkan kesempatan ini untuk meyakinkan McFarlane agar mengizinkan Nir untuk menemani rombongan ke Iran, dengan menegaskan bahwa penolakan terhadap permintaan ini akan sangat menyinggung perdana menteri Israel. McFarlen menyetujui permintaan tersebut dengan terpaksa.[510] Rombongan Amerika tiba di bandara Mehrabad di kota Iran pada pukul 9 pagi tanggal 26 Mei dengan pesawat jet pribadi yang juga membawa rudal dan persenjataan lainnya. Sebagaimana usulan dari North, rombongan Amerika ini membawa Bibel—dengan ayat tulisan tangan presiden Reagan—dan sebuah kue coklat berbentuk kunci—sebagai simbol dimulainya hubungan Amerika Serikat-Iran—sebagai hadiah.

Tetapi berbeda dengan apa yang dijanjikan North dan Ghorbanifar—dan ini membuat McFarlane terkejut—setelah dua hari di Iran, rombongan Amerika tidak menjalani pertemuan apapun dengan para pejabat senior Iran. Pada hari terakhir kunjungan, hari ketiga, ketua Komite Luar Negeri parlemen Iran, Mohammad Ali Hadi Najafabadi dan seorang penasihat Rafsanjani, akhirnya muncul. Dengan bahasa Inggris yang fasih, Najafabadi memiliki kepercayaan diri yang tampak pada pengetahuannya yang mendalam dan luas. Akhirnya, pembicaraan dapat dimulai. McFarlane dan Najafabadi membicarakan pandangan pemerintahannya masing-masing terkait situasi geopolitik di regional. Najafabadi menjelaskan bahwa Iran perlu mengkonsoildasikan semangat revolusinya dari pada mendukung aksi terorisme atau melanjutkan peperangan. Mantan Penasihat Keamanan Nasional ini kemudian meyakinkan pejabat Iran bahwa Washington tidak ingin mengulang kembali revolusi. “Pemerintahan dan urusan pemerintah Iran adalah urusan kedaulatan Anda,” dia menjelaskan.[511] Menyampaikan pengakuan diam-diam pemerintahan Amerika Serikat terhadap revolusi sebagai sebuah kenyataan merupakan langkah penting. Dua puluh tahun kemudian, usaha untuk menyelesaikan persoalan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu karena Teheran

506

507

508

509

510

511

meyakini bahwa pemerintahan George W. Bush tidak akan menerima pemerintahan revolusi Iran dan justru menginginkan pergantian rezim.

Pembicaraan McFarlane dengan Najafabadi membuatnya berbesar hati. Pernyataan Najafabadi nampak mendukung keinginan Amerika terhadap Iran—bahwa harus ada sekelompok orang bijak di Teheran yang tertarik untuk mengakhiri peperangan, mengurangi isolasi mereka, dan memulihkan kembali hubungan Iran dengan blok Barat.[512] McFarlane juga menjelaskan pandangan Amerika mengenai ancaman Uni Soviet terhadap Iran, pendudukan Soviet terhadap Afghanistan, dan ambisi Soviet untuk menguasai pelabuhan air-hangat di Teluk Persia. McFarlane juga menyampaikan isu tentang Israel. Apakah mungkin Iran memberikan legitimasi terhadap negara Israel, McFarlane bertanya. Najafabadi menerima setiap pembicaran terkait Uni Soviet tetapi menolak berkomentar terhadap pertanyaan mengenai Israel. Setiap McFarlane membahasa Israel, Najafabadi segera mengganti topik pembicaraan. Pada akhirnya jawaban Najafabadi sedikit melunak. McFarlane mengutip pernyataan Najafabadi, "Kami tidak mempersiapkan diri untuk membicarakan Israel saat ini, tetapi topik ini harus diagendakan." Iran memberikan pengakuan pasif terhadap Israel sebagai sebuah negara." Pernyataan Najafabadi jelas sekali telah mengabaikan karakter permusuhan pemerintahan Islam Iran terhadap Israel. Konflik Palestina memang tidak menjadi agenda dalam utama bagi Republik Islam. Ketika aspek keamanan dan situasi geopolitik Iran menjadi taruhan, maka pemerintahan Republik Islam dengan mudah mengabaikan ideologi dan retorikanya." Najafabadi menggunakan isu Israel sebatas dalam retorika dan tidak pernah bersuara lantang tentang Israel," McFarlane menjelaskan.[513]

Pembicaraan serius ini membuat McFarlane yakin bahwa masih ada "tumpuan untuk sebuah harapan". McFarlane percaya bahwa ada semangat ideologis yang cukup besar, dan Rafsanjani nampak sangat ingin merealisasikan pembicaraan di atas. Seperti biasa, poin pembicaraan yang tersulit adalah mengenai sandera. McFarlane memberikan penawaran yang sulit dan menolak untuk mengirimkan rudal yang sudah dibawa ke Teheran sebelum seluruh sandera dibebaskan. Pendirian tegasnya ini tidak disetujui oleh perwakilan Shimon Peres, Amiram Nir. Menyikapi langkah McFarlane ini, Nir melakukan negosiasi sendirian dengan Iran di koridor hotel tempat mereka bertemu. Sementara McFarlane mengambil sikap yang tegas, agen Israel ini justru memberitahu Iran bahwa sikap McFarlane akan melunak. Agen Israel ini telah melakukan kesalahan.[514]

Pada hari ketiga pertemuan, Najafabadi menegaskan kembali posisi Iran. Meskipun Iran menyadari kejujuran sikap Amerika Serikat, mereka masih percaya bahwa usaha untuk saling-mendekat antara Iran dan Amerika Serikat masih terlalu cepat dan terlalu beresiko. Najafabadi menjelaskan bahwa Rafsanjani masih ingin memiliki hubungan (dengan Amerika, *pen.*). Mengenai persoalan sandera, Iran akhirnya menawarkan untuk membebaskan dua orang dari total empat sandera. Bagi McFarlane tawaran ini tidak cukup, dan pembicaraan menemui jalan buntu. McFarlane kemudian mengetahui bahwa tawaran Iran untuk membebaskan hanya dua orang ini karena utusan Peres telah memberitahu Iran bahwa tawaran ini merupakan inti dari keinginan McFarlane. Dalam keadaan frustasi, McFarlane meninggalkan Iran dengan tangan kosong. Tetapi ketika jet

512

513

514

pribadi Amerika mendarat kembali di Washington, George Cave mencapai kesepakatan dengan seorang anggota delegasi Iran bahwa sebuah saluran harus dipertahankan dengan menjadikan Ghorbanifar sebagai perantara. Meskipun begitu Iran menegaskan bahwa "saluran kedua" ini harus dihindarkan dari campur-tangan Israel.[515]

Kebocoran Al Shiraa

Selama beberapa bulan, Amiram Nir dan Letnan Kolonel Oliver North memimpin operasi ini, yang berujung pada tambahan kiriman senjata sekaligus pembebasan para sandera.[516] Tetapi ketika Amerika Serikat dan Iran mulai sadar untuk memiliki kesepakatan resmi antara kedua belah pihak, "saluran kedua" mulai memainkan perannya. Pada pertengahan bulan Agustus, Richard V. Secord bertemu dengan pejabat Iran di Brussel yang sebelumnya membuat kesepakatan dengan Goerge Cave bahwa komunikasi harus tetap dijaga. Pada pertengahan September, pejabat Iran ini mengunjungi Washington secara rahasia dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Dia menyampaikan kepada pejabat Amerika bahwa putra dari Khomeini sudah memberitahu ayahnya secara detail tentang pembicaraan di atas dan bahwa Iran menginginkan adanya dialog dengan Washington; tidak hanya dialog tentang senjata tetapi untuk alasan yang lebih luas.[517] Shimon Peres lalu menemui Ronald Reagan di Gedung Putih pada September 1986 untuk memastikan bawah operasi ini tetap dilanjutkan. Dengan menyampaikan argumentasi Iran, pihak Israel merujuk pada kasus penyanderaan sebagai sebuah rintangan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah hubungan strategis yang lebih luas dengan pemerintahan Iran.[518]

Salah satu usulah Iran adalah pembentukan sebuah komisi yang bertemu secara rahasia yang akan membicarakan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan kedua negara secara bertahap. "Iran sudah memilih empat pejabat senior yang terdiri dari seluruh faksi," Geroge Cave menulis satu tahun setelah peristiwa ini terjadi. "Hal ini menunjukkan bahwa masih ada konsensus yang luas di Iran untuk memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat," salah satu pejabat Iran berbicara pada George Cave.[519] Komisi rahasia ini bertemua di Jerman pada Oktober 1986 yang menyepakati pembebasan sandera David Jacobsen sekaligus pengiriman 500 rudal TOW dari Amerika ke Iran.

Tetapi pada 6 November 1986, pertikaian internal di Iran terungkap dengan saluran ini. Seorang rekan Ayatollah Ali Montazeri, yang berasal dari sayap KIRI ayatollah dan bersebarangan dengan faksi Rafsanjani, membocorkan seluruh detail kunjungan McFarlane ke Iran kepada sebuah surat kabar Lebanon, *Al Shiraa*.[520] Anggota saluran kedua ini tidak memprediksi dampak dari pembocoran ini, sehingga mereka kemudian berkumpul di Genewa selama dua hari pasca publikasi surat kabar ini. Pihak Iran berharap bahwa pembicaran akan tetap berlanjut setelah pemberitaan ini mulai redup, sekalipun Washington nantinya tidak mampu melanjutkan pengiriman senjata. Sebuah pertemuan

515
516
517
518
519
520

final digelar di Frankurt pada 14 Desember 1986. Dalam pertemuan itu Amerika menutup pintu dialog karena pertimbangan politik.[521] Kasus ini menjadi skandal besar bagi pemerintahan Ronald Reagan. Reagan dituntut untuk melakukan pengakuan pada 25 November; bahwa meskipun Amerika melakukan embargo senjata produk Amerika dan usaha-usahanya untuk mencegah negara lain menjual senjata ke Iran, Amerika telah menjual senjata ke Iran dan mengirimkan dana ke kelompok gerilya "Contra" yang sedang berperang melawan pemerintahan Sandinista di Nicaragua.[522] Dalam pidato yang ditayangkan secara nasional, Reagan membela keputusan operasi tersebut dan beralasan bahwa operasi ini dilakukan karena pentingnya posisi strategis Iran dan pengaruh Iran di dunia Islam yang kita usahakan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan negara kita."[523]

Baik Senat maupun Parlemen memutuskan untuk menginvestigasi peristiwa ini, dengan memanggil sejumlah pejabat Amerika Serikat untuk hadir dan dimintai keterangan. Permainan saling-menyalahkan segera dimulai, yang menyebabkan retaknya hubungan Amerika dengan Israel.[524] Pada 8 Desember, Yitzhak Shamir, yang sudah menjadi perdana menteri pemerintahan nasional, mencatat pernyataan Reagan bahwa kiriman senjata Amerika ke Iran ditunda tetapi menolak untuk menghentikan penjualan senjata ke Iran.[525] Dua hari kemudian Peres menyatakan ,"Penjualan senjata ke Iran merupakan ide dari Amerika dan keterlibatan Israel hanya atas permintaan Amerika."[526] Pada Januari 1987, Shimon Peres membela langkah Israel dengan menyatakan bahwa langkah ini merupakan usaha untuk membuat Iran menjadi lebih moderat. "Mengapa kita tidak berhak untuk mendapatkan pemandangan yang indah jika ada sebuah jendela peluang, dan untuk melihat jika ada kemungkinan untuk masa depan lainnya di Iran?" Peres memberikan keterangan pada para wartawan.[527] Abba Eban, kepala komisi dari Israel untuk menginvestasi keterlibatan negara ini dalam operasi di Iran, berkesimpulan bahwa "menjual senjata ke Iran adalah hak kami."[528] Dalam sebuah wawancara dengan *Washington Post,* Yitzhak Shamir bahkan mendorong Ronald Reagan untuk melanjutkan kontak dengan Iran dan membantah "kesalahan kompleks [yang] coba ditimpakan oleh beberapa negara Arab kepada Washington."[529] Rasa malu yang berkepanjangan Amerika Serikat dan Israel dapat dihindari karena kematian misterius Amiram Nir dalam sebuah kecelakaan pesawat di Meksiko pada minggu yang sama dengan jadwal pemberian keterangan Amiram Nir di pengadilan Oliver North. Dalam upacara pemakaman Amiram Nir, Yitzhak Rabin berbicara tentang "Misi Amiram Nir yang belum selesai dalam tugas rahasia dan rahasia-rahasia yang dibiarkan terkunci di dalam hatinya."[530]

Iran sendiri menolak keras setiap negosiasi dengan Israel. "Kami tidak pernah bernegoisasi dengan Israel mengenai pembelian senjata," Rafsanjani mengatakan hal ini

521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

pada akhir bulan November. “Jika kami tahu bahwa senjata yang sampai ke Iran melalui Israel, kami bahkan tidak akan menggunakan senjata tersebut dalam peperangan.”[531] Meskipun begitu Rafsanjani tetap berusaha menjelaskan bahwa Iran tetap bersedia untuk membebaskan sandera Amerika di Lebanon secara sukarela jika Washington mengirimkan senjata yang sudah dibeli oleh rezim Shah yang terakhir. Kelompok sayak kiri Iran menuntut adanya investigasi, tetapi Khomeini kemudian turun tangan dan menolak permintaan investigasi ini karena khawatir bahwa hubungan Iran-Israel terungkap ke publik yang akan merusak citra Iran di dunia Islam.[532]

Dengan atau tanpa investigasi, dampak buruk sudah terjadi. Negara-negara Arab menumpahkan kemarahan mereka pada Washington yang telah mendukung Iran melalui Israel untuk melawan Saddam Hussein.[533] Bagi beberapa negara Arab, ideologi fundamentalis Iran secara potensial lebih berbahaya daripada ancaman Israel.[534] Kebocoran operasi ini membuat hubungan Iran dengan dunia Arab semakin memburuk. Hubungan dengan Arab Saudi hampir tidak dapat diperbaiki lagi setelah polisi Arab Saudi menembak mati 275 jamaah haji asal Iran di Mekah pada musim haji tahun 1987.[535] Teheran merespon—sebagaiman yang dapat diprediksi—dengan menunjukkan penolakan terhadap Israel dan seluruh pemerintahan negara Arab yang bersedia melakukan negosiasi dengan Negara Yahudi. Pada beberapa tahun berikutnya Khamenei bahkan marah besar terhadap PLO yang memberikan pengakuan pada Israel, dengan menegaskan bahwa “pembagian wilayah Palestina tidak dapat diterima” dan bangsa Palestina tidak dapat didirikan kecuali jika “Zionis sudah dihancurkan dan wilayah yang mereka duduki dikembalikan.”[536] Namun ketika hubungan Iran dengan Israel semakin terungkap ke publik, (retorika, *pen.*) penolakan Iran terhadap Israel semakin meredup.

531

532

533

534

535

536

12-Runtuhnya Doktrin Periperial

Iran merupakan sahabat sejati Israel dan kami tidak ingin merubah hubungan kami dengan Teheran, karena rezim Khomeini tidak akan berlangsung selamanya.
—Yitzhak Rabin, Oktober 1987

Israel mengakhiri strategi bertahan pada 1987, satu tahun setelah skandal "Iran-Contra" terungkap. Ketika peluang kemenangan Irak semakin terbuka setelah Amerika Serikat mulai memberikan dukungan kepada Saddam Hussein berupa bantuan intelijen terhadap pergerakan pasukan Iran, Tel Aviv berpandangan bahwa perang yang berkelanjutan akan sangat berisiko dan hasil terbaik adalah tidak ada pemenang perang.[537] Panduan prinsip kebijakan Israel tetap dihindarkan dari setiap hal yang bertentangan dengan Teheran, dan dapat menghambat apa yang dianggap Tel Aviv sebagai bangkitnya Iran—yang tak terhindarkan—sebagai sekutu periperial non Arab.[538] Bahkan ketika Israel jelas-jelas memberikan dukungan kepada sayap radikal Iran—bukan sayap moderat—melalui pengiriman senjata untuk melanjutkan operasi.[539]

Skandal "Iran-Contra" bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Kontak antara Iran dan Israel terjadi secara intens sepanjang dekade 1980-an yang didorong oleh kebutuhan Iran terhadap senjata dan kebutuhan Israel untuk menciptakan kembali poros Israel-Iran. Kelompok revolusioner Iran yang menjarah kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran pada November 1979 menemukan sejumlah dokumen tentang aktivitas Yitzhak Segev, atase militer Israel yang terakhir untuk Iran. Iran berhasil menemukan Segev, dan setahun sebelum skandal "Iran-Contra" terungkap, Segev menerima panggilan telepon dari Teheran, yaitu ayatollah Eskandari dan seseorang bernama Mr. Khalil. Dengan bahasa Persia ayatolllah berbicara pada Segev bahwa Iran tertarik untuk bekerjasama dengan Israel.

Iran sangat membutuhkan peralatan militer dari Amerika, dan mereka menawarkan pembebasan pasukan Israel yang ditangkap Hezbollah sebagai imbalan. Dengan semangat untuk memiliki peran dalam terobosan hubungan antara Israel-Iran, Segev segera menghubungi pemerintahan Israel dan mendapatkan restu untuk melakukan pertemuan dengan pihak Iran. Rangkaian pertemuan ini dilakukan di Genewa, Madrid, dan pertemuan terakhir dilakukan di Israel, tepatnya di kediaman Segev di luar kota Tel Aviv. Dengan memakai pakaian sipil, mantan atase militer Israel itu bahkan menemai para mullah Iran ini berkunjung ke beberapa tempat suci di kota Yerusalem. Di depan Tembok Ratapan, Segev bertanya kepada perwakilan Iran ini tentang ideologi Khomeini dan apakah Iran benar-benar ingin menaklukkan Yerusalem. Perwakilan itu menjawab sambil tersenyum bahwa target itu tidak akan tercapai pada masa kekekuasaan mereka. Meskipun begitu, Segev segera menyadari bahwa Iran tidak memiliki kepentingan terhadap Israel. Iran hanya membutuhkan bantuan Israel untuk mendapatkan akses terhadap senjata dan onderdil militer dari Amerika Serikat. "Mereka bermain-main dengan kami," Segev

537

538

539

berbicara. “Tiga kali pertemuan yang kami lakukan tidak menghasilkan apa-apa karena para pasukan sudah tewas,” sebuah fakta yang ia ketahui di kemudian hari.[540]

Tetapi Israel tidak berputus asa dengan kegagalan-kegagalan ini. Pendirian Israel—yang tetap tidak terpengaruh oleh perubahan internal di Iran dan oleh perjanjian damai dengan Mesir—tetap didominasi oleh doktrin periperial—yaitu ketakutan atas ancaman Irak dan janji dari Iran.[541] Menteri Pertahanan Yitzhak Rabin berkali-kali menggunakan ancaman Irak ini sebagai justifikasi untuk membangun kontak dengan Teheran. Dalam konferensi pers pada bulan Oktober 1987, Rabin menyesalkan adanya kontak senjata antara pasukan Amerika dengan angkatan laut Iran di Teluk Persia dan berbicara pada para wartawan “bahwa Amerika Serikat sudah dimanipulasi Irak untuk menyerang Iran dalam Perang di Teluk Persia, dan bahwa Israel tidak pernah merubah keberpihakannya terhadap Iran.”[542] Rabin lalu mengungkapkan pandangan Iran terhadap Iran sebagai sebuah rekan strategis. “Iran merupakan sahabat sejati Israel dan kami tidak ingin merubah hubungan dengan Teheran, karena rezim Khomeini tidak akan berkuasa selamanya.”[543]

Pernyataan ini bukanlah kata-kata tanpa makna. Penasihat terdekat Rabin menjelaskan secara pribadi bahwa Rabin seringkali berbicara tentang Iran dengan penuh nostalgia.[544] Rabin berbicara pada Duta Besar Amerika Serikat, Thomas Pickering, tentang sejumlah kejadian selama masa jabatannya di Israel antara 1985 hingga 1988 bahwa “Amerika Serikat harus mencari cara untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Iran.” Menurut Pickering ,”Terlepas dari peristiwa revolusi Iran, Rabin begitu tertarik dengan Iran dan berpikir bahwa penting sekali untuk melakukan perbaikan hubungan dengan Iran.” Pejabat Israel lainnya juga menyampaikan hal yang sama.[545]

Tetapi Israel ternyata keliru. Seluruh asumsinya ini berdiri di atas fondasi yang rapuh; bahwa Iran di bawah kekuasaan Shah merupakan Iran yang sebenarnya, bahwa Irak akan selalu menjadi musuh sementara Iran tidak akan pernah menjadi ancaman bagi Israel, dan bahwa ancaman Soviet terhadap Iran—selama perang Iran-Irak—akan memaksa Iran mendekat ke Israel.[546] Bagi Teheran, Israel bukanlah aset bagi Iran, Negara Yahudi ini hanya sebuah “barang habis pakai”, bagian dari hubungan taktis jangka pendek yang akan mengurangi ancaman terhadap Iran untuk mengamankan tujuan strategis Iran yang sebenarnya, yaitu menjadi pemimpin di tingkat regional. “Seluruh koneksi ini; Israel digunakan untuk mendapatkan onderdil persenjataan. Jika tidak ada perang, Iran tidak akan berhubungan dengan kita,” Segev mengeluhkan sikap Iran.[547]

Dalam skandal “Iran-Contra”, Iran bertujuan untuk membangun kembali hubungan dengan Washington—bukan Israel. Seluruh bagian dari operasi ini—ketika Iran melibatkan Israel sekaligus mengecam Negara Yahudi di hadapan publik—memengungkapkan adanya kontradiksi yang akut antara kebutuhan keamanan jangka pendek Iran dan strategi imperatif jangka panjangnya. Dalam kebutuhan jangka

540

541

542

543

544

545

546

547

pendeknya, pemerintahan Islam Iran bahkan membutuhkan Israel untuk mengimbangi ancaman dari blok Arab. Dalam konteks jangka panjang, Iran justru perlu untuk berhubungan baik dengan blok Arab dengan memainkan isu anti-Israel untuk mendapatkan peran kepemimpinan di dunia Islam. Meskipun Israel bukanlah ancaman bagi Iran, para pemimpin agama di Teheran percaya bahwa mereka tidak akan berhasil mendapatkan kepemimpinan regional tanpa mengambil sikap tegas di hadapan publik terhadap Israel, sama seperti apa yang dipertimbangkan Shah. Hingga saat ini, Iran tetap menegaskan bahwa mereka tidak pernah mendekati Israel untuk keperluan senjata. Teheran menegaskan kembali bahwa Iran hanya memperoleh akses terhadap persenjataan Israel melalui pasar gelap.[548] "[Iran] tidak pernah menjelaskan kepada kami seluruh pertimbangan mereka," Eliezer Tsafrir, kepala operasi Mossad di Iran dan Irak pada dekade 1960-an hingga 1970-an, menjelaskan. "Meskipun [tampak, *pen.*] ideologis dan Islami, apa yang dilakukan Iran cenderung nasionalistik, dan bahkan sama dengan apa yang pernah dilakukan Shah."[549]

Pada 20 Agustus 1988, setelah melakukan negosiasi yang intens selama beberapa bulan, Iran dan Irak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Ayatollah Khomeini dengan terpaksa menyetujui Resolusi Dewan Keamanan 598 PBB yang menuntut adanya gencata senjata—sebuah tindakan yang ia ibaratkan dengan meminum segelas racun—dan permusuhan kemudian berakhir. Setelah berperang selama 8 tahun, yang menguras biaya milyaran dolar dan jutaan korban—kebanyakan warga Iran—dan kerusakan industri minyak di kedua negara, garis perbatasan antar kedua negara tetap tidak berubah.[550] Bahkan berakhirnya perang ini tidak merubah pertimbangan strategis Israel terhadap Iran. Para pendukung doktrin periperial berpendapat bahwa perang ini justru membuat Iran semakin terisolasi dan—oleh karena itu—lebih berpeluang memperbaharui hubungan dengan Israel daripada Irak.[551] Pada saat yang sama, pendudukan Gaza dan Tepi Barat—lokasi intifada pejuang Palestina, yang dimulai pada musim gugur sebelumnya, yang membuat biaya perluasan wilayah Israel meningkat—menjadi perhatian utama Israel. Beberapa pejabat tinggi Israel, termasuk Rabin, menyadari bahwa masyarakat Israel semakin rentan menanggung risiko dari konflik berkepanjangan dengan blok Arab.[552] Perang ini juga berhasil membuat pasukan militer Irak lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Strategi bertahan Israel kemudian berakhir ketika Irak berada pada puncak kekuatan militernya. "Irak telah membangun sebuah kekuatan militer yang besar dengan lebih dari lima puluh divisi," Shimon Peres berkomentar dalam konteks kesepakatan gencatan senjata. "Pertanyaannya adalah apakah Irak akan merehabilitasi negaranya atau tergoda untuk memiliki kembali posisinya di dunia Arab (dengan menyerang Israel)."[553] Seluruh situasi ini—bersamaan dengan isolasi diplomatik Israel, membuat para pendukung doktrin periperial merasakan kebutuhan untuk membangun hubungan strategis dengan Iran.

548

549

550

551

552

553

Tetapi sebuah aliran pemikiran baru kemudian muncul di Israel yang berpandangan bahwa Irak—bukan Iran—sebagai sekutu potensial bagi Israel di regional Timur Tengah. Doktrin periperial mulai meredup; negara-negara di pinggiran wilayah Arab tidak lagi menjadi lawan berat bagi kekuatan radikal di internal negara-negara Arab tetapi justru menjadi pelaku dari 'radikalisme' itu sendiri. Sebagian pejabat Israel ini sampai pada kesimpulan bahwa pemerintahan Republik Islam, dan oposisi ideologisnya yang kaku terhadap Israel, dapat bertahan lebih lama dari yang awalnya mereka harapkan. Pada saat yang sama, lingkaran internal dalam pemerintahan Iran semakin moderat. Di sisi lain, Jenderal Moshe Tamir, Uri Saguy, dan para pendukung kelompok baru ini menyatakan bahwa baik Mesir maupun Irak, mulai mendekat ke blok Barat. Perjanjian perdamaian dengan Mesir sudah berusia 8 tahun dan Saddam Hussein—yang tidak begitu bersahabat dengan Israel—telah bersekutu dengan blok Barat untuk melawan Iran. Dan ancaman Syria terhadap Israel semakin berkurang setelah gempuran yang dilancarkan Israel dalam perang Lebanon. Maka ancaman terhadap Israel kemudian muncul dari Iran—baik langsung ataupun melalui Hezbollah di Lebanon—dan bukan dari negara-negara di sekitar Arab.[554] Sebagai seorang direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Israel pada waktu itu, Jenderal Moshe Tamir bahkan berpandangan bahwa Israel harus menggantungkan diri pada Irak untuk melawan bahaya Iran. "Irak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari blok Arab yang luas dan pragmatis, yang dikembangkan untuk membendung bahaya dari kelompok fundamentalis Iran," Tamir berkomentar.[555] Meskipun ide yang menyatakan bahwa "Iran merupakan ancaman bagi Israel" memiliki sedikit pendukung, dalam beberapa tahun saja ide ini secara luas menyebar di kalangan pada ahli strategi Partai Buruh Israel—bukan karena adanya pergeseran ideologi Israel, tetapi karena perubahan dramatis peta geopolitik. Tetapi sebelum ide ini mencapai titik yang lebih tinggi dalam Partai Buruh, Israel mendapatkan kesempatan terakhir untuk menguji Iran.

Pada 3 Juni 1989, Ayatollah Khomeini meninggal. Kematian ini memberikan peluang emas bagi kelompok di Israel yang percaya bahwa sayap moderat di Iran akan menjadi suksesor selanjutnya sekaligus mengakhiri kerenggangan Israel dan Iran. Hanya satu hari setelah kematian Khomeini, juru bicara pemerintahan Israel, Avi Pazner, menyatakan bahwa Israel ingin agar Iran pasca-Khomeini dapat memperbaharui hubungan persahabatan yang sempat terputus oleh revolusi, dan Avi Pazner mengekspresikan harapan Israel atas adanya perbaikan hubungan di masa depan.[556] Dalam sebuah wawancara dengan televisi Israel, seorang penasihat Yitzhak Rabin, Yossi Alpher, menegaskan kembali doktrin periperial; musuh nyata Israel adalah Irak dan negara-negara Arab lainnya, maka Iran punya banyak alasan untuk bersekutu dengan Israel; "Irak dari hari ke hari semakin kuat dengan mengembangkan senjata kimia dan senjata non-konvensional yang menjadi ancaman bagi kita. Ada satu alasan untuk memandang bahwa Iran dapat melanjutkan konfrontasi dan permusuhan dengan pasukan Irak. Iran juga memiliki minyak, Iran memiliki warga Yahudi dan seluruh aset ini merupakan alasan yang kuat untuk memperbaharui koneksi Israel dengan Iran, tanpa ada hubungan apapun dengan rezim yang sedang memerintah.[557]

554

555

556

557

Bagi kelompok yang percaya bahwa fanatisme ideologis Khomeini menjadi akar permusuhan Iran terhadap Israel, maka kematian ayatollah ini meningkatkan harapan bahwa perubahan dalam hubungan Israel-Iran agakn segera terjadi. Tel Aviv berpandangan bahwa dengan kepergian Khomeini dalam dunia politik Iran, dan ancaman Irak yang begitu besar bagi kedua negara, maka hubungan Israel dan Iran akan segera mencair. Pada November 1989, Kementerian Luar Negeri Israel memberitahu Departemen Luar Negeri AS bahwa Negara Yahudi melanjutkan pembelian minyak dari Iran.[558] Israel sepakat untuk membeli dua juta barel minyak senilai 36 juta dolar, sebagai bagian dari perjanjian agar Iran membantu pembebasan tiga tahanan Israel dalam perang di Lebanon.[559] Meskipun Kementerian Luar Negeri Iran menolak untuk terlibat, kontak antara Israel dan Iran tetap terjadi.[560] Topik ini kemudian menjadi bahan pembicaraan di Knesset Israel pada Februari 1990. Di forum ini Menteri Energi dan Infrastruktur mengungkapkan bahwa perbendaharaan Israel berhasil mendapatkan keuntungan transaksi senilai 2,5 juta dolar.[561] Israel berharap bahwa transaksi minyak ini akan memberikan dampak lebih, tetapi bagi Iran transaksi minyak ini tidak lebih dari sekedar pertimbangan ekonomi daripada didorong oleh pertimbangan geopolitik. Pasca peperangan dengan Irak, Iran muncul dengan semangat dan ekonomi yang lumpuh. Meskipun semangat revolusi tetap bertahan, Iran tidak dapat memenangkan peperangan. Mimpi Iran untuk menyebarkan semangat revolusi justru membuat Iran berada di kasta terendah—bukan seorang hegemon. "Akhir dari perang Iran-Irak memberikan daya rusak terhadap cara berpikir Iran. Perang ini merupakan pengalaman yang pahit yang dapat dialami seseorang. Perang ini justru membuat Iran semakin pragmatis dan mengubah pertanyaan tentang biaya-manfaat (*cost-benefit).*"[562]

Langkah Détente Rafsanjani

Pasca perang dengan Irak, Iran kemudian menjadi negara yang semakin terisolasi. Usahanya untuk mengekspor semangat revolusi membuatnya dimusuhi oleh negara blok Arab, dan pada saat yang sama juga menghancurkan sumber daya nasional dan gengsinya di tingkat global.[563] Ketika rezim di Iran menyadari bahwa berbagai kebijakannya gagal, perdebatan di Iran kemudian terbagi ke dalam dua kubu. Di satu sisi, kelompok revolusioner garis-keras berpandangan bahwa Irak sedang berada dalam kondisi lemah dan perlu memperkuat persenjataan mereka "untuk mempertahankan revolusi." Kubu lainnya, yang dipimpin oleh Hashemi Rafsanjani, yang kemudian menjadi presiden pada tahun 1989, berpendapat bahwa Iran harus mengakhiri isolasi internasional terhadap negaranya dan memprioritaskan agenda rekonstruksi ekonomi dan menjadikan pembangunan kembali di bidang militer sebagai kebijakan tambahan.[564] "Rafsanjani sangat tertarik dengan usaha-usaha rekonstruksi dan kebijakan-kebijakan yang pragmatis," Gary Sick, yang bekerja di *National Security Council* pada masa kepresidenan Jimmy Carter dan Ronald Reagan, menjelaskan. "Banyak hal yang mulai berubah, tahun 1988-1989

558
559
560
561
562
563
564

merupakan momentum bagi rakyat untuk memandang segala sesuatunya dengan cara yang berbeda."[565]

Kelompok Rafsanjani berpandangan bahwa Iran juga harus memperbaiki hubungannya dengan pemerintahan blok Arab, karena dukungan rakyat Arab ternyata gagal membawa Iran menjadi pemimpin regional. (Rezim Iran tidak akan pernah mengakui hal ini secara terbuka di depan publik, karena ini bertentangan dengan nilai-nilai revolusi). Antara 1989-1992, kelompok Rafsanjani—yang berorientasi ekonomi—mulai meminggirkan rivalnya—kelompok isolasionis—dari kekuasaan. Meskipun begitu, untuk mendapatkan legitimasi kepemimpinan, ide untuk mengekspor propaganda revolusi tetap tidak bisa diabaikan. Tetapi alih-alih berusaha melemahkan berbagai kekuatan di regional, Rafsanjani justru mengekspor citra Iran sebagai negara Islam yang terdepan, modern, dan independen. Iran perlu membuat citra Iran ini menarik bagi dunia Islam dengan melakukan modernisasi sekaligus proteksi terhadap masyarakat dan ajaran Islam dari kemerosotan nilai-nilai Barat.[566]

Setelah kematian Khomeini, kepemimpinan baru Iran berusaha membangun kembali hubungan—yang pernah dibangun Shah—dalam bidang ekonomi—dan dalam batas-batas tertentu—politik-militer dengan blok Barat.[567] Pada 1970-an, Iran mendapat dukungan dari Amerika Serikat melalui kebijakan Tiang Kembar dari Richard Nixon, sehingga Teheran tidak mendapat sambutan baik dari negara-negara Arab. Saat ini Iran tidak memiliki hubungan baik dengan keduanya—Amerika dan blok Arab—dan pertama perlu memperbaiki hubungan dengan Washington. Hubungan baik dengan Washington juga perlu untuk membangun kembali perekonomian Iran sehingga menjadi contoh bagi negara Muslim lainnya. Dalam satu hal, para pejabat Iran percaya bahwa mereka bisa saja meminjam uang untuk membiayai program rekonstruksi karena hutang luar negeri Iran baru mencapai 6 milyar dolar sebagai akibat dari biaya perang.

Tetapi Iran juga hanya bisa mendapatkan pinjaman luar negeri jika bersedia merubah kebijakan luar negerinya menjadi lebih moderat sekaligus menghindari langkah-langkah yang membuat blok Barat tidak senang. Untuk memperlancar proses perbaikan hubungan ekonomi, Teheran berusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan negara tetangga di dunia Arab dan dengan Amerika Serikat. Persoalan terbesar adalah tindakan penyanderaan warga Amerika yang masih dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-Iran di Lebanon.[568] Bantuan Iran bagi Amerika Serikat di Lebanon merupakan respon terhadap ajakan dari Presiden George H.W. Bush. Dalam pidatonya pada 1989, Bush memberi isyarat pada Iran bahwa "Niat baik membuahkan niat baik. Kepercayaan yang baik mampu menjadi sebuah spiral yang akan bergerak selamanya." Mediator PBB dari Italia dalam kasus penyanderaan ini, Giandomenico Picco, berusaha mendapatkan dukungan dari Rafsanjani untuk membebaskan para sandera. Awalnya Rafsanjani ragu-ragu. Iran "tidak punya kaitan apapun dengan kasus penyanderaan itu," Rafsanjani berbicara pada Picco. "Tidak mudah berhubungan dengan orang-orang ini." Tetapi setelah menyadari bahwa bantuan Iran di Lebanon akan memperbaiki hubungan Iran dengan Washington, Rafsanjani kemudian merubah pendiriannya. Iran berhasil membantu

565

566

567

568

pembebasan seluruh sandera yang masih tersisa dengan harapan bahwa Amerika akan "menghentikan dendam-tak rasionalnya terhadap Iran."[569]

Usaha Iran untuk memperbaiki hubungan dengan blok Barat dan rezim-rezim di dunia Arab sekaligus mengakhiri ekspor propaganda revolusi menghasilkan daya dorong baru terhadap pandangan dan sikap internasional Iran—de-ideologisasi kebijakan luar negeri Iran. "Ini adalah bagian dari evolusi proses revolusi kami," Mustafa Zahrani, seorang diplomat senior Iran, menjelaskan.[570] Menurut Javad Zarif, duta besar Iran di PBB yang memiliki peran penting dalam proses negosiasi di PBB dan pembebasan sandera di Lebanon, kebijakan luar negeri Iran "dikembangkan dengan mempertimbangkan eksistensi negara-negara daripada eksistensi massa. Itulah mengapa Anda menyaksikan perbaikan yang signifikan dalam hubungan Iran dengan dunia Arab dan juga negara-negara di Teluk Persia. Ada sebuah usaha yang dilakukan Iran untuk menemukan posisi penting di dunia Islam dan gerakan non-blok. Pada dasarnya, pasca perang dengan Irak, Iran berusaha untuk mendefinisikan kembali posisinya dalam komunitas internasional, dalam konteks sebagai sebuah kekuatan regional, dan memiliki hubungan baik dengan negara lain di regional."[571]

Iran kemudian menurunkan ketegangan retorikanya terhadap negara-negara Arab di Teluk Persia dan memainkan sikap ofensif untuk memperbaiki hubungannya dengan negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC) dengan kesuksesan di tahap awal.[572] Negara anggota GCC kemudian menyatakan secara terbuka bahwa Iran harus dilibatkan dalam masa depan sistem keamanan regional.[573] Pada saat yang sama, munculnya Mikhail Gorbachev—seorang yang berhaluan reformis—sebagai pemimpin baru di Uni Soviet juga membuat hubungan Iran dengan musuh tradisionalnya di bagian Utara ini lebih hangat. Pada 1989, sisa-sisa permusuhan antar kedua negara tidak tersisa lagi—baik dukungan Moskow terhadap Partai Komunis Iran, bantuan senjata Moskow pada Irak, dan pendudukan Moskow atas wilayah Afghanistan.

Namun masih ada hambatan yang dihadapi Iran. Meskipun Iran berhasil membantu Amerika untuk membebaskan sandera di Lebanon, Bush tetap dalam pendiriannya dan tidak membalas langkah dari Iran tersebut. "Ketika para sandera dibebaskan, kami tidak melakukan apapun," Brent Scowcroft, Penasihat Keamanan Nasional AS, memberikan keterangan. Meskipun pemerintahan Bush menyadari bahwa semangat ideologi Iran sudah menurun dan bahwa Teheran "telah kembali dari masa-masa ekstrem rezim Khomeini," ingatan tentang skandal "Iran-Contra" cukup membuat para politisi Amerika menjauh—karena malu—dari Iran. "Picco mengatakan bahwa [skandal itu] merupakan kesalahan kami. Barangkali dia benar," Scowcroft mengakui. "Bisa saja itu adalah kesalahan Amerika, bahwa Picco tidak berhasil menghubungkan Iran dengan Amerika. Pada saat itu, Iran lebih bersemangat untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika."[574] Hubungan Iran dengan Palestina juga masih dingin, termasuk dengan munculnya organisai Islam Palestina. Kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam juga menjadi pendukung Irak dalam perang.[575]

569

570

571

572

573

574

575

Meskipun [sama-sama Islamis, *pen.*], mereka merupakan kelompok fundamentalis Sunni yang tumbuh dari kelompok anti-Syiah, Ikhwanul Muslimim. Kelompok-kelompok ini memiliki sedikit perhatian pada Iran secara umum, dan Syiah secara khusus. Iran "tidak memiliki hubungan apapun dengan kelompok-kelompok ini".[576] Kondisi yang sangat menguntungkan Israel.

Ketegangan dengan kelompok pejuang Palestina juga berpengaruh pada perdebatan antara kelompok Rafsanjani dan rival politiknya. Presiden dan para teknokrat di Kementerian Luar Negeri Iran memilih kebijakan untuk mendukung penyelesaian apapun yang dinginkan warga Palestina, sementara kelompok isolasionis mendukung para pejuang Palestina untuk melawan Israel, seperti yang mereka lakukan pada awal dekade 1980-an.[577] Meskipun Rafsanjani menginginkan kebijakan yang lebih pragmatis, dia harus memainkan pertarungan ini dengan hati-hati. Pendekatannya kepada Amerika Serikat cukup berisiko, sementara itu bergerak terlalu cepat dalam isu Palestina akan mambahayakan jabatan kepresidenannya.

Akhirnya yang terjadi adalah berlanjutnya *status quo*. Kebijakan praktikal Iran (*siasat-e amali*) adalah menerima—tapi tidak mendukung—keinginan warga Palestina, termasuk apa yang saat ini berlaku; solusi dua-negara, sementara retorika anti-Israel tetap dilakukan meskipun Teheran tidak melanjutkan retorika tersebut dalam kebijakan praktikal.[578] Menurut Mohsen Mirdamadi, seorang reformis terkemuka Iran dan mantan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Iran: "Kami menghormati apapun solusi yang disepakati warga Palestina. Jika Palestina sepakat atas solusi dua-negara (*two-state solution*), kami tidak akan menolaknya. Kami tidak akan memberikan dukungan, tetapi juga tidak akan menentangnya. Tapi kebijakan untuk tidak menentang solusi itu merupakan inti dari kebijakan mendukung solusi tersebut secara tidak langusng [solusi dua-negara]."[579]

Tetapi pada 2 Agustus 1990, Saddam Hussein kembali menjadi pusat perhatian strategis bagi Iran, Amerika, dan Israel dengan melakukan pendudukan terhadap sebuah negara tetangga. Segera setelah manuver Saddam ini, Uni Soviet runtuh dan Perang Dingin berakhir yang hampir tidak menumpahkan setetes darahpun. Hanya dalam waktu satu malam, struktur bipolar—dua kutub—dalam sistem global bertransfromasi menjadi sebuah kompoisi unipolar, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Meskipun begitu, pergeseran geopolitiklah yang akan menentukan bahwa Israel melihat sedikit keuntungan dari Iran pasca-rezim Khomeini yang cenderung pragmatis.

576

577

578

579

13-Tatanan Dunia Baru

Semuanya berjalanan sesuai dengan cara kami. Semua sistem sudah berjalan. Dan Iran merupakan masalah bagi kami, lalu apa? Kami memiliki segalanya.
—Duta Besar Amerika Serikat Daniel Kurtzer, setelah kekalahan Irak dalam Perang Teluk Persia, dan keruntuhan Uni Soviet

Antara 1990 dan 1992, wilayah Timur Tengah mengalami dua peristiwa besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya—kekalahan Irak dalam Perang Teluk Persia dan keruntuhan Uni Soviet. Tsunami geopolitik ini secara signifikan mampu merubah cara pandang Iran dan Israel satu sama lain. Ancaman bersama yang selama beberapa dekade telah memaksa keduanya untuk bekerjasama dan menemukan kesamaan kepentingan geostrategis—terlepas dari perubahan Iran menjadi negara Islamis yang anti-Zionis—tidak lagi terjadi. Sementara kedua negara diuntungkan dengan kondisi-kondisi tersebut, maka ketidakpastian dari sebuah tatanan dunia baru membawa berbagai bahaya baru. Ketika tatanan dunia baru ini sedang terbentuk di Timur Tengah, Teheran dan Tel Aviv segera menyadari bahwa mereka berada pada posisi yang berlawanan, meskipun semangat revolusi Iran sudah meredup. Keruntuhan Uni Soviet dan kekalahan Irak juga mampu membebaskan sumber daya Iran dan Israel. Kedua negara ini kemudian menganggap bahwa mereka tidak terkontrol. Ahli strategi Israel berpandangan bahwa tanpa kehadiran Irak sebagai pengimbang kekuatan, Iran bisa menjadi ancaman bagi Israel. Seiring berjalannya waktu, dua sekutu strategis ini akan bertemu dalam sebuah permusuhan sengit demi masa depan tatanan regional di Timur Tengah. Negara Yahudi memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari setiap perubahan tatanan regional karena hubungan eratnya dengan Washington, yang dilandasi oleh peran Israel sebagai benteng pertahanan untuk membendung penetrasi Uni Soviet di Timur Tengah. Iran—yang telah tumbuh dengan kebencian terhadap kebijakan isolasi—mendapati dirinya berada dalam isolasi tersebut, berpandangan bahwa mereka mampu menjadi pemenang dalam perubahan-perubahan ini.

Saddam Menyerang Lagi

Pada 2 Agustus 1990, hampir berselang satu tahun pasca runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya pemisahan Tirai Besi, Saddam Hussein menyerang negara tetangga lainnya, Kuwait, untuk mengambil alih kilang minyak Kuwait. Beberapa bulan kemudian, pemerintahan George H.W. Bush dengan hati-hati menggalang sebuah koalisi beberapa negara di bawah bendera PBB dan mengalahkan pasukan Irak sekaligus memulihkan keluarga penguasa Kuwait, Keluarga Sabah. Kekuatan militer Irak melemah. Belanja tahunan militer Irak turun dari 26,4 milyar dolar pada tahun 1990 menjadi hanya 2 juta dolar pada tahun 1991, dan anggota militer yang berjumlah 1,4 juta orang pada tahun 1990 turun menjadi 475,000 orang pada akhir peperangan. Tetapi meskipun kekalahan Irak ini sangat monumental, Irak tetap memainkan kekuatan militer yang penting di Timur Tengah. Dengan jumlah pasukan kira-kira setengah juta orang, Irak masih mampu memberikan ancaman besar bagi negara tetangga terdekatnya.

Dalam banyak hal, langkah bodoh Saddam ini menjadi peristiwa monumental yang pertama. *Untuk pertama kalinya*, sebuah negara Arab terkemuka berperang dengan

sesama negara Arab, yang memberikan lubang besar bagi gagasan pan-Arabisme. *Untuk pertama kalinya*, Uni Soviet yang semakin melemah dan Amerika Serikat menyaksikan sebuah konflik antar tetangga dekat, yang mendorong Dewan Keamanan PBB memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer untuk memukul mundur pasukan penyerang. Dan *untuk pertama kalinya*, Amerika Serikat mengajak negara-negara Arab untuk berkoalisi sementara menjaga jarak dengan Israel. Untuk menggagalkan usaha Bush membangun koalisi Arab anti-Irak, Saddam menawarkan diri untuk meninggalkan Kuwait jika Israel melepaskan pendudukannya atas wilayah Palestina. Untuk menghindari hubungan dan persepsi bahwa Washington memimpin kampanye melawan Islam, atau bahwa konflik yang terjadi antara blok Barat dan dunia Arab, Washington perlu mengikutsertakan negara-negara Arab dalam aliansi ini. Dan blok Arab ini bisa diajak ke dalam aliansi hanya jika Israel tidak ada dalam aliansi tersebut.

Dinamika politik baru ini—yang memposisikan Israel lebih sebagai beban daripada aset strategis bagi Amerika Serikat—menjadi hal yang paling dikhawatirkan oleh Tel Aviv, meskipun penghancuran mesin perang Saddam Hussein sangat menguntungkan Israel. Yang membuat sangat Israel marah adalah Amerika Serikat dan Inggris Raya menggunakan janji resolusi konflik Arab-Israel sebagai umpan untuk meyakinkan negara Arab agar bergabung ke dalam aliansi anti-Irak. Bahkan William Waldegrave, menteri negara di Kantor Luar Negeri Inggris, memberikan pernyataan di Parlemen bahwa, dalam tatanan baru Timur Tengah, posisi Israel tidak lagi penting. Waldegrave berbicara di *House of Common* bahwa Amerika Serikat harus memahami bahwa aliansi strategis dengan Israel "tidak lagi berguna jika tidak bisa digunakan dalam situasi krisis seperti ini. Sekarang Amerika Serikat tahu bahwa aliansi dengan Israel tidak ada gunanya."[580]

Bahkan ketika Saddam Hussein meluncurkan 45 rudal Scud ke kota Tel Aviv dan beberapa kota di Israel, sebagai bentuk ajakan perang yang jelas terhadap Israel, Amerika Serikat menyampaikan pesan pada Israel—dengan kata-kata yang setegas mungkin—bahwa Israel harus menghindar dari operasi militer Irak karena serangan balasan dari Israel akan menggagalkan aliansi anti-Irak yang sedang bangun Washington.[581] Bagi Perdana Menteri Yitzhak Rabin, hal itu merupakan keputusan yang sulit. Serangan rudal Irak berhasil menghancurkan semangat publik Israel; kehidupan negara yang bising dan bergairah berubah menjadi sebuah kota mati. Bush lalu mengutus Wakil Sekretaris Negara Lawrence Eagleburger ke Israel untuk menyakinkan para pemimpin Negara Yahudi bahwa Amerika Serikat sudah berusaha untuk menghancurkan peluncur rudal Irak.

Tetapi Pasukan Pertahanan Israel (*Israel Defense Force*) maupun Menteri Pertahanan Israel tidak mempercayai pernyataan itu. Para petinggi Israel justu merasa bahwa Washington tidak bisa dipercaya dan Amerika hanya bisa diandalkan ketika berkaitan dengan eksistensi negara Israel. Menurut Efram Halevi, mantan kepala Mossad, konflik terjadi antara Israel dan Amerika Serikat. Proteksi Washington terhadap Israel tidak efektif, dan citra bahwa Israel mengandalkan Amerika Serikat untuk perlindungan sangat sulit diterima oleh warga Israel.[582] Keputusan Yitzhak Shamir untuk menerima usulan Amerika Serikat sangat tidak populer, karena langkah ini diyakini akan merusak

580

581

582

kemampuan antisipatif dari Israel.[583] Orang-orang di sekitar Shamir bahkan percaya bahwa Amerika tidak membalas jasa Israel yang telah memungkinkan koalisi anti-Irak ini tetap berjalan dengan keputusan Israel untuk tidak membalas serangan Irak. Ketegangan antara Tel Aviv dan Washington ini semakin memperbesar kekhawatiran Israel atas perubahan yang akan dihasilkan oleh tatanan dunia baru ini.[584] Bagi Iran, perang ini memberikan bahaya sekaligus peluang. Meskipun Amerika Serikat tidak membalas jasa baik Iran di Lebanon, serangan Saddam terhadap Kuwait memberikan peluang bagi Iran untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat dapat diuntungkan dari hubungan baik dengan Teheran. Iran juga menunjukkan bahwa *Gulf Cooperation Council* (GCC) mengakui kebutuhan mereka terhadap Iran untuk mengimbangi kekuatan Irak.[585] Agresi Irak terhadap rekannya sesama negara Arab merupakan kemenangan moral bagi Teheran dengan menunjukkan kepicikan blok Arab yang sebelumnya mendukung Irak.[586]

Iran tampil dengan kekuatan melawan invasi Irak terhadap Kuwait dan menggunakan agresi Saddam ini untuk mengingatkan komunitas global bahwa Iraklah—bukan Iran—yang menjadi ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan regional.[587] Iran mengadopsi kebijakan "netralitas positif", dengan beroposisi terhadap Irak dan menolak membantu Saddam, lalu pada saat yang sama tetap berada di luar koalisi anti-Irak yang dikomandoi Amerika Serikat. Tetapi kebijakan "netraliats positif" ini pada intinya merupakan kebijakan pro Amerika, meskipun Iran mengkritisi secara terbuka langkah Amerika yang mencari alasan untuk mendapatkan alibi bagi kekuatan militernya di Teluk Persia—kekhawatiran yang Iran rasakan sejak rezim Shah.[588] "Irak bahkan datang dan merayu agar kami membantu, tapi kami menegaskan bahwa kami berada pada posisi netral dalam perang, yang pada kenyataannya adalah kebijakan melawan Irak." Mahmoud Vaezi menjelaskan, saat itu menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Iran.[589]

Secara diam-diam, Iran kemudian berkomunikasi dengan Amerika Serikat untuk menghindari kesalahpahaman, dan mengizinkan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk melintasi wilayah udara Iran sekaligus menolak permintaan bantuan dari Irak. Iran juga melakukan kontrol terhadap masalah pengungsi (jutaan warga Irak melarikan diri ke Iran dan Turki setelah perang berakhir). Iran menolak untuk mengembalikan jet Irak yang pernah diterbangkan ke Iran untuk diamankan, dan barangkali yang paling penting, adalah untuk menahan bantuan atas komunitas Syiah Irak yang memberontak Saddam Hussein pada akhir peperangan. Langkah ini membuat perpecahan Irak terhindari tidak menjadi perang warga sipil-sektarian. Rangkaian peristiwa ini bahkan membuat Iran mendapatkan pujian dari Sekretaris Negara Amerika Serikat James Baker.[590]

Teman menjadi Musuh

583
584
585
586
587
588
589
590

Situasi keamanan di Timur Tengah telah berubah secara dramatis sebagai akibat dari Perang Teluk Persia dan disintegrasi Uni Soviet pada 31 Desember 1991—yang secara efektif mengakhiri masa Perang Dingin. Ketika sistem tatanan global berubah dari *bipolar* menjadi *unipolar* yang dipimpin Amerika Serikat, wilayah Timur Tengah bergerak ke arah yang berbeda. Di tengah gemuruh perubahan ini, Iran dan Israel muncul sebagai dua negara terkuat di Timur Tengah yang membentuk situasi bipolar (di internal wilayah Timur Tengah, *pen.*). Ketika berbagai kekuatan dunia muncul dan runtuh, maka berbagai aliansi terbentuk dan permusuhan-permusuhan baru diciptakan.

Hilangnya Uni Soviet di wilayah perbatasan utara Iran membuat hubungan Teheran-Moskow membaik.[591] Didorong oleh kekhawatiran atas manuver Washington untuk menyerang Iran sebagai akibat dari berakhirnya Perang Dingin, Iran memprioritaskan untuk membangun hubungan dengan Moskow. Rusia tidak lagi menjadi sebuah ancaman tetapi seorang teman.[592] Tetapi di Afghanistan, keruntuhan Soviet memberikan bahaya baru bagi Iran. Penarikan pasukan Uni Soviet membuat Afghanistan berada dalam situasi kekosongan kekuasaan yang kemudian diperebutkan oleh berbagai faksi yang sedang berkonflik, yang justru melakukan perampokan terhadap negara dan membawa kesengsaraan sebagaimana yang dibawa oleh pendudukan Soviet. Pada pertengahan 1990-an, kekosongan kekuasaan ini kemudian diisi oleh kelompok Taliban, yang didukung oleh Pakistan dan Arab Saudi. Kelompok Taliban ini menjadi surga bagi munculnya kelompok al Qaeda. Kelompok fundamentalis Sunni ini sangat membenci Iran, satu hal yang menjadi catatan bagi Tel Aviv dan Washington.[593] Sejak awal, pemimpin al Qaeda menyatakan bahwa dunai Islam menghadapi tiga ancaman besar; Kristen, Yahudi, dan Syiah.[594] Karena Taliban dan al Qaeda memberikan ancaman militer dan ideologis, Iran kemudian memperpanjang dukungan mereka terhadap kelompok anti-Taliban sepanjang dekade 1990. Pada akhir dekade 1990, ancaman dari Afghanistan tidak lagi bersifat teoritis, ketika pasukan Taliban mengeksekusi 11 diplomat Iran di sebelah utara Afghan kota Mazar-e Sharif. Peristiwa hampir membawa Iran dan Taliban ke dalam peperangan.

Tetapi ketika ancaman Uni Soviet mereda, ancaman dari Amerika semakin berbahaya. Dalam perang dengan Irak, Amerika Serikat menjadi kekuatan terbesar di Teluk Persia—wilayah perairan yang secara tradisional dianggap sebagai bagian dari 'halaman belakang' Iran. Amerika saat ini berada di dalam wilayah pengaruh Iran yang kekuatan pasukannya mampu menggulingkan rezim di Teheran.[595] "Kekuatan militer Amerika memandang Iran sebagai ancaman yang lebih berbahaya bahkan daripada Israel," Mohammad Reza Tajik, seorang penasihat mantan Presiden Iran Mohammad Khatami, menjelaskan. "Hal ini memberikan pengaruh besar pada pandangan kami. Amerika Serikat menjual lebih banyak senjata pada negara Arab sebagai kompensasi dan Amerika menjadi kekuatan dominan di Teluk Persia. Akibatnya, Iran berada di bawah ancaman langsung Amerika Serikat."[596] Program persenjataan Iran—yang menurut ilmuwan Inggris Anoushiravan Ehteshami dan Raymond Hinnebusch merupakan persenjataan paling

591

592

593

594

595

596

sederhana dan bersifat defensif dan hanya sepersekian persen dari total belanja yang dihabiskan Shah—merupakan bagian dari respon terhadap ancaman Amerika Serikat.[597]

Di sisi lain, Irak tetap menjadi ancaman utama bagi Iran, terlepas dari kekalahannya di tangan pasukan militer Amerika Serikat. Meskipun pasukannya sangat lemah, Irak tetap dipandang sebagai satu-satunya negara di regional yang mampu mengancam integritas teritorial Iran.[598] "Saya tidak pernah percaya bahwa Irak akan melewatkan sebuah peluang untuk menghancurkan Iran. Dan mereka memberi saya setiap alasan untuk semakin mempercayai hal ini," Duta Besar Javad Zarif, yang memimpin negosiasi Iran dengan Irak baik selama dan pasca perang Iran-Irak, menjelaskan.[599] Efek psikologis destruktif dari perang Iran-Irak dan berlanjutnya kekuasaan Saddam Hussein di Baghdad memaksa Iran untuk fokus pada Irak sebagai sebuah ancaman militer. Beberapa ahli strategi militer in Iran dan Irak percaya bahwa konfrontasi ini tidak dapat dihindari, dengan penggunaan senjata pemusnah massal sejak awal mula peperangan.[600] "Kami paham bahwa selama Saddam Hussein berkuasa, dia akan terus mencari cara untuk balas dendam," Wakil Menteri Pertahanan Mahmoud Vaezi berbicara.[601] Baik sekutu perang Iran dan Irak tetap berencana untuk saling serang satu sama lain, dan program persenjataan Iran sepanjang dekade 1990 terutama ditujukan untuk menghadapi ancaman Irak, satu hal yang tidak luput dari pantauan para pejabat Israel.

Perang Iran-Irak mengungkapkan kerentanan Iran atas serangan rudal balistik, sebab Irak dengan mudah mampu menjadikan ibu kota Iran sebagai sasaran tembak rudal Scud dari daerah pedalaman Irak sekalipun. Untuk mengatasi persoalan ini, Iran memulai program ambisius untuk mengembangkan teknologi rudal jarak jauh, sebagaimana yang ditemukan faktanya oleh intelijen Israel pada akhir tahun 1994.[602] Segera setelah Perang Teluk Persia, Iran mulai mengembangkan program rudal balistik di wilayah negara Korea Utara, Nodong-I. Rudal yang dinamai *The Shahab III* ini dapat menempuh jarak 900 mil dan dapat menjangkau Israel. Iran tidak berhasil melakukan uji-coba rudal ini hingga tahun 1999, meskipun, menurut sumber dari Israel, perlu beberapa tahun lagi untuk menjadikan rudal tersebut dapat berfungsi penuh.[603] Terlepas dari daya jangkau rudal ini, Teheran hanya memiliki pertimbangan defensif. Menurut Mahmoud Sariolghalam, penasihat di lembaga *Iran National Security Advisor* Hassan Rowhani; "Persepsi ini muncul karena Iran tidak memiliki satu pun rekan dalam hal keamanan wilayah. Iran menanggung tugas untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pasca perang dengan Irak, Iran tidak pernah memiliki strategi ofensif terhadap negara manapun. Iran selalu berposisi defensif. Para pemimpin Iran sudah belajar banyak tentang cara agar tidak terlibat dalam perang. Kami sangat paham tentang biaya politik, ekonomi, dan sosial dalam suatu keterlibatan peperangan, maka kebijakan Iran adalah strategi defensif. Rudal Shahab dan senjata lainnya merupakan sebuah mekanisme untuk mempertahankan kemampuan antisipatif."[604]

597

598

599

600

601

602

603

604

Dalam kurun waktu ini, Iran juga pelan-pelan memulai kembali program energi nuklir Shah. Ayatollah Khomeini telah menghentikan program ini, dengan alasan bahwa senjata nuklir tidak Islami.[605] Program nuklir Iran—yang masih dalam tahap paling awal—kekurangan bahan uranium dan keterampilan untuk mengembangkan senjata nuklir—bahkan jika seseorang berasumsi bahwa persenjataan merupakan tujuan Iran. Laporan komprehensif dari intelijen Amerika Serikat tahun 2005 mengungkapkan bahwa Iran mungkin saja mampu mengolah bahan utama untuk senjata nuklir tidak lebih dari tahun 2015. [606] (Program nuklir Iran mengalami percepatan pada akhir dekade 1990-an, dan setelah dua setengah tahun inspeksi yang menggangu dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA) tidak menemukan bukti apapun tentang program nuklir Iran, tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa program Iran ini sepenuhnya untuk kepentingan perdamaian.[607])

Meskipun program rudal Iran kemudian membuat Israel ada dalam jangkauannya, Teheran tetap menganggap Israel bukan sebagai ancaman dan seorang musuh yang jaraknya jauh, seperti yang terjadi pada dekade 1980-an. Iran tidak khawatir dengan tujuan manuver militer Negara Yahudi, meskipun kemampuan militer Israel—termasuk gudang senjata rudal dan pesawat tempur F-15, belum termasuk ratusan rudal—terus berkembang.[608] "Ada banyak retorika Iran yang menyerang Israel, tetapi Iran tidak pernah benar-benar memandang Israel sebagai ancaman," seorang pemikir politik terkemuka Iran menjelaskan.[609]

Kemunduran yang dialami Iran selama perang Iran-Irak memaksa Iran untuk memoderasi ambisi politik. Iran kemudian memandang bahwa wilayah keamanannya hanya di Laut Kaspian dan Teluk Persia, bukan seluruh wilayah blok Arab. Hal ini membuat Israel berada di luar wilayah pengaruh Iran sebagaimana yang didefinisikan Iran sendiri. "Saya mengikuti setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin Irak. Saya mengikuti setiap pernyataan yang dibuat pemimpin Amerika karena saya sadar bahwa mereka ada dalam wilayah keamanan kami. Saya tidak perlu memperhitungkan Israel dalam konteks wilayah keamanan nasional kami."[610] Israel lebih menjadi ancaman politik bagi kepentingan dan pengaruh Iran di regional daripada menjadi ancaman militer.[611] "Israel selalu menjadi negara yang akan berusaha mengganggu posisi Iran. setelah Uni Soviet runtuh, sebagian kalangan merasa bahwa Israel akan berusaha membuat sebuah basis di republik baru di Asia tengah yang beroposisi terhadap Iran. Awalnya, Teheran khawatir bahwa Armenia akan memainkan peran ini, tetapi kemudian muncul Azerbaijan," Ali Akbar Alavi Tabar, reformis terkemuka Iran, memberikan keterangan.[612] Iran berpandangan bahwa permainan Israel di negara-negara Asia tengah, yang ditujukan untuk mengantisipasi penyebaran pengaruh Iran ke wilayah utara, bermakna bahwaTel Aviv telah menaikkan taruhan.[613]

605
606
607
608
609
610
611
612
613

Keamanan di Halaman Belakang Iran

Kekalahan Irak dan kebutuhan untuk menciptakan sebuah situasi pasca-Saddam di Timur Tengah merupakan peluang besar bagi Iran untuk mendapatkan kembali peran yang pernah hilang sebagai akibat dari revolusi dan kerusakan pasca perang dengan Irak. Dengan keyakinan bahwa kapasitas dan kekuatannya memang ditakdirkan untuk menjadi negara terdepan di Teluk Persia, Teheran memiliki banyak keuntungan dan sedikit kerugian dari setiap perubahan di tatanan regional.[614] Jalan menuju target ini sudah jelas—memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan negara anggota GCC. Kebijakan "netralitas positif" Iran mendapatkan sambutan baik dari raja-raja Arab di Teluk Persia. Bahkan Arab Saudi—yang disebut Khomeini tiga tahun sebelumnya sebagai musuh Islam—mengakui sikap pragmatis Iran ini pada tahun 1991 dan memperpanjang undangan kepada Rafsanjani untuk mengunjungi Arab Saudi. Orang-orang di sekitar Rafsanjani berkesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan anti *status-quo* dan kekakuan ideologis tidak akan membuat Iran lebih dekat dengan tujuan-tujuan geopolitiknya. Hanya satu bulan setelah berakhirnya Perang Teluk Persia, Iran dan Arab Saudi menormalisasi hubungan mereka, dengan isyarat bahwa Iran pasca-Khomeini telah mengabaikan semangat revolusinya.[615] Dalam pandangan beberapa ahli, kebijakan Teheran yang bertentangan dengan titah-titah Khomeini merupakan isyarat yang jelas bahwa nasionalisme telah mengalahkan ideologi dalam perumusan kebijakan di Iran.[616]

Rafsanjani melengkapi manuvernya terhadap negara-negara Arab dengan kebijakan "pembangunan dulu, persenjataan kemudian". Iran secara signifikan mengurangi belanja senjatanya. Kekuatan pasukannya terjun bebas dari 654,000 orang pasukan pada 1988 menjadi rata-rata 480,000 orang pasukan antara periode 1990-1991, dan pengeluaran militernya turun dari 9,9 milyar dolar pada 1990 menjadi 5,3 milyar dolar pada 1995. Hal ini bukanlah bentuk demobilisasi terhadap sebuah perang; ini merupakan keputusan strategis yang dibuat meskipun tidak ada kesepakatan damai antara Iran dan Irak. Akibatnya, kekuatan militer Iran hanya sedikit lebih besar dari pada Irak pasca kekalahan Saddam di Peran Teluk Persia. Meskipun orientasi baru Iran ini tidak lepas dari catatan pengambil keputusan di Washington, para pejabat di Washington gagal mengapresiasi sikap pragmatis ini secara utuh.[617] Setelah mendapatkan basis di Teluk Persia, pemerintahan Bush paham bahwa kehadiran pasukan militernya di wilayah tersebut bisa bertahan selama negara-negara GCC membutuhkan Washington untuk melindungi mereka dari Iran dan Iran. Ketika hubungan GCC dengan Iran membaik, maka posisi Amerika di Teluk Persia akan terganggu.[618]

Tetapi situasi ini tidak menghentikan langkah Teheran untuk mendapatkan peran utama di regional. Para pemimpin Iran merasa bahwa sudah waktunya bagi Washington untuk mengakui kekuatan Iran dan menerima Iran sebagai pemimpin regional. "Saat itu adalah waktu yang tepat bagi Iran untuk mendapatkan kembali posisi tersebut. Situasi

614

615

616

617

618

yang ada cenderung menguntungkan kami," Alavi Tabar menjelaskan.[619] Pada malam kekalahan Irak, Rafsanjani menyatakan: "Hanya ada satu kekuatan yang dapat mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Teluk Persia, dan kekuatan itu adalah Iran."[620] Iran mendekati negara-negara GCC dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur keamanan yang inklusif di Teluk Persia yang akan membuat GCC tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.

Iran sudah memimpikan adanya peluang untuk menciptakan situasi seperti itu pada dekade 1980-an. Atas desakan Iran, Resolusi 598 Dewan Keamanan PBB mendorong penyelesaian perang Iran-Irak, termasuk ketentuan yang menuntut PBB untuk berkonsultasi dengan negara-negara di regional agar meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah itu. Dalam konteks resolusi ini, Iran menekankan konsep *kemandirian* dan *non-intervensi* dari kekuatan-kekuatan eksternal, yang tercantum dalam piagam GCC, untuk meyakinkan negara Arab bahwa keamanan regional harus menjadi tanggungjawab negara-negara di regional saja—sebagaimana yang sudah dilakukan Iran di bawah rezim Shah. Iran khususnya memberikan perhatian pada langkah Mesir dan Syria—GCC+2—yang akan menciptakan zona keamanan Teluk Persia "Arab" dengan memasukkan Mesir dan Syria dalam rencana keamaan regional sekaligus mengeluarkan Iran. Sebagaimana rezim Nasser, Mesir di bawah presiden Hosni Mobarak mencari peluang untuk melakukan penetrasi ke Teluk Persia. "Negara-negara Teluk ini tidak mau bergantung lagi pada Irak untuk mengimbangi Iran, maka kami berpikir bahwa mereka sedang mencari negara Arab lainnya sebagai pengimbang, dalam kata lain yaitu Mesir dan Syria, yang akan mengimbangi Iran dalam konflik non-strategis," Nabil Fahmi, duta besar Mesir untuk Amerika Serikat, menjelaskan.[621]

Meskipun begitu, Amerika memiliki pandangan yang berbeda. Karena telah berhasil membela Arab dari serangan Saddam Hussein, negara anggota GCC merasa berhutang budi kepada Amerika Serikat dan akan mempertimbangkan keinginan Washington.[622] Tekanan dari Amerika membuat negara-anggota GCC menghadapi dua pilihan—menciptakan sebuah zona keamanan di kawasan Timur Tengah dengan Iran atau sebuah tatanan dunia Arab dengan Amerika Serikat. Dengan menawarkan kesepakatan keamanan bilateral kepada negara GCC, Washington telah menciptakan rencana keamanan bersama di Teluk Persia sekaligus mengeluarkan Iran dari proses pengambilan keputusan di regional. Akhirnya negara anggota GCC menerima kesepakatan bilateral ini, dan bulan madu Arab dengan Iran secara efektif berakhir.[623] Iran segera sadar bahwa baik Washington maupun Israel tidak ingin Iran memiliki peran di regional. Tetapi Israel harus menyelesaikan perselisihannya terlebih dahulu dengan Amerika.

Perselisihan Amerika-Israel

Sistem dunia unipolar membuat berbagai asumsi keamanan Israel mulai dipertanyakan. Kekalahan blok timur (Irak) dan hilangnya ancaman dari Uni Soviet tentu saja membuat

619

620

621

622

623

keamanan wilayah Israel meningkat. Seluruh ancaman militer konvensional yang membahayakan Israel hampir tidak ada.[624] Pergeseran geopolitik yang monumental ini meningkatkan keamanan Israel dalam tiga aspek. *Pertama*, situasi ini mengakhiri dukungan militer Moskow terhadap musuh-musuh Israel dari negara Arab, khususnya Syria, yang secara efektif menghapuskan ancaman militer dari blok Arab. Blok Arab tidak lagi memiliki kekuatan *super power*. Yang paling penting, Irak tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Israel.[625] "Tidak ada lagi kekuatan di blok timur, sebuah istilah yang biasa mereka gunakan," Ehud Yaari dari televisi *Channel 2* menjelaskan.[626] Yitzhak Rabin, yang menjadi perdana menteri Israel pada 1992, menyatakan berbagai implikasi dari perkembangan ini terhadap Israel sebagai berikut; "Permusuhan negara-negara Arab terhadap Israel tidak bisa lagi bersandar pada kekuatan Uni Soviet yang melindungi mereka pada masa lalu, baik secara militer politik atau ekonomi."[627] Rusia juga telah merubah sikap politiknya terhadap konflik Israel dan Palestina, yang membuat Tel Aviv sangat senang.

Kedua, kejatuhan komunisme membuka pintu bagi jutaan warga Yahudi yang tinggal di Uni Soviet. Israel—yang selalu memberikan perhatian atas perang demografis melawan warga Palestina—menyambut kedatangan rombongan warga Yahudi Rusia sebagai perlawanan terhadap warga Palestina, yang tingkat kelahirannya lebih tinggi daripada penduduk Israel.[628] Hanya dalam beberapa tahun saja, lebih dari satu juta warga Yahudi dari Uni Soviet bermigrasi ke Israel.[629] *Ketiga*, dengan menyerang Kuwait, Saddam Hussein telah menghancurkan citra Pan-Arabisme sebagai kekuatan politik dan ideologis di dunia Arab. "Perang ini secara politik menunjukkan bahwa Pan-Arabisme merupakan sebuah mitos," Keith Weissman dari *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) berkomentar.[630]

Setelah ancaman militer konvensional hilang, Israel kemudian fokus menghadapi ancaman baru; ancaman internal yang datang dari perlawanan warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel, penyebaran senjata pemusnah massal, dan tantangan terhadap hubungan khusus Israel dengan Washington.[631] Ancaman yang paling mendesak adalah perlawanan warga Palestina—*Intifada*. Israel dikagetkan dengan kemampuan pejuang Palestina untuk melanjutkan perlawanan dalam jangka waktu yang lama (Intifada terjadi pada bulan Desember 1987 dan terus berlangsung paling tidak hingga terjadinya Perang Teluk pada 1991—meskipun ada penurunan intensitas secara bertahap. "Intifada ini cukup mengganggu masyarakat. Saya pikir Intifada ini telah menggoncang rakyat yang berada di pusat, bahwa sesuatu harus dilakukan untuk merubah dinamika interaksi antara Israel-Palestina," Dan Kurtzer Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel berkomentar.[632] Biaya untuk aksi pendudukan sudah terlalu tinggi, dan disintegrasi di internal masyarakat Palestina sangat berbahaya bagi mereka sendiri. Dengan melakukan aksi pendudukan,

624
625
626
627
628
629
630
631
632

Israel tentu saja bertanggung jawab terhadap permasalahan wilayah warga Palestina. Menurut Yaari, Palestina telah lumpuh di hadapan pasukan militer Israel, hidup di dalam kemiskinan dan disintegrasi sosial.[633] (Dalam sebuah pembicaraan antara utusan Israel dan Palestina di Norwegia yang menghasilkan perjanjian Oslo, kepala negosiasi Israel, Uri Savir, berkata kepada utusan Palestina Abu Ala bahwa "Aksi pendudukan telah merusak masa muda kami. Kami ingin membebaskan diri kami dari aksi tersebut.")[634]

Tantangan lainnya adalah mempertahankan hubungan khusus Israel dengan Washington. Setiap pergeseran di tingkat regional dapat mengganggu signifikansi strategis Negara Yahudi karena posisinya sudah sangat menguntungkan. Selama era Perang Dingin, Israel memainkan peran strategis sebagai benteng terluar pertahanan blok Barat di wilayah Timur Tengah yang terancam oleh penetrasi Uni Soviet. Tetapi dengan keruntuhan Uni Soviet, sementara hubungan Amerika dengan negara Arab berada pada puncaknya, maka aliansi dengan Israel menjadi tidak berguna lagi bagi Washington. Pemerintahan Bush berjanji untuk membahas isu Palestina segera setelah Perang Teluk Persia, dan penolakan pemerintah Shamir untuk melakukan kompromi teritorial tidak memperbaiki posisi Israel di hadapan Amerika. Perang Teluk menunjukkan kepada Israel bahwa keruntuhan Uni Soviet telah memberikan Washington begitu banyak kelonggaran di wilayah negara-negara Arab. Akibatnya kebutuhan atas bantuan Israel sebagai sekutu pro Barat yang dapat diandalkan dalam keruhnya pusaran politik Timur Tengah mulai berkurang. Dari berbagai sisi keberadaan Israel bahkan menjadi beban bagi Washington.[635]

Dengan membaiknya hubungan Amerika Serikat dengan negara Arab, sebuah terobosan dalam hubungan Amerika dan Iran akan menghapuskan signifikansi strategis Israel yang masih tersisa. Tidak seperti Israel, posisi Iran sangat strategis yang berada di antara dua cadangan minyak dan gas alam terbesar; Teluk Persia dan Laut Kaspia. Iran berbatasan dengan negara-negara di Asia tengah yang baru saja bebas tetapi terkunci-daratan, yang memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar dan berjanji akan menjadi pasar terbesar bagi produk-produk Barat. Dengan populasi penduduk lebih dari 60 juta orang, Iran juga menjadi pasar yang 10 kali lebih besar dari Israel. Ketika Perang Dingn berakhir, Negara Yahudi menghadapi persoalan tentang bagaimana caranya untuk membuktikan manfaat startegis Israel bagi Amerika Serikat.[636]

Keinginan Washington untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah pasca Perang Teluk membuat hubungan Amerika Serikat dengan Israel semakin memburuk. Amerika Serikat sedang berada pada puncak kekuatannya dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika akan menggunakan langkah diplomatik untuk menyelesaikan isu Israel-Palestina. “Iniah saatnya untuk memanfaatkan momentum karena ada sesuatu yang sangat potensial mampu menggerakkan negara Arab," Sekretaris Negara, Baker, berkomentar. Baker optimis bahwa sikap baru dari negara Arab dapat meyakinkan Israel untuk memilih jalan damai.[637] Tetapi Baker kemudian mendapatkan kejutan. Shamir dan pemerintahan Israel tidak berhasil diyakinkan, juga tidak tertarik dengan kepercayaan diri Washington atas perdamaian di Timur Tengah. Israel menduga bahwa hal ini didorong oleh

633

634

635

636

637

hutang Budi pemerintahan Bush terhadap Syria dan Mesir atas dukungan mereka di Perang Teluk Persia. "Kami merasa bahwa ada bahaya yang terkandung dalam rencana ini. Amerika Serikat bisa saja merasa perlu untuk berpihak ke negara Arab. Kondisi damai itu tidak akan dapat diterima oleh Israel."[638]

Meskipun Shamir menghadapi gerakan oposisi di Israel, khususnya dari Partai Buruh Rabin—yang menentang prinsip-prinsip kunci dari ajaran Zionisme neo Revisionis dengan beralasan bahwa mimpi Israel Raya (Eretz Israel) harus segera dihentikan dan bahwa tidak ada lagi solusi militer dalam penyelesaian masalah Palestina—Shamir tetap melakukan penentangan atas tekanan Washington. Tetapi Israel hanya memiliki sedikit kartu untuk dimainkan kecuali menggagalkan usaha perdamaian Washington dan menciptakan situasi baru. Sejak 1989, pemerintahan Bush berdebat dengan pemerintahan Shamir terkait pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Meskipun Shamir telah meyakinkan Bush bahwa kegiatan ini akan dihentikan, Israel tidak menepati janjinya sebagaimana yang diakui Baker. Perselisihan antara Israel dan Amerika seringkali memanas. Pada satu kesempatan Baker bahkan mengusir Wakil Menteri Luar Negeri Benjamin Netanyahu dari Departemen Luar Negeri AS setelah Netanyahu menuduh Amerika Serikat di hadapan publik telah "membangun kebijakannya di atas fondasi kebohongan dan distorsi."[639]

Pada Mei 1991, Zalman Shoval, duta besar Israel untuk Amerika Serikat mengatakan Israel akan segera meminta jaminan pinjaman kepada Amerika sebesar 10 milyar dolar untuk membantu pembangunan pemukiman bagi imigran Yahudi dari Soviet. Meskipun permintaan ini menandai adanya peningkatan kebutuhan bantuan Israel, permintaan ini juga memungkinkan Amerika Serikat untuk mengaitkan bantuan Amerika pada kebijakan pemukiman Israel. Pada September 1991, Israel secara resmi mengajukan permintaan ini, hanya satu bulan sebelum prinsip perdamaian yang didukung Amerika Serikat dijadwalkan akan diselenggarakan di kota Madrid. Bush menolak permintaan Israel. Dia meminta Kongres untuk menunda pembahasan atas permintaan Israel ini agar tidak mengganggu usaha Baker dalam konferensi di Madrid tersebut. Setelah berbulan-bulan melakukan perdebatan terkait isu ini dengan Israel dan kelompok pro Israel di Washington—kurang dari satu tahun sebelum pemilihan presiden tahun 1992—Baker berbicara pada Shoval pada 24 Januari 1992 bahwa Amerika menerima pemukiman yang sudah ada tetapi jaminan pinjaman akan diberikan hanya jika tidak ada pemukiman baru yang dibangun. Bush kemudian mengklarifikasi posisinya dengan bahasa yang sangat jelas pada bulan Maret. "Pilihannya adalah Israel. Mereka dapat menentukan apakah mereka akan mengambil tindakan yang akan didukung oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendapatkan jaminan pinjaman ini atau tidak." Tetapi Israel menolak untuk menerima syarat dari Amerika ini dan pada 17 Maret Bush secara resmi menolak permintaan pinjaman Israel atas jaminan pinjaman ini.[640] (Setelah Rabin terpilih menjadi perdana menteri, pemerintahan Bush setuju untuk memberikan jaminan pinjaman kepada Israel dengan syarat yang ringan.)

Persoalan lainnya adalah negosiasi dengan PLO. Meskipun Amerika Serikat tidak ingin memaafkan pemimpin PLO Yasser Arafat atas dukungannya terhadap Saddam Hussein selama Perang Teluk, Amerika Serikat paham bahwa tanpa Arafat proses

638

639

640

perdamaian tidak akan bisa dimulai. Di sisi lain Shamir menggunakan prinsip untuk tidak bernegosiasi dengan teroris sebagai pembenaran untuk menolak usaha perdamaian Washington. Dalam sebuah percakapan telepon yang memanas antara Bush dan Shamir, Bush mengklarifikasi bahwa Amerika Serikat "tidak berusaha untuk memaksa Israel untuk bernegosiasi dengan PLO. Tapi kami berharap tidak ada lagi penundaan untuk memberikan respon kepada kami. Jika anda memberi kami respon positif, maka Israel dan Amerika Serikat dapat bergerak ke depan bersama-sama. Jika Anda tidak merespon, kami akan menganggap bahwa Anda tidak ingin maju ke depan. Saya baru saja membaca sebuah cerita yang mengutip Anda tentang sebuah konfrontasi dengan Amerika Serikat. Jika anda menginginkannya, baiklah." Konfrontasi antara Israel dan Amerika terangkum dalam pernyataan kasar Baker kepada Israel secara terbuka," Jika Anda serius untuk berdamai, hubungi kami." Jelas sekali bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel sedang memburuk.[641]

Pada bulan Oktober 1991, Shamir berusaha menghindar, tetapi Washington kemudian memaksa Israel hadir dalam pertemuan perdamaian di Madrid. Shamir menawarkan satu syarat; menghindari satu kondisi yang memungkinkan komunitas internasional memaksa Israel untuk kembali pada batas-batas teritorial tahun 1967. Pemimpin partai Likud ini meminta agar pertemuan itu tidak merumuskan keputusan permanen yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Dengan kata lain pertemuan ini bukanlah forum untuk membicarakan perkembangan proses negosiasi. Pertemuan ini hanya untuk mengawali pembicaraan, pada proses akhir negosiasi, Israel akan mengakui apapun hasil dari proses negosiasi.[642] Menurut Kurtzer, yang pada akhirnya mendorong Shamir pergi ke Madrid adalah usaha Washington untuk meyakinkan pemimpin Likud bahwa:

> Posisi Israel sudah berubah menjadi lebih baik pada tiga level; bahwa risiko_bagi Israel untuk_mengikuti proses damai sangat kecil. *Pertama*, pada level global terkait keruntuhan Uni Soviet, yang sangat berkaitan dengan pertemuan di Madrid. *Kedua*, pergolakan regional, bukan hanya kekalahan Irak dalam perang, tetapi proses mobilisasi yang melibatkan negara Arab yang dipersiapkan untuk bergabung ke dalam kekuatan kolonial Barat untuk memukul mundur serangan dari sebuah negara Arab. *Ketiga*, faktor-faktor domestik. Intifada pertama sudah berlangsung selama tiga atau empat tahun. Para pejuang Palestina belum mampu mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka sedang berusaha menerjemahkan kegagalan strategis para militan ke dalam sebuah proses politik, dan Israel, meskipun berhasil menghentikan berbagai aksi kekerasan dalan rentang waktu tersebut, juga gagal menerjemahkan kesuksesan itu ke menjadi sebuah kemenangan politik. [643]

Bush menegaskan bahwa seluruh rakyat di regional memiliki aspirasi terhadap formasi tatanan baru Timur Tengah, dan Baker secara ekstensif telah berusaha meyakinkan negara-negara regional agar sama-sama memiliki satu kepentingan dalam proses ini maka untuk menghindari proses ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kesuksesan Washington

641

642

643

untuk memastikan keikutsertaan Israel, Syria, dan Palestina menunjukkan kekuatan posisi barunya di Timur Tengah. Secara substansial setiap negara di regional Timur Tengah mendapatkan undangan kecuali satu negara—Iran.[644]

Mencipta Perdamaian di Madrid

Konferensi di Madrid merupakan perayaan atas posisi Amerika yang baru di tingkat global sebagai satu-satunya negara adidaya. Meskipun Uni Soviet masih memiliki waktu beberapa bulan sebelum keruntuhannya, tetapi keputusan sudah ditetapkan. Kekuatan-kekuatan besar mendominasi konferensi, tapi sejak awal sudah jelas sekali siapa yang menyulut perdebatan. Konferensi ini diselenggarakan pada 30 Oktober 1991 dengan dua jalur pembicaraan yang dilakukan secara bersama, jalur bilateral dan multirateral. Jalur bilateral berisi pembicaraan-langsung yang pertama antara Israel dan tetangga-tetangga terdekatnya dari negara Arab, yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan mencari kesepakatan perdamaian antara Israel dengan tetangga Arabnya. Jalur multilateral bertujuan untuk membicarakan masa depan Timur Tengah. Pembicaraan ini, yang dilakukan di Moskow pada 1992, difokuskan pada berbagai isu di Timur Tengah—air, lingkungan, kontrol senjata, pengungsi, ekonomi, dan paling penting, keamanan regional.

Undangan acara ini diberikan kepada banyak negara. Peserta utamanya adalah pemerintahan Israel, Syria, Lebanon, dan Yordania. (Sesuai dengan permintaan Israel, Palestina tidak bisa mengutus perwakilan atas nama mereka sendiri, tetapi bagi pihak yang bukan berasal dari PLO bisa menghadiri konferensi tersebut sebagai bagian dari gabungan perwakilan Yordania-Palestina.) Mesir, negara-negara Eropa, dan negara-negara GCC juga diundang sebagai peserta konferensi, sementara Amerika Serika diminta untuk mengutus seorang peninjau yang mewakili sekretaris-jenderal. Meskipun ada 43 negara yang hadir dalam pembicaraan multilateral, hanya ada 15 negara yang berasal dari regional Timur Tengah. Ketika Iran mulai menyadari bahwa ada peluang untuk dapat diterima sebagai kekuatan regional dan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di Timur Tengah, Washington menutup peluang tersebut dengan menolak untuk mengundang Iran.

Dalam berbagai hal, Washington tidak dapat menghargai kebijakan pragmatis Iran, khususnya sikap terbaru Iran terhadap Israel, ketika Rafsanjani menegaskan bahwa Iran akan menyetujui solusi appaun yang dapat diterima warga Palestina. “Kami tidak melihat kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari proses perdamaian dengan Israel,” Dennis Ross, yang saat itu menjabat koordinator urusan Timur Tengah di Gedung Putih, menjelaskan. Washington tidak menyambut baik kesiapan Iran karena citra Iran sebagai bangsa yang anti-Amerika, yang terbentuk selama satu dekade melalui ketegangan antara dua negara ini. Sebagaimana yang dinyatakan Ross: ”Beberapa citra tertentu sudah terbentuk, dan ketika citra ini terbentuk, bahkan ketika ada perilaku yang bertentangan dengan citra itu, dan jika ada citra lain yang pada saat yang sama cenderung membenarkan citra yang sudah terbentuk itu, Anda akan cenderung membenarkan perilaku yang membenarkan citra yang sudah terbentuk itu, dan Anda mengabaikan fakta-fakta yang mengarahkan Anda pada arah yang berbeda. Isyarat dari Rafsanjani cenderung

644

bertentangan dengan citra Iran, tetap mereka tetap begitu. Perilaku yang cenderung sesuai dengan citra tradisional Iran akan dianggap sebagai Iran yang sebenarnya."[645]

Kelompok lain di Washington memandang Iran pada dekade 1990-an justru lebih radikal. Kelompok ini berpendapat bahwa pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Iran Shahpour Bakhtiar di Paris pada 1991—yang diberitakan dilakukan oleh agen Iran—menunjukkan bahwa keberadaan Iran "tak tergantikan", karena pelaku pembunuhan itu terjadi ketika Iran berusaha memperbaiki hubungan dengan Washington. Setidaknya, perilaku yang nampak kontradiktif dari Iran telah membuat biaya politik untuk menjangkau Iran menjadi lebih besar.[646] Dan karena Washington tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran, maka Amerika tidak berkepentingan untuk mengundang negara yang justru akan menjadi penggangu.[647] "Hubungan kita dengan Iran cukup buruk, pada saat itu kami tidak siap untuk melibatkan Iran." Scowcroft berkomentar.[648]

Tetapi masih ada faktor lain—Iran dipandang tidak memiliki relevansi dengan isu konflik Israel-Palestina. Hubungan Iran dengan manfaatnya terhadap Palestina dianggap tidak signifikan karena keterlibatannya yang tidak begitu aktif dalam isu Palestina.[649] "Iran tidak memiliki kontribusi apapun. Iran tidak memberikan keuntungan apapun pada negara Arab, maka bagaimana mungkin Iran membantu proses perdamaian?" Scowcroft beralasan.[650] Israel juga memiliki pandangan yang sama, dan menilai bahwa Iran memiliki tawaran yang kecil terkait hal ini. "Posisi Iran tidak memiliki relevansi. Iran tidak punya pengaruh terhadap isu Palestina, tidak seperti Mesir dan negara-negara Arab, maka keterlibatannya menjadi tidak perlu," seorang diplomat Israel di PBB menjelaskan.[651] (Beberapa tahun kemudian, baik Israel dan Amerika kemudian menyalahkan pengaruh Iran terhadap isu Palestina atas gagalnya proses perdamaian).

Menurut para pengambil kebijakan di Washington, yang tidak relevan bukan posisi Iran terkait isu Israel-Palestina, tetapi waktunya yang tidak tepatnya. Sementara kelompok Baker khawatir bahwa Iran akan mengganggu proses konferensi jika Iran diundang, mereka lupa memperhitungkan kemampuan Iran untuk menjadi *penggangu* ketika tidak diundang. Dalam dunia unipolar ini, Washington tidak melihat Iran sebagai sebuah kekuatan yang diperhitungkan—kepercayaan diri Washigton berbatasan tipis dengan kesombongan mereka. Situasi ini merupakan "momentum bagi Amerika di Timur Tengah. Semuanya berjalanan sesuai dengan cara kami. Semua sistem sudah berjalan. Dan Iran merupakan masalah bagi kami, lalu apa? Kami telah memiliki segalanya." Kurtzer menjelaskan.[652]

Teheran memberikan respon keras terhadap penghinaan Washington ini—tidak mengundang pada konferensi di Madrid, *pen.* Dengan atau tanpa pengaruh terhadap Palestina, Iran menganggap dirinya sebagai kekuatan terbesar di regional dan berharap ada satu kursi baginya dalam konferensi, khususnya setelah Iran berhasil membantu membebaskan sandera warga Amerika di Lebanon dan bantuan tidak langsung terhadap

645
646
647
648
649
650
651
652

Amerika ketika memimpin aliansi untuk memerangi Irak.[653] Pertemuan Madrid kemudian tidak hanya dipandang sebagai pertemuan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, tetapi momentum pembentukan tatanan baru di Timur Tengah—Iran berharap dapat memainkan peran yang sesuai dengn keunggulan geopolitisnya. Tidak diundangnya Iran ini telah menutup peluang bagi Teheran untuk membentuk tatanan baru Timur Tengah sesuai dengan kepentingan Iran.[654]

Undangan terhadap Syria pada konferensi ini juga mengganggu aliansi Teheran-Damaskus dan membatasi peran dan akses Iran di wilayah *Levant*—sebuah kawasan strategis tempat Iran telah berinvestasi besar.[655] Ini adalah pukulan telak terhadap pengaruh dan posisi sah Iran di regional.[656] (Kekhawatiran Iran tidak berdasar. Israel—yang memberikan perhatian pada dukungan Iran terhadap Hezbollah di Lebanon dan meningkatnya kekuatan Iran pasca kekalahan Irak dalam Perang Teluk—mengundang Syria hadir di Madrid agar sepakat untuk mengeluarkan Iran dari kerangka pembicaraan sekaligus mengakhiri hubungan Syria dengan Iran.[657]) "Tindakan ini tentu saja telah menghina Iran, tidak ada keraguan mengenai anggapan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hadi Nejad-Hosseinian berkomentar.[658] Sejumlah pejabat Iran berbicara pada saya bahwa Iran ingin terlibat dalam pembicaraan dan menggunakan pengaruh serta perannya untuk menolak keberadaan Israel.[659] (Penerimaan terhadap keberadaan Israel tidak menjadi tuntutan dari peserta negara manapun.) Situasi ini sesuai dengan inisiatif Iran lainnya, karena konferensi ini diselenggarakan ketika Iran berusaha keras untuk menjadi bagian dari komunitas internasional. "Menjadi bagian dari komunitas internasional adalah salah satu tujuan Iran pada waktu itu," Siamak Namazi dari *Atieh Bahar Consulting* berkomentar.[660] Satu dekade kemudian, Iran memainkan peran penting pada konferensi di kota Bonn pasca invasi Amerika Serikat ke Afghanistan tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa Iran bersemangat untuk terlibat dalam konferensi regional semacam ini ketika mendapatkan undangan, sebagaimana yang dinyatakan oleh penasihat mantan Presiden Iran Mohammad Khatami, Mohammad Reza Tajik. "Iran akan memenuhi undangan konferensi di Madrid. Kami memiliki peran dalam konferensi Bonn terkait isu Afghanistan dan kami juga ingin melakukan hal yang sama di Madrir."[661]

Tidak diundangnya Iran pada pertemuan di Madrid merupakan momentum terakhir bagi kebijakan *detente* Rafsanjani terhadap Washington. Iran sudah menyadari bahwa modifikasi kebijakannya gagal mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pemerintahan Bush. *Pertama*, Washington memilih untuk membiarkan Saddam tetap berkuasa dan membiarkan *Iraqi Republican Guard*—pasukan militer Amerika di wilayah Teluk—untuk mengimbangi kekuatan Iran.[662] "Langkah ini sudah sesuai dengan tujuan," Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan kepala staff Sekretaris Negara, Colin Powell,

653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

menjelaskan. “Pasukan ini cukup dijaga agar tidak menjadi ancaman tetangga Irak, tetapi tetap mampu menjadi penyeimbang kekuatan Iran.”[663] *Kedua*, Washington sudah merancang sebuah arsitektur keamanan yang inklusif di Teluk Persia. “Ini adalah kesempatan pertama ketika Iran telah mengambil langkah besar, dan langkah ini tidak mendapatkan balasan setimpal,“ Namazi berkomentar. “Iran merasakan dengan jelas bahwa kebijakan isolasi tidak menguntungkan lagi bagi Iran.”[664] Langkah Rafsanjani ini membawa risiko politik domestik yang signifikan, para pejabat di sekeliling presiden Iran semakin sedikit yang ingin membayar biaya kedekatan Iran dengan Amerika Serikat. “Keinginan untuk melakukan hal positif bagi Amerika hampir meredup, karena mereka tidak pernah mendapatkan balasan. Apapun langkah positif yang dilakukan Iran, respon yang datang selalu merupakan kebijakan isolasi,” Masoud Eslami dari Kementerian Luar Negeri Iran mengeluh.[665]

Kegagalan Amerika untuk membalas sikap positif Iran—meskipun ekspektasi Teheran bisa saja terlalu dibesar-besarkan—semakin memperkuat kelompok rejeksionis di Iran, yang berpandangan bahwa Washington tidak akan pernah berhubungan dengan Iran secara sukarela. Secara perlahan, langkah Rafsanjani untuk memoderasi kebijakan luar negeri Iran dan membuatnya lebih dekat dengan blok Barat mulai runtuh.[666] Sadar bahwa Washington tidak akan memberikan peran sah kepada Iran di regional, Teheran mengambil langkah untuk melakukan sabotase terhadap kebijakan mereka.[667] Keputusan ini mendorong Iran untuk mendekat kembali kepada kelompok-kelompok di Palestina dan Lebanon yang memiliki kesamaan pandangan dengan Iran,” Ali Reza Alavi Tabar menjelaskan.[668] Isu Israel-Palestina merupakan salah satu isu yang dapat digunakan Iran untuk melemahkan Amerika Serikat. Iran mulai memilih posisi yang lebih tajam terhadap Israel dan mulai meninggalkan posisi awalnya yang mengakomodir aspirasi warga Palestina.[669] Dalam ingatannya, Ross mengakui bahwa keputusan untuk tidak mengundang Iran pada konferensi di Madrid merupakan pandangan yang terbesar dibandingkan pandangan lainnya pada waktu itu. “Saya kira wajar untuk mengatakan bahwa kami tidak melihat dengan dekat pada hal tersebut, dan terhadap apa yang sudah dilakukan Iran pada masa lalu yang harus kita lakukan. Iran hanya tidak mendapat lebih banyak perhatian.”[670]

Ketika undangan pada konferensi di Madrid semakin jelas tidak akan datang, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, memberikan lampu hijau kepada Ali Akbar Mohtashamipour, salah satu pendiri Hezbollah Lebanon yang pernah membujuk Ayatollah Khomeini untuk menentang Israel selama dekade 1980-an, untuk menyelenggarakan sebuah konferensi tandingan terhadap konferensi di Madrid.[671] Situasi ini adalah momentum distingtif, ketika Iran untuk pertama kalinya secara serius mendekati kelompok-kelompok rejeksionis Palestina, terlepas dari adanya pertentangan antara Sunni dan Syiah serta permusuhan mereka dalam perang Irak-Iran. Hanya satu tahun

663
664
665
666
667
668
669
670
671

sebelumnya, Iran telah mengurangi dukungan finansialnya terhadap Hezbollah di Lebanon.[672] Iran kemudian memimpin sebuah gerakan politik untuk menentang konferensi di Madrid, sebuah langkah yang tidak akan dilakukan Iran jika Washington mengundangnya untuk hadir dalam konferensi, sebagaimana yang dinyatakan Ruholla K. Ramazani dari Universitas Virginia, seorang pakar terkemuka tentang kebijakan luar negeri Iran.[673]

Konferensi tandingan yang diselenggarakan di Teheran ini bertepatan dengan pertemuan di Madrid dan melibatkan kelompok militan Palestina yang, sebagaimana Iran, memandang langkah mediasi yang dilakukan Amerika Serikat merupakan langkah yang bertentangan dengan kepentingan mereka.[674] Teheran kemudian meningkatkan kembali retorika penentangannya terhadap Israel dan menyalahkan pemerintahan Arab yang telah mendukung proses perdamaian melalui pengkhianatan. Iran juga memainkan kartu "rakyat Arab" untuk melemahkan pemerintahan Arab pro-Amerika. Iran tetap menahan diri untuk berkonfrontasi secara langsung dengan Israel, baik secara konvensional maupun penggunaan aksi teror. Merujuk pada sumber Israel, masih belum ditemukan aksi-aksi teroris terhadap Israel yang didalangi oleh Iran.[675] Yang membuat Iran merasa lega adalah bahwa konferensi di Madrid tidak menghasilkan terobosan baru sebagaimana yang diharapkan Washington. Sejak awal, pemerintahan Shamir (Israel) merupakan peserta yang cenderung tidak punya itikad baik dan tidak berkontribusi besar terhadap kesuksesan proses negosiasi. Ketika kegagalan negosiasi di Madrid semakin jelas, Rafsanjani berharap Washington akan mengerti bahwa perubahan regional tidak akan dapat dicapai tanpa kerjasama dengan Iran. Tetapi sebelum Rafsanjani dapat melakukan proses pendekatan pada Washington, Partai Buruh Israel, dengan mempertimbangkan berbagai konsekwensi dari tatanan baru Timur Tengah terhadap posisi strategis Tel Aviv, membuat perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Israel.

672

673

674

675

14-Jual-Beli Musuh

Kami memerlukan alat perekat baru untuk bersekutu (dengan Amerika), dan alat perekat baru itu adalah Islam radikal, dan Iran merupakan Islam radikal.
—Efraim Inbar, Begin-Sadat Center

Publik Israel sudah kelelahan ketika mereka menjalani pemilihan umum pada bulan Juni 1992. Perlawanan pejuang Palestina—Intifada—yang dimulai sejak Desember 1987 telah menimbulkan banyak korban dari Negara Yahudi.[676] Israel semakin sadar bahwa aksi pendudukan—yang dijustifikasi oleh pertimbangan keamanan—telah menjadi ancaman keamanan itu sendiri. "Aksi pendudukan tidak lagi menjadi sebuah rutinitas yang dapat kita abaikan dengan aman. Israel sudah mendapatkan peringatan dari konflik dan menginginkan perdamaian, dan kedamaian pikiran," Uri Savir menulis, yang kemudian menegosiasikan perjanjian damai Oslo dengan *Palestine Liberation Organization* (PLO).[677] Terus berselisih satu sama lain, Partai Likud dan Partai Buruh menawarkan perspektif yang berbeda terkait dilema yang dihadapi Israel. Yitzhak Shamir dan Partai Likud lebih memilih kondisi *status quo*—Palestina merupakan sebuah masalah dan membuat kesepakatan dengan mereka merupakan tindakan yang mustahil. Mereka berpandangan bahwa Israel tidak akan mendapatkan perdamaian ataupun keamanan melalui kompromi dengan negara Arab. Keamanan Israel akan terjamin dalam jangka panjang jika aksi pendudukan tetap dilakukan dan memperluas area pemukiman. Partai Likud percaya bahwa Israel akan bertahan jika mereka tetap tegas, meskipun Washington akan memprotes tindakan tersebut.

Partai Buruh berpandangan bahwa beberapa area pemukiman bisa saja ditutup. Sumber daya di pemukiman tersebut harus dialihkan ke wilayah Israel untuk memenuhi kebutuhan imigran Yahudi Soviet. Langkah ini lebih penting bagi Israel, karena ancaman utama keamanan Israel bukan lagi persoalan teritorial, tetapi persoalan demografik. Pertumbuhan penduduk Palestina dengan cepat telah melampaui pertumbuhan populasi Yahudi. Negara-negara Arab di Teluk Persia sudah mengusir ribuan pekerja Palestina sebagai balasan atas dukungan PLO terhadap Irak. Kuwait saja sudah mengusir 300,000 warga Palestina. Sebagian dari mereka kembali ke Tepi Barat dan Gaza sehingga memicu "perang kamar tidur" yang menguntungkan warga Palestina.[678]

"Kami sedang menghadapi ledakan demografis, tingkat kelahiran penduduk Palestina," Dan Meridor, seorang politisi terkemuka dari Partai Likud yang berbeda pendapat dengan partainya mengenai hal ini, menjelaskan. "Jika kita tinggal mulai dari wilayah Yordania hingga daerah pantai, dalam beberapa tahun kita bisa menyamai jumlah penduduk Palestina. Kondisi ini akan menjadi akhir dari mimpi Zionisme." Seluruh identitas ke-Yahudian Israel sedang dipertaruhkan, Israel harus menerima penduduk Palestina dan kehilangan ke-Yahudian-nya atau pergi ke Afrika Selatan dan mengorbankan

676

677

678

demokrasi.[679] Pilihan pertama akan mengakhiri proyek Zionis, sementara pilihan kedua akan mengakhiri proses demokrasi di Israel.[680]

Partai Buruh berpandangan bahwa Israel juga perlu memperbaiki hubungan buruknya dengan Amerika Serikat dengan menunjukkan sikap yang lebih fleksibel. "Proses perdamaian di Madrid sudah dilakukan dan pemerintahan Shamir jelas sekali tidak punya niat baik dengan proses ini. Kita harus menyelesaikan hubungan dengan pemerintahan Bush/Baker, yang sempat terganggu oleh kelompok Shamir/Sharon," Itamar Ranovich, penasihat Yitzhak Rabin, menjelaskan.[681] Para pemimpin Partai Buruh dengan cerdas menyadari bahwa Israel tidak bisa mempertahankan strategi yang kaku sementara lingkungan di sekitarnya mengalami perubahan radikal. Dalam konteks global yang sudah berubah, Israel harus merubah skala prioritasnya.

Pemilihan umum 1992 dalam berbagai sisi merupakan sebuah penentuan atas dua kubu yang direpresentasikan oleh Rabin dan Shamir. Sebagaimana hasil pemilu tersebut, Israeli berada di pihak Rabin. Partai Buruh memenangkan pemilu dan, untuk pertama kalinya sejak lima belas tahun terakhir, berhasil mengeluarkan Partai Likud dari kekuasaan.[682] Dengan dukungan penuh para pemilihnya, Rabin dan Peres percaya bahwa Israel mampu menghadapi bahaya Intifada dan hubungan buruknya dengan Washington menjadi sebuah peluang. Partai Buruh menyadari bahwa ancaman internal dan persoalan eksternalnya, khususnya hubungan buruk Israel dengan Washington, sangat berkaitan erat. Menyelesaikan satu persoalan tanpa menyelesaikan persoalan lainnya akan membuat kedua persoalan tersebut tak bisa diselesaikan.

Perubahan di internal Israel dan lingkungan eksternalnya ini kemudian menciptakan sebuah "dunia baru"—sebuah momentum yang menentukan bagi keamanan Israel yang membutuhkan perubahan drastis.[683] Tatanan lama sudah tidak berlaku lagi, dan Israel tidak akan memiliki masa depan dalam tatanan baru kecuali Negara Yahudi ini memiliki alasan bagi Washington untuk melanjutkan hubungan strategis.[684] Israel tidak cukup kuat untuk melawan berbagai perubahan ini—Israel tetap bersikap pasif dan menyaksikan rival-rivalnya memimpin pembentukan sebuah tatanan baru di Timur Tengah yang menguntungkan mereka, atau mereka dapat mengambil inisiatif dan membentuk Timur Tengah sesuai dengan kepentingan Israel. Meskipun begitu, dalam permainan regional ini, Israel tidak lagi berkompetisi dengan negara Arab—tetapi Iran. Israel yakin bahwa Iran—yang muncul sebagai pemenang Perang Teluk Persia, akan berusaha memaksakan kepentingannya sendiri di Timur Tengah, khususnya jika Iran berhasil membangun hubungan dengan Amerika.[685] Israel khawatir bahwa keberlanjutan fokus Washington pada Irak akan menganggu keseimbangan kekuatan regional dan membuat Iran menjadi ancaman politik—dan militer—bagi Israel.[686]Pergeseran yang terjadi secara tiba-tiba dalam pemikiran Partai Buruh "berasal dari fakta bahwa Teheran

679

680

681

682

683

684

685

686

menginginkan hegemoni regional yang juga diinginkan Israel."[687] Dalam rivalitas baru demi masa depan regional ini, Partai Butuh berpandangan bahwa apa yang menjadi keuntungan bagi Iran merupakan kerugian bagi Israel. [688]

Satu-satunya cara bagi Israel adalah dengan memimpin proses pembentukan-kembali formasi kekuatan di Timur Tengah untuk memastikan bahwa proses ini menguntungkan Negara Yahudi dan membuat Israel memiliki peran utama dalam persoalan-persoalan regional.[689] Shimon Peres menyebut desain baru regional ini dengan istilah "Timur Tengah Baru".[690] Dalam konsep ini, akan ada sebuah "komunitas regional dari berbagai bangsa, dengan sebuah pasar bersama dan sebuah lembaga sentral sebagaimana komunitas Eropa." Peres percaya bahwa jika perselisihan antara Israel dan negara Arab sudah selesai, maka hubungan ekonomi antara Israel dan negara Arab akan berkembang dan Israel akan tampil sebagai mesin ekonomi regional, yang melakukan produksi barang bagi 240 juta penduduk negara Arab.[691] Sebagai Hong Kong-nya Timur Tengah, Israel akan mencapai tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB) per kapita yang sama dengan Amerika Serikat.[692]Lalu, dengan menggeser pusat ekonomi Timur Tengah menuju Laut Merah dan Israel, wilayah Teluk Persia (dan Iran) akan kehilangan signifikansi strategisnya.[693] Partai Buruh berpandangan bahwa sebuah posisi yang tidak bisa dicapai melalui kekuatan politik atau militer—atau dengan bertahan di teritori Palestina—akan bisa dicapai melalui kekuatan ekonomi.[694]

Strategi ini menghadapi dua langkah penting dan berkaitan satu sama lain: berdamai dengan Palestina dan mencitrakan Iran kepada publik global sebagai ancaman regional. Israel sedang berada pada situasi yang kondusif untuk mencapai kesepakatan dengan negara Arab. Washington menginginkan agar Israel memilih jalan damai dan—terlepas dari Intifada—PLO sedang berada pada titik terlemahnya sejak awal kemunculannya. Ketika Partai Buruh Israel berada pada puncak kejayaannya, pemimpin PLO Yasser Arafat sedang berada pada titik nadir. Para pemimpin Palestina telah melakukan berbagai kesalahan strategis dalam beberapa bulan sebelumnya: Arafat memberikan dukungan pada invasi Saddam atas Kuwait, yang menimbulkan ketegangan tidak hanya dengan Amerika Serikat tetapi juga dengan negara-negara Arab di Teluk Persia, yang merupakan sponsor pendanaan PLO. Lalu, beberapa bulan kemudian, pemimpin Palestina mendukung sebuah gerakan kudeta Komunis yang gagal di Rusia, dengan harapan bahwa pemimpin Komunis itu nantinya akan memperbaharui dukungan terhadap perjuangan Palestina.[695]

Pada musim panas 1993, PLO hampir bubar. PLO gagal menterjemahkan kemenangan taktisnya dalam Intifada menjadi sebuah modal politik dalam konteks global. Lalu ketika aliran bantuan finansialnya berkurang, ancaman kebangkrutan tinggal menunggu waktu saja. Dengan kondisi seperti ini, PLO harus membuat kesepakatan

687
688
689
690
691
692
693
694
695

dengan Israel.[696] "Jika mereka tidak mau, kami akan menyerang mereka," Efraim Halevi, mantan kepala Mossad, menegaskan.[697] Baik Palestina dan Israel sepakat untuk melakukan perdamaian karena PLO hampir bubar: Palestina sudah terlalu lemah untuk mencari solusi alternatif lain, dan Israel terlalu kuat sehingga sebuah kesepakatan yang lebih menguntungkan Israel dapat dicapai. Partai Buruh berpandangan bahwa Israel lebih baik menyelamatkan PLO yang sedang lemah itu daripada menghancurkannya.[698] "Tetangga-tetangga sudah lemah, Palestina sudah hancur, Syria tidak punya pendukung, Mesir sudah keluar dari permainan, maka kita memiliki peluang besar untuk berdamai," Keith Weissman dari *American Israel Public Affairs Committe* (AIPAC) berkomentar. Bagi Shimon Peres, gelombang sejarah ini tidak dapat dibendung lagi.[699]

Jika Israel kehilangan kesempatan ini, Negara Yahudi akan menghadapi risiko perlawanan dari gerakan radikal Palestina pada masa depan yang dipimpin oleh Hamas. Sejak pengusiran terhadap PLO dari Lebanon pada 1980-an, PLO mulai kehilangan basis di Tepi Barat dan Gaza. Kelompok fundamentalis seperti Hamas dan Jihad Islam mulai mengisi kekosongan yang ditinggalkan PLO. Pada dekade 1990-an, Hamas mulai memberikan tantangan kepada Arafat—yang menunjukkan kerapuhan nasionalisme Arab dan pengaruh dari fundamentalisme Islam.[700] Ironisnya, Israel pernah mendukung Hamas pada masa awal Intifada untuk melemahkan PLO. Tapi sekarang Israel tidak bisa lagi mengabaikan pergeseran kekuatan (di Palestina, *pen.*).[701] Pilihannya jelas; sekarang melakukan perjanjian dengan PLO dan nanti bertarung dengan kekuatan Hamas.[702] (Arafat juga menghadapi dilema yang sama; antara melakukan kesepakatan dengan Partai Buruh dalam keadaan PLO yang lemah atau disingkirkan Hamas dan hanya menjadi penonton pertempuran antara kelompok Islamis Palestina dan para pendukung Israel Raya dalam Partai Likud.)[703]

Langkah ini akan menjadi pergeseran yang tidak pernah terjadi dalam sejarah pemikiran geopolitik Israel. Langkah ini sama sekali bertentangan dengan panduan strategi Israel sejak masa Ben-Gurion—*doktrin periperial*. Melalui jalan damai dengan negara Arab di sekitar wilayah Israel dan menganggap bahwa negara di pinggiran wilayah Arab—Iran—sebagai sebuah ancaman, Rabin dan Peres telah merombak total doktrin periperial. Pergeseran ini cukup mengherankan karena Rabin dan Peres merupakan salah satu pihak yang beberapa tahun sebelumnya pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan pemerintahan Khomeini di Iran. Peres mempertahankan posisi barunya dengan beralasan bahwa dia, sebagai anak didik Ben-Gurion, sebenarnya tidak berubah—justru situasi global yang sudah berubah.[704] Alih-alih bergantung pada negara-negara periperial untuk mengimbangi negara Arab; lemahnya kekuatan negara Arab, menguatnya negara-negara periperial, dan berbagai kekuatan yang mendorong lahirnya sebuah tatanan dunia baru telah memaksa Israel dan Iran berada pada

696
697
698
699
700
701
702
703
704

posisi yang berlawanan dalam situasi geopolitik yang baru ini. Keputusan in merupakan pukulan paku terakhir bagi peti mati doktrin periperial—sekarang Iranlah yang akan menghadirkan ancaman bagi Israel, bukan tetangga dekat negara Arab.[705] Dalam pandangan publik Israel, peran Peres dalam skenario "Timur Tengah Baru" hadir dengan mengorbankan Iran; agar Israel menjadi kekuatan dominan dalam skenario "Timur Tengah Baru", Iran harus tetap berada pada pinggiran politik regional dan perannya tetap terabaikan—sesuatu yang dipercayai Iran bahwa mereka berhak atas peran dominan tersebut.[706] "Tidak diragukan lagi bahwa ketika peluang perdamaian dengan lingkaran internal negara Arab muncul, [maka gambaran tentang Iran sebagai sebuah ancaman] hadir," David Makovsky, seorang pakar tentang kebijakan luar negeri Israel, menjelaskan.[707]

Pandangan bahwa negara-negara periperial akan menjadi ancaman bagi Israel bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Rabin sudah mulai mempertimbangkan kembali doktrin ini pada akhir 1989, dan bersama Peres, Rabin memandang bahwa sebuah proses perdamaian dengan Palestina dan keberlanjutan doktrin periperial merupakan strategi yang ekslusif satu sama lain. (Israel pernah menghadapi dilema ini sebelumnya; sebuah langkah kompromi antara berdamai dengan negara tetangga dan bersekutu dengan negara periperial pernah dilakukan Menachem Begin dan Moshe Dayan ketika mereka memilih untuk mengorbankan hubungan Tel Aviv dengan Ethiopia untuk melakukan perjanjian damai dengan Mesir pada 1979."[708] Tetapi peringatan yang sebenarnya datang dari senjata generasi terbaru, dan peringatan ini datang ketika Saddam menyerang Israel dengan rudal Scud dalam Perang Teluk Persia. Irak, yang bersama Iran, dianggap sebagai negara di lingkaran-luar, berhasil menjadikan Israel berada dalam jangkauannya. Serangan rudal Scud "menegaskan sesuatu yang tidak pernah kita perhatikan sebelumnya—bahwa ada ancaman dari ufuk langit, yaitu dari negara-negara periperial," Moshe Arens, menteri pertahanan Israel pada waktu itu, menjelaskan.[709] Jika negara yang jaraknya jauh saja dapat menyerang Israel, maka konsep dasar dari doktrin periperial kehilanngan maknanya.[710] Ide untuk beraliansi dengan negara periperial—yang bisa saja menjadi ancaman—untuk melemahkan negara tetangga Israel dari dunia Arab—yang terlalu lemah untuk menjadi sebuah ancaman—sudah tidak memiliki alasan kuat lagi. Hal ini membuat pendukung doktrin periperial di Israel terdiam.[711]

Pada 1991 para ahli strategi Iran membanjiri berbagai surat kabar yang dekat dengan Partai Buruh dengan berbagai artikel yang membantah pandangan tradisional terhadap Iran sebagai sebuah sekutu strategis non-Arab, sekaligus menggambarkan Iran sebagai ancaman strategis terbesar bagi Israel. (Artikel yang meragukan perdamaian dengan negara Arab ditulis dengan lebih hati-hati).[712] Misalnya *Jerusalem Post* menulis pada November 1991 bahwa "kekalahan Irak telah menyebabkan adanya kekosongan kekuasaan yang ingin diisi oleh Iran—yang termotivasi oleh ide Pan Islamisme dan

705
706
707
708
709
710
711
712

kecenderungan hegemonik dari Iran itu sendiri. Sebuah pembangunan kekuatan militer yang masif telah melengkapi tujuan politik yang baru Iran. Keduanya dapat ditingkatkan dengan dukungan program nuklir dari India dan China. Maka, Iran akan tampil sebagai tantangan strategis selanjutnya bagi Israel. Dengan kata lain, Iran telah menjadi apa yang diharapkan Irak pada lima tahun yang lalu."[713]

Meskipun perdebatan ini hanya sebatas retorika, agenda Israel selanjutnya tidak didasarkan pada ancaman Iran yang sudah ada tetapi langkah antisipatif terhadap ancaman Iran di masa depan. (Saat itu Iran tidak memiliki kemampuan pengembangan nuklir selama beberapa dekade dan belanja militernya menurun tajam). Di antara para elit pengambil kebijakan di Israel, kampanye ini dipimpin oleh Ephraim Sneh, seorang anggota Partai Buruh di Knesset, Mayor Jenderal Amos Gilad, dan Uri Lubrani, mantan utusan Israel untuk Iran. “Saya adalah salah satu orang yang menjadikan kampanye ini sebagai agenda pembicaraan dalam Knesset. Pendapat saya adalah bahwa Iran merupakan sebuah kombinasi yang berbahaya—sebuah rezim yang menginginkan kehancuran kita yang bisa saja memiliki kemampuan pengembangan nuklir,” Sneh berbicara pada saya.[714] Tetapi pada awalnya, penentang Iran seperti Sneh harus melewati situasi yang sulit dan seringkali mendapati para pendukungnya ragu dan tidak yakin. Terkadang mereka dituduh sebagai orang yang panik-gugup dan kata-katanya berbisa yang suka memicu peperangan melewati batas wilayah Israel.[715] Yitzhak Rabin awalnya juga bersikap skeptis. Dia tidak menyambut baik usaha Sneh dengan meminta Sneh agar menurunkan tempo retorikanya dan menahan diri untuk menjadikan Iran sebagai fokus pembicaraan di parlemen.[716] Tetapi hanya beberapa bulan setelah terpilih menjadi perdana menteri—dan dua tahun sebelumnya Iran terlibat langsung dalam aksi teror pejuang Palestina terhadap Israel—keraguan Rabin digantikan dengan gairah dan antusiasme. Pergeseran doktrinal sudah menjadi sebuah kenyataan.

Sebuah kampanye untuk meyakinkan Amerika Serikat dan Uni Eropa bahwa Iran merupakan ancaman global segera dilakukan dengan cepat. Peres dan Rabin sudah memastikan bahwa kekhawatiran Israel terhadap Iran tidak akan lepas dari perhatian siapapun. Pada Oktober 1992, mereka mulai menebar hasutan terhadap Iran. Dengan terus mengulang slogan mereka dalam setiap kesempatan, para pemimpin Partai Buruh telah mengadopsi sikap terhadap Iran yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Peres menuduh Iran selalu mengipasi kobaran api di Timur Tengah dengan berargumentasi bahwa kegagalan resolusi konflik Israel-Palestina berakar dari campur tangan Iran, bukan karena kesalahan Israel dan Palestina.[717] Rabin menuduh Iran memiliki kecenderungan megalomania dan berusaha menjadi kekuatan terbesar di regional.[718] Dia berbicara di hadapan Knesset pada Desember 1992 bahwa “perjuangan Israel melawan kelompok teror Islam yang kejam bertujuan untuk membangunkan dunia yang sedang berbaring di tempat tidur” terhadap bahaya fundamentalisme Syiah. “Kematian sudah berada di depan pintu

713

714

715

716

717

718

kita," Rabin menutup pembicaraannya, meskipun beberapa tahun sebelumnya Rabin mengajak Iran untuk menjadi sekutu strategis Israel.[719]

Pergeseran Israel sangat intens dan tidak terduga sama sekali. "Tiba-tiba hal ini muncul begitu saja. Mereka semuanya sibuk dengan hal ini; ini adalah sebuah propaganda," Gary Sick, yang bekerja di *National Security Council* selama pemerintahan Jimmy Carter dan Ronald Reagan, berkomentar.[720] Hanya satu hari setelah pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1992, pemerintahan Yitzhak Rabin berusaha meyakinkan presiden Bill Clinton untuk menjadikan Iran—bukan Irak—sebagai ancaman. "Iran harus diidentifikasi sebagai musuh No.1," Yossi Alpher, yang pada saat itu menjadi penasihat Rabin, memberikan keterangan kepada *New York Times,* empat hari setelah kemenangan Clinton.[721] Rabin berulang kali menyampaikan pesan ini kepada para pejabat Amerika Serikat untuk menekan Washington agar mengambil tindakan terhadap Iran. "Iran sebagai bagian dari ancaman menjadi bagian dari pertimbangan strategis Israel, karena hal ini merupakan pandangan yang disampaikan Rabin di Washington pada awal 1990-an," Robert Pelletreau, yang pada saat itu bekerja sebagai asisten sekretaris negara untuk urusan Timur Dekat.[722] Menurut Israel Shahak, seorang akademisi Israel dan presiden *Israeli League for Human and Civil Rights*, strategi Partai Buruh adalah mendorong Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya untuk berkonfrontasi dengan Iran." Israel tidak dapat berkonfrontasi langsung dengan Iran karena hal ini akan berujung pada konflik Israel dengan Islam. Untuk mengantisipasi kemungkinan ini, Israel mempropagandakan bahwa Iran tidak hanya berbahaya bagi Israel, tetapi juga berbahaya bagi seluruh dunia Barat.[723]

Israel mendasari pertimbangannya ini dengan beberapa faktor. *Pertama*, Israel menuduh Iran telah berusaha mengembangkan senjata nuklir dan kimia.[724] Untuk memperingatkan komunitas internasional bahwa Iran akan mengembangkan senjata bom nuklir pada tahun 1999, Peres memberikan keterangan kepada televisi *France 3* pada Okotber 1992 bahwa "Iran merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dan masalah terbesar di Timur Tengah karena Iran berusaha mengembangkan nuklir dan mempertahankan hubungan dekat dengan kelompok agama militan." Menteri luar negeri Israel menyatakan bahwa Anda tidak dapat mencegah sebuah negara fanatik, negara teroris yang memiliki senjata nuklir.[725] Dan jika negara teokrasi-Syiah yang bersenjata nuklir ini memiliki rudal balistik, maka Iran akan menjadi ancaman yang lebih berbahaya dibandingkan Palestin.[726] (Israel tidak akan mengetahui perkembangan program rudal Iran hingga akhir tahun 1994).[727]

Kedua, karakter rezim Iran dan ideologi anti-Israelnya merupakan ancaman dari dan bagi dirinya sendiri.[728] Hidup bersama dengan rezim yang tidak bisa diganti lagi

719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

merupakan sebuah kemustahilan. Iran sudah “gila”, Peres dan Rabin menegaskan bahwa Khomeinisme merupakan satu-satunya ideologi yang tersisa yang percaya bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, segala cara bisa dilakukan.[729] “Khomeinisme tanpa Khomenini” merupakan slogan Rabin yang ia sampaikan sebagai wilayah keamanan baru bagi Israel. Para veteran politisi Israel, yang “tidak pernah kehilangan kesempatan untuk mengutuk Iran,” berpandangan bahwa ideologi fundamentalis Khomeini tetap bertahan bahkan setelah meninggalnya ayatollah dan ideologi ini telah menggantikan Komunisme sebagai ancaman ideologis terhadap blok Barat.[730] Makovsky mencatat bahwa Rabin berulangkali menyampaikan pandangannya tentang Khomeinisme dalam “setiap pidato yang ia sampaikan ketika dia bepergian. “Saya kira Rabin mengucapkannya seribu kali. Dia sangat fokus pada Khomeinisme.”[731] Dan pada akhirnya Iran mulai mempertanyakan apakah Israel berhak ada sebagai sebuah negara.

Sadar atas keberadaan para mullah, mendorong para pengambil kebijakan di Israel untuk memandang Iran sebagai musuh permanen, karena Iran menyerukan penghancuran Israel, meskipun seruan ini masih lebih sering dilakukan pada dekade 1980-an, ketika beberapa pejabat di Israel khawatir terhadap retorika dan niat Israel.[732] Perbedaan pentingnya adalah bahwa Iran sudah tidak lagi mendapat 'gangguan' dari Irak. Israel berpandangan bahwa retorika merefleksikan tujuan, dan, Iran—yang sudah terlepas dari gangguan Irak—memiliki kapasitas untuk menterjemahkan tujuan itu ke dalam sebuah kebijakan.[733] Peres menegaskan bahwa meskipun saat itu Iran tidak memiliki kemampuan tersebut, Iran tetap menjadi ancaman eksistensial dan "bahaya terbesar yang pernah dihadapi Israel" dengan mempertimbangkan tujuan-tujuannya.[734] Perubahan Israel yang tiba-tiba ini kemudian memperoleh perhatian dari Amerika Serikat.[735]

Penekanan bahwa Iran merupakan ancaman baru ba regional Timur Tengah dan bagi posisi Amerika di Timur Tengah merupakan "sebuah gagasan kontroversial" yang memiliki kredibilitas rendah, sebagaimana dilansir *Washington Post*.[736] Meskipun Israel merujuk kepada pembelian reaktor nuklir China yang dilakukan Iran sebagai sebuah peringatan, surat kabar *New York Times* tetap bersikap skeptis. "Mengapa Israel menunggu hingga sekarang untuk menyuarakan peringatan keras tentang Iran, merupakan hal membingungkan," *New York Times* menulis. Dalam artikel yang sama, Alpher dan Sneh dianggap telah mengaitkan sikap waspada Israel dengan proses perdamaian dan kebutuhan atas hubungan dengan pemerintahan baru di Amerika Serikat.[737] Hal ini akan memghadapkan Israel pada sebuah "batasan antara rezim yang gila dan rezim yang waras" di Timur Tengah.[738]

Propaganda Israel ini tidak sesuai dengan agenda pemerintahan Clinton. Perhatian utama Gedung Putih tertuju pada Irak, bukan Iran. Berbeda dengan pertengahan 1980-an,

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738

sekarang Israel mengirim agen pengintai ke Irak dan memaksa Amerika Serikat agar mengisolasi Iran. "Setelah perang Irak, kapan waktunya bagi kita untuk berbicara dengan Teheran secara masuk akal, dan Israel tidak datang dan menyampaikan argumentasi. Mereka justru berusaha menjangkau Irak, " Martyn Indyk berkomentar, seorang asisten khusus Clinton untuk urusan Timur Dekat dan Asia Selatan di *National Security Council* yang kemudian bekerja sebagai duta besar untuk Israel dan sebagai asisten sekretaris negara. Sebelum bergabung dengan pemerintahan Clinton, dia bekerja sebagai direktur riset AIPAC.

Asumsi bahwa pemerintahan Peres-Rabin terlalu melebih-lebihkan ancaman Iran sudah tersebar luas di internal pemerintahan Clinton. Propaganda Israel terhadap Iran dilakukan ketika Iran menurunkan sikapnya terkait isu Palestina, sebuah fakta yang secara pribadi diakui oleh para pemegang kebijakan baik di Tel Aviv maupun Washingto.[739] "Pada waktu itu, Iran berusaha memperhalus retorika radikal Khomeini," Weissman dari AIPAC menjelaskan. "Tidak diragukan lagi, ada sebuah wawancara populer dengan Rafsanjani; dia mengatakan bahwa jika ada solusi yang baik untuk Palestina, maka solusi itu juga baik bagi kami."[740] Masih sedikit dari para pejabat yang membahas isu perubahan kebijakan Israel ini di depan publik. Mantan pejabat di *National Security Advisor* Brent Scowcroft mengamati bahwa sebagian besar orang bahkan tidak mengingat "simpati Israel terhadap Iran pada 1980-an."[741]

Perubahan sikap Israel yang tiba-tiba terhadap Iran juga tidak membuat negara Arab yakin. Mengingat dukungan Israel terhadap Iran selama perang Iran-Irak, sulit sekali bagi negara Arab untuk mempercayai ketulusan sikap baru Israel ini. "Jika Israel memang benar-benar mengkhawatirkan Iran, hal ini akan nampak konsisten jika dilakukan sejak rezim Khomeini," duta besar Mesir untuk Amerika Serikat Nabil Fahmi berkomentar. "Pandangan bahwa mereka menganggap Iran sebagai sebuah ancaman merupakan pandangan yang konyol."[742] Negara Arab juga memberikan perhatian pada niat Israel sendiri di Timur Tengah. Bagi negara Arab, visi Peres tentang "Timur Tengah Baru" justru menimbulkan ketakutan daripada harapan. Beberapa negara Arab ini berpandangan bahwa visi Peres bukanlah visi perdamaian, tetapi sebuah ketundukan negara Arab dan hegemoni Israel.[743] "Israel terlalu bersemangat mengkapitalisasi visi barunya tentang Timur Tengah. Israel ingin sekali menjadi bagian dari Timur Tengah dan menunjukkan manfaatnya kepada negara-negara Arab," seorang diplomat Israel menjelaskan. "Semangat Israel ini membuat negara Arab menduga bahwa proyek "Timur Tengah Baru" ini hanya sebuah kendaraan bagi Israel untuk mengendalikan mereka."[744]

Israel telah mengambil kebijakan untuk melakukan dominasi militer atas seluruh negara yang ada dalam jangkauan Negara Yahudi.[745] Negara Arab khawatir jika proyek "Timur Tengah Baru" akan menjadikan Israel menguasai ekonomi regional. Dan jaminan Israel untuk membantah semua anggapan itu tidak berhasil meyakinkan negara Arab. Bagi Shlomo Brom, seorang aktivis perdamaian Israel-Palestina, negara Arab telah salah paham

739
740
741
742
743
744
745

terhadap Israel."Ini adalah kasus mispersepsi yang biasa terjadi. Peres mengatakan bahwa kami akan membantu tetangga kami karena kami yakin bahwa bantuan ini akan menciptakan perdamaian. Apa yang bisa kami bantu? Kami dapat membantu dalam aspek perkembangan teknologi dan yang lainnya. Peres mengatakan hal ini secara tulus, tanpa ada tujuan tertentu. Tetapi hal ini sudah dipahami dengan salah."[746]

Ancaman Iran-Kenyataan atau Imaginasi

Meskipun Peres dan Rabin dengan penuh gairah mengkampanyekan ancaman Iran, publik masih tidak berada di pihak mereka.[747] Keraguan publik ini berakar pada satu fakta sederhana—tidak ada satupun yang percaya bahwa Iran akan menjadi ancaman besar bagi regional dalam satu malam. Meskipun kekalahan Irak memberikan keuntungan bagi Teheran, kekalahan Irak juga berdampak pada menguatnya pasukan militer negara-negara anggota GCC, khususnya Arab Saudi, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Belanjar militer Arab Saudi lebih besar berlipat-lipat dibandingkan Iran. Saudi menghabiskan dana lebih dari 40 juta dolar untuk belanja senjata pada 1991, pada waktu itu pengeluaran militer Iran hanya 6,7 juta dolar. Kekuatan persenjataan negara Arab lebih menjadi ancaman bagi Iran dari pada militer Iran—yang semakin menua—terhadap negara Arab.[748] Optimisme Israel untuk berdamai tidak membuat anggaran militer Israel berkurang. Sebaliknya, propaganda atas Iran sebagai sebuah ancaman memberikan pembenaran bagi ekspansi militer Israel.[749] Dengan anggaran militer 8,7 juta dolar pada tahun 1992, Israel—dengan populasi hanya 4 juta—melampuai pengeluaran militer Iran yang memiliki populasi 60 juta penduduk. (Menurut Departemen Luar Negeri AS, Rafsanjani mengurangi pengeluaran militer Iran dari 6,7 juta dolar pada 1991 menjadi 4,2 juta dolar pada 1992.)[750] Dalam pertemuan pertamanya dengan Clinton, Rabin merubah permintaan senjata tahunan Israel dari pesawat takitkal F-16 menjadi modifikasi F-15 yang mampu menjangkau Iran.[751] Israel memesan 25 buah pesawat jenis F-15 ini dengan harga 85 juta dolar per unit.[752]

Iran tidak berubah; pihak lainnya berubah. Iran lebih menonjol dalam radar keamanan Israel bukan karena Iran menjadi lebih antagonistik terhadap Israel tetapi karena seluruh ancaman yang sebelumnya ada sudah berkurang. Tidak ada lagi ancaman militer yang tersisa.[753] "Tidak ada yang spesial dari Iran, tetapi karena Irak sudah kalah, maka Iran mulai memainkan peran penting dalam persepsi ancaman Israel," Brom berkomentar.[754] Kekalahan Irak dan hilangnya "front timur" yang menakutkan membuat perhatian Israel kemudian tertuju pada Iran. "Iran menjadi ancaman besar karena front timur mengalami disintegrasi. Tidak ada lagi aliansi yang menjadi ancaman eksistensial melalui kekuatan dan rudal jarak-jauh yang dimiliki Irak. Setelah tahun 1991, front ini mengalami perpecahan," Ranaan Gissin, yang menjadi juru bicara Ariel Sharon ketika

746
747
748
749
750
751
752
753
754

menjadi perdana menteri, berkomentar.[755] Bahkan lobi pro-Israel mengakui bahwa tidak banyak yang berubah dari Iran selama 5 tahun terakhir ketika Rabin bergeser dari memanggil Teheran sebagai "sekutu geostrategis" menjadi sebuah "ancaman dari Persia".[756] Dan tidak banyak yang mengamati bahwa Israel nampak lebih perhatian terhadap ancaman Iran bagi negara Arab anggota GCC dari pada negara Arab itu sendiri. Arab Saudi bahkan menegaskan bahwa Iran bukan sebuah ancaman.[757] "Langkah Peres menggunakan propaganda ini merupakan sebuah selubung asap dari pada realita," duta besar Mesir Nabil Fahmi berkomentar.[758] Mesikpun Iran tampak lebih besar dibandingkan sebelumnya, kemunduran kekuatan negara lain membuat Iran dengan sendirinya menjadi ancaman. "Apakah Iran sudah menjadi ancaman besar pada tahun 1991?" Baryy Rubin, direktur *Global Research in International Affairs Center* di Yerusalem, berkomentar."Jawabannya adalah tidak."[759] Bahkan ancaman asimetris yang mampu dilakukan Iran tetap terbatas pada waktu itu. Iran memang aktif sekali mendukung Hezbollah di Lebanon tetapi Iran tidak memiliki keterlibatan apapun di wilayah Palestina. Efraim Halevi menjelaskan, yang bekerja sebagai wakil direktur Mossad pada waktu itu.[760] Beberapa tahun kemudian, situasi berubah. Pada 1995, Iran merupakan pendukung terbesar kelompok rejeksionis Palestina. Tetapi pada 1992, ketika Rabin dan Peres memulai propaganda mereka terhadap Iran, tindakan Israel terhadap Iran mendahului ancaman Iran.

Beberapa pejabat di Israel menyatakan bahwa Israel membutuhkan ancaman eksistensial. Ancaman ini bisa berupa sebuah negara, seperti Iran; sebuah ideologi, misalnya fundamentalisme Islam; atau pada waktu lain bisa sebuah taktik—terorisme. "Anda harus mengakui bahwa kami membutuhkan sebuah ancaman eksistensial. Ini adalah bagian dari cara kami memandang dunia. Jika kami bisa menemukan lebih dari satu ancaman, itu akan lebih baik, tapi kami akan menyelesaikan satu ancaman saja," seorang pakar tentang Iran dari Israel memberi penjelasan kepada saya. Fenomena ini berakar kuat pada pengalaman bangsa Yahudi. Setelah mengalami persekusi berabad-abad, sebuah Holocaust yang hampir menyapu bersih seluruh populasi Yahudi di Eropa, dan lima puluh tahun bernegara dengan perang berkali-kali, pandangan seperti ini dapat dipahami. Ketika menghadapi ancaman eksistensial, negara-negara cenderung bekerja dengan skenario paling buruk. Setiap peristiwa yang terjadi kemudian dibenarkan dalam konteks skenario paling buruk itu. "Ketika Anda selalu mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, Anda dapat melewati dengan kinerja di bawah standar sebagai kinerja terbaik yang pernah dilakukan," seorang pakar tentang Iran bergurau.[761] Meskipun begitu, sebagian pejabat di Kementerian Pertahanan Israel, melihat bahaya besar dari skenario paling-buruk ini. Tetapi hanya sedikit yang mengekspresikan kritisme mereka secara terbuka.

Brom merupakan sebuah pengecualian. "Dalam banyak kasus, Anda dapat melihat bagaimana (rencana "skenario terburuk" (*worst-case scenario*) ini) mengarahkan pada ramalan-ramalan yang terbukti dengan sendirinya (*self-fulfilling prophecies*). Ini

755
756
757
758
759
760
761

merupakan tema perdebatan saya dengan banyak pejabat Israel," dia berbicara pada saya di kantornya yang kecil dan sederhana *Jaffe Center for Strategic Studies* di kota Tel Aviv. "Skenario-terburuk sangat mudah dilakukan. Skenario ini biasanya untuk kepentingan pribadi si perencana. Karena jika Anda membuat ramalan terburuk, lalu jika ramalan itu tidak terjadi, setiap orang akan senang. Tidak akan ada orang yang mengingatnya. Tetapi juga ramalan itu terjadi, Anda bisa selalu mengatakan,"Saya sudah mengatakannya pada Anda," Dia tertawa ketika mengatakan hal ini, tetapi saya merasa bahwa level-kepeduliannya tidak begitu populer di Pasukan Pertahanan Israel. Dia pernah menjadi aparat intelijen Israel ketika lembaga ini secara sistematis terlalu melebih-lebihkan kemampuan nuklir Iran. "Ingat," Dia mengatakannya sambil tertawa, "Iran selalu berjarak 5 hingga 7 tahun dari kemampuan nuklirnya. Waktu sudah berlalu tetapi mereka masih berjarak 5 hingga 7 tahun dari kemampuan nuklirnya."[762]

Propaganda Peres-Rabin terhadap Iran awalnya sangat kontroversial baik di Israel maupun di Amerika Serikat. Militer Israel menolak keras pandangan dari pemimpin politik Israel ini. Kepala intelijen militer Israel, Jenderal Uri Saguy menyatakan secara terbuka bahwa Iran bukanlah sebuah ancaman karena program militernya tidak ditujukan pada negara tetangga terdekatnya dan bukan ditujukan pada Israel. "Negeri ini memang menyerukan sebuah perang suci terhadap kita, tetapi kebijakan persenjatannya tidak terikat dengan kita, dan Iran akan tetap bertindak sama bahkan jika kita tidak ada," Saguy memberikan keterangan pada wartawan. Pernyataan Saguy ini mendapatkan dukungan publik dari Jenderal Ehud Barak, kepala staf Israel yang kemudian menjadi perdana menteri. Barak berpendapat bahwa ancaman nyata bagi Israel adalah Irak. Memfokuskan diri pada Iran ketika negara ini tidak mampu memberikan ancaman bagi Israel merupakan tindakan kontraproduktif. "Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat sebuah iklim menakutkkan dengan membuat diri kita menjadi target utama Israel," Barak menegaskan pendapatnya.[763]

Meskipun Irak sudah kalah, beberapa kalangan di internal militer Israel tetap khawatir atas program senjata kimia dan senjata nuklir Saddam. "Iran bukanlah ancaman terdekat. Iran tidak pernah menjadi ancaman terdekat. Iraklah yang telah menjadi ancaman bagi Israel," Jenderal Amnon Lipkin-Shahak menjelaskan.[764] Para akademisi Israel dan ahli bidang keamanan juga sama kritisnya. Israel Shahak mencatat bahwa pemerintahan Partai Buruh mencitrakan Iran sebagai sebuah ancaman ketika Iran sedang berada pada titik terlemahnya. "Mari saya amati bahwa ketika (sebagaimana bukti lain menunjukkan) Israel setelah Perang Teluk memutuskan bahwa Iran merupakan musuh nomor satu, Iran masih kelelahan pasca perang berkepanjangan dengan Irak dan belum memulai program nuklirnya," dia menulis.[765] Shai Feldman dari *Jaffe Center for Strategic Studies* menulis bahwa kebutuhan Israel terhadap musuh berakar dari pandangan yang berlebihan atas kekuatan militer Iran.[766] Anoushiravan Ehteshami dan Raymond Hinnebusch berpandangan bahwa Peres dan Rabin memposisikan Iran sebagai Golem di era modern—seorang sosok mitos yang penuh dengan ketakutan dan kebencian dalam

762

763

764

765

766

cerita rakyat Israel.[767] Ehud Sprinzak dari Universitas Hebrew di Yerusalem menulis bahwa para elit politik Israel telah menerapkan "konsep strategi-politik" yang gagal untuk membedakan antara retorika Iran dan realitas kebutuhan Iran atas militer defensif.[768] Kelompok di luar pemerintahan lainnya mencatat bahwa Iran memilih strategi bertahan, dan kekuatan militernya ditujukan untuk tindakan antisipatif. "Ancaman Iran ditujukan untuk merespon ancaman dari pihak lain, ancaman ini bukan berawal dari Iran dan tidak bersifat ofensif terhadap negara lain, termasuk Israel," Ephraim Kam dari *Jaffe Center* berkomentar.[769]

Tetapi Partai Buruh percaya bahwa propaganda yang tiba-tiba dari Peres dan Rabin terhadap Iran memberikan arah politik dan strategis bagi Israel karena langkah ini bersamaan dengan usaha Israel untuk berdamai dengan negara tetangga Arabnya sekaligus memperbaiki hubungan strategis dengan Amerika Serikat.[770] Meskipun Iran pada saat itu belum menjadi ancaman, meningkatnya kekuatan Iran pasca kekalahan Irak akan membuat Iran menjadi ancaman pada masa yang akan datang. Israel tidak dapat menghadapi Iran yang meningkat kekuatannya dan kekuatan blok Arab yang dendam dalam waktu yang bersamaan. Dari dua kemungkinan ini, Iran lebih berpotensi memberikan ancaman, maka Israel harus memanfaatkan kesempatan untuk berdamai dengan blok Arab sebelum Iran benar-benar menjadi sebuah ancaman nyata. Pada 1992, Rabin memperkirakan bahwa peluang ini hanya akan datang tujuh tahun lagi.[771] "Mari membuat perjanjian (dengan blok Arab) sebelum Iran menjadi apapun yang diinginkan Iran. Ciptakanlah sebuah situasi yang mampu mencegah Iran melakukan intervensi," Ketarangan Rabin menurut Ehud Yaari dari *Channel 2*, sebuah televisi Israel.[772]

Blok Arab sendiri akan lebih tertarik untuk berdamai dengan Israel jika mereka merasa lebih terancam oleh pemerintahan fundamentalis Iran daripada gudang senjata nuklir Israel dan pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Partai Buruh berpandangan bahwa meskipun perseteruan Arab-Persia tidak sekuat sebagaimana perseteruan Israel-Arab, pemerintahan pro-Barat akan menerima argumentasi ini. Akhirnya, posisi Irak sebagai garis pertahanan blok Arab dari Iran mulai runtuh. Menurut Denis Ross, seorang diplomat Amerika Serikat, dalam peta baru geopolitik Timur Tengah, blok Arab dan Israel memiliki "sebuah ancaman bersama dari Iran dan fundamentalisme".[773] Para pemimpin Partai Buruh percaya bahwa ketakutan negara Arab terhadap Iran harus dimanfaatkan agar mereka mengabaikan permintaan terhadap Israel untuk meninggalkan wilayah Palestina. Gagasan bahwa negara Arab harus berdamai dengan Israel hanya jika mereka menghadapi ancaman yang lebih besar bukanlah sesuatu yang baru. Pada awal 1980-an, ketika Washington bersikeras untuk menjatuhkan rezim Khomeini, pemerintahan Ronald Reagan gagal menawarkan ide ini kepada pemerintahan Partai Likud. Tujuannya untuk mencapai "konsensus strategis" antara Israel dan tetangga Arabnya yang "moderat". "Cawan suci dari kebijakan Amerikan Serikat di regional selalu ditujukan agar negara Arab

767
768
769
770
771
772
773

melupakan konflik Arab-Israel dan memfokuskan diri pada ancaman lainnya," Gary Sick, mantan anggota *National Security Council*, menjelaskan.[774]

Tidak seperti pemerintahan Likud, Partai Buruh memilih gagasan ini secara terang-terangan. Peres menyebut Iran sebagai ancaman terbesar bagi negara Arab dan berpandangan bahwa belanja militer besar-besaran Arab Saudi yang tidak pernah terjadi sebelumnya berakar dari ketakutan mereka terhadap Syiah Iran—bukan ketakutan Arab terhadap Israel. "Awan hitam yang menggantung di langit Timur Tengah adalah awan hitam fundamentalisme, bukan Israel," Peres berbicara dalam sebuah pertemuan di kota Milan pada November 1993.[775] Untuk menarik negara Arab ke pihak Israel, Peres berpandangan bahwa Arab Saudi dapat menerima bantuan Israel untuk melawan Iran via Laut Merah.[776] Beberapa tahun selanjutnya, dalam sebuah kunjungan perdana ke Qatar dan Teluk Persia, Peres berbicara pada media bahwa "negara Arab sadar bahwa Iran, kekerasan dan ekstremisme merupakan musuh Arab dan Israel. Iran menjadi ancaman langsung dan musuh utama atas perkembangan dan kemajuan, bukan hanya Israel tetapi juga dunia Arab."[777] Partai Buruh menekankan ancaman Iran terhadap Arab bahkan lebih bergairah dalam pembicaraan pribadi dengan para pejabat negara Arab. [778]

Tetapi mitra potensial Israel untuk berdamai dengan negara Arab bukanlah pihak yang perlu diyakinkan. Selama beberapa dekade, Israel telah memandang Arab sebagai musuh besar mereka. Lebih dari dua generasi anak-anak Israel telah tumbuh dengan pemahaman bahwa Yasser Arafat dan PLO merupakan teroris yang berusaha menghancurkan Negara Yahudi. Waktu lima tahun setelah Intifada tidak mampu merubah pandangan ini. Meskipun mayoritas pejabat Israel menginginkan perdamaian, usaha untuk meyakinkan warganya bahwa Arafat dan Palestina bukan lagi seorang teroris tetapi seorang mitra untuk mewujudkan perdamaian merupakan tugas yang tidak mudah. Sebagaimana yang sudah dilakukan Partai Buruh pada negara Arab, mereka juga perlu merepresentasikan sebuah ancaman yang lebih berbahaya yang terbentang di ufuk langit untuk meyakinkan warga Israel yang masih skeptis terhadap pergeseran strategis yang dramatis ini.[779] "Rabin menggunakan "ancaman Iran" ini lebih dari apa yang selayaknya dilakukan untuk mengkampanyekan proses damai," Efraim Inbar dari kelompok konservatif *Begin-Sadat Center* di Yerusalem, berkomentar.[780] Rabin dengan basa-basi bertanya; yang manakah yang akan menjadi ancaman nyata bagi Israel—Palestina yang melemah atau Iran yang menguat? "Kita perlu menyepakati perjanjian damai sebelum Iran memiliki kemampuan di bidang senjata nuklir yang mampu merubah keseimbangan kekuatan di regional," Rabin berbicara pada konsituennya.[781] Meningkatnya kekhawatiran terhadap Iran membantu pencapaian tujuan-tujuan politik, yang mengisyaratkan bahwa ancaman tidak lagi datang dari Palestina atau Arab, sehingga kita perlu berdamai dengan lingkaran-dalam."[782] Iran menjadi "sebuah argumentasi yang praktis" dalam wacana publik

774
775
776
777
778
779
780
781
782

di Israel, yang digunakan Partai Buruh untuk mempengaruhi opini publik Israel agar mendukung kebijakan berdamai dengan negara tetangga Arab.[783] "Misalnya, jika Anda ingin berargumentasi tentang Syria dengan cepat, Anda akan mengatakan bahwa "karena Iran begini dan begitu, kita perlu memutuskan hubungan Syria dengan Iran," Yaari menjelaskan.[784] Dan barangkali yang paling penting, propaganda terhadap Iran semakin memperkuat pesan bahwa Washington membutuhkan Israel. Signifikansi strategis yang Israel nikmati selama Perang Dingin bisa diraih dengan menjadikan Iran dan fundamentalisme Islam sebagai ancaman bersama—alih-alih menjadi benteng pertahanan terhadap ekspansi Uni Soviet, saat ini Israel menjadi benteng pertahanan terhadap ambisi regional Iran dalam situsi dunia yang unipolar.[785] "Ada persepsi umum yang berkembang di Israel bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, hubungan Israel dengan Amerika Serikat menurun dan kami membutuhkan daya perekat baru untuk bisa beraliansi, dan daya perekat baru itu adalah Islam radikal. Dan Iran adalah Islam radikal." Inbar memberikan keterangan.[786]

Kebijakan *Dual Containment*

Alat perekat baru ini tidak membutuhkan waktu lama untuk bekerja. Hanya beberapa bulan setelah Clinton terpilih menjadi presiden—dan delapan bulan setelah pemerintahan Rabin-Peres mengambil langkah untuk mengisolasi Iran—Washington mengambil kebijakan *Dual Containment*.[787] Pada 18 Mei 1993, Martin Indyk, sebagai asisten khusus urusan Timur Dekat dan Asia Selatan pada *National Security Council,* menyampaikan kebijakan ini dalam sebuah pidato di *Washington Institue for Near East Policy,* sebuah lembaga *think-thank* pro-Israel yang didirikan oleh Indyk pada 1985. Pidato tersebut merupakan deklarasi kebijakan besar, yang awalnya akan disampaikan oleh Anthony Lake sebagai *National Security Advisor.*[788]Kebijakan ini merupakan pergeseran besar dalam langkah Amerika Serikat di Timur Tengah. Secara tradisional, Washington akan berusaha menjaga agar Iran dan Irak saling serang satu sama lain untuk mempertahankan stabilitas. Indyk berpandangan bahwa kekuatan Amerika sekarang sudah mencapai level yang membuatnya tidak perlu lagi membuat Iran dan Irak saling serang satu sama lain—Amerika mampu menciptakan keseimbangan tanpa bersandar pada keduanya. “Kami tidak perlu bergantung pada salah satu pihak untuk mengimbangi kekuatan pihak lain,” Indyk menegaskan. Irak sedang mengalami pelemehan akibat sanksi PBB, Iran sedang memulihkan kembali kekuatan mereka pasca perang Iran-Irak, dan Amerika Serikat merupakan kekuatan dominan di Teluk Persia dengan “peralatan yang mampu menjatuhkan rezim di Irak dan Iran.”[789] Indyk berpandangan bahwa Iran masih terlalu lemah untuk memberikan ancaman besar kepada Amerika Serikat, tetapi jika mereka sudah ‘pulih’, negara ini mampu memanfaatkan kelemahan Iran dan membuat masalah bagi kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Perhatian penuh pada ancaman Irak akan menimbulkan akibat berbahaya jika perimbangan kekuatan bergeser ke arah yang

783
784
785
786
787
788
789

menguntungkan Iran."[790] Menurut Kenneth Pollack, yang kemudian menjadi analis tentang Iran di CIA, kebijakan ini "dibuat untuk menenangkan Israel bahwa Amerika Serikat akan tetap mengontrol Iran sementara Yerusalem telah memulai proses damai yang berisiko."[791]

Kebijakan ini mendapatkan sambutan positif di Tel Aviv, tetapi justru mendapatkan kritik pedas di Washington. Para pakar kebijakan luar negeri di Washington berpandangan bahwa perhatian Israel terhadap kebijakan baru ini cenderung mengganggu. Menurut Asisten Sekretaris Negara Robert Pelletreau, kenyataan bahwa kebijakan *Dual Containment* berasal dari pengaruh Israel "mendapatkan penerimaan positif di Washington", meskipun di kalangan para pejabat administrasi publik hanya mengakui bahwa kebijakan ini "dipengaruhi atau dipicu" oleh pola pikir orang Israel.[792] Kritik paling tajam menyatakan bahwa dukungan Israel pada kebijakan ini menimbulkan berbagai konsekwensi yang tidak diharapkan bagi kepentingan Amerika. "Kebijakan ini merupakan gagasan gila," Scrowcroft protes. Scrowcroft menyatakan bahwa keputusan untuk membuat keseimbangan dengan mengimbangi kekuatan Iran dan Irak dengan kekuatan Amerika merupakan keputusan yang gila.[793] Secara pribadi, beberapa pejabat dalam pemerintahan Clinton setuju dengan kebijakan ini, karena kebijakan ini mendorong musuh-musuh Anda menuju sudut yang sama, lalu mereka akan bekerja sama untuk melawan Amerika Serikat. "Cara pemerintahan Clinton mengartikulasikan kebijakan baru ini tidak dapat diterima oleh mayoritas publik," seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengakui.[794] Tetapi ketika propaganda Israel mulai menjadi daya tarik di Gedung Putih, Parti Buruh segera menyadari bahwa "skenario terburuk" bukanlah satu-satunya jalan menuju "ramalan yang membuktikan dirinya sendiri". Ketika Washington dan Tel Aviv mengalihkan perhatiannya pada Teheran, ayatollah mulai mengesampingkan permusuhan mereka terhadap Islamis Sunni di wilayah Palestina.

790

791

792

793

794

15-Dari Perdamaian Dingin ke Perang Dingin

Kemanapun Anda memandang, Anda akan menemukan tangan jahat Iran di wilayah ini.
—Sekretaris Negara Amerika Serikat, Warren Christopher, 10 Maret 1995

Kampanye Partai Buruh untuk mengisolasi Iran membuat Teheran terkejut. Iran kemudian mengira bahwa Israel akan terus melanjutkan langkahnya dengan mengecam retorika agresif Iran terhadap Negara Yahudi, sebagaimana yang terjadi pada 1980-an. Kesepahaman-tidak tertulis antara kedua negara ini akan tetap berlaku sepanjang kritisisme Iran hanya sebatas retorika. Iran akan tetap menyuarakan berbagai kecaman terhadap Israel sekaligus memberikan dukungan-retoris terhadap isu Palestina. Israel sendiri tidak akan menghiraukan retorika Iran dan akan tetap mengingat bahwa retorika tersebut tidak mencerminkan kebijakan Iran yang sesungguhnya. Tetapi sikap ofensif Rabin dan Peres menunjukkan bahwa situasi sudah berubah. Pelan-pelan, Teheran mulai sadar bahwa Israel telah menjadi rival dalam proses pembentukan tatanan Timur Tengah yang baru. Bagi Iran, tidak ada satupun tuduhan Israel yang mengungkapkan tujuan nyata lebih dari klaim Israel bahwa Iran ingin membangun hegemoni atas wilayah Timur Tengah.

Meskipun Iran tidak bertujuan untuk menandingi atau menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan tak terkalahkan di Timur Tengah—Amerika telah menjadi kekuatan *de facto* di Timur Tengah dengan kehadiran pangkalan militernya di negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC)—bangkitnya kekuatan Iran dan proses pembentukan tatanan dunia baru menjadi bahan bakar utama bagi Iran untuk memainkan peran politik dan ekonomi yang nampaknya akan mengorbankan posisi Israel. Para mullah di Iran berpandangan bahwa isolasi terhadap Iran merupakan langkah yang tidak wajar, tidak adil, dan tidak dapat dipertahankan.[795] Kegagalan konferensi Madrid pada 1991 seharusnya memberikan pelajaran berharga bagi Washington—bahwa tidak ada satupun perubahan besar di Timur Tengah yang bisa terjadi tanpa kerja sama dengan Iran. "Tidak diragukan lagi bahwa Iran menginginkan dan merasakan bahwa berperan sebagai kekuatan regional merupakan hak bagi Iran," Hadi Nejad-Hosseinian, yang bekerja dalam kabinet Presiden Hashemi Rafsanjani pada dekade 1990-an, berkomentar. "Kami harus menjadi kekuatan terbesar di regional dan memainkan sebuah peran yang sesuai dengan kekuatan kami. Kami memiliki potensi dan kami harus mewujudkannya."[796] Teheran berpandangan bahwa suka atau tidak suka, Washington dan Tel Aviv tidak punya pilihan lain kecuali menerima kenyataan atas kekuatan dan pengaruh Iran. "Iran merupakan sebuah kekuatan regional. Iran mampu menyelesaikan masalah Armenia-Azerbaijan. Iran harus menjadi bagian dari Konferensi Shanghai. Iran merupakan bagian dari ECO (*Economic Cooperation Organization*), dan Iran harus menjadi anggota GCC," Abbas Maleki, yang saat itu menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Iran, berkomentar.[797]

Tapi Teheran menegaskan bahawa "memimpin" tidak sama dengan "melakukan hegemoni". Iran ingin berada di tengah-tengah—sebagai sebuah negara yang masih belum bersuara atas berbagai persoalan regional dan yang berusaha melakukan hegemoni. Dalam posisi ini, Iran tidak lagi terisolasi, dan mampu merebut kembali perannya sebagai

795

796

797

kekuatan dominan di Timur Tengah.[798] Konsep tentang "peran" ini (*naqsh*), dalam pandangan Iran, bukanlah sebuah alat untuk melakukan dominasi secara ofensif, tetapi merupakan sebuah bentuk partisipasi untuk tujuan-tujuan defensif. *Naqsh* merupakan konsep "yang membuat pihak lain mendengarkan Anda dan berkonsultasi dengan Anda" sehingga Anda mampu " menghentikan sebuah proses jika mereka menggangu kepentingan Anda," Mahmoud Sariolghalam, penasihat Hassan Rowhani dari *National Security Advisor* Iran, menjelaskan.[799] Ketika mendengarkan penjelasan dari Sariolghalam—seorang yang berpendidikan Amerika—di kantor mewahnya di kota Teheran, yang didesain menyerupai istana Iran pra-Islam, saya merasa bahwa sulit sekali untuk tidak terkesan dengan kenyataan bahwa hal-hal kecil telah berubah. Ketika Republik Islam berusaha membuat kebijakan luar negerinya berbeda dari Shah, maka kebijakan itu semakin menyerupai inti dari kebijakan Shah itu sendiri. Meraih dan mempertahankan posisi dominan di Teluk Persia—berdasarkan keterlibatan Iran dalam seluruh keputusan regional—merupakan panduan prinsip dalam kebijakan luar negeri pemerintahan monarki Iran. Situasi telah berubah secara dramatis. Ideologi telah bergeser secara mengejutkan. Tetapi tujuan akhir tetap sama.

Berbagai perubahan dan kesamaan perilaku pemerintahan Iran—dari masa ke sama, *pen.*—tidak lepas dari pengamatan Israel. Bahkan para ahli strategi Israel menyadari adanya kebutuhan Iran atas partisipasi politik dengan tujuan-tujuan defensif. "Arti dari "dominasi"—memperjuangkan dominasi atas regional—bukanlah perjuangan untuk memperluas wilayah, yang tidak menjadi bagian dari tujuan-tujuan Iran," Ephraim Kam dari *Jaffe Center for Strategic Studies* di Universitas Tel Aviv menjelaskan. "Keinginan Iran lebih dari sekedar untuk memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di wilayah mereka, terutama wilayah Teluk Persia, yang menjadi wilayah sangat penting bagi Iran. Di wilayah ini tersimpan ancaman bagi Iran. Melalui wilayah inilah aliran minyak mengalir, yang merupakan kunci utama perekonomian Iran. Di wilayah inilah Amerika hadir."[800]

Tetapi penting juga diperhatikan apakah yang menjadi persoalan bagi Iran itu Washington atau Tel Aviv, bahkan jika posisi yang Iran merasa berhak atasnya tidak bertentangan dengan peran yang dibutuhkan Israel untuk menyelematkan hubungan khususnya dengan Washington. Israel dan Iran merupakan dua negara yang cukup kuat dibandingkan negara lainnya di Timur Tengah untuk membentuk tatanan baru Timur Tengah. Situasi ini mempososikan dua negara non-Arab ini ke dalam sebuah konfrontasi. Israel lebih dulu menyadari hal ini, tetapi Iran lebih cepat mengambil tindakan. Iran percaya bahwa Israel perlu untuk menciptakan sebuah koalisi global untuk menghadang Iran menjadi pemimpin regional.[801] "Kami tidak merasakan ancaman besar dari Israel, tetapi mereka merasakan ancaman datang dari kami ketika kondisi kami membaik. Israel berpikir bahwa kekuatan Iran sudah runtuh, bahwa Iran sedang bangkit." Amir Mohebian, editor politik *Resalat* surat kabari harian konservatif di Iran, menjelaskan.[802]

Teheran percaya bahwa kompetisi kekuatan regional ini mendorong Iran berkonfrontasi satu sama lain. "Rivalitas ini wajar, karena Iran dan Israel merupakan dua

798

799

800

801

802

kutub kekuatan di Timur Tengah. Tidak ada negara lain yang mampu menandingi kami." Nejad-Hosseinian menjelaskan.[803] Sama seperti Israel, Iran memandang rivalitasnya dengan Israel merupakan rivalitas hidup-dan-mati. Ketika situasi menguntungkan Iran maka situasi itu merugikan Israel, dan sebaliknya.[804] Menguatnya posisi Israel dan membaiknya hubungan Arab-Israel akan semakin menyulitkan Iran mencapai tujuan-tujuan politiknya.[805] Said Nejad-Hosseinian menjelaskan, "Sayangnya, beberapa negara Arab seperti Qatar sudah membangun hubungan perdagangan dengan Israel. Hal ini berbahaya bagi Iran. Jika seluruh negara di regional mengikuti langkah Qatar, maka perlawanan terhadap Israel akan kehilangan pendukungnya dan Israel akan menjadi sesuatu yang wajar bagi masyarakat di regional Timur Tengah. Dari perspektif Iran, ketika pengaruh Israel semakin menguat di kalangan negara Arab, maka Israel semakin potensial untuk menjadi ancaman bagi Iran."[806]

Melalui konferensi tandingan atas konferensi Madrid, Iran mulai mendekati kelompok-kelompok rejeksionis Palestina yang secara historis memiliki hubungan konfrontatif dengan Israel. Sebagaimana PLO, Hamas juga memberikan dukungan terhadap Saddam Hussein dalam perang Iran-Irak. Sebagai anak-cucu ideologis dari para aktivis Sunni dalam organisasi Ikhwanul Muslimin, kelompok pejuang Palestina ini memiliki banyak perbedaan dengan para tokoh Syiah Iran. Menyelesaikan perbedaan ini bukan tugas yang mudah. Meskipun pemerintahan Partai Buruh Israel sedang menjadikan Iran sebagai target, sepanjang kesepakatan Israel-Palestina masih belum terjadi, maka Teheran tetap rentan untuk bertindak secara terbuka terhadap Israel. Tetapi segala sesuatunya berubah pada 13 September 1993.

Dari Perdamaian Dingin ke Perang Dingin

Bertempat di kota Oslo, ibu kota Norwegia, di bawah mediasi *Institute for Applied Social Science,* Israel dan Palestina melakukan negosiasi perjanjian damai dengan penuh kerahasiaan pada Januari 1993. Ide negosiasi ini pertama kali disampaikan oleh Yossi Beilin, penasihat sekaligus anak didik Peres, kepada Shimon Peres pada akhir 1992. Pada 19 Agustus 1993, sebuah kesepakatan bersejarah terjadi di atas prinsip tanah untuk perdamaian (*land for peace*)—dengan mengembalikan wilayah kepada Palestina, Israel akan mampu mewujudkan perdamaian. Berita tentang pertemuan ini kemudian bocor ke media pada 27 Agustus, dan tidak kurang dari tiga minggu kemudian, dengan penuh keriuhan, *Declaration of Principles* ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres dan pejabat PLO Mahmoud Abbas (Abu Mazen) dalam sebuah upacara di Gedung Putih. Kesepakatan ini diakhiri dengan jabatan tangan bersejarah antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin, yang sebelumnya saling bermusuhan. Dengan penuh kerahasiaan dan perlawanan terhadap banyak hambatan, Israel dan Palestina berhasil membuat kesepakatan damai yang dapat mendorong Iran ke pinggiran politik regional dengan cara yang tidak dapat dilakukan konferensi Madrid. Iran bereaksi dengan cepat dan keras. Iran kemudian meningkatkan perlawanannya terhadap Israel dengan mempertajam konfrontasi retorikanya terhadal Israel dan membuat pengumuman dalam surat kabar garis-keras

803

804

805

806

Ettelaat bahwa Iran akan memberikan dukungan tidak terbatas bagi pihak penentang perjanjian Oslo.[807] Hanya dalam satu malam, perdamaian dingin yang terjadi antara Israel dan Iran pada dekade 1980-an berubah menjadi sebuh perang dingin.[808]

Satu hari setelah upacara di halaman rumput Gedung Putih itu, Rafsanjani menuduh Arafat telah berkhianat pada rakyat Palestina. Presiden Iran ini menyatakan bahwa perjanjian Oslo merupakan langkah berbahaya, yang akan membuat perpecahan dalam tubuh negara muslim di dunia; para pemimpin PLO dan Yordania telah mengkhianati rakyat mereka sendiri melalui kesepakatan perdamaian dengan para pemimpin Israel.[809] Meskipun ajakan penghancuran terhadap Israel sudah pernah terjadi pada masa lalu, frekuensinya semakin meningkat ketika kebijakan Iran terhadap Israel semakin keras.[810] Pada Maret 1994, 270 anggota parlemen Iran menandatangani sebuah pertanyaan yang menegaskan perlunya penghapusan Israel dari peta dunia, dengan argumentasi bahwa isu Palestina tidak akan selesai kecuali melalui perlawanan senjata terhadap Israel.[811]

Perdamaian antara negara Arab dengan Israel tidak secara otomatis menjadi ancaman bagi Iran. Hanya ketika perdamaian ini dikombinasikan dengan usaha-usaha Israel-Amerika untuk mengisolasi Iranlah—dengan menggambarkan Iran sebagai ancaman dan mengeluarkannya dari proses pengambilan kebijakan regional—yang akan membuat Iran khawatir. Iran khawatir jika Israel berusaha menggunakan citra buruk Iran untuk memperbesar keinginan negara Arab untuk berdamai dengan Negara Yahudi.[812] Rafsanjani khawatir jika perjanjian Oslo berhasil, dan negara Arab segera berdamai dengan Israel, Iran akan menjadi negara yang mendapatkan isolasi berkepanjangan.[813] Dalam tatanan baru Israel-sentris yang akan terbentuk, Israel akan memimpin sementara Teheran akan dihalangi untuk memainkan peran yang sesuai dengan kapasitas dan kekuatannya.[814] Dan apa yang awalnya akan menjadi sebuah ancaman politik dapat menjadi sebuah ancaman militer. Jika negara Arab semakin dekat dengan Israel, Iran akan semakin terisolasi. Lalu Israel akan menjadi ancaman utama bagi Iran, Masoud Eslami, yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Iran, menjelaskan. Secara sederhana, Teheran khawatir jika nanti Iran akan ditundukkan di bawah hegemoni Israel; sebuah ide lama bahwa Yahudi akan mendominasi wilayah mulai dari Sungai Nil hingga Sungai Euphrat.[815] Tetapi, Iran menegaskan, jika Iran dilibatkan dalam proses-proses politik, konstelasi politik yang berbeda akan sepenuhnya terwujud. Kami akan memperbesar dukungan terhadap, dan bekerja sama dengan, usaha-usaha perdamaian jika sejak awal kami diberikan peran aktif dan partisipatif, bukan malah mereka merancang seluruh rencana lalu berharap agar kami secara sukarela mengikuti rencana itu, Ali Reza Alavi Tabar, seorang tokoh reformis Iran terkemuka, berkomentar.[816]

807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

Pemerintahan Rafsanjani, yang sebelum konferensi Madrid telah menurunkan sikap Iran terhadap isu Palestina dan mengisyaratkan bahwa Iran tidak akan mendukung sebuah kesepakatan damai, akan mendukung perjanjian damai antara Israel-Palestina hanya jika Amerika menerima peran dominan Iran di regional, sebagai imbalannya, dan mengakhiri kebijakan isolasi terhadap Iran. Dengan dilibatkan dalam proses-proses politik, Iran dapat memastikan bahwa perjanjian damai yang ada tidak akan mengganggu kepentingan Iran sekaligus menunjukkan kemampuan Iran untuk menjadi kekuatan positif dan menjaga stabilitas regional.[817] Kami bisa memainkan sebuah peran yang sangat positif ketika kami dilibatkan, Alavi Tabar menegaskan. Lihatlah bagaimana kami membantu proses penyelesaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Kami berhasil memberikan bantuan kemanusiaan kepada kedua belah pihak, sekaligus memanaskan minyak yang sangat dibutuhkan pada musim dingin di sana. Kami dapat berperan secara positif di seluruh wilayah Timur Tengah.[818]

"Sebuah Permainan Bola yang Berbeda"

Untuk pertama kalinya, Iran mulai menerjemahkan retorika anti-Israelnya ke dalam kebijakan operasional. Berbeda dengan diktum Ayatollah Khomeini, sekarang Iran akan menjadi negara yang berada di garis-depan untuk melawan Israel, karena jika perdamaian Oslo gagal, maka upaya untuk menciptakan tatanan regional baru melalui isolasi terhadap Iran juga akan gagal. Ironisnya, dukungan Iran terhadap Hezbullah pada beberapa tahun sebelumnya mulai berkurang seiring dengam orientasi baru kebijakan luar negeri Rafsanjani, sehingga membuta para pemimpin Syiah di Lebanon merasa diabaikan oleh Iran.[819] Tetapi sekarang Teheran kembali memberikan perhatian pada Hezbollah dan kelompok-kelompok Islamis lainnya. Teheran berpandangan bahwa perlawanan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat akan memperkuat posisinya di hadapan rakyat Arab. Situasi ini akan menyulitkan Israel untuk membentuk blok Israel-Arab melawan Iran.[820] Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa awal revolusi, Iran berusaha mendapatkan simpati rakyat Arab untuk melawan pemerintahan Arab pro-Barat dari bawah dengan mencitrakan para pemimpin Arab itu nampak bersahabat dengan Israel. Tujuannya untuk menciptakan situasi yang membuat Israel tidak mampu mencapai kesepakatan, seorang tokoh politik Iran menjelaskan. Karena ketika kondisi semakin kacau, itu lebih baik bagi kita, karena kondisi itu memberikan kita lebih banyak waktu.[821]

Iran semakin meningkatkan usahanya untuk menyelesaikan perselisihan dengan kelompok radikal Palestina. Perjanjian Oslo menciptakan sebuah perkawinan harmonis antara Iran dan Jihad Islam, tetapi hubungan Iran dengan Hamas masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk mencair.[822] Meskipun proses ini begitu lambat dan tidak berimplikasi pada langkah apapun hingga awal 1994, proses ini sangat signifikan, karena hubungan Iran dengan dan akses terhadap kelompok Palestina masih sangat rendah hingga saat itu.[823] Iran berhasil melalui jalan ini dengan mulus. Di satu sisi, Iran ingin

817
818
819
820
821
822
823

mendeklarasikan dukungannya kepada kelompok-kelompok rejeksionis seterbuka mungkin untuk menarik dukungan publik Arab yang kecewa (terhadap para pemimpinnya, *pen*.). "Kami mendukung pihak yang memperjuangkan hak-hak mereka, tidak peduli itu kelompok Hamas atau kelompok lainnya," pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Velayati ketika menuduh PLO tidak mampu memenuhi harapan warga Palestina.[824] Di sisi lain, Iran harus menghindari dukungan ini menjadi dukungan militer sebab hal tersebut justru akan membuat Iran menjadi sasaran serangan militer itu sendiri. Terlepas dari pernyataan Velayati di atas, pihak intelijen Israel menuduh Iran berada di belakang aksi teror terhadap titik-titik kepentingan Israel di seluruh dunia pada pertengahan 1994. Pada 18 Juli 1994, sebuah bom meledak di kantor pusat *Argentine-Israel Mutual Association* (AMIA) di kota Buenos Aires. Sebanyak 47 warga sipil terbunuh dan lebih dari 300 orang terluka dalam serangan teror terburuk dalam sejarah Argentina. Tidak ada satu pihak pun yang dikenai sanksi dalam kasus ini, tetapi sebagian pihak di Israel masih meragukan dalang aksi pengeboman ini—Iran dan kelompok Hezbollah Lebanon.

Dua tahun sebelumnya, pada 17 Maret 1992, sebuah ledakan bom berhasil menghancurkan kantor kedutaan besar Israel di Buenos Aires dan menewaskan 29 orang. Meskipun ada kelompok lain yang mengklaim bertanggungjawab atas peristiwa ini, Israel masih menduga bahwa kelompok ini merupakan jaringan kelompok Hezbollah. Menurut cacatan Israel, serangan teror ini merupakan balasan atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel berhasil membunuh pemimpin Hezbollah, Sheikh Abbas Mussawi, dan keluarganya satu bulan sebelum pengeboman kedutaan besar di atas. Tiga bulan sebelum serangan terhadap kantor pusat AMIA, Israel melakukan serangan bom ke sebuah markas Hezbollah di pedalaman Lebanon dan menculik pemimpin Syiah Lebanon, Mustafa Dirani dalam sebuah interogasi tentang pasukan Israel yang hilang. Tidak diragukan lagi bahwa pengeboman kedutaan besar ini dihubungkan dengan operasi militer Musawi dan bahwa pemerintahan Israel pada waktu itu tidak menyadari akibat yang bisa saja terjadi bagi kepentingan Yahudi di luar Israel, Avinoam Bar-Yosef, direktur jenderal di *Jewish People Policy Planning Institute*, sebuah lembaga *tink tank* Yerusalem yang berafiliasi dengan *Jewish Agency for Israel* dan pemerintahan Israel.[825] Itamar Rabinovich, mantan penasihat Rabin dan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, berpandangan yang sama. Satu serangan merupakan balasan terhadap pembunuhan Abbas Musawi di Lebanon, dan serangan lainnya merupakan balasan atas serangan terhadap markas Hezbollah di pedalaman Lebanon.[826]

Apakah Iran berada di belakang aksi pengeboman markas AMIA atau tidak, dan apakah aksi ini merupakan tindakan balas dendam atau bentuk agresi, persepsi yang berkembang di Israel adalah bahwa Iran telah menjadi pelaku tindakan teror. Ramalan telah terwujud. Ancaman Iran yang dipropagandakan Rabin dan Peres untuk meyakinkan publik Israel agar menyetujui tindakan pendudukan wilayah Palestina telah menjadi kenyataan. "Inilah pertama kalinya Iran meninggalkan jejak langkah yang jelas. Tiba-tiba kami melihat begitu banyak keterlibatan tidak-langsung Iran dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Israel." Jenderal Amnon Lipkin-Shahak berkomentar.[827] Hal ini menciptakan

824

825

826

827

dinamika yang sepenuhnya baru dalam hubungan Israel dengan Iran. Iran bukan lagi musuh yang jauh dan potensial. Melalui kelompok Hezbollah, Iran merupakan sebuah negara perbatasan.[828] Dan melalui kelompok pejuang Palestina, sekarang Iran berada di dalam wilayah Israel atau setidaknya berada di dalam wilayah yang sedang diduduki Israel. Ide untuk berdamai dengan negara Arab perbatasan untuk beroposisi dengan negara periperial Persia telah gagal, karena negara periperial ini telah menjadi negara perbatasan.[829] Pihak intelijen Israel mengisyaratkan bahwa Iran telah mendorong kelompok pejuang Palestina untuk menggunakan perlawanan bersenjata terhadap Israel dan terhadap perjanjian Oslo.[830]

Israel percaya bahwa dengan melakukan serangan terhadap titik-titik kepentingan Israel dalam skala yang besar seperti ini, Iran telah menaikkan taruhannya. Masa-masa bagi Iran sebagai sebuah kritik-non praktikal terhadap Israel sudah berakhir. Setiap tindakan Israel terhadap Hezbollah atau kelompok pejuang Palestina, dan setiap usaha untuk mewujudkan visi "Timur Tengah Baru" versi Shimon Peres akan berhadapan dengan serangan teror yang didalangi Teheran. "Baiklah, ini merupakan permainan bola yang berbeda. Jika Anda tidak bisa melawan Hezbollah di Lebanon tanpa resiko pengeboman terhadap kantor kedutaan Israel atau terhadap komunitas Yahudi di Buenos Aires, maka situasi ini memberikan Anda lampu merah. Ini adalah situasi yang berbeda."[831]

Beberapa kelompok radikal mengusulkan agar Israel membalas dengan setimpal. *Iranian Mujahedin-e Khalq Organization* (MKO), sebuah organisasi teror Marxis-Islamis yang, sejak kejatuhan Khomeini pada 1981, telah melakukan kampanye teror terhadap pemerintahan Iran dari markasnya di Irak, melakukan pendekatan terhadap beberapa pejabat Israel pada awal 1995 dan menawarkan bantuan untuk melawan Teheran. (Kelompok ini dibiayai Saddam Hussein dan ada dalam daftar kelompok teroris sejak 1992 di Departemen Luar Negeri AS. MKO telah membunuh sejumlah pejabat Iran dan warga sipil melalui aksi pengeboman.[832]) Sebagai imbalannya, kelompok ini meminta Israel agar melobi Amerika di Washington untuk menghapus MKO dalam daftar kelompok teroris di atas. Pejabat Israel menolak untuk berhubungan dengan MKO sementara tetap menunjukkan dukungannya terhadap gagasan bahwa Iran harus diisolasi.[833]

Tetapi kelompok lainnya di Israel ingin melangkah lebih jauh. Ephraim Sneh, Anggota Parlemen garis-keras dari Partai Buruh yang mendorong Rabin dan Peres agar melakukan konfrontasi denhan Iran pada 1992, mendukung hubungan dengan MKO dan berusaha memperoleh dukungan di Israel atas pilihannya ini, meskipun sejumlah pakar terkemuka Israel tentang Iran menasihatinya agar tidak melakukan hal ini.[834] Menurut seorang pengamat militer Israel, kelompok pro-MKO di Israel berpandangan bahwa "Iran memberikan perlawanan yang nyata. Sangat mudah, dan sangat murah untuk mendukungnya (MKO, *pen.*). Jika sebuah bus meledak di sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama di Teheran? Iran mendukung dan mendorong aksi bom bunuh diri,

828
829
830
831
832
833
834

peledakan mobil. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama secara tidak langsung, dan mengatakan kepada mereka bahwa tindakan ini merupakan pedang bermata dua?"[835]

Tetapi akhirnya pendapat yang lebih dingin yang menang. Meskipun MKO tetap merayu pemerintahan Israel, Tel Aviv tetap menahan diri untuk meningkatkan ketegangannya dengan Teheran lebih jauh melalui hubungan terbuka dengan MKO. Posisi Israel sendiri dapat dikompromikan jika Israel mendukung secara terbuka kelompok teror anti-Teheran sekaligus menekan publik global untuk melawan Iran karena diduga terlibat dalam aksi teror. Pemerintahan Partai Buruh Israel masih membuka setengah pintu bagi MKO. Israel mengizinkan MKO untuk menggunakan dua satelit Israel untuk mengarahkan siaran televisinya ke wilayah Iran.[836]

Pada 1994, serangkaian tindakan Iran terhadap Israel nampak membenarkan tuduhan pemerintahan Rabin bahwa Iran merupakan sebuah ancaman. Meskipun begitu, ancaman ini merupakan ancaman non-konvensional, karena Iran masih belum memiliki kemampuan militer yang ofensif untuk menjangkau Negara Yahudi. (Ironisnya, formula "tanah-untuk-perdamaian" yang tertuang dalam perjanjian Oslo hanya meningkatkan hasrat persenjataan Israel. Belanja militer Israel pada 1990 sejumlah 8,6 milyar dolar, yang masih berada di bawah belanja militer Iran, tetapi pada 1995—ketika proses damai berada pada puncaknya—belanja militer Israel meningkat hingga 9,4 milyar dolar. Sejak 1992, Israel menghabiskan dana mulai dari 1,8 milyar dolar hingga 4,2 milyar dolar per tahun untuk belanja senjata, yang lebih dari pengeluaran belanja senjata Iran.)[837]

Secara pribadi, Israel mengakui bahwa meskipun Iran mendukung kelompok rejeksionis Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam yang pada musim semi 1994 mulai melakukan serangkaian teror bom di Israel, Iran bukanlah akar dari aksi teror yang dialami Israel. Ketika membicarakan hal ini dengan teman dekatnya, Rabin sendiri menemukan bahwa jatuhnya korban warga Palestina di wilayah yang diduduki Israel, dan bukan Iran, sebagai faktor pendorong munculnya aksi teror.[838] "Apapun yang dilakukan Iran terhadap Israel melalui aksi teror, kelompok Palestina telah melakukan tindakan yang lebih baik pada Israel." David Menashri, professor di Universitas Tel Aviv, berkomentar.[839] Kenyataannya, aksi teror bom pada musim semi 1994 merupakan respon langsung atas serangan sekelompok penduduk Yahudi ekstrim atas warga Muslim di Masjid Ibrahimi di kota Hebron, yang menewaskan 29 warga Palestina.

Kenyataan ini menimbulkan persoalan politik bagi pemerintahan Rabin. Jika Israel menyalahkan sepenuhnya pihak Palestina, baik secara langsung pada Arafat sendiri atau secara tidak langsung pada Arafat sebagai orang yang bertanggungjawab atas ketidakmampuannya mengantisipasi aksi teror, Israel akan merusak fondasi utama proses perdamaian—sebuah gagasan yang memposisikan Palestina sebagai mitra perdamaian, bukan musuh. Proses damai dengan pihak Palestina kemudian akan mustahil diwujudkan jika Israel secara terus-menerus menuduh Palestina telah melakukan aksi teror. Meskipun begitu, Iran merupakan target yang cocok—dan bertanggungjawab. Partai Buruh percaya bahwa penggunaan wacana tentang ancaman Iran bukanlah tindakan agresif, karena partai

835

836

837

838

839

ini percaya bahwa tuduhan-tuduhan mereka ada beberapa yang terbukti. Meskipun cenderung berlebihan, "ancaman itu nyata, dan ancaman itu bukan 'diciptakan'," Rabinovich berbicara pada saya.[840] Dan sikap berlebihan-lebihan atas ancaman Iran ini memperkuat tujuan Israel lainnya—hal ini berhasil mengganggu hubungan Amerika Serikat dengan Iran. Situasi ini memaksa Washington untuk meningkatkan kontrol atas Iran, sekaligus mendorong negara-negara Arab pro-Barat untuk melawan Iran, dan situasi ini menjadi "ancaman terbesar bagi tujuan Iran untuk melakukan dominasi regional."[841] Jika Israel tidak pernah mempropagandakan Iran sebagai ancaman utama bagi perdamaian dan stabilitas regional dan internasional, komunitas global dan Amerika Serikat tidak akan berusaha untuk menghadang dan mengisolasi Iran.[842]

Meskipun begitu, bagi kelompok kontra proses perdamaian di Israel, hal ini merupakan sebuah sinisme politik. Partai Buruh "lebih memilih untuk fokus pada Iran dari pada ancaman laten dari kelompok Palestina," demikian komentar Efraim Inbar dari kelompok konservatif di lembaga *Begin-Sadat Center* di kota Yerusalem.[843] Tetapi sepanjang proses damai tetap berjalan dan aksi teror bisa ditahan, pandangan-pandangan ini tersamarkan oleh keberhasilan pemerintahan Partai Buruh di tingkat global. Sebagaimana yang diperkirakan Rabin dan Peres, perjanjian Oslo mampu mengakhiri isolasi terhadap Israel. Setelah menandatangani perjanjian, Israel kemudian membangun hubungan diplomatik dengan beberapa negara, termasuk beberapa pemerintahan Arab.[844] Normalisasi hubungan dengan raksasa China dan India merupakan perubahan radikal bagi status internasional Israel sejak 1948 sekaligus meningkatkan daya tawarnya untuk mempertahankan signifikansi strategisnya di Timur Tengah—dan di Washington.[845]

Hubungan Amerika-Iran sebagai Target Israel

Hubungan segitiga Israel-Amerika-Iran telah bergeser secara dramatis hanya dalam beberapa tahun saja. Pada dekade 1980-an, Israel merupakan pembela sekaligus bentuk apologi bagi Iran di Washington, dengan berusaha menekan pemerintahan Reagan—sebuah langkah yang beresiko besar—untuk membuka pintu komunikasi dengan Iran. Sekarang Israel bertindak secara berlawanan. Israel menginginkan agar Amerika Serikat memposisikan Iran berada dalam kontrol politik dan ekonomi.[846] Visi "Timur Tengah Baru" Shimon Peres dan kebijakan *Dual Containment* Amerika yang mulai berlaku pada 1993—setelah lebih dari satu tahun Israel melakukan tekanan—akan semakin mengisolasi Iran.[847]

Pada waktu itu, sebagian kelompok masih mempertanyakan kebijakan ini. Pada akhirnya, jika Iran merupakan sebuah ancaman bagi Israel karena ideologi, kapabilitas, dan program nuklirnya, bukankah kepentingan-kepentingan Israel akan lebih terjamin dengan berusaha mempengaruhi sikap Iran melalui dialog antara Amerika dengan Iran, daripada bekerja keras untuk mencegah dialog semacam itu terjadi? Ketika kekuatan Washington berada pada puncaknya, bisakah Israel tidak menggunakan hubungannya dengan Amerika

840
841
842
843
844
845
846
847

Serikat untuk memaksa Iran agar merubah sikapnya terhadap Israel? Bukankah langkah itu akan lebih efektif daripada mengintensifkan isolasi terhadap Iran? Di internal Kementerian Luar Negeri Israel, ada kelompok mayoritas yang melemparkan pertanyaan ini dan berpandangan bahwa pembicaraan antara Teheran dan Washington dapat memberikan keuntungan bagi Israel. Kelompok ini berpandangan bahwa Teheran akan terpaksa menurunkan retorika dan sikapnya agar hubungannya dengan Washington membaik.[848]

Tetapi pandangan yang dominan dalam pemerintahan Israel adalah bahwa sebuah dialog Amerika-Iran tidak akan memberikan keuntungan bagi Israel karena Iran hanya tertarik untuk meredakan ketegangan dengan Washington, bukan dengan Israel.[849] "Apa yang diinginkan Iran adalah mendapatkan pengakuan Amerika Serikat sebagai kekuatan regional di Timur Tengah," Jenderal Israel, Amos Gilad berpendapat.[850] Sebagaimana yang terjadi pada kasus skandal *Iran-Contra* dan proses negosiasi sandera Lebanon dengan Washington pada awal 1990-an, Iran akan berusaha menyingkirkan Israel dari kesepakatan karena Israel sendiri tidak bisa menawarkan apapun yang dibutuhkan Teheran.[851] Setiap indikasi bahwa Iran mulai memoderasi sikapnya terhadap Israel tidak lebih dari sekedar manuver taktis tanpa implikasi strategis apapun, yang sepenuhnya ditujukan untuk mengurangi tekanan Amerika pada Teheran.[852] "Mereka hanya berpura-pura untuk membuka pembicaraan dengan kami ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat membangun hubungan dengan Amerika. Itu saja. Mereka tidak tertarik pada Israel dengan tulus," Ehud Yaari, seorang mantan jurnalis Televisi Israel, berkomentar.[853]

Israel percaya bahwa ketika tekanan Israel berkurang, Iran akan mengkhianati Negara Yahudi.[854] Ketika hal itu terjadi, Israel akan kesulitan untuk memaksa Washington menekan kembali Iran. Maka langkah negosiasi hanya sekedar lereng licin yang membuat Israel segera akan kehilangan kontrol atas negosiasi tersebut.[855] Bahkan jika Iran tidak berkhianat pada Israel, maka Amerika yang akan melakukannya. Dengan mengesampingkan ideologi dan retorikanya, Iran dan Amerika Serikat memiliki banyak kesamaan kepentingan di Timur Tengah. Keduanya sama-sama memusuhi Irak, dan membutuhkan stabilitas keamanan di Teluk Persia, mendukung pembebasan aliran minyak, dan sama-sama menentang—dalam derajat yang berbeda—pertumbuhan aksi gerilya kelompok Taliban di Afghanistan dan penjualan-obat-obatan di Afghanistan. Israel khawatir jika kesamaan kepentingan-kepentingan antara Iran dan Amerika ini akan membayangi perhatian Israel pada Iran dan meninggalkan Israel sendirian menghadapi rivalnya bangsa Persia.[856]

Pertimbangan ini bisa saja benar jika hubungan Amerika-Iran diletakkan dalam konteks global, ketika Washington perlu mempertahankan pengaruhnya atas Iran termasuk cadangan gas dan minyaknya untuk mengontrol rival geopolitiknya di masa depan—China. "Sebuah negara kecil akan selalu khawatir jika sebuah aliansi global akan

848
849
850
851
852
853
854
855
856

melakukan kesepakatan dalam perspektif kepentingan global dan melupakan konteks kepentingan regional yang sangat penting bagi aktor regional," Rabinovich menjelaskan.[857] Prediksi bahwa Washington akan mengabaikan Israel dan berusaha menjaga kepentingannya sendiri melalui dialog Amerika-Iran menjadi kekhawatiran utama bagi para ahli strategi di Israel.[858] Karena Israel memandang dialog Amerika-Iran merupakan ancaman yang lebih berbahaya daripada eksistensi Iran itu sendiri, maka strategi yang paling efektif adalah mencegah terlebih dahulu dialog tersebut menjadi langkah kongkrit.[859] Langkah ini membuat lembaga *American Israel Public Affairs Committe* (AIPAC) menjadi lembaga lobi pro-Israel yang paling ampuh di Amerika Serikat dengan tugas baru untuk diselesaikan.

Raja Lobi Bernama AIPAC

Didirikan pada 1953, *American Israel Public Affairs Committee* menggambarkan dirinya sebagai "Lembaga Lobi Amerika yang Pro-Israel." Dengan lebih dari seratus ribu anggota di seluruh Amerika, AIPAC secara konsisten masuk dalam peringkat majalah *Fortune* sebagai salah satu lembaga lobi paling kuat di Amerika Serikat.[860] Melalui lobi terhadap pemerintahan Amerika Serikat terkait berbagai isu dan perundang-undangan "untuk memastikan bahwa hubungan Amerika-Israel masih kuat sehingga kedua negara bisa bekerja sama" dan melalui slogan bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai, efeisiensi, kerumitan, dan 'kekejaman' AIPAC menimbulkan kekaguman baik dari kawan maupun lawan. Tetapi proses perdamaian memberikan tantangan besar bagi organisasi ini.

Selama beberapa dekade, AIPAC telah bekerja untuk merusak kesepakatan senjata Amerika dengan negara Arab, memperhalus sikap Washington terhadap kebijakan pembangunan pemukiman warga Israel di wilayah pendudukan, mencegah kesepakatan damai apapun yang dipaksakan pada Israel, menekan Amerika Serikat untuk tidak mengakui PLO sebagai organisasi resmi, dan berusaha mengarahkan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah agar pro-Israel-dan seringkali pro-Likud. AIPAC dengan sengaja bersikap lebih keras terkait isu-isu ini dibandingkan pemerintah Israel sendiri, bukan hanya karena AIPAC didominasi oleh anggota yang lebih dekat dengan Partai Likud daripada Partai Buruh, tetapi juga untuk memberikan peluang bagi pemerintah Israel bermanuver secara maksimal di Washington. "AIPAC merepresentasikan pola piker strategis Israel yang agresif, dan mereka melakukannya dengan penuh kesadaran," mantan kepala Mossad, Yossi Alpher, menjelaskan. Tugas mereka adalah memberikan Israel peluang maksimal untuk bermanuver, dan untuk melakukan tugas itu, mereka bersikap agresif.[861] Maka, proses damai yang sedang berlangsung, memberikan ancaman bagi alasan utama keberadaan AIPAC—ancaman Arab dan Palestina terhadap eksistensi Israel. Sekarang Palestina adalah mitra perdamaian, bukan musuh, dan Israel akan diuntungkan dari bantuan ekonomi Amerika Serikat. Situasi ini merupakan kenyataan sulit untuk dihadapi AIPAC. Sebagai sebuah organisasi, aspek penting dari *raison d'etre* telah terancam.

857
858
859
860
861

Pendekatan Partai Buruh terhadap Palestina membuat proses lobi dengan Rabin akan berawal dengan penuh ketegangan. Rabin selalu memiliki hubungan problematik dengan organisasi Yahudi Amerika, salah satunya karena kecenderungan dan didikannya yang sekuler dan, terutama karena apa yang Rabin persepsikan sebagai usaha yang berkali-kali yang dilakukan para pemimpin Yahudi Amerika kepada para pejabat pinggiran pemerintahan Israel (khususnya pemerintahan Partai Buruh) dengan mendekati pemerintahan Amerika Serikat atas nama Israel. Rabin menegaskan bahwa akses lobi terhadap lembaga pemerintahan harus dibatasi bagi AIPAC, sementara pihak Capitol Hill sendiri merupakan sasaran cemoohan.[862] "Dia merasa bahwa komunitas ini sudah terlalu besar untuk menjadi bagian dari hubungan bilateral Amerika dan Israel," Jess Hordes, direktur *Anti-Defamation League* di Washington, D.C., menjelaskan.[863] Pada masa awal jabatannya sebagai perdana menteri, Rabin memberikan pesan yang sangat jelas—Anda tidak dapat menjadi pendukung Partai Likud dalam pantauan saya.[864] Dia mengulangi pesan ini dalam sebuah pertemuan *Conference of President of Major American Jewish Organization* pada tahun yang sama.[865]

Tidak diragukan lagi, sikap keras Rabin ini menambah friksi baru bagi ketegangan hubungan yang baru saja terjadi. "Dia bukanlah diplomat inti," Hordes berkomentar.[866] Iranlah yang kemudian membantu memenangkan hubungan. Dorongan baru Israel terhadap Iran memberikan peluang bagi AIPAC untuk merevitalisasi dirinya dalam situasi perjanjian Oslo, ketika fungsi utamanya untuk melawan pengaruh Arab di Washington menjadi usang.[867] "AIPAC membuat Iran menjadi isu utama ketika mereka tidak lagi memiliki isu lain untuk diperjuangkan, Amerika Serikat diuntungkan dengan proses perdamaian ini, lalu apa lagi yang akan mereka perjuangkan?"[868] Shai Feldman dari *Jaffe Center for Strategic Studies* di kota Tel Aviv, berkomentar. AIPAC membutuhkan isu baru, dan Israel membutuhkan bantuan untuk membalikkan sikap Washington agar memusuhi Iran. Situasi ini merupakan *win-win solution*.

Pada pertengahan 1994, Israel dan AIPAC mengerahkan seluruh kekuatan diplomatik dan lobi mereka untuk menyerang Iran. Para penasihat Rabin meminta agar dia memohon blok Barat untuk menjatuhkan "beberapa sanksi ekonomi yang ampuh kepada Iran."[869] Langkah ini bukanlah tugas yang mudah, karena meskipun Iran bukan negara populer di Amerika Serikat, negara ini tidak menganggap Iran sebagai ancaman. Tapi apapun tantangan yang ada di depan, tantangan itu harus diselesaikan dengan bantuan AIPAC.[870] Rabin melakukan komunikasi telekonferensi dengan pemimpin Yahudi Amerika Serikat pada bulan September 1994 untuk berkoordinasi. Pesan Rabin jelas—Iran merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian di Timur Tengah. "Di belakang (kelompok rejeksionis Palestina) ada sebuah negara Islam, Iran, yang berusaha mengembangkan

862
863
864
865
866
867
868
869
870

senjata nuklir tujuh hingga 15 tahun yang akan datang dan rudal *ground-to-ground* yang dapat menjangkau setiap jengkal tanah di Timur Tengah," Rabin menjelaskan.[871]

Setelah mengetahui komitmen pemerintahan Clinton pada proses perdamaian, Rabin kemudian menggunakan perjanjian Oslo sebagai alat pengait. "Kalian harus melakukan sesuatu terhadap Iran, karena mereka sedang membunuhi kami," Israel berbicara pada pemerintahan Clinton, menurut Ken Pollack, yang bekerja di Gedung Putih pada masa kepresidenan Clinton, dengan menegaskan bahwa Tel Aviv tidak bisa mewujudkan perdamaian dengan lingkaran dalam blok Arab sebelum Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih keras terhadap Iran di wilayah periperial.[872] Berdasarkan permintaan pemerintahan Israel, AIPAC kemudian menyusun dan menyebarkan 74 halaman draft di kota Washington yang menegaskan bahwa Iran merupakan sebuah ancaman tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi Washington dan blok Barat.[873] "Komunitas pro-Israel berubah menjadi memusuhi Iran, dan mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran dengan cara yang begitu emosional," Brent Scowcroft, mantan penasihat *National Security Council*, berkomentar.[874]

Pada akhir 1994, Rabin menuduh Korea Utara telah menyuplai Iran dengan rudal Scud *ground-to-ground* dengan jangkauan 300 mil—jauh lebih sedikit daripada jarak antara Iran dan Israel.[875] Satu bulan kemudian, dengan mengutip pejabat Amerika dan Israel secara anonim, *New York Times* melaporkan bahwa program senjata nuklir Iran akan dilakukan lebih cepat dari rencana awal dan bisa mendahului serangan terhadap reaktor nuklir Israel.[876] Iran memberikan respon dengan menyampaikan peringatan keras kepada Israel. "Apakah Israel harus melakukan tindakan bodoh, kami akan mengajarinya agar tidak lagi memberikan serangan lainnya terhadap Iran," Juru Bicara Parlemen Iran, Ali Akbar Nateq Noori memberikan keterangan pada *Iran News*.[877]

Tetapi pernyataan-pernyataan Iran ini tidak berpengaruh besar bagi Israel, yang usahanya untuk mencitrakan Iran sebagai sebuah ancaman berawal dari retorika keras Iran. Retorika Iran tidak begitu signifikan, sebab apa yang pada akhirnya membuat Israel berhasil adalah kebijakan Gedung Putih di bawah pemerintahan Clinton yang berorientasi pada proses-damai. Washington telah berinvestasi besar dalam perjanjian Oslo dan dalam pembentukan sebuah tatanan baru di Timur Tengah. Pemerintahan Clinton sedang bersemangat untuk mengintensifkan pengaruhnya dengan meyakinkan Israel dan Palestina agar tetap berada pada jalan damai, bahkan jika langkah tersebut menimbulkan ketegangan dengan Iran. Menurut Pollack, "Hal ini hanya persoalan tentang 'Apa yang kami butuhkan agar kalian berada di jalan ini, sampaikan apa yang Anda perlukan dan kami akan melakukannya.' Dan lihatlah, bagaimanapun juga kami tidak menyukai Iran."[878]

Pada Oktober 1994, Washington mulai mengikuti kebijakan Israel terhadap Iran. Sebagai respon terhadap tekanan Israel—dan bukan terhadap langkah Iran—retorika

871

872

873

874

875

876

877

878

Washington terkait Iran mulai menyerupai Israel.[879] Sekretaris Negara Amerika Serikat Warren Christopher berbicara dalam sebuah forum di Universitas Georgetown pada Oktober 1994 bahwa "Iran merupakan pendukung utama terorisme dan pihak yang paling bersemangat menentang proses damai di Timur Tengah. Komunitas internasional sudah terlalu toleran terhadap perilaku Iran yang melanggar hukum. Buktinya banyak sekali: Iran begitu giat dalam proyek teror dan ekstrimisme di seluruh wilayah Timur Tengah dan di luar regional. Hanya usaha bersama dunia internasional yang dapat menghentikan Iran."[880]

Beberapa bulan kemudian, Christopher menegaskan "bahwa kemanapun Anda memandang, Anda akan menemukan tangan jahat Iran di wilayah ini,"[881] Sementara itu mantan Sekretaris Negara Martin Indyk menggambarkan Iran sebabai ancaman bagi Israel, Arab, dan blok Barat—sebuah posisi yang pernah ditolak Washington hanya dua tahun sebelumnya.[882] Pemerintahan Clinton berbicara pada Israel bahwa "proses perdamaian ini merupakan penghalang untuk melawan Iran. Karena jika kita berhasil membawa negara Arab ke dalam lingkaran proses perdamaian, maka pengaruh Iran terhadap politik antar-negara Arab akan semakin terpinggirkan."[883] Hal ini persis seperti apa yang disampaikan Israel pada Washington selama dua tahun sebelumnya. Sikap Washington ini menunjukkan keberhasilan propaganda Rabin dan Peres terkait ancaman Iran. Menurut Pollack, perubahan sikap Washington ini merupakan akibat langsung dari tekanan Israel, karena reaksi Amerika Serikat terhadap langkah Iran hanya akan terjadi ketika Israel mengancam untuk tidak melanjutkan proses damai.[884]

Tetapi sikap adoptif Amerika terhadap kebijakan Israel terkait Iran atau kebijakan *Dual Containment* belum cukup. Setelah mencapai tujuan ini, Israel meningkatkan taruhannya dan meminta tekanan lainnya terhadap Iran.[885] Namun, sementara pemerintahan Clinton telah mengadopsi retorika dan sikap keras Israel terhadap Iran secara politik, perdagangan Amerika-Iran masih belum terpengaruh oleh kebijakan *Dual Containment*. Perdagangan antara kedua negara mencapai angka 3,8 milyar dollar pada tahun 1994, dengan tambahan angka 1,2 juta dollar dalam penjualan barang oleh perusahaan-perusahaan Amerika melalui beberapa anak perusahaan luar negeri. Angka ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Iran.[886] Inkonsistensi ini mendapatkan perhatian dari AIPAC melalui kanselor Jerman, Helmut Kohl, yang pada sebuah pertemuan dengan AIPAC pada 1994 mempertahankan perdagangan Jerman dengan Iran dengan mengungkapkan hubungan perdagangan Amerika yang ekstensif dengan Teheran. "Kami memperhatikan data itu, dan dia memang benar," Keith Weissman dari AIPAC menjelaskan. "Pada dasarnya, uang Amerika yang dikirim ke Iran jauh lebih besar dibandingkan negara manapun. Inilah yang menjadikan kami memberi perhatian pada aspek ekonomi Iran."[887] (Sepanjang dekade 1990-an, Israel

879
880
881
882
883
884
885
886
887

tidak pernah melanggar aturan apapun yang melarang perdagangan Iran-Israel.)[888] AIPAC kemudian melakukan kampanye untuk menjembatani perbedaan antara pendekatan politik dan ekonomi Amerika terhadap Iran. Bersama dengan pemerintah Israel, AIPAC menekan pemerintahan Clinton untuk memberikan contoh, karena usaha Amerika untuk memutus perdagangan Rusia dan Eropa akan gagal kecuali jika kebijakan politik dan ekonomi Amerika selaras. "Kelompok sayap Kanan, AIPAC, Israel semuanya menkampanyekan adanya sanksi baru," Pollack menjelaskan, sekaligus menegaskan bahwa pemerintahan Clinton hanya melihat Iran dalam kacamata konflik Israel-Palestina.[889]

Kampanye ini tidak begitu mendatangkan banyak perhatian hingga pemerintahan Rafsanjani menawari perusahaan minyak Amerika, *Conoco*, sebuah kesepakatan minyak yang menguntungkan pada 1995. Ketika Israel sedang mengkampanyekan sanksi baru bagi Iran, Rafsanjani melakukan usaha terakhir untuk memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat. Penolakan yang berulang kali dari Amerika telah membuat Rafsanjani rugi besar, tetapi Iran kemudian mengambil kebijakan ganda. Pada satu sisi, mereka merayu Amerika jika memungkinkan, dan di sisi lain, mereka mendukung kelompok Islamis Palestina dan memimpin gerakan perlawanan di dunia Islam untuk melawan Israel dengan tujuan memperkuat kedekatan Iran terhadap rakyat Arab. Teheran memprediksi bahwa langkah ini akan membuat Iran semakin sulit untuk disingkirkan dari urusan-urusan regional pada masa yang akan datang, karena situasi ini akan membuat Iran menjadi penggangu yang ampuh.[890]

Karena proses saling-mendekat secara langsung dengan Amerika Serikat masih tidak memungkinkan, Rafsanjani memilih untuk menggunakan hubungan ekonomi dengan Washington untuk menciptakan kepentingan bersama yang akan memberikan jalan bagi proses saling-mendekat secara politik.[891] Rafsanjani mempertimbangkan bahwa Investasi Amerika pada industri minyak Iran yang sedang kritis akan menjadi sebuah *win-win solution.* Dalam usahanya untuk memperluas hubungan ekonomi Iran dengan komunitas internasional, Rafsanjani telah berjuang selama bertahun-tahun untuk membuka kembali industri minyak Iran bagi perusahaan luar negeri. Aspek simbolik dari langkah ini sangat siginifikan. Industri minyak memainkan peran utama dalam revolusi Iran dan dalam ekonomi dalam negeri serta dalam perkembangan politik pada awal abad kedua puluh. Iran membuka penawaran untuk kesepakatan kerjasama produksi di dua kilang minyak lepas pantai kepada perusahaan-perusahaan asing pada 1994. Kontrak pertama setelah revolusi, senilai 1 milyar dolar, diharapkan akan dilakukan dengan perusahaan minyak dari Prancis, *Total.* Tetapi setelah melakukan negosiasi dengan *Conoco*, Iran mengumumkan pada 6 Maret 1995 bahwa kontrak ini akan dilakukan dengan perusahaan dari Amerika tersebut.[892] Kesepakatan ini sudah disetujui oleh Ayatollah Ali Khamenei sendiri dan Iran mengatakan bahwa kontrak ini ditujukan sebagai sebuah cabang minyak zaitun di Washington. Untuk memastikan dukungan dari Gedung Putih, *Conoco* terus memberikan informasi kepada pemerintahan Amerika Serikat terkait negoisasi ini. Departemen Luar

888

889

890

891

892

Negeri AS telah berulang kali meyakinkan *Conoco* bahwa Gedung Putih akan menyetujui kesepakatan ini.[893]

Bagi AIPAC, kesepakatan yang dilakukan *Conoco* "merupakan target yang tepat dan mudah."[894] Organisasi ini kemudian meningkatkan usahanya untuk menggunakan penawaran Iran ini tidak hanya untuk memgagalkan kesepakatannya dengan *Conoco,* tetapi juga mengakhiri seluruh hubungan perdagangan Amerika dengan Iran. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada 6 April 1995, dengan judul "Sanksi Komprehensif AS terhadap Iran: Sebuah Rencana Aksi," AIPAC menegaskan bahwa Iran harus dijatuhi hukuman atas sikap permusuhannya terhadap Israel. "Pemimpin Iran menolak keberadaan negara Israel. Lebih jauh lagi, Iran melihat bahwa proses perdamaian merupakan usaha Amerika untuk melegalkan pendudukan Israel atas Palestina, tanah umat Islam," demikian tertulis dalam laporan tersebut.[895] Setelah mendapatkan tekanan dari Kongres, AIPAC, dan Israel sendiri, Presiden Clinton kemudian membatalkan kesepakatan tersebut dengan menerbitkan dua keputusan eksekutif yang secara efektif melarang seluruh hubungan dagang dengan Iran.[896]

Keputusan ini diumumkan pada 30 April oleh Clinton dalam sebuah pidato sebelum Kongres Yahudi se-Dunia.[897] Satu hari kemudian, Chistopher memberikan keterangan kepada media bahwa keputusan kontroversial ini didorong oleh "perilaku buruk" Iran—Teheran masih mendukung terorisme, tidak mendukung proses damai di Timur Tengah, dan berusaha mengembangkan senjata nuklir.[898] Tetapi kenyatannya, dengan operasi penggagalan kesepakatan *Conoco*—yang semakin meningkatkan semangat Teheran untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat—merupakan "sebuah pertunjukan besar atas dukungan Amerika kepada Israel."[899] Spekulasi di media Amerika segera muncul; "ketika kebijakan luar negeri Amerika Serikat berakhir dan kepentingan Israel baru saja dimulai."[900]

Sejak saat itu, pemerintahan Clinton memandangan Iran sebagai musuh abadi dan cabang minyak Iran sebagai langkah yang egois.[901] Menurut Dennis Ross, mantan koordinator khusus urusan Timur Tengah bagi Clinton, sikap tidak-berkompromi terhadap ancaman Iran "merupakan titik tolak utama" bagi pemerintahan Clinton. "Kami tidak tertarik lagi untuk membuka hubungan baru dengan Iran. Kami lebih tertarik untuk menghadang apa yang kami lihat sebagai sebuah ancaman."[902] Sebagai bentuk justifikasi lanjutan dari keputusan ini, para pejabat Amerika berbicara—secara anonim—kepada *Los Angeles Times* pada 9 Mei 1995, bahwa para pejabat Iran sudah melatih dua orang warga Palestina pelaku bom bunuh diri yang telah menewaskan 21 warga Israel pada awal tahun tersebut. Pejabat anonim Amerika yang mengkaitkan Iran dengan serangan teroris yang ditujukan untuk menggagalkan perjanjian Oslo ini—sebagai tuduhan pertama Amerika

893
894
895
896
897
898
899
900
901
902

kepada Iran—juga menuduh Iran telah mengirimkan bantuan finansial kepada anggota keluarga pelaku bom bunuh diri.[903]

Satu hari berikutnya, Peres berbicara pada *Jerusalem Post* bahwa ancaman terbesar bagi Israel dari kelompok fundamentalis yang dipersenjatai dengan teknologi nuklir. "Yang manakah yang merupakan ancaman terbesar: tank tua dari Syria atau reaktor nuklir yang sedang dikembangkan pemerintah Iran?" dia bertanya.[904] Secara politik, keputusan untuk membatalkan kesepakatan *Conoco* memang tidak punya risiko apapun. Atas lobi AIPAC dan Israel yang menentang adanya hubungan industri minyak dengan Iran dan tidak adanya keuntungan politik dari proses saling-mendekat antara Amerika dengan Iran, maka perubahan sikap terhadap Iran tidak memiliki resiko politik apapun. (Usaha *Conoco* untuk merubah keputusan ini tidak berhasil.) "Dari perspektif politik, tidak ada seorang pun yang harus dikorbankan atas sikap keras terhadap Iran," Dennis Ross berkomentar.[905]

Tetapi langkah ini belum cukup. Meskipun Clinton telah menghapuskan potensi keuntungan milyar dolar dari perdangan Amerika-Iran melalui dua keputusan eksekutif, dia bisa saja dengan mudah mencabut keputusan itu dan memulihkan kembali perdagangan tersebut. Jika sanksi ini dijatuhkan oleh Kongres, maka manuver presiden—dan siapapun presidennya—akan terbatasi. Atas inisiatif sendiri, AIPAC kemudian merubah rancangan laporan yang sudah disampaikan oleh Senator Alfonse D'Amato atas bantuan Israel pada awal 1995, lalu AIPAC meyakinkan A'Amato untuk menyampaikannya kembali pada 1996—dengan perubahan draft yang dilakukan AIPAC.[906]

AIPAC kemudian meluncurkan sebuah dokumen lobi yang spektakuler sekaligus memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan lobi ini—dokumen ini berjudul *Iran Libya Sanctions Act* (ILSA) di Capitol Hill.[907] ILSA mampu melampaui dua keputusan eksekutif yang sudah diterbitkan Presiden Clinton 16 bulan sebelumnya, karena draft ini menargetkan baik perusahaan Amerika maupun non-Amerika yang telah berinvestasi 40 juta dolar atau lebih di sektor minyak dan gas Iran. Tujuan resmi dari draft ini adalah untuk menghalangi pendapatan Iran dan Libya yang dapat digunakan untuk aksi terorisme internasional dan membatasi aliran sumber daya untuk pengembangan senjata pemusnah massal.[908] Pemerintahan Clinton menolak dengan keras. Robert Pelletreau, asisten sekretaris negara pada waktu itu, memberikan kesaksian di Kongres untuk menentang draft tersebut, dengan beralasan bahwa sanksi-sanksi ekstra-teritorial akan menjadi kontra-produktif dengan meminggirkan negara-negara yang memiliki hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat diperlukan untuk melumpuhkan rezim Iran. "Kami ingin mengisolasi Iran, bukan mengisolasi diri kita sendiri," dia berbicara di hadapan forum *House International Relations Committee*.[909] Tetapi Clinton bukanlah tandingan bagi pengaruh AIPAC di Kongres. Draft ini mendapatkan suara mayoritas di *House of Representatives* dengan 415 suara pro dan 0 suara kontra dan kemudian ditandatangani dengan terpaksa oleh presiden pada Agustus 1996.[910]

903

904

905

906

907

908

909

910

Meskipun usaha-usaha AIPAC berhasil menghapuskan potensi milyaran dolar dari perdagangan dengan Iran, kelompok lobi pro-Israel merasa bahwa ILSA harus disambut oleh para pelaku usaha Amerika karena peraturan ini terutaman ditujukan kepada perusahaan-perusahaan luar negeri. “Kami telah menyebarluaskan ILSA hingga pada level wilayah permainan. Kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak sedang mengukum para pengusaha Amerika atas pertimbangan kebijakan luar negeri. Tetapi tidak ada satupun [dalam komunitas bisnis] yang menyukai apa yang kita lakukan. Mungkin hal ini naif bagi kita.” Weissman dari AIPAC menjelaskan. Para pengusaha Amerika banyak yang geram dengan peraturan ILSA ini. Meskipun sanksi dalam ILSA ditujukan kepada perusahaan luar negeri, peraturan ini tetap berbahaya bagi perusahaan Amerika karena potensi ancaman perlawanan-transaksi dari pemerintahan Eropa dan Asia. Ironisnya, meskipun telah menekan Amerika memberikan sanksi, Israel sendiri tetap membeli barang-barang produksi Iran melalui negara ketiga. “Pengalaman selama beberapa tahun tentang hubungan Israel dengan Iran membuat publik berpersepsi bahwa kami [Amerika Serikat] justru bersikap lebih keras dari pada Israel,” Weissman mengakui.[911]

Dengan mengesampingkan kontradiksi ini, ILSA merupakan keberhasilan terbesar AIPAC dan Israel—bukan sebagai sebuah hasil dari dorongan perubahan atas kebijakan luar negeri Iran, karena hal ini tidak pernah dilakukan. Di pihak lain, Indyk mengakui bahwa ILSA “merupakan peraturan yang kontraproduktif bagi usaha-usaha kita untuk merubah perilaku Iran karena peraturan ini membatasi kita dari sekutu kita, Eropa.”[912] Kesuksesan ILSA justru ada pada tidak dapat dihapuskannya persoalan politik—yang diciptakannya sendiri—bagi setiap usaha untuk memperbaiki hubungan Amerika dengan Iran—sebuah tujuan penting bagi Israel sebagai akibat dari kekhawatirannya bahwa sebuah dialog antara Washington dan Teheran akan mengorbankan peran strategis Israel. “Kami menentangnya [dialog Amerika-Iran] karena kepentingan Amerika tidak cocok dengan kepentingan kami,” Wakil menteri Pertahanan Israel, Sneh, mengakuinya.[913]

911

912

913

16-Kembalinya Doktrin Periperial bersama Partai Likud

Partai Likud cenderung terbuka pada ide bahwa bisa saja masih ada sisa-sisa dari rezim revolusioner di Iran yang melihat segala sesuatu dalam konteks geopolitik sebagaimana yang dilakukan rezim Shah.
—Dore Gold, mantan duta besar Israel untuk PBB, 28 Oktober 2004

Terlepas dari retorika Israel terhadap Iran dan ideologi kelompok Islamis yang tak tergantikan, sebagian pejabat Israel dapat memahami pertimbangan strategis di belakang oposisi Iran pada proses damai. Baik Washington maupun Tel Aviv mengakui bahwa proses damai dan langkah diplomatik Israel untuk menciptakan tatanan baru di Timur Tengah telah mengganggu posisi strategis Iran.[914] Garis pemisah baru di Timur Tengah bukan lagi Islam vs. Arab-Persia, sebagaimana yang diinginkan Persia, tetapi antara pihak yang mendukung dan menolak perjanjian Oslo.[915] Dan perdamaian dengan Palestina bisa membuat Israel berdamai dengan Syria, situasi yang akan menbuat dunia Arab memberikan keuntungan bagi Israel dan lebih jauh lagi mengurangi pengaruh Iran di Timur Tengah. Israel menilai bahwa pertimbangan inilah yang membuat Iran memiliki kepentingan strategis untuk menentang proses perdamaian.[916] "Bayangkan bahwa akan ada sebuah kesepakatan antara Israel dan Syria pada tahun 1993, yang cukup dekat, lalu Iran kehilangan sekutunya Syria dan kehilangan akses atas Lebanon sekaligus kehilangan basisnya di Lebanon, dan Israel bersama Palestina menurunkan ketegangan," Itamar Rabinovich, penasihat Perdana Menteri Itzhak Rabin dan juga bekerja sebagai duta besar Israel untuk Amerika Serikat, menjelaskan." Kebijakan Iran di Timur Tengah kehilangan begitu banyak aset dan sumber daya. Oleh karena itu Iran mulai berkepentingan untuk menggagalkan proses perdamaian, salah satu cara untuk menggagalkan proses perdamaian adalah dengan mendukung kelompok Palestina fundamentalis."[917]

Proses perdamaian ini tidak hanya akan membuat Iran kehilangan sekutunya Syria, tetapi juga akan "memperkuat eksistensi militer Amerika di Teluk Persia, sebuah situasi yang dipandang Iran sebagai sebuah ancaman bagi dominasi regionalnya," *Washington Institute for Near East Policy* menulis.[918] "Saya selalu merasa bahwa mereka (Iran) merasa terancam dengan pertimbangan geostrategis," Keith Weissman dari AIPAC berkomentar. "Lihatlah, blok Arab akan semakin percaya diri karena mereka akan merasa bahwa sekarang Israel akan mendukung mereka (untuk melawan Iran), begitu juga untuk melawan Amerika."[919]

Terlepas dari ketakutan yang nyata dari Iran atas kebijakan isolasi, Washington tidak mengira bahwa Iran akan menentang proses perdamaian dengan cara yang telah mereka lakukan. Menurut Martin Indyk, mantan asisten sekretaris negara Amerika Serikat, Amerika khawatir bahwa Iran dan Irak akan membentuk koalisi untuk mengimbangi Amerika Serikat dan menggagalkan usaha untuk mengisolasi mereka. "Pada waktu itu,

914
915
916
917
918
919

kami begitu fokus pada strategi untuk mengantisipasi kebijakan *Dual Containment* yang dapat mengarahkan Iran untuk mendekati Irak,"dia menjelaskan. Washington tidak mengira bahwa bahwa Iran akan melakukan aksi teror, meskipun mereka menuduh Iran telah memberikan dukungan pada aksi teror untuk membenarkan kebijakan isolasi terhadap Iran. “Apa yang dilakukan Iran adalah untuk mengelabui kita dengan menentang proses [perdamaian]. Dan mereka menjadi pendukung yang sangat agresif bagi terorisme Palestina dan bukan hanya bagi kelompok Hezbollah.”[920]

Washington mulai memahami titik kelemahan kebijakan *Dual Containment*-nya—dengan menolak tawaran Iran dan bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan baru di Timur Tengah dengan meminggirkan peran dan eksistensi Iran, Amerika Serikat telah memberikan insentif kuat bagi Iran untuk memanfaatkan sisi terlemah dari kebijakan tersebut, yaitu perundingan Israel-Palestina. Menurut Indyk, Iran memiliki “setiap alasan untuk menentang [proses perdamaian]. Strategi kita adalah, pada satu sisi, menggunakan proses perdamaian untuk melakukan transformasi regional dan di sisi lain membendung Iran melalui sanksi dan isolasi. Dua strategi ini saling berkaitan. Ketika kita semakin berhasil mewujudkan proses perdamaian, maka Iran akan semakin terisolasi. Lalu, ketika kita berhasil membendung kekuatan Iran, maka Iran semakin mungkin mengikuti proses perdamaian. Maka mereka memiliki alasan kuat untuk bekerja sama dengan kita dalam proses damai untuk menggagalkan kebijakan *containment* dan isolasi. Dengan demikian, mereka akan mendukung proses perdamaian.”[921] Meskipun Washington tidak mengharapkan Iran berposisi pasif ketika sebuah tatanan Timur Tengah baru terbentuk, Washington tetap menganggap rendah kemampuan Teheran untuk berperan aktif dalam proses perdamaian. “Kami tidak berharap bahwa Iran akan diam, karena kami tahu bahwa mereka tidak mampu,” Daniel Kurtzer, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Israel, menjelaskan.[922] Tetapi hingga akhir 1995, jelas sekali bahwa terorisme dapat menggagalkan seluruh proyek Israel-Palestina.

Yigal Membunuh Yitzhak

Pada 4 November 1995, terorisme kembali menyerang Israel, tetapi dari sisi yang tidak terduga. Yigal Amir, seorang anggota kelompok saya kanan-ekstrem, menembak dan membunuh Perdana Menteri Rabin di sebuah tempat parkir dekat *King of Israel Square* di kota Tel Aviv. Rabin baru menghadiri sebuah pertemuan perdamaian untuk mendukung perjanjian Oslo dan baru saja masuk ke mobilnya ketika pelaku pembunuhan menyerang. Israel terkejut; pemerintahan di Teheran bersuka cita. Surat kabar garis-keras *Jomhuri Eslami* menulis bahwa “di seluruh dunia, bangsa-bangsa merdeka bersama umat Islam bersuka cita atas pembantaian Zionis haus-darah ini meskipun pemerintahan mereka berduka atau mengirim belasungkawa,” sementara itu surat kabar berbahasa-Inggris *Kayhan International* menyatakan,”Tidak ada seorang pun yang harus meratapi Rabin, yang telah menumpahkan darah, air mata dan kegelapan bagi kehidupan ratusan ribu orang.”[923] Juru bicara parlemen Iran, Ali Akbar Nateq-Nouri, mengatakan bahwa Rabin telah membayar dengan dirinya sendiri: ”Kami mengecam aksi teroris, tetapi Zionis harus

920

921

922

923

tahu bahwa ketika mereka membuka pintu terorisme, maka mereka bisa saja menjadi korban dari alur cerita yang mereka buat untuk orang lain."[924]

Pembunuhan Rabin menimbulkan pertengkaran publik yang baru antara Teheran dan Tel Aviv. Iran merasa berani—tanpa Rabin, proses damai terancam gagal. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berbicara di radio Teheran bahwa "pemerintah dan rakyat Iran percaya bahwa eksistensi Israel merupakan sebuah kesalahan dan palsu. Kenyataannya, tidak ada negara bernama "Israel", yang ada hanya para pemimpin Zionis, yang hanya bertindak atas dasar rasisme, lalu mengumpulkan orang-orang dari seluruh dunia dan mendirikan sebuah negara pesanan untuk menduduki wilayah Palestina."[925] Israel merespon dengan semakin mengintensifkan usaha mereka untuk mengisolasi Iran dan mencitrakan Iran sebagai sebuah ancaman global. Pada 15 Februari 1996, Menteri Luar Negeri Israel Ehud Barak berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa Iran akan mampu memproduksi senjata nuklir dalam waktu delapan tahun.[926] Sebagaimana Iran berusaha mengganggu hubungan Israel-Arab, Israel juga berusaha menghalangi Iran menggunakan hubungan dagangnya dengan Uni Eropa untuk keluar dari isolasi. "Anda harus benar-benar berhenti bermain mata dengan Iran," Perdana Menteri Shimon Peres berbicara pada televisi *France 2* pada Maret 1996. "Iran merupakan pusat terorisme, fundamentalisme, dan subversi dan dalam pandangan saya lebih berbahaya dari Nazisme, karena Hitler tidak memiliki bom nuklir, sementara Iran berusaha menciptakan senjata nuklir."[927]

Meskipun Partai Buruh memilih perjanjian Oslo, pada 1996 nampak semakin jelas bahwa Israel hanya mencapai perdamaian yang sedikit. Publik Israel, yang pada 1992 memberikan kemenangan pemilu pada Partai Buruh, merasa khawatir terhadap proses perdamaian dan kemudian berbalik mendukung Partai Likud yang menentang perjanjian Oslo. Pada musim semi 1996, terorisme memberikan pukulan telak lagi kepada Peres dan partainya. Sejak 25 Februari hingga 4 Maret, empat serangan teroris menghantam kota Tel Aviv, Yerusalem, dan Ashkelon, dan menewaskan 49 warga sipil Israel. Peres segera menyalahkan Teheran, dan menegaskan bahwa Iran sedang berusaha menjatuhkan pemerintahannya. "Mereka sedang melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk mengakhiri perdamaian dan mengakhiri pemerintahan yang sedang melakukan perdamaian. Kami mempunyai bukti bahwa mereka mendukung kelompok Jihad Islam dan organisasi subversif lainnya untuk menentang Israel sebelum pemilihan umum," Peres berkomentar.[928] (Tetapi Hamas secara terbuka mengaku bertanggungjawab dan memberikan alasan atas aksi bom tersebut sebagai pembalasan atas pembunuhan Israel terhadap Yehya Ayyash, seorang aktivis elit Hamas.)

Hingga saat ini, menurut Weissman, Peres percaya bahwa empat serangan teroris didalangi oleh Iran untuk menggagalkan prospek perdamaian. "Bahwa Iran berpandangan bahwa dengan memilih Binyamin "Bibi" Netanyahu, Anda akan memperlambat proses

924

925

926

927

928

damai merupakan pandangan yang realistis. Dan inilah yang terjadi."[929] (Meskipun begitu, Israel tidak mampu memberikan bukti apapun untuk membantah pandangan ini.)

Dari Perjanjian Oslo kembali ke Doktrin Periperial

Mayor Jenderal Amos Gilad adalah tipe jenderal Israel yang berbicara-keras dan cenderung tidak mau mempertimbangkan kembali apa yang menurut para kritikusnya sebagai asumsi yang keliru tentang musuh-musuhnya. Pada 1990-an, tidak ada satupun orang yang lebih bersemangat mendukung propaganda terhadap Iran sebagai sebuah ancaman dalam Kementerian Pertahanan Israel dibandingkan dia, sebagai kepala bidang militer di *National Intelligence Assessment*. Obsesinya terhadap Iran berujung pada kritikinya yang digambarkan sebagai "Iran-mania."[930] "Amos Gilad menganggap rudal Iran sebagai sebuah dendam (*vendetta*) pribadi," seorang pejabat militer Israel yang dekat dengan Gilad bercerita, dan menambahkan bahwa Gilad "selalu berpikir secara apokaliptik tanpa ampun."[931] Bersama anggota Knesset Ephraim Sneh, Gilad berhasil menempatkan Iran dalam pantauan Israel dan meyakinkan Parati Buruh untuk mengambil kebijakan agresif terhadap Iran.

Namun Gilad kemudian menemukan tandingannya dalam diri Netanyahu. Pada 30 Mei 1996, seorang ketua Partai Likud berpendidikan Amerika Serikat berhasil mengalahkan calon petahana Shimon Peres dengan kemenangan tipis dalam sebuah pemilihan umum yang menjadi momentum referendum bagi proses damai. Kedua partai hanya berselisih 15,000 suara.[932] Kemenangan Netanyahu ini menandai mulai mencairnya hubungan Israel dengan Iran. Bahkan sebelum pemilihan umum 1996, sebagai respon atas kritik internal terhadap kebijakan Partai Buruh atas Iran, Rabin membentuk sebuah komite untuk merumuskan rekomendasi tentang sikap terhadap ancaman yang datang dari Iran. Sebagian besar kalangan di Israel memandangasikap oposisi Iran terhadap Israel pasca pemilu 1994 merupakan akibat langsung dari propoaganda pemerintahan Peres-Rabin atas Iran. Retorika pemerintahan Partai Buruh terlalu melebih-lebihkan dan merusak diri sendiri dan membuat Israel berada dalam pantauan Iran.[933] Retorika ini "cenderung menjadi sebuah ramalan-yang membuktikan-dirinya sendiri," Yossi Alpher, mantan pejabat Mossad dan penasihat senior Perdana Menteri Ehud Barak, berkomentar. "Jika kita banyak berbicara tentang kemungkinan serangan nuklir Israel terhadap Iran, Iran akan semakin khawatir terhadap kita dan eskalasi yang tidak terkontrol semakin mungkin terjadi."[934]

Kritik ini mendorong sebuah kebijakan untuk mengindari komentar yang dapat membuat Iran khawatir dan menggertak. Pada akhirnya, Iran dapat memberikan tantangan kepada Israel, tetapi bukan sebuah ancaman atas eksistensi Israel. Bahkan dengan penyebaran roket Fajar di Lebanon, kemampuan Iran untuk menghancurkan Israel masih terbatas dan masih jauh di bawah kemampuan Israel.[935] Israel tahu bahwa Iran tidak memiliki senjata pemusnah massal dan tidak mungkin memicu peperangan konvensional

929
930
931
932
933
934
935

dengan Israel.[936]Meskipun pihak intelijen Israel mengungkapkan adanya program rudal Iran pada akhir 1994, mayoritas kalangan di Israel mengakui bahwa persenjataan Israel, program rudal, dan program nuklir yang potensial tidak ditujukan pada Israel.[937] "Ingat, bahwa Iran bisa saja membicarakan kita, tetapi kita bukanlah perhatian strategis utama mereka, bahkan perhatian strategis sekunder atau alasan pengembangan senjata nuklir mereka," Alpher menegaskan.[938]

Komite bentukan Partai Buruh merupakan badan lintas-kementerian yang terdiri dari perwakilan Mossad, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional Israel. Komite ini dipimpin oleh Jenderal David Ivry, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat (yang pernah memimpin pasukan Israel dalam serangan terhadap reaktor nuklir Irak pada 1981). Shmuel Limone, seorang ahli tentang Iran di Kementerian Pertahanan, yang bertugas sebagai sekretaris.[939] Anggota penting lainnya adalah Oded Eran, salah seorang diplomat terkemuka Israel; Uri Lubrani, utusan Israel untuk Iran pada dekade 1970-an; dan David Menashri, seorang profesor di Universitas Tel Aviv, seorang pakar terkemuka tentang Iran dari Israel, yang juga seorang Yahudi Iran.[940] Meskipun propaganda agresif Partai Buruh berhasil membuat dunia internasional ikut menekan Iran, komite ini berpandangan bahwa Israel tidak mendapatkan banyak keuntungan dengan membuat Iran menjadi musuh Israel. Retorika agresif Partai Buruh hanya berhasil mendatangkan perhatian Iran dan memperkuat persepsi Iran tentang ancaman dari Israel, yang membuat Israel justru menjadi lebih tidak aman. Di dalam komite tersebut, Eran dan Menashri mendukung adanya komunikasi dengan Iran, sebuah usulan yang secara khusus ditentang oleh Lubrani sebab Lubrani percaya bahwa Teheran sudah dikutuk untuk runtuh.[941] Pada akhirnya, pemerintahan Peres-Rabin menolak rekomendasi komite ini dan tetap melanjutkan sikap agresif Israel terhadap Iran.

Pemerintahan Netanyahu sendiri lebih terbuka terhadap temuan komite ini. Perdana menteri dari Partai Likud ini segera meminta pandangan dari pihak intelijen tentang lingkungan keamanan Israel baik dari pihak Mossad maupun intelijen militer. Perdebatan antara kedua agen intelijen ini sama dengan apa yang perah terjadi pada dekade 1980-an—apakah Iran menjadi ancaman terbesar bagi Israel? Apakah Iran dapat diandalkan untuk mengimbangi kekuatan Irak?[942] Hanya beberapa minggu setelah Netanyahu menjabat, rekomendasi yang diminta sudah siap. Perdana menteri dari Partai Likud ini kemudian mengundang pihak intelijen militer dan Mossad ke dalam rapat kabinet lengkap untuk mendengarkan rekomendasi tersebut. Gilad mewakili pihak militer, dan Uzi Arad, direktur intelijen Mossad, mewakili pihak agen intelijen. Meskipun perdebatan terjadi secara memanas dan penuh gairah—sebagaimana seluruh rapat kabinet dalam pemerintahan Netanyahu—hasil dari pertemuan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Gilad berpandangan bahwa Iran telah menggantikan Irak sebagai ancaman eksistensial bagi Israel. *Pertama*, Gilad mengatakan bahwa rezim Iran memusuhi Israel dan berusaha

936
937
938
939
940
941
942

menghancurkan Negara Yahudi. Gilad membantah pandangan yang menyatakan bahwa kelompok moderat akan kembali berkuasa di Iran dan menegaskan skenario sebalinya. "Saya menyampaikan sebuah pandangan tegas yang menyatakan bahwa Iran akan dikuasai oleh kelompok konservatif. Pandangan ini ada dalam konteks tujuan-tujuan strategis," mayor jenderal itu menjelaskan.

Kedua, kemampuan Iran telah bertambah khususnya melalui program rudal Teheran. Gilad menyatakan bahwa Iran akan menjadikan Israel dalam jangkauan rudalnya pada 1999. *Ketiga*, program pengembangan nuklir Iran. Badan Intelijen Nasional (*National Intelligence Assessment*) menyimpulkan bahwa Iran akan memiliki senjata nuklir pada 2005. "Bahkan sebuah senjata nuklir sederhana pun cukup untuk menghancurkan Israel," Gilad menegaskan. Pada akhirnya, Gilad menegaskan bahwa Iran menentang proses perdamaian dan telah memberikan ancama teror terhadap Israel melalui dukungannya kepada kelompok Jihad Islam, Hamas dan Hezbulloh. "Semua fakta ini menunjukkan bahwa Iran bertujuan untuk menghancurkan Israel, baik secara ideologis maupun strategis," Gilad menutup presentasinya.[943]

Arad kemudian menyampaikan sebuah perspektif yang sangat berbeda. Dia berpandangan bahwa persenjataan Israel bersifat defensif dan ditujukan terutama untuk mengantisipasi serangan Saddam Hussein. Iran perlu untuk mempersenjatai dirinya sebagai konsekwensi dari permusuhan alaminya dengan negara Arab; pada akhirnya, Irak dan Iran belum menyepakati sebuah perjanjian damai. Lebih jauh lagi, Iran masih terbebani hutang, situasi politik internal masih belum stabil, dan harga minyak sedang turun. Semua faktor ini membuat kemampuan Iran berkurang untuk menjadi sebuah ancaman, Arad berargumentasi, sementara Irak—dengan rudal Scudnya, yang sudah diluncurkan ke arah Israel sebanyak tigapuluh empat buah selama Perang Teluk Persia—merupakan sebuah bahaya yang sudah terbukti.[944] Kenyataannya, persepsi negara Arab terhadap Iran sebagai sebuah ancaman dapat membuat doktrin periperial hidup kembali sehingga mendorong kembali koalisi Israel-Iran untuk melawan blok Arab sebagai ancaman bersama.

Inti dari argumentasi Arad adalah Israel hanya memiliki satu pilihan: Israel bisa memposisikan dirinya sebagai musuh nomor satu Iran dengan melanjutkan retorika agresif Peres dan Rabin atau menurunkan tekanan dan membiarkan Iran merasakan ancaman yang lebih besar dari aktor regional lainnya. “Masih banyak orang jahat di sekitar mereka; kami tidak ingin memposisikan diri kami sebagai musuh,” demikian argumentasi Arad.[945] Tetapi, Israel harus tetap berhati-hati dan menerapkan kebijakan “tunggu dan amati” (*wait and see*) karena ambisi Iran dapat melampaui kebutuhan pertahanan mereka.[946] Yang paling penting, Israel harus menghindari eskalasi ketegangan dengan Iran yang didorong oleh retorika sebelumnya dari Partai Buruh. “Kita perlu menurunkan retorika,” Shlomo Brom dari *Jaffe Center for Strategic Studies,* yang juga seorang anggota komite berasal dari Iran, berkomentar.[947]

943

944

945

946

947

Netanyahu mendengarkan presentasi dengan hati-hati seolah-olah kedua belah pihak sedang bertarung. Gilad berbicara dengan penuh percaya diri; dia sangat paham bahwa tidak pernah ada perdana menteri yang menolak temuan dari Badan Intelijen Nasional Israel. Dengan kecenderungan Israel pada skenario perang besar (*doomsday scenario*), nuansa ancaman, dan prediksi yang sedikit optimistik yang penuh kecurigaan, ada di pihak Gilad. Tetapi respon Nenyatahu segera membuat Gilad kebingungan. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, perdana menteri menolak usulan Badan Intelijen Nasional Israel dan menerima rekomendasi Arad untuk menurunkan ketegangan dengan Iran.[948] Penolakan Netanyahu terhadap pandangannya merupakan pukulan telak bagi Gilad, dan hingga saat ini Gilad berusaha menutupi kekecewaannya hanya dengan menyebutkan berbagai kesalahan rivalnya. "Salah satu organisasi paling penting di Israel, Saya tidak mau menyebutkan namanya karena saya malu untuk menyebutkannya, menyatakan bahwa pada 2005, setiap orang akan bahagia karena rezim di Iran akan jatuh."[949] Gilad bercerita. Meskipun skenario perang besar yang diprediksi Gilad tidak terjadi, dia menegaskan bahwa meningkatnya permusuhan antara Iran dan Israel menjad bukti bahwa dia benar. "Prediksi ini merupakan pencapaian intelijen terbesar," Gilad berbicara pada saya tanpa ada yang ditutupi. Sebagai bukti kebenaran prediksinya, pada tahun 2001 Iran berhasil melakukan uji coba rudal Shahad-3 yang mampu menjangkau Israel hanya dua tahun setelah Gilad menyampaikan prediksinya. Tetapi berbeda dengan prediksinya, Iran tidak menggunakan rudal ini untuk menghancurkan Israel.

Netanyahu Mengakhiri Protes Iran

Netanyahu justru memberikan perhatian pada pemimpin LPO Yasser Arafat dan ancaman dari Palestina daripada Iran, dan dia mengakhiri sepenuhnya konfrontasi retoris Israel terhadap Iran—situasi yang semakin membuat Gilad frustasi. Ini merupakan pergeseran kebijakan monumental yang mempengaruhi seluruh perencanaan Israel terkait Iran. "Hingga masa pemerintahan Netanyahu, ada sebuah perkembangan dari pernyataan Israel yang berusaha untuk menghalangi Iran, memperingati Iran, perpanjangan tangan dari angkatan udara Israel, dan lain sebagainya. Semua hal ini dihentikan Netanyahu," Ehud Yaari dari *Channel 2 Israel* berkomentar.[950] Menurut Dore Gold, duta besar Israel untuk PBB, perdana menteri Israel yang baru ingin menghindari kesalahan para pendahulunya. "Ada sebuah perasaan bahwa bisa saja sebagian retorika dari pemerintahan Peres sebelumnya telah merusak hubungan tertentu di Timur Tengah. Misalnya, dengan membicarakan wacana "Timur Tengah Baru" dan Israel memiliki peran ekonomi," dia melanjutkan.[951] Beberapa penasihat Netanyahu bahkan berpandangan bahwa Israel dan Iran memiliki kepentingan yang sama, terlepas dari ketidaksetujuan antara keduanya.[952]

Media Israel yang bersimpati pada perubahan sikap pemerintahan Partai Likud terhadap Iran berpandangan bahwa pemerintahan Partai Buruh yang sebelumnya bertanggungjawab atas meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran, dengan

948

949

950

951

952

menyinggung langkah utusan Israel, Uri Lubrani, untuk meyakinkan pemerintahan Clinton untuk membiayai kudeta. Publikasi dari inisiatif Partai Buruh ini telah "mengakibatkan kerusakan besar bagi Israel," seorang pejabat intelijen anonim berbicara pada *Chanel 2 Israel.* "Jika pada masa lalu Amerika Serikat merupakan Setan besar dan Israel adalah Setan kecil, maka sekarang Iran menganggap Israel sebagai Setan yang berada di dalam otak Setan besar dan mengaktifkan Setan besar itu."[953] Pemerintahan Netanyahu menganggap pernyataan ini cenderung kontra-produktif dan mengganggu kedekatan Israel dengan Iran. "Netanyahu tidak ingin menggunakan retorika yang hanya akan membuat Israel bermusuhan dengan Iran tanpa alasan," Gold berkomentar, yang juga bekerja sebagai penasihat kebijakan luar negeri bagi Netanyahu.[954]

Tetapi Netanyahu bertindak lebih dari sekedar menurunkan retorika. Dia juga berusaha mencapai sebuah kesepahaman dengan Iran melalui bantuan terhadap kelompok Yahudi Iran terkemuka, dia juga menghentikan serangan Israel terhadap Iran dalam berbagai organisasi internasional, dia juga merancang serangkaian pertemuan antara Iran dan perwakilan Israel pada lembaga *think thank* Eropa, dia juga mendorong parlemen Israel untuk mengajak rekan mereka di Iran ke dalam pertemuan *Inter-Parliamentarian Union*. Seperti biasa, Iran kemudian menolak hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan Israel.[955]

Dalam sebuah kesempatan, Netanyahu bahkan mengusahakan adanya mediasi dari Kazakhstan dan Rusia antara Iran dan Israel. Pada Desember 1996, menteri urusan minyak Kazakhstan, Nurlen Balgimbaev, yang sangat menikmati hubungan baiknya dengan Teheran, melakukan kunjungan ke Israel untuk berobat, lalu diminta merancang sebuah pertemuan dengan Iran untuk membicarakan penurunan ketegangan antara kedua negara.[956] Tetapi menteri dari Kazakhstan itu tidak bisa berbuat banyak untuk mencairkan suasana antara Iran dan Israel. Pemerintahan Likud juga berusaha untuk mengurangi kekhawatiran Iran dan negara Arab, bahwa Israel sedang berusaha mencari peran hegemonik di regional Timur Tengah atau bahwa perjuangan melawan fundamentalisme Islam—yang diinisiasi Rabin dan Peres—merupakan sebuah perang terhadap Islam itu sendiri. Selama penerbangan pesawat dari Yerusalem ke Kairo, Gold menunjukkan sebuah artikel pada Netanyahu mengenai persoalan ini yang ditulis oleh Fawaz Gerges, seorang profesor keturunan campuran Arab-Amerika, dan meyakinkan pemimpin Partai Likud untuk secara terbuka menentang gagasan bahwa sebuah benturan peradaban sedang terjadi.

Beberapa minggu kemudian, pada 10 Juli 1996, Netanyahu menyampaikan penolakannya dalam sebuah pidato di hadapan Kongres Amerika Serikat. "Atau, saya harus mengatakan, apakah kita memiliki masalah dengan Islam. Kami tidak setuju dengan pandangan bahwa Islam telah menggantikan komunisme sebagai musuh baru blok Barat,"[957] Netanyahu menegaskan. Pernyataan ini secara hati-hati dirancang untuk mengisyaratkan bahwa kebijakan Rabin-Peres yang menekankan ancaman regional dibandingkan ancaman internal bagi Israel telah berakhir. "Kami berpikir bahwa kita bisa

953

954

955

956

957

mendapatkan kesan perdana menteri Partai Likud ini akan mengatakan bahwa Islam bukan musuh," Gold menjelaskan.[958] Tetapi pergeseran yang dilakukan Netanyahu terhadap Iran lebih didorong oleh usaha untuk menghapuskan Israel dari pantauan Iran. *Pertama*, Netanyahu mengakui bahwa terorismelah yang telah menyerang warga sipil Israel yang telah membuatnya menang dalam pemilihan umum dan membuat publik Israel beroposisi pada Partai Buruh. Ketika Netanyahu berkuasa, dia khawatir jika keberlanjutan teror ini dapat menjatuhkan dirinya sebagaimana aksi teror ini telah menjatuhkan Peres.[959] Dengan menurunkan retorika Israel terhadap Iran, Netanyahu berusaha menghindari provokasi apapun yang menentang Iran yang diyakininya dapat menyebabkan lebih banyak serangan teror dengan konsekwensi-konsekwensi politis yang tidak terduga.

Kedua, pada level strategis, Netanyahu secara ideologis menentang perjanjian Oslo dan tidak dapat menyembunyikan ketidakpercayaannya pada Palestina. Dia percaya bahwa oleh karena perdamaian dengan negara Arab masih tidak mungkin, keamanan Israel dapat dicapai dengan menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab di Timur Tengah—yaitu, kembalinya doktrin periperial. "Kami harus melupakan proyek "Timur Tengah Baru", tidak ada lagi proyek semacam itu," Netanyahu berbicara kepada pembantunya, merujuk pada surat kabar harian Israel, *Maariv*.[960] Tidak hanya karena visi "Timur Tengah Baru" ciptaan Peres memiliki cacat dalam dirinya sendiri, tetapi juga karena kebijakan yang membuat citra Iran buruk justru membahayakan kepentingan nasional Israel dalam dua aspek penting. Pada satu sisi, Israel sedang berinvestasi besar pada seorang mitra—Arafat—yang dipercayai Likud pasti melakukan pengkhianatan terhadap Israel dan berusaha menghancurkannya. Pemerintahan Likud percaya bahwa Arafat tidak akan pernah menyepakati perjanjian damai dengan Israel dan negosiasi yang dilakukannya hanya untuk mengulur waktu dan memperkuat posisinya sendiri.[961] "Bagi Peres, Arafat merupakan mitra yang telah berbelok dari perjanjian Oslo karena dukungan Iran terhadap Hamas. Masalahnya adalah Iran, bukan Arafat," Gold menjelaskan. "Kami memiliki sebuah gambaran lengkap. Kami mengatakan bahwa Arafatlah masalahnya."[962]

Di sisi lain, Israel telah menggabungkan investasinya di Palestina dengan sebuah kebijakan yang membuat sebuah negara periperial—Iran—memusuhi Israel. Retorika agresif Peres telah mengurangi peluang bagi revitalisasi aliansi Iran-Israel. Karena Partai Likud melihat adanya sebuah perjanjian yang tahan lama dengan Arafat sebagai sesuatu yang tidak mungkin, mereka percaya bahwa strategi Partai Buruh akan membuat Israel mendapatkan dua kerugian—tanpa memiliki perdamaian dan tanpa aliansi dengan negara periperial untuk mengimbangi negara Arab. Perdana menteri Israel garis-keras ini perlu menjaga kemungkinan Iran—sebagai sebuah aliansi, *pen.*—tetap hidup karena dia tidak percaya pada kebijakan perdamaian dengan Palestina. "Partai Likud cenderung terbuka pada ide bahwa bisa saja masih ada sisa-sisa dari rezim revolusioner di Iran yang melihat segala sesuatunya secara geopolitik sebagaimana yang dilakukan pada rezim Shah," Gold menjelaskan.[963] Bahkan meskipun Partai Likud di bawah Netanyahu menekan Amerika

958

959

960

961

962

963

Serikat, Uni Eropa, dan Rusia untuk mencegah Iran dari pengembangan program senjata yang dapat membuat Israel berada dalam jangkauan Teheran, pemerintahan Netanyahu juga berusaha untuk merevitalisasi aliansi periperialnya dengan Iran, dengan menganggap bahwa aliansi dengan Iran merupakan strategi yang lebih disukai dibandingkan menaruh kepercayaan pada pemimpin Palestina.[964]

Ketiga, dari perspektif politik dalam negeri, Netanyahu bertujuan untuk membuat publik Israel agar menentang perjanjian Oslo dan mengakhiri formula tanah-untuk-perdamaian (*land-for-peace*). Tetapi dia tidak dapat mengarahkan kemarahan Israel pada Arafat dan Palestina jika Iran masih dianggap sebagai sumber teror.[965] "Menyalahkan Iran atas aksi teror Palestina akan menjadi langkah kontraproduktif bagi pesannya bahwa teror tersebut datang dari Palestina," Weissman dari AIPAC menjelaskan.[966] Sebagaimana ide tentang Iran sebagai sebuh ancaman digunakan Rabin dan Peres untuk meyakinkan publik Israel agar mendukung proses rekonsiliasi dengan negara Arab, maka ide ini menghalangi usaha Netanyahu untuk meyakinkan publik Israel agar menentang rekonsiliasi yang sama. Gold menjelaskan bahwa peran Iran dalam proses perdamaian bukanlah perhatian utama Netanyahu. "Hal tersebut bukanlah bagian dari pembicaraan. Perhatian utama kami adalah Arafat," Weissman menjelaskan.[967] Bagi pemerintahan Likud, Rabin dan Peres telah bermain politik dengan keamanan Israel dengan menjadikan Iran sebagai target dan bersikap diam terhadap negara seperi Arab Saudi, yang telah memberikan bantuan keuangan lebih banyak kepada Hamas dibandingkan Iran.[968]

Terakhir, tetapi yang paling penting, sebagaimana Peres dan Rabin, Netanyahu juga mengkhawatirkan implikasi dari dialog Amerika-Iran. Tetapi dalam konteks ini ada simpul baru. Jika Iran dan Amerika Serikat akan membangun kembali aliansi *sementara hubungan Israel-Iran masih bermusuhan,* maka Israel akan dibiarkan sendiri.[969] "Amerika memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan Iran: obat-obatan, Irak, senjata pemusnah massal. Mengapa Amerika akan berbicara dengan Iran mengenai Israel?" Gilad bertanya secara retoris.[970] Isyarat awal dikirimkan ke Iran ketika Likud menyalahkan Partai Likud atas ketegangan Israel dengan Iran yang didorong oleh ketidakmampuan Washington mengajak Eropa untuk ikut mengisolasi Iran, seorang pejabat senior di kantor perdana menteri Israel berbicara kepada radio Israel. Pemerintahan Likud percaya bahwa era kebijakan *Dual Containment* telah berakhir dan khawatir bahwa Amerika Serikat akan membukan hubungan dengan Iran. Israel harus mengurangi ketegangan dengan Iran untuk mempersiapkan dirinya bagi sebuah skenario. Semakin ketegangan dengan Iran berkurang, maka efek negatif dari hubungan Amerika-Iran dapat semakin bisa diminimalisir.[971]

Sebagaimana Partai Buruh, Partai Likud juga sebisa mungkin menentang hubungan Amerika-Iran, tetapi Likud ingin agar Israel dengan cepat mampu melakukan reposisi jika terjadi terobosan politik antara Iran dan Amerika Serikat. Ketika dialog antara Iran dan Amerika sudah tidak terhindarkan lagi, Israel lebih baik berada di posisi yang dapat

964
965
966
967
968
969
970
971

mempengaruhi diaog tersebut dengan menjadi bagian dari proses dialog. Usaha Netanyahu untuk membuka diri pada Iran tidak berarti Israel akan menurunkan tekanannya pada Iran dalam aspek lainnya. Israel tetap melakukan lobi terhadap Amerika Serikat untuk menekah Rusia agar tidak menjalin kerja sama dengan Iran dalam program nuklir; kelompok pro-Israel di Washington terus melakukan lobi atas sanksi ekonomi bagi Iran; dan Israel terus mengusahakan agar dunia internasional tetap melakukan isolasi terhadap Iran.[972] Israel juga tetap berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan dalam skandal Iran-Contra; ketika hubungan Iran dengan Amerika mulai menghangat, maka hubungan Israel dengan Iran akan terpengaruh. Jika Iran ingin memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, tidak ada jalan lain kecuali melalui Israel.

Iran sendiri sudah menurunkan peran dan keterlibatannya dalam menentang perjanjian Oslo segera setelah pembicaraan Israel-Palestina mulai menemui jalan buntu. Sepanjang proses damai tidak berjalan, proses ini tidak akan mengancaman Iran dan tidak ada alasan bagi Iran untuk menentangnya. Iran tidak dapat mengakui hal ini secara terbuka, tetapi kemenangan Netanyahu dalam pemilihan umum secara pribadi disambut baik oleh Teheran, persis karena Likud tidak terlalu tertarik terhadap proyek "Timur Tengah Baru" yang dibangun di atas isolasi yang berkepanjangan terhadap Iran.[973] Meskipun penuh curiga, rezim di Iran pada saat yang sama ingin mengetahui dampak yang dapat dihasilkan dari manuver pemerintahan Likud. Teheran tidak tertarik untuk melanjutkan hubungan dengan Israel, tetapi mereka menyambut baik peluang untuk menurunkan ketegangan antar kedua negara.[974] "Ada beberapa pembicaraan yang mengindikasikan bahwa kubu Netanyahu ingin memperbaiki hubungan dengan Iran dan bahwa mereka menentang anggapan bahwa permusuhan Israel-Iran merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari," Mohsen Mirdamadi, anggota komite Parlemen Iran untuk bidang hubungan luar negeri.[975]

Iran menekan kelompok Hezbollah Lebanon agar melakukan gencatan senjata dengan Israel pada April 1996. (Pada bulan tersebut, Israel telah melancarkan serangan berturut-turut selama 16 hari terhadap Hezbollah di Lebanon yang dikenal dengan nama "Operasi Anggur Kemarahan (*Operaiton Grapes of Wrath*)." Meskipun tidak ada satu pihak pun yang menang, Israel gagal memberikan dampak kerusakan yang cukup parah bagi Hezbollah, yang berakibat pada disepakatinya perjanjian gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Ali Akbar Velayati melakukan kunjungan diplomatik intensif selama 9 hari yang menghasilkan gencatan senjata antara Hezbollah dengan Israel, begitu juga dengan pembebasan para sandera.[976]

Pihak Iran lalu mengusulkan beberapa bentuk kompensasi kepada Israel, termasuk mengurangi dukungan pada Hezbollah sebagai imbalan atas berakhirnya tekanan Israel kepada Rusia untuk menghentikan kerjasama nuklirnya dengan Iran.[977] Wakil menteri luar negeri Iran juga menunjukkan bahwa Teheran ingin membantu pencarian pilot Israel yang hilang, Ron Arad, seorang petugas sistem senjata Angkatan Udara Israel yang ditangkap

---

972

973

974

975

976

977

oleh milisi Syiah Lebanon pada tahun 1986 dan diyakini Israel berada di Iran.[978] Israel secara terbuka memuji usaha Iran—sebuah langkah yang jarang terjadi—yang berhasil membebaskan para sandera dan para prajurit Israel yang terbunuh di Lebanon. "Sebagai sebuah bentuk niat baik, saya ingin berterimakasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dalam aksi kemanusiaan ini—di Lebanon, Syria dan Iran. Dan saya ingin berterimakasih kepada mereka yang terus melanjutkan usahanya," Menteri Pertahanan Israel, Yitzhak Mordechai, berbicara kepada media.[979]

Tetapi sebagaimana beberapa kasus sebelumnya, Iran menginginkan hubungan baik dengan Washington, bukan dengan Tel Aviv. Saluran diplomatik *Track-II* dan *Track-I½* (saluran diplomatik informal yang seringkali melibatkan para akademisi, pensiunan, pejabat militer, dan tokoh masyarakat, dan aktivis sosial) didirikan pada 1996 untuk meyakinkan pemerintahan Netanyahu bahwa Teheran menginginkan keuntungan dari hubungan baik dengan Israel ini. Teheran ingin memperbaiki hubungan dengan blok Barat, tetapi mereka tidak ingin menghentikan sikap anti-Israelnya, karena sikap merupakan bentuk legimitimasi Iran di dunia Arab. Seluruh tawaran dan kompensasi Iran merupakan manuver taktis yang ditujukan untuk mengurangi tekanan Amerika terhadap Iran, bukan untuk memperbaiki hubungan dengan Israel. Pada akhirnya, usaha Netanyahu hanya menghasilkan mencairnya hubungan Israel-Iran yang sesaat. Namun, bagi Iran, agenda politik Likud dan sikap oposisinya terhadap perjanjan Oslo lebih dari cukup. Iran lebih memilih Likud daripada Partai Buruh karena alasan yang sama bahwa Likud menyalahkan Palestina, bukan Iran: pemerintahan Israel yang tidak berusaha untuk mewujudkan proses damai berdasarkan isolasi terhadap Iran tidak akan mendorong Amerika Serikat dan komunitas global untuk menentang Iran. "Iran berpersepsi bahwa Likud tidak serius berdamai dengan Palestina, sehingga Israel tidak perlu mencari kambing hitam," seorang ahli strategi politik Iran berbicara kepada saya dengan terus terang. "Namun, Partai Buruh membutuhkan seorang kambing hitam."[980]

978

979

980

17-Kebijakan *Détente* Khatami

Peradaban Amerika layak dihormati. Ketika kita sudah memahami akar dari peradaban ini, pengaruhnya menjadi lebih nampak.
—Presiden Iran Mohammad Khatami, 7 Januari 1998

Sebagaimana hari ini kita memeriahkan pertandingan antara atlet Amerika dan Iran, saya berharap hal ini bisa menjadi langkah untuk mengakhiri ketegangan antara kedua negara.
—Presiden Bill Clinton (pernyataan sebelum pertandingan Piala Dunia antara Iran dan Amerika Serikat), 21 Juni 1998

Pada 23 Mei 1997, Iran mengalami peristiwa yang kemudian dianggap sebagai revolusi kedua. Sebagai bentuk penolakan terhadap kemapanan politik dan situasi keagamaan Teheran, rakyat Iran menggunakan ruang kecil yang mereka miliki untuk mengirimkan sinyal jelas pada rezim penguasa: Perubahan harus terjadi! Dengan jumlah massa yang besar, mereka mendatangi tempat pemungutan suara dan memilih seorang petugas perpustakaan yang tidak terkenal, Seyyed Mohammad Khatami, sebagai presiden Iran selanjutnya. Khatami memimpin dalam koridor aturan hukum, demokrasi, perbaikan hubungan dengan dunia luar,dan sistem politik inklusif. Dengan dukungan dari kelompok perempuan dan generasi muda, Khatami berhasil meraih kemenangan besar atas lawannya yang konservatif. Kelompok reformis, sebagaimana koalisi politik Khatami kemudian disebut, berhasil merubah garis pragmatis presiden sebelumnya, Akbar Hashem Rafsanjani, ke dalam level yang sepenuhnya baru. Mereka tidak hanya berusaha memoderasi kebijakan luar dan dalam negeri Iran, mereka juga secara intensif mengurangi—meskipun sulit—resistensi dari kelompok konservatif yang di dalam pemerintahan. Rekam jejak Khatami di dalam negeri bisa saja diperdebatkan, tetapi jabatan kepresidenannya memberikan angin segar bagi hubungan Iran dengan blok Barat dan dunia Arab.[981] Tetapi sebagaimana situasi pada awal 1990-an, hubungan Iran dengan Israel memiliki cerita yang berbeda.

Keingintahuan terhadap pemimpin baru Iran yang tidak diharapkan ini segera menimbulkan daya tarik—di dunia Arab dan pihak lain. Mencairnya hubungan Arab dengan Iran berujung pada pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada Desember 1997 di kota Teheran—dalam acara ini negara tetangga Arab hadir sebagai delegasi tingkat tinggi. Barangkali tamu undangan paling penting adalah Putra Mahkota Abdullah dari Arab Saudi dan pemimpin PLO Yasser Arafat, yang tidak pernah menginjakkan kaki di Iran sejak tahun 1980. Sikap baru Iran terhadap negara tetangganya dan dunia internasional sudah terlihat sejak awal. Dalam pembukaan pidatonya Khatami meyakinkan kembali tetangga Arabnya atas tujuan damai Teheran dan penerimaannya terhadap rezim-rezim di negara Arab—tanda terbesar bahwa propaganda revolusi Iran sudah berakhir.[982] Putra mahkora Kerajaan Saudi merespon dengan ramah: “Dengan prestasi besar yang diraih oleh masyarakat Muslim di Iran, dan kontribusi mereka yang tidak ternilai dalam perjalanan sejarah Islam, tidak mengherankan bahwa Teheran, ibukota Republik Islam Iran, menjadi tuan rumah bagi pertemuan negara Islam yang penting ini;

981

982

bagi seorang pemimpin bangsa-bangsa Muslim wajar sekali jika Iran sadar terhadap tugas dan tanggungjawabnya kepada dunia Islam pada momentum penting bagi sejarah kita bersama."[983]

Penerimaan yang Iran cari dari negara Arab pada akhirnya mereka dapatkan. Pada Maret 1996, ketika proses damai Israel-Palestina menemui jalan buntu, Presiden Rafsanjani kemudian bertemu dengan Arafat di kota Islamabad, Pakistan, untuk mengurangi ketegangan antara Iran dan blok Arab.[984]Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, pemerintahan Rafsanjani menurunkan retorikanya terhadap pemimpin Palestina. Tidak ada lagi kecaman terhadap usaha Arafat untuk mewujudkan solusi dua-negara, meskipun Teheran tetap bersikap skeptis atas proses perdamaian. Pergeseran Iran ini salah satunya merupakan akibat dari tekanan Arafat atas kelompok Islam militan di wilayah Palestina. Dengan meningkatkan kontrolnya ada wilayah Gaza dan Tepi Barat, pemimpin Palestina mengisyaratkan bahwa, sebagaimana yang disampaikan oleh Duta Besar Mesir untuk Amerika Serikat, Nabil Fahmi,"Anda bisa memainkan apapun yang Anda inginkan di perbatasan Lebanon, tetapi jika Anda ingin bermain di internal politik Palestina, Anda akan terluka." Iran paham maksud ucapan ini. Memberikan dukungan pada kelompok rejeksionis Palestina akan berisiko besar.[985] Tetapi yang lebih penting, seiring dengan sikap Israel sendiri yang berbalik menentang proses damai dan ketegangan Arab-Israel mulai tumbuh, Iran harus memperhalus posisinya dengan memanfaatkan peluang emas ini untuk memperbaiki hubungannya dengan pemerintahan Arab.

Liga Arab telah merekomendasikan agar seluruh anggotanya menghentikan proses normalisasi hubungan dengan Israel hingga pemerintahan Netanyahu kembali mendukung perjanjian Oslo. Iran dengan hangat menyambut baik keputusan negara Arab ini, dan hanya beberapa bulan setelah kemenangan pemilu Khatami, Arafat mengisyaratkan bahwa kelompok reformis di Iran telah membuka peluang baru antara Otoritas National Palestina (*Palestinian National Authority*) dan Iran.[986] Sebagaimana persepsi terhadap ancaman dari Iran mendorong blok Arab lebih dekat dengan Israel, maka rasa frustasi blok Arab terhadap Israel mendorong mereka lebih dekat dengan Iran.[987] Teheran hanya membutuhkan waktu yang sedikiti untuk menunjukkan bahwa Iran tidak memberikan ancaman bagi tetangga Arabnya dan bahwa sikap Israel yang menjelek-jelekkan Iran ditujukan hanya untuk mengalihkan perhatian dari apa yang disebut Teheran sebagai "kebijakan-kebijakan Washington dan Tel Aviv yang mengancam".[988] Alih-alih Iran menjadi ancaman bagi negara-negara Arab moderat, sekarang justru Israel yang sekali lagi menjadi ancaman bagi negara-negara Muslim di wilayah Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran bersama-sama melakukan kecaman terhadap Israel—sebuah indikasi kuat bahwa perubahan situasi di Timur Tengah telah terjadi secara cepat. "Ada sebuah kesepakatan bahwa kebijakan-kebijakan Israel merupakan gangguan terhadap keamanan dan stabilitas di Timur Tengah," Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud Al Faisal berbicara di hadapan wartawan pada bulan November 1997.[989] Kebijakan *detente* Khatami tidak hanya

983
984
985
986
987
988
989

terbatas pada negara Arab. Hubungan Uni Eropa-Iran juga mengalami perbaikan di bawah kepemimpinan Khatami sekaligus membuat frustasi Amerika Serikat dan Israel yang sedang melakukan isolasi terhadap Teheran. Rintangan paling besar bagi perbaikan hubungan Uni Eropa dan Iran—fatwa (keputusan hukum dalam Islam) ayatollah Khomeini pada 1989 atas penulis Inggris Salman Rushdie—sudah diselesaikan pada akhir 1998 melalui negosiasi antara Menteri Luar Negeri Kamal Kharazi dan Robin Cook dari pihak Inggris. Iran secara terbuka menyatakan tidak akan melaksanakan fatwa Khomeini tersebut, dengan menjelaskan bahwa fatwa tersebut merupakan pandangan pribadi ayatollah dan bukan kebijakan negara Iran. "Pemerintahan Republik Islam Iran tidak punya niat apapun, ataupun melakukan tindakan apapun untuk mengancam hidup penulis *The Satanic Verses* atau siapapun yang berkaitan dengan karya ini, atau mendorong atau membantu siapapun untuk melakukan hal yang sama," Kharazi berbicara pada Cook. Kemenangan kepentingan nasional atas ideologi sudah semakin jelas.[990]

Manuver Khatami juga diperluas hingga Amerika Serikat. Hanya empat bulan setelah menjabat, presiden baru Iran memberikan kesempatan wawancara kepada koresponden CNN kelahiran Iran, Christiane Amanpour, yang meninggalkan Iran segera setelah peristiwa revolusi. Dalam wawancara yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati, Khatami berusaha menjangkau langsung masyarakat Amerika dan menyampaikan isu-isu penting antara Washington dan Teheran, termasuk terorisme: "Kami percaya pada kitab suci al Quran yang menyatakan: membunuh satu orang yang tidak bersalah sama dengan membunuh seluruh manusia. Bagaimana mungkin sebuah agama, dan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya, terlibat dalam pembunuhan orang-orang tidak berdosa? Kami menolak mentah-mentah seluruh tuduhan ini. Terorisme harus dikecam dengan seluruh bentuk dan manifestasinya; pembunuh harus mendapat kecaman. Terorisme sudah tidak berguna lagi dan kami mengecam terorisme."[991]

Khatami kemudian menunjukkan penyesalannya atas peristiwa penyerangan kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Iran pada 1979 dan membantah keterlibatannya dalam aksi pembakaran bendera Amerika Serikat—sebuah peristiwa yang terjadi dalam aksi unjuk rasa kelompok garis keras di Iran. Khatami mengatakan bahwa kedua peristiwa ini—aksi penyerangan kantor kedutaan besar dan slogan anti-Amerika harus dipandang dalam konteks yang lebih luas sebagai "dinding ketidakpercayaan" yang ada di antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun dia telah meminta bahasa yang lebih sopan, Khatami menegaskan bahwa slogan-slogan ini tidak bermaksud untuk melecehkan masyarakat Amerika. Pernyataan-pernyataan ini justru untuk mengungkapkan aspirasi warga Iran "untuk mengakhiri sebuah pola hubungan antara Iran dan Amerika."[992]

Washington memberikan respon dengan cepat. Martin Indyk, yang kemudian menjadi duta besar Amerika untuk Israel, berbicara pada wartawan bahwa Washington akan menyambut baik dialog dengan Iran dan bahwa Amerika mengakui pemerintahan Islam Iran. Beberapa bulan sebelumnya, Indyk sudah mengumumkan ketertarikan pemerintahan Clinton untuk melakukan pembicaraan dengan Iran. "Amerika Serikat sudah berkali-kali menjelaskan bahwa kami tidak memiliki keberatan apapun terhadap pemerintahan Islam di Iran," Indyk menegaskan. "Kami siap untuk melakukan pembicaraan

990

991

992

dengan pemerintahan Iran,"[993] Pemerintahan Clinton segera tertarik dengan Khatami dan gagasan untuk mengakhiri permusuhan dua-dekade antar dua negara ini.[994] Kedua sinyal terbuka dan tertutup sudah terkirim ke masing-masing ibu kota negara, yang menunjukkan bahwa sebuah terobosan sebentar lagi bisa saja terjadi.

Tiga dari isyarat Washington sangat penting. Dalam sebuah pidato penting yang disampaikan Sekretaris Negara Madeleine Albright, Amerika Serikat secara tidak langsung menyampaikan permintaan maaf atas aksi kudeta CIA terhadap perdana menteri Iran—yang sebelumnya terpilih secara demokratis—Mohammad Mossadeq, pada 1953 dan mengusulkan sebuah rencana bagi langkah saling-mendekat antara Amerika Serikat dan Iran. Clinton sendiri juga menyampaikan isyarat lainnya. Dalam sebuah konferensi pers dia mengungkapkan pengertiannya atas kebencian Iran terhadap Barat. "Saya pikir penting untuk menerima, bahwa Iran, karena besarnya urgensi posisi geopolotiknya, telah menjadi objek dari cukup banyak penyalahgunaan negara-negara Barat."[995] Dalam malam pertandingan sepak bola antara Amerika Serikat dan Iran pada Piala Dunia di Prancis, 21 Juni 1998, Clinton menyampaikan sebuah pernyataan yang kemudian disiarkan ke seluruh dunia: "Sebagaimana hari ini kita memeriahkan pertandingan antara atlet Amerika dan Iran, saya berharap hal ini bisa menjadi langkah untuk mengakhiri ketegangan antara kedua negara. Saya senang sekali bahwa sepanjang tahun lalu, Presiden Khatami dan saya telah bekerja untuk mendorong lebih banyak lagi interaksi antar-warga, sekaligus membantu warga negara kami untuk mengembangkan pengertian yang lebih baik terhadap kekayaan peradaban masing-masing."

Tetapi diplomasi sepak bola, atau kemudahan pengurusan visa, ataupun retorika yang lebih halus tidak berhasil mencairkan hubungan antara kedua negara. Ironisnya, sanksi ekonomi dan meningkatnya retorika Clinton menjadi hambatan paling sulit bagi proses saling-mendekat ini. Sementara kegagalan Teheran dan Washington terutama ada pada proses komunikasi, isyarat yang keliru, dan sikap Iran yang terlalu-percaya diri, maka Israel dan kelompok pro-Israel terus memberikan hambatan-hambatan politik dalam setiap tahap proses saling-mendekat Iran dan Amerika Serikat ini.[996] Pendekatan Clinton terhadap Iran membuat para pendukung Israel di Amerika Serikat khawatir, khususnya kelompok yang tergabung dalam AIPAC, yang telah menjadikan kebijakan pembendungan terhadap Iran sebagai prioritas dan berusaha menentang proses dialog dengan Iran.[997] Agar ketidaksetujuan AIPAC ini jelas bagi Washington, Kementerian Luar Negeri Israel menginstruksikan pada diplomatnya untuk memboikot konferensi di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh para pejabat Iran.[998]

Doktrin Periperial Plus

Kegembiraan Washington dan Eropa atas pergerakan kelompok reformis di Iran tidak pernah sampai ke Israel. Berbagai usaha Netanyahu untuk mendekati Rafsanjani hanya membuahkan hasil yang sedikit meskipun Iran sudah menurunkan retorika dan

993
994
995
996
997
998

sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina. Pada 1997, meskipun Khatami berhasil memenangkan pemilu, pemerintahan Netanyahu kecewa terhadap strategi program rudal dan nuklir Iran yang tetap dilanjutkan. Meskipun Israel mengakui bahwa rudal ini tidak beroperasi, pemerintahan Likud mulai kehilangan kepercayaan terhadap Iran.[999]

Pada 1997 Netanyahu justru mulai menggunakan bahasa dan retorika yang sama terhadap Iran sebagaimana para pendahulunya. Dia merubah keputusan sebelumnya dan mengisyaratkan bahwa Iran lebih berbahaya daripada Irak karena Iran "memiliki ambisi global. Mereka memiliki sebuah ideologi."[1000] Dia berbicara kepada para pemimpin Yahudi-Amerika bahwa pemerintahannya akan "membiarkan pemerintahan Rusia yakin terkait syarat-syarat" atas penentangan Israel terhadap dugaan bantuan Rusia bagi program rudal balistik Iran.[1001] Netanyahu juga menuduh Iran sedang mengembangkan rudal yang mampu menjangkau Amerika Serikat. "Kami percaya bahwa Iran bertujuan mengembangkan rudal balistik, pertama untuk menjangkau Israel, lalu Eropa, lalu untuk menjangkau radius 10,000 kilometer (6,000 mil)—artinya rudal tersebut dapat menjangkau garis pantai timur Amerika Serikat," Netanyahu menegaskan.[1002] Meskipun program rudal Iran masih dalam tahap awal, program ini memberikan sebuah tantangan baru bagi Israel. Tidak seperti program rudal di Syria—sebuah negara yang dengan mudah dapat diserang kembali—ancaman rudal baru ini terletak dekat dengan batas wilayah operasional Angkatan Udara Israel.[1003]

Retorika agresif Israel sangat terpengaruh oleh kemenangan pemilu Khatami. Hanya beberapa hari setelah kemenangan kelompok reformis, Menteri Luar Negeri Israel David Levy memperingatkan bahwa jika Iran tidak merubah cara mereka, maka Iran akan menghadapi sebuah koalisi global sebagaimana kekuatan yang memerangi Irak pada 1991.[1004] Perhatian utama Israel pada dugaan ancaman rudal Iran awalnya diragukan oleh pihak Washington. Mengingat bahwa Iran tidak memiliki teknolgi rudal apapun pada waktu itu dan sikap diam Netanyahu terhadap Iran selama lebih dari sembilan bulan dan pada waktu yang sama menekankan Irak sebagai sebuah ancaman, perubahan sikap Israel ini menarik perhatian pemerintahan Clinton. Para pejabat Amerika ini semakin kecewa atas keengganan Netanyahu untuk menindaklanjuti proses damai, sekaligus khawatir bahwa ancaman rudal ini merupakan sebuah taktik pengalihan. "Beberapa pejabat di pemerintahan Clinton berpandangan bahwa perhatian Netanyahu pada isu rudal Iran merupakan bentuk perubahan saluran dari persoalan-persoalan dalam perjanjian Oslo," David Makovsky dari lembaga *think tank* bernama *Washington Institue for Near East Policy*, menjelaskan.[1005]

Kecurigaan Amerika ini ternyata tidak berdasar—kelompok sayap kanan Israel secara tradisional telah berusaha mengalihkan perhatian Washington dari persoalan konflik Palestina. "Bagi setiap orang, jelas sekali bahwa Iran menjadi isu utama bagi Barat karena dalam situasi ini kita berada dalam lingkaran isu yang lebih luas dan menurunkan kita ke dalam status sekunder masalah kita dengan Palestina," Shlomo Ben-Ami, menteri

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

luar negeri kelahiran Maroko pada masa Perdana Menteri Ehud Barak menjelaskan.[1006] Tetapi Netanyahu tidak bergeming, dan tetap memperingatkan Amerika Serikat bahwa "seluruh ekonomi global akan tersandera Iran" jika Teheran berhasil memproduksi rudal balistik, dan bahwa Iran berencana untuk mendominasi wilayah Timur Tengah dan menjadi sebuah kekuatan dunia.[1007] "Hal ini terdengar fantastis tetapi Iran ingin menjadi kekuatan dunia melalui sebuah ideologi global dengan dominasi kelompok fundamentalis, yang melihat Barat sebagai musuh terbesarnya," dia berbicara pada wartawan pada November 1997.[1008]

Kegagalan Netanyahu menjangkau pemerintahan Rafsanjani membuat Israel berkesimpulan bahwa penentangan Iran akan tetap terjadi siapapun rezim yang berkausa di Iran, menganggap kemampuan Iran menjadi sebuah ancaman. Ketika Iran tetap mempertanyakan eksistensi Israel, Israel merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali tetap waspada atas kekuatan Iran, bahkan jika langkah-langkah Iran tidak sesuai dengan retorikanya. Tel Aviv mempertimbangkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali mempengaruhi kemampuan Iran untuk beroposisi terhadap Israel dengan mennghalangi program rudal dan nuklir Iran." Proses moderasi yang terjadi di Iran tidak berarti bahwa mereka akan menghentikan program nuklirnya," Ranaan Gissin, mantan juru bicara Perdana Menteri Ariel Sharon, menjelaskan. "Bahkan jika rezim di Iran berubah, kelompok fundamentalis ini akan tetap memberikan pengaruh pada Iran. Saya juga tidak melihat negara manapun akan benar-benar menghentikan program nuklirnya kecuali terpaksa. Dengan kemauan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah berhenti, meskipun rezim berubah."[1009]

Situasi ini membuat Israel menghadapi dilema besar. Kegagalan menjangkau Iran dan keengganan Netanyahu melakukan proses damai dengan Palestina, membuat Israel menghadapi ancaman dari lingkaran dalam (*inner circle*) dan wilayah periperial—karena perkembangan teknologi Iran membuatnya semakin dekat ke Israel. Meskipun kegagalan menjangkau kembali Iran akhirnya membuat para pendukung doktrin periperial terdiam—yang keyakinannya tentang kerjasama Iran-Israel tak tergoyahkan oleh revolusi 1979, pola pikir doktrin periperial masih kuat dalam jiwa Israel dan termanisfestasi melalui sebuah penafsiran baru.[1010]

Ketika Israel yakin bahwa mereka tidak dapat berdamai baik dengan negara Arab maupun negara periperial Iran, logika doktrin periperial mendorong Israel untuk mengimbangi negara Arab dan Iran dengan beraliansi dengan negara-negara yang bersahabat di luar wilayah periperial. "Lihatlah, ada negara periperial lama dan periperial baru," anggota Knesset, Ephraim Sneh, pendukung utama pandangan ini, berbicara pada saya. "Negara periperial lama ditujukan untuk mengepung musuh-musuh Israel dari negara Arab. Itulah kasus Iran pada waktu itu. Sekarang kita harus memiliki sebuah negara periperial baru untuk mengepung Iran." Pada tahun 1996, Sneh menulis dalam bukunya *Israel After the Year 2000* tentang kebutuhan untuk melemahkan Iran dengan menjalin

1006

1007

1008

1009

1010

kerjasama dengan apa dia sebut sebagai "negara periperial baru (*the new periphery*)."[1011] Dalam strategi "periperi-plus" ini, negara periperial baru terdiri dari negara periperial baru dan lama. Turki merupakan negara "periperial baru" yang paling penting—merupakan negara Muslim tetapi non-Arab, seperti Iran. India merupakan negara "periperial baru" yang paling penting—yang berposisi sebagai "Iran baru". India merupakan negara mayoritas non-Muslim dan non-Arab yang berada di wilayah paling luar dari wilayah pinggiran (periperial) regional Timur Tengah yang secara substansial telah menggantikan Iran dalam pandangan strategis Partai Likud. Negara periperial baru lainnya ada di wilayah Kaukasus dan beberapa negara republik di Asia Tengah.[1012]

Munculnya kerjasama Israel-Turki-India sangat tidak terduga. Hal ini menandai evolusi logis dari sepasang hubungan strategis yang telah memetakan masa depan yang sama untuk situasi yang lebih baik dalam 1990-an.[1013] Kenyatannya, para ahli strategi Israel masih heran mengapa Negara Yahudi membutuhkan waktu yang lama untuk mengakui adanya kesamaan kepentingan bagi India dan Israel. "Israel selalu berpandangan bahwa 'Apa yang salah dengan India?' Mengapa mereka berusaha menjadi pemimpin Gerakan Non Blok yang terdiri atas mayoritas negara Muslim ketika kita merupakan sekutu alami mereka?"[1014] meskipun hubungan strategis dengan India dan Turki mampu memenuhi berbagai tujuan, langkah untuk melemahkan Iran merupakan langkah paling penting bagi Negara Yahudi.[1015]

Bahaya terbesar yang diberikan Iran kepada Israel pasca 1996 merupakan kemampuan Iran sebagai sebuah kekuatan regional yang dapat memberikan tantangan kepada kekuatan militer dan dominasi nuklir Tel Aviv sekaligus membatasi kemampuan manuver Negara Yahudi baik secara militer maupun politik.[1016] Serangan nuklir Iran sendiri tidak menjadi bagian dari perhatian utama Israel. Bukan hanya karena ketidakmampuan Iran, tetapi meskipun pada akhirnya program rudal Iran dapat beroperasi, mereka tidak akan mampu menghancurkan Israel tanpa menyebabkan penghancuran dirinya sendiri karena Israel memiliki kemampuan serangan-balik. Melalui kapal selam senjata nuklir buatan-Jermannya, Israel akan mampu untuk membalas serangan nuklir dari Iran, yang membuat Israel menjadi sebuah negara dengan kekuatan antisipatif yang tangguh (*formidable deterrence*). "Kemampuan apapun yang mereka miliki, mereka tidak dapat menghancurkan kemampuan Israel untuk membalas," Gissin menjelaskan.[1017] Tetapi menguatnya kemampuan Iran setidaknya mampu memberikan tantangan bagi persepsi atas superioritas kekuatan militer Israel dan kemampuan bermanuver Israel yang diuntungkan oleh persepsi ini. "Iran akan merusak citra bahwa kami adalah sebuah negara adidaya yang tidak bisa dikalahkan," Jenderal Amos Gilad menjelaskan.[1018]

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

Situasi ini memberikan keuntungan bagi organisasi seperti Hezbollah, yang akan merasa bahwa mereka dapat bertindak di bawah perlindungan Iran.[1019] Potensi serangan balik Israel akan membatasi secara signifikan jika eskalasi terhadap Hezbollah dapat memancing respon dari Iran. "Jika negara lain memiliki bom nuklir, mereka akan membendung Israel, memborgol tangan kami, dan mengantisipasi setiap jenis pembalasan. Hal ini sangat penting," Gilad menjelaskan.[1020] Dalam situasi seperti ini, Israel bisa terpaksa untuk menerima konsesi teritorial yang bisa mereka hindari. "Hal ini akan memberikan negara Arab kekuatan nuklir. Saya tidak ingin negosiasi antara Israel dan Palestina dilakukan di bawah bayang-bayang bom nuklir Iran," Sneh menjelaskan.[1021]

Kekhawatiran ini tidak berarti bahwa Israel akan menolak untuk mendekati Iran meskipun Israel tidak berharap banyak; bahwa akan ada sebuah terobosan dari pemerintahan Khatami. Pada Oktober 1997, Menteri Luar Negeri Ariel Sharon berusaha membayar hutang Israel kepada Iran sejak rezim Pahlavi melalui Rusia dan melalui bantuan *Israel-Arab Friendship Association,* sebuah organisasi yang berusaha untuk memperbaiki hubungan Israel-Iran dengan menerima peran dan aspiran Iran di Timur Tengah. "Jika Israel memberikan Iran kekuatan regional, maka ada ada sebuah integrasi kepentingan," Yehoshua Meiri, kepala organisasi ini, berbicara pada *Jerusalem Post*.[1022] Sharon berpandangan bahwa penyelesaian hutang akan membantu menurunkan ketegangan dengan Iran dan membuka saluran ke pemerintahan Khatami. Sharon mendapatkan dukungan dari beberapa elemen dalam komunitas intelijen Israel yang berpandangan bahwa pembicaraan dengan Iran merupakan sesuatu yang perlu dan mungkin.

Tetapi Menteri Pertahanan Israel mementang keputusan Sharon dan berpandangan bahwa meningkatkan pendapatan Iran sama saja dengan membantu langsung musuh terbesar Israel untuk memiliki rudal jarak-jauh dan kemampuan pengembangan nuklir. Dengan mengungkapkan kontradiksi antara membuka diri kepada Iran sementara mengkampanyekan isolasi internasional terhadap Teheran, para pejabat Kementerian Pertahanan berpandangan bahwa "membayar hutang kepada Iran akan menjadi kesalahan serius. Kita tidak bisa membayangkan bahwa pada satu sisi Netanyahu harus menyatakan Iran merupakan musuh nomor satu dan para asistennya harus berusaha meyakinkan berbagai negara untuk bergabung dalam aksi embargo Amerika Serikat, sementara di sisi lain seorang menteri senior harus berinisiatif mengembalikan uang. Kita sedang membodohi diri kita sendiri."[1023] Pada akhirnya, Israel telah membuat dirinya menjadi hambatan terbesar yang menghalangi proses saling-mendekat Amerika Serikat dan Iran.[1024]

Kontradiksi antara kebijakan Israel terhadap Iran dan apa yang diminta Washington telah menyebabkan beberapa masalah di Amerika. Misalnya, industri kacang pistasi Amerika hancur karena pasar Israel dibanjiri oleh kacang pistasi Iran dengan mengorbankan kacang pistasi yang diproduksi di California.[1025] Meskipun volume

1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025

perdagangan ini masih kecil—185 juta dolar pada 1997 dan 360 juta dolar pada 1998—nilai simboliknya sangat signifikan karena Israel berhasil menekan Washington untuk memutuskan seluruh hubungan dagangnya dengan Iran.[1026] Beberapa waktu kemudian terungkap bahwa perusahaan-perusahaan Israel tidak hanya bertransaksi kacang dan barang komersial lainnya dengan Iran, tetapi juga peralatan kimia dan militer.[1027] Iran sendiri tidak mempermasalahkan aspek ideologi. "Seorang pencuri telah mencuri uang kita, mengapa kita harus peduli dengan ideologi mereka?" Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hadi Nejad-Hosseinian beralasan.[1028]

Negosiasi awal terkait hutang—yang diperkirakan mencapai 2 milyar dolar, termasuk bunga pinjaman—sudah dimulai, tetapi kemudian dihentikan atas instruksi Netanyahu.[1029] (Kasus ini selanjutnya dibawa ke arbitrase di Mahkamah Internasional di kota The Hague dan masih tidak terselesaikan.) Kegagalan Netanyahu mencairkan hubungan dengan Rafsanjani, keyakinan mereka bahwa Iran akan tetap memusuhi Israel apapun yang terjadi, doktrin militernya bahwa kemampuan militer Iran harus dibendung, dan kekhawatiran Israel bahwa pemerintahan Clinton bisa saja mengorbankan kepentingan Israel untuk membuat perjanjian dengan Khatami mendorong Israel untuk menghentikan perubahan sikap Iran terhadap Israel di bawah rezim Khatami.

Kebijakan Israel yang Baru terhadap Iran

Pragmatisme Khatami tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat, Uni Eropa, dan blok Arab. Munculnya kelompok reformis Iran semakin meningkatkan usaha Teheran mengintegrasikan kembali Iran ke dalam komunitas internasional.[1030] Situasi ini mempengaruhi posisi Iran terhadap Israel. Yang paling penting, kebijakan dan sikap Iran terhadap Israel mengalamai modifikasi selama rezim Khatami.[1031] Ketika usahanya untuk memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Arab mulai membuahkan hasil, kebutuhan Iran terhadap rakyat arab berkurang, sebagaimana kebutuhan Iran untuk bersikap antagonis terhadap Israel sekaligus menentang proses perdamaian.[1032] Ketika hubungan Iran dengan Arab dan Uni Eropa semakin kuat, maka Iran semakin terisolasi dari berbagai perkembangan isu Israel-Palestina.

Setelah sukses menjati tuan rumah pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di kota Teheran pada 9979, pemerintahan Khatami percaya bahwa hubungan Iran dengan negara regional telah cukup kuat untuk menghadapi konsekwensi dari kesepakatan antara Israel dengan Palestina. Singkat kata, proses perdamaian ini tidak lagi menjadi ancaman bagi posisi Iran di Timur Tengah.[1033] Langkah pertama adalah mengurangi (agresifitas, *pen.*) retorika Iran. Meskipun kelompok reformis lebih bersemangat memberikan penentangan terhadap negara Israel daripada kelompok konservatif, dan meskipun mereka mengakui bahwa sikap keras Iran diperlukan untuk melawan bahaya dari proses perjanjian Oslo antara 1994-1995, mereka masih percaya bahwa keaktifan dan

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033

penentangan terbuka Iran terhadap proses damai telah merusak citra negara Iran dan semakin mempersulit proses melepaskan diri dari strategi *containment* (yaitu, strategi geopolitik untuk menghentikan proses ekspansi sebuah negara, *pen.*).[1034]

Kelompok reformis berpandangan bahwa usaha Israel dan Amerika Serikat untuk menciptakan sebuah tatanan baru di Timur Tengah dengan mengorbankan Iran dapat dilawan tanpa memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok teroris Palestina dan mendorong Iran terlibat dalam konflik yang lebih jauh dengan blok Barat. Seorang menteri pada rezim Khatami, Abdullah Nuri, melakukan terobosan terhadap sebuah tabu dalam Republik Islam dengan membicarakan secara terbuka sebuah solusi alternatif terkait isu Palestina yang diusulkan oleh Khomeini sendiri: "Ketika negara Arab memutuskan untuk tidak mengambil langkah peperangan, baik secara politik, ekonomi, atau mililter, apakah kita mau memerangi Israel? Saat ini, warga Palestina memiliki sebuah pemerintahan, yang kita akui, dan mereka bertanggungjawab atas nama rakyat mereka sendiri. Situasi saat ini tidak ideal, tetapi kita harus menghadapi kenyataan ini dan berusaha tidak menjadi sebuah mangkuk yang lebih hangat dari pada sop (Idiom*:* Orang yang lebih peduli dengan urusan orang lain daripada orang yang bersangkutan, *pen.*)."[1035]

Kelompok reformis berpandangan bahwa penggunaan teror sebagai alat politik terlalu merugikan dan tidak bermoral, kelompok reformis juga menyatakan bahwa Iran sendiri merupakan korban teror.[1036] Mereka mengatakan bahwa senjata teror Rafsanjani juga membuat Israel mampu semakin memberikan gangguan pada hubungan Amerika-Iran.[1037] Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Khatami mengecam aksi terorisme terhadap Israel, meskipun dia juga memperingatkan bahwa dukungan bagi gerakan pembebasan merupakan persoalan lain. "Memberikan dukungan kepada masyarakat yang memperjuangkan pembebasan wilayahnya bukan, dalam pandangan saya, dukungan terhadap terorisme. Pada kenyatannya, dukungan ini merupakan dukungan terhadap pihak yang sedang memerangi terorisme yang dilakukan sebuah negara," Khatami berbicara pada CNN.[1038] Dalam sebuah pergeseran yang luar biasa ke arah kebijakaan awal Rafsanjani, Khatami kemudian tidak mengabaikan kemungkinan adanya negara Israel di wilayah historis Palestina.[1039] Pernyataan Khatami tidak hanya ditujukan untuk publik di Barat saja—satu bulan sebelumnya, presiden Iran yang berbicara lembut ini telah menyampaikan dalam pidatonya di OKI bahwa solusi dua-negara merupakan solusi yang bisa diterima.

Ketika Iran merasa bahwa mereka kembali berada di atas angin dalam rivalitasnya dengan Israel—proses perdamaian menemui kegagalan sementara Iran sedang mendapatkan pengakuan di regional—Teheran ingin mengkonsolidasikan situasi ini untuk mengurangi ketegangan dengan Israel dan memaksa Israel untuk tidak mengganggu proses saling-mendekat Amerika dengan Iran.[1040] "Ada sebuah kepentingan untuk menunjukkan pada Israel bahwa kami akan bahagia dengan sebuah resolusi konflik yang adil," seorang

1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

penasihat Khatami menjelaskan.[1041] Sebuah pembicaraan semi-resmi dengan Amerika yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga *think tank* di wilayah Skandinavia, para pejabat di Kementerian Luar Negeri Iran dan para akademisi mengungkapkan bahwa "perdebatan tentang Israel memanas" dan bahwa Iran tidak punya pilihan lain kecuali sepakat dengan solusi dua-negara. "Iran akan menghadapi kesulitan jika tidak menerima solusi dua-negara ini," para pejabat Iran ini mengisyaratkan pada teman bicaranya dari Amerika bahwa pemerintahan Iran telah menerima pandangan bahwa Israel merupaan sebuah kenyataan di regional Timur Tengah.[1042]

Dalam perdebatan tersebut, argumentasi dari Nuri menjadi pandangan yang menentukan. "Logika macam apa," Nuri berbicara,"yang menyatakan bahwa setiap pihak berhak berbicara dan memutuskan terkait Palestina dan keyakinan warga Palestina, tetapi warga Palestina sendiri tidak memiliki hak yang sama? Mengapa kita harus merasa berhak untuk memaksanakan pandangan kita pada tentang mereka?". Sebagian besar elemen reformis dalam kubu Khatami merupakan penentang aktif terhadap Negara Yahudi, tetapi mereka merasa bahwa hambatan terberat dalam isu Palestina harus dibebaskan dari pundak Iran.[1043] "Kami tidak ingin bersikap lebih Katolik daripada seorang paus," mantan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Maleki menjelaskan. "Ketika warga Palestina ingin melakukan negosiasi, mengapa Iran harus bersikeras pada langkah non-negosiasi?"[1044] Perdebatan ini mengungkapkan bahwa isu Palestina semakin nampak sebagai sebuah persoalan nasionalisme dan bukan sebuah persoalan keagamaan, sebagaimana yang diinginkan Khomeini.

Meskipun Khatami tidak pernah mengulangi argumentasi-argumentasi ini secara terbuka, secara perlahan Iran bergeser ke posisi pra-perjanjian Oslo terkait isu Palestina. Solusi apapun yang disetujui Palestina, Iran akan menerima solusi tersebut tanpa memberikan dukungan secara aktif dan tetap mempertahankan hak untuk mengkritisi setiap kesepakatan yang dinilai Iran tidak adil (tetapi tanpa mengambil langkah kongkrit untuk menentang kesepakatan tidak adil tersebut).[1045] "Kami tidak akan ikut campur dalam proses damai, tetapi kami akan mengekspresikan pandangan kami. Kami berhak untuk mengekspresikan pandangan kami, tetapi ekspresi ini tidak sama dengan mengintervensi proses damai. Kami akan menerima posisi Palestina, tanpa mendukungnya," Mohammad Reza Dehshiri, Menteri Luar Negeri Iran, menjelaskan.[1046] Dengan memegang teguh tradisi kebijakan luar negeri Iran, Teheran tetap bersikap kritis terhadap Israel, dan pemerintahan Khatami terus menolak untuk menerima Negara Yahudi sekaligus mendukung Palestina secara retoris. Tetapi alih-alih menyerukan penghancuran Israel, Khatami justru berusaha untuk mengarahkan komunitas internasional agar fokus pada ancaman gudang senjata nuklir Israel—yang belum terekspos—dan mendorong berbagai organisasi hak asasi manusia untuk mengecam tindakan Israel di wilayah-wilayah pendudukan.[1047] Secara pribadi, para pejabat Iran berbicara pada para pejabat Eropa dan Amerika bahwa revolusi Iran tidak membuat solusi dua-negara menjadi tidak dapat

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

diterima bagi Iran.[1048] Terlepas dari retorika Iran sebelumnya, para pejabat Iran melanjutkan, Teheran tidak berusaha untuk menghancurkan Israel dan menunjukkan fakta bahwa Khatami sendiri tidak pernah mempertanyakan keberadaan Israel.

Pergeseran kebijakan ini berulang kali disampaikan para pejabat Iran—dan pada beberapa waktu (disampaikan, *pen.*) langsung kepada para pejabat Israel. Menurut surat kabar harian Israel *Yediot Aharonot,* duta besar Iran untuk UNESCO, Ahmad Jalali, telah melakukan pertemuan dengan Kepala Rabi Israel, Eliahu Bakhsi-Doron secara rahasia dalam sebuah konferensi di Maroko pada Februari 1998. Bakhsi-Doron, yang pindah dari Israel ke Iran, dilaporkan telah berbicara pada Jalali bahwa "Iran bukanlah Irak dan tidak akan pernah menyerang Israel."[1049] Beberapa hari sebelumnya pada bulan yang sama, *Yediot Aharonot* memberitakan bahwa Wakil Presiden Iran Masumeh Ebtekar berbicara pada surat kabar tersebut dalam *World Economic Forum* di kota Davos, Swis, bahwa Iran sedang mempertimbangkan kembali kebijakan mereka terhadap Israel dan bahwa Iran akan menyambut baik dialog dengan Israel terkait persoalan-persoalan non-politik.[1050] Ebtekar kemudian membantah telah melakukan wawancara dengan surat kabar Israel ini dan menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan mengakui Negara Yahudi.[1051] (Pada 1979, ketika masih berusia 18 tahun sebagai seorang pelajar, Ebtekar pernah bekerja sebagai penerjemah selama pengambilan alihan kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Iran dan dijuluki "Sister Mary" oleh media Amerika. Seperti para penyandera lainnya, Ebtekar kemudian bergabung ke dalam kelompok reformis pada pertengahan 1990-an.)

Satu tahun kemudian, surat kabar harian Israel *Haaretz* memberitakan bahwa Iran, melalui pemerintahan Inggris, telah melakukan pendekatan terhadap Israel dengan permintaan negosiasi perjanjian rudal. Sebuah laporan yang tidak-terkonfirmasi menyatakan bahwa pihak Iran telah meyakinkan Israel bahwa pengembangan persenjataan Iran tidak diarahkan untuk menyerang Israel, tetapi untuk menyerang negara lain yang dianggap menjadi ancaman regional, terutama Irak.[1052] Meskipun Iran menegaskan bahwa mereka tidak pernah berbicara pada pejabat atau surat kabar Israel, mereka seringkali memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas posisi Iran terhadap Israel dalam pandangan publik internasional. Ketika berbicara dengan Hoosshang Amirahmadi dari *American Iranian Council,* duta besar Iran untuk PBB Javad Zarif menyatakan posisi baru Iran:

Amirahmadi:	Kebijakan resmi Israel—dipersepsikan secara umum—sedang bekerja untuk kehancuran Israel.
Zarif:	Iran tidak mengakui Israel secara resmi. Tetapi tidak sama dengan mengambil langkah kongkrit untuk menentang Israel. Kami telah berusaha menjelaskan bahwa Iran berusaha memusuhi atau berkonflik dengan siapapun. Iran telah berusaha menjelaskan dengan istilah-istilah yang paling umum dan paling khusus bahwa kami tidak mencari permusuhan.

1048

1049

1050

1051

1052

Pada saat yang sama, kami tidak pernah malu untuk menyatakan posisi kami bahwa kami tidak mengakui Israel. Ini adalah posisi yang kami pilih. Kami percaya bahwa posisi ini tidak cocok dengan keputusan untuk menerima apapun solusi yang dinginkan Palestina, yaitu, apapun yang mereka putuskan akan menjadi keputusan mereka. Jika keputusan itu akan membawa stabilitas dan keamanan regional, maka setiap pihak akan menyambut baik keputusan itu.

Amirahmadi: Dua bangsa, dua negara. Apakah itu solusi yang dapat diterima?

Zarif: Jika solusi ini dapat diterima oleh Palestna, kami tidak menentangnya.

Amirahmadi: Jadi, Anda berpendapat bahwa beberapa wilayah yang direbut Israel merupakan wilayah yang sah?

Zarif: Masalahnya adalah pendudukan yang berkelanjutan atas wilayah Palestina. Ketika masalah ini terselesaikan, dan bagaimana masalah ini diselesaikan tergantung pada Palestina dan Israel, ini adalah hal yang berbeda. Tetapi hal ini tidak tergantung pada keputusan kita. Kami hanya bisa menyampaikan analisa kami dan bahkan berusaha untuk memberikan masukan yang positif dan kondusif bagi keamanan dan perdamaian.

Amirahmadi: Dan kebijakan Anda adalah tidak ditujukan untuk menghancurkan masyarakat Israel?

Zarif: Kebijakan kami tidak ditujukan untuk menghancurkan masyarakat manapun.[1053]

"Hilang dalam terjemahan" (*lost in translation*) merupakan aspek penting dalam kebijakan Khatami terhadap Israel. Dengan mengakui solusi dua-negara, Iran akan memberikan pengakuan tidak langsung kepada Israel. Hanya sedikit dari blok Barat yang memberikan perhatian pada pergeseran yang halus tetapi penting ini. Kenyataan ini membuat pemerintahan Khatami sangat kecewa, yang kemudian memandang pengabaian ini sebagai indikasi lainnya atas ketidakluwesan sikap Washington terhadap Iran.[1054]

Barak hanya Melihat Lebanon

Meskipun telah menangkap "isyarat strategis dari Khatami bahwa Iran telah mempertimbangkan kembali kebijakannya," pola pikir periperial-plus mendorong pemerintahan Netanyahu untuk memandang Iran sebagai sebuah ancaman potensial.[1055] Ehud Barak dari Partai Buruh, sebagai suksesor Netanyahu, juga mengabaikan isyarat dari Iran ini. Sebagai seorang prajurit dengan tanda jasa terbanyak di *Israel Defense Forces* (IDF), Barak yang saat itu menjabat sebagai kepala staf IDF pernah mengkritisi sikap

1053

1054

1055

Yitzhak Rabin dan Shimon Peres terhadap Iran sebagai sikap yang kontra-produktif.[1056] Pada 1993, Barak pernah menyatakan bahwa ancaman yang nyata adalah Irak, dan dia tetap memegang pandangan ini—sampai pada taraf tertentu—saat dia mengalahkan Netanyahu pada pemilu 17 Mei 1999.

Ketika kekuasaan kembali berada di pihak Partai Buruh, kebijakan untuk mengakhiri pendudukan di Lebanon dan isu Palestina dan Syria kembali menjadi perhatian utama Israel, sementara Iran menjadi persoalan yang tidak lebih penting. "Iran bukanlah agenda kami yang sebenarnya. Selama dua tahun tersebut, saya pikir agenda utama sudah mengerucut pada dua persoalan utama, isu Palestina dan Syria. Saya tidak ingat sebuah rapat kabinet—rapat kabinet terbatas, yang disebut *kabinet kebijakan pertahanan-keamanan*—ketika Iran menjadi perhatian." Ben-Ami berbicara pada saya.[1057] Iran masih bergerak lambat untuk masuk ke dalam pantauan Israel karena tiga persoalan utama.

Pertama, hubungan Iran dengan kelompok Hezbollah mengalami kemunduran setelah Iran gagal mendekati Amerika Serikat pada awal dekade 1990-an. Pandangan moderat Rafsanjani dan keinginannya untuk membuat sebuah kesepakatan dengan Washington telah membuat marah elemen garis-keras dalam organisasi Lebanon. Suasana penentangan ini tersebar di Lembah Bekaa ketika Iran mengurangi keterlibatannya dalam perlawanan Hezbollah.[1058] Tetapi konferensi Madrid dan perjanjian Oslo mampu mengembalikan posisi strategis Hezbollah. Setelah gagal membangun hubungan erat dengan kelompok Sunni di Palestina, Iran kembali membutuhkan Hezbollah untuk membendung pengaruh Israel. Melalui para pejuang Syiah Lebonan, Iran dapat mengumpulkan informasi intelijen sekaligus menimbulkan kerugian yang besar pada Negara Yahudi atas tekanannya pada Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Yang paling penting, melalui hubungannya dengan Hezbollah Iran tidak perlu lagi mengembangkan rudal balistik untuk menjangkau Isarael. "Hezbollah merupakan perpanjangan senjata dari Iran," Ben-Ami menjelaskan, dan kelompok militan ini telah membuat Iran menjadi sebuah negara perbatasan. "Inti dari kebijakan mereka adalah menganggu proses perdamaian, dan cara terbaik untuk mengganggu proses perdamaian adalah mengacaukan kekuatan Israel di Lebanon."

Sebagian besar elit Israel memandang bahwa kerjasama Iran dengan Hezbollah lebih buruk akibatnya daripada hubungan Iran dengan kelompok rejeksionis Palestina. Ada pandangan yang menganggap bahwa tanpa koneksi Iran dengan Hezbollah, hubungan Israel-Iran dapat menjadi lebih baik. "Persoalannya bukan pada Palestina, atau rezim (Iran), tetapi pada Hezbollah," Jenderal Amnon Lipkin-Shahak, yang menjadi Kepala Staf Jenderal ke-15 pada 1995, menjelaskan.[1059] Ami Ayalon, direktur agen rahasia Israel *Shin Bet,* berpandangan bahwa Iran tidak hanya mempersenjatai Hezbollah dengan ribuan roket dan rudal yang mampu menghancurkan sebagian besar wilayah utara Israel, tetapi Iran juga mengarahkan organisasi Lebanon untuk mempersiapkan berbagai fasilitas yang memungkinkan aksi-aksi teror masuk ke dalam wilayah Israel.[1060] Ketika biaya dan penentangan atas langkah pendudukan wilayah selatan Lebanon semakin meningkat, Israel

1056

1057

1058

1059

1060

semakin sadar bahwa Lebanon telah berubah menjadi sebuah jebakan. Alih-alih memberikan jaminan keamanan bagi Israel, langkah pendudukan ini justru memberikan peluang bagi Iran untuk men-skakmat Israel. “Kami merasa bahwa kami telah disandera,” Ben-Ami berkomentar.[1061]

Kedua, invasi Israel terhadap Lebanon telah memberikan peluang bagi Iran untuk mempengaruhi konflik Israel-Palestina secara tidak langsung melalui pengaruhnya di Lebanon. Hubungan Iran dengan Hezbollah membuatnya menjadi alat perusak paling ampuh—sebuah fakta yang tidak dapat diabaikan pemerintahan Barak ketika pemerintahannya mempersiapkan untuk menjalankan kembali proses perdamaian. Israel sudah menyadari adanya kepentingan Iran ketika menggunakan Hezbollah untuk melakukan penetrasi ke wilayah Palestina, dan pemerintahan Barak sudah memprediksi bahwa Iran akan mempertajam kebijakan anti-Israelnya ketika proses perdamaian kembali berjalan. “Iran adalah musuh dari proses perdamaian. Mereka tidak tertarik pada perjanjian perdamaian antara Israel dan dunia Arab, barangkali karena situasi ini akan semakin mengisolasi Iran.”[1062]

Ketiga, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, ketertarikan pemerintahan Clinton pada Khatami memicu kekhawatiran bahwa Washington akan membuat kesepakatan dengan Teheran dan meninggalkan Israel.[1063] Meskipun skenario seperti itu tidak mungkin terjadi, pemerintahan Israel tidak ingin mengambil resiko. “Ketika Anda memulai negosiasi, Anda tahu kapan mereka memulai [tetapi] Anda tidak akan tahu kapan mereka berhenti,” mantan kepala Mossad, Efraim Halevi, berbicara pada saya. “Ada sebuah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat bisa saja membuat sebuah keputusan yang tidak disukai Israel.”[1064] Jelas sekali bahwa pembicaraan dengan Iran tidak akan terjadi jika Amerika tidak memberikan sebuah imbalan, tanpa membuat sebuah kompromi untuk memenangkan konsensi dari Iran. Dan lebih dari semua itu, Israel khawatir jika Washington akan mengakui legitimasi rezim Iran dan keunikan posisinya di regional, yang akan mengorbankan posisi Israel. Perjanjian ini akan berarti bahwa “Iran dapat memiliki kebebasan untuk melangkah, bahwa Amerika akan memasukkan mereka ke dalam daftar negara pendukung terorisme [dan] bahwa mereka dapat memiliki peran regional.”[1065] Pada akhirnya Iran hanya akan melakukan sedikit perubahan atas kebijakan regionalnya karena Iran menghargai hubungannya hanya dengan Washington, bukan dengan Israel. Sepanjang Israel tidak berada dalam kesepakatan, situasi yang ada tidak cukup kuat untuk mengarahkan perhatian Israel pada Iran, yaitu, dukungan Iran terhadap Hezbollah dan kelompok rejeksionis Palestina, program rudalnya, dan program senjata nuklirnya. Israel khawatir jika Iran bersedia melakukan pembicaraan hanya untuk mengurangi tekanan Amerika. “Semua itu merupakan senyuman manis. Mereka bersedia berbicara hanya untuk keluar dari tekanan Amerika. Itu semua hanya sebuah trik,” Dan Meridor dari pemerintahan Netanyahu berkomentar.[1066]

1061

1062

1063

1064

1065

1066

Akibatnya, selama masa depan hubungan Amerika Serikat dengan Iran tampak suram, Israel lebih baik mengisolasi Iran daripada bersikap baik pada Iran. Situasi *status quo,* ketika Iran menjadi musuh yang tidak mampu memberikan ancaman nyata bagi Negara Yahudi, merupakan situasi yang lebih baik daripada situasi yang memungkinkan adanya kesepakatan antara Amerika dengan Iran yang akan membuat Israel menghadapi Iran sendirian sementara Iran akan menggunakan kedekatannya dengan Washington untuk mengembangkan kemampuan militernya agar tidak berada dalam kontrol siapapun. "Jelas sekali bahwa mereka tidak akan menghentikan program pengembangan nuklir hanya karena Presiden Clinton," Ben-Ami berkomentar. "Mereka akan menagih imbalan, dan imbalan ini bisa saja merupakan sesuatu yang tidak menguntungkan Israel." Bahkan jika Iran mengakui solusi dua-negara, Iran akan memilih sikap ideologis terhadap Israel ketika posisi mereka semakin menguat. Sebagaimana Israel yang selalu menekankan adanya pengakuan langsung dari negara Arab sebagai kompensasi atas keberhasilan proses negosiasi, Israel juga menekanan hal yang sama dari Iran untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Iran tidak akan mengalami re-radikalisasi.

Tetapi pemerintahan Clinton memberikan isyarat adanya peningkatan keinginan untuk berbicara dengan Iran sehingga Israel ketakutan. Beberapa orang di lingkaran pemegang kebijakan luar negeri Israel berpandangan bahwa berlanjutnya sikap oposisi terhadap sebuah perkembangan yang nampak tidak terhindarkan hanya akan semakin melemahkan posisi Israel. Sebuah kenyataan baru muncul yang tidak dapat diabaikan Israel. "Hingga saat ini, Israel tetap menolak hubungan apapun yang mungkin terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran," David Menashri, pakar Israel paling terkemuka tentang Iran dan pendukung hubungan Israel-Iran yang bekerja pada komite Iran untuk Israel, berkomentar. Dia juga menyatakan bahwa sekarang dia tidak yakin bahwa Israel dapat menghentikan proses tersebut."[1067]

Setelah pemilihan anggota parlemen Iran pada Februari 2000, ketika kelompok reformis menguasai mayoritas kursi di *Iranian Majlis* (badan legislatif Iran), Menteri Kehakiman Israel, Yossi Beilin, arsitek utama perjanjian Oslo, berpandangan—dengan dukungan diam-diam Israel dari Kementerian Luar Negeri Israel—bahwa Israel harus mempertimbangkan kembali hubungan Israel dengan Iran.[1068] "Pasca pemilihan umum, Presiden Khatami dan Iran merupakan sebuah negara yang jauh lebih berbeda dan lebih kompleks daripada yang pernah kita lihat," Beilin menulis di surat kabar *Haaretz.* "Kita harus mempertimbangkan kembali sikap kita terhadap Iran."[1069] Tetapi sikap pemerintahan Barak untuk menyelesaikan isu Israel-Palestina menyulitkan Israel untuk membuat Iran memberikan perhatian yang diperlukan Israel. Tidak ada gunanya Barak memasukan gagasan untuk mendorong dialog Amerika Serikat-Iran ke menjadi agenda kabinet. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ben-Ami percaya bahwa langkah tersebut merupakan sebuah kesalahan. Mendorong dialog Amerika Serikat-Iran "akan menjadi langkah yang baik" untuk melayani kepentingan Israel karena, sebagaimana yang dikatakan oleh perdana menteri sendiri, Iran tidak akan pernah berdamai dengan Setan kecil sebelum berdamai dengan Setan besar.[1070]

1067

1068

1069

1070

Tetapi alih-alih mendorong dialog Amerika-Iran, segera setelah mejabat pada 1999, Barak merubah status Iran dari musuh menjadi sebuah ancaman sebagai persiapan untuk penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon pada Mei 2000. Langkah untuk menolak Iran sebagai seorang musuh menunjukkan bahwa Israel tidak memandang Iran sebagai ancaman yang abadi dan tak terhindarkan. "Posisi terbaru Israel adalah bahwa Israel tidak memiliki konflik apapun dengan rakyat Iran, negara Iran atau dengan Islam," beberapa diplomat Israel menegaskan. Pergeseran ini sudah dikerjakan oleh komite Iran, yang telah membuat seruan terhadap sebuah kebijakan rekonsiliasi sejak pemerintah Yitzhak Rabin.[1071]

Keputusan ini dipicu oleh ketertarikan pemerintahan Clinton dengan gagasan bahwa Khatami akan menjadi Mikhail Gorbachev-nya Iran, pemimpin Uni Soviet hingga kejatuhan Soviet pada 1991. Pihak Israel tidak ingin terhalang dari potensi dialog, dan pada saat yang sama mereka tidak ingin nampak menabuh genderang perang ketika Amerika Serikat berusaha melakukan dialog.[1072] Untuk membuat sinyal semakin kuat, secara tidak resmi Israel mengecam serangan teroris terhadap penasihat Khatami dengan harapan bahwa langkah ini akan memperkuat kelompok moderat di Iran.[1073] Tetapi Barak tidak pernah serius untuk mendekati Iran. Kenyatannya, Iran tetap mengembangkan rudal Shahab-III yang dipandangan Israel sebagai tanda yang jelas atas ambisi Iran terhadap senjata nuklir.[1074] David Levy, yang bekerja sebagai menteri luar negeri baik pada rezim Netanyahu maupun Barak, kemudian mengungkapkan bahwa Israel telah menolak tawaran Iran untuk membuka pembicaraan rahasia. "Setelah melakukan peninjauan dan pertimbangan secara hati-hati atas implikasi dari pembicaraan ini," pemerintahan Barak memutuskan bahwa "semua hal ini bukanlah omong kosong" dan menolak tawaran Iran.[1075] (Seperti biasa, Iran membantah telah mengirimkan penawaran tersebut, dan menuduh Israel telah merekayasa berita untuk merusak citra Iran di dunia Islam.)[1076]

Pada 17 April 2000, Barak melakukan langkah yang oleh beberapa perdana menteri sebelumnya berani dilakukan—Barak memulai penarikan pasukan dari wilayah—wilayah pendudukan di selatan Lebanon, dan mempertimbangkan bahwa resiko mempertahankan pasukan di wilayah tersebut lebih besar daripada persepsi publik bahwa Israel telah kalah. Penarikan pasukan ini berlangsung kurang dari 1 bulan dan mendapatkan dukungan penuh dari publik Israel. (Lebanon dan Syria menyatakan bahwa Israel masih menduduki sebuah wilayah di Lebanon bernama *Shebaa Farms*. Israel, dengan dukungan PBB, mengklaim bahwa wilayah *Shebaa Farms* merupakan bagian dari wilayah Syria, bukan Lebanon.) Barak memilih untuk menyelesaikan proses penarikan pasukan ini sebelum status final dari negosiasi dengan Palestina dilanjutkan, sehingga Iran dan Hezbollah tidak akan bisa menganggu proses negosiasi, dan untuk menghalangi kemampuan Iran agar tidak membatasi manuver Israel. "Dengan menarik pasukan dari Lebanon dibawah dukungan PBB, kami telah membuat Iran tidak memiliki peluang untuk mengeksekusi kebijakan tersebut," Ben-Ami menjelaskan.[1077]

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

Iran secara resmi mengumumkan kemenangan dan menyatakan bahwa proses penarikan pasukan merupakan bukti dari kegunaan langkah kekerasan untuk melawan Israel. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei memberi pernyataan pada 25 Mei bahwa "kemenangan ini menunjukkan bahwa solusi untuk menghadapi intimidasi dan kekejaman kelompok Zionis penjajah adalah logika perlawanan, Jihad dan dan loyalitas."[1078] Satu minggu kemudian, dia menambahkan bahwa peristiwa di Lebanon "bisa terulang, dan terjadi di Palestina sendiri, mungkin saja dalam beberapa tahun, wilayah Palestina yang mengalami pendudukan secara bertahap, dan pada akhirnya seluruh wilayah Palestina yang mengalami pendudukan akan kembali menjadi milik warga Palestina."[1079] Tetapi secara pribadi Iran tahu bahwa kemenangan ini memiliki sisi lain. Pengaruh Iran terhadap Israel tergantung pada bantuan yang Iran berikan pada Hezbollah.

Di sisi lain, *raison d'etre* organisasi-organisasi Lebanon adalah perlawanan terhadap pendudukan yang dilakukan Israel. Aksi pendudukan ini juga memberikan alasan bagi Iran untuk membangun hubungan strategis di wilayah Levant. Tanpa pendudukan yang dilakukan Israel, semua situasi ini akan terganggu. Jika Hezbollah tidak mampu mentransformasikan dirinya dari perlawanan gerilya menjadi sebuah gerakan politik, Iran akan kehilangan pengaruhnya di Lebanon yang akan memperlemah aliansi Iran-Syria. Proses penarikan pasukan ini juga menghilangkan salah satu daya tawar Syria utama terhadap Israel—memicu spekulasi bahwa Damaskus bisa saja memulai konflik dengan Israel. Khatami merasa bahwa masuknya kembali Israel ke wilayah Lebanon akan memberikan bahaya yang lebih besar bagi masa depan Hezbollah dan mendorong Syria untuk menahan diri. Khatami menyampaikan pada Presiden Syria Hafez al-Assad bahwa setelah "kemenangan bersejarah atas Zionis," Hezbollah harus tetap bersikap "rendah hati dan sederhana" agar tidak merusak "posisi moral yang tinggi" yang telah mereka dapatkan.[1080]

Camp David II dan Intifada Al Aqsha

Segera setelah penarikan pasukan dari Lebanon, Barak kemudian mengalihkan perhatiannya pada Palestina untuk menyelesaikan konflik selama-lamanya. Prajurit dengan tanda jasa terbanyak ini percaya bahwa publik Israel akan mendukung berbagai konsesi kepada Palestina jika kesepakatan perdamaian tercapai—seluruh persoalan yang ada harus diselesaikan dan penyelesaian konflik harus disepakati. Dengan antusiasme yang tinggi tapi persiapan yang kurang, Gedung Putih memfasilitasi pertemuan antara Palestina dan Israel di Camp David pada 11 Juli dengan harapan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan final untuk menyelesaikan konflik. Presiden Clinton memiliki kepentingannya sendiri—masa kepresidenannya akan berakhir dan langkah ini akan menjadi penutup rekam jejaknya.

Meskipun Israel menuduh Iran telah meningkatkan dukungan pada kelompok rejeksionis Palestina untuk menyabotasi proses perdamaian, Iran tetap bersikap tenang selama proses di Camp David. Seperti biasa, Iran mengkritisi pertemuan ini dan mempertanyakan klaim Washington bahwa dirinya netral, tetapi pendekatan Iran berbeda

1078

1079

1080

dibandingkan dengan sikapnya pada 1994-1995.[1081] "Saya tidak ingat bahwa ada begitu banyak hal yang dilakukan Iran," Halevi bercerita.[1082] Dua kekuatan telah memaksa Iran untuk menurunkan sikapnya. *Pertama,* Iran secara signifikan telah mengisolasi dirinya sendiri dari perkembangan Israel-Palestina melalui peningkatan hubungan dengan tetangga dekatnya dan dengan Eropa. Iran tidak menyadari bahwa pertemuan di Camp David II memberikan begitu banyak ancaman strategis bagi posisinya sehingga membuat oposisi Iran terhadap pertemuan tersebut menjadi tidak berarti. Reaksi Iran terhadap Intifada Al Aqsha semakin menunjukkan bahwa pendekatan Iran terhadap konflik Israel-Palestina lebih didorong oleh pertimbangan-pertimbangan strategis daripada ideologis. Jika ideologi atau nasib warga Palestina yang mendorong kebijakan Iran terhadap Israel, maka reaksi Teheran atas perlawanan aksi Intifada akan jauh lebih keras.

Kedua, penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon telah membatasi kemampuan Iran untuk menganggu proses negosiasi. Iran perlu waktu untuk memulihkan situasi dari proses penarikan pasukan ini lalu menemukan saluran baru untuk mendekati kelompok rejeksionis Palestina. "Menurut saya mereka begitu terkejut dengan langkah penarikan pasukan Israel dari Lebanon, dan mereka perlu menigkatkan usaha mereka agar mereka lebih efisien," Ben-Ami berkomentar. "Ketika kami meninggalkan Lebanon, mereka berada pada situasi yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Untuk pertama kalinya mereka tidak memiliki instrumen apapun untuk mengganggu proses negosiasi antara Israel dan Palestina." Menurut Ben-Ami, jika Israel tidak menarik pasukannya dari Lebanon, Iran bisa saja menggunakan Hezbollah untuk memberikan bencana besar di regional Timur Tengah. Salah satu alasan penarikan pasukan dari Lebanon adalah untuk menghentikan langkah Iran dalam memainkan kartu ini (Hezbollah, *pen.*)—langkah ini juga untuk memenuhi aspirasi publik Israel yang mendukung kebijakan penarikan pasukan dari Lebanon.[1083]

Setelah melakukan negosiasi intensif selama dua minggu, perundingan di Camp David ini berakhir tanpa ada kesepakatan apapun. Saat ini Barak dan Clinton menghadapi kenyataan bahwa mereka akan mewariskan sebuah kegagalan daripada keberhasilan. Untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan ini, mereka perlu mendapatkan seorang kambing hitam.[1084] Aksi saling-menyalahkan segera dimulai setelah proses negosiasi menemui jalan buntu. Karena Iran tetap bersikap tenang, Israel dan Amerika Serikat kemudian melemparkan tanggungjawab atas kegagalan ini pada Yasser Arafat dan PLO, meskipun setiap pihak dalam negosiasi tersebut telah sepakat sebelumnya bahwa tidak akan ada satu pihakpun yang akan dipersalahkan jika proses perundingan gagal. Washington khawatir jika kegagalan perundingan ini akan mengancam jabatan perdana menteri Ehud Barak sehingga membuat kekuasaan di Israel jatuh ke tangan Partai Likud yang anti-perjanjian Oslo (proses perdamaian dengan Palestina, *pen.*). Berbagai kekhawatiran ini semakin meningkat dengan aksi Intifada Al Aqsha yang terjadi dua bulan setelah kegagalan perundingan di Camp David.[1085]

Pada 28 September, pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon mengunjungi *Tempel Mount* di Kota Tua Yerusalem. Kunjungan Sharon ini terlebih dahulu telah mendapatkan

1081

1082

1083

1084

1085

izin resmi dari pemerintahan Ehud Barak, meskipun ada peringatan dari para aktifis perdamaian dan beberapa pejabat bahwa kunjungan ini akan memicu kerusuhan. Palestina mengecam kunjungan ini sebagai sebuah bentuk provokasi dan serangan, dan, tentu saja, memicu Intifada selanjutnya. Beberapa hari kemudian, setelah shalat Jumat, kerusuhan terjadi di Yerusalem yang membuat beberapa warga Palestina ditembak hingga meninggal. Meskipun beberapa kalangan menyalahkan Iran, Teheran merasa diuntungkan dengan kegagalan Washington dan Tel Aviv. "Iran tidak bisa lebih bahagia," Yoran Schweitzer, seorang pakar intelijen dari Isral yang bekerja di *Jaffe Center for Strategic Studies*, berkomentar.[1086] Efek jera dari hubungan Israel dengan negara Arab, khususnya keputusan Mesir dan Yordania untuk menarik duta besarnya, juga disambut baik oleh Iran.[1087]

Seperti pada periode sebelumnya, Teheran berusaha memanfaatkan ketegangan antara Israel dengan Arab dengan mengajak dunia Islam agar bersatu melawan Israel. Iran menyebut Israel sebagai "sebuah tumor yang ganas, pohon setan," Iran juga mencitrakan Israel sebagai "ancaman bagi dunia Islam, bahkan bagi pemerintahan yang berpikir bahwa hubungan mereka dengan pemerintahan Zionis penjajah merupakan bagian dari kepentingan mereka."[1088] Tetapi dibandingkan dengan retorika mereka pada pertengahan dekade 1990-an, retorika agresif Iran terhadap Israel lebih sedikit frekuensinya dan, dengan sedikit pengecualian, tidak terlalu diarahkan pada rakyat Arab. Pemerintahan Arab telah menang—Intifada dan kemenangan pemilu Ariel Sharon pada awal 2001 mendorong rekonsiliasi Iran dengan negara Arab, termasuk negara Arab yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel.[1089] Iran bahkan membuka hubungan dengan gerakan Fatah milik Yasser Arafat sehingga Iran juga semakin dekat dengan kelompok Palestina sekuler.[1090] Saat ini, Iran berusaha menghimpun opini publik internasional untuk melawan Israel melalui, misalnya, ajakan untuk "mengadili penjahat perang untuk menyelesaikan tindakan 'kriminal' Israel di wilayah-wilayah pendudukan Israel," dan desakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengirimkan pengawas internasional untuk mengantisipasi eskalasi kekerasan.[1091]

Tetapi sementara Israel menuduh Iran telah mendanai kelompok teror Palestina, Palestina sendiri mengeluhkan janji palsu Iran.[1092] Jelas sekali bahwa retorika Iran masih menunjukkan sebuah bentuk pemenuhan kewajiban Iran terhadap Palestina. Pemimpin tertinggi Iran menyampaikan pada pemimpin Hamas bahwa "perang suci untuk Palestina adalah untuk kehormatan Islam dan umat Islam, dan kami akan terus mendukung rakyat Palestina meskipun ada tekanan ekonomi dan politik, dan bahwa isu Yerusalem tidak hanya persoalan rakyat Palestina, tetapi persoalan bagi seluruh umat Islam."[1093] Tetapi lebih mudah bagi Iran untuk memberikan dukungan retorika daripada dukungan nyata. Pernyataan-pernyataan Iran jarang sekali ditindaklanjuti menjadi sebuah langkah nyata, bahan setelah Intifada kedua terjadi. Sementara Iran menjadi pemimpin dalam berbagai seruan publik terkait isu Palestina, mereka jarang sekali mencoba untuk mengeksekusi

1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093

berbagai pernyataan dalam seruan mereka. Beberapa diplomat Eropa yang memiliki kontak dengan perwakilan kelompok Jihad Islam dan Hamas dan melakuan kunjungan ke Iran setelah Intifada menceritakan bahwa kedua kelompok ini sangat kecewa dengan Iran. Teheran tidak memberikan mereka dukungan dana ataupun senjata. Sebuah lelucon di jalanan Teheran merefleksikan sikap Iran ini: ”Mengapa tidak ada batu yang tersisa untuk melempari para pelaku pelacuran? Sesuai permintaan Pemimpin Tertinggi, seluruh batu sudah dikirimkan ke Palestina sebagai kontribusi Iran untuk Intifada.”[1094]

1094

18-Pengkhianatan di Afghanistan

Negara seperti ini [Iran, Irak, dan Korea Utara], dan sekutu teroris mereka, membentuk sebuah poros setan
—Presiden George W. Bush (Pidato di hadapan Kongres Amerika Serikat), 29 Januari 2002

Dunia internasional sedang menahan nafas mereka ketika Amerika menghadapi tahun "keraguan 2000." Bagi Israel dan Iran, hasil dari perselisihan pemilu presiden yang berlangsung selama 6 minggu itu bisa menjadi satu-satunya faktor penentu bagi masa depan Timur Tengah. Di kedua ibu kota negara ini, Al Gore dan Joe Lieberman diperkirakan telah memenangkan pemilu, kedua orang ini akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Clinton di Timur Tengah; dukungan kuat terhadap Israel dan terhadap proses perdamaian di Timur Tengah sekaligus pemberian sanksi dan isolasi terhadap Iran (meskipun pada akhir masa jabatan presidennya, Clinton berusaha mendekati Iran). Benar atau tidak, Iran percaya bahwa kesalahan terbesar Clinton adalah bahwa dia telah membiarkan Israel mengontrol kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah dan bahwa Clinton telah menghubungkan persoalan berkepanjangan—tapi tetap bisa diselesaikan—Iran dengan Amerika dengan rivalitas Iran terhadap Israel.[1095]

Sementara itu George Bush dan Dick Cheney dianggap akan memberlakukan kembali kebijakan yang pernah diambil oleh ayahnya—menekan Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina, memberikan perhatian besar pada kerjasama dengan negara Arab, dan sebuah kebijakan energi yang mendorong Washington untuk tidak memutuskan hubungan bisnis minyak dengan pasar besar seperti Iran. Dick Cheney sendiri, calon wakil presiden George Bush, merupakan seorang Direktur Eksekutif dari sebuah perusahan energi, Halliburton, mengkritik tajam kebijakan ekonomi pemerintahan Clinton yang memberikan sanksi pada Iran. Ada sedikit keraguan tentang sosok didukung Israel dan Iran ketika mereka dengan cemas menyaksikan kotak suara di kota Florida sedang dihitung dan dihitung-ulang.

Pada 9 Desember, Mahkamah Agung Amerika Serikat mensahkan hasil hitung-ulang di Florida yang memenangkan suara Bush di negara bagian tersebut—dan secara nasional. Meskipun kehilangan suara nasional (*national electoral vote*) dengan lebih dari setengah juta suara, Bush unggul dalam suara elektoral (*electoral vote*) dan menjadi presiden pertama sejak Benjamin Haris pada 1888 yang terpilih meskipun mendapatkan suara nasional yang rendah. Kekhawatiran segera melanda Israel yang menduga Washington akan memperhalus sikapnya terhadap Iran, meringankan sanksi ekonomi yang telah dijatuhakn Clinton, dan mengurangi usahanya untuk menghentikan program nuklir Teheran.[1096]

Kekhawatiran Israel memiliki beberapa alasan. Segera setelah pemilu presiden, para pengusaha minyak Amerika menemui Menteri Luar Negeri Iran Kamal Kharrazi di New York. Kandidat sekretaris negara Bush, Jenderal Collin Powell, berbicara pada Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam proses dengar pendapat bahwa Washington harus merubah kebijakannya terhadap Iran.[1097] Jelas sekali bahwa Powell ingin merubah situasi

1095

1096

1097

di Timur Tengah, tetapi Iran bukanlah agenda utama kebijakan luar negeri pemerintahan Bush.[1098] Jika memungkinkan, Iran akan kembali dibayang-bayangi konflik Israel-Palestina. Pada hari pelantikan Bush, Presiden Bill Clinton memanggil Powell untuk berbicara mengenai Timur Tengah. Pembicaraan yang seharusnya berlangsung singkat untuk membahas tentang apa yang salah dengan proses perdamaian dan bagaimana mengembalikan proses perdamaian ke jalur yang benar menjadi diskusi panjang yang berlangsung selama empat puluh menit yang hampir membuat calon sekretaris negara ini terlambat hadir pada acara pelantikan. Clinton berusaha keras menyalahkan pemimpin PLO Yasser Arafat atas kegagalan proses perdamaian dan hampir tidak pernah menyinggung Iran—meskipun Israel sudah berusaha untuk menyalahkan Iran sebagai pengganggu utama terhadap proses perdamaian. Seperti para perdahulunya, Powell percaya bahwa solusi bagi persoalan Israel-Palestina akan memberikan jalan untuk mendekati Iran, dan bukan solusi lain. Bahkan jika dia ingin membuka hubungan dengan Iran, Powell percaya bahwa dia akan lebih sulit untuk menawarkan ide ini—dialog Amerika-Iran—kepada lembaga lobi pro-Israel di Amerika Serikat daripada menawarkan ide ini kepada pemerintahan Israel sendiri.[1099]

Ketika Israel sedang mempersiapkan diri untuk sebuah skenario-paling-buruk—Ephraim Sneh dari Partai Buruh, yang sekarang menjabat sebagai wakil menteri pertahanan di bawah Perdana Menteri Ehud Barak, mengatakan bahwa "jika Amerika Serikat memang mengadopsi kebijakan rekonsiliatif terhadap Iran. Sebagai konsekwensinya, kita harus menghadapi ancaman ini sendirian"—Sekutu-sekutu Israel di Washington begitu bersemangat untuk bertempur.[1100] Kebijakan sanksi yang tertuang dalam *Iran Libya Sanctions Acts* (ILSA) akan habis masa berlakunya pada Agustus 2001, dan organisasi lobi pro-Israel paling kuat AIPAC khawatir jika pemerintahan Bush akan berusaha untuk mengakhiri sanksi ILSA ini. Alih-alih menunggu Bush dan Powell untuk membuat kebijakan, AIPAC memanfaatkan disorganisasi yang ada di Gedung Putih pasca konflik pemilihan presiden.

"Keraguan 2000" membuat Bush membutuhkan waktu hingga 6 minggu untuk mengorganisasikan pemerintahannya dan mengisi pos-pos penting di Departemen Luar Negeri AS dan di lembaga lain. Lebih dari tiga bulan sejak dilantik sebagai Presiden, Bush masih belum menemukan orang-orang yang akan memimpin berbagai lembaga di pemerintahannya, termasuk orang yang akan bertanggungjawab atas berbagai kebijakan terkait Iran. Di sisi lain, mesin organisasi AIPAC bekerja secara luar biasa. Organisasi lobi pro-Israel ini memberikan pertimbangan dasar bagi perpanjangan ILSA di Capitol Hill, dan pada pertengahan Maret—sebelum Bush memutuskan sebuah formulasi terkait ILSA—AIPAC berhasil mengumpulkan lebih dari tiga ratus pendukung di *House of Representative* (draft perpanjangan ini hanya membutuhkan 218 suara untuk disahkan). Meskipun sanksi ini gagal merubah kebijakan luar negeri Iran, AIPAC tetap menganggap ILSA sebagai sebuah kesuksesan besar. Direktur Eksekutif AIPAC, Howard Kohr mendorong lembaga *House International Relations Committee* untuk memperbaharui ILSA karena "ILSA efektifitasnya telah teruji dan terbukti" dan karena "perilaku Iran pantas mendapatkan

1098

1099

1100

sanksi."[1101] *Washington Institue for Near East Policy,* organisasi pro-Israel lainnya, berpandangan bahwa pembaharuan ILSA akan membantu "kelompok moderat yang sebenarnya" di Iran sekaligus menghancurkan "kelompok yang berpura-pura moderat" di sekeliling Presiden Mohammad Khatami, yang mengikuti kebijakan anti-Israel dari para ulama Iran garis-keras."[1102] Pemerintahan Bush sudah dilumpuhkan; melalui langkah cepatnya di Capitol Hill, AIPAC berhasil men-skakmat Bush dan meloloskan draft sanksi ini agar disahkan dengan dukungan melimpah dari kedua belah fraksi. Sikap optimis yang berhati-hati tetap menjadi karakter pendekatan Iran terhadap Amerika Serikat dalam beberapa bulan pertama pemerintahan Bush, dan sebuah perang kata-kata antara Teheran dan Tel Aviv mulai mereda.[1103] Semua situasi ini kemudian berubah pada pagi hari 11 September 2001.

11 September

Pada 11 September 2001, Amerika mulai menyadari bawah ancaman Islam yang sebenarnya tidak berasal dari kelompok Syiah Iran—sebagaimana yang dikampanyekan Israel sejak 1991—tetapi berasal dari sayap ekstrem dalam kelompok Sunni. Sembilan belas loyalis Osama bin Laden, pendiri dan pemimpin organisasi teoris Sunni Al Qaeda yang mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Taliban di Afghanistan (dan bantuan finansial dari Arab Saudi dan Pakistan), berhasil membajak empat pesawat jet dan menabrakkannya ke dua gedung kantor *World Trade Center* di New York, gedung Pentagon di kota Washington, D.C., dan ke sebuah wilayah perkampungan di Pennsylvania. Saat itu dunia tidak mengalami perubahan, tetapi Amerika yang berubah—dan respon Washington terhadap serangan teror ini akan segera membawa huru-hara bagi negara Arab dan dunia Islam. Pada malam itu Powell memerintahkan sekelompok staf elitnya agar bekerja sepanjang malam untuk menghasilkan sebuah strategi pembentukan koalisi global untuk menangkap Osama bin Laden. Strategi ini menjadi cetak-biru (*blueprint*) strategi diplomatik *Operation Enduring Freedom*—perang Amerika melawan Taliban dan Al Qaeda di Afghanistan.[1104] Untuk memenangkan peperangan dengan Taliban, Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak lagi dukungan internasional—Amerika membutuhkan dukungan khusus dari Iran, negara tetangga Afghanistan dan musuh sengit Taliban.

Sepanjang 1990-an, Iran telah menjadi sponsor utama Aliansi Utara (*Northern Alliance*), sebuah aliansi anti-Taliban yang dipimpin oleh pejuang gerilya Ahmed Shah Massoud. Bersama Rusia dan India, Iran mempersenjatai dan mendanai Aliansi Utara ini ketika Amerika Serikat menutup mata atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Taliban dan dukungannya terhadap aksi teror. Sikap anti-Iran dan anti-pemerintahan Syiah yang ada di Afghanistan mampu merubah tujuan pemerintahan Clinton untuk mengisolasi Iran. kebijakan itu kembali menghantui Amerika beberapa tahun kemudian. Tetapi sekarang Iran bersemangat sekali untuk menawarkan bantuannya kepada Washington dan menunjukkan keuntungan strategis bagi Amerika atas kerjasamanya dengan Iran. "Iran memiliki hubungan nyata dengan para aktor di Afghanistan dan sudah mempersiapkan diri untuk menggunakan pengaruh mereka dengan cara yang konstruktif ketika bekerjasama

1101

1102

1103

1104

dengan Amerika Serikat," Flynt Leverett, direktur senior urusan Timur Tengah pada *National Security Council*, berkomentar.[1105] Rencana yang sudah dirancang Powell untuk mengajak Iran bekerjasama akan digunakan sebagai cara untuk mempengaruhi Teheran agar menghentikan dukungannya terhadap kelompok teroris anti-Israel sebagai imbalan atas hubungan strategis yang positif dengan Washington.[1106]

Rencana ini membuat Israel marah. Hampir sama seperti ketika Perang Dingin berakhir, tiba-tiba berbagai peristiwa di Timur Tengah membuat Israel lebih menjadi beban bagi Amerika Serikat daripada sebuah aset. Sementara itu situasi ini membuat Iran memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada Amerika. Jika dialog Amerika-Iran sudah dimulai, maka "Israel akan memberikan perhatian besar", Yossi Alpher, penasihat Ehud Barak dan mantan pejabat Mossad, berbicara pada saya. "Dimana posisi kami [Israel] dalam dialog tersebut? Apakah Iran akan berbicara terlebih dahulu dengan kami mengenai kebutuhan dan kekhawatiran kami? Apakah kami akan menjadi bagian dari paket kerjasama Amerika dengan Iran dan jika benar, bagian apa?"[1107] Pernyataan Alpher ini merefleksikan kekhawatiran yang inheren dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat: Apakah Amerika Serikat akan melindungi kepentingan Israel dalam konflik geostrategis, ketika situasi kepentingan antara kedua negara ini tidak sama? Lebih khusus lagi, Israel khawatir bahwa proses saling-mendekat Amerika Serikat dan Iran tidak akan membuat Iran menghentikan program senjata rudalnya atau memaksa Iran untuk mengakui Negara Yahudi. Israel beranggapan bahwa kepentingan geopolitik Amerika Serikat—khususnya kebutuhan untuk membendung kebangkitan China dengan mengontrol akses Beijing atas sumber energi melalui Iran—dapat mendorong Washington untuk mengorbankan komitmen mereka pada Israel.

Kobaran konflik antara Israel dan Iran—yang tidak dapat dipicu oleh perundingan di Camp David ataupun Intifada Al Aqsha—kemudian muncul sebagai akibat dari peristiwa 11 September persis karena peristiwa menggemparkan ini telah mengguncang situasi *status quo* di Timur Tengah dan memaksa seluruh negara untuk mempertimbangkan kembali posisi dan perannya dalam era pasca 9/11. Dengan kehadiran Inggris sebagai negara perantara, Washington mulai mendekati Iran sementara tetap menjaga jarak dengan Israel. Dan sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintahan Inggris pada 1991 pasca Perang Teluk Persia, Sekretaris Negara Inggris Jack Straw memberikan saran bahwa Israel merupakan pihak yang harus disalahkan. Dalam sebuah pernyataan yang dianggap Israel sebagai sebuah "hinaan" dan sebuah "tikaman dari belakang," Straw berpandangan bahwa terorisme dan konflik yang berlarut-larut antara Israel-Palestina bisa saja dikaitkan dengan serangan 9/11.[1108]

Israel dan kelompok neo-konservatif di Amerika Serikat, yang telah menemukan kembali kekuatan mereka pasca kemenangan pemilu Bush, memiliki rencana yang berbeda. Amerika harus mengumpulkan seluruh pihak yang diduga memberikan dukungan terhadap aksi teror dalam perhatian khusus—khususnya Iran dan Otoritas Palestina. Dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh empat puluh-satu anggota kelompok neo-konservatif terkemuka, termasuk William Kristol, Richard Perle, dan Charles

1105

1106

1107

1108

Krauthammer, Bush didesak untuk tidak hanya menargetkan Al Qaeda, tetapi juga Hezbollah dan menuntut Iran dan Syria segera menghentikan seluruh dukungan militer, ekonomi, dan politik bagi organisasi tersebut. Jika mereka menolak, Bush harus "mempertimbangkan langkah yang tepat untuk membalas negara-negara yang pendukung terorisme."[1109] Memulai sebuah perang dengan Iran dan Syria akan menjadi berlebihan bagi Amerika Serikat, tetapi langkah ini akan membuat Amerika dan Israel berada pada pihak yang sama dan semakin meningkatkan—daripada menurunkan—kebutuhan Amerika Serikat pada Israel.

Awalnya, kelompok neokonservatif hanya membutuhkan perubahan sederhana. Ketika Amerika Serikat mulai melancarkan operasi militer di Afghanistan, para pejabat di Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan NAsional (*National Security Council*) menyelenggarakan pertemuan rahasia dengan para diplomat Iran di Paris dan Genewa pada Oktober 2001 dibawah sponsor Lakhdar Brahimi, kepala *United Nations Assitance Mission* (Misi Bantuan PBB) di Afghanistan.[1110] Komunikasi ini diawali Duta Besar James Dobbins, utusan khusus pemerintahan Bush untuk Afghanistan. Dengan dukungan penuh dari Powell, Dobbins berbicara pada Brahimi bahwa dia ingin bertemu dengan Iran, dan dalam beberapa hari para pejabat Kementerian Luar Negeri Iran menghubungi Dobbins untuk menawarkan bantuan Iran. Dalam pertemuan perdana, utusan Jerman dan Italia juga hadir untuk menutupi keterlibatan Iran dan Amerika Serikat dalam pertemuan tersebut. Kehadiran dua negara ini membuat pertemuan ini—yang kemudian disebut sebagai *Genewa Channel* (Saluran Jenewa)—nampak sebagai sebuah pertemuan multilateral. Pada kenyatannya, pembicaraan berlangsung secara bilateral (hanya melibatkan Iran dan Amerika, *pen.*) dan komunikasi tingkat-paling tinggi antara pejabat dari kedua negara sejak skandal Iran-Contra.

Pertemuan ini berkembang lebih baik dari yang diharapkan. Pembicaraan tertuju pada "bagaimana menggusur Taliban secara efektif dan—setelah Taliban jatuh—bagaimana membangun sebuah pemeritahan di Afghanistan,". Iran memberikan bantuan yang besar bagi Amerika Serikat dalam peperangan; mereka tidak sadar apa yang akan terjadi setelah Amerika berhasil di Afghanistan.[1111] Para diplomat Iran berhasil membuat Amerika, Jerman, dan Italia sangat terkesan dengan pengetahuan dan keahlian mereka mengenai Afghanistan dan Taliban, dan bantuan Iran tidak dapat diabaikan. Iran menawarkan pangkalan udara mereka kepada Amerika Serikat, mereka menawarkan bantuan *search-and rescue* (SAR) untuk menemukan para pilot Amerika yang jatuh, mereka menjembatani kerjasama antara Aliansi Utara dengan Amerika Serikat untuk memerangi Taliban, dan terkadang mereka bahkan menggunakan informasi dari Amerika untuk menemukan dan membunuh para pemimpin Al Qaeda yang melarikan diri.[1112]

Meskipun mandat yang dimiliki Dobbins terbatas hanya untuk membicarakan persoalan Afghanistan, sebuah kelompok militan di sekeliling Powell telah menyiapkan sebuah paket tawaran rahasia untuk diberikan kepada Iran. Tidak seperti Pentagon, Departemen Luar Negeri AS tertarik untuk membuka kerjasama dengan Iran, tidak hanya sebuah pembicaraan taktis. Para diplomat Amerika menyadari bahwa kerjsama untuk

1109

1110

1111

1112

menghadapi Afghanistan (Taliban, *pen.*) dapat diperpanjang untuk menghadapi al Qaeda dan organisasi teroris lainnya. Amerika Serikat dan Iran bisa memperluas kerjasama intelijen mereka dan mengkoordinasikan langkah pendudukan wilayah-wilayah perbatasan yang kuat untuk menangkap para pejuang Al Qaeda yang melarikan diri ke Pakistan dan Iran. Ryan Cocker, anggota tim negosiasi Amerika yang bertanggung jawab untuk membicarakan persoalan-persoalan umum, berbicara mengenai paket tawaran rahasia ini. Bersama kolega-koleganya yang berpikiran sama, Crocker sudah siap untuk mengeksekusi rencana Powell tanpa ditunda lagi—jika presiden bersedia menyetujuinya. Tetapi kelompok garis-keras di Gedung Putih telah bekerja keras agar Bush tidak menyetujuinya. "[Wakil Presiden] Cheney dan (Sekretaris Pertahanan Donald] Rumsfeld selalu menghalangi kerjasama kami di Afghanistan jika kerjasama ini berjalan terlalu jauh," Wilkerson berkomentar.[1113]

Tidak ada kepentingan bersama yang lebih jelas antara Amerika Serikat dengan Iran dibandingkan ketika Konferensi Boon pada Desember 2001 sedang berlangsung. Dalam konferensi tersebut sejumlah tokoh terkemuka dari Afghanistan dan berbagai perwakilan dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Iran, melakukan perundingan di ibu kota Jerman di bawah mediasi PPB untuk merumuskan sebuah rencana bagi masa depan pemerintahan di Afghanistan. Amerika Serikat dan Iran secara hati-hati telah mempersiapkan sebuah rumusan bagi konferensi ini beberapa minggu sebelumnya. Pengaruh politik Iran terhadap berbagai kelompok-musuh di Afghanistan terbukti menjadi persoalan yang krusial. Pengaruh Iran terhadap Afghanistanlah—bukan ancaman dan janj-janji Amerika—yang berhasil membuat proses perundingan berjalan efektif. Juga delegasi dari Iranlah—bukan Dobbins (delegasi Amerika, *pen.*)—yang menyatakan bahwa draft Konferensi Bonn tidak mengadung bahasa demokrasi atau komitmen apapun atas nama Afghanistan untuk membantu memerangi terorisme global. Cukup aneh, instruksi Dobbin tidak mengandung apapun tentang demokrasi.

Pada malam terakhir konferensi, sebuah rumusan sementara telah disepakati dan semua persoalan sudah diselesaikan kecuali persoalan paling rumit—siapa yang akan memegang pemerintahan di Afghanistan? Aliansi Utara menyatakan bahwa, sebagai pemenang peperangan, pemerintahan harus menjadi milik mereka. Meskipun mereka mewakili empat puluh persen dari Afghanistan, mereka ingin menguasai delapan belas dari empat puluh kementerian yang ada. Sekitar pukul 2 pagi, Dobbins mengumpulkan perwakilan dari Afghanistan, Iran, Rusia, India, Jerman, dan Brahimi dari PBB untuk menyelesaikan persoalan terakhir ini. Selama dua jam berbagai perwakilan bergiliran meyakinkan Yunus Qanooni, perwakilan dari Aliansi Utara, untuk menerima jumlah kementerian yang lebih sedikit tetapi tidak berhasil. Akhirnya, perwakilan dari Iran—Javad Zarif—mengajak Yunus Qanooni berbicara empat mata dan berbisik padanya dengan bahasa Persia. "Baiklah, saya menyerah. Pihak lainnya mendapatkan dua kementerian lagi." Yunus memberikan keterangan. Situasi ini merupakan titik balik yang sangat penting, karena berbagai usaha yang dilakukan negara lain gagal. "Persoalan ini belum tuntas hingga Zarif mengajaknya berbicara empat mata dan persoalan ini selesai," Dobbins mengakui. "Kami mungkin saja mengalami situasi seperti kami menghadapi Irak dulu, ketika kami tidak dapat menyelesaikan satu pemimpin dan pemerintahan." Keesokan harinya, kesepakatan Bonn yang bersejarah itu ditandatangani. Amerika tidak hanya

1113

berhasil memenangkan peperangan, tetapi, atas jasa Iran, Amerika juga berhasil memenangkan perdamaian.[1114]

Bagi Iran, peristiwa ini merupakan momentum kemenangan. Tidak hanya karena musuh besar Iran—Taliban—telah dikalahkan, Iran juga berhasil menunjukkan bagaimana mereka mampu menciptakan stabilitas di regional dan bagaimana Amerika diuntungkan dari hubungan yang lebih baik dengan Teheran. Untuk memberi isyarat atas keinginan Iran agar pembicaraan diperluas ke berbagai aspek lain, Zarif berkelakar pada Crocker bahwa sekarang persoalan Afghanistan sudah selesai, barangkali inilah waktunya untuk membahas persoalan nuklir yang telah merenggangkan hubungan kedua negara. Tanpa ragu, Crocker mengembalikan bola ke pihak Zarif dan bertanya apakah dia harus menarik instruksinya pada dokumen itu, yang menunjukkan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menyiapkan sebuah rumusan pembicaraan mengenai hal tersebut. Namun Zarif pada waktu itu tidak memiliki otoritas untuk berbicara lebih dari persoalan Afghanistan meskipun Iran menganggap pembicaraan ini sebagai sebuah pembukaan hubungan strategis.[1115] "Hal ini sesuai dengan perilaku mereka bahwa mereka menginginkan pembicaraan strategis," Dobbins menjelaskan, sekaligus menyatakan bahwa Iran tidak mengungkapkan tujuan mereka dalam waktu yang lama.[1116]

Dilema yang dihadapi Iran adalah agenda pembicaraan ini—Afghanistan, nuklir, dan terorisme—hanya melibatkan perhatian Amerika. Kekhawatiran Iran dengan kebijakan-kebijakan Amerika tidak menjadi pertimbangan. Sementara itu pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei dan Presiden Khatami mendukung penuh pembicaraan tentang Afghanistan dan gagasan untuk membuka hubungan strategis dengan Washington. Mereka menyatakan bahwa pembicaraan yang lebih luas akan melibatkan perhatian Iran juga perhatian Amerika.[1117] Bagi Departemen Luar Negeri AS dan Condolezza Rice dari *National Security Advisor* hal ini bukanlah sebuah masalah. Keduanya ingin membuka diri lebih luas dengan Iran, tetapi mereka dihalangi oleh sebagian kelompok di Gedung Putih yang begitu bergairah dengan semangat anti-Iran.[1118] Dobbins bercerita bahwa "Saya melihat cahaya redup dari kepentingan di luar Departemen Luar Negeri AS" untuk sebuah pembicaraan strategis dengan Iran. Meskipun ada bantuan signifikan Iran bagi Amerika Serikat di Afghanistan, pemerintahan Bush tidak memberikan penerimaan yang nyata atas niat baik Iran. Situasi 1991 terjadi lagi: Tidak ada apresiasi bagi kepentingan strategis Iran dalam stabilisasi situasi Timur Tengah dan kemungkinan bagi Iran untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Janji Iran dalam konferensi donor di Tokyo pada Januari 2000 untuk menawari Afghanistan dana 500 juta dolar—janji bantuan terbesar dibandingkan negara lain, termasuk Amerika Serikat, juga tidak membuat kelompok garis-keras di Gedung Putih terkesan.

Tawaran Iran untuk membantu pembangunan kembali angkatan militer Afghanistan—di bawah komando Amerika Serikat—agar memperkuat pemerintahan Afghanistan dalam menghadapi para panglima pasukan yang masih menguasai beberapa wilayah juga tidak didengar. "Kami telah siap untuk memberikan rumah, mendanai,

1114

1115

1116

1117

1118

memberikan seragam, mempersenjatai, dan melatih lebih dari dua puluh ribu pasukan dalam sebuah program yang lebih besar di bawah komando Anda," perwakilan Iran berbicara pada Dobbins dalam salah satu pertemuan di kota Genewa. Dobbins menyatakan bahwa jika Iran dan Amerika Serikat memiliki tanggungjawab yang sama untuk melatih pasukan, mereka akan bekerja dengan dua doktrin yang berbeda. Komandan Iran, yang menemani delegasi Iran untuk berbicara dengan Dobbins, hanya tersenyum dan menjawab,"Jangan khawatir, kami masih menggunakan panduan yang Anda tinggalkan pada 1979." Tidak akan ada masalah terkait loyalitas para pasukan, sang Komandan menjelaskan, karena iran masih membiayai pasukan Afghanistan yang digunakan Amerika Serikat untuk menghabisi Taliban dan al Qaeda di perbatasan Afghanistan-Pakistan. "Apakah Anda meragukan loyalitas mereka?" sang komanda bertanya kepada Dobbin secara retoris.[1119]

Dobbins kemudian kembali ke Washington untuk membicarakan tawaran Iran yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini dengan beberapa pejabat administrasi, yang disimpulkan Dobbins ditujukan sebagai sebuah sikap yang bersahabat. Dia berbicara dengan Powell terlebih dahulu, Powell kemudian merancang sebuah pertemuan dengan Rice. Rice sepakat bahwa tawaran Iran harus dipertimbangkan, dan pertemuan ketiga melibatkan Poweel, Rice, dan Donald Rumsfeld. Pada pertemuan ketiga ini, Dobbins tidak terlibat. Sepanjang pertemuan ini Rumsfeld tidak memberikan komentar apapun. Dengan memberikan tatapan tajam pada Dobbins, dia mendapatkan beberapa catatan tetapi tidak pernah menunjukkan ketertarikan apapun pada proposal Iran tersebut. Dalam pertemuan ini, proposal Iran telah kandas. "Sepengetahuan saya, tidak pernah ada respon," Dobbins bercerita. "Ada sebuah arahan untuk tidak mempertimbangkan secara serius tawaran Iran ini dan untuk tidak memberikan Iran peluang yang lebih luas." Lebih lanjut, Dobbins berpandangan bahwa ketidaktertarikan pemerintahan Bush pada pembukaan hubungan strategis yang lebih luas (dengan Iran, *pen.*) "disebabkan oleh perhatian utama Washington pada sikap Iran terhadap Israel" dari pada sikap Iran terhadap Amerika.[1120]

Melalui kerjasama Washington dengan Iran, Israel telah mendapatkan peringatan. Dalam sebuah teguran keras—yang tidak biasa—terhadap Bush, Perdana Menteri Ariel Sharon secara terbuka menilai Bush sedang bertindak seperti Perdana Menteri Inggris periode 1937-1940, Neville Chamberlain, yang sedang mengorbankan Israel sebagaimana Chamberlain telah mengorbankan Ceko dengan menolak untuk berkonfrontasi dengan Adolf Hitler.[1121] Ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel sudah dimulai sebelum peristiwa 11 September. Powell telah mengembangkan sebuah rancangan baru Timur Tengah yang memproyeksikan Yerusalem sebagai ibukota bagi Israel dan negara Palestina—sebuah perbedaan mencolok dari kebijakan Amerika sebelumnya terhadap konflik Israel-Palestina. Bagi Partai Likud, posisi Yerusalem sebagai ibukota abadi Israel merupakan garis merah yang tidak bisa dikompromikan. Kebijakan baru pemerintahan Bush telah mengancam Sharon dari berposisi sebagai sekutu Amerika menjadi halangan yang berat. Serangan personal Sharon pada Bush tidak mampu meredakan ketegangan. Pernyataan-pernyataan Sharon membuat marah presiden Amerika berkulit tipis itu, dan

1119

1120

1121

sekretaris pers Gedung Putih, Ari Fleischer menyebut pernyataan Sharon sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.[1122]

Ketegangan Israel dengan Amerika tidak lepas dari perhatian Iran. Pemerintahan Khatami semakin percaya diri bahwa kebuntuan hubungan segitiga antara Israel-Iran-Amerika akan berakhir dengan memberikan keuntungan bagi Iran. Valiollah Shojanpurian, seorang legislator Iran dari kelompok reformis, memuji kebijakan *detente* Khatami dan memperingatkan kemarahan Israel atas kesuksesan Iran. "Pengakuan global terhadap Iran ini telah membuat marah musuh bebuyutan kita Isreal, tetapi situasi ini telah memberi kita peluang baru untuk membangun kembali hubungan internasional kita," dia berbicara pada surat kabar harian Iran, *Aftab-e Yazd*.[1123]

Kelompok neokonservatif di Washington dan di pemerintahan Israel tak henti-hentinya berusaha menghalangi kerjasama Amerika-Iran. Dengan berbagai cara, mereka berusaha menghentikan "Saluran Genewa" dan mengantisipasi setiap kemungkinan Bush untuk bekerja sama dengan Iran—sebagaimana Nixon dengan China, yaitu mendekati dan berteman dengan musuh besar Amerika Serikat. Sebuah langkah telah dirancang untuk mengarahkan Iran agar menutup "Saluran Genewa" oleh mereka sendiri. Cara ini dilakukan dengan memprovokasi seorang ayatollah radikal untuk mengkritisi perundingan tersebut sebagai sebuah bentuk penjilatan terhadap kelompok ekstrem Iran, yang akan mendorong pemimpin tertinggi Iran untuk menutup "Saluran Genewa". Ironisnya, saat ini kelompok neokonservatif yang memainkan peran penting dalam skandal Iran-Contra berusaha untuk menghalangi terobosan politik apapun yang telah mereka perjuangkan selama lima belas tahun sebeumnya. Setelah berada di luar pemerintahan selama lebih dari satu dekade, Michael Ledeen, seorang neokonservatif dan mantan rekan Perdana Menteri Israel Shimon Peres yang memperjuangkan dialog Amerika-Iran pada 1980-an bersama Israel—dan yang dipercayai oleh CIA sebagai "seorang agen yang berpengaruh terhadap sebuah pemerintahan luar negeri"—mendapatkan kesempatan untuk kembali berada dalam kekuasaan pasca terpilihnya Bush pada 2000.[1124] Aksesnya pada presiden dilakukan melalui penasihat utama Bush, Karl Rove, yang ditemuinya secara rutin.[1125] Sebagai Ilmuan Bebas (*Freedom Scholar*) di *American Entreprise Institute,* Ledeen mulai menulis sebuah kolom mingguan di *National Review* pada tahun 2000; dalam tulisan-tulisannya Ledeen berulang kali menyarankan agar Amerika menjadikan Iran sebagai target. Ledeen menunjukkan ketidakpuasannya dengan langkah yang lambat dari Washington terhadap Iran dengan menulis "Lebih cepat, ayo. Lebih cepat."[1126]

Runtuhnya Uni Soviet dan kekalahan Iran pada Perang Teluk Persia 1991 memberikan dampak besar pada posisi Ledeen. Seperti yang dilakukan Israel, sekarang dia memandang Iran sebagai sebuah rival yang harus diisolasi dan dilemahkan daripada dianggap sebagai sekutu potensial untuk didekati dan diperkuat. Pada Desember 2001, Ledeen yang bekerja sebagai konsultan bagi Wakil Menteri Pertahanan Douglas Feith, merancang sebuah pertemuan di kota Roma dengan teman lamanya ketika skandal Iran-Contra, Manuchehr Ghorbanifar, seorang peramal dari Iran dan pedagang senjata yang

1122

1123

1124

1125

1126

disebut CIA sebagai "perakit serial". Sebagai seorang murid dari gerakan fasis Italia, Ledeen menikmati hubungan ekstensif dengan badan intelijen Italia dan juga mengundang Nicolo Pollari, kepala agen intelijen militer Italia, SISMI, dan Menteri Pertahanan Italia Antonio Martino.[1127] Beberapa aktifis Iran yang diasingkan juga hadir; Larry Franklin, seorang analis Badan Intelijen Pertahanan Iran yang di kemudian hari mengaku bersalah telah menjadi mata-mata Israel pada 2005 dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama tiga belas tahun; dan Harold Rhode, seorang pakar tentang Timur Tengah yang memainkan peran penting dalam skandal Iran-Contra.[1128] Franklin dan Rhode merupakan bagian dari sebuah kelompok kecil dan solid dari sayap konservatif garis-keras terhadap Iran yang menginginkan ada pergantian rezim di Teheran dan yang bertujuan untuk mengakhiri usaha diplomasi Powell. Di kemudian hari, jaringan kebijakan mereka di Pentagon ingin melibatkan *Office of Special Plan,* sebuah badan intelijen alternatif yang dipimpin oleh Douglas Feith yang menyediakan informasi akurat bagi aparat intelijen Amerika dalam peperangan melawan Irak.[1129]

Pertemuan demi pertemuan diselenggarakan di Eropa karena Ghorbanifar tidak bisa mendapatkan visa Amerika Serikat karena hubungan terakhirnya dengan CIA. Ledeen secara hati-hati merahasiakan pertemuan sensitif ini dari Departemen Luar Negeri AS dan CIA, yang bertentangan dengan aturan baku dalam hubungan dengan agen intelijen dari pemerintahan luar negeri. Tetapi informasi tentang pertemuan ini dengan cepat sampai kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, Mel Sembler, begitu juga dengan kepala cabang CIA di kota Roma, dan persoalan ini segera sampai pada pejabat tertinggi pada pemerintahan Bush. Setelah Direktur CIA, George Tenet, melakukan intervensi, Feith dan Ledeen diperintahkan untuk memutuskan seluruh komunikasi dengan Ghorbanifar dan rekan-rekannya.[1130] Tetapi kerusakan sudah terjadi. Pihak Iran telah mendapatkan informasi terkait pertemuan ini dan marah sekali karena pejabat tinggi Amerika Serikat melakukan pertemuan dengan Ghorbanifar dan tokoh-tokoh Iran yang diasingkan lainnya—yang saat ini berbalik menentang rezim mullah. Namun dampak buruk apapun yang dihasilkan Ledeen dan Ghorbanifar untuk mempengaruhi "Saluran Genewa", tetap tidak sebanding dengan apa yang akan terungkap.

Kapal *Karine A* dan "Poros Setan"

Pada 3 Januari 2002, Israel berhasil menangkap kapal *Karine A* di perairan internasional di Laut Merah. Kapal tersebut dinakhodai oleh seorang anggota militer Palestina, dan memuat roket Katyusha, mortir, bedil, senjata mesin, bedil penembak jitu (sniper), amunisi, ranjau anti-tank, dan bahan-bahan peledak lainnya. Israel menyatakan bahwa kapal tersebut datang dari pulau Kish, Iran. Karena seluruh senjata tersebut masih dalam bungkusan pabrik dan memiliki cap yang memberikan keterangan bahwa senjata tersebut diproduksi di Iran, Israel menegaskan bahwa kesimpulan sangat jelas: Iran berusaha mempersenjatai Otoritas Palestina dibawah pimpinan Yasser Arafat untuk merusak perjanjian Otoritas Palestina dengan Israel. Hal merupakan bukti kuat yang diperlukan Israel untuk menghalangi dialog Amerika-Iran dan mengakhiri tekanan

1127

1128

1129

1130

Amerika atas kesepakatan Israel dengan Palestina.[1131] Peristiwa ini merupakan hadiah-kiriman-dari surga bagi Sharon, dan peristiwa ini bertepatan dengan kunjungan Jenderal Anthony Zinni, utusan baru Bush di Timur Tengah, ke Israel. Bagi sebagian besar pihak, peristiwa ini terlalu baik untuk menjadi sebuah kenyataan—"terlalu baik" karena sekutu-sekutu Israelpun mulai mempertanyakan kebenaran peristiwa ini. Rute normal bagi pengiriman barang dari Iran ke beberapa organisasi *proxy*-nya akan melalui Damaskus dan Lebanon—dengan pesawat udara, dan bukan dengan kapal air melalui Semenanjung Arab, lokasi yang menjadi wilayah patroli angkatan laut Israel, demikian pandangan beberapa sekutu Israel.

Iran membantah memiliki keterkaitan dengan kapal tersebut, tetapi tidak ada bantahan yang bisa merusak citra Sharon ketika memeriksa kapal dan senjata produksi Iran tersebut. Washington menerima keterangan versi Israel dan menyatakan bahwa bukti yang dimiliki Israel sebagai "sesuatu yang menarik". Bagi pemerintahan Bush, berbagai keraguan yang bisa saja masih ada terkait berlanjutnya hubungan Iran dengan terorisme sudah terhapuskan.[1132] Situasi ini merupakan kemunduran besar bagi para pendukung dialog (Amerika) dengan Iran seperti Powell. "Situasi ini membuat Powell harus mempertimbangkan kembali tentang apa yang mungkin untuk dicapai dengan Iran," Wilkerson berkomentar.

Di Iran sendiri, Presiden Khatami merasa kecolongan. Dia memerintahkan untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan Badan Keamanan Nasional Iran untuk menyelidiki siapa yang ada di balik pengiriman senjata tersebut. Khatami sangat paham kelompok pengkhianat dalam pemerintahan Iran yang setiap saat berusaha merusak kebijakan *detente*-nya dengan Amerika Serikat. Tetapi tidak ada satupun anggota Badan Keamanan Nasional Iran yang memiliki informasi terkait pengiriman tersebut. Melalu "Salurna Genewa", Iran segera menghubungi Dobbins dan memberitahu tentang pertemuan Khatami dengan Badan Keamana Nasional Iran. Para diplomat Iran diinstruksikan untuk meminta bukti asal pengiriman kepada Amerika Serikat sehingga otoritas di Teheran bisa bertindak atas dasar bukti tersebut. Pada saat yang sama, pemerintahan Khatami mengirimkan sebuah pesan kepada Washington melalui kedutaan Swiss di Teheran untuk membantah setiap keterlibatan Iran dalam kasus tersebut. Iran mengulangi permintaan informasinya kepada Amerika Serikat dan memberikan tawaran kepada Washington untuk memberikan informasi apapun yang bisa saja disembunyikan Iran. Tetapi baik pesan kepada Dobbins maupun memo yang dikirim ke Swiss tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan Bush. Washington tidak pernah memberikan Teheran bukti apapun atas tuduhan Israel, tetapi Washington memberika respon kepada Teheran beberapa minggu kemudian dan menegaskan bahwa informasi yang dimiliki Washington dapat dipertanggungjawabkan dan cukup, yang secara efektif berhasil membantah bantahan Teheran.[1133]

Bagi Iran yang pernah-menaruh curiga, seluruh peristiwa ini adalah hasil rekayasa. Mereka percaya bahwa peristiwa ini hanya memiliki satu tujuan: untuk menganggu "Saluran Genewa". "Dalam beberapa hari saja, sebuah kebijakan kerjasama berubah menjadi kebijakan konfrontasi," Zarif berkomentar. "*Karine A* tetap menjadi misteri yang

1131

1132

1133

terjadi pada momentum yang tepat bagi pihak yang ingin menghalangi kedekatan Amerika-Iran."[1134] Beberapa pejabat dalam pemerintahan Bush bahkan mulai mempertanyakan kasus ini. Beberapa pihak menduga bahwa peristiwa ini didalangi Israel. Pihak lainnya berpandangan bahwa kelompok pengkhianat dalam pemerintahan Iran mungkin saja berada di belakang peristiwa ini. Tetapi tidak ada satu pun dalam pemerintahan Bush yang mengurusi kasus ini lebih jauh; ketika badan intelijen Amerika Serikat telah membenarkan keterangan Israel, makan keterangan itu tidak bisa dibantah lagi. "Tetapi sesudah kejadian itu, kami semua mulai mempertimbangkan tentang apakah kasus ini benar atau tidak," Wilkerson mengakui.[1135]

Tidak seperti spekulasi tentang asal dan rincian kiriman dari kapal *Karine A,* hanya ada beberapa opini tentang dampak kasus ini pada sikap Washington terhadap Teheran. Dalam beberapa hari saja, pejabat Pentagon membuat tuduhan serius terhadap Iran; bahwa Iran telah memuluskan jalan para pejuang al Qaeda untuk melarikan diri agar dapat menggunakan mereka untuk melawan Amerika Serikat pasca kejatuhan Taliban di Afghanistan. Tetapi tuduhan ini berdiri di atas fondasi yang rapuh. Sesuai permintaan Amerika Serikat, Iran telah meningkatkan kekuatan pasukannya di wilayah perbatasan Afghanistan, dan Iran menyerahkan sebuah dokumen kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan terkait 290 anggota al Qaeda yang ditahan Iran. Sebagian besar tahanan ini kemudian dikembalikan ke Arab Saudi, Afghanistan, dan negara Arab dan Eropa lainnya. "Saya tidak tahu informasi intelijen apapun yang mendukung tuduhan itu. Saya tentu saja akan melihat ada informasi intelijen. Tidak ada seorangpun yang memberitahu saya bahwa mereka (Iran) menyembunyikan al Qaeda."[1136]

Lalu pada 29 Januari 2002, dalam pidato pertama Bush di hadapan Kongres, dia menyamakan Iran bersama Irak dan Korea Utara sebagai negara berbahaya dan mengancam yang membentuk sebuah "Poros Setan." Tidak bisa dipastikan apakah dimasukannya Iran ke dalam Poros Setan merupakan sebuah pertimbangan retorikal atau apakah Bush percaya bahwa Iran, Irak, dan Korea Utara sedang bekerjasama, tetapi yang pasti adalah insiden kapal *Karine A* secara langsung menyebabkan Iran masuk ke dalam daftar musuh Bush.[1137] Teheran terkejut. Kebijakan *detente* Khatami dan dukungan yang disiapkan Iran berantakan. Posisi Khatami di dunia internasional juga mendapatkan pukulan keras. Khatami telah mengambil resiko dan menentang kelompok garis-keras di Teheran, yang keraguan mereka terhadap Amerika ternyata terbukti benar.[1138] "Poros Setan" merupakan bentuk kegagalan bagi pemerintahan Khatami," Farideh Farhi berkomentar. Dia juga menyatakan: Jika Anda menyerah, jika Anda membantu dalam kondisi lemah, maka Anda akan mendapatkan hasil yang buruk.[1139]

Ironisnya, Iran sudah memanggil Amerika Serikat, Si Setan Besar, selama lebih dari dua dekade ketika Bush menganggap Iran sebagai seorang penjahat. Jelas sekali kedua negara telah menggunakan retorika yang berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi ada beberapa contoh pernyataan-pernyataan non-diplomatik yang disampaikan pada waktu-

1134
1135
1136
1137
1138
1139

waktu yang krusial—hanya beberapa minggu setelah Iran telah membuktikan dirinya sebagai sekutu yang sangat diperlukan di Afghanistan. Kelompok garis-keras di Teheran, juga beberapa anggota tim negosiasi Iran dengan Amerika, berpandangan bahwa Iran seharusnya tidak menawari Amerika bantuan tanpa menagih imbalannya di awal. "Iran telah melakukan kesalahan dengan tidak mengaitkan bantuannya di Afghanistan dengan bantuan Amerika di bidang lain dan hanya berharap bahwa Amerika Serikat akan membalas," Zarif berkomentar. Beberapa diplomat kemudian terpaksa membayar kegagalan ini dengan karir mereka, sehingga membuat lingkaran lain dalam perumusan kebijakan luar negeri Iran berpikir dua kali sebelum memperluas persahabatan dengan pemerintahan Bush.

Respon cepat Teheran terhadap pidato "Poros Setan" merupakan langkah untuk mengakhiri "Saluran Genewa" sebagai bentuk protes. Iran beralasan bahwa Washington kembali gagal membalas niat baik Iran dan justru telah menghukum Iran atas dukungannya.[1140] Dalam pertemuan terakhir mereka dengan Dobbins, Iran memprotes pidato "Poros Setan" tersebut. Dobbins menjelaskan bahwa Amerika Serikat masih memiliki banyak ketidaksepakatan dengan Teheran, termasuk dalam hal konflik Israel-Palestina, dan bahwa kerjasama di Afghanistan meskipun sangat membantu, tetap tidak dapat merubah kenyataan tersebut. Dia menyatakan bahwa dalam banyak hal, Amerika Serikat dan Iran masih memiliki banyak perbedaan. Respon Iran ini telah mengkristalisasi peluang bahwa pidato "Poros Setan" mungkin tidak memberikan keuntungan sama sekali. "Kami juga ingin membicarakan persoalan-persoalan itu," delegasi dari Iran berterus terang pada Dobbins atas niat Teheran untuk menggunakan "Saluran Genewa" dan kerjasama di Afghanistan untuk menyelesaikan isu-isu besar antara Amerika Serikat dan Iran.[1141] Bagi Iran, menjadi negara yang disamakan dengan Saddam Hussein, musuh berat Iran, merupakan sesuatu yang membingungkan.[1142]

Tetapi pidato Bush ini tidak hanya membuat Teheran marah. Pidato dan istilah yang digunakan Bush juga mendapatkan kritik tajam di Amerika Serikat—termasuk dari para pejabat Amerika Serikat (meskipun mereka jarang memberikan kritik secara terbuka hingga mereka berhenti bekerja). Dobbins merasa bahwa pidato itu "lucu" dan "konyol" dengan menganggap Iran, Irak, dan Korea Utara telah membentuk sebuah aliansi. "Pernyataan ini seperti menganggap Uni Soviet dan Nazi Jerman harus diperlakukan sama setelah Jermah menyerang Uni Soviet," Dobbins berbicara pada *New America Foundation* pada Agustus 2006.[1143] Dia memperingatkan C. Rice bahwa pidato ini bisa membuat Iran membalas dengan menciptakan situasi tidak stabil di Afghanistan. Tetapi C. Rice tidak bergeming dengan peringatan tersebut dan menganggap Afghanistan dan Iran sebagai persoalan yang tidak penting. Amerika Serikat memiliki rencana yang lebih besar, dia menyampaikan pada Dobbins, dan baik Iran maupun Afghanistan tidak masuk ke dalam agenda yang lebih besar.[1144] Staf Powell menyampaikan perhatian Dobbins ini, tetapi sekretaris negara tersebut "tidak melihat ada masalah besar dengan pidato tersebut."[1145]

1140

1141

1142

1143

1144

1145

Insiden *Karine A* memberikan nafas baru bagi propaganda berkepanjangan Israel untuk mendapatkan pengakuan internasional bahwa Iran merupakan negara sponsor bagi aksi teror.[1146] Peres memerintahkan penyebaran sebuah "buku hitam" ke seluruh dunia. "Buku hitam ini akan mengungkapkan seluruh fakta berkaitan dengan tindakan dari rezim ayatollah terhadap Israel. Buku ini berisi seluruh seruan pemimpin Iran untuk menghancurkan Israel, termasuk program nuklir yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut."[1147] Iran sendiri menyerukan PBB akan mengadakan sebuah peradilan untuk mendakwa para pejabat Israel atas kasus kejahatan perang.[1148] Retorika dari kedua negara segera menjadi sebuah ancaman. Israel mengancam akan menyerang instalasi nuklir Iran di Bushehr, dan Iran merespon dengan mengancam akan menyerang Iran dengan rudal balistik jika Israel mengancam kedaulatan Iran.[1149]

Pada suatu waktu, retorika ini menjadi sangat agresif yang membuat para jenderal di Washington dan Israel ikut campur untuk meredakan ketegangan. Pada Februari 2006, Washington meminta Sharon agar memperhalus retorika mereka terhadap Iran.[1150] Pada bulan yang sama, kepala Badan Keamanan Nasional Israel, Jenderal Uzi Dayan, mengingatkan koleganya di Tel Aviv bahwa Iran harus dianggap sebagai ancaman global, bukan hanya ancaman bagi Israel. Iran "bukan musuh Israel," Dayan berbicara pada radio militer Israel. "Kita tidak boleh mengancam Iran—dari perspektif kami Iran bukanlah sebuah musuh—tetapi kita harus memastikan bahwa Iran tidak berusaha membeli senjata pemusnah massal."[1151] Tetapi dengan pidato "Poros Setan" dan isolasi Israel terhadap Iran, Teheran tidak pernah berbalik melawan Amerika di Afghanistan. Ketika Iran berhenti menggunakan "Saluran Genewa", hambatan besar di Afghanistan untuk melawan Taliban dan membangun pemerintahan baru Afghanistan sudah teratasi. Tetapi Iran kemudian memerlukan kembali "Saluran Genewa" ini, karena segera setelah perang di Afghanistan, mereka merasa bahwa kelompok garis-keras di Washington memiliki rencana untuk melanjutkan peperangan dengan tetangga Iran di sebelah barat—Irak.

1146

1147

1148

1149

1150

1151

19-Menelan Kekalahan di Pintu Kemenangan

Jika kesederhanaan adalah kekuatan dari orang lemah,
maka kesombongan merupakan kelemahan dari orang kuat
—Mardy Grothe

Saya merasa bahwa keputusan untuk tidak membuka komunikasi dengan Iran merupakan sebuah kesalahan besar
—Pengamat terkemuka tentang militer Israel (yang berkomentar atas kegagalan Israel memanfaatkan manuver Iran), 7 Oktober 2004

Pada September 2000, satu tahun sebelum serangan teroris 9/11, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Florida Governor Jeb Bush, dan ajudan Dick Cheney, I. Lewis Libby telah memiliki pandangan bersama tentang Irak ketika mereka berkumpul di sebuah lembaga *think thank* neo-konservatif *Project for the New American Century* di kota Washington, D.C.[1152] Atas bantuan organisasi ini, mereka merancang sebuah dokumen yang berisi pandangan mereka tentang peran Amerika di Timur Tengah, termasuk rencana serangan terhadap Irak. Dokumen berjudul "Membangun Kembali Pertahanan Amerika: Strategi, Kekuatan dan Sumber Daya dalam Millenium Baru," mereka berpandangan bahwa Amerika Serikat harus memiliki pangkalan militer permanen di Teluk Persia, dan bahwa meskipun "konflik dengan Irak yang belum teratasi memberikan justifikasi (bagi invasi terhadap Irak), kebutuhan atas kehadiran pasukan Amerika di Teluk lebih penting dari pada isu tentang rezim Saddam Hussein."[1153] Laporan ini dipublikasikan secara terbuka dan disebarkan secara luas di jalan raya. Serangan terhadap Irak sudah dimulai. Sebagian kalangan menduga bahwa perang Amerika terhadap Irak terutama ditujukan untuk melayani kepentingan Israel. Sebuah pandangan menyatakan bahwa kelompok lobi pro-Israel telah mendorong pemerintahan Bush untuk menginvasi Irak pasca 9/11 untuk kepentingan keamanan Israel. Pada kenyataannya, Israel menjadi pendukung utama perang ini ketika Washington memutuskan untuk menyerang Irak, apapun yang terjadi.[1154]

Israel memiliki alasan yang alasan kuat untuk mendukung invasi Amerika terhadap Irak. Keberadaan Saddam dan kemampuan potensial untuk memproduksi senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction* [WMD]) menjadi tujuan utama Israel; untuk merubah peta politik Timur Tengah secara drastis dengan mengunci perimbangan kekuatan (*balance of power*) yang menguntungkan Israel. Sebagian pihak berpandangan bahwa jika Amerika sukses di Irak, maka Irak akan menjadi Mesir yang selanjutnya—sebuah negara yang kuat dan padat-penduduk yang ketergantungannya terhadap Amerika akan memaksanya untuk berdamai dengan Israel. Jika Irak menjadi negara selanjutnya yang mengakui Israel, maka musuh-musush Israel di Timur Tengah—Iran dan Syria—akan semakin terisolasi dan lemah.

Invasi Amerika terhadap Irak akan memungkinkan Israel untuk memulihkan kembali hubungannya dengan suku Kurdi Irak. Klan Barzani, yang memiliki kerjasama yang sudah lama dan menguntungkan dengan Israel pada 1960-an dan 1970-an, masih

1152

1153

1154

menjadi kekuatan besar dalam politik Kurdi. Dengan dukungan klan Barzani, Israel bisa menggunakan Kurdi Irak untuk mengumpulkan informasi intelijen dan melakukan infiltrasi ke wilayah barat laut Iran, sebagaimana Iran menggunakan wilayah perbatasan Lebanon di wilayah selatan untuk melakukan hal yang sama terhadap Israel. Pada kenyataannya, pada September 2006, BBC mendapatkan bukti bahwa, setelah Amerika berhasil menaklukkan Irak, Israel mulai memberikan pelatihan militer kepada suku Kurdi di wilayah utara Irak, dekat dengan perbatasan Iran. Surat kabar Israel, *Yediot Aharonot,* memberitakan hal yang sama pada Desember 2005.[1155] Tetapi sama problematiknya dengan potensi yang ada di Irak, Israel tidak lagi menganggap Irak sebagai ancaman utamanya. Sejak akhir dekade 1990-an, ketika Iran memulai program rudal balistiknya dengan sungguh-sungguh, Iran telah masuk ke dalam daftar ancaman regional Israel. Berbeda dengan persepsi umum, Israel awalnya menentang perang terhadap Irak.

Pada awal 2002 pemerintahan Israel mulai curiga bahwa Amerika Serikat bisa saja menyerang Irak. Tapi Israel kemudian berpandangan bahwa kecurigaan ini bisa saja salah, karena Irak merupakan acaman yang keliru; Amerika seharusnya tidak membuang energi untuk menghadapi ancaman sekunder sementara ancaman utama—Iran—diabaikan. Sekelompok pejabat Israel, baik dari unsur sipil dan militer, berkunjung ke Washington untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka. Pesan Israel jelas; Irak dibutuhkan untuk mengimbangi musuh yang sesungguhnya. Pada Februari 2002, Binyamin Ben-Eliezer dari Partai Buruh mengunjungi Washington untuk meyakinkan pemerintahan Bush bahwa Iran merupakan "ancaman strategis yang sesungguhnya" dan bahwa Amerika harus "menghadapi ancaman ini baik secara diplomatik atau militer atau keduanya." Jika Washington tidak melakukannya, Ben-Eliezer mengancam, "Israel akan melakukannya sendiri."[1156] Pejabat Israel lainnya menolak argumentasi kelompok neo-konservatif, dengan menyatakan bahwa kejatuhan Saddam Hussein dan munculnya Irak sebagai negara demokratis akan memicu pemberontakan di Iran untuk melawan rezim mullah.

Tetapi ketika sejumlah pejabat Israel ini berkesimpulan bahwa pendirian kelompok neokervatif dalam pemerintahan tidak bisa berubah dan bahwa Presiden Bush akan mengivasi Irak apapun yang terjadi, Israel kemudian merubah taktiknya. Pada akhir musim semi 2002, sejumlah pejabat Israel mendatangi Gedung Putih. "Kedatangan ini merupakan hal yang paling membuat saya penasaran," Lawrence Wilkerson, kepala staf Sekretaris Negara Colin Powell, bercerita. Pesan dari kedatangan yang kedua dari rombongan pejabat Israel ini cukup berbeda; Irak merupakan sebuah ancaman dan Israel telah menyediakan layanan intelijen yang baru untuk mendukung perubahan keputusan mereka yang tiba-tiba itu. Iran harus menjadi target utama, tetapi ancaman Iran tidak bisa diatasi tanpa mengatasi Irak terlebih dahulu. Pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon memandang invasi terhadap Irak merupakan langkah yang perlu diambil untuk menindaklanjuti peperangan mereka dengan Iran. Pada awal November 2002, Sharon mengungkapkan tujuan Israel ketika mendorong Washington untuk menginvasi Iran "sehari setelah" Irak hancur.[1157]

Atas alasan yang sama persis, Iran menentang invasi ini. Memang benar bahwa Saddam masih memusuhi Iran, tetapi pasukannya, yang sudah dihancurkan oleh koalisi

1155

1156

1157

pimpinan Amerika pada Perang Teluk Persia, berada dalam kondisi yang sangat lemah; ekonomi Irak juga sedang lemah dan tangan Saddam masih terikat pasca sanksi dan isolasi internasional dari PBB selama 10 tahun. Singkat kata, Irak hanya memberikan ancaman kecil bagi Iran. Ancaman dari musuh seperti Saddam Hussein—yang berada dalam kondisi lemah—lebih baik daripada ancaman dari pemerintahan pro-Barat di Irak dengan sikap permusuhan terhadap Teheran dan mendapat dukungan dari pasukan blok Barat. Rezim di Baghdad dengan keberpihakannya pada blok Barat akan melengkapi kepungan Amerika terhadap Iran. Inilah kekhawatiran para ahli strategi Iran. Di wilayah selatan Iran, negara Arab pro-Amerika telah menyerahkan keamanan mereka kepada Washington dan memberikan legitimasi atas kehadiran kekuatan militer Amerika di Teluk Persia. Di wilayah utara, pasukan Amerika ada di Azerbaijan dan negara-negara Asia Tengah. Di sebelah tenggara, Pakistan sudah menjadi sekutu penting Amerika dalam perang global melawan teror meskipun Pakistan menjadi pencipta sekaligus pendukung utama rezim Taliban di Afghanistan. Dan dengan kekalahan Taliban, pasukan Amerika berhasil menguasai wilayah perbatasan Iran di sebelah timur. Tehran, yang memiliki 800 mil garis perbatasan dengan Irak, khawatir jika keberhasilan Amerika menaklukkan Irak akan membuat Iran menjadi target empuk dalam rencana pemerintahan Bush untuk melakukan transformasi di Timur Tengah. Berbagai pernyataan dari lembaga *think tank* neo-konservatif Amerika tidak dapat meyakinkan mereka kembali. Misalnya, sebelum invasi dilakukan, seorang staf administrasi berkelakar, ”Setiap orang ingin pergi ke Baghdad. Laki-laki sejati ingin pergi ke Teheran.”[1158]

Meskipun sebagian pejabat di Teheran menginginkan agar Iran berusaha mendekati lagi Washington, genderang perang yang dipukul kelompok neo-konservatif pada awal 2002 membuat Iran cukup khawatir untuk melakukan hal tersebut. Para mullah di Iran masih memiliki banyak kartu untuk mereka mainkan untuk memberikan imbalan kepada Departemen Luar Negeri AS dan pihak yang mendukung dialog (Amerika-Iran, *pen.*) dalam perdebatan di Washington. Berdasarkan pengalaman Iran dalam perang delapan-tahun pada 1980-an, tidak seperti Amerika, Iran memahami kompleksitas hubungan sosial yang ada di Irak dan tahu bagaimana mengarahkan mereka. Teheran berpandangan bahwa Washington akan membutuhkan informasi semacam ini, yang akan memberikan Iran sebuah peluang untuk mempengaruhi kelompok neo-konservatif. Tanpa ada saluran komunikasi, kesalahpahaman bisa saja terjadi, yang akan menguntungkan rival regional Iran, termasuk Israel dan negara Arab-Sunni. Kelompok oposisi di Irak yang memiliki hubungan dekat dengan Teheran—baik kelompok Syiah dan faksi dalam suku Kurdi yang dipimpin Jalal Talabani (yang kemudian menjadi presiden Irak)—juga menekan Iran untuk membantu Amerika. Pada akhirnya, Iran membutuhkan sebuah saluran untuk memahami dan mempengaruhi keputusan Amerika terkait Irak, dan Amerika menginginkan agar Iran tidak mempersulit rencana Amerika. Maka pada akhir musim semi 2002, “Saluran Genewa” dibuka kembali setelah Departemen Luar Negeri AS mendekati Iran.

Karena pengalaman Iran dalam pembicaraan sebelumnya tentang Afghanistan, Iran ingin memperbesar forum ini dengan melibatkan kekuatan besar lainnya. Amerika Serikat menolak usulan tersebut, karena usulan ini akan membuat Rusia dan Prancis terlibat, dua negara yang sangat menentang invasi militer terhadap Irak. Solusinya adalah tetap menggunakan format yang sebelumnya digunakan untuk membicarakan Afghanistan, dan

1158

menjadikan pembicaraan tentang Irak sebagai persoalan sampingan.[1159] Dari sisi Iran, pembicaraan ini dipimpin oleh seorang politisi senior, termasuk Duta Besar PBB Javad Zarif. Perwakilan dari Amerika adalah Duta Besar Zalmay Khalilzad, seorang Amerika-Afghan yang fasih berbahasa Persia dan memiliki hubungan dekat dengan Bush. Pembicaraan ini berlangsung tanpa semangat kerjasama seperti ketika membicarakan perang Afghanistan tetapi tetap berlangsung atas dasar saling membutuhkan.[1160] Beberapa negosiator dari Iran merasa bahwa Khalilzad menyimpan sebuah alat sadap di pundaknya. Mereka percaya bahwa orang yang berbahasa Inggris dengan akses Afghan ini berusaha untuk memberikan kompensasi atas statusnya sebagai imigran dengan bersikap sangat agresif dalam proses negosiasi.

Tindakan Iran merupakan sebuah langkah yang dilematis; mengatasi rasa takut jika operasi Amerika berhasil, maka Iran akan terkepung dan menjadi target empuk berikutnya adalah sebuah kenyataan bahwa Saddam Hussein, jika dia masih bertahan, akan berani dan menjadi ancaman yang lebih besar. Di samping itu, kemenangan peperangan yang tidak diikuti dengan keberhasilan melakukan proses rekonstruksi akan menimbulkan disintegrasi bagi Irak dengan dampak yang lebih besar; suku Kurdi di utara Irak bisa mendeklarasikan kemerdekaan sehingga akan memicu tindakan yang sama dari minoritas Kurdi di Iran dengan populasi 6 juta orang (hampir 10 persen dari total populari Iran). Dan kondisi kekosongan kekuasaan akan mengundang Turki, Arab Saudi, Syria, dan Iran datang ke wilayah Irak untuk memperjuangkan harapan mereka. Jadi, meskipun Iran menentang rencana invasi Amerika terhadap Irak, tetapi ketika rencana itu akan segera dilakukan, Iran berkesimpulan bahwa dukungan moderat terhadap langkah Amerika ini merupakan tindakan yang lebih baik.[1161]

Segera setelah pembicaraan antara Amerika dengan Iran dimulai kembali, kelompok neo-konservatif di Washington mulai menganggu proses ini. Lebih dari satu dekade, Michael Ledeen dan Israel berada pada sisi yang lain dari perdebatan ini. Ledeen menulis dalam *New York Times* pada Juli 1988—ketika perang Irak-Iran berakhir—bahwa Amerika Serikat harus membuka saluran komunikasi dengan Iran: ”Amerika Serikat, yang seharusnya memperbaiki hubungan dengan Iran sebelumnya, harus memanfaatkan peluang untuk melakukannya. Menunggu bisa saja memberikan kesan pada elemen Iran pro-barat bahwa penolakan untuk memperjuangkan hubungan yang lebih baik lebih disebabkan oleh sikap anti-Iran dari pada keberatan atas langkah-langkah tertentu Iran. Elemen dalam pemerintahan Iran yang menyerukan sebuah hubungan yang lebih baik dengan blok Barat jelas sekali sudah mengumpulkan kekuatan. Beberapa orang yang memperjuangkan perbaikan hubungan ini adalah dua kandidat utama yang akan menggantikan Ayatollah Rohullah Khomeini, yaitu Ayatollah Hojatolislam Rafsanjani dan Ayatollah Hussein Ali Montazeri.”[1162]

Sekarang, Ledeen dan Israel berusaha untuk menghalangi Rafsanjani atau pejabat Iran lainnya dari pembicaraan dengan Amerika. Pada Juni 2002, hanya satu minggu setelah “Saluran Genewa” difungsikan kembali, Ledeen merancang pertemuan kedua di kota Roma dengan pejabat Pentagon dan Ghorbanifar. Saat ini Ledeen sudah memastikan bahwa

1159

1160

1161

1162

pertemuan ini telah diketahui oleh beberapa pihak tertentu, dan *Senate Select Committee on Intelligence* segera diberi tahu mengenai pertemuan ini. Pada musim panas 2003, *Newsweek* mengungkapkan kesepakatan antara Ghorbanifar-Ledeen-Pentagon. Ghorbanifar sendiri memberikan keterangan pada jurnalis Laura Rozen bahwa dia telah melakukan lebih dari lima puluh kali pertemuan dengan Ledeen setelah peristiwa 9/11 dan telah menyediakan bagi Ledeen lebih dari "4,000 hingga 5,000 halaman dokumen sensitif" mengenai Iran, Irak, dan Timur Tengah.[1163]

Meskipun Pentagon membantah pertemuan ini sebagai sebuah "kesempatan bertemu", kenyataan bahwa beberapa pejabat tinggi Amerika terlibat dalam pembicaraan dengan kelompok oposisi di Iran membuat sebuah terobosan hubungan antara Amerika dengan Iran menjadi semakin sulit diwujudkan. Tetapi usaha Ledeen gagal untuk mempengaruhi Iran agar menutup "Salurna Genewa". Komunikasi tetap berlanjut, dan, menurut Kenneth Pollack dari *Brookings Institue*, Iran mengakhiri bantuannya dalam invasi ke Irak, khususnya dalam fase rekonstruksi pasca jatuhnya kekuatan pasukan Irak. Di antara persoalan lainnya, Iran menginstruksikan kelompok Syiah *proxy* Iran di Irak pasca perang untuk mendukung proses rekonstruksi daripada menghambat proses pendudukan Amerika. Dan ketika Iran dapat memberikan bencana bagi Amerika Serikat, Iran memilih untuk tidak melakukannya. "Jika Iran ingin menimbulkan kekacauan di Irak (setelah kejatuhan Saddam), mereka bisa dengan mudah melakukannya pada hari-hari tergelap setelah peperangan, dan Amerika Serikat beruntung karena mereka tidak melakukan hal itu," Pollack menulis.[1164]

Sebuah Tawaran yang tidak Bisa Ditolak Washington

Kemenangan militer atas Irak menjadi keberhasilan yang sudah diprediksikan oleh kelompok konservatif. Pada 9 April 2003, hanya beberapa minggu menjelang invasi, pasukan Amerika Serikat bergerak ke Baghdad. Ibukota Irak itu secara formal telah ditaklukan pasukan Amerika Serikat, dan era Saddam Hussein secara resmi sudah berakhir. Keberhasilan Amerika dalam menjatuhkan pasukan Arab paling kuat ini—yang gagal ditaklukan Iran dalam perang berdarah selama delapan tahun—menimbulkan rasa takut daripada musuh-musuh Amerika di Timur Tengah dan wilayah lainnya. Kelompok *hawkish* di Washington sekalipun terkejut dengan kehancuran pasukan (*Republican Guard*) Saddam Hussein. Di Teheran, para mullah mulai menghadapi kenyataan baru yang suram. Kepungan Amerika terhadap Iran sudah lengkap. Selama dua puluh empat tahun kekuasaan mereka, para mullah ini jarang merasa sangat rentan. Hanya beberapa hari sebelum Bush mengumumkan bahwa "misi telah berhasil" di pangkalan udara *Abraham Lincoln* pada 1 Mei, Teheran merasa bahwa eksistensi mereka sedang dipertaruhkan. Iran kemudian meletakkan semuanya di atas meja—Hezbollah; konflik Israel-Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam; dan program nuklir Iran.

Iran kemudian menyiapkan sebuah proposal lengkap, yang menawarkan potensi tawar-menawar antara dua negara yang dapat menyelesaikan semua titik perselisihan antara kedua negara. Draft pertama dari proposal ini ditulis oleh Sadegh Kharrazi, keponakan menteri luar negeri Iran dan duta besar Iran untuk Prancis. Draft ini kemudian diberikan kepada pemimpin tertinggi Iran untuk disetujui, yang sebelumnya meminta duta

1163

1164

besar Iran untuk PBB, Javad Zarif, untuk mengkaji kembali draft tersebut dan memperbaikinya sebelum dikirim ke Amerika. Hanya sekelompok pemegang kebijakan di Teheran yang sadar terhadap dan terlibat dalam persiapan proposal ini—Menteri Luar Negeri Kamal Kharrazi, Presiden Mohammad Khatami, Duta Besar PBB Javad Zarif, Duta Besar Iran untuk Prancis Sadegh Kharrazi, dan Ayatollah Ali Khamenei. Di samping itu, Iran juga berkonsulasi dengan Tim Guldiman, duta besar Swiss untuk Iran, yang segera mengirimkan dokumen proposal ini ke Washington.

Proposal ini membuat Amerika terdiam. Bukan hanya karena dokumen proposal ini sangat otoritatif—karena telah mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi—tetapi juga isi dari proposal ini cukup mengherankan. (Lihat Appendiks A). "Iran mengakui bahwa *weapon of mass destruction* (WMD), senjata pemusnah massal, dan dukungan terhadap teror merupakan perhatian serius kami, dan mereka bersedia melakukan negosiasi," Flynt Leverett, direktur senior bidang Timur Tengah di Badan Keamanan Nasional waktu itu, berkomentar. "Proposal ini sudah disetujui oleh seluruh pejabat tinggi."[1165] Iran telah menaruh seluruh kartunya di atas meja, dan menyatakan apa yang mereka inginkan dari Amerika Serikat dan apa yang mereka tawarkan sebagai imbalannya.[1166] "Proposal ini sampai ke Amerika untuk menyatakan bahwa kami siap berunding, kami siap untuk menyelesaikan masalah kami," Mohammad Hossein Adeli, yang kemudian menjadi wakil menteri luar negeri Iran, bercerita.[1167]

Dalam sebuah perundingan "saling-menghormati", Iran menawarkan diri untuk mengakhiri dukungan mereka pada Hamas dan Jihad Islam—saudara ideologis Iran dalam perjuangan melawan Negara Yahudi—sekaligus menekan mereka agar menurunkan serangan pada Israel. Mengenai Hezbollah, anak-didik Iran dan rekan paling bisa diandalkan Iran di dunia Arab, para mullah ini menawarkan langkah pelucutan senjata atas para milisi Lebanon dan mentransformasikan mereka menjadi sebuah partai politik yang murni. Mengenai program nuklir, proposal ini memberikan kesempatan bagi dunia internasional untuk melakukan pemeriksaan terhadap program nuklir Iran untuk menepis berbagai kekhawatiran atas program senjata Iran. Iran akan menandatangani dokumen *Additional Protocol to the Non-Proliferation Treaty* (Protokol Tambahan atas Perjanjian Non-Proliferasi), dan mereka juga menawarkan kesempatan bagi Amerika untuk terlibat dalam program nuklir ini sebagai sebuah jaminan dan bukti niat baik. Mengenai terorisme, Teheran menawarkan kerjasama penuh untuk memerangi seluruh organisasi teror, terutama al Qaeda. Mengenai Irak, Iran akan bekerja secara aktif dengan Amerika Serikat untuk mendukung stabilisasi politik dan pembentukan lembaga-lembaga demokratis dan—lebih penting—sebuah pemerintahan sekuler.

Barangkali tidak mengejutkan semua orang, Iran juga bersedia untuk menerima Deklarasi Beirut atas nama Liga Arab—yaitu, rencana damai Arab Saudi sejak maret 2002, dalam deklarasi itu negara Arab menawarkan diri untuk secara kolektif berdamai dengan Israel, mengakui dan melakukan normalisasi hubungan dengan Negara Yahudi sebagai imbalan atas kesepakatan Israel untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang sebelumnya diduduki dan menerima sepenuhnya sebuah negara independen untuk warga Palestina; pembagian berimbang kota Yerusalem; dan sebuah resolusi yang layak bagi para

1165

1166

1167

pengungsi Palestina. Melalui tahapan ini, Iran secara formal akan mengakui solusi dua-negara dan melakukan perdamaian dengan Israel. Hal ini merupakan konsesi yang dibuat Teheran—yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Satu tahun sebelumnya, kelompok garis-keras di Teheran mengkritik langkah Arab Saudi ini, dan menyatakan bahwa kembalinya Israel pada wilayah-wilayah perbatasan pra-1967 merupakan solusi yang tidak adil bagi Palestina.[1168]

Sebagai imbalannya, Iran memiliki permintaan taktis dan strategis. Pada level taktis, mereka meminta agar anggota organisasi teroris Iran yang berbasis di Irak, Mujahedin-e Khalq Organization (MKO), diserahkan kepada mereka sebagai tebusan atas mata-mata al Qaeda yang ditangkap Iran. Iran tidak bersedia menyerahkan mata-mata al Qaeda kecuali setelah Washington merubah sikapnya terhadap Iran. Teheran akan membuat dirinya menjadi target utama al Qaeda jika mereka menyerahkan mata-mata al Qaeda kepada Amerika Serikat, dan, kecuali setelah Amerika Serikat sepakat untuk memberikan balas jasa, Iran akan menghadapi organisasi teroris Sunni sendirian. Lebih jauh lagi, Iran menganggap para tahanan al Qaeda sebagai alat tawar yang ampuh. Menyerahkan para tahanan ini tanpa memastikan keamanan dari Amerika Serikat merupakan langkah yang tidak bijaksana. Para mullah berpandangan bahawa pertukaran MKO dengan al Qaeda akan menjadi transaksi yang adil dalam semangat anti-teror, langkah ini juga akan menunjukkan niat Washington untuk tidak menggunakan kelompok teroris untuk menggulingkan rezim ayatollah.

MKO telah masuk dalam daftar kelompok teroris yang dibuat Departemen Luar Negeri AS sejak 1992 dengan nama yang berbeda-beda. Dalam sebuah pidato di forum PBB Bush bahkan merujuk pada dukungan Saddam Hussein kepada MKO sebagai bukti keterkaitan Saddam dengan kelompok teroris. “Irak terus menampung dan mendukung organisasi-organisasi teroris yang memberikan ancaman langsung kepada Iran,” Bush berbicara dalam Sidang Umum PBB pada 12 September 2002.[1169] Meskipun berstatus sebagai kelompok teroris, MKO memiliki dukungan kuat di Washington dan Tel Aviv. Pada Agustus 2002, MKO terlibat dalam pengungkapan perkembangan program nuklir Iran. Banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa informasi intelijen MKO berasal dari Israel. Badan intelijen Israel, yang tetap membantah telah menjadi dalang dari tekanan Amerika Serikat atas Iran dalam isu nuklir, pertama kali mendekati putra Shah dengan informasi itu. Pewaris tahta Iran ini menolak untuk mempublikasikan informasi ini, dan meninggalkan opsi lan bagi israel selain mencari MKO.[1170] Di Gedung Putih, kelompok teroris Iran ini mendapatkan perlindungan dari Rumsfeld, Cheney, dan tokoh neo-konservatif lainnya, yang memandang MKO sebagai aset potensial untuk mengacaukan situasi pada rezim Iran.[1171] Setelah invasi Amerika, sekretaris pertahanan memutuskan, seperti yang sudah dilakukan Saddam, untuk menggunakan para anggota MKO untuk mengontrol penduduk Irak. Dia membiarkan MKO tetap bersenjata dan memerintahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan di selatan Iran bersama pasukan Amerika Serikat. Ketika Powell berpandangan bahwa Amerika Serikat tidak bisa hidup nyaman dengan

1168

1169

1170

1171

keberadaan organisasi teroris di tengah-tengah perang Amerika terhadap teror, Rumsfeld menjawab bahwa dia tidak punya cukup pasukan untuk melucuti senjata MKO.[1172]

Sikap agresif dari sekretaris pertahanan terkait MKO merupakan rahasia umum di Washington. Pada akhir Mei 2003, *ABC News* memberitakan bahwa Pentagon telah menyerukan penggulingan rezim Iran dengan "menggunakan seluruh alat penekan yang ada terhadap rezim Iran, termasuk mendukung para pembangkan Iran yang bersenjata dan memanfaatkan jasa Mujahedin-e Khalq."[1173] (Meskipun akhirnya Powell melakukan penutupan kantor MKO di pusat kota Washington, D.C., pada Agustus 2003, kelompok ini masih aktif bergerak di Amerika Serikat dan Irak. Pada Januari 2004, anggota-anggota MKO melakukan sebuah penggalangan dana besar di MCI Center di kota Washington dengan Richard Perle, seorang tokoh utama dari kelompok neo-konservatif, bertindak sebagai pembicara utama. Juru bicara MKO dan seorang pelobi ulung, Ali Reza Jafarzadeh, telah bekerja sebagai pakar terorisme di jaringan *Fox News*.)

Pada level strategis, Iran ingin memiliki hubungan jangka-panjang dengan Amerika Serikat dengan menghentikan sikap permusuhan Amerika, seperti retorika "Poros Setan" dan intervensi Amerika pada urusan dalam negeri Iran; mengakhiri seluruh sanksi Amerika Serikat terhadap Iran; menghargai kepentingan nasional Iran di Irak dan mendukung permintaan Iran untuk perbaikan pasca perang; menghargai hak Iran untuk memiliki akses penuh terhadap teknologi nuklir, teknologi biologi, dan teknologi kimia; dan pada akhirnya, mengakui kepentingan keamanan sah Iran di regional. Proposal ini juga menjelaskan tahap-demi-tahap dalam proses negosiasi demi sebuah kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.[1174]

Langkah untuk menawarkan proposal ini kepada Amerika Serikat merupakan sebuah operasi besar. Sebagai penjaga kepentingan Amerika Serikat di Iran, duta besar Swiss di Iran, Tim Guldiman, bertindak sebagai perantara ketika kedua negara perlu berkomunikasi. Saluran ini dibuat pada 1990, sebelum terjadinya Perang Teluk Persia pertama, karena Washington menyadari bahwa Amerika perlu berkomunikasi dengan Iran untuk menghindari potensi kesalahpahaman selama perang berlangsung. Amerika telah berusaha untuk mencari Swiss dan memberikan mereka arahan ketat mengenai saluran komunikasi ini. Informasi ini disampaikan dengan teliti—dengan dua arah—tanpa ada interpretasi apapun dari Swiss. Kedutaan besar Swiss di Iran akan mengirimkan pesan Iran ke kedutaan besar Swiss di Washington melalui Kementerian Luar Negeri Swiss, yang kemudian akan mengirimkannya kepada Departemen Luar Negeri AS.[1175]

Iran, yang sangat sadar terhadap karakter suka-perang dari pemerintahan Bush, khawatir jika proposal itu bisa saja tidak sampai ke Gedung Putih jika dikirim terlebih dahulu ke Departemen Luar Negeri AS. Bahkan jika Powell telah menerima proposal itu, tidak ada jaminan bahwa dia bisa membuat Bush memberikan perhatian pada proposal itu—mengingat adanya ketegangan antara Powell dengan pejabat Gedung Putih. Saluran lainnya diperlukan selain Departemen Luar Negeri AS; seseorang yang memiliki akses langsung dengan presiden. Guldiman, pertemuannya yang berkali-kali dengan pejabat

1172

1173

1174

1175

Amerika Serikat di Washington terkait berbagai peristiwa di Iran sangat diapresiasi, memiliki jawabannya—Wakil rakyat dari kota Ohio, Bob Ney.

Politis Republikan dan ketua *House of Representative Committee* ini merupakan seorang legislator yang tidak biasa. Dia merupakan satu-satunya anggota Kongres yang berbahasa Persia, dia belajar bahasa Persia dari teman kamarnya dari Iran ketika kuliah di *Ohio State University*. Setelah lulus, dia menjadi guru bahasa Inggris di kota Shiraz, selatan Iran, selama satu tahun. Ketika revolusi terjadi di Iran, Ney kembali ke Amerika Serikat dan memulai karir di bidang politik—pengalamannya di Iran seringkali berguna. Pengetahuan dan keahliannya tentang Iran membuatnya dihormati oleh legislator lainnya dan begitu juga para pejabat Gedung Putih.[1176]

Pada awal Mei 2003, Guldiman datang ke Washington dan berbicara empat mata dengan Ney mengenai proposal ini. Diplomat Swiss ini memberikan salinan dua halaman dari proposal ini kepada Ney, yang berisi tentang tujuan dari Iran dan Amerika dan sebuah tawaran mekanisme tentang bagaimana mengembangkan negosiasi tersebut, termasuk delapan halaman catatan Guldiman dari percakapannya dengan pejabat Iran. Catatan Guldiman ini berhasil memperjelas posisi dan otentisitas dokumen proposal. Beberapa hari sebelumnya, pada 4 Mei, Guldiman telah mengirimkan dokumen proposal itu ke Departemen Luar Negeri AS—bersama dengan satu halaman surat pengantar yang merinci tujuan Iran dengan proposal ini dan keaslian dokumen tersebut. Salinan lainnya telah dikirim ke duta besar Amerika di Genewa, Kevin Moley. “Saya mendapatkan kesan yang jelas bahwa sekarang ada sebuah keinginan kuat dari rezim untuk menyelesaikan persoalan dengan Amerika dan Iran mencobanya dengan inisiatif ini,” Guldiman menulis dalam surat pengantar tersebut. (Lihat Appendiks C.)

Ney, yang sudah memperjuangkan dialog Amerika-Iran sejak Khatami menjadi presiden pada 1997, segera menyadari bahwa dokumen ini dapat menimbulkan sebuah terobosan besar dalam hubungan Amerika-Iran dan membantu perang Amerika terhadap al Qaeda. “Inilah sesuatu yang akan membuatnya terjadi.” Dia berbicara kepada saya dengan penuh kegembiraan. Ney segera mengirim seorang staf untuk mengirimkan dokumen ini kepada Karl Rove, penasihat senior presiden, yang dikenal Ney sejak masa kuliah. Dalam beberapa jam saja, Rove kemudian menelpon Ney untuk memastikan keaslian dokumen ini, dan meyakinkan legislator Ohio ini bahwa dia akan mengirimkan dokumen “menarik” ini langsung kepada presiden. Langkah pertama dari operasi ini telah berhasil—proposal telah sampai kepada pejabat level tertinggi di pemerintahan Amerika Serikat. Meskipun respon Washington akan mengejutkan semua pihak, termasuk Swiss.

Keangkuhan

Bagi sebagian pejabat di Departemen Luar Negeri AS, proposal ini merupakan sebuah dokumen tidak masuk akal. Iran menawarkan berbagai konsensi besar sebagai imbalan atas penghentian kebijakan sanksi yang didalangi oleh agen lobi pro-Israel *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), yang mungkin memberikan kerugian lebih besar secara diplomatik bagi Amerika daripada yang telah dilakukan Amerika pada Iran. Yang lebih penting lagi, dokumen proposal ini asli dan telah disetujui oleh otoritas tertinggi Iran, sebuah fakta yang diakui Departemen Luar Negeri AS.[1177] Powell dan wakilnya, Richard

1176

1177

Armitage, lebih menyukai respon positif terhadap Iran. Bersama dengan Condoleeza Rice dari *National Security Advisor*, mereka mendekati presiden terkait proposal ini, tetapi alih-alih memicu perdebatan yang hidup mengenai potensi respon dari Amerika, Cheney dan Rumsfeld dengan cepat mengakhiri pembicaraan mengenai proposal ini. Alasan mereka sederhana tetapi sangat 'destruktif'. "Kami tidak berbicara dengan penjahat," mereka menjelaskan.[1178] Bahkan jika Poweel dan rekan-rekannya tetap memperjuangkan proposal ini, mereka mungkin tidak akan berhasil. "Departemen Luar Negeri AS paham bahwa pada level antar-lembaga, tidak ada kesempatan untuk meloloskan proposal ini dengan sukses," Leverett berkomentar. "Mereka tidak ingin menghabiskan kekuatan Powell yang berkurang dengan cepat pada sesuatu yang mustahil terjadi." Bahkan tidak ada satu pun pertemuan antar-lembaga yang dilakukan untuk membicarakan proposal ini.[1179] "Akhirnya, sebuah komplotan rahasia telah mendapatkan apa yang mereka inginkan: tidak ada negosiasi apapun dengan Teheran." Wilkerson berkomentar dengan merujuk pada kelompok neo-konservatif yang dikomandoi Cheney dna Rumsfeld.[1180]

Tawaran Iran datang ketika Amerika Serikat nampak berada pada puncak kekuatannya. Irak berhasil dijatuhkan hanya beberapa minggu sebelumnya, dan meskipun sebagian pihak melihatnya hanya sebuah slogan, pemerintahan Bush nampak benar-benar mempercayainya: kebebasan sedang dalam perjalanan. Seperti pada 1991, ketika Amerika Serikat memutuskan untuk tidak mengundang Iran pada konferensi Madrid, langkah negosiasi dengan Iran bukan merupakan agenda utama Gedung Putih. Kelompok garis-keras di Pentagon dan kantor wakil presiden menafsirkan proposal ini—yang mungkin saja benar—sebagai bukti kelemahan. Mereka berpandangan bahwa Iran menawarkan proposal ini—yang secara ekstrem bertentangan dengan ideologi resminya—hanya karena mereka lemah dan putus asa. Para pejabat ini menolak membuat kesepakatan dengan Iran apapun yang ditawarkan ayatollah karena, menurut mereka, Amerika bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan secara gratis dengan menjatuhkan rezim di Teheran. Di sisi lain, jika pembicaraan dengan Iran dilakukan dan Amerika menerima bantuan Iran, maka Washington tidak bebas bermanuver karena telah berhutang jasa pada ayatollah.[1181] Kenapa harus berdialog dengan Iran ketika Anda bisa menentukan peraturan dalam keadaan kuat? Pada akhirnya, kesuksesan yang cepat di Irak menunjukkan bahwa menghadapi Iran tidak menjadi sesuatu yang terlalu sulit. Hanya satu bulan sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan bidang Kebijakan, Douglas Feith telah berbicara dengan pejabat Pertahanan dan Departemen Luar Negeri AS tentang bagaimana perang di Irak dapat berlanjut hingga Iran dan Syria untuk mengganti rezim di sana. Rencananya cukup ekstensif dan memiliki jangkauan yang luas. "Rencana ini lebih dari sekedar rencana darurat," Wilkerson bercerita.[1182] Tetapi menyampaikan kata "tidak" pada Iran tidak cukup. Kelompok agresif di Washington nampak ingin menambah rasa sakit pada luka yang sudah ada.

Alih-alih menolak langsung tawaran Iran, pemerintahan Bush memutuskan untuk memberikan hukuman pada Swiss karena telah mengirimkan dokumen proposal itu. Hanya

1178

1179

1180

1181

1182

beberapa hari setelah dokumen itu sampai, Washington kemudian memberikan teguran pada Guldiman dan pemerintahan Swiss karena telah melanggar mandat diplomatiknya. "Tindakan itu merupakan perbuatan yang sangat memalukan," Wilkerson memberikan pengakuan. Tetapi pesan kepada Iran sudah jelas—tidak hanya menolak memberikan respon atas tawaran Iran, pemerintahan Bush juga akan memberikan sanksi pada pihak yang menyampaikan pesan itu.[1183]

Sebuah kesempatan untuk membuat terobosan besar telah disia-siakan begitu saja. Para mantan pejabat pemerintahan Bush mengakui bahwa penolakan ini merupakan sebuah kesalahan. Proposal ini datang pada waktu yang menguntungkan. Teheran tidak memiliki program nuklir yang sedang berjalan, dan mereka tidak sedang menikmati pendapatan minyak dari meningkatnya permintaan sumber energi. "Pada waktu itu, mereka tidak sedang memperkaya uranium," Leverett berbicara dalam sebuah wawancara. Paul R. Pillar, mantan staf intelijen nasional untuk wilayah Timur Dekat dan Asia Selatan, menyebutkan langkah ini sebagai sebuah "kehilangan kesempatan", dan Richard Haass, kepala perencanaan kebijakan pada Departemen Luar Negeri AS waktu itu dan sekarang menjadi kepada Dewan Hubungan Luar Negeri, mengungkapkan bahwa proposal itu paling tidak layak untuk dieksplorasi. "Dengan menggunakan analogi minyak, kita harus mengebor sebuah lubang kering. Tetapi saya tidak melihat apa yang harus kami lepaskan."[1184] Bagi para pejabat pemerintahan yang menolak agenda kelompok noekonservatif, sulit sekali untuk memahami bagaimana peluang seperti itu bisa disia-siakan. "Dalam pandangan saya, proposal ini merupakan sesuatu yang Anda lempar ke udara lalu Anda berkata,"Saya tidak percaya saya telah melakukannya," Wilkerson berkomentar.[1185]

(Di kemudian hari pada Februari 2007, Sekretaris Negara Condoleeza Rice mendapatkan tekanan dari Komite Hubungan International (*House International Relations Committee*) tentang penawaran besar Iran dan mendapatkan pertanyaan apakah Amerika Serikat telah kehilangan sebuah peluang besar. Berbeda dengan wawancara sebelumnya dengan Radio Pubik Nasional, ketika dia mengakui telah melihat proposal tersebut, Rice sekarang berbicara kepada para anggota legislatif bahwa dia tidak ingat bahwa dia telah menerima dokumen proposal itu. "Saya tidak ingat pernah menerima dokumen itu," dia berbicara tanpa rasa peduli pada proposal Iran. Rice khawatir jika pada akhirnya Amerika Serikat harus melakukan negosiasi dengan Iran, alasan yang mungkin bagi perubahan sikap Rice adalah mungkin saja untuk menghindari hasil apapun dari potensi negosiasi dengan Iran pada 2007 dibandingkan dengan apa yang bisa dicapai Amerika pada 2003, ketika negara ini berada pada posisi yang lebih kuat.)[1186]

Proposal ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Para diplomat Iran di Eropa dan di negara lainnya mengirimkan isyarat yang sama kepada Amerika Serikat pada musim semi 2003. Utusan Iran untuk Swedia dan Inggris juga mulai mengirimkan isyarat bahwa rezim Iran siap untuk melakukan negosiasi, dengan menggunakan saluran lama daripada melalui Kementerian Luar Negeri Swiss.[1187] Dan di kota Genewa, perundingan antara Zarif dan

1183

1184

1185

1186

1187

Khalilzad terus berjalan—sesuatu yang membuat kecewa kelompok neo-konservatif. Pada 3 Mei, sebelum Teheran menyadari bahwa proposalnya ke Washington akan ditolak, Zarif dan Khalilzad telah bertemu dan membicarakan berbagai perkembangan di Irak. Pentagon telah memperingatkan Khalilzad tentang isu serangan al Qaeda terhadap pasukan Amerika Serikat di Teluk Persia. Khalilzad mendapatkan instruksi untuk meminta bantuan Iran agar mendapatkan informasi dari mata-mata al Qaeda yang ditahan Iran untuk menjelaskan isu tersebut. Informasi sangat berharga untuk menghindari serangan mematikan kepada pasukan Amerika Serikat. Tetapi Khalilzad tidak punya otoritas untuk memberikan imbalan apapun, khususnya pengembalian teroris MKO di Irak. Untuk memecahkan jalan buntu pembicaraan, Zarif kemudian menawarkan sebuah kompromi; Jika Washington memberikan nama-nama anggota MKO di Irak, maka Iran akan memberikan nama-nama mata-mata al Qaeda dalam tahanan Iran.[1188] Tawaran ini tidak didengarkan, tetapi ada dua diplomat yang sepakat untuk bertemu kembali pada 25 Mei untuk membicarakan hal ini dan hal lainnya.

Hanya beberapa minggu sebelum Guldiman mengirimkan dokumen proposal Iran ke Washington, Iran juga mengirimkan penawaran yang sama ke Israel di kota Athena. Untuk meyakinkan Negara Yahudi bahwa Iran sudah siap untuk membuat sebuah kesepakatan dengan Israel, Jenderal Mohsen Rezai, mantan komandan Pengawal Revolusi Iran (*Iranian Revolutionary Guards*), menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan sejumlah pejabat resmi dan tidak-resmi dari Amerika, Israel, dan Palestina yang disponsori oleh sebuah universitas di Amerika.[1189]

Rezai melakukan sesi tanya-jawab dengan Israel—sebuah manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya—dan membicarakan sebuah proposal pemulihan kembali hubungan Amerika dengan Iran.[1190] Inti dari rencana Rezai adalah menyusun sebuah kesepakatan sementara dalam kebuntuan hubungan Israel-Iran; kedua negara akan saling menghormati terhadap wilayah pengaruh masing-masing negara dan tidak saling mengganggu. Jika Amerika Serikat dan Israel menghentikan kebijakan isolasi terhadap Iran, maka Teheran akan merubah sikapnya terhadap beberapa isu, termasuk isu tentang Israel.[1191] Secara signifikan, Iran akan memoderasi posisinya mengenai konflik Israel-Palestina dengan mengadopsi sikap negara seperti Malaysia dan Pakistan, yaitu, Iran akan menjadi sebuah negara Islam yang tidak akan mengakui Israel, sesekali akan mengkritik Israel, tetapi sama sekali tidak akan melakukan konfrontasi atau menantang Negara Yahudi baik secara langsung ataupun tidak langsung.[1192] Iran juga akan menekan kelompok seperti Hezbollah untuk tidak memprovokasi Israel. Sebagai imbalannya, Israel akan berhenti menentang proses saling-mendekat Amerika dan Iran dan akan mengakui peran Iran di regional, sementara itu Amerika Serikat akan mengakhiri kebijakan isolasinya terhadap Iran dan mengakomodasi peran kunci Iran dalam keamanan di Teluk Persia. Bagi Iran, langkah ini merupakan cara untuk memisahkan hubungan Amerika-Iran dari rivalitasi Israel-Iran. “Pada tahun pertama revolusi, kami tidak mengakui Israel, tapi kami memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat,” seorang pejabat di Kementerian Luar

1188

1189

1190

1191

1192

Negeri Iran bercerita. “Dan jika perlu, Israel bisa melakukan perdagangan dengan Iran melalui Amerika Serikat. Hal ini akan menadi solusi sementara sebab pada waktu itu kami tidak mengakui Israel. Israel secara praktikal akan mampu mencapai tujuannya, dan Iran juga tidak akan menentang kebijakan Israel di regional.”[1193]

Dukungan terhadap model negara Pakistan/Malaysia kuat sekali dalam Kementerian Luar Negeri Iran, termasuk di beberapa lembaga militer, dan dalam kantor kepresidenan, dan model ini juga didukung oleh mantan presiden Rafsanjani.[1194] Model ini juga mendapatkan dukungan ‘basa-basi’ dari Ayatollah Khamenei, dan hal ini dapat menjelaskan mengapa dalam berbagai kesempatan, para diplomat Iran, termasuk dalam jamuan makan malam di Capitol Hill yang dihadiri Zarif dan beberapa anggota legislatif Amerika, mengulangi lagi seruan untuk melibatkan Iran dalam pengambilan keputusan di regional sebagai imbalan atas sikap pasif Iran terhadap Israel.[1195] Iran juga mengkomunikasikan inti dari model negara Pakistan/Malaysia kepada anggota komunitas kebijakan luar negeri di Washington, yang mengkonfirmasi keinginan Iran untuk merundingkan beberapa isu sensitif seperti dukungan Iran terhadap Hezbollah, Jihad Islam, Hamas, dan bahkan mengenai catatan hak asasi manusia di Iran.[1196]

Israel tertarik dengan tawaran proposal Iran. Dengan sikap penuh hormat dan hangat, mereka menyambut baik jenderal yang bantuan dan nasihatnya kepada Hezbollah telah menyebabkan begitu banyak kerusakan dan penderitaan bagi Israel. Sebagian besar isi proposal ini bukan hal yang baru—Israel telah mendengar pesan yang sama dari perwakilan resmi dan tidak resmi Iran dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi ketika Israel mendengar pesan yang sama berulang kali disampaikan Teheran, mereka percaya bahwa kali ini Teheran serius. Proposal ini bukanlah omong kosong. Bukan sebuah kebijakan strategis, tetapi sebuah kebijakan (yang sesungguhnya, *pen.*). Jika saat itu saya seorang pemegang kebijakan, saya akan katakan,”Mari kita bergerak ke pembicaraan yang lebih seriuss” salah satu pakar terkemuka Israel di bidang pertahanan dan kemanan menjelaskan.[1197]

Tetapi kelompok neo-konservatif dan kelompok garis-keras dalam pemerintahan Israel tidak menginginkan adanya “pembicaraan serius” apapun. Kemenangan di Irak dan penolakan terhadap proposal Iran memberikan mereka kekuatan tambahan, dan mereka meningkatkan lagi usaha untuk meyakinkan Gedung Putih agar menjadikan Iran sebagai target. “Pembebasan Irak merupakan pertempuran besar pertama untuk masa depan Timur Tengah,” William Kristol, seorang tokoh neo-konservatif terkemuka dan pendiri *Project for New American Century*, menulis dalam majalah *Weekly Standard,* pada awal Mei. “Pertempuran besar berikutnya—bukanlah, saya harap, pertempuran militer—adalah dengan Iran. Kami sudah siap untuk pertempuran mematikan dengan Iran untuk masa depan Irak.”[1198] Dengan memberikan argumentasi bahwa kemenangan di Irak “akan memberikan tanda kematian bagi revolusi Iran”, Kristol telah bergabung dengan neo-konservatif lainnya untuk mempromosikan penekanan pada efek domino. Ketika Irak

1193

1194

1195

1196

1197

1198

menjadi negara demokratis, maka kediktatoran di Timur Tengah akan mengikuti atau runtuh di bawah tuntutan kuat dari rakyat mereka sendiri. “Ketidakpuasan yang meluas di Iran cenderung meningkat ketika pasukan Amerika Serikat semakin dekat ke wilayah Republik Islam,” Reuel Marc Gerecht dari *American Enterprise Institute* (AEI) menulis dalam majalah yang sama.[1199]

Sebuah konfrontasi dengan Iran sudah berada dalam jangkauan, tetapi sebelum Washington bisa meningkatkan ketegangan dengan Iran, opsi diplomatik harus sepenuhnya ditutup. Pada 6 Mei, dalam sebuah konferensi AEI, seorang pakar Timur Tengah kelahiran Israel, Meyraw Wurmser (yang suaminya saat ini bekerja sebagai penasihat senior Cheney) mengungkapkan target selanjutnya dari kelompok neo-konservatif; pembicaraan Khalilzad dengan Zarif di Genewa. “Pertempuran kita dengan Irak merupakan sebuah pertempuran dalam sebuah peperangan panjang.” Wurmser berkomentar. “Langkah ini akan sulit dipahami jika kita hanya bisa memerangi Irak. Kita harus bergerak maju, dan lebih cepat. Keputusan untuk mengutus Khalizad ke sebuah pertemuan rahasia dengan perwakilan pemerintahan Iran dalam beberapa minggu terakhir merupakan kesalahan besar. Alih-alih datang sebagai pemenang yang harus ditakuti, dihormati, dan dicintai, kita masih berkomunikasi dalam pola diplomasi lama, situasi politik yang mengarah pada serangan 11 September”.[1200]

Enam hari kemudian, pada 12 Mei, sebuah serangan teroris di kota Riyadh, berhasil menewaskan delapan warga Amerika dan dua puluh tujuh warga Arab Saudi. Peristiwa ini memberikan alasan kuat bagi kelompok neo-konservatif untuk mengakhiri diplomasi Khalilzad. Dalam beberapa hari saja, jari-jari Amerika tertuju pada Iran. Rumsfeld mengumumkan bahwa serangan ini telah diperintahkan al Qaeda di Iran. Pada 15 Mei, David Martin dari *CBS News* memberitakan bahwa Pentagon memiliki bukti bahkan serangan di Arab Saudi “telah direncanakan dan diarahkan oleh agen senior al Qaeda yang mendapatkan keamanan di Iran.” Tetapi bukti yang dimaksud itu tidak ada. Meskipun panggilan telepon telah dideteksi antara agen al Qaeda di Arab Saudi dan Iran, tidak ada satupun bukti bahwa serangan ini dilakukan atas persetujuan atau pengetahuan pemerintahan Iran. “Para ahli tentang Iran sepakat bahwa, bahkan jika al Qaeda telah masuk ke dan keluar dari Iran, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah Iran terlibat. Ada banyak aspek di Iran yang tidak diketahui oleh pemerintahan.”[1201]

Pertemuan selanjutnya di Genewa dijadwalkan pada 25 Mei, tetapi pada 14 Mei Iran mencurigai bahwa Washington mungkin saja membatalkan pertemuan tersebut. Duta besar Iran untuk Afghanistan melaporkan pada Teheran bahwa Amerika tidak akan menghadiri pertemuan itu, meskipun Washington belum membatalkan rencana pertemuan ini secara resmi. Akibatnya, Zarif tidak pernah berkunjung ke Teheran dari New York untuk menerima instruksi agar menghadiri pertemuan itu. (Sebagai duta besar Iran untuk PBB, Zarif tinggal di New York dan harus selalu berkunjung ke Iran baik sebelum atau sesudah pertemuan Genewa untuk menerima instruksi dan melapor kepada Teheran terkait pertemuan ini. Karena sensitifitas pertemuan ini, seluruh laporan dan instruksi disampaikan secara lisan, sebagian besarnya disampaikan langsung kepada pemimpin

1199

1200

1201

tertinggi Iran.)[1202] Hanya beberapa hari sebelum jadwal pertemuan, Washington mengirimkan pesan kepada Teheran melalui Swiss—yang bantuannya dibutuhkan satu kali lagi—bahwa "Saluran Genewa" sudah ditutup. Kelompok neo-konservatif-agresif (*neoconservative hawk*) telah memenangkan kembali pertaruangan, tetapi pertempuran dengan Iran masih belum selesai.

Para diplomat di Departemen Luar Negeri AS terpukul, tetapi mereka tidak menyerah. Pada 2003, seperti yang terjadi pada 1996, ketika AIPAC bergerak dengan sanksi yang disetujui Kongres untuk memastikan bahwa Presiden Clinton tidak akan bisa menolak mereka (karena hanya Kongres yang dapat membatalkan mandat sanksi yang disetujui Kongres itu sendiri), sekali lagi Kongres berhasil membatasi kemampuan manuver presiden. Koalisi baru antara AIPAC dan kelompok Kristen evangelis dari Partai Republik di Capitol Hill ternyata sangat membantu dalam kasus ini. Senator Sam Brownback, seorang Republikan evangelis dari Kansas, pada awal musim semi 2003 memimpin Senat untuk menganggu dialog antara Amerika dengan Iran. Dilatarbelakangi oleh pengetahuannya atas kecenderungan Powell untuk berusaha membangun dialog dengan Iran dan sebuah tawaran besar, Brownback kemudian bekerja untuk memberikan hambatan politik bagi usaha Powell tersebut.

Pada 8 April, Brownback memperkenalkan sebuah amandemen kontroversial dalam Undang-Undang Otorisasi Hubungan Luar Negeri tahun 2004 yang memberikan alokasi bantuan anggaran sebesar 50 juta dolar untuk kelompok oposisi di Iran. Amandemen ini merupakan pengulangan dari gagasan yang diusulkan pada Juni 2002 oleh pejabat Pentagon dalam pembicaraan mengenai kebijakan pemerintah Bush terhadap Iran. Meskipun usaha pejabat Pentagon ini gagal, Brownback menghidupkan kembali gagasan ini di Senat. Dengan memperkenalkan semua amandemen yang akan memperbesar dukungan finansial kepada kelompok-kelompok oposisi di Iran—sama halnya dengan bantuan finansial Amerika kepada kelompok oposisi Kongres Nasional Irak (*Iraqi National Congress*) yang dipimpin oleh Ahmad Chalabi—Washington akan mengambil langkah penting dalam membuat perubahan rezim dalam kebijakan resmi Amerika terhadap Iran. Ketika perubahan rezim ini terjadi, kemungkinan dialog Amerika dengan Iran atau sebuah tawaran besar akan secara efektif hilang.

Amandemen ini berusaha untuk membentuk sebuah Yayasan Demokrasi Iran (*Iran Democracy Foundation*) yang akan membagi dana 50 juta dolar ke berbagai kelompok oposisi di Iran dan saluran televisi satelit di Amerika Serikat. Hanya satu minggu sebelumnya, dalam sebuah pembicaraan pribadi di Capitoll Hill yang diselenggarakan oleh *Iranian Jewish Public Affairs Committe,*[1203] Reza Pahlavi, anak dari Shah yang terakhir dan pendukung Brwonback, mendesak pejabat di Capitoll Hill untuk mendukung gagasan untuk mendanai kelompok oposisi di Iran. Pangeran Persia ini meyakinkan kembali pada pejabat itu bahwa setiap perhatian pada dana yang dibagikan ke kelompok-kelompok oposisi bisa diatasi dengan menciptakan "sebuah derajat pemisahan" antara Kongres dan para penerima dana di Iran. Yayasan Demokrasi Iran akan melakukan hal ini. Faktanya, ketentuan dalam amandemen tersebut hampir sama dengan Undang-Undang Pembebasan Irak yang disahkan Kongres pada 1998 yang berhasil membuat perubahan rezim dalam kebijakan resmi Amerika Serikat terkait Irak dan memberikan jalan bagi terjadinya perang

1202

1203

Irak pada 2003 yang secara efektif mampu menutup semua opsi diplomati. AIPAC segera mendukung amandemen ini.[1204]

Koneksi Pahlavi dengan Israel dan kekuatan pro-Israel di Washington bukan hal yang baru. Pada awal 1980-an dia pernah mendekati Ariel Sharon—yang kemudian menjadi Perdana Menteri—dengan sebuah rencana untuk menjatuhkan rezim mullah. Tetapi dengan kemunculan kelompok neo-konservatif dalam pemerintahan Bush, Pahlavi mendapatkan alasan baru untuk membangun kembali koneksi dengan teman lamanya. Sebagaimana dia membutuhkan kelompok pro-Israel agar pesannya sampai kepada para pemegang kebijakan di Washington, AIPAC dan kelompok neo-konservatif diuntungkan dengan melibatkan unsur Iran dalam agenda mereka. "Ada sebuah perjanjian yang muncul anatara kelompok agresif dalam pemerintahan, kelompok-kelompok Yahudi dan kelompok Iran pendukung Reza Pahlavi untuk mendesak perubahan rezim," Pooya Dayanim, presiden *Iranian Jewish Public Affairs Committee* di kota Los Angeles, berbicara pada majalah Yahudi *The Forward*.

Meskipun Pahlavi telah bertemu dengan pimpinan *Jewish Institute for National Security Affairs,* Sharon, mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan presiden Israel kelahiran Iran, Moshe Katsav, Reza Pahlavi gagal meyakinkan pada pendengarnya ini.[1205] Kecerdasan politiknya tidak cocok dengan antusiasmenya. Misalnya, Pahlavi mendesak untuk menyelenggarakan konferensi tahunan AIPAC pada Mei 2003 di kota Washington, tetapi para pajabat AIPAC harus menyakinkan anak Shah bahwa hubungan terlalu dekat dengan kelompok pro-Israel mungkin saja tidak terlalu baik bagi komunitasnya sendiri—komunitas diaspora warga Iran di Amerika Serikat.[1206]

Tetapi bantuan dan masukan-masukan Pahlavi bagi pembentukan Yayasan Demokrasi Iran mendapatkan respon yang positif. Amandemen usulan Brownback menjadi kendaran yang tepat bagi kelompok agresif di Pentagon untuk menghalangi Bush agar tidak merespon tawaran besar Iran. Ironisnya, terlepas dari kecaman senator Kansas ini pada dukungan pemerintah Iran terhadap terorisme, dia rupanya tidak menerapkan patokan yang sama bagi dirinya sendiri. Ketika otoritas Prancis menangkap pemimpin MKO Maryam Rajavi pada Juni 2003 di Paris, Brownback segera berusaha untuk membantu militan Iran tersebut. Meskipun MKO mendapatkan bantuan finansial dari Saddam Hussein, sebagaimana yang diakui Bush sendiri, dan meskipun MKO telah masuk ke dalam daftar organisasi teroris versi Departemen Luar Negeri AS dan bertanggung jawab atas kematian beberapa warga Amerika, Brownback mengirimkan surat kepada Duta Besar Prancis Jean-David Levitte, yang mendesak agar tidak ada tindakan apapun pada Rajavi. Prancis tidak boleh melakukan "pekerjaan kotor Republik Islam Iran" dengan memperkuat "sebuah rezim teroris atas sebuah kelompok dari rakyatnya sendiri yang sedang memperjuangkan kebebasan," dia menulis.[1207] Tetapi usaha senator Kansas untuk membantu organisasi teroris ini berakhir sia-sia.

Desakan amandemen Brownback juga gagal, terutama karena kelompok oposisi gagal menjadi kelompok yang kompeten dan kredibel. Dalam sebuah pembicaraan di Capitol Hill, Reza Pahlavi membuat para pejabat Hill kebingungan dan tidak yakin ketika

1204

1205

1206

1207

dia berbicara tentang Amerika dengan menggunakan kata "kami". Pahlavi memuji usaha Amerika di Irak dan menunjukkan ketinggian moral dari pasukan Amerika. "Kami [Amerika] telah membawa para korban yang akan kami hindari jika kami tidak berusaha menghindari kematian warga sipil di pihak mereka [Irak]," dia berbicara pada staf yang kebingungan, yang pertama kali menduga bahwa mungkin saja masih ada pasukan militer yang setia pada Reza Pahlavi yang telah bertempur bersama pasukan Amerika ketika mereka memasuki kota Bangdad. Meskipun gagal meloloskan amandemennya, Brownback nampak telah mencapai tujuannya; mengganggu proses dialog Amerika dan Iran dan membuat Departemen Luar Negeri AS tidak mendesak Gedung Putih untuk mempertimbangan dialog yang lebih jauh dengan Teheran. Bagi Israel, ketegangan yang berkepanjangan antara Amerika dan Iran membuat opsi militer tetap terbuka dan harapan hidup kembali bahwa, setelah Baghdad, lelaki sejati akan pergi ke Teheran.

Sementara itu, di Teheran, sikap Amerika yang tidak memberikan respon dianggap sebagai sebuah penghinaan. Sekarang Iran mengeluhkan sulitnya berurusan dengan sebuah rezim ideologis—pemerintahan Bush. "Orang-orang yang ada di Washington in tidak melihat dunia apa adanya; mereka hanya melihat dunia sebagaimana yang ingin mereka lihat," seorang reformis Iran berbicara pada saya. "Kami pernah mengalami kesulitan dari pola pikir seperti itu setelah Revolusi, tetap kami kemudian belajar dengan cepat atas bahaya dari kebijakan luar negeri yang cenderung ideologis. Kami telah membayar mahal bagi kesalahan kami itu."[1208] Sikap Washington terhadap proposal Iran memperkuat keyakinan Iran bahwa berhubungan dengan Amerika dalam kondisi lemah tidak akan berjalan. Tawaran bantuan kepada Amerika di Iran atau sikap kompromi adalah langkah sia-sia sebab Washington akan meminta ketundukan penuh dari Iran ketika Amerika percaya bahwa Iran memiliki kemampuan manuver dan opsi lainnya untuk dipilih. Pemerintahan Bush akan sepakat melakukan kerja sama dengan Iran dalam posisi yang setara, para mullah itu berpandangan, hanya jika Amerika tidak memiliki pilihan lain.

Sebagaimana yang terjadi pada periode 1991-1993, setelah Iran tidak dilibatkan dalam konferensi Madrid dan Amerika terus berupaya mengisolasi Iran karena bantuan Iran dalam Perang Teluk Persia pertama, keputusan Amerika ini memperkuat kelompok di Iran Teheran yang berpandangan bahwa Amerika dapat dipaksa untuk datang ke meja perundingan hanya jika ada sebuah kerugian yang akan dihadapi Amerika jika Amerika tidak datang ke meja perundingan itu. Keseimbangan kekuatan yang ada di Iran kemudian bergeser ke pihak kelompok garis-keras, dan, sebagaimana yang terjadi sebelumnya, para diplomat yang terlibat dalam pembukaan koneksi dengan Amerika harus membayar sebuah harga atas resiko yang mereka ambil. "Kesalahannya bukan hanya pada ide, tetapi juga pada kelompok yang memperjuangkan ide tersebut," Seyyed Mohammad Hossein Adeli berkomentar.[1209] (Sebagai duta besar Iran untuk Inggris, Adeli kemudian dipecat oleh presiden baru Iran yang berhaluan garis-keras, Mahmoud Ahmadinejad.) Sebagaimana yang dilakukan pemerintahan ayahnya pada 1991, pemerintahan Bush berpandangan bahwa Amerika Serikat tidak perlu bernegosiasi dengan Iran; Amerika terlalu kuat dan terlalu mengagumkan, Iran terlalu lemah dan terlalu rapuh. Ungkapan ini merupakan bentuk kesombongan lagi.

1208

1209

Kelompok agresif di Israel percaya bahwa manuver Iran ini merupakan sebuah usaha mengulur waktu untuk memperkuat negaranya menghadapi ancaman Amerika, yang tumbuh menjadi kekuatan berbahaya setelah kejatuhan Saddam Hussein di Irak. Baik pemerintahan Ehud Barak dan Ariel Sharon menolak manuver Iran ini karena Iran tidak punya kepentingan dengan Israel, tetapi hanya berusaha memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, yang setelah itu Iran kemudian akan menyerang Israel.[1210] Menurut anggota Knesset Ephraim Sneh, yang menolak untuk percaya bahwa Iran ingin memperhalus posisinya terkait Israel, negosiasi dengan Teheran "tidak memiliki dasar sama sekali, sama sekali sia-sia." Langkah ini hanya akan memberikan kesempatan lain bagi Iran untuk menghindar dari kekuatan Amerika. Iran tidak akan pernah merubah sikap mereka terhadap Israel, dia melanjutkan, maka satu-satunya pilihan adalah mengganti rezim (di Iran, *pen.*) "Rezim di Teheran tidak mengakui keabsahan Negara Yahudi di dunia ini," dia berbicara pada saya di kantornya di Tel Aviv. "Jika seperti ini situasinya, apa yang harus saya bicarakan dengan mereka—ketentuan-ketentuan dari tindakan saya?"[1211] Kelompok agresif di Israel berpandangan bahwa mengapa Amerika harus bernegosiasi dengan Iran dan mengizinkan ayatollah untuk bertahan hidup, ketika Amerika memiliki kekuatan untuk mengakhirinya selama-lamanya. Tetapi pandangan lain di Israel lebih berhati-hatii dan pada waktu itu merasa menyesal karena telah kehilangan sebuah peluang dan sebuah pembukaan pembicaraan. "Saya pikir, keputusan untuk tidak membuka saluran dialog adalah kesalahan besar," seorang pengamat terkemuka tentang militer Israel berkomentar. "Tidak untuk menyelesaikan setiap masalah, tetapi agar memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Kedua belah pihak akan memahami garis merah [melalui sebuah dialog]."[1212]

Sebagaimana yang terjadi sebelumnya, kompleksitas politik regional menunjukkan bahwa beberapa kemenangan dapat bertahan lama di Timur Tengah. Hanya beberapa bulan setelah kekalahan Saddam, sebuah pemberontakan terjadi yang kembali merubah peta politik regional bagi Iran dan Amerika Serikat. Sementara pengaruh Teheran mulai meningkat, karena hubungannya dengan kelompok Syiah di selatan dan suku Kurdi di utara, kemampuan manuver Washington mulai berkurang. Pemerintahan Bush merugikan dirinya sendiri dengan meruntuhkan kredibilitasnya sendiri, tetapi membuat Iran yakin bahwa tujuan akhir Amerika—terlepas dari kerja sama jangka pendeknya dengan Teheran—adalah menjatuhkan Republik Islam. Keceriaan nampak jelas di wajah Wakil Menteri Urusan Minyak Hadi Nejad-Hosseinian ketika dia menjelaskan tentang bagaimana Amerika Serikat secara tidak sengaja telah membuat Iran kuat. Washington telah membantu Iran bertransformasi menjadi sebuah kekuatan regional dengan menjatuhkan Saddam dan Taliban sementara membuat dirinya sendiri menemui jalan buntu di Mesopotamia. "Irak tidak bisa lebih baik lagi bagi kami," dia berbicara pada saya sambil tersenyum.

1210

1211

1212

20-Menatap Masa Depan, Menghadapi Kenyataan

Siapa yang menguasai Timur Tengah—Iran atau Amerika Serikat?
—Mantan Menteri Luar Negeri Jerman, Joschka Fischer, 29 Mei 2006

Sejak berakhirnya Perang Dingin, rivalitas Israel dan Iran telah menjadi hambatan bagi sebagian besar tujuan-tujuan strategis Amerika Serikat di Timur Tengah. Kedua negara ini akan selalu berusaha menganggu kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang mereka anggap menguntungkan salah satu pihak. Iran berusaha menentang proses perdamaian di Timur Tengah agar Amerika Serikat tidak menciptakan apa yang ditakutkan Iran, yaitu sebuah tatanan Timur Tengah yang berpusat pada Israel dan didasarkan pada isolasi berkepanjangan terhadap Iran. Israel juga menentang langkah negosiasi Amerika dengan Iran, karena khawatir jika proses saling-mendekat antara Amerika dan Iran akan memberikan signifikansi strategis Iran di Washingtan dengan mengorbankan Israel—sebab Iran merupakan negara kuat yang memiliki kepentingan bersama dengan Amerika Serikat, meskipun ada konflik ideologis diantara mereka.[1213]

Amerika bisa memanfaatkan kekuatan Iran sebagai negara penyangga (*buffer state*) untuk membendung akses China ke Teluk Persia dan sumber-sumber energi di Danau Kaspia, sebagaimana Iran telah berfungsi sebagai negara peyangga terhadap Uni Soviet sebelum keruntuhan Komunisme. Israel khawatir jika Israel sendiri ataupun Washington tidak mampu memiliki pengaruh lebih besar jika Iran menjadi negara kuat, bersenjatakan rudal, dan memiliki potensi nuklir.[1214] Sementara itu sebagian besar pejabat Israel merasa bahwa Negara Yahudi tidak dapat bersaing dengan Iran pada level strategis—sebagai negara yang bernilai bagi Amerika Serikat—pejabat lainnya berpandangan bahwa hubungan khusus Israel dengan Amerika Serikat tidak didasarkan pada kepentingan strategis. Hubungan spesial ini "didasarkan pada sebuah ikatan erat", Shlomo Brom dari *Jaffe Center for Strategic Studies* menjelaskan. "Hubungan ini didasarkan pada kenyatan bahwa sebagian besar populasi di Amerika Serikat mendukung Israel; Yahudi, Kristen Kanan, dan populasi lainnya. Hubungan ini didasarkan pada kesamaan nilai."[1215]

Baik Israel maupun Iran—ataupun seluruh negara di Timur Tengah—tidak mampu mengatasi gempa bumi geopolitik yang mengguncang wilayah tersebut setelah jatuhnya Uni Soviet. Kekhawatiran Israel dan Iran adalah pembentukan sebuah tatanan baru di Timru Tengah yang akan menguntungkan salah satu pihak merupakan situasi yang berbahaya, terutama karena wilayah Timur Tengah tidak memiliki basis geopolitik bagi tatanan lemah ini. Proses pembentukan kembali sebuah keseimbangan yang baru dan stabil muncul ke permukaan dan semakin meningkatkan rivalitas regional. Bukan hanya keruntuhan Uni Soviet yang belum mendapatkan perhatian, tetapi konsekwensi menyeluruh dari kemenangan Amerika atas Taliban dan Irak masih harus terus dipelajari. Lebih parah lagi, Washington berusaha menciptakan situasi yang mengancam keseimbangan alami dengan membendung dan mengisolasi Iran, salah satu negara kuat di Timur Tengah. Bahkan jika situasi buatan ini dapat diciptakan berdasarkan pada eksklusi atas sebuah raksasa regional seperti Iran, situasi ini tidak akan mampu berdiri di atas

1213

1214

1215

kakinya sendiri dan situasi ini akan bertahan lama hanya jika Amerika Serikat bersedia untuk mempertahankannya. Tetapi harga yang harus dibayar akan semakin berat bagi Amerika Serikat.

Konflik antara Iran dan Israel tidak dipicu oleh perbedaan ideologi, juga tidak dipicu oleh semangat ideologi yang hingga saat ini membuat kedua negara tetap hidup. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa ideologi kedua negara ini tidak relevan; paling tidak, retorika yang mereka gunakan membuat sebuah politik akomodasi semakin sulit terjadi. Sikap anti-Zionis dipegang oleh sebagian besar, jika bukan semuanya, pejabat Iran. Tetapi dampak dari orientasi ideologis dari para pemimpin Iran terhadap kebijakan luar negeri Iran merupakan hal yang sama sekali berbeda. Transformasi besar dalam hubungan Israel dengan Iran semuanya beriringan dengan pergeseran geopolitik, bukan perubahan politik. Shah mulai menjaga jarak dari Israel setelah Iran menjadi sangat kuat sehingga mampu mengatasi ancaman dari Arab dan berteman dengan negara-negara Arab sebagai negara kuat. Pada saat itu, Iran kemudian memandang hubungannya dengan Israel sebagai sebuah beban daripada aset. Kegagalan Shah untuk mendapatkan dukungan dari Arab untuk mendapatkan posisi dominan, terutama merupakan akibat dari hubungan dekatnya dengan Israel, mendorong kelompok revolusioner mencari sebuah formula berbeda untuk menjembatani keretakan hubungan antara Arab dengan Persia—formula itu bernama "Islam politik". Formula ini membuat Iran harus semakin beroposisi terhadap Israel, meskipun hubungan keamanan yang secara diam-diam dengan Negara Yahudi terus berlanjut.

Perubahan dramatis paling buruk dalam hubungan Israel-Iran terjadi pada awal 1990-an, pasca berakhirnya Perang Dingin dan kekalahan Iran dalam Perang Teluk Persia. Ironisnya, semangat ideologis Iran secara tajam menurun dalam tahun-tahun tersebut. Sementara kebijakan luar negeri Iran selalu memiliki aspek ideologis, ideologi ini akan diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional dalam hubungan dengan Israel hanya jika tidak bertentangan dengan kepentingan strategis, sebagaimana yang terjadi ketika era pasca-Perang Dingin.[1216] "Israel menentang Iran yang memiliki peran penting, atau peran utama, di regional. Konsekwensinya, mereka menentang perkembangan Iran," Mohsen Mirdamadi menjelaskan, yang menjadi kepala Komite Hubungan Luar Negeri di Parlemen Iran pada akhir 1990-an. "Maka rivalitas ini merupakan konflik strategis yang kami miliki dengan Israel. Dan jika kami mengambil sisi ideologis, kami masih akan tetap berkonfrontasi dengan Israel."[1217]

Ketika kepentingan strategis dan ideologis Iran berbenturan, seperti yang mereka lakukan pada 1980-an, pertimbangan strategis secara konsisten selalu didahulukan. Bagi Iran, hal ini bukan sebuah kontradiksi tetapi sebuah kenyataan hidup yang sederhana. Ideologi bukan sebuah hal mutlak bagi para penguasa di Teheran. Mantan Presiden Hashem Rafsanjani mengakui hal yang sama dalam sebuah khutbah Shalat Jumat. "Kita membuat sebuah tindakan yang tidak tepat atau tidak pernah membuat tindakan sama sekali. Kita telah menunda untuk membuat sebuah keputusan. Ideologi kami fleksibel. Kita dapat memilih sebuah tindakan berdasarkan Islam."[1218] Dalam kesempatan lain, Rafsanjani menolak anggapan bahwa kebijakan luar negeri Iran harus didasarkan pada prinsip-

1216

1217

1218

prinsip ideologis sehingga negara harus bertindak sesuai dengan tugasnya (*vazifeh*) dalam Islam, apapun konsekwensi yang akan dialaminya. "Tindakan yang membuat sebuah negara ada dalam bahaya atas dasar pertimbangan Islam sama sekali tidak Islami."[1219] Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Maleki, kebijakan luar negeri Iran sudah lama tidak ideologis. "Ideologi artinya bahwa kita harus membuat kebijakan-kebijakan pro-Islam di seluruh dunia. Ya, kami mengakui bahwa kami pro-Muslim di seluruh dunia, tetapi kami tidak mendukung Muslim Chechnya. Jika ideologi merupakan pertimbangan pertama dalam kebijakan luar negeri Iran, Iran harus melakukannya. Tetapi Iran tidak."[1220] Seperti pemimpin Iran lainnya yang mungkin saja ingin mencapai tujuan idelogis mereka, tidak ada satupun kekuatan dalam kebijakan luar negeri Iran yang lebih dominan daripada pertimbangan geopolitik.[1221]

Terlepas dari retorika Israel yang sebaliknya, sebagian besar para pemegang keputusan tertinggi di Tel Aviv mengakui hal ini dan berpandangan bahwa ambisi Iran ini tidak berkaitan dengan karakter Islam dari rezim yang sedang berkuasa. "Apa yang dilakukan Shah adalah sebuah ambisi yang dibangun di atas nasionalisme, yang bagi para penerusnya memiliki kesamaan dengan ambisi yang dibangun di atas radikalisme Islam, dan seringkali berbeda tipis dengan nasionalisme," Barry Rubin, direktur *Global Research in International Affairs* (GLORIA) *Center* di kota Yerusalem. Akhir dari permainan Iran, seperti yang disaksikan Israel, tidak berbeda jauh dari rezim Shah.[1222] "Bangsa Persia menginginkan hegemoni! Mereka selalu menginginkannya, mereka akan selalu begitu," seorang Iran di Israel berbicara pada saya dengan berterus-terang.

Ketika seseorang berusaha menggali lebih dalam, retorika pedas dari Presiden Iran Mahmoud Ahamdinejad terhadap Israel ternyata memiliki motivasi strategi tersendiri. Ahmadinejad melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh beberapa pemimpin Iran sebelumnya—dia mempertanyakan peristiwa Holocaust. (Presiden sebelumnya, Mohammad Khatami, secara hati-hati menghindari persoalan ini.) "Hari ini, mereka membuat sebuah mitos atas nama Holocaust dan menganggapnya berada di atas tuhan, agama, dan nabi," Ahmadinejad berbicara di hadapan ribuan orang pada akhir 2003 di wilayah tenggara Iran, Zehdan. "Jika Anda [Eropa] telah melakukan tindakan kriminal besar ini, lalu mengapa warga Palestina yang sedang tertindas itu yang harus menebusnya?" dia melanjutkan. "Anda [Eropa] harus menebus kesalahan itu dengan diri Anda sendiri." Presiden Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan pernyataan untuk mengecam pidato presiden Iran tersebut. Eropa sendiri, tidak mengherankan, marah dan mengancam akan bergabung dengan Amerika Serikat untuk mengambil langkah lebih keras terhadap Iran. Respon cepat dari publik internasional ini mengejutkan Iran, yang kemudian memicu perdebatan besar dalam pemerintahan. Pernyatan ini juga membuat para negosiator nuklir Iran marah; mereka telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Eropa sejak 2003 mengenai program nuklir Iran. Mereka menyatakan bahwa pernyataan ini mengganggu usaha mereka selama ini yang secara bersamaan juga ditujukan untuk menghindari pantauan Dewan Keamanan dan untuk mempertahankan hak pengayaan Iran terhadap uranium.

1219

1220

1221

1222

Orang-orang di sekitar Ahmadinejad dengan tegas menyatakan bahwa Iran harus memperbesar konflik ini dan membuat Israel menjadi bagian penting dan signifikan dalam perdebatan internasional mengenai program nuklir Iran. Memposisikan Israel dalam isolasi hanya akan menguntungkan blok Barat. Dengan memperbesar cakupan perdebatan, Iran akan menemukan alat yang tepat untuk mempertahankan posisinya. Paling tidak, orang-orang Ahmadinejad berpandangan, kerugian harus dibebankan pada Israel karena telah menjadikan program nuklir Iran sebagai perhatian utama dunia internasional dan karena telah meyakinkan Washington untuk mengadopsi kebijakan agresif terhadap Iran. Kelompok oposisi pemerintahan Ahmadinejad dari sayap yang lebih moderat sepakat dengan gagasan untuk menempatkan Israel dalam posisi defensif dan memperluas topik perdebatan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang langkah terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut seorang pejabat senior Iran, orang-orang dekat Ahmadinejad lebih suka mempersoalkan isu-isu yang harus diselesaikan Israel selama dua dekade terakhir; legitimasi Israel dan hak eksistensi Israel, kebenaran peristiwa Holocaust, dan hak Yahudi Eropa untuk tetap tinggal di Timur Tengah. Mereka berpandangan, pendekatan seperti ini akan bertemu dengan kekecewaan rakyat Arab sekaligus mengungkapkan ketidakmampuan negara Arab pro-Amerika, yang akan sama-sama merasa tertekan dan malu.

Sebagaimana yang pernah dilakukan Iran pada awal 1980-an, Iran kembali berusaha mengganggu kekuatan pemerintahan Arab pro-Barat di regional dengan menggunakan rakyat Arab. Jika kebuntuan program nuklir dipandang sebagai sebuah serangan Amerika-Israel terhadap sebuah negara Islam Iran yang membela Palestina, maka pemerintahan Arab tidak mungkin—meskipun kebencian mereka terhadap Teheran—menentang Iran secara terbuka karena hal ini akan membuat mereka nampak berada di pihak Israel. Langkah ini merupakan strategi lama Iran. Israel tidak asing lagi dengan strategi ini, meskipun mereka mereka tetap melawannya. “Dalam pandangan saya, hal ini masih—bahkan dengan persoalan nuklir ini—menjadi tujuan utama retorika berapi-api dari Ahmadinejad. “Jika persoalan di Timur Tengah adalah sebuah persoalan Arab, maka Iran akan terisolasi. Jika perdebatan yang ada adalah sebuah perdebatan Islam, maka Iran akan memimpin perdebatan itu dengan misi untuk melindungi Iran dan revolusi Iran, yang menjadi alasan bagi mereka untuk terus berusaha menentang proses perdamaian.”[1223]

Pandangan yang lebih moderat di Teheran menentang dengan keras pendekatan ini karena mereka memprediksi banyak kesulitan yang akan mempengaruhi diplomasi nuklir Iran. Mereka lebih menyukai strategi Khatami yang menyuarakan penderitaan rakyat Palestina dan keengganan Israel untuk membuat kesepakatan teritorial, tetapi tetap menghindari isu-isu sensitif seperti hak negara Israel untuk berdiri atau Holocaust. Mereka berpandangan bahwa pendekatan seperti itu justru akan menjadi bumerang bagi Iran dan membuat negara-negara kuat seperti Rusia dan China menentang Iran. Sebagian dari perdebatan ini dimuat dalam media cetak Iran, *Sharq*, sebuah surat kabar harian berhaluan reformis yang kemudian dibredel oleh Ahmadinejad karena sikap kritis media ini kepada Ahmadinejad terlalu terbuka—media ini menulis sebuah editorial kontroversial yang mengecam bantahan presiden Iran terhadap peristiwa Holocaust. Editorial tersebut memiliki dua argumentasi utama—Holocaust bukan urusan Iran; dan alih-alih membuat

1223

musuh Teheran kembali ke meja perundingan, pernyataan Ahmadinejad ini hanya akan memberikan dampak yang lebih buruk bagi Iran.[1224]

Apa yang terlewatkan secara mencolok dari perdebatan internal di Teheran adalah motivasi dan faktor ideologis yang secara terbuka digunakan Iran untuk menjustifikasi posisinya terhadap Israel. Perdebatan ini bukan tidak didasarkan pada kehormatan Islam ataupun penderitaan rakyat Palestina. Sebaliknya, perdebatan kedua belah pihak itu sepenuhnya didasarkan para pertimbangan strategis. Kedua belah pihak mendorong Iran agar melakukan inisiatif konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel untuk menghindari nasib buruk seperti Irak, yang sejak 1991 hingga 2003 masih dikuasai pasukan invasi Washington. Meskipun rezim Iran tidak mencapai sebuah konsensus tentang bagaimana cara untuk mengatasi persoalan ini, seluruh pejabat Iran mendapatkan larangan dari Ayatollah Khamenei untuk mengulangi perdebatan tentang Holocaust—situasi yang membuat Ahmadinejad frustasi.

Larangan ini masih berlaku. Ketika Ahmadinejad mengunjungi New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB pada September 2006, seorang jurnalis Barat menantang dirinya mengenai persoalan Holocaust. Tetapi alih-alih mengulangi pandangan awalnya, Ahmadinejad mengalihkan pertanyaan itu ke topik yang berbeda: Apakah Palestina harus menebus kesalahan Nazi Jerman, dan mengapa membicarakan Holocaust merupakan sebuah tindakan kriminal di beberapa negara Eropa? "Jika Holocaust memang terjadi, dimana tempatnya?" Ahmadinejad bertanya kepada Anderson Cooper dari *CNN*. "Pertanyaan "dimana" merupakan pertanyaan utama. Dan lokasinya bukan di Palestina. Lalu, mengapa peristiwa Holocaust ini menjadi alasan bagi pendudukan wilayah rakyat Palestina?" Dia kemudian menyerukan agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini karena Ahmadinejad berusaha menghindar untuk mengakui kebenaran peristiwa Holocaust atau mengulangi pernyataan awalnya tentang Holocaust sebagai sebuah mitos.[1225] Tetapi bahkan tanpa mengulangi pernyataan sebelumnya itu, Ahmadinejad menunjukkan bahwa dia dengan mudah dapat mengalahkan rivalnya dari kelompok moderat di Teheran dengan membuat marah publik Barat.

Nuklir Ayatollah?

Kebuntuan program nuklir Iran juga harus dibahas dalam konteks ini. Sama halnya dengan permusuhan Israel-Iran yang tidak didorong oleh perbedaan ideologis antara dua negara, permusuhan ini juga tidak disebabkan semata-mata oleh persepsi ancaman yang muncul di Israel karena aktifitas nuklir Iran. Tentu saja Israel memiliki kekhawatiran yang wajar mengenai rencana nuklir Iran, tetapi kekhawatiran ini tidak bisa menjelaskan mengapa hubungan Israel dengan Iran memburuk pada 1992—tiga tahun setelah Israel mengetahui bahwa Iran telah memulai kembali program nuklirnya—atau mengapa kekhawatiran ini untuk sementara hilang ketika Netanyahu berusaha mendekati Iran. "Israel tidak benar-benar memberikan perhatian pada [program nuklir Iran] hingga proses perdamaian," Keith Weissman dari AIPAC menjelaskan.[1226] Pada waktu itu, program nuklir ini masih dalam tahap awal. Iran tidak memiliki bahan uranium dan tidak memiliki banyak

1224

1225

1226

pengetahuan untuk mengembangkan senjata nuklir—dan sekarang kondisinya masih sama.

Merujuk pada laporan komprehensif dari intelijen Amerika, pada 2005 Iran hanya membutuhkan satu dekade lagi untuk memproduksi bahan utama senjata nuklir.[1227] Lebih dari itu, menurut para pemegang kebijakan di Israel, Partai Buruh telah melebih-lebihkan ancaman Iran karena pertimbangan politik. Meskipun ancaman itu ada, Perdana Menteri Yitzhak Rabin terlalu berlebihan dengan menawarkan formula *land-for-peace* (tanah untuk perdamaian) kepada publik Israel, demikian penjelasan dari mantan penasihat Rabin.[1228] Akibatnya, perilaku Israel tidak sesuai dengan pandangan bahwa Israel sedang menghadapi ancaman eksistensial dari Iran. Jika ini terjadi, sebagian pihak akan berharap Israel berusaha mengoptimalkan semua cara untuk menetralisir ancaman tersebut, termasuk dialog Amerika-Iran. Sebaliknya, Israel bekerja dengan keras untuk mencegah terjadinya dialog Amerika-Iran.

Shah memulai program nuklir Iran pada 1970-an. Iran memproduksi minyak lebih banyak yang dihasilkannya hari ini, dan konsumsi domestik Iran terhadap minyak lebih rendah dibandingkan saat itu. Tetapi Presiden Gerald Ford menawari Iran sebuah kesempatan untuk membeli peralatan untuk menghasilkan plutonium dari bahan bahan bakar reaktor nuklir. Dengan tawaran ini, Iran akan menguasai siklus produksi bahan bakar nuklir, yang juga memungkinkannya mampu menghasilkan bahan untuk bom nuklir. Tetapi Washington ingin melangkah lebih jauh lagi. Pada 1975, Sekretaris Negara Henry Kissinger melakukan serangkaian strategi negosiasi untuk menjual peralatan energi nuklir kepada Iran untuk meningkatkan pendapatan bisnis Amerika lebih dari 6 milyar dolar. Dick Cheney, Paul Wolfowitz, dan Donald Rumsfeld memegang pos-pos keamanan nasional dalam pemerintahan Ford. Lebih dari dua puluh lima tahun kemudian, orang yang sama ini berada di garis terdepan dalam kampanye untuk menolak akses Iran terhadap teknologi yang sama—mereka beralasan bahwa sebuah negara dengan kekayaan minyak seperti Iran akan mengembangkan teknologi hanya untuk tujuan-tujuan militer saja.[1229]

Meskipun masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk memiliki kemampuan dan bahan-bahan untuk memproduksi sebuah bom nuklir, kebuntuan ini telah mencapai titik kritis dari usaha Iran untuk menguasai pengayaan uranium. Menurut Israel, ketika Iran belajar bagaimana mengembangkan uranium dalam kuantitas yang besar dan dalam derajat yang tinggi, mereka akan melewati sebuah "titik yang tidak ada jalan kembali." Iran akan menguasai pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan, sehingga tidak mungkin menghentikan Teheran dari program nuklir ini. Tetapi ada banyak persoalan dengan analisis ini. *Pertama,* Teheran—tidak seperti Israel—telah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi (*Non-Proliferation Treaty [NPT])*, dan mayoritas pihak yang menyepakati perjanjian itu percaya bahwa Iran berhak atas pengayaan uranium berdasarkan Pasal IV dari NPT, yang menjamin semua negara "memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan-tujuan perdamaian tanpa pengecualian." Melepaskan hak ini dari Iran akan merubah ketentuan perjanjian ini, yang sebagian pihak yang tidak memiliki teknologi nuklir, menolak melakukannya kecuali negara-negara yang memiliki nuklir menjaga komitmen mereka

1227

1228

1229

dalam Pasal VI dari perjanjian tersebut dan mulai membongkar gudang senjata nuklir mereka.[1230] Konsep "titik tanpa jalan kembali" (*point of no return*) adalah tidak benar, dan beberapa opini di Amerika dan Israel yang menggunakan konsep ini untuk mendorong adanya solusi cepat merupakan kekeliruan," Jon Wolfsthal, mantan pejabat senior Departemen Energi, berkomentar. "Konsep ini merupakan istilah yang dibuat pihak yang menginginkan tindakan segera."[1231]

Respon cepat merupakan sesuatu yang sudah lama diserukan Israel. "Setiap hari berlalu membuat Iran lebih mampu untuk membuat sebuah bom," Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni mengatakannya pada musim gugur 2006. "Dunia tidak bisa mengizinkan sebuah nuklir Iran."[1232] Kelompok lobi pro-Israel di Washington mengambil sikap yang lebih agresif dibandingkan pemerintahan Israel sendiri. "Kesamaan iklim geopolitik pada 5 Maret 1933 dengan apa yang terjadi pada 5 Maret 2006 menjadi perhatian besar dalam kesamaannya; dan mengerikan dalam implikasinya," Direktur Eksekutif AIPAC Howard Kohr berbicara di hadapan lima ribu pendukung AIPAC dalam sebuah jamuan tahunan di Washington pada Maret 2006. Sebelum Kohr menyampaikan pidatonya, para pendengar dipertontonkan serangkaian video yang membandingkan kebangkitan kekuatan Adolf Hitler dengan kekuasaan Ahmadinejad sebagai presiden Iran.[1233] Israel telah memberikan tekanan yang besar pada pemerintahan Bush untuk bertindak. Mereka memainkan peran penting dalam meyakinkan Washington untuk mengadpsi sebuah kebijakan *zero-enrichment*, yang berarti bahwa Iran harus dihalangi sepenuhnya dari teknologi pengayaan (*enrichment*) apapun. Bahkan, Israel menegaskan bahwa, sebuah program berskala kecil tidak akan dapat diterima, karena Iran akan terus mempelajari bagaimana menguasai teknologi dalam sebuah program. Ketika pemerintahan Bush menunjukkan isyarat untuk berkompromi, maka Israel akan membunyikan alarm peringatan.

Misalnya, ketika pemerintahan Bush menunjukkan dukungan pada sebuah proposal yang akan mengizinkan Iran untuk melanjutkan pengembangan nuklirnya sepanjang proses pengayaan berlangsung di Rusia, AIPAC menentang keras pemerintahan Bush.[1234] Dalam sebuah pembicaraan di Capitoll Hill, seorang diplomat senior Israel mendapatkan pertanyaan tentang rezim seperti apa yang akan membuat Israel merasa nyaman dengan program nuklir dari warga sipil Iran. Tanpa keraguan sedikitpun diplomat itu menjawab,"Tidak ada." Sebaliknya, dia menjelaskan, satu-satunya jaminan yang dapat diterima Israel adalah "pelemahan fondasi industri Iran." Jika Amerika Serikat tidak mengambil langkah cepat terhadap Iran, diplomat Israel itu melanjutkan, Negara Yahudi "mungkin saja melakukannya sendirian," sebuah isyarat bahwa Israel bisa saja menghancurkan fasilitas nuklir Iran oleh dirinya sendiri.

Kemungkinan serangan Israel terhadap instalasi nuklir Iran menimbulkan kecemasan yang luar biasa di Gedung Putih, karena Amerika Serikat secara otomatis akan disalahkan atas tindakan seperti itu—terlepas dari apakah Presiden Bush sudah memberikan lampu hijau kepada Israel atau tidak. Dan karena Israel sendiri tidak memiliki kemampuan militer untuk menghancurkan program nuklir Iran melalui serangan udara,

1230

1231

1232

1233

1234

maka ancaman dari Tel Aviv kemungkinan besar ditujukan untuk menekan Washington bukan untuk memoderasi posisinya, dengan memperingatkan Washington tentang akibat dari serangan Israel terhadap Iran; sebuah eskalasi kekerasan besar-besaran di regional yang akan memberikan bahaya besar bagi keamanan Amerika Serikat dan membuat posisi Washington di Irak semakin rentan. Suka atau tidak suka, Washington akan terperangkap pada kekacauan selanjutnya.

Ironisnya, Teheran mungkin saja tidak mengembangkan sebuah senjata nuklir, tetapi sebuah kemampuan untuk bisa menggunakan senjata nuklir ketika negaranya menghadapi sebuah ancaman mendesak. (Bagi Iran sendiri, memiliki kemampuan seperti itu masih dianggap sebagai masalah besar oleh kekuatan-kekuatan Barat). Direktur Eksekutif *International Etomic Energy Agency* (IAEA), Mohamed ElBaradei berpandangan bahwa Iran memutuskan untuk memiliki kemampuan pengembangan senjata nuklir tanpa harus melakukannya. ElBaradei mengatakan bahwa Iran tahu bahwa menguasai pengayaan uranium merupakan "sebuah langkah antisipatif (*deterrent*)" dan bahwa "mereka tidak perlu sebuah senjata; [pengayaan] (ditujukan untuk, *pen.*) mengirim sebuah pesan." Direktur IAEA ini menyampaikan pandangannya dalam acara *News Hour with Jim Lehrer* tanggal 18 Maret 2004: "Baiklah, yang saya maksud adalah jika Anda bisa memproduksi uranium, maka Anda benar-benar sedang mengirimkan sebuah pesan bahwa kami tahu bagaimana melakukannya, apakah kami harus membuat senjata itu. Kami tidak perlu mengembangkan sebuah senjata, tetapi saya sampaikan pada Anda—Anda tahu, dunia [tahu], tetangga saya [tahu], bahwa saya bisa melakukannya."[1235]

Iran sadar betul bahwa keputusan untuk mengembangkan senjata nuklir mungkin saja akan melemahkan posisi strategis Iran—bukan memperkuatnya. Selama wilayah Timur Tengah dijaga sebebas mungkin dari penggunaan senjata nuklir, Iran akan menikmati sebuah superioritas konvensional *via a vis* tetangga-tetangganya karena kapasitas dan sumber daya Iran. Tetapi, jika Iran melakukan pengembangan senjata, hal ini akan menimbulkan kompetisi senjata nuklir yang bisa saja memicu negara-negara kecil seperti Bahrain dan Kuwait untuk memiliki kemampuan nuklir juga. Dalam situasi Timur Tengah seperti itu, Iran akan kehilangan superioritas konvensionalnya dan memiliki kesamaan dengan negara-negara yang kapasitasnya jauh dari Iran. Inilah yang menyebabkan mengapa Iran bergabung dengan negara padat penduduk—Mesir—untuk menjaga agar Timur Tengah tetap menjadi zona-bebas-nuklir seperti tahun 1970-an. Sebagai sebuah negara yang luas, Iran dan Mesir akan menjadi negara yang paling sedikit mendapatkan keuntungan dan paling banyak mendapatkan kerugian dengan adanya senjata nuklir. Sebagai sebuah negara kecil, Israel akan menjadi negara yang paling banyak diuntungkan. (Ketidaksetujuan Israel dengan analisis dan asumsi ini adalah bahwa Iran akan berusaha untuk mengembangkan senjara nuklir apapun yang terjadi.)[1236]

Lebih jauh lagi, Teheran percaya bahwa dirinya memliki kemampuan antisipasi yang efektif untuk menghadapi hampir seluruh negara di Timur Tengah, termasuk Israel, dan Iran tidak akan membutuhkan senjata nuklir untuk mencegah Israel agar tidak menyerang Iran. "Dari perspektif pemerintah, senjata pemusnah massal tidak akan menjadi alat pencegahan (*deterrance*) terhadap Israel. Kami memiliki alat-pencegahan lainnya yang bekerja lebih baik," Javad Zarif Duta Besar Iran untuk PBB memberi isyarat atas

1235

1236

kemampuan asimetris Iran di Lebanon.[1237] (Efektifitas alat-pencegahan ini dipertunjukkan selama perang Israel-Hezbollah pada musim panas 2006.) Amerika Serikat adalah satu-satunya ancaman yang tidak dapat diantisipasi secara efektif oleh Iran (meskipun Iran memiliki alat-pencegahan parsial dengan pengaruh Iran atas milisi Syiah di Irak, yang mampu memberikan serangan terhadap aksi pendudukan pasukan Amerika yang gagal di sana). Tetapi jika hubungan dengan Amerika Serikat dapat diperbaiki, maka Iran juga bisa kehilangan salah satu alasan utama pengembangan senjata nuklir.

Teheran yang dapat Diatasi?

Ketakutan Israel atas program nuklir Iran dapat dimengerti, meskipun Israel tidak percaya bahwa Iran akan menggunakan senjata penghancur itu untuk menyerang Israel.[1238] Situasi yang akan menyebabkan kehancuran Iran adalah; warga sipil Iran dan para pemimpin militer yang sangat sadar terhadap dua ribu senjata nuklir di gudang senjata Israel dan kemampuan Israel untuk melakukan serangan-kedua melalui tiga kapal selam Dophin yang dipersenjatai teknologi nuklir. Bertentangan dengan persepsi Iran sebagai "mullah yang gila" (*mad mullah*), sebagian besar para pemikir strategis di Israel mengakui bahwa pemerintahan Iran merupakan pemerintahan yang ekstrem dan radikal—tetapi tetap rasional.

Kenyatannya, Iran merupakan musuh yang lebih berbahaya bagi Israel persis karena Iran itu tidak rasional dan ceroboh. Iran telah bersikap lebih bijak dan waspada dibandingkan musuh-musuh tradisional Israel lainnya. Sementara Saddam merupakan orang yang ceroboh dan petualang, dan melakukan kesalahan strategis dengan menyerang Iran pada 1980-an lalu Kuwait pada 1990. Teheran telah bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang sama sekali berbeda. Bahkan dalam masa-masa paling ideologis dalam revolusi Iran, Iran tidak pernah bertindak ceroboh dan relatif sensitif terhadap potensi kerugian-kerugiannya.[1239] "Orang-orang di sini menghormati Iran dan rezim yang berkuasa di Iran. Mereka memperlakukan Iran sangat serius, dengan mempertimbangkan berbagai pihak," Ehud Yaari, mantan jurnalis televisi Israel, berkomentar.[1240] Efraim Halevi, mantan bos Mossad, memiliki pendapat yang sama. "Saya tidak sependapat bahwa mereka itu tidak rasional, menurut saya mereka sangat rasional. Menilai mereka sebagai negara yang tidak rasional merupakan pandangan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hal itu membuat Anda lari dari kenyataan," dia berkomentar.[1241] Menurut Reuven Pedatzur, direktur *Galili Center for Strategy and National Security* dan seorang pilot petarung dalam pasukan *Israeli Air Forces*, sepanjang pihak lain bersikap rasional, kemampuan antisipatif Israel terhadap ancaman nuklir Iran memiliki peluang kesuksesan yang besar persis karena Iran akan paham terhadap resiko ketika menyerang Israel.[1242]

Rasionalitas Iran ini mungkin juga menjadi alasan mengapa hingga saat ini Iran tidak membagi senjata biologi atau senjata kimianya dengan kelompok *proxy* Arab manapun seperti Hezbollah, dan mengapa Iran mungkin tidak akan membagi senjata

1237
1238
1239
1240
1241
1242

nuklirnya dengan kelompok-kelompok teroris. Israel sudah mengisyaratkan bahwa mereka akan membalas setiap serangan nuklir terhadap Israel dengan menyerang Iran—terlepas dari pihak manapun yang menyerang Israel. Teheran paham betul arti dari isyarat tersebut—jika kelompok *proxy* Iran menyerang Israel dengan hulu ledak nuklir, maka Israel akan menghancurkan Iran. Tetapi bahkan tanpa peringatan keras ini, Iran tidak mungkin membagi senjata nuklirnya dengan kelompok-kelompok *proxy*-nya persis karena kelompok-kelompok tersebut akan berhenti menjadi *proxy* Iran jika mereka memiliki akses terhadap senjata berkekuatan tinggi seperti itu. Ambisi Iran adalah menjadi kekuatan tak terkalahkan di Timur Tengah, yang membuatnya cenderung untuk memandang pihak lain sebagai pesaing potensial. Iran hampir tidak mungkin akan membuat tujuannya terganggu dengan membagi teknologi sensitif ini. Dengan berkaca pada perilaku Teheran pada masa lalu, kepemimpinan Iran terlalu Machiavellian untuk melakukan sebuah kesalahan yang fatal dan luar biasa itu (membagi senjata nuklir ke pihak lain, *pen.*)

Pandangan minoritas di Israel, yang disebut sebagai pandangan Beginist, disuarakan oleh orang-orang seperti Wakil Menteri Pertahanan Ephraim Sneh, anggota Knesset Uzi Landau, dan Jenderal Ami Gilad. Mereka berpandangan bahwa doktrin Menachem Begin—yang menghancurkan fasilitas nuklir Iran dengan mengebom Osirak pada 1981—harus menjadi panduan bagi Israel ketika menghadapi Iran. Negara-negara di Timur Tengah cenderung tidak rasional dan mengalami depresi—menurut pandangan kelompok ini—dan, akibatnya, tidak ada opsi pencegahan yang bisa dipilih.[1243] Israel tidak bisa mengambil resiko dengan musuh-musuh seperti itu. Satu-satunya taktik pertahanan adalah dengan memastikan bahwa negara-negara ini tidak mendapatkan akses terhadap teknologi nuklir dengan menghancurkan terlebih dahulu fasilitas nuklir mereka.

Pembelaan terhadap pandangan ini seringkali merujuk pada sebuah pernyataan Rafsanjani pada awal 2002, ketika dia berbicara tentang bagaimana Israel dengan wilayah yang lebih kecil akan membuatnya semakin rentan mendapatkan serangan nuklir, sebuah isyarat—kelompok Beginist mengatakan—bahwa Iran percaya bahwa mereka bisa memenangkan perang nuklir dengan Israel. (Rafsanjani kemudian menuduh Israel telah mendistorsi pernyataannya.)[1244] Selama dua puluh tujuh tahun terakhir, Republik Islam nampak berhasil menggagalkan setiap peluang untuk menghancurkan dirinya. Kenyataannya, para mullah di Teheran mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Dengan banyaknya persoalan internal dalam pemerintahan Iran dan ketidakpopuleran mereka di dalam dan luar negeri, sulit sekali untuk memahami bagaimana para mullah ini mampu mencapai keberhasilan ini jika mereka tidak berpandangan rasional.

Meskipun begitu, tidak mengherankan jika banyak kalangan di Israel yang berkesimpulan bahwa Teheran tidak rasional karena apa yang para mullah inginkan agar musuh-musuh Iran mempercayainya. Tetapi di belakang perilaku mereka yang seringkali kontradiktif, tersimpan sebuah kebijakan yang telah diperhitungkan secara hati-hati. Iran menggunakan kontradiksi ini untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingannya dan membuatnya nampak tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. Perilaku itu dikenal sebagai "irrasionalitas palsu".[1245] "Kita tidak boleh menjadi sesuatu yang bisa diukur dan diprediksi oleh mereka [musuh-musuh Iran]," Amir Mohebian, seorang ahli strategi

1243

1244

1245

konservatif yang berpengaruh, menjelaskan. “Amerika Serikat tidak bisa berurusan dengan Imam [Khomeini] karena dia tidak bisa diprediksi. Kejatuhan Saddam disebabkan karena dia bisa diprediksi; Amerika tahu bahkan jika Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, dia tidak akan berani menggunakannya.”[1246]

Pola pikir seperti ini tidak hanya terbatas di kalangan kelompok konservatif di Iran. Menurut seorang penasihat di *Iranian National Security Advisor*, pandangan ini berakar dari pengalaman Iran selama abad kesembilan belas dan abad keduapuluh, ketika keterbukaan negeri ini memungkinkan kekuatan-kekuatan asing memanipulasi keterbukaan ini untuk mengeksploitasi sumber daya alam Iran dan membuatnya tergantung pada Barat. Pemerintahan Iran percaya bahwa “Anda harus mempertahankan sebuah jarak tertentu dengan pihak asing,” penasihat tersebut menjelaskan. “Anda tidak boleh membiarkan mereka memahami bagaimana Anda menjalankan urusan Anda. Dan itulah mengapa saya berpikir ada sebuah tujuan di luar sana untuk membuat bingung. Itulah mengapa mereka membiarkan begitu banyak kebijakan kontradiktif diambil oleh berbagai lembaga yang berbeda. Hal ini tidak apa-apa. Inilah harga yang harus dibayar untuk keamanan Iran karena kami tahu apa yang sedang kami lakukan.”[1247] Iran mungkin saja berhasil mengelabui banyak pihak di Israel dengan strategi ini, tetapi strategi ini juga menimbulkan ketidakpercayaan antara Iran dengan dunia luar sehingga menimbulkan kesulitan untuk menemukan solusi bagi persoalan Iran dengan Amerika Serikat dan komunitas internasional.

Rasional atau tidak, destruktif atau tidak, atau bahkan jika Iran berniat menyerang Israel atau tidak, Iran dengan program nuklirnya tetap akan menjadi masalah bagi Israel karena dampaknya pada manuver strategis Israel. *Pertama*, Iran yang tidak memiliki senjata nuklir—tetapi memiliki kemampuan untuk memproduksinya—akan secara signifikan mengganggu kemampuan Israel untuk menghadang militan Palestina dan organisasi-organisasi di Lebanon. Situasi ini akan merusak citra Israel sebagai satu-satunya negara bersenjata-nuklir di Timur Tengah dan menghapuskan mitos Israel sebagai kekuatan yang terkalahkan. Citra Israel adalah sebagai “penjaga stabilitas perdamaian paling kuat”. Inilah alat-pencegahan (*deterrence*) kami,” Gilad berbicara pada saya. Strategi pencegahan Iran yang seperti ini akan mengancam supremasi militer Israel dan menghalangi Israel untuk mendikte parameter perdamaian dan untuk merumuskan rencana perdamaian sepihak (*unilateral*). “Kami tidak bisa menerima bom nuklir berada di tangan musuh kami. Mereka tidak perlu menggunakannya; fakta bahwa mereka memilikinya sudah cukup,” Sneh berkomentar. Iran dengan teknologi nuklirnya dapat memaksa Israel untuk melakukan kompromi wilayah dengan negara tetangganya untuk menghilangkan titik-titik permusuhan Teheran yang bisa mereka gunakan untuk melawan Negara Yahudi. Israel tidak akan bisa menghadapi rivalitas nuklir dengan Iran dan tetap melanjutkan perselisihan teritorial dengan tetangga Arab dalam waktu yang bersamaan. *Kedua*, kekuatan dan kemampuan-pencegahan (*deterrence*) Iran akan diperoleh dengan menguasai siklus bahan bakar yang dapat memaksa Washington untuk memutuskan kerjasama dengan Teheran sehingga Iran akan diakui sebagai kekuatan regional dan mendapatkan signifikansi strategis di Timur Tengah dengan mengorbankan Israel.

1246

1247

Pilihan Washington: Antara sebuah Batu dan sebuah Tempat Sulit

Ketika Amerika berhadapan dengan Iran dan rivalitas Israel dengan Iran, sebuah pandangan menyatakan bahwa Washington tidak memiliki pilihan yang baik. Tetapi beberapa pilihan itu lebih buruk dibandingkan pilihan lainnya. Beberapa pilihan ini didasarkan pada teori-teori yang canggih tetapi tidak memiliki kaitan dengan realitas, sama halnya dengan desakan Israel untuk tetap setia pada doktrin periperial pada 1980-an bahkan setelah Khomeini berhasil merebut kekuasaan di Iran. Pandangan-dunia Israel lebih didasarkan pada asumsi-asumsi sederhana tentang cara kerja dalam hubungan internasional yang gagal memperhitungkan kepentingan Iran yang kontradiktif. Di satu sisi, Israel percaya bahwa keretakan hubungan Israel-Arab terjadi sangat dalam sehingga tidak ada perdamaian sejati yang mampu dicapai dengan negara Arab (terlepas dari perjanjian Israel dengan Mesir di Camp David I); di sisi lain, Israel menganggap bahwa Iran berpikiran sama dengan apa yang dipikirkan Israel. Israel berasumsi bahwa Iran akan tetap bermusuhan dengan tetangga Arabnya karena perselisihan Arab-Persia—rivalitas Arab-Persia ini membuat Iran menjadi sekutu abadi dan alami bagi Israel terlepas dari harapan-harapan para penguasa Teheran. Berbagai kenyataan geostrategis ini akan membuat Teheran tidak punya lagi pilihan lain.[1248] Berdasarkan asumsi-asumsi ini, ada anggapan yang tercipta tentang bagaimana *seharusnya* Iran harus berperilaku. Ketika perilaku Iran tidak sesuai dengan anggapan ini, maka kebenaran asumsi yang mendasarinya tidak dipertanyakan. Sebaliknya, jika perilaku Iran dianggap tidak rasional dan bersifat sementara, cepat atau lambat Iran akan menyadarinya.

Pandangan "lari-dari-kenyataan" ini telah membentuk pendekatan pemerintahan Bush terkait Timur Tengah sejak peristiwa 11 September. Sebuah fantasi yang telah menghabiskan energi dan harapan pemerintahan Bush adalah perubahan rezim di Iran, yang didasarkan pada asumsi bahwa dengan perubahan rezim di Teheran, maka persoalan antara Amerika dengan Iran, sebagaimana Israel dengan Iran, akan secara otomatis terselesaikan. "Ketika rezim Islam berhasil dijatuhkan, maka hubungan Israel dan Iran akan berubahn 180 derajat," Sneh menjelaskan.[1249] Dengan mempertimbangkan kedekatan hubungan antara Israel dan Shah, mudah sekali untuk sampai pada kesimpulan yang meragukan ini. Tetapi ada banyak ketidaksetujuan di Israel mengenai hal ini. Beberapa direktur legendaris di Radio Israel Persia, seperti Menashe Amir, melihat bahwa semangat keagamaan dari para pemimpin Iran sebagai sebab satu-satunya akar dari permusuhan ini. "Hari ini, Iran menentang Israel atas pertimbangan agama," dia berbicara pada saya di kantornya di Yerusalem, yang didekorasi dengan artefak dan lukisan Iran. "Rezim Iran di masa depan tidak akan menghadapi masalah itu."[1250]

Pihak lainnya berpandangan bahwa perubahan pemimpin atau rezim di Teheran tidak akan berpengaruh pada program nuklir Iran. Sebuah pemerintahan sekuler dan demokratis di Teheran mungkin saja lebih tertarik untuk memproduksi bom nuklir—juru bicara Ariel Sharon, Ranaan Gissin, menegaskan—atau, paling tidak, mereka akan berada di bawah tekanan rakyatnya untuk melanjutkan program itu dengan kecepatan yang sama.[1251] Israel "tidak bisa percaya bahwa reformasi di Iran akan menghilangkan ancaman

1248

1249

1250

1251

strategis Iran bagi Israel," Uzi Arad, mantan direktur intelijen Mossad dan saat ini menjadi guru besar di Pusat Interdisipliner di Herzliya.[1252] Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Iran yang demokratis akan lebih stabil atau lebih radikal dibandingkan dengan rezim yang sedang berkuasa. "Jika perubahan rezim adalah sesuatu yang mungkin, maka ancamannya ada pada perubahan itu sendiri. Perubahan ini akan membuat situasi tidak stabil dan terus berlanjut hingga menjadi rezim yang juga tidak stabil," Jenderal Israel Amnon Lipkin-Shahak menjelaskan. Sebagaimana rezim Shah yang digantikan dengan pemerintahan radikal, sebuah pemerintahan demokratis yang lemah di Iran akan mengalami nasib yang sama.[1253] Sementara itu Gilad menganggap semua pembicaraan ini tidak berguna dan terlalu akademis, karena, dalam pandangannya, rezim di Iran tidak mungkin jatuh. "Saya membantah setiap kemungkinan perubahan rezim di Iran," dia menegaskan.[1254] Sama problematiknya dengan ayatollah, karakter dari rezim mullah bukanlah akar dari permusuhan Iran dengan Israel dan Amerika. Perubahan geopolitiklah yang memicu rivalitas Israel dengan Iran pasca berakhirnya Perang Dingin, bukan ideologi atau karakter kepemimpinan di Iran. Sebagaimana Revolusi Islam tidak mengakhiri pencarian supremasi Iran (kenyataannya, revolusi ini awalnya justru semakin mengintensifkan pencarian supremasi ini), ada sebagian pihak yang berpandangan bahwa sebuah negara Iran yang sekular akan tidak terlalu tertarik untuk mencari posisi unggul dan lebih rentan untuk menerima sebuah peran yang penakut dalam urusan-urusan regional.

Kegagalan Kebijakan *Containment*—Perang Lebanon 2006

Kebijakan lainnya yang gagal adalah kebijakan *containment*—sebuah pandangan yang menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi konflik adalah dengan membendung dan melemahkan Iran. Kebijakan ini tidak hanya gagal, tetapi juga menjadi bumerang dan membuat situasi lebih buruk dengan membuat Iran lebih kuat—dan semakin marah. Percobaan terakhir untuk melemahkan Iran—perang musim panas pada 2006 di Lebanon—menjadi contoh dari kegagalan ini. Meskipun Israel tidak mengharapkan serangan 12 Juli di wilayah perbatasan yang dilakukan Hezbollah dan penculikan tentaranya, Negara Yahudi sudah merencanakan dan mempersiapkan perang dengan Hezbollah selama lebih dua tahun. Pada 2005 seorang perwira senior militer Israel mulai memberikan dokumen presentasi rahasia kepada diplomat-diplomat Amerika, jurnalis, dan beberapa lembaga *think thank*, yang menjelaskan detail operasi. "Dari seluruh perang Israel sejak 1948, perang ini merupakan perang yang paling disiapkan Israel," Professor Geral Steinberg dari Universitas Bar Ilan menjelaskan.[1255] Awalnya, segala sesuatu berjalan seperti yang sudah direncanakan. Ketika Washington merestui dan mendukung perang Israel ini—Sekretaris Negara Condoleeza Rice menilai pertempuran ini sebagai "kelahiran yang pedih dari Timur Tengah yang baru"—Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Dan Halutz, dan sejumlah pejabat berkumpul ratusan meter di bawah tanah di sebuah bunker milik Angkatan Udara Israel di Tel Aviv untuk memantau perkembangan. Pada akhir malam 12 Juli, laporan pertama datang. Lima puluh empat peluncur rudal berhasil dihancurkan jet tempur Israel, yang kemudian kembali ke pangkalan udaran. Dengan lega,

1252

1253

1254

1255

Halutz menelpon Perdana Menteri Ehud Olmert di rumahnya di Yerusalem. “Semua roket jarak-jauh sudah hancur,” Halutz dengan bangga memberitahu. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Setelah berhenti beberapa saat, dia menambahkan,“Kita telah memenangkan peperangan.”[1256]

Sementara itu, ketika kelompok neo-konservatif di Washington mendesak pemerintahan Bush untuk tidak hanya mendukung tetapi juga bergabung dalam peperangan, para pemegang kebijakan di Teheran ketakutan. Baik Hezbollah maupun Iran terkejut dengan respon Israel terhadap serangan itu, “Kami mengharapkan respon Israel terhadap penyanderaan atas dua prajurit adalah sekedar tembakan selama satu sampai dua hari atau beberapa serangan yang terbatas pada lokasi-lokasi tertentu,” wakil sekretaris jenderal Hezbollah, Sheikh Naim Kassem, di kemudian hari berbicara pada para wartawan.[1257] Pihak intelijen Iran telah memperingatkan pemimpin politik Teheran bahwa Israel berencana untuk menyerang Lebanon, pada Oktober 2006, tetapi mereka tidak punya indikasi bahwa skala peperangan akan sebesar ini atau bahwa perang ini akan dimulai sejak bulan Juli.[1258] “Perang ini merupakan hadiah Tuhan kepada Israel. Hezbollah telah memberikan mereka [Israel] peluang emas untuk menyerang.” Nasser Hadian, seorang ahli strategi berhaluan reformis, berkomentar.[1259]

Iran khawatir karena Washington dan Israel sedang membukan jalan untuk sebuah konfrontasi militer dengan Iran dengan pertama-tama menyerang Hezbollah—garis pertahanan pertama Iran. Teheran khawatir bahwa situasi ini lebih dari sekedar perang *proxy*. Situasi ini merupakan sebuah pertarungan terakhir. Berbagai pakar di Amerika Serikat berspekulasi bahwa Iran telah memicu konflik untuk mengalihkan perhatian dari kebuntuan program nuklir Iran, tetapi persepsi yang berkembang di Teheran adalah bahwa “salah satu kartu Iran sudah disia-siakan begitu saja” oleh kebodohan Hezbollah dengan menyerang Israel. Kebijakan konvensional di Teheran mengatakan bahwa sebuah konfrontasi langsung antara militan Lebanon dengan pasukan Israel mungkin akan merugikan Hezbollah.[1260] “Israel dan Amerika Serikat tahu bahwa selama Hamas dan Hezbollah masih ada, konfrontasi dengan Iran akan membutuhkan biaya besar,” Mohsen Rezai, Sekretaris Dewan Kebijaksanaan Iran, berbicara pada surat kabar Iran, *Baztab*. “Maka, untuk berurusan dengan Iran, pertama kali mereka ingin menghilangkan kekuatan yang dekat dengan Iran yang ada di Lebanon dan Palestina.”[1261] Pada titik ini, Israel dan Iran nampak tidak akan mencapai kata sepakat. Selama beberapa tahun, Israel merasa khawatir terhadap pengembangan militer Hezbollah; dengan sebaran ribuan rudal dan roketnya, kelompok gerilya Syiah ini bisa menghantam sebagian besar wilayah utara Israel. Melalui Hezbollah, Iran mendapatkan kemampuan pencegahan dan pengaruh yang tidak dapat diterima oleh Israel. Dalam pandangan Israel, pertempuran di Lebanon tidak hanya tentang Hezbollah, tetapi juga tentang Iran. “Sampai pada taraf tertentu, salah satu tujuan dari perang ini adalah untuk memastikan di Teheran, ketika mereka melihat foto-foto di

1256

1257

1258

1259

1260

1261

Beirut, mereka juga berpikir tentang Teheran," Steinberg berbicara pada Dewan hubungan internasional dalam sebuah wawancara.[1262]

Namun, baik harapan Israel dan kekhawatiran Iran, keduanya menjadi kenyataan. Setelah beberapa kemenangan di awal, Israel dikejutkan oleh respon meyakinkan dari Hezbollah, termasuk penembakan Hezbollah terhadap roket-roket Katyusha di wilayah utara Israel. Israel segera sadar bahwa mereka tidak sedang menghadapi sebuah milisi amatir, tetapi mereka sedang bertarung dengan pasukan gerilya yang terlatih dan memiliki persenjataan lengkap. Hezbullah bahkan menggunakan sebuah rudal C-870 buatan China untuk menyerang kapal perang Israel di garis pantai Lebanon, sehingga berhasil menangkap pasukan penjaga Israel dan melumpuhkan kapal perang itu. Intelijen Israel gagal mengetahui bahwa Hezbollah telah menyembunyikan gudang senjata mereka sebelum perang berlangsung.[1263] Hezbollah bertarung dengan teknologi canggih, dan mereka memberikan perhatian besar pada perang di media sebagaimana mereka melakukannya pada perang senjata. Setelah mendapatkan pelatihan dan peralatan dari Iran, para pasukan Hezbollah berhasil membobol kode radio komunikasi Iran, sehingga berhasil mencegat laporan tentang korban yang berhasil dijatuhkan Hezbollah. Ketika seorang pasukan Israel terbunuh, Hezbollah mengkonfirmasinya dengan mendengarkan radio komunikasi Israel lalu segera mengirimkan laporan ke stasiun televisi satelit, *Al Manar,* yang menyiarkan berita secara langsung. Dengan demikian, dunia Arab mengetahui nama-nama korban Israel dan lokasi terbunuhnya korban sebelum pasukan Israel mendapatkan kesempatan untuk memberitahu keluarga korban. Dampak psikologis dari taktik ini terhadap Israel—yang tumbuh dengan perasaan superior atas pasukan dari negara tetangga Arab mereka—sangat luar biasa.

Ketika perang berlangsung, kesalahan taktis dan kepicikan strategis Israel merubah situasi di lapangan—begitu juga dengan opini publik di Israel. Awalnya, sebagian besar warga Israel mendukung perang ini. Perang ini dianggap sebagai perang defensif dan diperlukan untuk mengakhiri serangan Hezbollah di wilayah perbatasan. Namun, euforia dari para pemimpin Israel—dan publik Israel—segera menjadi sebuah keputusasaan. Setelah menjalani peperangan yang sulit selama berminggu-minggu tanpa kemenangan yang jelas bagi Pasukan Pertahanan Israel, sebuah survey menunjukkan bahwa 63 persen warga Israel menginginkan agar Olmert mengundurkan diri. Dan 74 persen menginginkan Amir Perez, seorang menteri pertahanan kelahiran-Maroko yang tidak berpengalaman itu, juga mengundurkan diri.[1264] Seruan untuk berperang pada awal peperangan yang terdengar "Biarkan Israel menang!", setelah tiga minggu berlalu telah berubah menjadi "Kami akan puas dengan hasil imbang." Pada akhir peperangan, setelah tiga puluh empat hari, Israel mengatakan dengan setengah bercanda bahwa yang penting bukanlah apakah Israel menang atau kalah, tetapi bahwa Israel telah menjalankan permainan. Alih-alih memperkuat citra Israel sebagai negara tak terkalahkan, perang yang ditujukan untuk melemahkan Iran ini justru membuat Israel semakin rentan. Meskipun Hezbollah melakukan sebuah serangan (sebagaimana yang dilakukan Lebanon secara umum; lebih dari seribu korban adalah warga sipil, dan infrastruktur negeri secara sistematis hancur akibat bom Israel sejak hari pertama peperangan), kemampuan strategisnya belum

1262

1263

1264

terkalahkan, dan kekuatan politiknya dalam rumitnya kekacauan sektarian di Lebanon mungkin saja meningkat. Dan Israel berada di bawah ancaman yang sama besarnya dengan ancaman sebelum perang.

Iran sendiri terkejut dengan hasil dari perang ini—dan dengan kekuatan tempur Hezbollah. Kekhawatiran, dan pada taraf tertentu merupakan sebuah harapan, yang muncul adalah bahwa Israel akan menghancurkan sekutu Iran di Lebanon ini, sehingga seluruh pertimbangan regional akan berubah merugikan Iran."[1265] Sebaliknya, posisi Iran—terlebih lagi Hezbollah—di kalangan rakyat Arab meningkat ke level yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat melemah, dan pemerintahan Arab pro-Barat terjepit di antara ketidakpuasan rakyatnya dan sikap Gedung Putih yang menunjukkan perhatian yang kecil bagi kepentingan dan harapan sekutu-sekutunya. Arab Saudi, Mesir, dan Yordania, tiga sekutu utama Amerika Serikat yang menderita kerugian besar atas meningkatnya kekuatan Iran, mengambil langkah yang tidak biasa di hari-hari awal peperangan dengan menyalahkan Hezbollah karena telah memulai peperangan. Tidak pernah terjadi sebelumnya sebuah pemerintahan Arab begitu terbuka mengecam kelompok Arab tertentu yang bertempur dengan Israel.[1266] Pertimbangan Arab Saudi adalah, dengan menawarkan peluang politik bagi negara lain untuk mengecam Hezbollah, Amerika akan menahan laju Israel. Tetapi manuver Arab Saudi ini ternyata menjadi bumerang. Pemerintahan Bush justru berusaha untuk memperpanjang peperangan, sehingga membuat pemimpin Arab Saudi malu karena situasi ini menunjukkan lemahnya pengaruh Arab Saudi terhadap pemerintahan Bush di Gedung Putih.[1267] Pada saat yang sama, dukungan besar terhadap Hezbollah sangat kuat di Arab Saudi, Yordania, dan Mesir; bahwa pemimpin-pemimpin mereka dengan cepat terpaksa merubah sikap anti-Hezbollah mereka. Lebih parah lagi, manuver Israel ini tidak hanya membuat Iran lebih kuat, tetapi Iran juga diuntungkan dengan pelemahan Washington terhadap rival Iran di dunia Arab.

Kebijakan *containment* bahkan gagal ketika situasi jauh lebih menguntungkan Amerika Serikat. Saat ini Washington dan Tel Aviv menghadapi sebuah situasi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tahun 1993, ketika kebijakan ini pertama kali dilakukan melalui proses perdamaian. Pada waktu itu Washington sedang berada pada puncak kekuatannya, Uni Soviet sudah runtuh, dan, dalam "Tatanan Dunia Baru" yang sedang terbentuk, Amerika Serikat merupakan satu-satunya kekuatan adidaya. Secara diplomatik, posisi Washington sama kuatnya. Lalu—Sekretaris Negara James Bakes telah membentuk sebuah koalisi besar—termasuk beberapa negara Arab—untuk mengusir Saddam Hussein dari Kuwait, dia menegaskan bahwa kerjasama Arab untuk melawan Irak akan mengarah kepada perdamaian Israel-Palestina. Di sisi lain, Iran sedang berada pada kondisi lemah. Iran masih memulihkan diri dari perang Iran-Irak, hubungannya dengan negara Arab dan Eropa masih memburuk. Tetapi langkah isolasi terhadap Iran jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Washington. Meskipun Washington telah berusaha keras, kebijakan untuk membendung Iran terbukti merupakan sebuah kegagalan besar.

Sekarang, situasi sudah berubah. Kredibilitas Washington sedang berada pada titik lemah. Invasi dan pendudukan Irak telah melemahkan Amerika Serikat baik secara militer maupun diplomatik. Perang Israel dengan Hezbollah tidak mampu menarik simpati negara

1265

1266

1267

Arab, dan ketidakmampuan pemerintahan Arab pro-Barat untuk mempengaruhi Washington telah memperlebar jarak antara rezim Arab dengan rakyatnya. Terlepas dari kesuksesan ekonomi mereka, negara Arab di Teluk Persia merupakan negara lemah, karena keamanan mereka terkait langsung dengan kekuatan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Iran telah memperoleh kekuatannya kembali. Pemerintahan Bush telah mempercepat kemunculan Iran sebagai kekuatan utama di Timur Tengah dengan menjatuhkan rival terdekat Iran—Taliban di Afghanistan dan Saddam Hussein di Irak—dari papan catur geopolitik. Tidak ada kekuatan regional yang bisa mengimbangi dan membendung Iran tanpa dukungan penuh dari Amerika Serikat—dan ketika resiko dari kebijakan ini meningkat, maka keberlangsungannya menjadi dipertanyakan. Cepat atau lambat, kebijakan *containment* akan runtuh dan Amerika Serikat akan terpaksa berdamai atau berkonfrontasi dengan Iran. Pilihan terbaik bagi Washington—dan Israel—nampaknya adalah menggigit peluru dan berdamai dengan Teheran, karena resiko untuk tidak bernegosiasi dengan Iran terus meningkat. Peluang untuk bernegosiasi dengan Iran dalam posisinya yang sedang kuat dalam lima tahun terakhir selalu dihalangi oleh kelompok neokonservatif, yang, sebagaimana yang juga terjadi di Israel, tidak menginginkan ada dialog apapun antara Amerika dengan Iran. Akibatnya, pembicaraan antara Amerika dengan Iran di masa depan mungkin harus dimulai dari titik yang lebih menguntungkan Teheran daripada menguntungkan Washington dan Tel Aviv.

Solusi tanpa Operasi Militer

Operasi militer terhadap Iran akan sangat beresiko, dan bahkan jika langkah tersebut berhasil, konsekwensinya akan sangat mengejutkan. Perwira tinggi di Angkatan Darat Amerika Serikat dan Korps Marinir, begitu juga dengan sebagian besar kelompok konservatif di kalangan elit keamanan nasional Amerika Serikat, memperingatkan bahwa serangan Amerika Serikat pada Iran secara potensial akan membahayakan posisi Amerika Serikat di Irak dan di wilayah lainnya, mengingat kemampuan serangan balik asimetris yang dimiliki Iran. Di sisi lain, Israel tidak bisa menghadapi Iran sendirian. Angkatan Udara Israel masih belum memiliki kemampuan untuk menyerang seluruh fasilitas nuklir Iran. Tidak seperti program nuklir Irak, fasilitas nuklir Iran tersebar di seluruh wilayah negaranya. Lebih dari itu, jarak Israel dengan Iran lebih jauh, dan Israel tidak bisa menjangkau Iran tanpa pengisian bahan bakar di udara. Lebih penting lagi, rencana perang Amerika Serikat tidak hanya menargetkan pembangkit nuklir tetapi juga banyak infrastruktur yang berkaitan dengan program nuklir itu. Amerika Serikat mampu menghancurkan target ini, tetapi Israel tidak. Operasi militer yang terburu-buru dan tidak berhasil bisa membuat momentum politik menguntungkan Iran sekaligus mengganggu upaya untuk menghentikan Teheran. Selanjutnya, dengan jumlah warga Yahudi Iran yang diperkirakan berpopulasi sekitar 25.000 orang, konfrontasi militer bisa membahayakan keamanan komunitas kuno ini, sebuah langkah yang tidak mau diambil oleh Negara Yahudi. Dan meskipun Israel sudah melobi Amerika Serikat untuk berurusan dengan Iran dengan cara yang tegas, kelompok pro-Israel di Washington khawatir jika mereka mendorong Amerika Serikat terlalu keras—mereka berusaha menghindari anggapan publik Amerika bahwa mereka telah menekan Amerika untuk berperang demi Israel. Organisasi-organisasi Yahudi di Amerika Serikat secara diam-diam telah meminta Gedung Putih untuk tidak

menjadikan keamanan Israel sebagai alasan utama dalam kemungkinan konfrontasi dengan Iran, karena takut terhadap reaksi publik Amerika.[1268]

Jalan Keluar yanng Tepat—Integrasi Regional dan Keamanan Bersama

Sebuah kebijakan yang belum direalisasikan secara serius adalah integrasi regional melalui dialog dan keakraban. Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa, seperti China, Iran merupakan sebuah negara yang tidak dapat dibendung Amerika Serikat tanpa batas, bahwa Iran menjadi lebih antagonistik ketika diisolasi, dan bahwa Amerika Serikat bisa lebih baik mempengaruhi Iran dengan membantunya untuk berintegrasi ke dalam struktur politik dan ekonomi dunia daripada membuatnya tetap terisolasi. Pendekatan seperti ini mendapat dukungan dari para aktifis hak asasi terkemuka di Iran, yang percaya bahwa pendekatan ini akan mendorong terjadinya reformasi politik dalam negeri. Dan apa yang diinginkan Iran adalah, pada intinya, mengakhiri sebuah kebijakan yang banyak merugikan Washington dan sedikit menguntungkannya.

Di samping menjadi kebijakan dengan resiko paling rendah, ada beberapa indikasi bahwa kebijakan ini memiliki peluang untuk berhasil. Baik rezim kerajaan Iran dan rezim Islam Iran keduanya telah menanamkan pada dirinya sendiri sebuah gagasan bahwa kapasitas, populasi, tingkat pendidikan, dan sumber daya alam Iran telah membuat negara ini ditakdirkan untuk memperoleh keunggulan regional dan bahwa Iran harus memainkan peran kepemimpinan sebagai refleksi atas kapasitas geopolitiknya. Pandangan ini telah—dan terus menjadi—daya dorong utama bagi kebijakan luar negeri Iran baik selama rezim Shah maupun pasca Revolusi Islam 1979. Iran pasca-Revolusi awalnya dicita-citakan untuk menjadi pemimpin seluruh dunia Islam. Keinginan Shah bagi peran Iran jauh melampaui wilayah Timur Tengah secara geografis; Shah memimpikan Iran menjadi kekuatan angkatan laut paling unggul di cekungan Samudera Hindia.

Namun pasca perang Iran-Irak, Teheran secara perlahan menurunkan cita-citanya dan pengertiannya tentang cakupan wilayah keamanan nasionalnya yang hanya mencakup wilayah Teluk Persia dan Laut Kaspia, bukan wilayah Timur Tengah raya.[1269] Dalam cakupan wilayah ini, Iran ingin menjadi kekuatan satu-satunya, dan kebijakan luar negerinya mengalami radikalisasi ketika kekuatan regional atau asing berusaha untuk mengisolasi dan menbendungnya. Menurut Murad Saghafi, seorang reformis sekuler yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Ayatollah Khomeini, Iran akan menerima proses saling-mendekat Amerika Serikat yang memberikan perlindungan bagi kepentingan regional Iran. “Jika mereka berkata, Iran berhak atas sebuah tempat di dunia, kami tidak ingin meyerang Iran, mari membuat Iran menjadi sebuah produsen gas terdepan, [Iran] akan berkata “Ya”,” Saghafi berkomentar.[1270]

Tetapi meskipun revolusi Iran tidak ragu untuk mengorbankan tujuan-tujuan ideologisnya demi pertahanan hidup negara dan rezim, apakah ada jaminan bahwa Iran akan lebih pragmatis ketika Iran mampu mencapai tujuan-tujuan ideologisnya tanpa mengorbankan posisi strategisnya? Apakah ideologi akan tetap menjadi motivasi sekunder bagi kebijakan luar negerinya, atau apakah ideologi ini akan berada di garis terdepan? Singkat kata, apakah ketika Iran menjadi lebih kuat akan membuatnya lebih radikal? Tidak

1268

1269

1270

mungkin membuat sebuah prediksi dengan akurasi yang tinggi. Tetapi sebuah pertimbangan atas perilaku Iran di masa lalu mengindikasikan bahwa ketika Iran semakin kuat atau semakin terintegrasi, Iran akan semakin moderat. Perilaku Iran pasca kemenangan Partai Likud pada 1996 adalah contohnya. Ketika kekuatan Iran meningkat dan hubungan dengan negara Arab, Uni Eropa, dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) membaik dan berhasil menentang langkah Amerika untuk mengisolasinya, posisi Iran terhadap isu Israel-Palestina semakin moderat. Iran tidak menggunakan kekuatannya yang sedang meningkat untuk mengintensifkan kebijakan-kebijakan anti-Israel. Iran mungkin telah menyadari bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan Israel dari proses pengambilan keputusan regional (sebagaimana Israel gagal melakukan hal yang sama terhadap Iran) dan bahwa dalam jangka panjang mereka tidak perlu mengisolasi Israel untuk mencapai tujuan-tujuan kepemimpinannya.

Pendekatan baru Amerika Serikat dapat mengubah kebijakan luar negeri Iran yang mengarah pada stabilitas dengan mengakomodasi tujuan-tujuan keamanan Iran yang sah sebagai imbalan atas konsesi Iran dalam beberapa isu regional dan internasional, begitu juga atas modifikasi kebijakan Iran yang signifikan, termasuk pengakuan Iran atas kepemimpinan global Amerika Serikat dan berakhirnya permusuhan Iran terhadap Israel. Seperti yang pernah diusulkan Iran pada proposal tahun 2003 kepada Washington, Teheran akan menerima Israel sebagai sebuah kenyataan regional dan menghormati solusi dua-negara (*two state-solution*) dalam konflik Israel-Palestina. Joschka Fischer, mantan menteri luar negeri Jerman, mendesak Amerika Serikat untuk mengadopsi kebijakan ini dalam sebuah kolom opini dalam surat kabar *Washington Post* terbitan Mei 2006. "Pilihan-pilihan Iran seharusnya tidak kurang dari "pengakuan" dan "keamanan" atau "isolasi total"," dia menulis.[1271] Pandangan seperti ini akan lebih baik mencerminkan keseimbangan regional yang alami, yang akan membuat situasi lebih stabil dan resiko yang lebih kecil bagi Amerika Serikat.

Pandangan ini juga mendapatkan dukungan dari kelompok moderat di Israel, yang mengakui bahwa pendekatan "pemenang-mengambil-semuanya" akan membuat Israel berada pada posisi lemah dalam jangka panjang. Ben-Ami, mantan menteri luar negeri Israel, menulis dalam halaman *Haaretz* bahwa "persoalan hari ini adalah bukan ketika Iran akan memiliki kekuatan nuklir, tetapi bagaimana mengintegrasikan Iran ke dalam sebuah kebijakan stabilitas regional sebelum Iran menguasai kekuatan seperti itu. Iran tidak didorong oleh obsesi untuk menghancurkan Israel, tetapi didorong oleh tekadnya untuk menjaga rezimnya dan memantapkan dirinya sebagai kekuatan regional yang strategis *vis a vis* baik dengan Israel dan negara-negara Arab Sunni. Jawaban atas ancaman Iran adalah kebijakan penurunan ketegangan (*detente*) yang akan merubah perilaku para elit Iran."[1272] Ben-Ami kemudian menyatakan bahwa inilah tanggung jawab pertama dan utama Amerika, tetapi pemerintahan Bush—seperti Israel—lebih tertarik untuk memerangi "penjahat" untuk mencapai resolusi konflik. Ben-Ami berpandangan bahwa dialog Amerika-Iran mutlak diperlukan, meskipun hal ini akan menyebabkan terjadinya kompromi-kompromi serius bagi Washington dan Tel Aviv, misalnya mengakui urgensi Iran di tingkat regional. Tidak seperti para pendahulunya di Partai Buruh, Ben-Ami menegaskan bahwa menghindari ancaman Iran akan membantu proses perdamaian Israel-

1271

1272

Palestina, dan bahkan usaha untuk membesar-besarkan ancaman Iran untuk menakut-nakuti negara Arab dan publik Israel pada langkah negosiasi akan merugikan Israel dalam jangka panjang.

Apa yang dikemukan Ben-Ami adalah bahwa konlik Israel-Palestina tidak bisa diselesaikan kecuali konteks geopolitiknya diperhatikan. Banyak yang berpandangan bahwa isu Israel-Palestina merupakan kunci untuk menyelesaikan semua persoalan di Timur Tengah. Misalnya, Colin Powell percaya bahwa perdamaian Israel-Palestina akan membuka jalan bagi proses akomodasi dengan Iran. Meskipun kuncinya mungkin terletak di tempat lain. Meskipun konflik antara Israel dan Palestina menyentuh setiap orang dan setiap hal secara sangat emosional, konflik ini bukanlah faktor yang menentukan keseimbangan geopolitik—yang juga tidak didorong oleh faktor-faktor geopolitik itu sendiri. Sebaliknya, *ketidakseimbangan* geopolitiklah yang menyebabkan konflik semakin tak bisa diselesaikan. Sebelum konflik yang mendasar ini ditangani terlebih dahulu, proses apapun untuk menyelesaikan perselisihan antara Israel dan Palestina akan tetap tersandera oleh rivalitas-rivalitas geopolitik. Ini akan menjadi pertaruhan dalam persaingan antara Israel dan Iran untuk masa depan tatanan regional, seperti yang terjadi pada 1990-an. Isu-isu ini, disadari atau tidak, jelas sekali saling terkait.

Meskipun hanya Washington yang bisa memimpin proses reintegrasi Iran ke dalam tatanan regional, Israel juga perlu mengambil langkah-langkah signifikan untuk membuat kebijakan ini berhasil. Keyakinan penuh bahwa tetangga Arabnya akan menghancurkan Israel jika mereka bisa melakukannya, membuat Negara Yahudi mempertahankan hidup mereka melalui dominasi militer.[1273] Israel memegang sebuah konsep yang disebut sebagai keunggulan strategis, atau keunggulan militer. Para pemimpin Israel secara umum percaya bahwa permusuhan dari tetangga-tetangganya tidak dapat berubah, sehingga membuatnya mengabaikan sebuah dampak bahwa langkah-langkahnya ada pada tujuan-tujuan mereka.[1274] Dan karena luas geografis dan populasi Israel lebih kecil—sebuah doktrin standar berpandangan—Israel tidak punya pilihan lain kecuali menjadi lebih kuat dibandingkan tetangga-tetangganya sepanjang waktu, karena "jika salah satu dari musuh kami memiliki kemampuan untuk menghacurkan kami, mereka akan melakukannya," sebagaimana yang disampaikan oleh Shmuel Bar, seorang veteran intelijen Israel.[1275] Sebagian besar pemimpin Israel mengabaikan pandangan; bahwa Israel dapat mempengaruhi tujuan dan motif Iran. "Mereka berdedikasi pada mimpi-mimpi mereka; dan mimpi mereka adalah menghancurkan Israel. Tidak ada yang akan berubah dalam pikiran mereka. Mereka hanya berkompromi mengenai waktunya," Jenderal Israel Gilad menegaskan.[1276] Jika niat ini tidak bisa dihapuskan, maka Israel tidak punya pilihan lain kecuali memastikan bahwa tetangga-tetangga mereka ada dalam keadaan lemah. Selama musuh-musuh Israel tetap lemah, tujuan-tujuan mereka menjadi tidak relevan. "Di wilayah ini, kita harus menyadari bahwa setiap senjata seolah-olah ditujukan pada Israel," Wakil Menteri Pertahanan Sneh berkomentar. "Ini adalah asumsi yang harus menjadi panduan kami dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami hidup di sebuah wilayah berbahaya dan

1273

1274

1275

1276

tidak stabil, dan kami harus hidup berdasarkan "skenario-paling-buruk" sepanjang waktu."[1277]

Penekanan pada "skenario-paling–buruk", pada level tertentu, merupakan akibat dari kompensasi berlebihan dari aparat intelijen atas kesalahan yang dilakukan Israel pada malam perang Yom Kippur 1973, ketika Israel terlalu meremehkan kemampuan negara Arab dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Akibatnya, Israel—yang sudah merasa puas dengan kemampuannya itu—dibuat bingung oleh pasukan Mesir yang bertempur dengan koordinasi yang baik dan serangan mengejutkan pasukan Syria yang menyebabkan kerugian besar dari pihak Israel di hari-hari pertama peperangan, yang hampir berakhir dengan kekalahan besar, sebelum Israel mampu mendapatkan kembali kekuatannya untuk melakukan serangan balik. "Koreksi terhadap kejadian ini, sejauh ini, juga terlalu berlebihan. Hari ini, budaya yang berlaku, atau saya akan mengatakan pola pikir dari intelijen adalah menganggap musuh kita memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan mengganggap remeh kekuatan kita dibandingkan mereka," Shmuel Limone dari Kementerian Pertahanan, menjelaskan.[1278] Pola pikir seperti ini cenderung mengarah pada "ramalan-yang membuktikan-dirinya sendiri", yang mendorong terwujudnya "skenario-paling-buruk" daripada mencegahnya terjadi.[1279] Di samping itu, penekanan pada propaganda permusuhan dari musuh-musuh Israel, yang dalam kasus Iran—propaganda ini—begitu banyak, cenderung membuat Israel kehilangan sinyal positif atau menganggap sinyal positif itu sebagai sebuah taktik penyesatan.[1280] Pada tahap selanjutnya, kebijakan ini mendorong Israel mengambil tindakan terlebih dahulu terhadap negara atau kelompok manapun yang akan memiliki kemampuan untuk menandingi Israel. Menurut David Ivry, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, langkah "menyerang terlebih dahulu" merupakan kebijakan Israel yang sudah lama. "Tradisi negara kami, '(Terhadap) Dia yang muncul untuk membunuhmu, bertindaklah lebih awal dan bunuh dia terlebih dahulu.' Frase 'bertindaklah lebih awal' (*arise earlier*) merupakan inti dari doktrin ini."[1281]

Pada April 2004, Perdana Menteri Ariel Sharon menerima sebuah laporan komprehensif tentang keamanan nasional—*Project Denial*—yang memberikan pandangan bahwa Israel memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri untuk melakukan serangan terlebih dahulu karena para pemimpin Arab dan Iran merupakan orang yang tidak rasional dan tidak menghargai sikap pembelaan-diri—demikian kesimpulan laporan tersebut. Hal ini mengganggu efektifitas pencegahan (*deterrence*) Israel dan mengharuskan dominasi militer Israel yang maksimal dan menghindari keseimbangan, apapun yang terjadi. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang kurang dari superioritas Israel akan menjadi ancaman eksistensial bagi Negara Yahudi.[1282] Akibatnya, Israel harus terus-menerus berusaha melumpuhkan tetanga-tetangganya dengan menyerang terlebih dahulu siapapun yang akan memberikan tantangan kepada Israel. Ketika negara-negara di regional berkembang, Israel harus melampaui perkembangan mereka. Israel tidak bisa menerima kehilangan keunggulannya, karena jika tetangga Israel memiliki kekuatan militer yang lebih unggul,

1277
1278
1279
1280
1281
1282

mereka akan menghancurkan Israel. Doktrin ini menunjukkan bagaimana proses demokratisasi di Iran mungkin saja tidak cukup untuk memberikan perubahan secara fundamental terhadap rivalitas Israel-Iran. Bahkan Iran yang demokratis akan dianggap sebagai ancaman bagi Israel jika Iran bisa memberikan tantangan kepada superioritas militer Israel—baik nuklir atau konvensional.[1283] "Ini menjadi satu-satunya cara yang kami percayai bahwa kami bisa membangun eksistensi secara kuat di regional; artinya ini adalah sebuah bentuk dominasi," seorang analis Israel mengakui. "Tetapi ini bukanlah sebuah hegemoni. Kami tidak ingin menjadi atau berpikir bahwa kami bisa menjadi kekuatan budaya dominan. Ini adalah sebuah eksistensi melalui dominasi." Tetapi walaubagaimanapun juga, apa yang diinginkan Israel adalah sebuah dominasi.

Sementara kebijakan integrasi masih menjadi satu-satunya kebijakan yang bisa mendorong stabilitas regional, kebijakan ini tidak bisa berhasil kecuali rivalitas Israel-Iran dapat diatasi terlebih dahulu, yang kemudian membutuhkan perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri baik di Iran dan Israel. Paling tidak, Iran harus menerima solusi dua-negara (*two-states solution*) dan mengurangi ambisi regionalnya dengan memainkan peran yang melampaui sumber dayanya. Jelas sekali bahwa Iran tidak bisa berharap dapat memperoleh peran utama sebagai kekuatan yang sah bagi stabilitas regional jika Iran tetap memandang kemampuan militer asimetris sebagai alat politik yang sah. Di sisi lain, Israel harus merubah pandangan militernya karena keyakinannya bahwa Israel harus mendominasi Timur Tengah secara militer akan membuatnya berbenturan dengan Teheran, terlepas dari ideologi, struktur politik, dan kebijakan-kebijakan Iran. Melepaskan doktrin militer ini juga akan mendorong terciptanya perdamaian antara Israel dan tetangga Arabnya.

Benturan antara ambisi regional Iran dengan desakan Israel atas dominasi strategis akan terus memicu ketidakstabilan dan menganggu kepentingan Washington di Timur Tengah kecuali Amerika mengakui stabilitas dan demokrasi tidak dapat dicapai tanpa mengakhiri permainan keseimbangan (*balancing game*) dan secara tulus menciptakan situasi di Timur Tengah yang mengintegrasikan seluruh aspirasi semua negara, termasuk Iran. Sejauh ini, pemerintahan Bush masih tetap menolak pergeseran kebijakan semacam itu. Dalam kondisi tertentu, Amerika menjadi sangat lemah dengan kegagalan di Iran; rivalitas Israel-Iran berada di bawah bayang-bayang ketakutan Washington sendiri bahwa Iran akan berhasil memberikan tantangan terhadap dominasi regional Amerika. Dalam pidatonya di hadapan Kongres pada 10 Januari 2007, Bush menuduh Iran telah menimbulkan ketidakstabilan di Irak dan mendukung milisi Syiah untuk membunuhi pasukan Amerika di sana, sementara itu Bush mengabaikan kenyataan bahwa berbagai kebangkitan kelompok Sunni—yang didukung oleh kelompok di Yordania dan Arab Saudi—bertanggung jawab atas jatuhnya lebih dari 90 persen korban Amerika di Irak. Dalam keadaan putus asa untuk mempertahankan hegemoni regional Amerika, Bush mengisyaratkan bahwa Iran akan diperangi dan diisolasi secara lebih agresif oleh Amerika Serikat melalui pembentukan aliansi anti-Iran yang terdiri dari negara-negara Arab dan Israel; yaitu, politik keseimbangan-kekuatan (*balance of power*) akan tetap digunakan Amerika. Tetapi bahkan jika Washigton berhasil menciptakan kestabilan di Irak dan menyelamatkan hegemoni Amerika di Timur Tengah, permainan keseimbangan akan memastikan bahwa "delapan ratus pon gorila"—yaitu, rivalitas Israel-Iran—akan tetap

1283

tidak terselesaikan dan bersembunyi di belakang slogan demokrasi dan kebebasan, sementara itu stabilitas dan keamanan di Timur Tengah menjadi sebuah mimpi kosong belaka.

CATATAN AKHIR

Bab 1—Pendahuluan

Epigraf: "Ahmadinejad Says Iran Ready for 'Final Nuclear Step'," AFP, 16 November 2006; Victor Ostrovsky, *By Way of Deception* (New York: St. Martin's, 1990), 330; Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 249.

1. Pernyataan Ahmadinejad telah diterjemahkan secara keliru,"Menghapus Israel dari peta." Ahmadinejad tidak pernah menggunakan kata "Israel" tetapi "rezim yang menjajah Yerusalem," yang merujuk pada rezim di Israel dan bukan merujuk pada sebuah negeri. Lebih dari itu, presiden Iran garis-keras ini telah keliru mengutip pidato Ayatollah Khomeini. Bapak Revolusi Iran ini menggunakan frase "*Sahneh roozgar*," yang berarti "panggung sejarah (*scene of time*)," meskipun selama beberapa tahun frase ini diterjemahkan secara keliru oleh pemerintah Iran dengan mengartikannya sebagai "peta." Meskipun begitu, Ahmadinejad mengartikan "*Safheh* roozgar," yang artinya "halaman waktu," atau "halaman sejarah." Tidak ada satu pihak pun yang menyadari perubahan ini, dan agen-agen baru terjebak dengan terjemahan standar ini—meskipun keliru. Persoalannya adalah bahwa kedua frase tersebut meruju pada waktu, bukan tempat, sehingga terjemahan "menghapus *Israel* dari peta." adalah keliru. Dengan demikian, Ahmadinejad "tidak sedang mengajak kepada sebuah peperangan untuk mengakhiri kontrol Israel terhadap Yerusalem" tetapi lebih kepada "mengekspresikan harapan yang samar-samar di masa depan," menurut Jonathan Steele dari *Guradian.* Lihat Jonathan Steele,"Lost in Translation," *Guradian,* 14 Juni 2006; dan Ethan Bronner dan Nazila Fathi,"Just How Far Did They Go, Those Words Against Israel?" *New York Times,* 11 Juni 2006.
2. "Israel Focuses on the Threat Beyond the Periphery," *New York Times,* 8 November 1992.
3. Seymour M. Hersh,"The Iran Plan," *New Yorker,* 17 April 2006. Gedung Putih membantah tuduhan dari cerita ini.
4. Barbara Demick,"Iran Remains Homes to Jewish Enclave," *Knight-Ridder,* 30 September 1997.
5. Pada tahun 1979, populasi komunitas Yahudi di Iran berjummlah kira-kira delapan ribu orang.
6. Normah Cohn, *Cosmos, Chaos, and the World to Come* (New Haven: Yale University Press, 2001)
7. Paul Kriwazek, *In Search of Zarathustra* (New York: Vintage Books, 2002), 184-185. Karakter henoteistik dari paham Yudaisme pra-periode pengasihan tercermin dalam Komando Pertama,"Akulah Tuhan Tuhanmu; Kamu tidak memilki tuhan lain sebelum aku."
8. Lary Derfner,"See No Evil, Hear No Evil," *Jerusalem Post,* 28 September 2006.
9. Barbara Demick," Iran: Life pf Jews Living in Iran," Sephardic Studies, http://www.sephardicstudies.org/iran.html.
10. Frances Harrison,"Iran's Proud bur Discreet Jews," BBC, 22 September 2006. "Sejauh ini, Ahmadinejad tidak mengambil kebijakan apapun terhadap Yahudi. Terlepas dari apapun yang dia katakan di media tentang Holocaust dan Israel, komunitas Yahudi

tidak merasakan tekanan apapun dan sebagian besar kalangan dewasa di sana ingin tinggal di sana (Iran, *pen.*)," Yahudi-Iran lainnya bercerita pada *Jerusalem Post*.

11. Ewen MacAskil, Simor Tisdall, dan Robert Tait,"Iran's Jews Learn to Live with Ahmadinejad," *Guardian,* 27 Juni 2006.
12. Sadeq Saba,"Iran Jews Express Holocaust Shock," BBC, 11 Februari 2006.
13. John R. Bradley,"Iranian Jews Wasy of Becoming Scapegoats," *Washington Times,* 21 Maret 2006. Pada Januari 2007, Khatami diwawancarai surat kabar Israel *Yediot Aharonot.* Dalam wawancara itu dia mengkritik Ahmadinejad yang menyelenggarakan sebuah konferensi di Teheran mengenai Holocaust. "Saya sangat mengecam penyelenggaraan konferensi ini," dia berkata dalam acara tahunan *World Economic Forum* di Davos, Swiss. "Holocaust yang menimpa warga Yahudi merupakan salah satu tindakan keji terhadap kemanusiaan dalam sejarah kita. Tidak ada keraguan lagi bahwa hal tersebut telah terjadi." "Khatami Slams Controversial Holocaust Conference," AFP, 26 Januari 2007.
14. "Iranian Jews Shaping Israeli Policy," *Jane's Islamic Analysis,* 1 Oktober 2006.
15. Orly Halpern,"Cramped in Ashdod, Cheering for Iran," *Jerusalem Post,* 11 Juni 2006. Orly Halpern,"Immigrant Moves Back 'Home' to Teheran," *Jerusalem Post,* 3 November 2006.
16. "Ini tidak berarti bahwa masyarakat berbohong," dia menambahkan. "Mereka hanya berurusan dengan Anda dengan karakter yang berbeda," Michael Slackman,"The Fine Art of Hiding What You Mean to Say." *New York Times,* 6 Agustus 2006.
17. Wawancara dengan Shmuel Bar, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
18. Wawancara dengan Ehud Yaari, Yerusalem, 24 Oktober 2004.
19. Wawancara dengan Mustafa Zahrani dari Kementerian Luar Negeri Iran, New York, 26 Februari 2004.
20. William Kristol,"It's Our Way—Bush Should Go to Jerusalem—and th U.S. Should Confront Iran," *Weekly Standard,* 24 Juli 2006.
21. James Bamford,"Iran: The Next War," *Rolling Stone Magazine,* 24 Juli 2006.
22. Michael Ledeen,"The Same War," *National Review Online,* 13 Juli 2006.
23. John Gibson,"Iran Attacking Israel IS Really on U.S.," *Fox News,* 13 Juli 2006.
24. Brian Knowlton,"Rice Says Israel May Need to Prolong Offensive," *International Herald Tribune,* 16 Juli 2006.

Bab 2—Persekutuan Oportunis

1. Komite Khusu PBB untuk Palestina, Rekomendasi untuk Sidang Umum, 3 September 1947.
2. Resolusi 181 telah disetujui dengan suara tiga puluh tiga – tiga belas, dengan suara abstain sebanyak sepuluh suara. AS dan Uni Soviet mendukung resolusi ini.
3. R.K Ramazani,"Iran and the Arab-Israeli Conflict," *Middle East Journal* 3 (1978): 414-415.
4. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948-1988* (New York: Praeger, 1989), 23. (Mohammad Mossadeq terpilih menjadi perdana menteri Iran pada 1951 melalui suara tujuh-puluh sembilan – sebelas oleh parlemen Iran. Kemenangan telak ini membuat Shah harus menyetujui suara Parlemen, meskipun terdapat banyak perbedaan antara dirinya dengan Mossadeq yang kharismatik. Perdana

menteri Iran ini kemudian dijatuhkan melalui sebuah kudeta yang dirancang CIA dan intelijen Inggris, yang semakin memperkuat kekuasaan Shah.)

5. Ibid, 3, 34.
6. Robert Reppa, *Israel and Iran—Billateral Relationship and Effect on Indian Ocean Basin* (New York: Praeger, 1974), 91.
7. Ramazani,"Iran and the Arab-Israeli Conflict," 415.
8. "Nasserisme" yang menekankan bahwa Barat berusaha menindas rakyat Arab dan bahwa konflik Arab-Israel merupakan alat bagi kekuatan Barat untuk ikut campur di Timur Tengah, telah menjadi kekuatan besar di Timur Tengah dengan menyerukan semangat anti-Kolonialisme dan sosialisme pan-Arab.
9. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 18.
10. Wawancara dengan mantan pejabat intelijen Iran, Washington D.C., 14 Maret 2004.
11. Wawancara via telpon dengan Duta Besar Fereydoun Hoveyda, mantan kepada Misi Permanen Iran di PBB, Washington D.C., 3 Maret 2004. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 62. Pada awal 1970-an, Shah menawari pimpinan PLO Yassir Arafat sebuah posisi yang lebih pro-Arab terhadap Israel sebagai imbalan atas penghentian dukungan PLO terhadap oposisi Iran. Pada 1960-an, dukungan Arafat dan PLO—pembawa bendera pan-Arabisme terdepan—terhadap gerakan oposisi di Iran dan kelompok separatis semakin memicu penentangan Iran terhadap pan-Arabisme. PLO membukan kamp pelatihan mereka terhadap kelompok oposisi Iran yang memberikan ancaman militer terhadap rezim Shah, dengan harapan bahwa perubahan rezim di Teheran akan membuat Iran berada di pihak Arab. (Wawancara dengan mantan diplomat Iran di bawah rezim Shah, Washington D.C., 2 April 2004.)
12. Segev, *Iranian Triangle,* 35-36.
13. Pada 1954, Sultan Sanandaji, diplomat kelas-bawah di kedutaan Iran di London, mendekati seorang diplomat Israel di kedutaan Israel di London, Sekretaris Pertama, Mordechai Gazit, dan menawari Israel akses terhadap sumber energi Iran. Tawaran Sanandaji ini dengan cepat membuat sibuk para pejabat tinggi di pemerintahan Iran dan Israel. Pada tahun yang sama, Yisrael Koslov, perwakilan Perdana Menteri Levi Eshkol, kemudian menyepakati sebuah perjanjian dalam kunjungan rahasianya ke Teheran. Segev, *Iranian Triangle,* 40.
14. Ibid, 60-61, 39-41. Jalur pipa kedua dari Eliat ke pelabuhan Israel di Mediterania di Ashkelon dibangun setelah perang 1967, ketika Kanal Suez ditutup kembali. Jalur pipa Eliat-Ashkelon memberikan Israel pasokan minyak yang melimpah bagi kilang minyak dan pertumbuhan konsumsi domestiknya. Kapasitas sekitar 400,000 barel per hari pada 1970, dengan rencana peningkatan hingga 1,2 juta barel per hari pada 1980. Memo Percakapan antara Pete Wolgast dari Esso dan Warren Clarck dari Departemen Luar Negeri AS, 8 Oktober 1970. Dokumen percakapan ini dan dokumen pemerintahan lainnya yang dirujuk dalam buku ini tersedia di *National Securiy Archives*.
15. Korespondensi antara Foggy Bottom dan kedutaan AS di Teheran, 13 Februari 1969.
16. Wawancara dengan Wakil Menteri M. Vakilzadeh, Washington D.C., 28 Februari 2004.
17. Wawancara dengan mantan Menteri Pertanian Iran A.A. Ahmadi, dan wakilnya, M. Vakilzadeh, Washington D.C., 28 Februari 2004.
18. Gary Sick, *October Surprise* (New York: Random House, 1991), 60.
19. Sobhani, *Pragmatic Entente,* xviii-xxii.

20. Ramazani, “Iran and the Arab-Israeli Conflict,” 416.
21. Wawancara dengan Charles Nass, mantan wakil dutabesar AS untuk Iran pada 1970-an, Washington DC., 8 Maret 2004.
22. Wawancara dengan Nass, 8 Maret 2004.
23. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 128.
24. Wawancara dengan Gholam-Reza Afkhami, penasehat Muhammad Reza Shah, Washington D.C, 5 Maret 2004.
25. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 109.
26. Ramazani, “ Iran and the Arab-Israeli Conflict,” 427.
27. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 27.
28. Nader Entessar, “Israel and Iran’s National Security,” *Journal of South Asia and Middle Easthers Studies 4* (2004): 1–2; *Segev, Iranian Triangle,* 43.
29. Wawancara dengan mantan duta besar Iran di bawah rezim Shah, Washington D.C., 2 April 2004. Tuduhan ini dibantah oleh Eliezer Tsafrir, yang menjabat sebagai kepala Mossad di Iran Irak pada 1960-an hingga 1970-an. Wawancara, Tel Aviv, 16 Oktober, 2004.
30. Wawancara dengan mantan perwira intelijen Iran, Washington D.C., 14 Maret 2004.
31. Wawancara dengan mantan diplomat Iran yang ditempatkan di Israel, Tehran, 12 Agustus 2004.
32. Telegram rahasia dari kedutaan besar AS di Tel Aviv, 7 Desember 1970.
33. Sick, *October Surprice,* 61.
34. Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (London: Researchers, 1988), 32.
35. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 114; Segev, *Iranian Triangle,* 42.
36. Wawancara dengan mantan duta besar Iran, Washington D.C., 2 April 2004.
37. Wawancara dengan mantan diplomat senior Israel yang ditempatkan di Tehran, Tel Aviv, 23 Oktober 2004.
38. Catatan Percakapan, kedutaan AS di Tehran, Andrew Kill-gore, Konselor Politik, 14 Oktober 1972.
39. R. K. Ramazani, *Iran’s Foreign Policy 1941 – 1973* (Charlottesville: University Press of Virginia, 1975), 404.
40. Seyed Assadollah Athari, ‘Iranian–Egyptian Relations,” *Discourse An Iranian Quarterly* 2 (2001): 51.
41. Ramazani, *Iran’s Foreign Policy,* 321. Ketika, sebagai bagian dari resolusi atas krisi Kuba pada 1962, Uni Soviet menghentikan propaganda terhadap Iran sebagai imbalasa atas janji Iran untuk tidak mengizinkan basis rudal AS di wilayahnya, peran Kairo dalam melakukan konfrontasi dan provokasi terhadap Iran meningkat. Dengan menggunakan hubungan Shah dengan Israel sebagai alibi, Nasser memberikan tantangan terhadap peran Iran di regional, dengan menggambarkan Iran sebagai seorang penindas rakyat Arab, dan menuduh Teheran sedang berusaha menjajah wilayah Arab—hal yang sama dilakukan Mesir terhadap Israel. Ramazani,”Iran the Arab-Israeli Conflict,” 416.
42. Wawancara dengan perwira intelijen Iran, Washigton D.C., 14 Maret 2004.
43. Ibid. Agen intelijen ini juga memberikan informasi tertang perkembangan di dunia Arab, meskipun Iran seringkali tidak mempercayai intelijen Israel dan menduga bahwa Israel hanya memberikan informasi dengan kualitas rendah. Wawancara dengan mantan diplomat senior Iran yang ditempatkan Israel, 12 Agustus 2004.

Bab 3—Kebangkitan Israel, Kebangkitan Iran

Epigraf: Walter Isaacson, *Kissinger: A Biography* (New York: Touchstone, 1992), 563.

1. Wawancara dengan mantan Duta Besar Iran untuk Denmark dan Yunani, Washington D.C., 2 April 2004.
2. Wawancara dengan Charles Naas, Washington D.C., 8 Maret 2004.
3. Wawancara dengan mantan wakil duta besar Iran PBB Mehdi Ehsasssi di Tehran pada 3 Agustus 2004.
4. Wawancara dengan Alinaghi Alikhani, mantan menteri keuangan di bawah rezim, Washington D.C., 7 April 2004.
5. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 70.
6. *Borba* (Yugoslavia), November 1967.
7. Memo dari pejabat Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan AS di Teheran, 10 November 1970.
8. Percakapan pada 27 April 1972, antara elit diplomat Iran di Tel Aviv dan seorang pejabat politik di kedutaan AS. Percakapan ini dirangkum dalam sebuah memo rahasia yang ditemukan di kedutaan As di Teheran selama krisis sandera 1979-1980. Memo ini kemudian dipublikasikan oleh pemerintah revolusioner Iran. Publikasi ini tersedia di gedung Arsip Dewan Keamanan Nasional di Washington D.C.
9. Seyed Assadollah Athari, "Iranian–Egyptian Relation," *Discourse: An Iranian Quarterly 2* (2001): 51. Wawancara via telpon dengan Duta Besar Fereydoun Hoveyda, mantan kepala Misi Permanen Iran untuk PBB di Washington D.C., 3 Maret 2004. Athari, "Iranian-Egyptian Relations," 51–52. Wawancara dengan Henry Precht, mantan sekertaris urusan Iran di Departemen Luar Negeri AS , Washington D.C., 3 Maret 2004.
10. Wawancara via telpon dengan Fereydoun Hoveyda, 3 Maret 2004.
11. Wawancara dengan mantan diplomat Iran di bawah rezim Shah, Washington D.C., 2 April 2004.
12. R.K,"Iran and the Arab-Israeli Conflict," *Middle East Journal* 3 (1978): 418.
13. Athari,"Iranian-Eqyptian Relations," 51-52.
14. Wawancara dengan Gholam Reza Afkhami, seorang penasihat Mohammad Reza Shah, Washington D.C., 5 Maret 2004. Para diplomat Iran di New York mendapatkan instruksi dari Shah untuk membantu Mesir berhubungan dengan para legislator dan pemimpin AS dari komunitas Yahudi-Amerika untuk memfasilitasi transisi Mesir menuju blok pro-Barat. Wawancara via telpon dengan Fereydoun Hoveyda, 3 Maret 2004.
15. Ramazani,"Iranian and the Arab-Israeli Conflict," 418.
16. Asadollah Alam, *The Shah and I,* ed. Alinaghi Alikhani (New York: St. Martin's, 1991), 152.
17. Wawancara via telpon dengan Fereydoun Hoveyda, 3 Maret 2004.
18. Wawancara, Tel Aviv, 3 Oktober 2004.
19. Alam, *The Shah and I*, 179-180. Pertemuan rahasia sudah dirancang oleh Kepala Pengadilan Shah, Asadollah Alam, tanpa sepengetahuan Menteri Luar Negeri Iran.
20. Henry Paolucci, *Iran, Israel and the United State* (New York: Griffon House, 1991), 10.
21. Wawancara dengan mantan wakl Duta Besar Iran untuk PBB, Mehdi Ehsassi, Teheran, 3 Agustus 2004.
22. Wawancara dengan Alinaghi Alikhani, 7 April 2004.
23. Wawancara dengan mantan wakil kepala angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.

24. Segev, *Iranian Triangle,* 77-78.
25. Wawancara dengan mantan pejabat intelijen Iran, Washington D.D., 14 Maret 2004.
26. Wawancara dengan mantan wakil kepala angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
27. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relation, 1948-1988* (New York: Praeger, 1989), 73.
28. Alam, *The Shah and I,* 82, 129, 170. Meskipun terjadi ketegangan antara Iran dan negara Arab lainnya, Iran tidak merasakan ancaman militer apapun dari mereka. Wawancara dengan Gholam-Reza Afkhami, Washington, D.D., 5 Maret 2004.
29. Wawancara dengan Shmuel Bar, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
30. Wawancara dengan Yitzak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
31. Menurunnya kecenderungan politik adidaya dari Israel terbukti seteah kudeta kelompok Marxis terhadap rezim Haile Selassie di Ethiopia pada 1974. Sebagai negara non-Aran dengan tingginya tingkat populasi Yahudi, Ethiopia memainkan peran penting dalam doktrin periperial Israel. Orientasi Ethiopia pada masa Perang Dingin tidak terlalu penting bagi Israel. Akibatnya, Tel Aviv bergerak cepat untuk membangun hubungan dengan pemerintahan Mengistu di Addis Ababa setelah kudeta komunis untuk memastikan kelanjutan doktrin periperial. Di sisi lain, Iran memandang perkembangan di Ethiopia sebagai langkah sukses Soviet untuk mendapatkan pengasuh di wilayah Tanduk Benua Afrika setelah diusir Anwar Sadat dari Mesir. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 74.
32. Wawancara dengan Davoud Hermidas-Bavand, Guru Besar di Universitas Shahid Beheshti dan mantan diplomat Iran, Teheran, 8 Agustus 2004.
33. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 74.
34. Ibid., 71.
35. R.K. Ramazani,"Security in the Persian Gulf," *Foreign Affairs* 4 (1979): I.
36. Wawancara dengan Gholan-Reza Afkhami, seorang penasihat Mohammad Reza Shah, Washington, D.C., 5 Maret 2004.
37. Misalnya, pesan yang sama sudah dikirimkan kepada pejabat senior Amerika di Washington oleh Shah pada April 1969 segera setelah pemakaman Presiden Eisenhower. Rezim monarki Iran menambahkan bawah penarikan pasukan Amerika dari Teluk Persia yang mengikuti hengkangnya pasukan Inggris akan menjadi langkah yang paling logis untuk menghadang Soviet mendapatkan pengaruh di regional. Sejak 1949, Angkatan Laut AS sudah berada di Teluk Persia—meskipun kecil—dengan memiliki pangkalan militer di Bahrain. Alam, *The Shah and I,* 50.
38. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 99-100.
39. Walter Isaacson, *Kissinger: A Biography* (New York: Touchstone, 1992), 563.
40. Dokumen ini tersedia di Arsip Dewan Keamanan Nasional, http://gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBBB/NSAEBB21/03-01.htm.
41. *International Financial Statistcs Yearbook,* Dana Moneter Internasional, 1991. *World Development Report,* Bank Dunia, 2003.

Bab 4—Pencarian Supremasi Iran

Epigraf: Wawancara dengan mantan wakil komandad angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.

1. R.K. Ramazani, *Revolutionary Iran: Challenge and Response in the Middle East* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1988), ch. 2.
2. Mohammad Reza Pahlavi, *Answer to History* (New York: Stein and Day, 1980), 142.
3. Wawancara dengan mantan diplomat Iran di bawah rezim Shah, Washington, D.C., 2 April 2004.
4. Wawancara dengan Gholam-Reza Afkhami, mantan penasihat Mohammad Reza Shah, Washington, D.C., 5 Maret 2004. Shah memandang Iran dan Jepang sebagai negara paling maju di Asia; sehingga dia percaya Jepang harus memimpin Asia timur, sementara Iran harus memimpin di Asia barat. Asadollah Alam, *The Shah and I,* ed. Alinaghi Alikhani (New York: St. Martin's, 1991), 389. Mohammad Reza Pahlavi, *Mission for My Country* (London: Hutchinson of London, 1960), 132.
5. Wawancara dengan Charles Naas, Washington, D.C., 8 Maret 2004.
6. Wawancara dengan Afkhami, 5 Maret 2004.
7. Alam, *The Shah and I,* 185.
8. Departemen Luar Negeri AS, Biro Verifikasi dan Penyesuaian.
9. Belanja militer Arab Saudi meningkat tajam, khususnya pasca 1973, ketika negara ini tumbuh berlipat-lipat dalam beberapa tahun terakhir. Negara Arab lainnya yang berkembang pesat adalah Irak, yang, di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, mulai mempersenjatai dirinya.
10. Secara historis, peperangan besar terjadi ketika berbagai perbedaan antara kekuatan negara dan peran politik mereka tidak bisa lagi dikompromikan. Ketidakseimbangan ini terjadi dalam situasi politik yang hanya bisa diselesiakan dengan perang. Singkat kata, negara ini dapat diberikan ruang oleh tetangga-tetangga mereka atau mendapatkannya melalui peperangan. Menurut Charles Doran, peran sebuah negara adalah mata uang dari kekuatan negara tersebut, yaitu kemampuan negara untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan regional dan meningkatkan kepentingannya tanpa harus melakukan paksaan. Tidak seperti "kekuatan", "peran" diberikan kepada sebuah negara dari tetangga-tetangganya dengan mengakui keabsahan kepentingan negara-negaranya. Ketika kekuatan sebuah negara tumbuh, maka negara itu perlu mengembangkan perannya untuk menjadi bagian dari keputusan yang berdampak pada pertumbuhan pengaruhnya. Dengan tidak memiliki peran semacam ini, sebuah negara akan menghadapi kesulitan besar untuk mempertahankan kekuatannya. Teori *power cycle* dari Doran ini memberikan penjelasan yang luas terhadap dinamika antara "peran" (*role*) dan "kekuatan" (*power*). Lihat Charles Doran, *The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1971).
11. Wawancara dengan Afkhami, 5 Maret 2004.
12. Ibid.
13. Wawancara dengan Davoud Hermidas-Bavand, guru besar di Universitas Shahid Beheshti dan mantan diplomat Iran, Teheran, 8 Agustus 2004.
14. Wawancara dengan mantan diplomat senior Iran yang ditempatkan di Teheran, Tel Aviv, 12 Agustus 2004.
15. Wawancara dengan mantan diplomat Iran yang ditempatkan di Israel, Teheran, 12 Agustus 2004. Karena alasan ini, Shah menyambut Sultan Oman dengan penuh hormat. Pada Juni 1976, setelah kunjungan singkat Sultan ke Teheran, Shah memberitahu

Kepala Pengadilan Asadollah Alam bahwa para penguasa Arab merupakan "orang baik. Dia tidak melakukan suatu hal tanpa meminta izin kami." Alam, *The Shah and I,* 495.

16. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 104.
17. Hooshang Amirahmadi dan Nader Entessar, *Reconstruction and Regional Diplomacy in the Persian Gulf* (London: Routledge, 1992), 230-231.
18. Hooshang Amirahmadi dan Nader Entessar, *Iran and the Arab World* (New York: St. Martin's, 1993), 201. Sejarawan terkemuka, Nikki Keddie menulis bahwa meskipun ketegangan Persia-Arab sudah terjadi sejak Aran menaklukan Iran, paradigma nasionalisme Persia abad 20 secara keliru mempertahankan bahwa permusuhan antara dua bangsa ini merupakan hal yang usang dan tidak berubah. Menurut Keddie, ada bukti kuat bahwa Iran pra-modern lebih dikenal sebagai Syiah daripada Iran itu sendiri. Lihat Nikki Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution* (New Haven: Yale University Press, 2003).
19. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948–1988* (New York: Praeger,1989),103.
20. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
21. Wawancara via telpon dengan Duta Fereydoun Hoveyda, mantan kepala Misi Permanen Iran untuk PBB, Washington, D.C., 3 Maret 2004.
22. Wawancara via telpon dengan Abbas Maleki, wakil menteri luar negeri Iran pada awal hingga pertengahan 1990-an, Genewa, 27 Januari 2005.
23. Sobhani, *Pragmatic Entente*,104.
24. Wawancara dengan Hermidas-Bavand, 8 Agustus 2004.
25. Wawancara dengan Wakil Menteri M.Vakilzadeh, Washington, D.C., 28 Februari 2004.
26. Memo Intelijen CIA, "Iran: The Shah's Lending Binge," December 1974. Dokumen tersedia di *National Security Archives*.
27. Wawancara dengan mantan wakil Duta Besar Iran untuk Amerika, Mehdi Ehsassi, Teheran, 3 Agustus 2004.
28. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 77.
29. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
30. William Quandt, *Peace Process* (Los Angeles: University of California Press, 1993), 148.
31. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 96. Wawancara via telpon dengan Soli Shavar, guru besar di Universitas Haifa, Haifa, 28 Oktober 2004.
32. Israel merupakan aset berharga bagi Iran dalam konteks bahwa Israel "telah menyita begitu banyak energi Arab." Wawancara dengan Afkhami, 5 Maret 2004. Iran tahu bahwa "menguatnya Israel akan membuat negara-negara Arab memandang Israel sebagai ancaman yang lebih besar dibandingkan Iran." Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
33. Wawancara dengan Yitzak Segev, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
34. Menurut mantan pejabat intelijen Iran, dari perspektif Iran, Mesir sudah berubah dari musuh dan rival menjadi sekutu dalam waktu kurang dari dua tahun sebagai konsekwensi dari munculnya Anwar Sadat. Wawancara dengan mantan pejabat intelijen Iran, Washington, D.C., 14 Maret 2004.

35. Shahram Chubin dan Mohammad Fard-Saidi, "Recent Trends in Middle East Politics and Iran's Foreign Policy Options," *The Institute for International Political and Economic Studies* (Agustus 1975): 79.
36. Setelah mendapatan kekuasaan di Teluk Persia dari Inggris—sebuah hadiah kiriman-Tuhan menurut seorang diplomat Iran—Sah tidak ingin menyerahkannya kepada Amerika atau Soviet. Wawancara via telpon dengan Hoveyda, 3 Mareh 2004.
37. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran,16 Maret 2004.
38. Peran Iran sebagai pemberi jaminan keamaan di Teluk meniscayakan adanya pengusiran Uni soviet dari wilayah tersebut. "Kami tentu saja bisa melihat bahaya dari kehadiran Soviet di Teluk Persia; kami tidak menginginkan hal tersebut." Wawancara dengan mantan duta besar Irani untuk Afrika Selatan, New York, 26 Februari 2004. Sementara Iran tidak dapat menandingi kekuatan Moskow, Iran tetap dapat menghalangi Uni Soviet untuk mendapatkan alibi untuk masuk ke perairan hangat di Teluk Persia. "Shah selalu memandang (munculnya kembali kekuatan besar di Teluk) akan berdampak buruk bagi Iran dan bagi wilayah tersebut." Wawancara dengan Afkham, 5 Maret 2004.
39. *Documents of the United States Embassy in Teheran*, Volume 8, 1979, 65.
40. Wawancara dengan Ehsassi, 3 Agustus 2004.
41. Pollack, *Persian Puzzle*,105.
42. Wawancara dengan Afkhami, 5 Maret 2004.
43. R. K. Ramazani, "Iran and the Arab-Israeli Conflict," *Middle East Journal* 3 (1978): 421.
44. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 84.
45. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 82.
46. Alam, *The Shah and I*, 326.
47. Kayhan, 1 Desember, 1973; dikutip dari Ramazani, "Iran and the Arab-Israeli Conflict," 418–420.
48. Alam, *The Shah and I*, 325–326. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
49. Wawancara dengan mantan duta besar Iran untuk Afrika Selatan, New York, 26 Februari 2004.
50. Wawancara dengan Alinaghi Alikhani, mantan menteri keuangan di bawah rezim Shah, Washington, D.C., 7 April 2004.
51. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 89.
52. Wawancara dengan mantan duta Iran untuk Afrika Selatan, New York, 26 Februari, 2004.
53. Wawancara via telpon dengan Hoveyda, 3 Maret 2004.
54. Wawanca telpon dengan Soli Shavar, professor di Universitas Haifa, Haifa, 28 Oktober 2004.
55. Wawancara dengan Ehsassi, 3 Agustus 2004.
56. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004. Wawancara dengan mantan diplomat Iran yang ditempatkan di Israel, Teheran, 12 Agustus 2004.
57. Mustafa Alani,"Probable Attitudes of the GCC States Towards the Scenario of a Military Action Against Iran's Nuclear Facilities," Gulf Research Center, 2004,11.

Bab 5—Menyambut Kematian dalam Momentum Kemenangan

Epigraf: Wawancara dengan Yaacov Nimrodi, Savion (Tel Aviv), 19 Oktober 2004.

1. Wawancara dengan mantan diplomat senior Israel ditempatkan di Teheran, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
2. Memo rahasia dari kedutaan Amerika Serikat di Iran, 21 Juni 1977. Dokumen ini tersedia di *National Security Archives*.
3. Wawancara dengan Uri Lubrani, Tel Aviv, Oktober, 2004. Penerbit Mage baru-baru ini menerbitkan *Shahname* berbahasa Inggris.
4. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press,1988), 83–84.
5. Wawancara via telpon dengan Soli Shavar, Haifa, 28 Oktober 2004.
6. Segev, *Iranian Triangle*, 87–88.
7. R. K. Ramazani, "Iran and the Arab-Israeli Conflict," *Middle East Journal* 3 (1978): 420–421.
8. Wawancara dengan mantan diplomat senior Israel yang ditempatkan di Tehran, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
9. Suku Kurdi merupakan dari wilayah geokultural yang saling berdekatan termasuk sebagian wilayah Iran, Irak, Syria, dan Turki. Beberapa komunitas yang lebih kecil bisa juga ditemukan di Lebanon, Armenia, dan Azerbaijan. Sejarawan Yunani kuno, Xenophon, merujuk pada suku Kurdi di Anabisis sebagai "Kardukhi, sebuah masyarakat-yang tinggal-di pegunungan yang galak dan protektif" yang menyerang pasukan Yunani pada tahun 400 SM.
10. Wawancara dengan Eliezer Tsafrir, Tel Aviv, 16 Oktober 2004.
11. Wawancara dengan mantan Wakil Duta Besar Iran untuk PBB, Mehdi Ehsassi, Tehran, 3 Agustus 2004.
12. Wawancara dengan Tsafrir, 16 Oktober 2004.
13. David Kimche, *The Last Option* (New York: Maxwell MacMillan International, 1991), 189.
14. Nader Entessar,"Israel and Iran's National Security," *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* 4 (2004): 2–4.
15. Kerjasama Israel-Iran-Kurdi semakin intensif selama 1960-an. Pada akhir 1965, instruktur militer Israel membangun kamp permanen di utara Irak untuk melatih pasukan gerilya Kurdi. Setelah perang 1967, volume kiriman senjata Israel semakin meningkat ketika senjata buatan-Soviet yang diambil dari Mesir dan Syria dikirimkan ke pasukan pimpinan Barzani, dan, pada 1969, sebagai akibat dari ketegangan antara kedua negara di wilayah utara Teluk Persia, Teheran mengirimkan pasukan reguler berseragam Kurdi ke wilayah Irak untuk mendukung pasukan Kurdi di Irak. Pada awal 1970-an, terjadi negosiasi antara Bahgdad dan Mustapha Barzani yang akan mengakhiri pemberontakan Kurdi di utara Irak. Hal mendapatkan perhatian besar dari Shah, yang khawatir bahwa tanpa pemberontakan Kurdi, Iran akan lebih mengkonsentrasikan kekuatannya pada wilayah perbatasan Iran. Namun, Barzani gagal mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Irak, dan pemberontakan berlanjut, begitu juga dengan dukungan Israel dan Iran terhadap pemberontakan ini. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948-1988* (New York: Preager Publishers, 1989, 46-47. Wawancara dengan Alinaghi Alikhani, mantan menteri keuangan di bawah rezim Shah, Washington, D.C., 7 April 2004. Kimche, *Last Option,* 194.

16. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004),105.
17. Shahram Chubin dan Mohammad Fard-Saidi,"Recent Trends in Middle East Politics and Iran's Foreign Policy Options," *The Institute for International Political and Economic Studies* (Agustus 1975): 87.
18. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 86.
19. Kimche, *Last Option*, 194.
20. Wawancara dengan Yaacov Nimrodi, Savion (Tel Aviv), 19 Oktober 2004.
21. Wawancara dengan Tsafrir, 16 Oktober 2004.
22. Asadollah Alam, *The Shah and I*, editor Alinaghi Alikhani (New York: St.Martin's, 1991), 415–417.
23. Gary Sick, *October Surprise* (New York: Random House, 1991), 61-62. Pembagian jalur air terjadi sejak Perjanjian Konstantinopel tahun 1913 antara Iran dna Kerajaan Utsmani. Teheran percaya ahwa perjanjian ini telah memberikan keistimewaan luar biasa bagi Irak terhadap jalur perairan yang seharusnya menjadi hak dunia internasional. Shah sudha sejak dulu berusaha untuk menegosiasikan kembali perjanjian tersebut, dan kedua negara hampir berperang mengenai persoalan ini pada 1969.
24. Alam, *The Shah and I*, 417, 409,418.
25. Wawancara dengan Tsafrir, 16 Oktober ,2004.
26. Wawancara dengan Gary Sick, New York, 25 Februari 2004.
27. Wawancara dengan Charles Naas,Washington, D.C., 8 Maret 2004.
28. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004. Kenyatannya, Shah dengan bangga menjelaskan dalam bukunya *Mission for My Country* bahwa hubungan antara AS dan Iran merupakan hubungan sejajar, sebuah perspektif hanya sedikit dari Teheran dan Washington yang menyetujuinya. Lihat Mohammad Reza Pahlavi, *Mission for My Country* (London: Hutchinson of London,1960),130.
29. Alam, The Shah and I, 417. Kimche, Last Option, 195. Wawancara dengan mantan diplomat Iran ditempatkan di Israel, Tehran, 12 Agustus,2004.
30. Wawancara dengan mantan diplomat Iran di bawah Shah, Washington D.C., 2 Apri, 2004.
31. Wawancara dengan Tsafrir,2004.
32. Kimche,The Last Option,195.
33. John A. Conway,"The Kurds and Israel," *Newsweek*, 7 April 1975,17.
34. Wawancara dengan Tsafrir, 16 Oktober 2004**.** Kimche, *Last Option*,195–196. Iran sendiri tidak memiliki banyak waktu; diperkirakan seratus buah altileri Iran, begitu juga rudal anti-tank dan rudal anti-pesawat, harus dihancurkan karena Teheran tidak punya waktu untuk membawa persenjataan ini kembali melewati wilayah perbatasan. Alam, *The Shah and I,* 419. Klan Barzani juga melarikan diri ke Iran dan menjadi pengungsi di Karaj, di luar Teheran. Pasukan Kurdi menginginkan kerjasama dengan Israel berlanjut dengan meminta angkatan udara Israel mengirimkan bantuan dengan parasut, tetapi Israel menilai kerjasama antara Israel dengan Kurdi tidak mungkin dilakukan tanpa akses yang disediakan Iran. Pasukan Irak memanfaatkan situasi yang baru ini dan dengan cepat menyerang pasukan Kurdi yang ditinggalkan sekutunya, dan mengalami kekalahan besar. Ratusan orang tewas, dan lebih banyak lagi orang yang

terpaksa dipindahkan ke selatan Iran sebagai bagian dari usaha Saddam Hussein untuk membersihkan wilayah utara Irak dari etnis Kurdi. Kimche, *Last Option,* 195-196.

35. Wawancara dengan mantan menteri kabinet Iran, Potomac, Februari 2004. Identitas menteri ini dirahasiakan demi perlindungan narasumber.
36. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
37. Wawancara dengan mantan duta besar Iran untuk Afrika Selatan, New York, 26 Februari 2004.
38. Wawancara dengan Mehdi Ehsassi, 3 Agustus 2004.
39. Alam, *The Shah and I*, 418.
40. Wawancara dengan Alikhani, 7April 2004. Beberapa pejabat Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung negosiasi—di belakang layar—dan peduli sepenuhnya terhadap isi negosiasi tersebut. (Wawancara dengan mantan duta besar Iran untuk Denmark dan Yunani, Washington, D.C., 2 April 2004.)
41. Alam, *The Shah and I*, 417–419.
42. Wawancara dengan Alikhani, 7April 2004.
43. Wawancara dengan Naas, 8 Maret 2004.
44. Wawancara dengan Henry Precht, mantan pejabat urusan Iran di Departemen Luar Negeri AS, Washington, D.C., 3 Maret 2004. Tetapi, diplomat Iran berpandangan bahwa Amerika Serikat juga menyatakan puas dengan kesepakatan tersebut, karena kesepakatn ini memberikan Iran, sebagai sekutu AS, kekuatan tambahan untuk melawan pemerintahan Irak yang didukung oleh Uni Soviet. (Wawancara dengan Ehsassi, 3 Agusutus 2004.)
45. Kimche, *Last Option*, 195.
46. Wawancara dengan Tsafrir, 16 Oktober 2004.
47. Wawancara dengan Yaacov Nimrodi, Savion (Tel Aviv), 19 Oktober 2004.
48. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 108.
49. Wawancara dengan mantan duta besar Iran untuk Afrika Selatan, New York, 26 Februari 2004.
50. Pengeluaran militer Tehran naik tiga kali lipat antara tahun 1973 hingga 1975, dari 6,1 milyar dollar menjadi 15,6 milyar dollar.
51. Pollack, *Persian Puzzle*, 108.
52. Wawancara dengan mantan diplomat Iran di bawah pemerintahan Shah, Washington, D.C., 2 April 2004.
53. Wawancara dengan Alikhani, 7 April 2004. Sebagai tambahan, Shah khawatir bahwa Amerika Serikat akan menjua rudal Pershing ke Israel yang mampu membawa hulu ledak nuklir Israel dengan menggunakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Telegram rahasia—yang sudah dideklasifikasi—Departemen Luar Negeri AS, September 1970. Dokumen ini tersedia di *National Security Archives*.
54. Joseph Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," dalam *The Iraq-Iran War: Impact and Implications*, editor Efraim Karsh (New York: St.Martin's, 1989), 157.
55. Andrew Parasiliti, "Iraq's War Decisions," Disertasi Doktoral di Universitas Johns Hopkins,1998, 36, 85–86.
56. Wawancara dengan Gholam-Reza Afkhami, mantan penasehat Mohammad Reza Shah, Washington, D.C., 5 Maret 2004.

57. Wawancara dengan Davoud Hermidas-Bavand, guru besar di Universitas Shahid Beheshti dan mantan diplomat Iran, Tehran, 8 Agustus 2004.
58. Parasiliti, "Iraq's War Decisions," 36.
59. Wawancara dengan Tsafrir, 16 Oktober 2004.
60. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004

Bab 6—Megalomania

Epigraf: Asadollah Alam, *The Shah and I*, editor Alinaghi Alikhani (New York: St. Martin's,1991), 477.

1. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004. "Iran memiliki ambisi yang tiak mungkin dimiliki Israel. Yaitu ambisi kepemimpinan, ambisi interaktifitas, ambisi untuk melakukan manuver melampaui wilayah Teluk Persia," Wawancara dengan Gholam-Reza Afkhami, mantan penasihat Mohammad Reza Shah, Washington, D.C., 5 Maret 2004.
2. Wawancara dengan mantan diplomat Iran di Israel, Tehran, 12 Agustus 2004.
3. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 73.
4. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948–1988* (New York: Praeger, 1989), 89.
5. Dalam beberapa literatur Syiah konservatif, kelompok di luar Syiah, termasuk Yahudi, dianggap sebagai najis, kotor. Sebagaimana yang disampaikan Segev, anti-Semitisme yang dihadapi Israel cenderung memiliki akar keagamaan daripada akar politik. Wawancara dengan Yitzak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
6. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
7. "Kami di Kementerian Urusan Luar Negeri berpikir bahwa kami seharusnya tidak bekerja sama dengan Israel. Saya secara pribadi tidak pernah berusaha memmbuat Israel merasa bahwa Saya seratus persen bersama mereka," seorang mantan wakil duta besar Iran untuk PBB menjelaskan. Wawancara dengan mantan wakil duta besar Iran untuk PBB, Mehdi Ehsassi, Teheran, 3 Agustus 2004.
8. Wawancara dengan mantan diplomat Iran di bawah rezim Shah, Washington, D.C., 2 April 2004.
9. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 86–87.
10. Baik Shah maupun menteri luar negerinya, Ardeshir Zahedi, tidak menyikapi Israel dengan penuh hormat. Diskusi diantara mereka mengenai Israel seringkali dipenuhi ketidaksopanan dan kejutan. Wawancara dengan mantan diplomat Iran yang ditempatkan di Israel, Teheran, 12 Agustus 2004.
11. Wawancara dengan Henry Precht, mantan pejabat urusan Iran di Departemen Luar Negeri AS, Washington, D.C., 3 Maret 2004.
12. Wawancara dengan mantan diplomat senior Israel yang ditempatkan di Teheran, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
13. Wawancara via telpon dengan Duta Besar Fereydoun Hoveyda, mantan kepala Misi Permanen Iran Untuk PBB, Washington, D.C., 3 Maret 2004. Pada Januari 1976, Kementerian Luar Negeri Israel menghubungkan Shah dengan Yahudi-Amerika yang bekerja sebagai konsultan hubungan masyarakat, Daniel Yankelovich. Usaha untuk memperbaiki citra Iran dan menggiring opini publik AS yang menguntungkan

kekuasaan Shah kemudian dikerjakanoleh sebuah lembaga baru bernama, *Center for Media Research,* agar keterlibatan Israel dalam kolaborasi ini tidak mendapatkan sorotan publik. Tetapi kampanye media ini ternyata gagal, terutama karena harapan Iran yang telalu tinggi. Pada akhir 1979, Shah kehilangan kepentingan dalam proyek ini, meskipun dia masih yakin bahwa media di Amerika berada di bawah kontrol "Yahudi Dunia". "Dia tidak pernah berhenti dari keyakinan ini," Hoveyda bercerita. Asadollah Alam, *The Shah and I*, editor Alinaghi Alikhani (New York: St. Martin's, 1991), 458, 463–464.

14. Alireza Nourizadeh, "Israel and the Jews: Drawing on Ancient Traditions," *(Beirut) Daily Star*, 26 Oktober 2002.
15. Massoume Price, "A Brief History of Iranian Jews," Culture of Iran, http://www.cultureofiran.com/iranian_jews.php.
16. Agen-agen Yahudi-Eropa mendorong migrasi ini dengan menawarkan insentif keuangan bagi warga Yahudi yang pindah ke Israel. Para diplomat Israel menahan diri untuk terlibat dalam migrasi Yahudi Iran ke Israel dan membiarkannya agar ditangani oleh berbagai komite-komite Zionis. Sebuah Memorandum Percakapan Rahasia, Sekretaris Kedua AS (Greene) dan Sekretaris Pertama Israel (Tourgeman) di Teheran, 22 Desember 1965. Dokumen ini tersedia di *National Security Archives*. Tidak seperti minoritas Yahudi lainnya, Yahudi Iran yang, untuk sebagian besar, cukup asing dari semangat ideologi Zionisme. Salah satu responden di Uniersitas Teheran menjelaskan bahwa identitas ke-Yahudi-annya, yang masih menjadi identitas kedua dari identitas ke-Iran-annya, hanya digunakan setelah dia tiba di Israel. Hormoz Shahdadi,"Immigration of Iranian Jews to Israel: The Effect of National Identity," *Relations Internationales,* Center for International Studies, Universitas Teheran (1974), 117-136. Para pemimpin Israel juga sangat perhatian dengan kuatnya identitas Iran dari Yahudi Iran, begitu juga dengan dukungan alakadarnya terhadap negara Israel. Menurut salah satu pejebat di Agen Yahudi, komunitas Yahudi Iran pada 1970-an "telah menjadi Persia" dan "tidak begitu membantu Israel sebagaimana yang diharapkan." Percakapan rahasia antara kedutaan AS di Tel Aviv dan Departemen Luar Negeri AS, 30 April 1976. Dokumen ini tersedia di *National Security Archives.*
17. Wawancara dengan Ehsassi, 3 Agustus 2004.
18. Wawancara dengan Ehsassi, 3 Agustus 2004.
19. Wawancara dengan Davoud Hermidas-Bavand, professor di *Shahid Beheshti University* dan mantan diplomat Iran, Teheran, 8 Agustus 2004.
20. Wawancara dengan mantan diplomat Iran, Washington, D.C.,April 2,2004.
21. Wawancara via telpon dengan Hoveyda, 3 Maret 2004.
22. Alam, *The Shah and I*, 451.
23. Wawancara dengan mnatan diplomat senior Israel yang ditempatkan di Tehran, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
24. Andrew Parasiliti, "Iraq's War Decisions," Disertasi Doktoral di Universitas Johns Hopkins,1998, 37.
25. Alam, *The Shah and I*, 477. Wawancara dengan Hermidas-Bavand, 8 Agustus 2004.
26. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004. Pada 1974, Shah sudah menunjukkan kecenderungannya untuk melebih-lebihkan posisi Iran dalam urusan internasional. Dalam sebuah presentasi terhadap duta besar Jerman pada 9 Juni 1974, Shah tersinggung dengan ketidakmampuan Jerman untuk

membedakan antara Iran *pada masa lalu* dengan Iran yang sudah dikembangkan oleh Shah. Dengan sikap non-diplomatik, Shah menyatakan bahwa jika :Jerman ingin membangun hubungan baik dengan Iran, maka langkah terbaik adalah dengan belajar untuk menjaga wilayahnya." Alam, *The Shah and I,* 375.

27. Wawancara dengan Hermidas-Bavand, 8 Agustus 2004.
28. Wawancara dengan Charles Naas, Washington, D.C., 8 Maret 2004.
29. Wawancara dengan Precht, 3 Maret 2004.
30. Wawancara dengan Yitzak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
31. Wawancara dengan Alinaghi Alikhani, mantan pegawai keuangan di bawah Shah, Washington, D.C., 7 April 2004.
32. *Department of State Scope Paper*, 15 Agustus 1967. Dokumen ini terdapat di *National Security Archives*.
33. Wawancara via telpon dengan Hoveyda, 3 Maret 2004.
34. Wawancara dengan Ehsassi, 3 Agustus 2004.
35. Alam, *The Shah and I*, 176.
36. Abbas Milani, *The Persian Sphinx* (Washington, D.C.: Mage, 2004).
37. Wawancara dengan Menteri Pertanian A.A.Ahmadi, Washington, D.C., 28 Februari 2004.

Bab 7—Munculnya Begin and Kelompok Sayap Kanan Israeli

Epigraf: Documen di Kedutaan Besar AS di Teheran, Volume 19, 1979, 4. *National Security Archives.*

1. William Quandt, *Peace Process* (Los Angeles: University of California Press,1993), 261.
2. Ilan Peleg, Begin's Foreign Policy 1977–1983: Israel's Move to the Right (New York: Greenwood, 1987),18.
3. Peleg, *Begin's Foreign Policy*, 7, 58.
4. Shlomo Avineri,"Ideology and Israeli Foreign Policy,"*Jerusalem Quarterly* 37 (Winter 1986): 4–6.
5. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948–1988* (New York: Praeger,1989), 98–99.
6. Peleg, *Begin's Foreign Policy*, 52.
7. Dan Fichter, "Extremists and Pragmatists: Israel's Far Right," *Yale Israel Journal* 3 (2004).
8. Peleg, *Begin's Foreign Policy*, 181–182.
9. Wawancara dengan mantan diplomat senor Israel yang ditempatkan di Teheran, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
10. Gary Sick, *All Fall Down: America's Tragic Encounter with Iran* (New York: Random House,1985), 22. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 60.
11. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 99.
12. Wawancara dengan mantan wakil duta besar Iran untuk PBB, Mehdi Ehsassi, Teheran, 3 Agustus 2004.
13. Wawancara dengan mantan diplomat Iran yang ditempatkan di Israel, Teheran, 12 Agustus 2004.
14. R.K.Ramazani, "Iran and the Arab-Israeli Conflict," *Middle East Journal* 3 (1978): 424.
15. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 101.

16. *U.S.News & World Report*, 22 Maret 1976.
17. "Morocco, Iran Issue Joint Communiqué," *Xinhua*, 3 Februari 1977.
18. "Iran, Egypt Issue Joint Communiqué," *Xinhua*, 17 Maret 1977.
19. "Kuwaiti Foreign Minister Visits Iran," *Xinhua*, 3 Mei 1977.
20. Wawancara via telpon dengan Duta Besar Fereydoun Hoveyda, mantan kepala Misi Permanen Iran untuk PBB, Washington, D.C., 3 Maret 2004.
21. Dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tehran, Volume 19, 1979, 4. Dokumen terdapat di *National Security Archives*.
22. Wawancara dengan Gholam-Reza Afkhami, penasehat Mohammad Reza Shah, Washington, D.C., 5 Maret 2004.
23. Wawancara dengan mantan duta besar Iran untuk Afrika Selatan, New York, 26 Februari 2004.
24. Wawancara via telpon dengan Hoveyda, 3 Maret 2004.
25. Dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tehran, Volume 19, 1979, 1-3. Dokumen terdapat di *National Security Archives*.
26. Quandt, *Peace Process*, 270.
27. Wawancara dengan Afkhami, 5 Maret 2004.
28. Arnaud de Borchgrave, "The Shah on War and Peace," *Newsweek*, 14 November, 1977, 69.
29. Moshe Dayan, *Breakthrough* (New York: Alfred Knopf, 1981), 106–107.
30. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 126–128.
31. Ramazani, "Iran and the Arab-Israeli Conflict," 423–424.
32. *Washington Post*, 10 Januari 1978.
33. Wawancara dengan Afkhami, 5 Maret 2004. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 100.
34. Wawancara dengan mantan diplomat senior Israel yang ditempatkan di Teheran, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
35. Rudal Scud milik Irak menjadi satu dari senjata Baghdad paling menakutkan dalam perang dengan Irak-Iran. Melalui akses Irak terhadap teknologi rudal, Irak mampu menyerang Tehran dari wilayah Irak sendiri.
36. Borchgrave, "The Shah on War and Peace," 70.
37. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 129. Perang Irak-Iran di kemudian hari menunjukkan bahwa rudal Scud merupakan senjata destruktif yang dimiliki Irak yang tidak membuat Irak tidak mampu mencegah dan melindungi diri dari senjata tersebut.
38. Wawancara dengan mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
39. Dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Volume 19, 1979, 4. *National Security Archives*.
40. Elaine Sciolino, "Documents Detail Israeli Missile Deal with the Shah," *New York Times*, 11 April 1986. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 116.
41. Martin Bailey, "The Blooming of Operation Flower," *Observer*, 2 Februari 1986, 19; Sciolino, "Documents Detail Israeli Missile Deal."
42. Sciolino,"Documents Detail Israeli Missile Deal."
43. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 116.
44. Dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Volume 19, 1979, 4. *National Security Archives*.

45. Dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, 36 (1979), 29. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 119.
46. Sciolino,"Documents Detail Israeli Missile Deal."
47. Wawancara mantan wakil panglima tertinggi angkatan laut Iran, 16 Maret 2004.
48. Sobhani, *Pragmatic Entente*,115.
49. Dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Volume 19, 1979, 4. *National Security Archives*.
50. Wawancara dengan Yitzak Segev ,mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004. Diskusi dengan pejabat senior pemerintah Iran, Paris, 19 Januari 2006.
51. Wawancara dengan Eliezer Tsafrir, yang bekerja sebagai kepala Mossad di Iran dan Irak pada 1960-an dan 1970-an, Tel Aviv, 16 Oktober 2004.
52. Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (London: Researchers, 1988), 38.

Bab 8—Masuklah Wahai Ayatollah!

Epigraf: Wawancara dengan Yitzak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.

1. William Sullivan, *Mission to Iran* (New York: WW Norton, 1981), 62.
2. Wawancara dengan Eliezer Tsafrir, kepala Mossad di Iran, Tel Aviv, 16 Oktober 2004.
3. Wawancara dengan Yitzak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
4. Wawancara dengan pejabat Israel, Tel Aviv, Oktober 2004.
5. Wawancara dengan mantan diplomat senior Israel yang ditempatkan di Tehran, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
6. Henry Paolucci, *Iran, Israel and the United States* (New York: Griffon House, 1990), 208.
7. Wawancara dengan pejabat Israel, Tel Aviv, Oktober 2004.
8. Wawancara dengan Yitzak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
9. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948-1988* (New York: Praeger, 1989), 135.
10. Wawancara dengan Segev, 17 Oktober 2004.
11. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 114-115.
12. Paolucci, *Iran, Israel and the United States,* 208.
13. Nader Entessar,"Israel and Iran's National Security," *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* 4 (2004): 4.
14. David Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran* (London: Frank Cass, 2001), 266.
15. Shireen Hunter, *Iran and the World* (Indianapolis: Indiana University Press, 1990), 40-41.
16. Akar sentimen anti-Israel di Iran terjadi sejak pembentukan Negara Yahudi itu sendiri. Ayatollah Mahmood Taleqani, seorang mullah terkemuka yang kemudian menjadi imam Shalat Jumat setelah kemenangan Revolusi Islam, merupakan intelektual Iran pertama yang membicarakan topik ini. Pada 1955, dia berkunjung ke wilayah Yerusalem yang berada di bawah kontrol Yordania untuk menghadiri sebuah konferensi mengenai konflik Israel-Palestina. Kunjungan ini memberikan kesan bagi sang mullah. Segera setelah kunjungan ini, dia menulis sebuah buku mengenai penderitaan rakyat Palestina yang mampu mewarnai pandangan publik Iran mengenai

konflik tersebut. Intelektual berpengaruh lainnya yang berkontribusi pada sentimen pro-Palestina di Iran adalah Sham Al-e Ahmad. Meskipun awalnya dia pengagum Negara Yahudi, sebuah kunjungan ke negara ini membuat pandangannya berubah. Wawancara dengan seorang mantan wakil menteri luar negeri Iran yang memiliki hubungan dekat dengan Ayatollah Taleqani, 1 Agustus 2004, Teheran.

17. Nikki Keddie, *Modern Iran: Roots and Result of Revolution* (New Haven: Yale University Press, 2003), 232.
18. Wawancara via telpon dengan Nader Entessar, 25 Januari 2005, Washington, D.C.
19. Entessar,"Israel and Iran's National Security," 5. Menashri, *Post-Revolutionary Politics,* 269.
20. R.K. Ramazani,"Ideology and Pragmatism in Iran's Foreign Policy," *Middle East Journal* 4 (2004): 555.
21. Hunter, *Iran and the World,* 36. Wawancara dengan Mahmood Sariolghalam, guru besar di Shahid Beheshti University dan penasihat di *Iranian National Security Advisor*, 18 Agustus 2004, Teheran.
22. Wawancara dengan ahli strategi terkemuka Iran yang berhaluan reformis, 2 Maret 2004, Washington, D.C.
23. Entessar,"Israel and Iran's National Security," 5.
24. Wawancara dengan mantan wakil menteri luar negeri Iran, 1 Agustus 2004, Teheran.
25. Entessar,"Israel and Iran's National Security," 5.
26. Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (London: Researchers, 1988), 45.
27. Wawancara via telpon dengan Entessar, 25 Januari 2005.
28. Telegram Rahasia Departemen Luar Negeri AS dari Kedutaan Besar AS di Teheran, dari Oktober 1979, dikirim oleh *Charge d'Affaires*, Bruce Laingen. Dokumen tersedia di *National Security Archives*.
29. Wawancara dengan mantan wakil perdana menteri Iran, 1 Agustus 2004, Teheran. Wakil menteri luar negeri merupakan bagian dari delegasi Iran untuk menyambut Arafat di bandara.
30. Souresrafil, *Khomeini and Israel*, 46.
31. Komunikasi rahasia dari Kedutaan Besar AS di Teheran, akhir September 1979. Dokumen tersedia di *National Security Archives*.
32. Beberapa tahun kemudian, PLO dan Amal melakukan pertempuran berdarah untuk memperebutkan kontrok atas wilayah Barat Beirut. Entessar, "Israel and Iran's National Security," 6.
33. Souresrafil, *Khomeini and Israel*, 48.
34. Entessar, "Israel and Iran's National Security," 6.
35. Memo rahasia dari Departemen Luar Negeri AS, 30 September 1979. Dokumen tersedia di *National Security Archives*.
36. PLO mempertahankan hubungan baik dengan kelompok Islam-marxis, Mujahedeen-e Khalq (Masyarakat Mujahidin) dan pemimpinnya, Massoud Rajavi, salah satu rival terberat Khomeini. Pemimpin Mujahidin menerima Arafat dalam kunjungan keduanya ke Teheran, untuk merayakan ulang tahun revolusi pada Februari 1980, dan menjanjikan dukungannya kepada Palestina dengan memberikan Arafat senjata mesin yang diambil dari Israel. "Dalam revolusi Palestinalah untuk pertama kalinya kami memegang senjata. Tetapi pertempuran kami dengan imperialisme dan Zionisme masih berlangsung. Mohon terima senjata-mesin ini sebagai sebuah pemenuhan janji dari

(Mujahidin) yang, dengan alat ini, suatu hari nanti kita akan bertemu di Yerusalem yang sudah merdeka," Rajavi berbicara pada Arafat. (Hari ini, para legislator pro-Israel seperi anggota dalam *House Foerign Affairs Committee*, Ileana Ros-Lehtinen, mendukung Rajavi dan Mujahidin sebagai sebuah alternatif bagi rezim mullah di Teheran meskipun kelompok ini masuk dalam daftar teroris Departemen Luar Negeri AS. *Mojahed*, Esfand 6, 1358 (28 FebruarI 1980).

37. Anoushiravan Ehteshami, *After Khomeini* (New York: Routledge, 1995), 129. Souresrafil, *Khomeini and Israel*, 50.

Bab 9—Pergeseran Ideologis, Kelanjutan Geopolitis

Epigraf: Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.

1. Publikasi Memo Intelijen CIA,"Iran: Khomeini's Prospects and Views," 19 Januari 1979. Dokumen ini dipublikasikan pada 23 Januari 1986 dan tersedia di *National Security Archives*.
2. Shireen Hunter, *Iran and the World* (Indianapolis: Indiana University Press, 1990), 42.
3. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.
4. Wawancara dengan Duta Besar Javad Zarif, perwakilan Iran di PBB, New York, 1 April 2004.
5. Publikasi Memo Intelijen CIA,"Iran: Khomeini's Prospects and Views."
6. Peran Khomeini dalam tahapan awal aksi penyanderaan ini masih diperdebatkan. Menurut Nikki Keddie,"Aksi sandera ini, seperti yang terjadi sebelumnya, akan terjadi dalam waktu yang singkat jika tidak mendapatkan dukungan dari Khomeini, yang melihat dalam aksi tersebut sebuah kesempatan untuk menyingkirkan pemerintahan liberal, meradikalisasi proses revolusi, dan meningkatan kekuatannya." Nikki Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution* (New Haven: Yale University Press, 2003), 248–249.
7. Hunter, *Iran and the World*, 113.
8. Wawancara dengan mantan Menteri Keuangan, Dan Meridor, Tel Aviv, 7 Oktober 2004.
9. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 4.
10. Gary Sick, *October Surprise* (New York: Random House, 1991), 61–63.
11. Wawancara dengan David Kimche, Tel Aviv, 22 Oktober 2004.
12. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948–1988* (New York: Praeger, 1989), 145.
13. Wawancara dengan Yitzhak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
14. Israel Shahak,"How Israel's Strategy Favors Iraq over Iran," *Middle East International*, 9 Maret 1993, 19.
15. Wawancara dengan Yossi (Joseph) Alpher, mantan pejabat Mossad dan penasihat senior Ehud Barak, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
16. Joseph Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," dalam *The Iraq-Iran War: Impact and Implications*, editor Efraim Karsh (New York: St. Martin's, 1989), 157–159.
17. Ilan Peleg, *Begin's Foreign Policy 1977–1983: Israel's Move to the Right* (New York: Greenwood, 1987), 53.
18. Jakob Abadi, *Israel's Leadership: From Utopia to Crisis* (London: Greenwood, 1993), 64, 82, 155. Doktrin periperial dapat bertahan karena keyakinan para pemegang kebijakan

di Israel bahwa Israel tidak mampu berdamai dengan Arab. Wawancara dengan David Menashri, guru besar di Tel Aviv University, Tel Aviv, 26 Oktober 2004.
19. Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," 158, 155.
20. Wawancara dengan Zarif, 1 April 2004.
21. Seyed Assadollah Athari, "Iranian-Egyptian Relations," *Discourse: An Iranian Quarterly* 2 (2001): 53–55. Hingga saat ini, hubungan diplomatik antara Mesri dan Iran tidak kunjung membaik. Persoalan utamanya adalah bahwa Iran telah mengganti nama sebuah jalan di Teheran setelah Letnan Kolonenl Khalid al Islambuli, prajurit Mesir yang membunuh Sadar pada 6 Oktober 1981.
22. David Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran* (London: Frank Cass, 2001), 227.
23. A. Ehteshami dan R. Hinnebusch, *The Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 45.
24. Hunter, *Iran and the World*, 110.
25. Memo Rahasia Depatemen Luar Negeri AS, Kedutaan Besar AS di Teheran, Oktober 1979. Dokumen tersedia di *National Security Archives*.
26. Wawancara dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahmoud Vaezi, Teheran, 16 Agustus 2004. Kecurigaan Israel semakin bertambah dengan keterangan dari tahanan Savak tentang peran Israel dalam pelatihan agen Savak melalui teknik penyiksaan. Massoumeh Ebtekar, *Takeover in Tehran* (Vancouver: Talonbooks, 2000), 188.
27. Wawancara dengan Gary Sick, New York, 25 Februari 2004.
28. Sick, *October Surprise*, 61–65.
29. Segev, *The Iranian Triangle*, 5. Sick, *October Surprise*, 71. Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (London: Researchers, 1988), 61–62. Di kemudian hari, Carter berhasil menenangkan sebuah janji dari Begin untuk tidak menjual onderdil apapun ke Iran hinnga para sandera dibebaskan. Sick, *October Surprise*, 141.
30. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 147.
31. Souresrafil, *Khomeini and Israel*, 62. Tidak semua Yahudi-Iran melarikan diri. Setelah pertemuan dengan para pemimpin komunitas Yahudi, Khomeini mengeluarkan sbeuah fatwa—sebuah keputusan agama—yang menyatakan bahwa Yahudi dan kelompok minoritas lainnya mendapatkan perlindungan.
32. Wawancara via telpon dengan Nader Entessar, 25 Januari 2005.
33. "Iran Calls for Stopping Oil Supply to Countries Supporting Israel," *Xinhua*, 15 Agustus 1980.
34. Wawancara dengan Bijan Khajepour, Washington, D.C., 17 Februari 2004.
35. Anoushiravan Ehteshami, *After Khomeini* (New York: Routledge, 1995), 131.
36. Wawancara dengan Sick, 5 Februari 2004.

Bab 10—Saddam Menyerang!

1. Shireen Hunter, *Iran and the World* (Indianapolis Indiana University Press, 1990), 104.
2. Wawancara dengan Ali Reza Alavi Tabar, Teheran, 21 Agustus 2004.
3. Seyed Assadollah Athari, "Iranian-Egyptian Relations," *Discourse: An Iranian Quarterly* 2 (2001): 56.
4. Shireen Hunter, *Iran After Khomeini* (New York: Praeger, 1992), 84, 92, 113.
5. Barry Rosen, ed., *Iran Since the Revolution* (New York: Columbia University Press, 1985), 56–59.

6. Hal ini kemudian ditunjukkan melalui gempuran rudal Scud Irak terhadap Tel Aviv selama Perang Teluk Persia 1991.
7. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 124.
8. Anoushiravan Ehteshami, *After Khomeini* (New York: Routledge, 1995), 132.
9. Wawancara dengan Amir Mohebian, Teheran, 19 Agustus 2004.
10. Wawancara dengan A. A. Kazemi, mantan diplomat Iran dalam tahun-tahun pertama rezim Khomeini, Teheran, 16 Agustus 2004.
11. Hal ini terefleksikan, di antara hal lainnya, dalam kerjasama Iran dengan kelompok secular Ba'ats di Syria, begitu juga perdagangan senjatanya dengan Israel. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004. A.Ehteshami dan R. Hinnebusch, *The Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 47.
12. Nader Entessar, "Israel and Iran's National Security," *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* 4 (2004): 7.
13. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.
14. Kelompok mullah garis-keras sekalipun melihat "tidak ada salahnya mendapatkan senjata dari musuhmu." Terkait dengan ajaran Syiah yang membolehkan sikap kontradiktif seperti ini, lihat Rosen, *Iran Since the Revolution*, xii.
15. Wawancara dengan Javad Zarif, duta besar Iran untuk PBB, New York, 1 April 2004. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.
16. Wawancara dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahmoud Vaezi, Teheran, 16 Agustus 2004. Elemen paling ideologis dari rezim Iran percaya bahwa Partai Ba'ats dan Iran sedang memerangi Iran atas nama Washington dan Tel Aviv. Invasi Saddam terhadap Iran dipercaya mendapatkan dukungan dari Washington, dan hasilnya seluruh sekutu AS, termasuk Israel, dipandang dengan penuh kecurigaan. Jika Saddam menyerang Iran atas perintah Washington dan Tel Aviv, bagaimana mungkin Iran memiliki kepentingan keamanan yang sama dengan Israel, kelompok revolusioner ini bertanya pada mereka sendiri. "Pada waktu itu, kami tidak melihat perbedaan apapun antara apa yang dilakukan Saddam [untuk menyerang Iran], dan apa yang Amerika dan Israel lakukan," seorang diplomat senior Iran menjelaskan kepada saya. "Kami menempatkan mereka dalam kategori yang sama. Wawancara dengan Tabar, 21 Agustus 2004. Wawancara dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahmoud Vaezi, Teheran, 16 Agustus 2004. Wawancara dengan Mustafa Zahrani, 6 Februari 2004. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.
17. Wawancara dengan Zarif, 1 April 2004.
18. Wawancara dengan Gary Sick, New York, 25 Februari 2004.
19. Wawancara dengan Amir Mohebian, Teheran, Agustus 19, 2004.
20. Wawancara dengan Kazemi, 16 Agustus 2004.
21. "Call for End to Iran's Links with Israel," *BBC*, 5 November 1984."Iran Runs 'Destroy Israel' Contest for Children," Associated Press, 25 April 1985. "Iran to Send Iraqi POWs to Lebanon to Fight Israel," Associated Press, June 5, 1981. "Iran Proposes Islamic Army to Fight Israel,"Associated Press, 2 April 1982.
22. Wawancara dengan Mohebian, 19 Agustus 2004.
23. Wawancara dengan Abbas Maleki, Teheran, 1 Agustus 2004.
24. Wawancara dengan Tabar, 21 Agustus 2004.
25. Wawancara dengan mantan pejabat Iran, Teheran, Agustus 2004.

26. Houchang Chehabi, *Distant Relations: Iran and Lebanon in the Last 500 Years* (New York: I. B. Tauris, 2006), 211–213.
27. Ibid., 226.
28. Wawancara dengan Vaezi, 16 Agustus 2004. Menurut Alavi Tabar, yang berada dalam faksi reformis pemerintahan Iran, dualitas ini masih menjadi masalah bagi kebijakan luar negeri Iran. "Kata-kata kita begitu keras, tetapi kebijakan kita sangat lembut, sementara Amerika berbicara lembut tetapi memiliki kebijakan yang keras. Meskipun retorika kita sangat radikal, dalam prakteknya, perilaku kita tidak seperti itu."
29. Wawancara dengan Maleki, 1 Agustus 2004.
30. Haleh Vaziri,"Iran's Involvement in Lebanon: Polarization and Radicalization of Militant Islamic Movements," *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* 16:2 (Musim Dingin 1992): 4.
31. Entessar, "Israel and Iran's National Security," 7.
32. Pada akhirnya, Irak merupakan sebuah negara Arab yang berambisi menggantikan Mesri sebagai negara pan-Arab terdepan yang berusaha mengambil sikap keras terhadap Israel. "Ketakutan kami adalah bahw aIran akan memenangkan perang, dan kami merasa bahwa kemenangan Irak ini akan mengancam keamanan Israel," Kimche menjelaskan. "Maka dari perspektif kemanan yang sesungguhnya, kami merasa harus melakukan apapun agar Irak tidak memenangkan peperangan." Kimche membantah kemungkinan bahwa senjata yang diberikan kepada Iran suatu hari akan digunakan untuk menyerang Israel, dan dia membenarkan pandangan Israel bahwa pada waktu itu Iran bukanlah sebuah ancaman. Wawancara dengan David Kimche, Tel Aviv, 22 Oktober 2004.
33. Segev, *Iranian Triangle*, 22. Jenderal Raphael Eytan, kepala staf militer Israel pada waktu, menjelaskan ketidakmampuan Iran untuk memberikan ancaman kepada Israel; "Jika Iran memutuskan untuk menginvasi Israel, pertama, kekuatan mereka harus melebih Iran dan kemudian, mereka harus melewati Yordania; untuk sampai ke Israel mereka harus menghancurkan dua negara ini dan ketika mereka sampai ke Israel, mereka akan menyadari nahwa kami bukanlah Irak ataupun Yordania dan untuk mengalahkan kami merupakan sesuatu yang tidak mungkin." Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (London: Researchers, 1988), 79.
34. Wawancara dengan David Menashri, guru besar di Tel Aviv University, Tel Aviv, 26 Oktober 2004. Menurut Yuval Ne'eman, anggota Knesset sayap Kanan, meskipun Iran bukanlah negara yang bershabat," sepanjang keamanan Israel terjaga, maka Irak merupakan bahaya yang lebih besar." Ruth Sinai, "Israel Helps Iran for Strategic and Economic Reasons," Associated Press, December 1, 1986.
35. Wawancara dengan Itamar Rabinovich, mantan penasihat Rabin and duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
36. Wawancara dengan mantan penasihat *National Security Advisor* Robert McFarlane, Washington, D.C., October 13, 2004. "Dalam konsep baku geopolitik, jka Anda tidak mempertimbangkan rezim, teman kita seharusnya Iran, dan kita tidak boleh melupakan hal itu," Itamar Rabinovich berkomentar, duta besar Israel untuk AS periode 1993–1996 dan penasihat terdekat Rabin. Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004. Wawancara dengan Jess Hordes, direktur *Anti-Defamation League's Washington*, Washington, D.C., 24 Maret 2004.
37. Wawancara dengan Kimche, 22 Oktober 2004.

38. Malcolm Byrne, *The Chronology* (New York: Warner Books, 1987), 116.
39. Gary Sick, *October Surprise* (New York: Random House, 1991), 114.
40. "Israel Would Aid Iran in Return for Friendship," Associated Press, 28 September 1980.
41. Menurut jurnalis Prancis Pierre Pean, beberapa penasihat militer Israel bahkan mengunnungi kelompok garis depan Iran untuk mengevaluasi kemampuan dan kebutuhan Iran. Entessar, "Israel and Iran's National Security," 7.
42. Sick, *October Surprise*, 114, 167–179, 198.
43. Entessar, "Israel and Iran's National Security," 8.
44. Nikki Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution* (New Haven: Yale University Press, 2003), 81.
45. Ariel Sharon, *Warrior* (New York: Simon and Schuster, 1989), 412–413.
46. Entessar, "Israel and Iran's National Security," 7.
47. Segev, *Iranian Triangle*, 7.
48. Wawancara dengan Kimche, 22 Oktober 2004.
49. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948–1988* (New York: Praeger, 1989), 148. Reza Pahlavi, anak dari Mohammad Reza Shah, pernah mendekati Menteri Pertahanan Sharon melalui seorang miliarder Saudi, Adnan Khashoggi, untuk meminta bantuan Israel agar memberikan pelatihan dan persenjataan kepada pasukan Iran yang setia kepada rezim monarki Pahlavi. Anak muda yang ini berpura-pura sebagai pemilik Tahta Merak ingin melatiha prajurit Iran di Sudan—lokasi yang cukup jauh dari jangkauan Teheran—dengan menggunakan dana dari Saudi dan peralatan Israel untuk melancarkan aksi kontra-revolusi di Iran. Dalam beberapa kesempatan Pahlavi berusaha mencapatkan bantuan Israel untuk menjatuhkan pemerintahan Khomeini. Pendekatannya terhadap Israel yang sudah memiliki hubungan dengan shah, sangat ekstensif, sehingga tidak mengejutkan bahwa Reza Pahlavi memanggil orang Israel secara personal untuk mendesak mereka berbicara dengan mendukung sebuah kudeta di Iran dan memberikan selamat kepada mereka ketika mereka melakukan hal tersebut. Namun, Sharon segera kehilangan kepercayaan terhadap Pahlavi muda ini.
50. Sharon, Warrior, 416–417. Segev, Iranian Triangle, 11, 82, 7.
51. Wawancara dengan Yossi (Joseph) Alpher, mantan pejabat Mossad dan penasihat senior Ehud Barak, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
52. *Sunday Telegraph*, 14 Juni 1981.
53. Sick, *October Surprise*, 207.
54. "BBC Says Israel Resumed Shipping Arms to Iran," Associated Press, 1 Februari 1982.
55. Entessar, "Israel and Iran's National Security," 9.
56. Sick, *October Surprise*, 200.
57. "Sharon Reveals Arms Supplies to Iran," *BBC*, 28 Mei 1982.
58. "Israel Sends Military Equipment to Iran," Associated Press, 28 Mei 1982.
59. Wawancara dengan Zarif, 1 April 2004.
60. Wawancara dengan Zahrani, 6 Februari 2004.
61. "Khomeini's Twenty-fourth August Speech: Israel and Iran's Opponents," *BBC*, 26 Agustus 1981.
62. Wawancara dengan Shmuel Bar, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.

Bab 11—Skandal!

Epigraf: Behrouz Souresrafil, Khomeini and Israel (England: Researchers, 1988), 115.

1. Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict* (New York: St. Martin's, 1996), 284.
2. Lara Deeb,"Hizballah: A Primer," *Middle East Report Online*, 31 Juli 2006.
3. Dampak invasi Israel pada 1982 ke Lebanon terhadap pendirian Hezbollah tidak bisa dianggap terlalu berlebihan. Jika bukan karena invasi Israel, Iran mungkin saja gagal mendapatkan kekuatan di Lebanon, sebagaimana yang terjadi di Irak dan Bahrain. Secara kebetulan, kepentingan Iran dalam kelompok Syiah Lebanon menjadi awal dari revolusi Iran. Selama invasi Israel di Lebanon pada 1978, Shah secara pribadi mengekspresikan perhatian besar terhadap saudara keagamaan Iran ini. Untuk meredakan kekhawatiran Shahm Israel membiarkan delegasi Iran mengunjungi Lebanon untuk memastikan bahwa Syiah di sana tidak diperlakukan buru. Wawancara dengan mantan diplomat senior Israel yang ditempatkan di Teheran, 31 Oktober 2004.
4. Efraim Karsh ed., *The Iran-Iraq War: Impact and Implications* (New York: St. Martin's, 1989), 154. A. Ehteshami dan R. Hinnebusch, ed., *The Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 47.
5. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948–1988* (New York: Praeger, 1989), 150.
6. Wawancara dengan David Kimche, Tel Aviv, 22 Oktober 2004.
7. Wawancara dengan Shmuel Bar, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
8. Sobhani, *Pragmatic Entente*, 149.
9. David Kimche, *The Last Option* (New York: Maxwell Macmillan International, 1991), 213.
10. Wawancara dengan Yaacov Nimrodi, Savion (Tel Aviv), 19 Oktober 2004. Informasi ini juga diambil dari naskah buku berbahasa Inggris karya Nimrodi mengenai hal ini.
11. Joyce Battle, "Shaking Hands with Saddam Hussein: The U.S. Tilts Toward Iraq, 1980–1984," *National Security Archive Electronic Briefing Book* No. 82, 25 Februari 2003.
12. Memo Departemen Luar Negeri AS berjudul "Iraq Use of Chemical Weapons," November 1, 1983. Dokumen tersedia di *National Security Archives*.
13. Robert Parry, "Missing U.S.-Iraq History," *Consortiumnews.com*, 27 Februari 2003. Berdasarkan pengakuan dari anggota staf *National Security Council*, Howard Teicher.
14. Rara Avis,"Iran and Israel,"Economist, 21 September 1985.
15. Samuel Segev, *The Iranian Triangle* (New York: Free Press, 1988), 161.
16. Wawancara dengan Kimche, 22 Oktober 2004.
17. Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (London: Researchers Inc., 1988), 115.
18. Ian Black, "Israel's Longstanding Links with Iran," *Manchester Guardian Weekly*, 7 Desember 1986.
19. Malcolm Byrne, *The Chronology* (New York: Warner Books, 1987), 72. Berdasarkan laporan *Senate Intelligence Panel*. Nimrodi membantan klaim ini dan menyatakan bahwa dia terlibat dalam skandal ini pada Februari 1985.
20. Robert C. McFarlane, *Special Trust* (New York: Cadell and Davis, 1994), 19.
21. Wawancara dengan mantan penasihat di *National Security Advisor* Robert McFarlane, Washington, D.C., 13 Oktober 2004.
22. Byrne, *Chronology*, 117–118.
23. Ibid., 125.

24. Segev, *Iranian Triangle*, 133.
25. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004. Lihat juga Byrne, *Chronology*, 98.
26. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
27. Kimche, *Last Option*, 220.
28. Wawancara dengan Gary Sick, New York, 25 Februari 2004.
29. Wawancara dengan hali strategi politik dari Iran, Maret 2004.
30. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
31. Segev, *Iranian Triangle*, 281.
32. Kimche, *Last Option*, 213. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
33. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
34. Wawancara dengan McFarlane, 13 Oktober 2004. "Tetapi, teori tersebut dibuat di internal kami dan tidak memiliki dasar fakta atau informasi intelijen," McFarlane berkesimpulan.
35. Memo Rahasia-Tingkat Tinggi kepada George Schultz dan Caspar Weinberger dari Robert McFarlane, 17 Juni 1985. Dokumen tersedia di *National Security Archives*.
36. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
37. Kimche, *Last Option*, 211. Menurut McFarlane, kunjungan Ledeen dengan Peres adalah atas inisiatif Ledeen sendiri; dia tidak berwenang untuk berbicara atas nama pemerintahan AS. McFarlane, *Special Trust*, 17.
38. McFarlane memberikan konfirmasi dalam pengakuannya sebelum Senat bahwa Peres telah mengusulkan ide penjualan senjata dengan Ledeen pada Mei 1985. Sally Mallison dan Thomas Mallison, "The Changing U.S. Position on Palestinian Self-Determination and the Impact of the IranContra Scandal," *Journal of Palestine Studies* 3 (Musim Semi 1987): 101–114. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
39. Segev, *Iranian Triangle*, 138.
40. Wawancara dengan Kimche, 22 Oktober 2004.
41. Kimche, *Last Option*, 211. Menurut Kimche, motivasi utama Israel adalah untuk membantu Amerika Serikat. "Kami begitu berhutang budi kepada Amerika bahwa kami harus melakukan yang terbaik untuk membantu mereka; khususnya ketika mereka datang kepada kami untuk mencari," Peres diberitakan berbicara pada Kimche.
42. Menurut McFarlane, utusan Israel mengusulkan bahwa Amerika Serikat dan Israel bisa berkolaborasi untuk mempercepat kematian. Tetapi McFarlane menolak usulan agar AS terlibat dalam rencana pembunuhan ayatollah. Namun Kimche membantah telah memberikan usulan semacam ini, dan menyatakan bahwa McFarlane "menyimpan hal ini dalam buku untuk menyudutkan Israel dan menyelamatkan dirinya sendiri." McFarlane, *Special Trust*, 21. Wawancara dengan Kimche, 22 Oktober 2004.
43. Wawancara dengan McFarlane, 13 Oktober 2004.
44. McFarlane, *Special Trust*, 21.
45. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
46. Segev, *Iranian Triangle*, 157.
47. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
48. Ibid.
49. Kimche, *Last Option*, 216.
50. Byrne, Chronology, 601. Berdasarkan pengakuan dari McFarlane sebelum Senat. Lihat juga McFarlane, *Special Trust*, 31–35.
51. Kimche, *Last Option*, 213.

52. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
53. Segev, *Iranian Triangle*, 183–184.
54. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
55. Segev, *Iranian Triangle*, 183–184.
56. Wawancara dengan Nimrodi, 19 Oktober 2004.
57. McFarlane, *Special Trust*, 46–47.
58. Ibid, 49–50, 52.
59. William Quandt, *Peace Process* (Los Angeles: University of California Press, 1993), 357.
60. Kimche, *Last Option*, 217.
61. Surat sangat-rahasia dari Peres kepada Reagan, tertanggal 28 Februari 1986. *National Security Archives.*
62. Victor Ostrovsky, *By Way of Deception* (New York: 1990), 330. Segev, *Iranian Triangle*, 249.
63. McFarlane, *Special Trust*, 54.
64. Kronologi Kejadian sangat-rahasia, tertanggal 18 November 1986. Dokumen terdapat di *National Security Archives.*
65. Segev, *Iranian Triangle*, 270.
66. George Cave, "Why Secret 1986 U.S.-Iran 'Arms for Hostages' Negotiations Failed," *Washington Report on Middle East Affairs* (September/19 Oktober 94).
67. McFarlane, *Special Trust*, 54–56.
68. Wawancara dengan McFarlane, 13 Oktober 2004.
69. McFarlane, *Special Trust*, 59.
70. Wawancara dengan McFarlane, 13 Oktober 2004.
71. McFarlane, *Special Trust*, 61, 65.
72. Cave,"Negotiations Failed." McFarlane, *Special Trust*, 61, 65.
73. Dalam satu kasus khusus, Nir menerima panggilan telepon dari Perdana Menteri Moussavi pada 20 Juli 1986, yang menginformasikan usaha Iran untuk membebaskan sandera Amerika dengan nama panjang "pendeta (*the priest*). Byrne, *Chronology*, 427.
74. Byrne, Chronology, 490. Berdasarkan pengakuan Charles Allen sebelum Komisi Menara (*Tower Commission*)
75. Memo sangat-rahasia dari Oliver North kepada *National Security Advisor* John Poindexter, 15 September 1986. Dokumen tersedia di *National Security Archives*. Para pendukung kerjasama dengan Iran berpandangan yang sama. Charles Allen dari CIA, yang terlibat dekat dalam operasi ini, menemukan motivasi utama di balik saluran Iran untuk"membuka hubungan strategis jangka-panjang dengan Iran." Kimche, *Last Option*, 219.
76. Cave, "Negotiations Failed."
77. Mallison dan Mallison,"Changing U.S. Position," 109.
78. Cave,"Negotiations Failed."
79. Quandt, *Peace Process*, 357.
80. Byrne, *Chronology*, 555.
81. Segev, *Iranian Triangle*, 313–314.
82. "Israel Doesn't Pledge Halt to Selling Iran Arms," Associated Press, 8 Desember 1986.
83. Ruth Sinai, "Peres Says U.S. Initiated Iran Deal, Israel Just Went Along," Associated Press, 10 Desember 1986.

84. Mary Sedor,"Peres: Arms Sales to Iran Less Than $6 Million in 1985,"Associated Press, 20 Januari 1987.
85. "Israel Bears No Guilt in Iran Arms Sale, Eban Says," Associated Press, 28 Februari 1987.
86. "Shamir Urges U.S. to Pursue Possible Contacts with Iran," *Washington Post*, 12 Februari 1987.
87. Ostrovsky, *By Way of Deception*, 329.
88. Scheherezade Faramarzi, "Iran Offers Help Freeing Hostages, Denies Israel in Arms Deal," Associated Press, 28 November 1986.
89. R. K. Ramazani, "Ideology and Pragmatism in Iran's Foreign Policy," *Middle East Journal* 4 (2004): 556.
90. Segev, *Iranian Triangle*, 28.
91. John Rice, "Arabs Switch Focus from Israel to Ancient Enemy Iran," Associated Press, 14 November 1987.
92. Pada akhir 1989 berbagai laporan muncul tentang berlanjutnya penjualan minyak Iran ke Israel. Iran dengan keras membantah tuduhan ini, tetapi Teheran mendapatkan kecaman dari PLO atas dugaan hubungannya dengan Israel. Associated Press, "Iran Denies Oil Sold to Israel," 20 Desember 1989.
93. L. Carl Brown, *Diplomacy in the Middle East* (New York: I. B. Tauris, 2004), 249.
94. Lee Stokes, "Iran Say Israel Will Only Respond to Force," United Press International, 6 Desember 1988.

Bab 12—Runtuhnya Doktrin Periperial

Epigraf: Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (England: Researchers, 1988), 144.

1. Joseph Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," dalam *The Iraq-Iran War: Impact and Implication,* ed. Efraim Karsh (New York: St. Martin's, 1989), 164
2. Ibid., 161.
3. Malcolm Byrne, *The Chronology* (New York: Warner Books, 1987), 444.
4. Wawancara dengan Yitzhak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
5. Samuel Segev, *The Iranian Triangel* (New York: Free Press, 1988), 232.
6. "U.S. Rejects Rabin Suggestion on Better Relations with Iran," Associated Prees, 29 Oktober 1987. Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," 162.
7. Behrouz Souresrafil, *Khomeini and Israel* (London: Researchers, 1988), 114.
8. Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," 163
9. *AIC Insight 2* (September 2004). Souresrafil, *Khoemeini and Israel,* 114.
10. Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," 159-160. Sohrab Sobhani, *The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations, 1948-1988* (New York: Praeger, 1989), 157.
11. Wawancara dengan Segev, 17 Oktober 2004
12. Wawancara dengan Javad Zarif, duta besar Iran untuk PBB, New York, 1 April 2004.
13. Wawancara dengan Eliezer Tsafrir, Tel Aviv, 16 Oktober 2004.
14. Farhang Rajaee, *The Iraq-Iran War: The Politics of Aggression* (Gainesville: University Press of Florida, 1993), 1, 206.
15. Moshe Zak, *Maariv,* 1 Agustus 1988. Dikutip dari Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," 165.

16. Efraim Imbar, Yitzhak Rabin and Israeli National Security," *Security and Policy Studies,* No. 25, Begin-Sadar (BESA) Center for Strategic Studies, http://www.biu.ac.il/Besa/books/25/analysis/html.
17. Nicolas Tatro,"End of Iraq-Iran War Would Be Bad News for Israel," Associated Press, 20 Juli 1988.
18. Sobhani, *Pragmatic Entente,* 152.
19. Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," 165. Tamir dan Saguy mendapat dukungan dari lembaga lobi pro-Irak di Washington yang berusaha meyakinkan pemimpin Israel bahwa kekuasaan Saddam Hussein memberikan keuntungan bagi Israel. Bahkan sebelum perang berakhir, sebuah usaha pernah dilakukan untuk menyesuaikan Israel dengan mencairnya hubungan Washington-Saddam Hussein. Negara Yahudi "harus mengembangkan sebuah orientasi pro-Irak, yang mungkin saja akan memberikan hasil dalam jangka panjang," seorang politisi senior Israel berbicara kepada surat kabar harian Israel *Hadashot* pada November 1987. "Dalam beberapa bulan terakhir, seorang pejabat senior Irak telah menunjukkan keinginan untuk menjajaki kemungkinan perubahan kebijakan terhadap Israel jika Israel mendukung Irak dalam Perang Teluk [Persia]." David Kimche, *The Last Option* (New York: Maxwell Macmillan International, 1991), 231. Ilan Kfir, *Hadashot,* 13 november 1987.
20. Nick Luddington,"Iraq, Israel Call for Closer Ties with Iran; U.S. Wants Hostages Freed," Associated Press, 5 Juni 1989.
21. "Israel Bought Oil from Iran," Associated Press, 19 Desember 1989.
22. "State Departmen: Israel Informed U.S. About Resuming Oil Purchases from Iran," *Jerusalem Post,* 20 Desember 1989.
23. "Israel-Iran Oil-POW Deal Reported," *World News Digest,* 31 Desember 1989.
24. "Iran Denies Oil Sold to Israel," Associated Press, 20 Desember 1989.
25. "IDF Radio Says Israel Made 2.5m Dollar Profit in Oil Deal with Iran,"*BBC*, 22 Februari 1990.
26. Wawancara dengan ahli strategi politik Iran, Maret 2004.
27. "The Gulf Challenges of the Future," Emirates' Center for Strategic Studies and Research, 2005, 163–183.
28. Yahya Sadowski, *Scuds or Butter? The Political Economy of Arms Control in the Middle East* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1993), 63. Anoushiravan Ehteshami,*After Khomeini* (London: Routledge, 1995), 140.
29. Wawancara dengan Gary Sick, New York, 25 Februari 2004.
30. Wawancara dengan Abbas Maleki, Teheran, 1 Agustus 2004.
31. Ehteshami, *After Khomeini,* 140.
32. Sadowski, *Scuds or Butter?,* 62.
33. Giandomenico Picco, *Man Without a Gun* (New York: Random House, 1999), 110, 113–114.
34. Wawancara dengan Mustafa Zahrani, Menteri Luar Negeri Iran, New York, 26 Februari 2004. Anoushiravan Ehteshami dan Raymond Hinnebusch, *The Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 300, 302.
35. Wawancara dengan Zarif, 1 April 2004.
36. Ehteshami,*After Khomeini,* 142. Hooshang Amirahmadi,"The Spiraling Gulf Arms Race,"*Middle East Insight* 2 (1994): 48.
37. Shireen Hunter, *Iran After Khomeini* (New York: Praeger, 1992), 131.

38. Wawancara dengan mantan Penasihat Dewan Keamanan Nasional Brent Scowcroft. Washington, D.C., 27 September 2004.
39. Wawancara dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Hadi Nejad-Hosseinian, Teheran, 12 Agustus 2004.
40. Wawancara dengan Ali Reza Alavi Tabar, Teheran, 21 Agustus 2004. Wawancara dengan Jenderal Lipkin-Shahak, Tel Aviv, 25 Oktober 2004.
41. Wawancara dengan penasihat *Iranian National Security Advisor,* Teheran, Agustus 2004.
42. Wawancara dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahmoud Vawzi, Teheran, 16 Agustus 2004. (Pemerintahan Iran menilai retorikanya hanya sebuah ekspresi opini dan bukan sebuah rencana tindakan. Hal ini membuat Iran mampu mengambil sebuah kebijakan sementara menggambarkan dirinya sebagai pemenang penuh dari kebijakan yang sama sekali berbeda.)
43. Wawancara dengan mantan anggora Parlemen dan memimpin ahli strategi reformis Mohsen Mirdamadi, Teheran, 22 Agustus 2004.

Bab 13—Tatatan Dunia Baru

Epigraf: Wawancara dengan Duta Besar AS Daniel Kurtzer, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.

1. David Kimche,*Last Option* (New York: Maxwell Macmillan International, 1991), 236.
2. Wawancara dengan mantan Penasihat Dewan Keamanan Nasional Bent Scowcroft, Washington D.C., 27 September 2004.
3. Efraim Halevi, *Man in the Shadows* (New York: St. Martin's, 2006), 33–34.
4. Wawancara telepon dengan Efraim Halevi, mantan kepala Mossad, 17 Juni 2006.
5. Kimche, *Last Option*, 236.
6. Badan intelijen Iran bahkan sudah memberikan peringatan kepada pemerintahan Kuwait beberapa jam sebelum Irak menyerang. Ibid., 233.
7. Shireen Hunter, *Iran After Khomeini* (New York: Praeger, 1992), 126.
8. Paul J. White dan William S. Logan, *Remaking the The Middle East* (New York: Berg, 1997), 201.
9. John Esposito dan R.K. Ramazan, *Iran at the Crossroads* (New York: Palgrave, 2001), 220.
10. Wawancara dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahmoud Vaezi, Teheran, 16 Agustus 2004.
11. Mengenai pembahasan tentang signifikansi pernyataan Baker, lihat R.K. Ramazani, "Move Iran Outside the 'Axis'," *Christian Science Monitor,* 19Agustus 2002.
12. Anoushiravan Ehteshami, *After Khomeini* (London: Routledge, 1995), 160. Shahram Chubin,"Iran's Security Policy in the Post-Revolutionary Era," *RAND* (2001), 12. Wawancara dengan Mustafa Zahrani dari Kementerian Luar Negeri Iran, New York, 26 Februari 2004.
13. Esposito dan Ramazani, *Iran and the Crossroads,* 151. David Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran* (London: Frank Cass, 2001), 252. White dan Logan, *Remaking the Middle East,* 209. Pergeseran luar biasa ini terungkap dalam sebuah pernyataan menteri luar negeri Iran, Ali Akbar Velayati, ketika berkunjung ke Moskow pada Maret 2006. Hubungan Iran-Rusia, Velayati mengatakan, "berada dalam level tertinggi dalam sejarah kontemporer." *RAND,* 7 Maret 1996. Esposito dan Ramazan,

Iran and the Crossroads, 7. Alih-alih mengekspors semangat revolusi Islam ke negara-negara merdeka di Asia tengah, Iran justru mengambil kebijakan pro-status quo yang didasarkan pada perubahan ekonomi dan ikatan budaya—bukan ikata0 agama.

14. Ahmed Rashid, *Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalis in Central Asia* (New Haven: Yale University Press, 2000).
15. Wawancara dengan Amir Mohebian, Teheran, 19 Agustus 2004. Pernyataan ini mirip dengan judul salah satu tulisan aktivis pan-Arab Khairallah Talfah (Talfah merupakan paman Saddam Hussein): "Tiga hal yang seharusnya tidak diciptakan Tuhan: Yahudi, Persia, dan Nyamuk."
16. Wawancara dengan Mohammad Reza Deshiri, kepala Departemen Studi Agama, Program Hubungan Internasional, Kementerian Luar Negeri, Teheran, 24 Agustus 2004.
17. Wawancara dengan Mohammad Reza Tajik, penasihat Presiden Khatami dan direktur *Strategic Studies Center of the President's Office,* Teheran, 25 Agustus 2004.
18. Anoushiravan Ehteshami dan Raymond Hinnebusch, *The Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 83. Wawancara dengan ahli strategis dari Iran, Maret 2004.
19. Chubin,"Iranian's Security Policy," Wawancara dengan Nasser Hadian, ahli strategi berhaluan reformis di Iran, New York, 26 Februari 2004.
20. Wawancara dengan Javad Zarif, duta besar Iran untuk PBB, New York, 1 April 2004.
21. Presentasi dari Shahram Chubin, Woodrom Wilson for International Scholars, 9 November 2004.
22. Wawancara dengan Vaezi, 16 Agustus 2004.
23. Wawancara dengan Shmuel Limone, Kementerian Pertahanan, sekretaris komite Israel untuk urusan Iran, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
24. *Jerusalem Post,* 1 Oktober 1997.
25. Wawancara dengan Mahmoud Sariolghalam, guru besar di Universitas Shahid Behesti dan penasihat di *Iranian National Security Advisor*, Teheran, 18 Agustus 2004.
26. Kenneth Pollack, *Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 259.
27. Dafna Lizner, "Iran Is Judged 10 Years from Nuclear Bomb," *Washington Post,* 2 Agustus 2005.
28. Resolusi IAEA GOV/2006/14, 4 Februari 2006.
29. Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran,* 297.
30. Wawancara dengan ahli strategi politik Iran, Februari 2004.
31. Wawancara dengan Zarif, 1 April 2004.
32. Wawancara dengan Vaezi, 16 Agustus 2004.
33. Wawancara dengan Ali Reza Alavi Tabar, Teheran, 21 Agustus 2004.
34. Christopher Boucek, "'An Impact Grater That Its Size: Israeli Foreign Policy in Central Asia," tesis master, 1999, *School of Oriental and African Studies,* University of London, 9. Wawancara dengan dengan Mustafa Zahrani dari Kementerian Luar Negeri Iran, New York, 26 Februari 2004.
35. Ehteshami, *After Khomeini,* 154.
36. White dan Logan, *Remaking the Middle East,* 203. Hunter, *Iran After Khomeini,* 133. Esposito dan Ramazani, *Iran at the Crossroads,* 217. Wawancara dengan Gary Sick, New York, 25 Februari 2004.
37. Hunter, *Iran After Khomeini,* 136. Wawancara dengan Siamak Namazi, Atieh Bahar Consulting, Teheran, 2 Agustus 2004.

38. Wawancara dengan Scowcroft, 27 September 2004. White dan Logan, *Remaking the Middle East,* 202.
39. Hooshang Amirahmadi,"The Spiraling Gulf Arms Race," *Middle East Insight* 2 (1994): 48.
40. Wawancara dengan Tabar, 21 Agustus 2004
41. Amirahmadi,"The Spiraling Gulf Arms Race," 49.
42. Wawancara dengan Duta Besar Nabil Fahmi, Washington, D.C., 12 Oktober2004.
43. James Baker, The Politics of Diplomacy (New York: Putnam, 1995), 412.
44. Amirahmadi, "The Spiraling Gulf Arms Race," 49. White and Logan, Remaking the Middle East, 204.
45. Amirahmadi, "The Spiraling Gulf Arms Race," 49. White and Logan, Remaking the Middle East, 204.
46. Wawancara dengan Shlomo Brom, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober 2004. "Posisi strategis Israel sudah sangat baik," Ephraim Kam dari *Jaffee Center for Strategic Studies* di Universitas Tel Avivberkomentar. "Keruntuhan Uni Soviet pada akhirnya sangat penting." Wawancara dengan Ephraim Kam, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober2004.
47. Wawancara dengan Eynat Shlein, kedutaan Israel di Washington, 1 Juni 2004. Wawancara dengan Kam, 26 Oktober 2004.
48. Max Abrahms, "A Window of Opportunity for Israel?" *Middle East Quarterly* (Musim Panas 2003).
49. Wawancara via telpon dengan Halevi, 17 Juni 2006.
50. Wawancara dengan mantan Menteri Keuangan Israel, Dan Meridor, Tel Aviv, 27 October 2004.
51. Wawancara dengan Keith Weissman of *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), Washington, D.C., 25 Maret 2004. Perang ini menunjukkan bahwa "tidak ada lagi persatuan Arab," menurut diplomat Israel untuk Misi PBB yang berbicara tentang kondisi non-atribusi. Narasumber diwawancarai pada 31 Maret 2004, New York.
52. Wawancara dengan Brom, 26 Oktober 2004.
53. Wawancara dengan Duta Besar Daniel Kurtzer, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
54. Wawancara dengan Yaari, 24 Oktober 2004.
55. Uri Savir, *The Process: 1,100 Days That Changed the Middle East* (New York: Random House, 1998), 27.
56. David W. Lesch, *The Middle East and the United States* (Boulder: Westview, 2003), 278.
57. Wawancara dengan Shai Feldman and Shlomo Brom, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 dan 27 Oktober2004.
58. Baker, *Politics of Diplomacy*, 415, 428.
59. Halevi, *Man in the Shadows*, 33–34.
60. Baker, *Politics of Diplomacy*, 117, 123, 129.
61. Barry Rubin, "The United States and the Middle East, 1992," *Middle East Contemporary Survey* (1992).
62. Baker, *Politics of Diplomacy*, 423, 125, 131.
63. Phone Wawancara dengan Halevi, 17 Juni 2006.
64. Wawancara dengan Kurtzer, 19 Oktober 2004.
65. Baker, *Politics of Diplomacy*, 444.
66. Wawancara dengan Duta Besar Dennis Ross, Washington, D.C., 29 Mei 2004.

67. Wawancara dengan Kenneth Pollack, Washington, D.C., 29 November 2004.
68. Wawancara dengan Assisten Sekretaris Negara Robert Pelletreau, Washington, D.C., 1 Maret 2004.
69. Wawancara dengan Scowcroft, September 27, 2004.
70. Wawancara dengan Pelletreau, 1 Maret 2004. Wawancara dengan Ross, 29 Mei 2004.
71. Wawancara dengan Scowcroft, September 27, 2004.
72. Wawancara dengan diplomat Israel yang berbicara tentang kondisi non-atribusi, New York, 31 Maret 2004.
73. Wawancara dengan Kurtzer, 19 Oktober 2004. 7
74. Wawancara dengan Tabar, Agustus 21, 2004."Kami bisa memainkan peran positif di regional. Kami mengharapkan sikap yang lebih baik dari Amerika Serikat," Tabar berkomentar.
75. Ehteshami and Hinnebusch, *Foreign Policies of Middle East States*, 302.
76. Pollack, *Persian Puzzle*, 254.
77. Ehteshami, *After Khomeini*, 157. Wawancara dengan Bijan Khajepour, Atieh Bahar Consulting, Washington, D.C., February 17, 2004.
78. Emma Murphy, "The Impact of the Arab-Israeli Peace Process on the International Security and Economic Relations of the Persian Gulf," *The Iranian Journal of International Affairs 2* (Summer 1996): 441.
79. Wawancara dengan Wakil Menteri Luar Negeri Hadi Nejad-Hosseinian, Teheran, 12 Agustus 2004.
80. Wawancara dengan Nejad-Hosseinian, 12 Agustus 2004; Tabar, 21 Agustus 2004; Tajik, 25 Agustus 2004; Namazi, 2 Agustus 2004; dan Bijan Khajepour, 17 Februari 2004. Pejabat lainnya yang berbicara tentang kondisi non-atribusi juga membenarkan keterangan ini.
81. Wawancara dengan Namazi, 2 Agustus 2004.
82. Wawancara dengan Tajik, 25 Agustus 2004.
83. Karena khawatir jika disintegrasi Irak akan membuat Iran tidak terkontrol, Washington memusutuskan untuk tetap membiarkan Saddam berkuasa untuk mengimbangi kekuatan Iran. Pollack, *The Persian Puzzle*, 247.
84. Wawancaradengan Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan kepala staf Sekretaris Negara Colin Powell, Washington, D.C., 16 Oktober 2006.
85. Wawancara dengan Namazi, 2 Agustus 2004.
86. Wawancara dengan Masoud Eslami dari Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, 23 Agustus 2004.
87. Wawancara dengan Tajik, 25 Agustus 2004. Secara keseluruhan, lebih dari 12 pejabat Iran berasal dari seluruh faksi politik mengkofirmasi bahwa Iran ingin mengikuti konferensi Madrid dan bahwa perilakunya akan lebih rekonsiliatif jika Iran diundang dalam konferensi. Wawancara dengan ahli strategi politik, Agustus 2004.
88. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Agustus 2004.
89. Wawancara dengan Tabar, Agustus 21, 2004. Wawancara dengan Mohebian, 19 Agustus 2004.
90. Wawancara dengan Tajik, 25 Agustus 2004.
91. Wawancara dengan Ross, 29 Mei 2004.
92. Wawancara dengan Mohebian, 19 Agustus 2004.

93. Wawancara dengan Tabar, 21 Agustus 2004. Wawancara dengan Mohebian, 19 Agustus 2004.
94. R. K. Ramazani, tinjauan atas artikel Mahmoud Sariolghalam berjudul "The Foreign Policy of the Islamic Republic" dalam *Discourse: An Iranian Quarterly 2* (2001): 216. Wawancara dengan Mohebian, 19 Agustus 2004.
95. *Ettela'at*, 11 September 1993.
96. Wawancara dengan diplomat Israel berbicara tentang kondisi non-atribusi, New York, 31 Maret 2004.

Bab 14—Jual-Beli Musuh

Epigraf: Wawancara dengan Efraim Inbar, *Begin-Sadat Center*, Yerusalem, 19 Juni 2004.

1. Kerusakan yang dialami warga Palestina jauh lebih parah, dengan ribuan orang yang hidup di bawah kekerasan dalam tahanan administratif. Lebih jauh lagi, wilayah yang diduduki (Israel, *pen.*) mengalami kemunduran ekonomi yang didorong oleh konflik dan situasi memburuk yang dilakukan oleh pasukan Israel dalam Perang Teluk Persia, yang berdmapak besar pada warga Palestina, yang hingga saat itu masih berganting pada pekerjaan di wilayah Israel.
2. Uri Savir, *The Process: 1,100 Days That Changed the Middle East* (New York: Random House, 1998), 22.
3. David Makovsky, *Making Peace with the PLO* (Boulder: Westview, 1996), 108.
4. Wawancara dengan mantan Menteri Keuangan Israe, Dan Meridor, Tel Aviv, 27 Juni 2004.
5. Menurut Savir, "Aksi pendudukan ini telah dipaksakan terhadap Israel pada 1967," dan Israel perlu keluar dari "Dinding Besi" Jabotinsky. Savir, *The Process*, 13, 23.
6. Wawancara dengan Itamar Rabinovich, mantan penasihat Rabin and Israeli duta besar untuk Amerika Serikat, Tel Aviv, 17 Juni 2004.
7. Makovsky, *Making Peace with the PLO*, 83.
8. Max Abrahms, "A Window of Opportunity for Israel?," *Middle East Quarterly* (Musim Panas 2003).
9. Shimon Peres, *The New Middle East* (New York: Henry Holt, 1993), 3. Wawancara dengan Shai Feldman, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 27 Juni 2004.
10. Wawancara dengan Jenderal David Ivry, kepala komite Israel untuk Iran, Tel Aviv, 19 Juni 2004.
11. Wawancara dengan mantan Penasihat Keamanan Nasional Brent Scowcroft, Washington, D.C., 27 September 2004. "On the Brink," *Near East Report*, Washington Institute for Near East Affairs, 12 Juni 1993.
12. Israel Shahak, *Open Secrets—Israeli Nuclear and Foreign Policies* (London: Pluto, 1997), 82–83.
13. Wawancara dengan Eynat Shlein, Sekretaris Utama, Kedutaan Israel, Washington, D.C., 1 Juni 2004; Feldman, 27 Juni 2004; dan Michael Eisenstadt, *Washington Institute for Near East Policy*, Washington, D.C., 2 Juni 2004.
14. David W. Lesch, *The Middle East and the United States* (Boulder: Westview, 2003), 277. Wawancara dengan Duta Besar Dennis Ross, Washington, D.C., 29 Juni 2004.
15. Peres, *New Middle East*, 12.

16. Emma Murphy, "The Impact of the Arab-Israeli Peace Process on the International Security and Economic Relations of the Persian Gulf," *The Iranian Journal of International Affairs 2* (Musim Panas 1996): 428, 432–433.
17. Adam Garfinkle, *Politics and Security in Modern Israel* (London: M. E. Sharpe, 2000), 271.
18. Peres, *New Middle East*, 146.
19. Anoushiravan Ehteshami and Raymond Hinnebusch, *The Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 77.
20. Barry Rubin, *From War to Peace in Arab-Israeli Relations 1973–1993* (New York: New York University Press, 1994), 4. Makovsky, *Making Peace with the PLO*, 11. Wawancara dengan Eisenstadt, 2 Juni 2004.
21. Charles Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict* (Boston: Bedford/St. Martin's, 2001), 440. Savir, *The Process*, 5. Makovsky, *Making Peace with the PLO*, 108. David Kimche, *The Last Option* (New York: Maxwell Macmillan International, 1991), 314.
22. Wawancara via telpon dengan Efraim Halevi, mantan kepala Mossad, 17 Juni 2006.
23. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, 441. Peres, *New Middle East*, 19.
24. Wawancara dengan Keith Weissman dari American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Washington, D.C., 25 Juni 2004. Shimon Peres, *Battling for Peace* (New York: Random House, 1995), 284. Peres, *New Middle East*, 2–3.
25. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, 440.
26. Makovsky, *Making Peace with the PLO*, 113. Kekuasaan Hamas berpengaruh besar pada pertimbangan Rabin bahwa posisi jangka panjang Israel untuk tidak melakukan negosiasi dengan PLO harus lebih lunak. Herbert C. Kelman, "Some Determinants of the Oslo Breakthrough," *International Negotiation 2* (1997): 188.
27. Peres, *New Middle East*, 19. Barry Rubin, "The United States and the Middle East, 1992," *Middle East Contemporary Survey 16* (1992). Makovsky, *Making Peace with the PLO*, 83.
28. Kelman,"Some Determinants of the Oslo Breakthrough," 188.
29. Peres, *New Middle East*, 33–34.
30. Wawancara dengan David Kimche, Tel Aviv, 22 Juni 2004.
31. Murphy,"Impact of the Arab-Israeli Peace Process," 437.
32. Makovsky, *Making Peace with the PLO*, 112. Duta Besar Dennis Ross menjelaskan pergeseran Israel sebagai berikut: Ketika "Iran berubah, Anda berusaha membuat koneksi dengan Iran untuk menyerang balik ancaman yang mendekati Anda. Sekarang [Rabin] sedang berusaha membangun sebuah negara penyangga (*buffer state*) antara Israel dan ancaman potensial terhadap Israel [dari Iran]. . . [karena] ancaman yang baru datang dari wilayah pinggiran (Timur Tengah, *pen.*)." Wawancara dengan Ross, 29 Juni 2004.
33. Joseph Alpher,"Israel and the Iraq-Iran War," dalam *The Iraq-Iran War: Impact and Implications*, ed. Efraim Karsh (New York: St. Martin's, 1989), 164, 167n14.
34. Wawancara dengan mantan Menteri Pertahanan Moshe Arens, Tel Aviv, 21 Juni 2004. Satu dari tiga puluh sembilan rudal Scud Irak yang diluncurkan Saddam Husssein terhadap Israel telah menghantam rumah Moshe Arens di utara Tel Aviv.
35. Wawancara dengan David Menashri, guru besar di Universitas Tel Aviv, Tel Aviv, 26 Juni 2004. Wawancara dengan Yossi (Joseph) Alpher, mantan staf Mossad dan penasihat senior Ehud Barak, Tel Aviv, 27 Juni 2004.

36. Wawancara dengan Alpher, 27 Juni 2004.
37. Shahak, *Open Secrets*, 54.
38. "Iran Looms as a Growing Strategic Threat for Israel," *Jerusalem Post*, 21 November 1991.
39. Wawancara dengan Ephraim Sneh, anggota Knesset, Tel Aviv, 31 Juni 2004.
40. Ephraim Sneh, "An Asymmetrical Threat," *Haaretz*, 7 Februari 2004.
41. Wawancara dengan pengamat terkemuka tentang militer Israel, yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 17 Juni 2004.
42. Peres, *New Middle East*, 43
43. AFP, 12 Februari 1993.
44. "Israel Seeking to Convince U.S. That West Is Threatened by Iran," *Washington Post*, 13 Juni 1993.
45. Wawancara dengan Gary Sick, New York, 25 Februari 2004.
46. "Israel Focuses on the Threat Beyond the Periphery," *New York Times*, 8 November 1992.
47. Wawancara dengan Asisten Sekretaris Negara Robert Pelletreau, Washington, D.C., Juni 1, 2004.
48. Israel Shahak, "How Israel's Strategy Favors Iraq over Iran," *Middle East International*, No. 446, 19 Juni 1993, 91.
49. Shai Feldman, "Confidence Building and Verification: Prospects in the Middle East," *JCSS Study 25* (1994): 167. "Iran Is Going Nuclear, Israel Says," Reuters, 17 September 1992.
50. Reuters, 25 Juni 1992. "Iran Greatest Threat, Will Have Nukes by '99," Associated Press, 12 Februari 1993. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Iran saat itu sedang mengembangkan senjata nuklir. Hingga hari ini, Iran tidak dapat meyakinkan IAEA bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan-tujuan perdamaian, tetapi IAEA belum menemukan bukti program senjata ini.
51. Peres, *New Middle East*, 41, 42, 63, 81, 82.
52. Wawancara dengan Shmuel Limone, Kementerian Pertahanan, sekretaris komite Israel untuk Iran, Tel Aviv, 18 Juni 2004.
53. Feldman, "Confidence Building and Verification," 25.
54. Peres, *New Middle East*, 19, 41.
55. Wawancara dengan Menashri, 26 Juni 2004. Menashri juga anggota komite Israel untuk Iran.
56. Wawancara dengan David Makovsky, *Washington Institute for Near East Policy*, Washington, D.C., 3 Juni 2004.
57. Wawancara dengan Shmuel Bar, Tel Aviv, 18 Juni 2004.
58. Wawancara dengan Shlein, 1 Juni 2004.
59. Peres, *New Middle East*, 19. Shahak, *Open Secrets*, 91. Wawancara dengan Ivry, 19 Juni 2004.
60. Peres, *New Middle East*, 83.
61. "Israel Seeking to Convince U.S. That West Is Threatened by Iran," *Washington Post*, 13 Juni, 1993.
62. "Israel Focuses on the Threat Beyond the Periphery," *New York Times*, 8 November 1992.
63. Wawancara dengan Sneh, 31 Oktober 2004.
64. Wawancara dengan Kenneth Pollack, Washington, D.C., 29 November 2004.

65. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
66. Wawancara dengan Scowcroft, 27 September 2004.
67. Wawancara dengan Duta Besar Nabil Fahmi, Washington, D.C., 12 Oktober 2004.
68. Wawancara dengan Bader Omar Al-Dafa, duta besar Qatar untuk Amerika Serikat, Washington, D.C., 26 Mei 2004; dan Fahmi, 12 Oktober 2004.
69. Wawancara dengan diplomat Israel yang berbicara dengan kondisi non-atribusi, New York, 31 Maret 2004.
70. Feldman,"Confidence Building and Verification," 168. Wawancara dengan Dore Gold, Jerusalem, 28 Oktober 2004. Gold berpandangan bahwa meskipun kekuatan militer penting sekali bagi pertahanan Israel, hal ini merupakan strategi defensif tanpa ambisi hegemonik baik secara politik maupun budaya.
71. Wawancara dengan Shlomo Brom, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober 2004.
72. Yahya Sadowski, *Scuds or Butter? The Political Economy of Arms Control in the Middle East* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1993), 64–65.
73. Paul J. White and William S. Logan, *Remaking the Middle East* (New York: Berg, 1997), 208.
74. Ehteshami and Hinnebusch, *Foreign Policies of Middle East States*, 85.
75. Belanja Militer di Dunia dan Transfer Senjata, Departemen Luar Negeri AS, Biro Verifikasi dan Layanan.
76. Wawancara dengan mantan Asisten Sekretaris Negara Martin Indyk, Washington, D.C., 4 Maret 2004.
77. Eric Margolis, "Israel and Iran: The Best of Enemies," *Toronto Sun*, 5 Juli 1998.
78. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
79. Wawancara dengan Brom, 26 Oktober 2004.
80. Wawancara dengan Ranaan Gissin, Yerusalem, 31 Oktober 2004.
81. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
82. White and Logan, *Remaking the Middle East*, 205–207.
83. Wawancara dengan Fahmi, 12 Oktober 2004.
84. Wawancara dengan Barry Rubin, *Global Research in International Affairs Center*, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
85. Wawancara via telpon dengan Halevi, 17 Juni 2006.
86. Wawancara dengan pakar tentang Iran dari Israel yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 30 Oktober 2004.
87. Wawancara dengan Brom, 26 Oktober 2004.
88. AFP, April 5, 1993.
89. Wawancara dengan Jenderal Amnon Lipkin-Shahak, Tel Aviv, 25 Oktober 2004.
90. Shahak, *Open Secrets*, 82–83.
91. Feldman,"Confidence Building and Verification," 167.
92. Ehteshami and Hinnebusch, *Foreign Policies of Middle East States*, 123.
93. Ehud Sprinzak, "Revving Up an Idle Threat," *Haaretz*, 29 September 1998.
94. Ephraim Kam, kuliah di Universitas Tel Aviv, Februari 2004.
95. Wawancara dengan Makovsky, 3 Juni 2004.
96. Makovsky, *Making Peace with the PLO*, 112.
97. Wawancara dengan Ehud Yaari, Yerusalem, 24 Oktober 2004. Israel harus menyetujui "konsesi menyakitkan" dengan tetangga dekatnya untuk mengahdapi "sajian tidak

menarik yang diberkan Iran, yaitu fanatisme, penggunaan terorisme global secara sengaja, pengembangan senjata pemusnah massal, dan pengiriman senjata," penasihat Rabin, Rabinovich, berkomentar. Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004.
98. Wawancara dengan Ross, 29 May 2004.
99. Jim Lobe, "'Strategic Consensus' Redux?" *IPS*, 4 Oktober 2006.
100. "Peres Says Iran Greatest Threat to Arabs," Reuters, 28 November 1993.
101. Peres, *New Middle East*, 91, 146.
102. Radio Monte Carlo, 16 Mei 1996.
103. Wawancara dengan Fahmi, 12 Oktober 2004.
104. Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004.
105. Wawancara dengan Efraim Inbar, *Begin-Sadat Center*, Yerusalem, 19 Oktober 2004.
106. Wawancara dengan Makovsky, 3 Juni 2004.
107. Wawancara dengan Indyk, 4 Maret 2004.
108. Wawancara dengan Feldman, 27 Oktober 2004.
109. Wawancara dengan Yaari, 24 Oktober 2004.
110. "Israel Seeking to Convince U.S. That West Is Threatened by Iran," *Washington Post*, 13 Oktober 1993.
111. Wawancara dengan Inbar, 19 Oktober 2004.
112. Murphy, "Impact of the Arab-Israeli Peace Process," 426.
113. Wawancara dengan mantan Penasihat Keamanan Nasional Anthony Lake, Washington, D.C., 5 April 2004.
114. Gary Sick, "The Future of U.S.-Iran Relations," *Middle East Economic Survey*, 21 Juni 1999, D1-D6.
115. F. Gregory Gause III, "The Illogic of Dual Containment," *Foreign Affairs*, Maret/April 1994.
116. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 263.
117. Wawancara dengan Pelletreau, 1 Maret 2004.
118. Wawancara dengan Scowcroft, 27 September 2004.
119. Wawancara dengan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang berbicara dengan kondisi non-atribusi, Oktober 2004.

Bab 15—Dari Perdamaian Dingin ke Perang Dingin

Epigraf: *Mideast Mirror*, Maret 10, 1995.

1. Shahram Chubin, "Iran's Security Policy in the Post-Revolutionary Era," *RAND* (2001), 10. Wawancara dengan Ali Reza Alavi Tabar, Teheran, 21 Agustus 2004.
2. Wawancara dengan Wakil Menteri Luar Negeri Hadi Nejad-Hosseinian, Teheran, 12 Agustus 2004.
3. Wawancara dengan Abbas Maleki, Teheran, 1 Agustus 2004.
4. Wawancara dengan Mohammad Reza Dehshiri, kepala Departemen Studi Regional, Sekolah Hubungan International, Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, 24 Agustus 2004. R. K. Ramazani, tinjauan terhadap buku *The Foreign Policy of the Islamic Republic* karya Mahmoud Sariolghalam dalam *Discourse: An Iranian Quarterly 2* (2001): 216.
5. Wawancara dengan Mahmoud Sariolghalam, guru besar di Universitas Shahid Beheshti dan penasihat di Dewan Penasihat Keamanan Nasional Iran, 18 Agustus 2004, Teheran.
6. Ephraim Kam, speech given at Universitas Tel Aviv, Februari 10, 2004.

7. Wawancara dengan Tabar, 21 Agustus 2004.
8. Wawancara dengan Amir Mohebian, Teheran, 19 Agustus 2004.
9. Wawancara dengan Nejad-Hosseinian, 12 Agustus 2004.
10. Wawancara dengan Mohebian, 19 Agustus 2004; and Sariolghalam, 18 Agustus 2004.
11. Wawancara dengan Davoud Hermidas-Bavand, guru besar di Universitas Shahid Beheshti and mantan diplomat Irani, Teheran, 8 Agustus 2004.
12. Wawancara dengan Nejad-Hosseinian, 12 Agustus 2004.
13. David Menashri, "Revolution at a Crossroads," Policy Paper 43, *Washington Institute for Near East Policy*, 1997, 81. Shaul Bakhash, "Iran: Slouching Towards the 21," dalam *The Middle East Enters the Twenty-First Century*, ed. Robert O. Freedman (Gainesville: University Press of Florida, 2002), 57–58.
14. Wawancara dengan Mohammad Reza Tajik, konsultan President Khatami dan direktur *Strategic Studies Center of the President's Office*, Teheran, 25 Agustus 2004.
15. Clark Staten, "Israeli-PLO Peace Agreement-Cause of Further Terrorism?," *Emergency-Net NEWS*, 12 Oktober 1993.
16. Wawancara dengan Masoud Eslami dari Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, 23 Agustus 2004.
17. Reuters, 5 Maret 1994.
18. Wawancara dengan Hermidas-Bavand, 8 Agustus 2004.
19. Wawancara dengan Tajik, 25 Agustus 2004; dan A. A. Kazemi, mantan diplomat Iran pada masa awal rezim Khomeini, Teheran, 16 Agustus 2004.
20. Wawancara dengan Mustafa Zahrani dari the Kementerian Luar Negeri Iran, New York, 26 Februari 2004.
21. Wawancara dengan Hermidas-Bavand, 8 Agustus 2004.
22. Wawancara dengan Tabar, 21 Agustus 2004.
23. Wawancara dengan Eslami, 23 Agustus 2004.
24. Wawancara dengan Tabar, 21 Agustus 2004.
25. Houchang Chehabi, *Distant Relations: Iran and Lebanon in the Last 500 Years* (New York: I. B. Tauris, 2006), 230.
26. Robert O. Freedman, *The Middle East Enters the Twenty-First Century* (Gainesville: University Press of Florida, 2002), 58. Wawancara dengan Shlomo Brom, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober 2004.
27. Wawancara dengan Ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.
28. Wawancara dengan Brom, Juni 26, 2004. "Mereka memiliki hubungan baik dengan Hamas dalam jangka waktu yang cukup lama, meskipun hingga saat ini menurut saya hubungan mereka dengan Hamas lebih lemah dibandingkan dengan kelompok Islam lainnya. Tetapi pada 1991 Hezbollah menjadi kelompk paling utama."
29. Wawancara dengan Duta Besar Nabil Fahmi, Washington, D.C., 12 Oktober 2004.
30. "Iran Blasts the PLO," *Washington Post*, 30 April 1994.
31. Marc Perelman, "Israeli Report Calls Argentina Bombing Payback for '92 Raid," *Forward*, 22 Juli 2005.
32. Wawancara dengan Itamar Rabinovich, mantan penasihat Rabin and duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
33. Wawancara dengan Jenderal Amnon Lipkin-Shahak, Tel Aviv, 25 Oktober 2004. "Iran mulai akrab dengan terorisme global anti-Israel dengan aksi penghancuran di Argentina, pada 1994," Rabinovich memberi keterangan. "Terorisme sebagai isu global

menjadi isu besar dalam perspektif kami dengan Iran sejak 1994," Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004.

34. Wawancara dengan Yossi (Joseph) Alpher, mantan pejabat Mossad and penasihat senior Ehud Barak, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
35. Wawancara telpon dengan Efraim Halevi, mantan kepala Mossad, 17 Juni 2006.
36. Wawancara dengan Brom, 26 Oktober 2004. "Dalam aksi bom bunuh diri yang dimulai pada 1994– 1995, Iran cukup aktif untuk mendorong kelompok Jihad Islam agar memulai berbagai aksi bom bunuh diri ini," Brom menjelaskan.
37. Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004.
38. Departemen Luar Negeri AS memberikan informasi detail tentang aktifitas kelompok teroris MKO di situs, http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/2001/6531.htm.
39. "Iranian Opposition Approaches Israel," *Voice of Israel*, 1 Mei 1995. "Sementara Israel tidak mengidentifikasi dirinya sebagai oposisi terhadap rezim Teheran, Israel mendukung kampanye politik untuk menghentikan pemerintahan petahana di Iran," Nisim Zvili, sekretaris jenderal Partai Buruh, menjelaskan.
40. Wawancara dengan David Menashri, guru besar di Universitas Tel Aviv, Tel Aviv, Oktober 26, 2004.
41. Wawancara dengan pengamat terkemuka tentang militer Israel yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
42. Iran-Interlink, http://www.iran-interlink.org/files/News3/Mei05/interlink040505.htm. Perusaha Israel yaitu kelompok Intergama Investment dan kelompok Kardan, menggunakan Laporan-Jarak Jauh REEM dan Laporan Jarak Jauh via satellit Tel-Aviv.
43. Anoushiravan Ehteshami and Raymond Hinnebusch, The *Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 82. Wawancara dengan Ephraim Sneh, anggota Knesset, Tel Aviv, 31 Oktober 2004. Wawancara dengan mantan Menteri Pertahanan Moshe Arens, Tel Aviv, Juni 21, 2004.
44. David Makovsky, *Making Peace with the PLO* (Boulder: Westview, 1996), 112.
45. Wawancara dengan Menashri, 26 Oktober 2004.
46. Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004.
47. Wawancara dengan diplomat Israeli yang berbicara dengan kondisi non-atribusi, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
48. Wawancara dengan Ephraim Kam, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober 2004.
49. Wawancara dengan Efraim Inbar, *Begin-Sadat Center*, Yerusalem, 19 Oktober 2004.
50. Shai Feldman, *Confidence Building and Verification: Prospects in the Middle East*, JCSS Study No. 25 (Tel Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies, 1994), 199.
51. Israel Shahak, *Open Secrets—Israeli Nuclear and Foreign Policies* (London: Pluto, 1997), 64.
52. Eric Margolis, "Israel and Iran: The Best of Enemies," *Toronto Sun*, 5 Juli 1998.
53. Mahmoud Sariolghalam, "Iranian Perceptions and Responses," *Journal of Political and Military Sociology 29* (2001): 297.
54. Wawancara via telpon dengan Soli Shavar, Haifa, 28 Oktober 2004.
55. Wawancara dengan Jenderal David Ivry, kepala Komite Israel untuk Iran Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
56. Wawancara dengan Jenderal Amos Gilad, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
57. Giandomenico Picco, *Man Without a Gun* (New York: Random House, 1999), 232.

58. Wawancara dengan Yitzak Segev, mantan atase militer Israel untuk Iran, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
59. Wawancara dengan Ehud Yaari, Yerusalem, 24 Oktober 2004.
60. Wawancara dengan mantan Menteri Keuangan Israel, Dan Meridor, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
61. Wawancara dengan Shai Feldman, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
62. Wawancara dengan Gilad, 31 Oktober 2004.
63. Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004.
64. Wawancara dengan Alpher, 27 Oktober 2004. "Ada kekhawatiran jika Amerika berbicara dengan Iran, Israel akan ditinggalkan sendirian," Gerald Steinberg menjelaskan, guru besar di Universitas Bar Ilan, Israel. "Setan Besar akan bekerjamsa dengan Iran dan melupakan Israel." Wawancara dengan Gerald Steinberg, Yerusalem, 28 Oktober 2004.
65. Wawancara dengan diplomat Israel yang berbicara dengan kondisi non-atribusi, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
66. Pada 1998 and 1999, misalnya, majalah *Fortune* menjuluki *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)* sebagai lembaga lobi terkuat kedua di Washington setelah *AARP (American Association for Retired Persons)*. Pada 6 Juli 1987, the *New York Times* menggambarkan AIPAC sebagai "sebuah kekuatan besar yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah." Artikel ini juga menyatakan bahwa "AIPAC telah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan kandidat presiden untuk memilih stafnya, menghentikan penjualan senjata ke negara-negara Arab, dan bekerja sebagai katalisator untuk menginisiasi hubungan militer antara Pentagon dan pasukan Israel. Para pejabat elitnya dikonsultasikan dengan Departemen Luar Negeri AS and pemegang kebijakan di Gedung Putih, oleh para senator dna jenderal." David K. Shipler, "On Middle East Policy, a Major Influence," *New York Times*, 6 Juli 1987.
67. Wawancara dengan Alpher, 27 Oktober 2004.
68. Samuel Segev, *Crossing the Jordan* (New York: St. Martin's, 1998), ch. 1.
69. Wawancara dengan Jess Hordes, direktur kantor *Anti-Defamation League's Washington*, Washington, D.C., 24 Maret 2004.
70. Wawancara dengan Alpher, 27 Oktober 2004.
71. Segev, *Crossing the Jordan*, ch. 1.
72. Wawancara dengan Hordes, 24 Maret 2004.
73. Farideh Farhi, "Economic Statecraft or Interest Group Politics: Understanding U.S. Sanctions on Iran," *The Iranian Journal of International Affairs 1* (Musim Panas 1997): 67.
74. Wawancara dengan Feldman, 27 Oktober 2004.
75. Shahak, *Open Secrets*, 84.
76. Efraim Karsh,"Israel's Imperative," *Washington Quarterly 3* (2000): 155.
77. Reuters, 12 September 1994.
78. Wawancara dengan Kenneth Pollack, Washington, D.C., 29 November 2004. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 260.
79. Emma Murphy, "The Impact of the Arab-Israeli Peace Process on the International Security and Economic Relations of the Persian Gulf," *The Iranian Journal of International Affairs 2* (Musim Panas 1996): 426. Wawancara dengan Keith Weissman

dari *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*, Washington, D.C., 25 Maret 2004.

80. Wawancara dengan mantan Penasihat Keamanan Nasional Brent Scowcroft, Washington, D.C., 27 September 2004.
81. Reuters, 15 Desember 1994.
82. Reuters, 6 Januari 1995.
83. UPI, 1 Januari 1995.
84. Wawancara dengan Pollack, 29 November 2004.
85. John Esposito and R. K. Ramazani, *Iran at the Crossroads* (New York: Palgrave, 2001), 203.
86. Naskah pidato Warren Christopher, "Maintaining the Momentum for Peace in the Middle East," Georgetown University, 25 Juni 1994.
87. *Mideast Mirror*, 10 Maret 1995.
88. Paul J. White and William S. Logan, *Remaking the Middle East* (New York: Berg, 1997), 199.
89. Wawancara dengan Duta Besar Daniel Kurtzer, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
90. Pollack, *Persian Puzzle*, 260.
91. Ibid., 268–270.
92. Ami Ayalon, *Middle East Contemporary Survey* (1994).
93. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
94. Wawancara dengan Rabinovich, 17 Oktober 2004.
95. Wawancara dengan Pollack, 29 November 2004.
96. Wawancara dengan Bijan Khajepour, Washington, D.C., 17 Februari 2004.
97. Lamis Andoni, "When Iran Hedges Closer, U.S. Pushes Away," *Christian Science Monitor*, 7 April 1995.
98. Colin Barraclough, "Iran Seeks Oil Partners, U.S. Firms Can't Join the Dance," *Christian Science Monitor*, December 12, 1995.
99. Pollack, *Persian Puzzle*, 271.
100. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
101. "Comprehensive U.S. Sanctions Against Iran: A Plan for Action," *AIPAC Report*, 2 April 1995.
102. John Greenwald, "Down Goes the Deal," *Time*, 27 Maret 1995.
103. "Clinton's Anti-Iran Move," *Christian Science Monitor*, 2 Mei 1995.
104. Pernyataan Sekretaris Negara Christopher di Gedung Putih, 1 Mei 1995.
105. Pollack, *Persian Puzzle*, 273.
106. "Clinton's Anti-Iran Move," *Christian Science Monitor*, 2 Mei 1995.
107. Pollack, *Persian Puzzle*, 259–260.
108. Wawancara dengan Duta Besar Dennis Ross, Washington, D.C., 29 Mei 2004.
109. Associated Press, 9 Mei 1995.
110. "Greatest Threat from Iran Says Peres," *Jerusalem Post*, 10 Mei 1995.
111. Wawancara dengan Ross, 29 Mei 2004.
112. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004. G. Moffett, "Push to Widen Libya Sanctions Riles U.S. Allies," *Christian Science Monitor*, 24 Januari 1996. Pollack, *Persian Puzzle*, 270.
113. Dengan terlibat langsung dalam setiap tahap pembahasan draft, yang kemudian dikenal dengan ILSA (*the Iran Libya Sanctions Act*), *American Israel Public Affairs*

Committee (AIPAC) menjadi satu-satunya kelompok lobi yang hadir ketika *Ways and Means Committee* mendiskusikan draft ini di Gedung Putih. Farhi, "Economic Statecraft," 66.

114. *White House Fact Sheet*, 6 Agustus 1996.
115. Keterangan Asisten Sekretaris Negara Pelletreau sebelum *House International Relations Committee*, 2 Mei 1995.
116. Gary Sick, "The Future of U.S.-Iran Relations," *Middle East Economic Survey*, 21 Juni 1999.
117. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
118. Komentar dari Martin Indyk dalam sebuah debat public di Cooper Union, New York City, 28 September 2006.
119. Wawancara dengan Sneh, 31 Oktober 2004.

Bab 16—Kembalinya Doktrin Periperial bersama Partai Likud

Epigraf: Wawancara dengan Dore Gold, Yerusalem, 28 Oktober 2004.

1. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 245.
2. Emma Murphy, "The Impact of the Arab-Israeli Peace Process on the International Security and Economic Relations of the Persian Gulf," *The Iranian Journal of International Affairs 2* (Musim Panas 1996): 435.
3. Wawancara dengan Ephraim Kam, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober 2004. Wawancara dengan Efraim Inbar, *Begin-Sadat Center*, Yerusalem, 19 Oktober 2004. "Iran Rallies Against Peace," *Near East Report WINEP*, 24 Januari 2000.
4. Wawancara dengan Itamar Rabinovich, mantan penasihat Rabin and Israeli duta besar untuk Amerika Serikat, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
5. "Iran Rallies Against Peace," *Near East Report WINEP*, 24 Januari 2000.
6. Wawancara dengan Keith Weissman dari *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*, Washington, D.C., 25 Maret 2004.
7. Wawancara dengan mantan Asisten Sekretaris Negara Martin Indyk, Washington, D.C., 4 Maret 2004.
8. Ibid. Pejabat Amerika lainnya kurang tertarik dengan kecerdikan Iran dan lebih kritis terhadap sikap Waashington. Menurut salah satu pejabat senior yang ingin dirahasiakan namanya: "Menurut saya, dengan mengatakan bahwa Iran telah mengakali kita adalah sebuah kekeliruan. Jika pada 1 November 1991 kita berada dalam dominasi [satu hari setelah konferensi Madrid], mengapa kita tidak mengeksploitasinya lebih jauh? Mengapa kita tidak menyelesaikan krisi Arab-Israel? Mengapa kita tidak kita tidak berhasil jika semuanya berjalan sesuai dengan kehendak kita? Enam bulan kemudian, Shamir berhenti, maka kita tidak memiliki alasan itu. kita telah menyingkirkan Arafat. Maka, dia bukanlah faktor utama. Bagaimana Iran melakukannya? Saya akan lebih mengkritisi diri sendiri dalam analisa saya. Menurut saya, mengatakan bahwa Iran telah mengakali kita dengan melakukan teror merupakan kekeliruan nyata dan tindakan 'cuci-tangan'. Tentu saja mereka akan memilih aksi teror, itulah yang mereka miliki. Tentu saja mereka akan melakukan pengeboman, dan mereka pergi ke pihak yang memiliki keahlian tersebut, Pakistan dna Korea Utara. Saya harap pakar kita tentang Iran mengetahui hal ini. Saya tidak merasa kita begitu bodoh untuk tidak mengetahui hal itu."

9. Wawancara dengan Duta Besar Daniel Kurtzer, Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
10. Reuters, 7 November 1995.
11. Reuters, 5 November 1995.
12. Reuters, 8 Februari 1996.
13. *Israel Line*, 15 Februari 1996.
14. Reuters, 7 Maret 1996.
15. Reuters, 8 April 1996. Binyamin Netanyahu, pesaing Peres dalam pemilihan umum, tidak ingin publik berkesimpulan bahwa serangan teror di Israel membuatnya memenangkan pemilihan dan bereaksi dengan mendapatkan bantuan dari Amerika dan Jerman untuk mengirimkan pesan kuat kepada Iran dan Syria. AFP, 8 April 1996.
16. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
17. Wawancara dengan Shlomo Brom, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober 2004.
18. Wawancara dengan seorang pejabat militer Israel yang terlibat dalam pertemuan Komite Iran. Dia berbicara dalam kondisi non-atribusi. Tel Aviv, Oktober, 2004.
19. "Israeli Election Draws Mixed Reactions," CNN, 30 Mei 1996.
20. Wawancara dengan Ehud Yaari, Yerusalem, 24 Oktober 2004.
21. Wawancara dengan Yossi (Joseph) Alpher, mantan pejabat Mossad dan senior penasihat Ehud Barak, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
22. Wawancara dengan Dore Gold, Jerusalem, Juni 28, 2004.
23. Wawancara dengan Weissman, Maret 25, 2004.
24. Wawancara dengan Shmuel Limone, Kementerian Pertahanan, sekretaris komite Israel untuk Iran, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
25. Wawancara dengan Alpher, 27 Oktober 2004.
26. Wawancara dengan Jenderal David Ivry, kepala Komite Israel untuk Iran Tel Aviv, 19 Oktober 2004.
27. Wawancara dengan Limone, 18 Oktober 2004.
28. Wawancara dengan Marshal Breger, guru besar Catholic University, Washington, D.C., 11 Oktober 2004.
29. Wawancara dengan Limone, 18 Oktober 2004.
30. Wawancara dengan Jenderal Amos Gilad, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
31. Wawancara dengan Shmuel Bar, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
32. Wawancara dengan Inbar, 19 Oktober 2004.
33. Uzi Arad, "Russia and Iran's Nuclear Program," *Jerusalem Issue Brief*, 28 April 2003.
34. Wawancara dengan Brom, 26 Oktober 2004.
35. Wawancara dengan pengamat terkemuka tentang militer Israel yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
36. Wawancara dengan Gilad, 31 Oktober 2004.
37. Wawancara dengan Yaari, 24 Oktober 2004.
38. Wawancara dengan Gold, 28 Oktober 2004.
39. Aluf Ben, "A Change in Israeli-Iranian Relations,"*Haaretz*, 10 November 1996. David Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran* (London: Frank Cass, 2001), 296.
40. "Israel Looks Again at Iran Relations," Channel 2, 22 November 1996. Usaha Lubrani berbuah dengan alokasi 18 juta dolar dari CIA untuk merusak stabilitas pemerintahan Iran. Pollack, *Persian Puzzle*, 273.
41. Wawancara dengan Gold, 28 Oktober 2004.

42. "Likud said to seek understanding with Iran," *RAND*, 24 Juli 1996. IDF Radio, November 10, 1996. *Xinhua*, 13 September 1996. *Xinhua*, 28 September 1996.
43. *Jerusalem Post*, 9 September 1997.
44. Pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam *Joint Session of the United States Congress*, Washington, D.C., 10 Juli 1996.
45. Wawancara dengan Gold, 28 Oktober 2004.
46. Wawancara dengan Indyk, 4 Maret 2004.
47. Reuters, 28 Agustus 1997.
48. Wawancara dengan Barry Rubin, *Global Research in International Affairs Center*, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
49. Wawancara dengan Gold, 28 Oktober 2004.
50. Ibid.
51. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
52. Wawancara dengan Bar, 18 Oktober 2004.
53. Wawancara dengan Weissman, 25 Maret 2004.
54. Wawancara dengan Gold, 28 Oktober 2004.
55. Ibid. Menurut Gold, 50–70 persen pendanaan Hamas berasal dari Arab Saudi.
56. IDF Radio, 10 November 1996.
57. Wawancara dengan Gilad, 31 Oktober 2004.
58. IDF Radio, 10 November 1996.
59. Wawancara dengan manta Menteri Keuangan Israel, Dan Meridor, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
60. Wawancara dengan Amir Mohebian, 19 Agustus 2004. Wawancara dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahmoud Vaezi, Teheran, 16 Agustus 2004.
61. Reuters, 25 Juni 1996.
62. Wawancara dengan mantan anggota Parlemen dan ahli strategi kelompok reformis, Mohsen Mirdamadi, Teheran, 22 Agustus 2004.
63. "Iran Helps Free Hostages,"AFP, 29 April 1996.
64. Wawancara dengan pengamat terkemuka tentang militer Israel yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
65. IDF Radio, 10 November 1996.
66. Reuters, 22 Juli 1996.
67. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, New York, 26 Februari 2004.

Bab 17—Kebijakan Detente Khatami

Epigraf: Presiden Mohammad Khatami, wawancara dengan CNN, 7 Januari 1998.

1. Anoushiravan Ehteshami and Raymond Hinnebusch, The *Foreign Policies of Middle East States* (London: Lynne Rienner, 2002), 302.
2. Kayhan Barzegar, "Détente in Khatami's Foreign Policy and Its Impact on Improvement of Iran-Saudi Relations," *Discourse: An Iranian Quarterly 2* (2002): 160–167.
3. Pidato Putera Mahkota Pangeran Abdullah pada Pertemuan kesebelas OKI, Teheran, 10 Desember 1997.
4. Reuters, 25 Maret 1997.
5. Wawancara dengan Duta Besar Nabil Fahmi, Washington, D.C., 12 Oktober 2004.
6. *Xinhua*, 24 Juni 1997. Reuters, 2 April 1997.

7. David Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran* (London: Frank Cass, 2001), 243.
8. *Xinhua*, 1 November 1997.
9. Reuters, 11 November 1997.
10. R. K. Ramazani, "Ideology and Pragmatism in Iran's Foreign Policy," *Middle East Journal 4* (2004): 558.
11. "Transcript of Interview with Iranian president Mohammad Khatami," CNN, 7 Januari 1998.
12. Ali Ansari, *Confronting Iran* (New York: Basic Books, 2006), 155–156.
13. *Dow Jones*, 27 Mei 1997.
14. Wawancara dengan David Makovsky, *Washington Institute for Near East Policy*, Washington, D.C., 3 Juni 2004.
15. The White House, Office of the Press Secretary, "Remarks at the Millennium Evening: The Perils of Indifference: Lessons Learned from a Violent Century," diterbitkan 12 April 1999.
16. Bulent Aras, "Turkish-Israeli-Iranian Relations in the Nineties: Impact on the Middle East," *Middle East Policy 3* (2000): 156. Misalnya, *Anti-Defamation League* dan *Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations* menetang keputusan pemerintahan Clinton untuk mencabut larangan impor telur ikan, permadani Iran, dan kacang pistasi dari Iran. "Israel, U.S. Jewish Lobby Disagree on Iran Sanctions," UPI, 22 September 2000.
17. "U.S. Move to Engage Iran Worries Supporters of Israel," JTA, 22 Juni 1998. Ansari, *Confronting Iran*, 142–143.
18. "Washington Event Boycott Said Censure of U.S.-Iran Moves," Israeli TV, 18 Juni 1998.
19. Wawancara dengan Dore Gold, Yerusalem, 28 Oktober 2004. Wawancara dengan Yossi (Joseph) Alpher, mantan pejebat Mossad dan penasihat senior Ehud Barak, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
20. Federal News Service, 28 Februari 1997.
21. Reuters, 4 Maret 1997.
22. Reuters, 26 Maret 1997.
23. Dore Gold, "Middle East Missile Proliferation, Israeli Missile Defense, and the ABM Treaty Debate," J*erusalem Letter-Jerusalem Center for Public Affairs*, 15 Mei 2000.
24. Reuters, 28 Mei 1997.
25. Wawancara dengan Makovsky, 3 Juni 2004.
26. Wawancara telpon dengan Menteri Luar Negeri Shlomo Ben-Ami, 21 Mei 2006.
27. *Israel Line*, 26 Agustus, 1997.
28. Reuters, November 16, 1997. Efraim Karsh, "Israel's Imperative," *Washington Quarterly 3* (2000): 160. Pada saat yang sama, Israel memberila pesawat F-15i buatan Amerika, sebuah pesawat tempur yang mampu menjangkau Iran. *Dow Jones*, 17 September 1997.
29. Wawancara dengan Ranaan Gissin, Yerusalem, 31 Oktober 2004.
30. Wawancara dengan Alpher, 27 Oktober 2004. Wawancara dengan David Menashri, guru besar di Universitas Tel Aviv, Tel Aviv, 26 Oktober 2004. Pada tahap ini, loyalitas terhadap doktrin periperial lebih kuat dalam Partai Likud.
31. Wawancara dengan Ephraim Sneh, anggota Knesset, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
32. "Israel Finds New Ally to Stop Iranian Nuclear Bomb," *Independent*, 29 Desember 1995.
33. Ilan Berman, "Israel, India, and Turkey: Triple Entente?" *Middle East Quarterly 4* (2002).

34. Wawancara dengan Alpher, 27 Oktober 2004.
35. Wawancara dengan Gissin, 31 Oktober 2004.
36. Erich Marquardt, "U.S. Seeks to Ostracize Iran," *Asia Times*, 30 September 2004.
37. Wawancara dengan Gissin, 31 Oktober 2004.
38. Wawancara dengan Jenderal Amos Gilad, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
39. Wawancara dengan Gold, 28 Oktober 2004.
40. Wawancara dengan Gilad, 31 Oktober 2004.
41. Wawancara dengan Sneh, 31 Oktober 2004.
42. *Jerusalem Post*, 9 September 1997.
43. "Splits in Israel over Iran," *Yediot Aharonot*, 15 Desember 1997.
44. John Esposito and R. K. Ramazani, *Iran at the Crossroads* (New York: Palgrave, 2001), 206. "Netanyahu Working to Prevent U.S. Policy Shift on Iran," *Haaretz*, 15 Desember 1997.
45. Reuters, 10 Juni 1997.
46. "Israeli-Iranian Trade Ties Reportedly 'Extensive,'" *Yediot Aharonot*, 15 Desember 1999.
47. *Voice of Israel*, 28 Mei 1997. *Dow Jones*, 22 Agustus 1997.
48. Wawancara dengan Wakil Menteri Luar Negeri Hadi Nejad-Hosseinian, Teheran, 12 Agustus 2004.
49. "Netanyahu Rejects Sharon Initiative to Discuss Debt to Iran," *Tel Aviv Globes*, 1 Februari 1998.
50. Ramazani, "Ideology and Pragmatism," 557.
51. Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran*, 288.
52. Wawancara dengan Bijan Khajepour, Washington, D.C., 17 Februari 2004.
53. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.
54. Wawancara dengan Ali Reza Alavi Tabar, Teheran, 21 Agustus 2004. Reformis terkemuka, termasuk saudara Presiden Khatami, Mohammad Reza Khatami, lebih sering bersikap anti-Israel daripada kelompok konservatif. Begitu juga dengan Mohtashamipour, pendiri Hezbollah, berada di kelompok Reformis.
55. Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran*, 294. "Sebuah mangkuk yang lebih hangat daripada sop" merupakan ungkapan orang Iran yang sama artinya dengan ucapan dalam bahasa Inggris,"Lebih katolik daripada paus,"
56. Kemenangan pemilu Khatami sangat menentukan perubahan sikap Iran terhadap aksi teror sebagai alat politik. Gary Sick, "Iran: Confronting Terrorism," *Washington Quarterly 4* (2003): 93.
57. Transkrip pertemuan-pertemuan Saluran-II yang diselenggarakan di Eropa utara. Penulis menghadiri salah satu pertemuan ini pada bulan Agustus 2003 sebagai seorang observer.
58. "Transcript of Interview with Iranian President Mohammad Khatami," CNN, 7 Januari 1998.
59. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 315.
60. Wawancara dengan Khajepour, 17 Februari 2004.
61. Wawancara dengan ahli strategi politik dari Iran, Maret 2004.
62. Transkrip pertemuan-pertemuan Saluran-II yang diselenggarakan di Eropa utara.
63. Wawancara dengan Davoud Hermidas-Bavand, guru besar di Universitas Shahid Beheshti dan mantan diplomat Iran, Teheran, 8 Agustus 2004.

64. Wawancara dengan Abbas Maleki, Teheran, 1 Agustus 2004.
65. Nejad-Hosseinian, yang ada dalam kabinet pemerintahan Rafsanjani, menyatakan bahwa Rafsanjani mengikuti kebijakan yang sama .“Posisi kami adalah bahwa kami memiliki pandangan mengenai Israel, tetapi kami tidak akan memaksakan pandangan kami kepada Palestina. Kami akan menghargai keputusan mereka, tetapi kami mungkin saja tidak akan mendukungnya. Sikap ini sudah dilakukan sepanjang dekade 1900. Khatami dan Rafsanjani telah melakukannya.” Wawancara dengan Nejad-Hosseinian, 12 Agustus 2004.
66. Wawancara dengan Mohammad Reza Dehshiri, kepala *Regional Studies Department, School of International Relations*, Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, 24 Agustus 2004. Menurut Nejad-Hosseinian, Iran “tidak memiliki pertimbangan moral untuk menolak” sebuah kesepakatan yang diterima oleh Palestina dan “tidak akan punya pilihan lain kecuali menerimanya”. Wawancara dengan Nejad-Hosseinian, 12 Agustus 2004.
67. AFP, 26 Februari 1998. Reuters, 2 Mei 1998.
68. Transkrip pertemuan-pertemuan Saluran-II yang diselenggarakan di Eropa utara.
69. AFP, 17 Februari 1998. Jalali kemudian membantah bahwa pertemuan ini pernah terjadi. AFP, 18 Februari 1998.
70. Reuters, 1 Februari 1998.
71. *Xinhua*, 1 Februari 1998.
72. *Haaretz*, 20 Juni 1999. Mantan Shlomo Ben-Ami Menteri Luar Negeri tidak ingat teleh menerima tawaran seperti ini dari Iran. Wawancara via telpon, 21 Mei 2006.
73. *AIC Insight 2* (2004).
74. Mark Katz, “Iran and America: Is Rapprochement Finally Possible?,” *Middle East Policy 4* (2005): 61.
75. Wawancara dengan Gerald Steinberg, guru besar di Bar Ilan University di Israel, Yerusalem, 28 Oktober 2004.
76. AFP, 5 April 1993.
77. Wawancara via telpon dengan Ben-Ami, 21 Mei 2006.
78. H. E. Chehabi, ed., *Distant Relations: Iran and Lebanon in the Last 500 Years* (London: I. B. Tauris, 2006), 230.
79. Wawancara dengan Jenderal Amnon Lipkin-Shahak, Tel Aviv, 25 Oktober 2004.
80. “Iran Told Hezbollah to Act Inside Israel,” *Haaretz*, 29 Maret 2000.
81. Wawancara via telpon dengan Ben-Ami, 21 Mei 2006.
82. Ibid.
83. Wawancara dengan Gold, 28 Oktober 2004. Tel Aviv khawatir jika Washington, ketika termotivasi dengan peluang bisnis yang menguntungkan di Iran, akan mengabaikan kepentingan Israel dan mengakhiri kebijakan isolasi terhadap Iran.
84. Wawancara via telpon dengan mantan kepala Mossad, Efraim Halevi, 17 Juni 2006. “Selalu ada tingkat kekhawatiran, bahwa mungkin saja akan ada konsesi dari Amerik yang sebaliknya tidak akan dipertimbangakn.”
85. Wawancara via telpon dengan Ben-Ami, 21 Mei 2006.
86. Wawancara dengan mantan Menteri Keuangan Israel, Dan Meridor, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
87. “U.S. Move to Engage Iran Worries Supporters of Israel,” JTA, 22 Juni 1998.

88. Israel berhati-hati untuk tidak terlalu meremehkan kelompok reformis di Iran dan menunjukkan optimisme yang berhati-hati terhadap pemilihan umum di Iran. "Israel Cautiously Welcomes Election Results in Iran," *Xinhua*, 20 Februari 2000.
89. "Beilin: Time to 'Reassess' Iran Relations," *Haaretz*, 5 April 2000.
90. Wawancara dengan Makovsky, 3 Juni 2004.
91. "Softer Israeli Policy Sees Iran as 'Threat, Not Enemy,'" *Haaretz*, 8 Juli 1999.
92. David Makovsky, *Making Peace with the PLO* (Boulder: Westview, 1996), 112.
93. "Israel Condemns Recent 'Terrorist' Attacks in Iran," *Yediot Aharonot*, 17 Maret 2000.
94. "Israel Says Iran Missile Test Reflects Nuclear Ambitions," UPI, 15 Juli 2000.
95. "Israel Rejects Talks with Iran: Former FM," *Xinhua*, 26 September 2000.
96. Wawancara dengan ahli strategi dari kelompok reformis Iranian, Februari 2004.
97. Wawancara via telpon dengan Ben-Ami, 21 Mei 2006.
98. Bill Samii, "Iran Welcomes Israeli Withdrawal," *RFE/RL Iran Report*, 29 Mei 2000.
99. Bill Samii, "Israeli Withdrawal Leaves Questions Unanswered," *RFE/RL Iran Report*, 5 Juni 2000.
100. Safa Haeri, "Iran Tells a Bewildered Syria Hezbollah Must Play It Cool," Iran Press Service, 29 Mei 2000.
101. "Israel: Source Says Iran Inciting 'Terrorist Acts' to Spoil Political Process," *Voice of Israel*, 23 Juli 2000.
102. Wawancara via telpon dengan Halevi, 17 Juni 2006.
103. Wawancara via telpon dengan Ben-Ami, 21 Mei 2006.
104. Lihat Clayton Swisher, *The Truth About Camp David: The Untold Story About the Collapse of the Middle East Peace Process* (New York: Nation Books, 2004), dan Hussein Agha and Robert Malley, "Camp David: The Tragedy of Errors," *New York Review of Books*, 9 Agustus 2001.
105. Wawancara dengan Robert Malley, Washington, D.C., 22 April 2004.
106. Pidato Yoram Schweitzer, disampaikan pada *Iranian Challenge Seminar*, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Universitas Tel Aviv, 19 Februari 2004.
107. "Iran: Official Welcomes Egypt's, Jordan's Decisions on Ties with Israel," *RAND*, 22 November 2000.
108. "Khamenei Calls for Muslim Unity Against Israel," *Voice of the Islamic Republic of Iran*, 27 Desember 2000.
109. "Intifada Helps Iran Warm Ties with Arab World," Reuters, 6 Maret 2001.
110. "Israel: Security Sources Say Iran Funding Some of Fatah's Activists," *Voice of Israel*, 11 Juli 2001.
111. "Iran Wants War-Crimes Court to Try Israel," AFP, 19 November 2000.
112. *Israel Line*, 4 Februari 1999.
113. AFP, Mei 2, 1998, April 10, 1999.
114. Wawancara via surat elektronik dengan mantan duta besar Eropa untuk Iran, yang berbicara dengan kondisi non-atribusi, Januari 2005.

Bab 18—Pengkhianatan di Afghanistan

1. Wawancara dengan Wakil Menteri Luar Negeri Hadi Nejad-Hosseinian, Teheran, 12 Agustus 2004. "Penggunaan solusi masalah kecil untuk menyelesaikan masalah yang

lebih besar adalah pandangan tidak logis!" dia berbicara pada saya di kantornya di Teheran.

2. "Israel to Face Iran Alone When U.S. Lifts Sanctions," *Haaretz*, 19 Februari 2001.
3. Konfirmasi dari Jenderal Colin Powell sebagai sekretaris negara, 17 Januari 2001.
4. Wawancara dengan Duta Besar James Dobbins, Washington, D.C., 24 Oktober 2006.
5. Wawancara dengan Kolonel Lawrence Wilkerson, kepala staf Sekretaris Negara Colin Powell, Washington, D.C., 16 Oktober 2006.
6. "Israel to Face Iran Alone When U.S. Lifts Sanctions," *Haaretz*, 19 Februari 2001.
7. Keterangan dari Howard Kohr kepada *House International Relations Committee*, 9 Mei 2001.
8. "Renew ILSA: Let the Real Moderates Win in Iran," *WINEP*, 14 Juni 2001.
9. Iran dan Israel terus saling menuduh, tetapi Teheran telah menurunkan retorikanya dan lebih fokus untuk mengisolasi Israel secara dari komunitas internasional dengan, misalnya, mendorong negara-negara Muslim untuk mendesak larangan internasional atas penjualan senjata ke Israel. "Iran: Foreign Minister Calls for Weapons Sanction against Israel," *RAND*, 20 Agustus 2001.
10. Flynt Leverett, "Illusion and Reality," *American Prospect*, 12 September 2006.
11. Gareth Porter, "How Neocons Sabotaged Iran's Help on al-Qaeda," *IPS*, 23 Februari 2006.
12. Leverett, "Illusion and Reality."
13. Wawancara dengan Yossi (Joseph) Alpher, mantan pejabat Mossad official dan penasihat senior Ehud Barak, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
14. Patrick Bishop, "Worried Israel Feels Spurned as the West Courts Iran," *Daily Telegraph*, 26 September 2001.
15. Surat dari *Project for the New America Century* kepada Presiden George Bush, 20 September 2001. Kelompok neo-konservatif lainnya yang mendukung ide untuk menginvasi Irak dari pemerintahan Bush termasuk Bernard Lewis dan Fouad Ajami.
16. Porter, "How Neocons Sabotaged Iran's Help on al-Qaeda."
17. Ibid.
18. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House, 2004), 346–347.
19. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006. Wawancara dengan Dobbins, 24 Oktober 2006.
20. Pidato Duta Besar James Dobbins kepada *New America Foundation*, Washington, D.C., 24 Agustus 2006. Wawancara dengan Javad Zarif, duta besar Iran untuk PBB, New York, 12 Oktober 2006. Pollack, *Persian Puzzle*, 347. Michael Hirsh and Maziar Bahari, "Blowup? America's Hidden War with Iran," *Newsweek*, 19 Februari 2007.
    Konstitusi sementara menempatkan Hamid Karzai sebagai penguasa Afghanistan. Hal ini merupakan keputusan kontroversial. Beberapa panglima perang Afghan tidak mengakui otoritasnya. Salah satunya adalah Ismail Khan, yang kedekatannya dengan Iran sangat terkenal. Untuk menghapus keraguan dari harapan-harapan Teheran, menteri luar negeri Iran menghadiri pelantikan Karzai dan membawa Ismail Khan bersamanya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun yang ragu bahwa dia akan mendukung Karzai.
21. "Diplomat Iran yang berunding dengan AS selama periode ini menunjukkan bahwa ada kepentingan Teheran untuk menggunakan operasi ini agar melancarkan hubungan kembali dengan AS." Leverett, "Illusion and Reality."

22. Wawancara dengan Dobbins, 24 Oktober 2006.
23. Wawancara dengan Zarif, 12 Oktober 2006.
24. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
25. Pidato Dobbins kepada *New America Foundation*, 24 Agustus 2006.
26. Wawancara dengan Dobbins, 24 Oktober 2006. Gareth Porter, "How Neocons Sabotaged Iran's Help on al-Qaeda," *IPS*, 23 Februari 2006.
27. James Bennet, "Sharon Invokes Munich in Warning U.S. on 'Appeasement,'" *New York Times*, 5 Oktober 2001.
28. Jack Donnelly, "Nation Set to Push Sharon on Agreement," *Boston Globe*, 10 Oktober 2001.
29. "Majlis Deputy Says Israel Angered by Iran's Current Foreign Policy Posture," *Aftab-e Yazd*, 29 September 2001. Anggota legislatif lainnya, Mohsen Armin, menyampaikan pandangan yang sama dalam sebuah wawancara dengan *Norooz*. "Reformist Official Comments on National Security, Ties with USA, Israel," *Norooz*, 17 November 2001.
30. Christopher Hitchens, "Minority Report," *Nation*, 14 November 1988, 482.
31. Jim Lobe, "Ledeen's Way," *IPS*, 3 Juli 2003.
32. Michael Ledeen mendukung oposisi pro-monarki Iran di Amerika Serikat dan secara rutin muncul dalam stasiun televisi satelit yang disiarkan di luar kota Los Angeles. Meskipun hanya baru dua dekade sebelumnya dia telah terlibat erat untuk menfasilitasi penjualan senjata kepada rezim mullah di Iran, sekarang dia mencitrakan dirinya sebagai pemenang gerakan pelajar Iran.
33. Edward Herman and Gerry O'Sullivan, *The "Terrorism" Industry* (New York: Pantheon, 1989), 161.
34. Joshua Micah Marshall, Laura Rozen, and Paul Glastris, "Iran-Contra II?," *The Washington Monthly*, September 2004.
35. Laura Rozen, "Three Days in Rome," *Mother Jones*, Juli/Agustus, 2006. Seymour M. Hersh, "Moving Targets," *New Yorker*, 15 Desember 2003.
36. Marshall, Rozen, and Glastris, "Iran-Contra II?"
37. Pollack, *The Persian Puzzle*, 350–351.
38. Ali Ansari, *Confronting Iran* (New York: Basic Books, 2006), 186. Pollack, *Persian Puzzle*, 351.
39. Wawancara dengan Dobbins, 24 Oktober 2006. Wawancara dengan Zarif, 12 Oktober 2006. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
40. *AIC Insight 2* (2004).
41. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
42. Porter, "How Neocons Sabotaged Iran's Help on al-Qaeda."
43. Gary Sick, "Iran: Confronting Terrorism," *Washington Quarterly 4* (2003): 90. Wilkerson berpandangan bahwa penyertaan Iran lebih didorong oleh kebutuhan adanya negara ketiga atas dasar tujuan-tujuan retoris daripada pandangan aktual bahwa rezim di Iran sama dengan Irak dan Korea Utara secara kategoris. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
44. Ansari, *Confronting Iran*, 186–187.
45. Scott Peterson, "Pragmatism Mei Trump Zeal as Iran's Power Grows," *Christian Science Monitor*, 6 Juli 2006.
46. Pollack, *The Persian Puzzle*, 353.
47. Wawancara dengan Dobbins, 24 Oktober 2006.

48. Ansari, *Confronting Iran*, 186.
49. Pidato Dobbins kepada *New America Foundation*, 24 Agustus 2006.
50. Wawancara dengan Dobbins, 24 Oktober 2006.
51. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
52. "Israel to Ask World to Declare Iran Terror-Supporting State," *Voice of Israel*, 4 Desember 2002.
53. "Israel Compiles 'Black Book' on Iran, Says Peres," AFP, 26 Januari 2002.
54. "Khatami Urges World to Boycott Israel," *RAND*, 29 Januari 2002.
55. "Iran to Revenge with Missiles If Israel Bombs Nuclear Plant," Tass, 7 Februari 2002.
56. "Washington Wants Israel to 'Cool It' over Iran: Report," AFP, 6 Februari 2006.
57. "Iran Not an Enemy for Israel, Says National Security Chief," AFP, 18 Februari 2006.

Bab 19—Merebut Kekalahan dari Pintu Kemenangan

Epigraf: Wawancara dengan pengamat terkemuka tentang militer Israel, yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.

1. Neil Mackay, "Bush Planned Iraq 'Regime Change' Before Becoming President," *Sunday Herald*, 15 September 2002.
2. "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century," *Project for the New American Century*, September 2000. Lihat http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf.
3. Setelah perang, sebagian besar pihak di Israel berkesimpulan bahwa invasi terhadap Irak menyebabkan kerusakan Israel. Yuval Diskin, kepala keamanan internal Israel, *Shin Bet,* berbicara di hadapan kerumunan pemukim Israel pada Februari 2006 bahwa kediktatoran yang kuat di Irak akan menyebabkan kekacauan di sana. "Saya tidak yakin kita akan kehilangan Saddam," dia menegaskan. "Israel 'May Rue Saddam Overthrow,'" *BBC*, 9 Februari 2006.
4. Magdi Abdelhadi, "Israel 'Trains Iraqi Kurd Forces,'" *BBC*, 20 September 2006. "Israelis Training Kurds in Northern Iraq—Report," Reuters, 1 Desember 2005.
5. "Israel Sets Up Iran as Next Target for the U.S.," *Manchester Guardian Weekly*, 13 Februari 2002.
6. Eric Margolis, "After Iraq, Bush Will Attack His Real Target," *Toronto Sun*, 10 November 2002.
7. *Newsweek*, 19 Agustus 2002.
8. Wawancara dengan Javad Zarif, duta besar Iran untuk PBB, New York, 12 Oktober 2006.
9. Kenneth Pollack, *The Persian Puzzle* (New York: Random House: 2004), 353.
10. Wawancara dengan politisi senior Irani yang berbicara dengan kondisi non-atribusi, Teheran, Agustus 2004.
11. Michael Ledeen, "Let's Talk with Iran Now," *New York Times*, 19 Juli 1988.
12. See Laura Rozen's blog, http://www.warandpiece.com/blogdirs/001070.html.
13. Pollack, *The Persian Puzzle*, 354–355.
14. Gregory Beals, "A Missed Opportunity with Iran," *Newsday*, 19 Februari 2006.
15. Bernard Gwertzman, "Leverett: Bush Administration 'Not Serious' About Dealing with Iran," *Council on Foreign Relations*, 31 Maret 2006.
16. Gordon Corera, "Iran's Gulf of Misunderstanding with U.S.," *BBC*, 25 September 2006.

17. "Iran: Hardline Daily Dismisses Saudi Plan for Recognizing Israel," *Resalat*, 26 Februari 2002.
18. Rujukan ke Mujahedin sudah diklarifikasi Gedung Putih melalui situsnya, yang menyatakan bahwa "Kelompok teroris yang bersembunyi di Irak termasuk Mujahedin-e-Khalq Organization (MKO), yang telah menggunakan kekerasan teroris terhadap Iran pada 1970-an bertanggungjawab dalam pembunuhan beberapa anggota militer AS dan warga sipil AS." Lihat http://www.whitehouse.gov/infocus/iraq/decade/sect5.html.
19. Connie Bruck, "Exiles: How Iran's Expatriates Are Gaming the Nuclear Threat," *New Yorker*, 6 Maret 2006, 56. Andrew Higgins dan Jay Solomon, "Iranian Imbroglio Gives New Boost to Odd Exile Group," *Wall Street Journal*, 29 November 2006.
20. Gareth Porter, "Cheney-Led 'Cabal' Blocked 2003 Nuclear Talks with Iran," *IPS*, 28 Mei 2006.
21. Wawancara dengan Kolonel Lawrence Wilkerson, kepala staf Sekretaris Negara Colin Powell, Washington, D.C., 16 Oktober 2006.
22. Porter,"Cheney-Led 'Cabal.'"
23. Berdasarkan cerita versi Iran, Iran tidak membuat proposal ini; proposal dari Iran justru merupakan balasan atas proposal dari Amerika (lihat Appendiks B). Iran mengatakan bahwa pada 17 April 2003, Duta Besar Kharrazi menerima proposal dari Amerika yang berisi sebuah tawaran besar. Sumber pasti dari proposal ini tidak diketahui, tetapi mereka mengatakan bahwa proposal ini berasal dari pejabat tingkat-tinggi Departemen Luar Negeri AS, kemungkinan besar Wakil Sekretaris Negara, Richard Armitage atau Asisten Sekretaris Negara William Burns. Kharrazi mencatat bahwa pemimpin tertinggi, Ayatollah Khamenei, yang meminta Duta Besar Zarif untuk melakukan perubahan terhadap proposal dan mengembalikannya. Tidak ada satupun pejabat AS yang membenarkan cerita versi Iran ini, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa cerita ini tidak semuanya mustahil. Dapat dipahami bahwa beberapa pejabat senior Departemen Luar Negeri AS khawatir bahwa kekalahan Iran akan mendorong kelompok agresif di Washington untuk menggeser ekspansi peperangan ke Iran. Melalui inisiasi negosiasi dengan Iran, rencana peperangan ini akan redup. Jika tidak, melalui komunikasi dengan para diplomat As, Iran bisa saja mempelajari draft rencana perdamaian AS-Iran yang dibuat Departemen Luar Negeri AS atas permintaan Colin Powell segera setelah peristiwa 11 September. Pihak Iran bisa saja tidak sadar bahwa rencana ini tidak pernah disetujui Bush akibatnya bisa saja Iran mengira bahwa proposal ini merupakan proposal resmi dari AS.
24. Gwertzman,"Leverett: Bush Administration 'Not Serious.'" Pada awal 2002, Iran mengirim memo ke Washington via Swissyang menegaskan atas ketidakterlibatan Iran dalam peristiwa kapal *Karine A*.
25. Penulis memberi masukan kepada anggota Kongress, Bob Ney, tentang kebijakan lua rnegeri pada saat itu.
26. Guy Dinmore, "Washington Hardliners Wary of Engaging with Iran," *Financial Times,* 16 Maret 2004.
27. Corera, "Iran's Gulf of Misunderstanding with U.S." Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
28. Gareth Porter,"Burnt Offering," *American Prospect*, 6 Oktober 2006.
29. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006. Porter, "Cheney-Led 'Cabal.'"
30. Porter, "Burnt Offering."

31. Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
32. Dinmore, "Washington Hardliners." Wawancara dengan Wilkerson, 16 Oktober 2006.
33. Kessler, "In 2003, U.S. Spurned Iran's Offer of Dialogue." Gwertzman, "Leverett: Bush Administration 'Not Serious.'"
34. Corera, "Iran's Gulf of Misunderstanding with U.S."
35. Glenn Kessler, "Rice Denies Seeing Iranian Proposal in '03," *Washington Post*, 8 Februari 2007.
36. Beals, "A Missed Opportunity with Iran."
37. Porter, "Cheney-Led 'Cabal.'"
38. Wawancara dengan Bijan Khajepour, Washington, D.C., 17 Februari 2004.
39. Guy Dinmore, "U.S. Rejects Iran's Offer for Talks on Nuclear Programme," *Financial Times*, 15 Oktober 2003.
40. Wawancara dengan Masoud Eslami dari Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, 23 Agustus 2004.
41. Wawancara dengan penasihat di *Iranian Security National Advisor*, Agustus 2004, Teheran.
42. Wawancara dengan pejabat di Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, Agustus 2004.
43. Wawancara dengan Mohammad Reza Tajik, konsultan Presiden Khatami dan direktur *Strategic Studies Center of the President's Office*, Teheran, 25 Agustus 2004. Wawancara dengan penasihat *Iranian National Security Adviser*, Agustus 2004, Teheran.
44. Dalam jamuan makan malam, Duta Besar Zarif menjelaskan permintaan Iran atas "Hubungan AS-Iran berdasarkan sikap saling-menghargai", artinya penyertaan Iran dalam proses pengambilan keputusan regional, khususnya dalam keamanan di Teluk Persia. Penulis menghadiri makan malam ini sebagai seorang peninjau yang diundnag oleh salah satu anggota Kongres.
45. Michael Ryan Kraig, "Realistic Solutions for Resolving the Iranian Nuclear Crisis," *The Stanley Foundation Policy Analysis Brief*, Desember 2005.
46. Wawancara dengan pengamat terkemuka tentang militer Israel yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
47. William Kristol, "The End of the Beginning" *Weekly Standard* 8:34 (12 Mei 2003).
48. Reuel Marc Gerecht, "Regime Change in Iran?" *Weekly Standard*, 5 Agustus 2002.
49. Jim Lobe, "Neo-cons Move Quickly on Iran," *IPS*, 26 Mei 2003.
50. Porter, "Burnt Offering." Flynt Leverett juga mempertanyakan validitas informasi intelijen yang mengklaim peran Iran dalam aksi bom di Arab Saudi selama diskusi panel di *Center for American Progress*, 15 Desember 2006.
51. Wawancara dengan Zarif, 12 Oktober 2006.
52. *The Iranian Jewish Public Affairs Committee* merupakan organisasi kecil yang berpusat di Los Angeles. Kecenderungan kebijakannya lebih dekat dengan *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).*
53. Mark Benjamin and Eli Lake, "Senator Asks $50M to Aid Iran Dissidents," *UPI*, 8 April 2003.
54. Marc Perelman, "New Front Sets Sights on Toppling Iran Regime," *Forward*, 16 Mei 2003.
55. Wawancara dengan Keith Weissman dari *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), Washington, D.C., 25 Maret 2004.

56. "Brownback Presses French Not to Turn Over Iranian Opposition Figures," pernyataan media dari Brownback, 20 Juni 2003.
57. Wawancara dengan pejabat senior Iranian yang berbicara dengan kondisi non-atribusi, Teheran, Agustus 2004.
58. Corera, "Iran's Gulf of Misunderstanding with U.S."
59. Wawancara dengan Menashe Amir, kepala *Israeli Radio's Persian Service*, Yerusalem, 24 Oktober 2004.
60. Wawancara dengan Ephraim Sneh, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
61. Wawancara dengan pengamat terkemuka tentang militer Israel yang berbicara secara anonim, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
62. Wawancara dengan Hadi Nejad-Hosseinian, Teheran, 12 Agustus 2004.

Bab 20—Menatap Masa Depan, Menghadapi Realitas

Epigraf: Joschka Fischer, "The Case for Bargaining with Iran," *Washington Post*, 29 Mei 2006.

1. Amerika Serikat sudah berhasil menjaga hubungan strategis dengan negara yang bertentangan secara ideologis. Misalnya Arab Saudi, yang memiliki hubungan yang sangat dekat dan strategis selama beberapa dekade, meskipun Kerajaan Saudi saat itu dikuasai oleh kelompok Sunni-Wahhabi yang keras dan represif.
2. Wawancara dengan Joseph Alpher, Tel Aviv, 27 Oktober 2004. Beberapa pihak di Iran mengakui kekhawatiran Israel atas membaiknya hubungan AS-Iran. "Ketika AS semakin melihat Irak dan Iran sebagai sebuah ancaman, maka keamanan strategis Israel semakin terjamin," Masoud Eslami berkomentar. Wawancara dengan Masoud Eslami dari Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, 23 Agustus 2004.
3. Wawancara dengan Shlomo Brom, *Jaffee Center for Strategic Studies*, Tel Aviv, 26 Oktober 2004.
4. Dalam bukunya "Ideology and Pragmatism in Iran's Foreign Policy," R. K. Ramazani menulis bahwa, secara historis, pragmatisme telah mengalahkan ideologi dalam kebijakan luar negeri Irani. Lihat *Middle East Journal* 4 (2004): 549–559.
5. Wawancara dengan Mohsen Mirdamadi, mantan anggota Parlemen dan ahli strategi kelompok Reformis, Teheran, 22 Agustus 2004.
6. Ray Takeyh, "Iranian Options: Pragmatic Mullahs and America's Interests," *National Interest* 73 (2003): 51.
7. *RAND*, 12 April 2003. Tetapi Rafsanjani tampak sekali berusaha menyampaikan pandangannya sebagai sebuah kritisime-ideologis terhadap penekanan *vazifeh*.
8. Wawancara via telpon dengan Abbas Maleki, Iranian Wakil Menteri Luar Negeri pada wal hingga pertengahan 1990-an, Genewa, 27 Januari 2005.
9. Mahmoud Sariolghalam, "Justice for All," *Washington Quarterly* 3 (2001): 115. "Tidak ada kepemimpinan, meskipun kuat, yang dapat melawan fondasi geopolitik Iran," Sariolghalam menulis.
10. Barry Rubin, "Iran: The Rise of a Regional Power," *The Middle East Review of International Affairs* 10, no. 3 (September 2006).
11. Wawancara via telpon dengan Ben-Ami, 21 Mei 2006.
12. Mohammad Quchani, "The Jewish Issue Is Not Our Issue," *Sharq*, 1 Maret 2006.
13. Anderson Cooper, CNN, 21 September 2006.

14. Wawancara dengan Keith Weissman dari *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), Washington, D.C., 25 Maret 2004.
15. Dafna Linzer, "Iran Is Judged 10 Years from Nuclear Bomb," *Washington Post*, 2 Agustus 2005.
16. Wawancara dengan Itamar Rabinovich, mantan penasihat Rabin dan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Tel Aviv, 17 Oktober 2004.
17. Dafna Linzer, "Past Arguments Don't Square with Current Iran Policy," *Washington Post*, 27 Maret 2005.
18. Pada 30 Mei 2006, 144 negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok memberikan pernyataan yang mendukung hak Iran atas pengayaan uranium. Mark Heinrich, "Iran: No Global Consensus Against It Despite Pressure," Reuters, 14 Juni 2006.
19. Marc Perelman, "U.S. Pursues Diplomacy on Iran Nukes," *Forward*, 27 Januari 2006.
20. Herb Keinon, "Israel 'Mei Go It Alone' Against Iran," *Jerusalem Post*, 24 Agustus 2006.
21. Eric Fingerhut dan Debra Rubin, "Iran, Hamas Dominate AIPAC," *Washington Jewish Week*, 9 Maret 2006.
22. Ron Kampeas, "With Time Short on Iran Nukes, AIPAC Criticizes Bush Approach," JTA, 4 December 2005.
23. *Transcript of Online Newshour*, 18 Maret 2004, http://www.pbs.org/newshour/bb/international/jan-Oktober04/elbaradei_3-18.html.
24. Wawancara dengan Shmuel Limone, Kementerian Pertahanan, sekretaris komite Israel untuk Iran, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
25. Wawancara dengan Javad Zarif, duta besar Iran untuk PBB, New York, 1 April 2004.
26. "Saya tidak percaya bahwa mereka melakukannya [mengembangkan nuklir] untuk menghancurkan Israel," Ben-Ami berbicara pada saya. "Saya telah mengatakan bahwa terkadang di Israel, dan hal ini tidak pernah populer. Mari kita katakan seperti ini; Tentu saja Israel tidak harus tertarik dengan bom nuklir Iran. Tetapi kemudian, setelah mengatakan hal ini, seseorang harus melihat apa yang sebenarnya ada di belakang di belakang pengembangan nuklir ini." Wawancara via telpon dengan Ben-Ami, 21 Mei 2006.
27. Wawancara dengan Shai Feldman, Tel Aviv, 27 Oktober 2004.
28. Wawancara dengan Ehud Yaari, Yerusalem, 24 Oktober 2004.
29. Wawancara via telpon dengan Halevi, 17 Juni 2006. "Iran itu rasional. Mereka memegang pandangan yang ekstrim, tetapi mereka tidka irasional," Brom menambahkan. Wawancara dengan Brom, 26 Oktober 2004.
30. Wawancara via telpon dengan Reuven Pedatzur, direktur *Galili Center for Strategy and National Security*, Tel Aviv, 24 November 2005.
31. Wawancara dengan Gerald Steinberg, guru besar di Bar Ilan University di Israel, Yerusalem, 28 Oktober 2004. Lihat juga "Project Daniel", sebuah surveypada tahun 2003 yang ditujukan untuk mengukur ancaman bagi Israel dari negara lain di Timur Tengah. Proyek ini dipersiapkan oleh tim otoritatif dari ahli kebijakan luar negeri Israel dan ahli militer. Laporan ini disampaikan ke Perdana Menteri Ariel Sharon dan didiskusikan oleh Israel, Amerika Serikat, dan NATO.
32. "Iran: Expediency Council Office Says Israel Distorted Its Chairman's Remarks," *RAND*, 2 Januari 2002.
33. Pelajar dalam sejarah Amerika akan mencatat sebuah ketakutan yang sama dengan apa yang Richard Nion sebut sebagai "teori orang gila" (*madman theory*). Untuk mengakhiri

perang Vietnam yang menguntungkan Amerika, Nixon berbicara pada para penasihatnya bahwa akan sangat berguna jika memberikan sebuah gertakan, bahwa Nixon begitu terobsesi dengan Komunis, bahwa dia akan melakukan apapun untuk memenangkan peperangan, termasuk menggunakan senjata nuklir untuk melawan Hanoi. Lihat Seymour Hersh, *The Price of Power* (New York: Summit Books, 1983), 52–53.

34. *International Crisis Group Report*, 24 November 2004.
35. Wawancara dengan penasihat di *Iranian National Security Council*, Agustus 2004, Teheran.
36. Israel juga percaya bahwa India, dengan pertimbangan atas konfliknya dengan Pakistan yang Muslim, sedang melawan hukum geopolitik dengan tidak mengakui Isral dan menolak untuk membangun hubungan keamanan dengan Israel.
37. Wawancara dengan Ephraim Sneh, anggota Knesset, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
38. Wawancara dengan Menashe Amir, kepala *Israeli Radio's Persian Service*, Yerusalem, 24 Oktober 2004.
39. Wawancara dengan Ranaan Gissin, Yerusalem, 31 Oktober 2004. Mantan Menteri Pertahanan Moshe Arens setuju dan berpandangan bahwa setiap rezim di Iran akan mengembangkan nuklir, dan bahwa pihak di luar Iran tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan Teheran. Wawancara dengan mantan Menteri Pertahanan Moshe Arens, Tel Aviv, 21 Oktober 2004.
40. Uzi Arad, "Russia and Iran's Nuclear Program," *Jerusalem Issue Brief*, 28 April 2003.
41. Wawancara dengan Jenderal Amnon Lipkin-Shahak, Tel Aviv, 25 Oktober 2004.
42. Wawancara dengan Jenderal Amos Gilad, Tel Aviv, 31 Oktober 2004.
43. Matthew Kalman, "Israel Set War Plan More Than a Year Ago," *San Francisco Chronicle*, 21 Juli 2006.
44. Max Blumenthal, "Birth Pangs of a New Christian Zionism," *Nation*, 8 Agustus 2006. Uzi Mahnaimi, "Humbling of the Supertroops Shatters Israeli Army Morale," *Sunday Times*, 27 Agustus 2006.
45. Roee Nahmias, "Hizbullah: We Were Surprised by Israel's Response to Kidnapping," *YNews*, 26 Agustus 2006.
46. Wawancara dengan Javad Zarif, duta besar Iran untuk PBB, New York, 12 Oktober 2006.
47. Michael Slackman, "Iran Hangs in Suspense as the Conflict Plays Out," *New York Times*, 29 Juli 2006.
48. Guy Dinmore, "Experts Challenge White House Line on Iran's Influence," *Financial Times*, 18 Juli 2006.
49. Slackman, "Iran Hangs in Suspense."
50. Wawancara dengan Gerald M. Steinberg, Dewan untuk Hubungan Luar Negeri, 1 Agustus 2006. See http://www.cfr.org/publication/11215/.
51. Ze'ev Schiff, "Teheran's Role Is Extensive,"*Haaretz*, 16 Juli 2006.
52. Mahnaimi, "Humbling of the Supertroops."
53. Wawancara dengan Zarif, 12 Oktober 2006.
54. Hassan M. Fattah, "Fearful of Iran, Arab Leaders Criticize Militants," *New York Times*, 17 Juli 2006.
55. "Dampened Trust? A Conversation with Nawaf Obaid," *SUSRIS*, 22 Agustus 2006.
56. James D. Besser dan Larry Cohler-Esses, "Iran-Israel Linkage by Bush Seen as a Threat," *The Jewish Week*, 21 April 2006.

57. Wawancara dengan Zarif, 1 April 2004.
58. Anne Barnard, "Iranians Debate Parameters for a Global Role," *Boston Globe*, 5 September 2006.
59. Joschka Fischer, "The Case for Bargaining with Iran," *Washington Post*, 29 Mei 2006.
60. Shlomo Ben-Ami, "The Basis for Iran's Belligerence," *Haaretz*, 7 September 2006.
61. Wawancara dengan Brom, 26 Oktober 2004.
62. Wawancara dengan Shmuel Limone, Kementerian Pertahanan, sekretaris komite Israel untuk Iran, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
63. Wawancara dengan Shmuel Bar, Tel Aviv, 18 Oktober 2004.
64. Wawancara dengan Gilad, 31 Oktober 2004.
65. Wawancara dengan Sneh, 31 Oktober 2004. "Kami tidak punya pilihan lain kecuali menjadi pihak paling unggul di lingkungan terdekat kita, karena jika kita tidak melakukannya, kami akan hancur. Mereka tidak akan menunggu," Yaari berkomentar. Wawancara dengan Yaari, 24 Oktober 2004. "Ada satu persepsi di Israel bahwa lebih baik jadi orang selalu gelisah, dan tidak dipercaya. Karena kapanpun Anda melepaskan leher Anda atau melangkah maju sama sekali, mudah sekali untuk terbukti salah, Anda membahayakan keamanan banga," Pollack noted. Wawancara dengan Kenneth Pollack, Washington, D.C., 29 November 2004.
66. Wawancara dengan Limone, 18 Oktober 2004.
67. Wawancara dengan Feldman, 27 Oktober 2004.
68. Wawancara dengan Limone, 18 Oktober 2004.
69. David Ivry, "War Against Terror, Dilemmas of Values and Legality," *The Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies*, April 2004, 2.
70. "Israel's Strategic Future—The Final Report of Project Daniel," *A Journal of Politics and the Arts* 3 (2004).
71. Wawancara dengan Bar, 18 Oktober 2004.

APPENDIKS A: PROPOSAL NEGOSIASI IRAN KEPADA AMERIKA SERIKAT, MEI 2003

Otoritas Iran telah mengirimkan proposal negosiasi kepada Amerika Serikat melalui Swiss pada Mei 2003.

Tujuan-tujuan Iran:
(Amerika Serikat menerima sebuah dialog **"saling menghormati"** dan menyetujui tujuan-tujuan Iran berikut ini)

- **Menghentikan sikap permusuhan Amerika Serikat dan memperbaiki status Iran di Amerika Serikat**: (campur tangan terhadap hubungan dalam dan luar negeri, "poros kejahatan", daftar terorisme.)
- **Menghapuskan semua sanksi:** sanksi perdagangan, pembekuan aset, pertimbangan-pertimbangan (FSIA, *Foreign Sovereign Immunities Act*), hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional dan lembaga keuangan.
- **Irak:** pemerintahan yang demokratis dan representatif di Irak, mendukung klaim Iran atas pemulihan situasi di Irak, menghomrati kepentingan nasional Iran di Irak dan hubungan keagamaan di Najaf/Karbala.
- **Akses penuh terhadap teknologi nuklir, bioteknologi, dan teknologi kimia untuk perdamaian.**
- Mengakui **kepentingan keamanan Iran yang sah** di regional sesuai dengan kapasitas pertahanan.
- **Terorisme:** menangkap kelompok teroris anti-Iran, terutama MKO dan mendukung proses pengembalian anggota-anggota mereka di Iran, tindakan tegas terhadap kelompok teroris anti-Iran, terutama MKO dan yang organisasi-organisasi terkait di Amerika Serikat

Tujuan-tujuan AS:
(Iran menerima sebuah dialog **"saling menghormati"** dan menyetujui tujuan-tujuan Amerika Serikat berikut ini)

- **Senjata Pemusnah Massal:** transparansi penuh demi keamanan bahwa Iran tidak berupaya untuk mengembangkan atau memiliki senjata pemusnah massal (WMD, *weapons mass destruction*), kerja sama penuh dengan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) berdasarkan adopsi Iran terhadap semua instrumen yang relevan (Ketentuan 93+2 dan seluruh ketentuan IAEA)
- **Terorisme:** tindakan tegas terhadap kelompok teroris manapun (terutama Al Qaeda) di wilayah Iran, kerja sama penuh dan pertukaran seluruh informasi yang relevan
- **Irak:** koordinasi atas pengaruh Iran terhadap kegiatan yang mendukung stabilisasi politik dan pembentukan institusi-institusi demokratis dan pemerintahan non-religius
- **Timur Tengah:**
    1) Menghentikan dukungan apapun terhadap kelompok oposisi di Palestina (Hamas, Jihad, dan lain-lain) dari wilayah Iran, menekan kelompok-kelompok ini untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil dalam wilayah perbatasan sesuai dengan perjanjian 1967.

2) Tindakan terhadap Hezbollah agar menjadi organisasi politik sahan di Lebanon
3) Menerima deklarasi Liga Arab di Beirut (inisiatif Arab Saudi, pendekatan dua-negara)

Tahapan-tahapan:

I. komunikasi terkait **kesepakatan bersama mengenai prosedur berikut ini**

II. **pernyataan bersama** "Kami selalu siap untuk pembicaraan-pembicaraan langsung dan otoritatif dengan Amerika Serikat/dengan Iran dengan itikad baik dan dengan tujuan untuk mendiskusikan—secara saling menghormati—kepentingan bersama kami dan perhatian bersama kami berdasarkan azas kepantasan dan realitas-realitas objektif, tetap kami selalu menjelaskan bahwa, pembicaraan seperti ini hanya bisa dilakukan, jika kemajuan atas solusi bagi perhatian kami dapat dicapai.

III. **pertemuan langsung yang pertama** pada level yang sesuai (misalnya di Paris) akan diselenggarakan **dengan tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya**

a. **keputusan-keputusan mengenai langkah bersama yang pertama**
   - **Irak:** pembentukan sebuah kelompok bersama, dukungan aktif Iran untuk stabilisasi Irak, komitmen Amerika Serikat untuk mendukung secara aktif klaim pemulihan yang dilakukan Iran dalam diskusi terkait hutang luar negeri Irak.
   - **Terorisme:** komitmen Amerika Serikat untuk melucuti senjata dan mengusir MKO dari Irak dan mengambil langkah yang sesuai dengan SCR 1373 (*Security Council Resolutions* 1373) / Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1373 berkaitan dengan kepemimpinannya, komitmen Irak untuk meningkatkan tindakan terhadap anggota al Qaeda di Irak, kesepakatan atas kerjasama dan pertukaran informasi
   - pernyataan jenderal Iran "untuk mendukung solusi damai di **Timur Tengah** termasuk pihak-pihak terkait"
   - pernyataan jenderal Amerika Serikat bahwa "Iran tidak menjadi bagian 'poros kejahatan'"
   - penerimaan Amerika Serikat untuk menghentikan sikap resistennya terhadap Iran dalam lembaga keuangan internasional dan lembaga-lembaga perdagangan.

b. **pembentukan tigas kelompok kerja pararel** mengenai proses pelucutan senjata, kemanan regional dan kerjasama ekonomi. **Tujuannya adala sebuah kesepakatan mengenai tiga peta jalan pararel,** berkaitan dengan diskusi dari kelompok kerja ini, setiap pihak menerima bahwa tujuan pihak lain (lihat ke atas) ada dalam agenda pembicaraan:
   1) **Pelucutan senjata**: peta jalan (*road map*), yang menggabungkan tujuan bersama, pada satu sisi, transparansi penuh oleh komitmen internasional dan jaminan untuk menjauhkan diri dari senjata pemusnah massal dengan, di sisi lain, akses penuh terhadap teknologi barat (di tiga wilayah).
   2) **Terorisme dan keamanan regional:** peta jalan untuk tujuan yang disebutkan di atas mengenai Timur Tengah dan terorisme

3) **Kerjasama ekomoni:** peta jalan untuk mengakhiri sanksi, pembatalan vonis, dan pencairan aset.

c. Kesepakatan mengenai jadwal implementasi
d. dan **sebuah pernyataan terbuka setelah pertemuan pertama ini mengenai kesepakatan yang telah dicapai**

APPENDIKS B: VERSI AWAL PROPOSAL NEGOSIASI AMERIKA SERIKAT

Menurut versi Iran, Teheran tidak mengusulkan sebuah proposal tetapi yang dilakukan Iran adalah merespon proposal dari Amerika. Dalam respon Iran ini, beberapa perubahan yang dilakukan hanya yang berkaitan dengan penjelasan mengenai tujuan-tujuan Iran dalam negosiasi ini, sementara tujuan-tujuan Amerika Serikat tidak dirubah sama sekali. Draft awal dari Amerika Serikat adalah sebagai berikut.

Tujuan-tujuan Iran:
(Amerika Serikat menerima sebuah dialoh **"saling menghormati"** dan sepakat bahwa Iran memiliki tujuan-tujuan berikut ini dalam agenda)

- **Amerika Serikat menahan diri untuk mendukung perubahan sistem politik dengan campur tangan langsung dari luar**
- **Menghapuskan semua sanksi:** sanksi komersial, pembekuan aset, penolakan akses terhadap WTO (*World Trade Organization,* Organisasi Perdagangan Dunia)
- **Irak:** penangkapan MKO, mendukung pengembalian anggota-MKO, mendukung klaim Iran terhadap pemulihan Irak, tidak ada invasi Tukri di Utara Irak, menghormati kepentingan nasional Iran dan hubungan keagamaan dengan Najaf/Karbala
- **Akses terhadap teknolog nuklir, bioteknologi, dan teknologi kimia untuk perdamaian**
- Mengakui **kepentingan keamanan Iran yang sah** di regional sesuai dengan kapasitas pertahanan
- **Terorisme:** tindakan terhadap MKO dan organisasi terkait di Amerika Serikat

Tujuan-tujuan AS:
(Iran sepakat bahwa Amerika Serikat memiliki tujuan-tujuan berikut ini dalam agenda)

- **Senjata pemusnah massal:** transparansi penuh demi kepentingan keamanan bahwa tidak ada usaha dari Iran untuk mengembangkan atau memiliki senjata pemusnah massal, kerja sama penuh dengan IAEA berdasarkan adopsi Iran terhadap seluruh instumen yang relevan (Ketentuan 93+2 dan seluruh protokol IAEA)
- **Terorisme:** tindakan tegas terhadap kelompok teroris manapun (terutama Al Qaeda) di wilayah Iran, kerja sama penuh dan pertukaran seluruh informasi yang relevan
- **Irak:** koordinasi atas pengaruh Iran terhadap aktifitas yang mendukung stabilisasi politik dan pembentukan institusi-institusi demokratis dan pemerintahan non-religius
- **Timur Tengah:**
    1) menghentikan setiap dukungan terhadap kelompok oposisi Palestina (Hamas, Jihad, dan lain-lain) dari wilayah Iran, menekah organisasi-organisai ini untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil dalam perbatasa berdasarkan perjanjian 1967.
    2) tindakan terhadap Hezbollah agar menjadi organisasi politik murni di Lebanon
    3) menerima deklarasi Liga Arab di Beirut (inisiatif Arab Saudi, pendekatan dua-negara)

Tahapan-tahapan:

I. komunikasi terkait **kesepakatan bersama mengenai prosedur berikut ini**

II. **pernyataan bersama** "kami selalu siap untuk sebuah pembicaraan langsung dan otoritatif dengan AS/Iran dengan tujuan untuk mendiskusikan—dengan cara saling menghormati—kepentingan bersama dan perhatian bersama kami, tetapi kami selalu menjelaskan bahwa, pembicaraan seperti itu hanya bisa dilakukan, jika kemajuan bagi solusi perhatian bersama kami dapat dicapai."

III. **sebuah pertemuan langsung yang pertama** pada level yang sesuai (misalnya di Paris) akan diselenggarakan **dengan tujuan-tujuan yang sudah disepakati sebelumnya**

a. **keputusan-keputusan mengenai langkah bersama yang pertama**

- **Irak:** pembentukan sebuah kelompok bersama, dukungan aktif Iran untuk stabilisasi Irak, komitmen Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah MKO di Irak, komitmen AS untuk memasukkan klaim pemulihan Iran ke dalam diskusi terkait hutang luar negeri Irak.
- **Terorisme:** komitmen Iran untuk meningkatkan tindakan terhadap anggota al Qaeda di Iran, kesepakatan atas kerja sama dan pertukaran informasi
- pernyataan jenderal Iran "untuk mendukung solusi damai di **Timur Tengah** termasuk pihak-pihak terkait"
- penerimaan Amerika Serikat terhadap akses Iran pada negosiasi keanggotaan WTO.

b. **pembentukan tiga kelompok kerja pararel** terkait pelucutan senjata, kerjasama ekonomi dan keamanan. Tujuan mereka adalah sebuah kesepakatan mengenai tiga peta jalan pararel ini, berkaitan dengan pembicaraan tiga kelompok kerja ini, setiap pihak menerima tujuan pihak lain (lihat di atas) ada dalam agenda pembicaraan:

1) **Pelucutan senjatan:** peta jalan, yang menggabungkan tujuan bersama, di satu sisi, transparansi penuh dengan komitmen internasional dan jaminan untuk tidak mengembangkan senjata pemusnah massal dengan, di sisi lain, akses terhadap teknologi barat (dalam tiag area)
2) Terorisme dan keamanan regional: peta jalan untuk tujuan-tujuan yang disebutkan di atas mengenai Timur Tengah dan terorisme
3) Kerja sama ekonomi: peta jalan bagi penghapusan sanksi dan solusi bagi pembekuan aset.

c. dan **sebuah pernyataan terbuka setelah pertemuan pertama ini mengenai kesepakatan yang telah dicapai**

APPENDIKS C: SURAT DARI DUTA BESAR GULDIMANN KEPADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI AS

Berikut ini adalah surat dari Tim Guldimann, duta besar Swiss untuk Iran, kepada Departemen Luar Negeri AS, tertanggal 4 Mei 2003, yang menjelaskan latar belakang dan keotentikan proposal penawaran Iran.

1. Pada **21 April, Saya melakukan diskusi panjang dengan Sadeq Kharrazi** yang mendatangiku (S.Kh. adalah Duta Besar Iran di Paris, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, dan keponakan Menteri Luar Negeri, saudarinya menikah dengan anak dari Pemimpin Agama Khamenei). **Selama diskusi ini berlangsung, draft pertama dari peta jalan sudah dikembangkan**. Dia mengatakan bahwa dia akan mendiskusikan peta jalan ini dengan Pemimpin dan Menteri Luar Negeri.
2. Pada **2 Mei, saya bertemu kembali dengannya selama tiga jam. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah melakukan dua kali pembicaraan panjang dengan Pemimpin mengenai peta jalan ini.** Dalam pertemuan ini, yang keduanya berlangsung selama hampir dua jam, hanya Presiden Khatami dan Menteri Luar Negeri Kharrazi yang hadir; "kami memeriksa setiap kata dari dokumen ini". (Dia juga melakukan rangkaian pertemuan terpisah dengan kedua orang ini).—Pertanyaan memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi sehingga tidak ada pihak lain yang diberitahu, (S.Kh. sendiri sangat berhati-hati dalam komunikasi terakhir kami).—S.kh. menyampaikan dokumen ini kepada Pemimpin sebagai sebuah proposal, **yang sudah dia diskusikan dengan seorang teman di Eropa yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri AS.** Pemimpin secara eksplisit bertanya kepada S.Kh. apakah dokumen ini merupakan proposal dari AS dan S.Kh. membantah hal ini, dengan mengatakan bahwa, jika dokumen ini diterima, teman ini bisa membawanya ke Washington sebagai dasar pembukaan pembicaraan bilateral.
3. Lalu S.Kh. memberitahu saya bahwa sang Pemimpin menyampaikan beberapa **keberatan** dalam beberapa hal; Presiden dan Menteri Luar Negeri sangat positif, tidak ada masalah dari pihak mereka. Lalu S.Kh. menyampaikan "Mereka (maksudnya seluruh pemimpin di atas) sepakat atas 85% hingga 90% dari isi dokumen tersebut. Tetapi segala sesuatunya bisa dinegosiasikan." (Dengan kata "sepakat" dia bermaksud untuk sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang mereka maksudkan sebagai "Tujuan-tujuan AS" dalam Peta jalan, dan bukan hanya menyepakati bahwa AS menempatkan poin-poin ini dalam agenda)—"Ada kepentingan yang jelas untuk mengatasi masalah hubungan kita dengan AS. Saya sampaikan kepada mereka, ini merupakan kesempatan emas, suatu hari kita harus menemukan solusinya".—Lalu S.Kh. bertanya kepada saya apakah saya bisa menyampaikan dokumen ini secara sangat percaya diri kepada seseorang yang sangat tinggi posisinya di Departemen Luar Negeri AS untuk mendapatkan respon AS terhadap dokumen proposal ini.—Dia meminta kepada saya untuk membuat beberapa perubahan kecil dalam draft dari pertemuan kita sebelumnya, kami menulis-ulang misalnya pernyataan Iran mengenai Timur tengah, dan dia sampaikan bahwa dia berpikir, bahwa pernyataan ini akan bisa diterima—"proses perdamaian adalah kenyataan".

4. Lalu dia berkata:"Jika Amerika sepakat untuk melakukan sebuah **pertemua bilateral rahasia mengenai dasar dari *road map* ini, maka pertemuan ini akan dirancang sesegera mungkin. Dalam pertemuan ini beberapa keberatan kami harus didiskusikan begitu juga dengan AS akan membawa keberatan-keberatan mereka dalam dokumen ini.** Saya yakin bahwa perbedaan-perbedaan ini bisa dihapuskan. Jika kita bisa sepakat mengenai sebuah *Road map* untuk mengklarifikasi prosedur, sebagai sebuah tahap lanjutan, hal ini harus diputuskan dalam pertemuan pertama bahwa dua Menteri Luar Negeri dapat bertemua untuk memulai prosesnya" sepanjang ketentuan *Road map* "untuk memutuskan tentang bagaimana menyelesaikan segala sesuatu dari A sampai Z".—Ketika ditanya apakah pertemuan antara dua Menteri Luar Negeri sudah disetujui oleh Pemimpin, dia menjawab "Lihatlah, jika kita sepakat dengan prosedur ini, saya percaya dengan jujur bahwa jawabannya adalah YA mengenai pertemua dua menteri luar negeri di Paris atau Jenewa, ada kesempatan segera."—Ketika ditanya siapa yang menurutnya akan ikut dalam pertemuan pertama, dia menyebutkan Armitage, mengacu pada situasi membaikk dari demokrasi Iran terbaru.—Saya sampaikan padanya bahwa menurut saya hal ini tidak mungkin, tetapi lalu dia menyebutkan bahwa sebuah pertemuan hari ini antara Khalilzad dan Zarif (Duta Besar Iran untuk PBB) di Jenewa tentang terorisme dan mengatakan bahwa pertemuan ini bisa menjadi level yang sama di Departemen Luar Negeri AS dan di sisi mereka mungkin saja dia tau Zarif atau keduanya.
5. Ketika saya berusaha untuk mendapatkan jawaban darinya tenang apa yang disetujui secara eksplisit oleh Pemimpin, **dia mengatakan bahwa ketidakpercayaan di AS membuat mereka perlu melanjutkan secara sangat hati-hati dan rahasia.** Setelah mendiskusikan masalah ini dengan hanya saya memahami bahwa mereka ingin memastikan bahwa jika langkah ini gagal, dan jika segala hal mengenai fleksibiltas Iran yang tercantum dalam proposal ini diketahui, mereka tidak akan—juga atas pertimbangan internal— terikat padanya.—Meskipun, saya mendapatkan **kesan yang jelas bahwa ada sebuah keinginan kuat dari rezim untuk menyelesaikan masalah dengan AS sekarang dan mencobanya dengan langkah ini.**